PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3[illegible] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pnenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah, dengan daftar Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Wajib :

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektor Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Perangkat Daerah lainnya.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

JL. BASUKI RAHMAT NO. 5 AMUNTAI

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3[illegible] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pnenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah, dengan daftar Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Wajib :

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektor Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Perangkat Daerah lainnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

1	Halaman Depan	i
2	Daftar Isi	ii
3	Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 20223 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	27
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	29
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	40
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	41
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	41
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja	43
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	45
4.1	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	45
4.2	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
4.3	Kesesuaian Antara Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD	62
4.4	Alokasi Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatam yang mengakomodir Pengarustamaan Gender (PUG)	63
BAB V	PENUTUP	64
	LAMPIRAN	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian Alokasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023	9
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara	11
2.3	Capaian kinerja Program yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023	16
2.4	Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023	17
2.5	Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023	18
2.6	Capaian kinerja pada Sub Kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023	18
2.7	Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023	19
2.8	Capaian kinerja Sub Kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023	20
2.9	Capaian kinerja Sub Kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Tahun 2023	21
2.10	Capaian kinerja Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023	22
2.11	Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	26
2.1.2	Pencapaian kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (T-C.30)	28
2.13	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inpspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (T-C.31)	33
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026	44

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Tabel T-C.33)..... 55

4.2 Anggaran Responsif Gender (ARG) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Tahun 2025..... 63

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 serta berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merumuskan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui:
   a. Pengolahan data dan informasi.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah.
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
d. Isu-isu penting penyelanggaaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
f. Perumusan tujuan dan sasaran.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
h. Perumusan kegiatan prioritas.
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
j. Pembahasan forum perangkat daerah.
k. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Renja Inspektorat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – Perangkat Daerah), dimana merupakan bagian dari penyusunan RAPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas persetujuan bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara eksternal merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang oleh dijabarkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Reformasi Birokrasi dan PAN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lebih lanjut memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 secara berjenjang, kemudian secara internal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2025 maupun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023–2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21).

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024, Tambahan Berita Daerah Nomor 10);
29. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/318/KUM/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar dapat menjadi acuan terhadap serangkaian pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025, disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Menguraikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Inpektorat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menyajikan Telahaan terhadaap Kebjakan Nasional dan Provinsi, dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dalam Bab ini disajikan Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangaan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Kesesuaian antara Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta tugas–tugas lainnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun Anggaran 2023 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dukungan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari dana APBD Kabupaten untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 21.087.138.776,- yang terdiri dari belanja operasi Rp.19.830.285.520,- dan belanja modal Rp.1.256.853.256,-. Berikut rincian alokasi belanja pada tahun anggaran 2023:

Tabel 2.1. Rincian Alokasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1.	**Belanja Operasi**	**16.425.266.300**	**19.830.285.520**	**3.405.019.220**	**20,73**
	Belanja Pegawai	8.871.360.000	9.236.969.925	365.609.925	4,12
	Belanja Barang dan Jasa	7.553.906.300	10.593.315.595	3.039.409.295	40,24
2.	**Belanja Modal**	**446.482.500**	**1.256.853.256**	**810.370.756**	**181,50**
	Belanja modal peralatan dan mesin	446.482.500	1.256.853.256	810.370.756	181,50
Total Belanja		**16.871.748.800**	**21.087.138.776**	**4.215.389.976**	**24,98**

Dari tabel di atas terlihat, pengalokasian dana sebelum perubahan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Belanja Operasi terdiri atas

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 97,35 % dari total belanja, sedangkan untuk Belanja Modal yaitu Belanja modal peralatan dan mesin 2,65 % dari total belanja.

Pada saat terjadi perubahan anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk belanja operasi terjadi peningkatan sebesar Rp.3.405.019.220,- (20,73%), sedangkan pada belanja modal mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 810.370.756,- 181,50%. Realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 dari Pagu sebesar Rp. 21.087.138.776,- dapat terealisasi Rp. 12.998.034.520,- atau 61,64%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Realisasi Renstra Inspektorat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**									
6.01.01	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah**	**84,25**		**82,75**	**83,22**	**100,57**	**83,15**	**83,22**	**98,78**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (dokumen)**	**60**		**15**	**15**	**100,00**	**15**	**15,00**	**25,00**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	36		9	9	100,00	9	**9,00**	**25,00**
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24		6	6	100,00	6	**6,00**	**25,00**
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	400		100	100	100,00	100	**100,00**	**25,00**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	180		51	40	78,43	45	**40,00**	**22,22**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	188		47	36	76,60	47	**36,00**	**19,15**
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang Diselesaikan (%)**	400		100	100	100,00	100	**100,00**	**25,00**
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	28		7	4	57,14	7	**4,00**	**14,29**
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	86		80	100	125,00	84	**100,00**	**116,28**
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		6	6	100,00	4	**6,00**	**37,50**
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	180		51	45	88,24	45	**45,00**	**25,00**
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana penunjang kegiatan (%)**	400		100	100	100,00	100	**100,00**	**25,00**
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	264		66	70	106,06	66	**70,00**	**26,52**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	344		95	109	114,74	86	**109,00**	**31,69**
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	400		100	100	100,00	100	**100,00**	**25,00**
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	288		72	72	100,00	72	**72,00**	**25,00**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	192		48	48	100,00	48	**48,00**	**25,00**
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	144		36	36	100,00	36	**36,00**	**25,00**
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	400		**100**	100	100,00	**100**	**100,00**	**25,00**
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	192		48	40	83,33	48	**40,00**	**20,83**
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4		1	1	100,00	1	**1,00**	**25,00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	100		25	32	128,00	25	**32,00**	**32,00**
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)**	**78**		**70**	**92,53**	**132,19**	**75**	**92,53**	**118,63**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**85**		**80**	**80**	**100,00**	**85**	**80,00**	**94,12**
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16		4	3	75,00	4	**3,00**	**18,75**
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	36		9	10	111,11	9	**10,00**	**27,78**
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	16		4	4	100,00	4	**4,00**	**25,00**
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	104		26	34	130,77	26	**34,00**	**32,69**
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	64		16	2	12,50	16	**2,00**	**3,13**
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	8		2	2	100,00	2	**2,00**	**25,00**
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	108		27	38	140,74	27	**38,00**	**35,19**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**400**		**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**25,00**
6.01.02.2.02.0001	Penanangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	48		12	6	50,00	12	**6,00**	**12,50**
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	40		10	7	70,00	10	**7,00**	**17,50**
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP (%)**	**80**		**60**	**55,88**	**93,13**	**70**	**55,88**	**69,85**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	400		100	100	100,00	100	**100,00**	**25,00**
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	8		2	2	100,00	2	**2,00**	**25,00**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**400**		**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**25,00**
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	44		11	14	127,27	11	**14,00**	**31,82**
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	40		10	2	20,00	10	**2,00**	**5,00**
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	20		5	5	100,00	5	**5,00**	**25,00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tiga program yang diampu Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target sebesar 60%, sedangkan realisasi sebesar (55,88%).

Indikator kinerja Program ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP. Adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Capaian kinerja Program yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Keluaran	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP (%)	60	55,88	93,13

Ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Tabel 2.4. Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangaan ASN (Orang/Bulan)	51	40	78,43
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	47	36	76,60
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	4	57,14
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51	45	88,24
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	40	83,33

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui:

1. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:

   a) Pengawasan Kinerja Pemerintah; b) Pengawasan Desa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Dengan sub kegiatan: a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Adapun target dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5. Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	3	75,00
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16	2	12,50
Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	12	6	50,00
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	7	70,00

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Adapun target dan capaian kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Capaian kinerja pada Sub Kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	2	20,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Beberapa sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluarah yang direncanakan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, dengan sub kegiatan: a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik; c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja program ini adalah Nilai LAKIP Inspektorat Daerah. Adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	9	100,00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	100,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	100,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	72	100,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	100,00
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100,00

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan: a) Reviu Laporan Kinerja; b) Kerjasama Pengawasan Internal

Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pembinaan dan Pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes. Adapun target dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. Capaian kinerja Sub Kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	4	100,00
Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	2	100,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah 1) Persentase pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan; 2) Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi. Adapun target dan capaian kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Capaian kinerja Sub Kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Tahun 2023

Indikator Kinerja Hasil	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	2	100,00
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korups	5	5	100,00

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dari tiga program yang diampu Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) rogram yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan, yaitu Program Penunjang Urusan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun target dan capaian kinerja Program dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.10. Capaian kinerja Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja Keluaran	Target	Realisasi	Persentase
Nilai LAKIP Inspektorat Daerah	82,75	83,22	100,57
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	70	92,53	132,19

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah:

1) Keterbatasan jumlah SDM Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, karena berdasarkan hasil analisis beban kerja di Tahun 2023, masih terdapat kekurangan Aparatur dilingkungan Inspektorat Daerah, dimana total kebutuhan kekurangan APIP sebanyak 56 Orang, khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD;
2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas dan operasional pengawasan secara keseluruhan, terutama sarana mobilitas darat berupa mobil operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.
3) Masih ada capaian kinerja pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang belum optimal berupa pengawasan desa, pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah, serta sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

B. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan dalam mendorong dan merealisasikan pencapaian target kinerja;
2) Efektifnya pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala;
3) Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP telah dilaksanakan, baik berupa Workshop, Bimbingan Teknis maupun Pendidikan dan Pelatihan APIP.
4) Atas capaian kinerja Tingkat maturitas SPIP Terintegrasi, dari hasil Penilaian BPKP atas Maturitas SPIP SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023, SPIP SKPD telah melaksanakan pemenuhan unsur SPIP dan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dengan hasil penilaian akhir 3,260 atau sudah berada pada level 3, dimana terjadi peningkatan skor SPIP-Terintegrasi sebesar 0,229 dari tahun 2022 (3,031).
5) Tercapainya kinerja persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan merupakan terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pada tiap-tiap Inspektur Pembantu Wilayah sesuai target, walaupun adanya perubahan fokus maupun lokus obrik pengawasan.

C. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama dari segi kualitas APIP;
2) Etos kerja yang tinggi SDM pengawasan untuk tetap berkinerja;
3) Adanya keselarasan antara Dokumen perencanaan RPD, Renstra maupun Renja serta Indikator Kinerja SKPD;
4) Adanya koordinasi intensif dan komunikasi yang baik antara Inspektorat Daerah dengan auditan, sehingga ada komitmen OPD untu menyelesaikan target tindak lanjut dengan Berita Acara Kesepakatan hasil audit/penegasan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang masih direncanakan pada Renja Tahun 2025 ini perlu menjadi prioritas peningkatan kinerja dan pendanaan guna menunjang mengoptimalkan pencapaian target.

Sedangkan terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target dan melebihi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetap dipertahankan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

a. Pemenuhan sumberdaya manusia Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
c. Peningkatan kompetensi aparatur pengawas intern pemerintah;
d. Penataan kebijakan sistem pengawasan berbasis risiko;
e. Melakukan pemantauan dan supervisi (pendampingan) kepada obrik khususnya terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan BPK RI maupun APIP;
f. Meningkatkan SPIP-Terintegrasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) baik oleh OPD maupun APIP;
g. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, baik dari perencanaan penugasan sampai tahap pelaporan pemeriksaan.

Secara umum pelaksanaan program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari Rata-rata capaian

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

kinerja program sebesar 100% atau kategori tinggi, sedangkan capaian realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 dari Pagu sebesar Rp. 21.087.138.776,- dapat terealisasi Rp. 12.998.034.520,- atau 61,64%. Hal ini dikarenakan ada penambahan anggaran pada saat APBD-Perubahan, sehingga terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2.1.7 Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilengkapi Gender Budget Statement (GBS) terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.296.675.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.647.551.312,-. Adapun target dan capaian dapat dilihat pada tabel 2.11.

Berdasarkan tabel 2.11 dapat dilihat bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan GBS berdasarkan keuangan hanya terealisasi sebesar 49,99%. Hal ini karena adanya penambahan anggaran pada saat APBD Perubahan, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.11 Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.852.475.000	2.226.591.312	45,89	80	75,3	94,125
1.1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.852.475.000	2.226.591.312	45,89	80	75,3	94,125
1.1.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	221.455.000	91.182.897	41,17	6	6	100
1.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.631.020.000	2.135.408.415	46,11	51	45	88,24
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	444.200.000	420.960.000	94,77	100	115,39	115,39
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	444.200.000	420.960.000	94,77	100	115,39	115,39
2.1.1	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	66.900.000	59.735.000	89,29	4	4	100,00
2.1.2	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	377.300.000	361.225.000	95,74	26	34	130,77
	JUMLAH	**5.296.675.000**	**2.647.551.312**	**49,99**			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan indikator yang telah ditetap dalam Renstra Tahun 2023-2026. berdasarkan target kinerja tahun 2023 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Berdasarkan tabel Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 dari 6 (enam) Indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebanyak 5 (lima) realisasi capaian sudah melebihi target, walaupun ada 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIP A			45%	55%	60%	65%	51,28%		60%	65%	
2	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)			≤15	≤14	≤13	≤12	10		≤13	≤12	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai			75%	80%	82%	85%	88,50%		82%	85%	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai			60%	62%	65%	67%	96,34%		65%	67%	
5	Indeks/Level Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	
6	Indeks/Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2		Level 3	Level 3	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola kepemerintahan serta pencegahan korupsi.
2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
3) Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)-Terintegrasi,
4) Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan (auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh unit organisasi/SKPD.
5) Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD);
6) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
7) Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional PPUPD belum berimbang.
8) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF PPUPD belum berimbang.
9) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah.
10) Sarana dan sarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa mobil operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah Kebijakan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 urusan pemerintahan, yakni memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 serta Renstra Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan tema "**Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat**"

Adapun Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tujuan

   Tujuan RKPD adalah Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi

2. Sasaran

   Sasaran RKPD adalah

   1) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran:
      a) Nilai SAKIP Kabupaten;
      b) Opini BPK; dan
      c) Persentase Pencegahan Korupsi (MCP/KORSUPGAH).
   2) Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN dengan indikator sasaran adalah Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN.

3. Arah kebijakan

   Arah kebijakan RKPD Tahun 2025 adalah: Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 adalah Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif.

4. Sasaran Prioritas RKPD Tahun 2025

   Sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a) Optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Nilai SAKIP dan IKM

b) Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah.

Ada beberapa hal yang perlu diakomodir dalam Pagu indikatif pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berkaitan dengan pendanaan program dan kegiatan pengawasan yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut:

   Pemerintah kabupaten/kota:

   a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

   b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

   Selain itu untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, alokasi pagu anggaran Inspektorat Daerah juga diperlukan untuk pemenuhan Pendidikan Profesional berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis minimal 120 jam/tahun per APIP, serta peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka memfasilitasi kegiatan pengawasan.

2. Masih kurangnya SDM Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selanjutnya dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat tabel berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.13 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

(T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**HSU**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah**	**83,56**	**15.652.002.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**HSU**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah**	**83,56**	**15.652.002.000**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**HSU**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15**	**56.651.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**HSU**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15**	**56.651.000**	
	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	9	28.719.800	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	9	28.719.800	
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	27.931.200	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	27.931.200	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	**100**	**9.770.023.080**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	**100**	**9.770.023.080**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	9.757.023.080	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	9.757.023.080	
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	47	13.000.000	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	47	13.000.000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)**	**100**	**9.985.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)**	**100**	**9.985.000**	
	(Sub Kegiatan) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	7	9.985.000	(Sub Kegiatan) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	7	9.985.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	**84**	**2.853.437.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	**84**	**2.853.437.000**	
	(Sub Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	149.725.000	(Sub Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	149.725.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	2.703.712.000	(Sub Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	2.703.712.000	Adanya penambahan JF PPUPD 6 Orang dan PPPK 2 Orang, serta penambahan jam bimtek untuk pemenuhan 120 JPL/Tahun per APIP
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)**	**100**	**1.669.908.370**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)**	**100**	**1.669.908.370**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	734.210.370	(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	734.210.370	
	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86	935.698.000	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86	935.698.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	**100**	**385.203.600**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**HSU**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	**100**	**385.203.600**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72	121.759.600	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72	121.759.600	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	155.000.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	155.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	108.444.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	108.444.000	penambahan petugas security dan resepsionis, Iuran BPJS (JKK dan JKM), dll
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**HSU**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	**100**	**906.793.950**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**HSU**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	**100**	**906.793.950**	
	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	150.100.000	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	48	150.100.000	
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	717.553.950	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	717.553.950	Rehab gedung kantor pada lantai 1 untuk ruang Pengawasan Auditor dan PPUPD
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	25	39.140.000	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	25	39.140.000	
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**HSU**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)**	**75**	**5.147.416.000**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**HSU**	**Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)**	**75**	**5.147.416.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**HSU**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**85**	**4.117.595.800**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**HSU**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**85**	**4.117.595.800**	
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	111.750.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	111.750.000	
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	9	795.405.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	9	795.405.000	
	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	126.307.400	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	4	126.307.400	
	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	26	771.436.400	(Sub Kegiatan) Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	26	771.436.400	
	(Sub Kegiatan) Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16	373.352.000	(Sub Kegiatan) Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16	373.352.000	
	(Sub Kegiatan) Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	860.000.000	(Sub Kegiatan) Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	860.000.000	
	(Sub Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	27	1.079.345.000	(Sub Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	27	1.079.345.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**HSU**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**100**	**1.029.820.200**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**HSU**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**100**	**1.029.820.200**	
	(Sub Kegiatan) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12	471.260.000	(Sub Kegiatan) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12	471.260.000	
	(Sub Kegiatan) Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	558.560.200	(Sub Kegiatan) Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	558.560.200	
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP (%)**	**75**	**944.242.000**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)**	**75**	**944.242.000**	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	**100**	**15.170.000**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	**100**	**15.170.000**	
	(Sub Kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	2	15.170.000	(Sub Kegiatan) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	2	15.170.000	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**100**	**929.072.000**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**HSU**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**100**	**929.072.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Sub Kegiatan) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	11	358.320.000	(Sub Kegiatan) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	11	358.320.000	
	(Sub Kegiatan) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	10	110.900.000	(Sub Kegiatan) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	10	110.900.000	
	(Sub Kegiatan) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	459.852.000	(Sub Kegiatan) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	459.852.000	
Total Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD					**21.743.660.000**					**21.743.660.000**	

Dari tabel 2.13 review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pagu indikatif hasil Analisa kebutuhan sebesar Rp.21.743.660.000,-, Ada beberapa yang perlu difokuskan dalam anggaran renja Tahun 2025, terkait adanya kebutuhan belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pegawai Pejabat Fungsional Auditor, PPUPD daan PPPK yang baru dalam rangka pemenuhan peningkatan Pendidikan professional APIP berkelanjutan minimal 120 jam/tahun per APIP. Selain itu ada belanja modal rehab Gedung kantor untuk Ruang Pengawasan Fungsional Auditor dan PPUPD.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan Masyarakat (wasmas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk di diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus.

.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Kemendagri tahun 2020-2024, yaitu *"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"*, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, rumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yang berkesesuaian dengan peran pengawasan adalah:

1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal. (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah "KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA". Pokok-pokok visi tersebut mempunyai pemaknaan sebagai berikut:

- Makmur Sejahtera, yaitu: Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa.
- Berkelanjutan, yaitu: Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara, yaitu: Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru.

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026, yang diamanahkan dlam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu misi ke-1, Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan, Tujuan dari Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Sasaran, Sasaran dari Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
   a) Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
   b) Meningkatnya maturitas SPIP pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
   c) Terwujudnya Zona Integritas (ZI) pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pengawasan, sebagai berikut:

a. Mendorong penerapan proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.
b. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
c. Mencegah terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses kepemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
d. Mengembangkan manajemen pengawasan dan kapasitas aparatur pengawasan agar tercipta kapabilitas pengawasan dari level *initial* meningkat menjadi level 3, yang ditandai dengan kapabilitas sebagai berikut:
    1) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas suatu kegiatan;
    2) APIP mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, dengan sasaran meningkatnya kualitas hasil pengawasan, meningkatnya efektovitas pengendalian intern pemerintah dan meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah

Indikator Sasaran yang akan diraih pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori SAKIP A sebesar 60%
b. Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD yaitu ≤13 temuan
c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai sebesar 82%
d. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai sebesar 65%

2. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah, dengan indikator sasaran Indeks/Level Maturitas SPIP yaitu Level 3
3. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah, dengan Indikator sasaran adalah Indeks Level Kapabilitas APIP yaitu Level 3

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi		Nilai Komponen Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN pada Indeks Reformasi Birokrasi (Point)	9	9,3	9,6	9,9
		Persentase Pencegahan Korupsi Area Intervensi Pengawasan APIP	65,50%	70,50%	72,50%	75,50%
	1. Meningkatya Kualitas Hasil Pengawasan	Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD	≤15	≤14	≤13	≤12
		Persentase PD dengan Kategori SAKIP A	45%	55%	60%	65%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai	75%	80%	82%	85%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai	60%	62%	65%	67%
	2. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	3. 1. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Indeks Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan rencana operasional dalam penjabaran tahun ketiga dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam renja ini harus sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Menyikapi hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai institusi pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah berkomitmen untuk mengawal terlaksananya pemerintah yang baik, yaitu Terciptanya sistem pemerintah yang semakin berkualitas sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rumusan program dan kegiatan yang disusun guna mewujudkan tujuan dan sasaran RKPD yakni : tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ” dan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN ”.

Jadi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjawab permasalahan dan isu-isu strategis.

4.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Hasil (Outcome) : Tingkat Kapabilitas APIP
Indikator (Output) : Nilai LAKIP Inspektorat Daerah

Kegiatan

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sub Kegiatan

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kegiatan

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat

Hasil (Outcome) : Persentase Pemenuhan Keuangan ASN

Indikator Keluaran (Output) : Gaji dan Tunjangan yang diterima pegawai

Sub Kegiatan

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kelompok sasaran : ASN Inspektorat Daerah

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kelompok sasaran : ASN Inspektorat Daerah

Kegiatan

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan BMD yang diselesaikan

Sub Kegiatan

1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kelompok sasaran : ASN Inspektorat Daerah

Kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Teknis dan Substansi Pengawasan

Sub Kegiatan

1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Kelompok sasaran : ASN Inspektorat Daerah

1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok sasaran : ASN Inspektorat Daerah

Kegiatan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Sarana Penunjang yang disediakan

Sub Kegiatan

1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.5.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.5.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

Kegiatan

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Jasa Penunjang SKPD yang disediakan

Sub Kegiatan

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

Kegiatan

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil (Outcome) : Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Hasil (Outcome) : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

2. Pogram Penyelenggaraan Pengawasan

Hasil (Outcome) : Tingkat Maturitas SPIP

Indikator (Output) : Persentase Terselenggaranya Urusan Pengawasan

Kegiatan

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan

Sub Kegiatan

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.3 Reviu Laporan Kinerja

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.4 Reviu Laporan Keuangan

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.5 Pengawasan Desa

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pengawasan Desa
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.6 Kerja Sama Pengawasan Internal

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

Kegiatan

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang diterbitkan

Sub Kegiatan

2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani

Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Hasil (Outcome) : Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

` Indikator (Output) : Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan

3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Indikator Hasil (Outcome) : Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
Kelompok sasaran : Sekretariat Inspektorat Daerah

Kegiatan

3.2 Pendampingan dan Asistensi

Indikator Hasil (Outcome) : Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Kelompok sasaran : APIP Inspektorat Daerah

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator Hasil (Outcome) : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kelompok sasaran : APIP dan APH Kabupaten

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan Tahun Ketiga Renstra Inspektorat Daerah dengan ditunjang 3 Program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, dengan Pagu Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.21.457.060.000,-

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dituangkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara **(Tabel T-C.33)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**								
6.01.01	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai LAKIP Inspektorat Daerah (Nilai)**	**HSU**	**83,56**	**16.748.805.200**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**83,85**	**9.153.105.277**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen/laporan yang diselesaikan tepat waktu (%)**	**HSU**	**15**	**46.395.600**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**15**	**55.990.395**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	HSU	9	20.655.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		9	28.554.985
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	HSU	6	25.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6	27.435.410
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)**	**HSU**	**100**	**9.763.339.050**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**6.176.937.500**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	HSU	45	9.757.023.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH		45	6.158.937.500

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	HSU	47	6.316.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		47	18.000.000
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang Diselesaikan (%)**	**HSU**	**100**	**3.960.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**15.000.000**
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	HSU	7	3.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		7	15.000.000
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)**	**HSU**	**84**	**2.127.323.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**86**	**1.068.464.144**
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	HSU	4	70.833.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4	127.429.857
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Diklat	HSU	45	2.056.490.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		45	941.034.287

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan penunjang dan kegiatan (%)**	**HSU**	**100**	**3.106.238.950**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**1.200.610.084**
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	HSU	66	2.159.182.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH		66	879.594.664
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	HSU	86	947.056.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		86	321.015.420
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)**	**HSU**	**100**	**320.328.600**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**300.159.720**
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	HSU	72	45.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		72	111.426.840
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	HSU	48	148.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		48	116.732.880
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	HSU	36	126.453.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		36	72.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)**	**HSU**	**100**	**1.381.220.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**335.943.434**
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	HSU	48	204.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		48	100.782.924
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	HSU	1	1.145.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1	120.939.509
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	HSU	25	30.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		25	114.221.001
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)**	**HSU**	**75**	**3.837.672.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**78**	**5.574.101.140**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes (%)**	**HSU**	**85**	**3.164.026.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**85**	**3.855.687.026**
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	HSU	4	204.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4	118.589.994

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	HSU	9	371.925.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		9	366.912.666
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	HSU	4	122.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4	115.936.974
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	HSU	26	676.317.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		26	932.165.107
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	HSU	16	240.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		16	352.480.237
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	HSU	2	838.135.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2	912.638.880
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	HSU	27	709.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		27	1.056.963.168
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)**	**HSU**	**100**	**673.646.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**1.718.414.114**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.02.0001	Penanangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	HSU	12	283.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12	967.609.454
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	HSU	10	390.486.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10	750.804.660
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP (%)**	**HSU**	**75**	**870.582.800**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**80**	**1.412.290.335**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)**	**HSU**	**100**	**10.170.000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**21.832.232**
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Berkas)	HSU	2	10.170.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2	21.832.232
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)**	**HSU**	**100**	**860.412.800**	PENDAPATAN ASLI DAERAH		**100**	**1.390.458.103**
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	HSU	11	401.792.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11	610.427.701

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemeirntahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	HSU	10	78.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		10	292.150.562
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	HSU	5	380.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5	487.879.840
TOTAL PAGU INDIKATIF					**21.457.060.000**				**16.139.496.752**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.3 Kesesuaian Antara Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa pagu indikatif pada Renja Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 telah mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan pendanaan program dan kegiatan pengawasan yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Pemerintah kabupaten/kota :

a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurangkurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Lebih lanjut bahwa dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.4 Alokasi Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengarustamaan Gender (PUG)

Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk mengakomodir Pengarustamaan Gender (PUG) dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Anggaran Responsif Gender (ARG) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
				2024	2025
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.725.000	70.833.000
			2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2.703.712.000	2.056.490.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan	2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Reviu Laporan Kinerja	110.334.400	122.625.000
			2. Reviu Laporan Keuangan	771.436.400	676.317.000
JUMLAH	2	2	4	3.735.207.800	2.926.265.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 Program, 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengarustamaan Gender dengan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 3.735.207.800,- dan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.926.265.000,-

.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, merupakan tahapan tahun ketiga pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Maksud dan tujuan yang diinginkan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah : a) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025; b) sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahun 2025 semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pengawasan; c) sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2025.

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Selain itu dalam penyusunan Renja ini kami berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan sesuai Tujuan dan Sasaran RKPD.

Amuntai, Juli 2024

Inspektur Daerah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

[illegible]

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN / NAMA KOMPONEN / JENIS KOMPONEN	INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET KINERJA PENDANAAN DARI PENDAPATAN DAERAH	TARGET KINERJA PENDANAAN DARI PENDAPATAN TRANSFER	TARGET KINERJA PENDANAAN DARI PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN / PENERIMA MANFAAT	KINERJA PENDANAAN					KEBUTUHAN PENDANAAN	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA PENDANAAN APABILA
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	PENGELOLA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

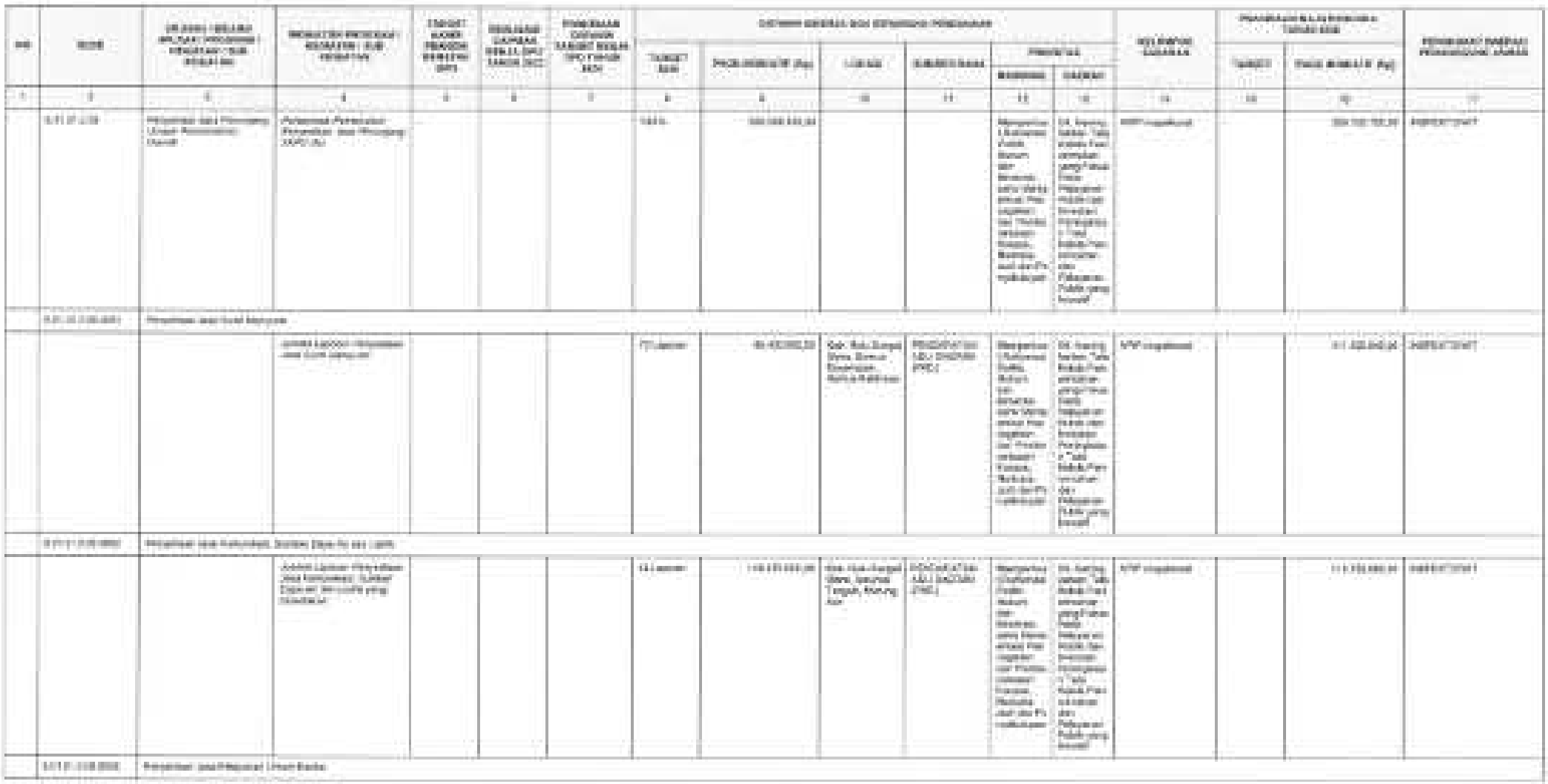
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD	PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	[illegible] (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	[illegible]			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]						[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			[illegible]				[illegible]										
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]										
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]										
[illegible]																	
			[illegible]				[illegible]										

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU [illegible]		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (PAD)	[illegible]	[illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (PAD)	[illegible]	[illegible]	APIP Inspektorat		[illegible]	INSPEKTORAT
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI CAPAIAN SEBELUM ORG TAHUN INI	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA SPD TAHUN INI	CAPAIAN HASIL DAN KELUARAN PROGRAM						KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN YANG DIPERLUKAN TAHUN INI		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RPJ	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KEBUTUHAN DANA	PRAKIRAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											MASYARAKAT	DUNIA USAHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	JUMLAH							[illegible]							[illegible]	

PEMERINTAH KABUPATEN [illegible] DAERAH
KABUPATEN [illegible] SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
[illegible] UT., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. [illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS : INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
TAHUN : 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam pengawasan	- Jumlah pejabat eselon II, III dan IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 Orang laki-laki dan 3 Orang Perempuan - Jumlah APIP yang mengikuti diklat/pelatihan teknis assessment sebanyak 4 orang	**Akses** : Dalam mengikuti pelatihan maupun diklat yang diikuti oleh aparatur Inspektorat masih mengacu pada kriteria yang netral gender yaitu terbuka bagi siapa saja yang mengikutinya sesuai dengan tupoksinya. **Partisipasi** : berkontribusi pejabat eselon perempuan dalam mengikuti diklat/pelatihan relatif rendah dibanding dengan laki-laki. **Kontrol** : waktu pelatihan yang relatif lama menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit perempuan yang berlatih	Adanya kebijakan internal yang mewajibkan untuk melakukan eksplorasi/ penggalian atas hasil diklat yang diikuti melalui "Pelatihan Kantor Sendiri/PKS"	- Lamanya diklat/ pelatihan yang dilaksanakan antara 50-120 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan diklat dan berada di luar daerah - Kurangnya dukungan dari keluarga karena terlalu lama meninggalkan rumah.	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan baik laki-laki maupun perempuan	- Melakukan pendampingan bagi narasumber pks dengan mengundang narasumber dari luar - Melakukan kegiatan diklat/pelatihan diluar kantor sendiri (PKS) - Memberikan pemahaman dan pengertian bagi aparatur perempuan dan keluarga yang bersangkutan bahwa betapa pentingnya mengikuti diklat/pelatihan	- Jumlah pejabat eselon II, III dan IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 Orang laki-laki dan 3 Orang Perempuan - Jumlah APIP yang mengikuti diklat/pelatihan untuk assessment sebanyak 4 orang	**Output** : Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat/pelatih an sebanyak 4 Orang **Outcome** : meningkatnya pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan **Dampak** : Meningkatnya Kualitas hasil Pengawasan dan Pemanfaatan bagi SKPD

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUMUMAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Manfaat : dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik perempuan dan laki-laki belum merata.						

Amuntai, Juli 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS : INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
TAHUN : 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tujuan : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan - Jumlah APIP yang mengikuti bimbingan teknis 17 orang perempuan dan 24 orang laki-laki	**Akses** : Dalam mengikuti bimbingan teknis relatif masih berpeluang untuk laki-laki dan perempuan, namun masih dominasi laki-laki. **Partisipasi** : SDM pemeriksa dan aparat pengawas perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. **Kontrol** : waktu lembur yang relatif lama menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit tenaga pengawasan perempuan tersedia.	- Tingginya risiko tugas dibidang pengawasan - Pelaksanaan pengawasan yang lebih banyak dilaksanakan diluar kantor/ lapangan - Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan khususnya terhadap isu-isu gender	- Lamanya bimbingan teknis yang dilaksanakan antara 5-10 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan bimtek dan berada diluar daerah - Pemerintah Pemangkat Daerah akan indikator kinerja, khususnya indikator program dan kegiatan responsif gender masih belum memadai	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Pengawasan baik laki-laki maupun perempuan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara melalui Bimtek	- Melakukan koordinasi dengan BKPSDM/BPKP dalam rangka pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur - Memberikan kesempatan yang sama bagi SDM Aparatur Pengawasan baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kompetensinya pada Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengawasan.	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 17 orang perempuan - Jumlah APIP perempuan yang mengikuti bimtek 17 orang Perempuan dan 24 laki-laki	**Output** : terlaksananya bimtek bagi tenaga aparatur pengawasan sebanyak 41 Orang **Outcome** : meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengawas **Dampak** : peningkatan kapasitas tenaga aparatur pengawas dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. HSU sehingga memberikan manfaat terhadap

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Manfaat : dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik perempuan dan laki-laki belum merasakan	Jumlah tenaga pemeriksa laki-laki pada tidak Kab. HSU lebih banyak dari perempuan			- Meningkatkan Bimbingan Teknis bagi SDM Aparatur Pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan - Memasukkan materi tentang Gender dan indikator responsif gender dalam pengawasan program/kegiatan bimtek di kantor		Hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHMIDAN, S.Hut., MS

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS : INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
TAHUN : 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : - Revisi Laporan Kinerja - Revisi Laporan Keuangan Tujuan : Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	- Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan - Jumlah APIP sebanyak 30 orang, 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan	Akses : - Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pengawasan - Minimnya informasi tentang Pengarusutamaan Gender bagi Pemeriksa Partisipasi : Perempuan lebih teliti, telaten, teliti dan memiliki kejelian Kontrol : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan	- Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap implementasi PPRB - Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan - Keterbatasan anggaran - Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya. - Telah terfenuhinya proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia diinstansi	- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaporkan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati atau aparat pengawas - Perubahan sistem politik kearah yang lebih demokratis dan arti HAM sangat kontroversial	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pengawas baik perempuan maupun laki-laki untuk pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD - Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan - Evaluasi SPIP pelaksanaan terintegrasi dan Pencegahan Korupsi	Peningkatan Pemeriksaan Revisi atas Dokumen LAKIP dan Laporan keuangan SKPD Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur APIP Evaluasi SPIP pelaksanaan terintegrasi dan pencegahan korupsi	- Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten - Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan. - Jumlah APIP sebanyak 30 orang, 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan	Output : Jumlah Laporan LAKIP dan Keuangan Pemerintah yang diriviu Outcome : Meningkatnya penyerapan LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik sesuai aturan Dampak : meningkatnya kualitas SDM Aparatur APIP dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA PEMBINA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pemeriksaan reviu Laklp dan laporan keuangan 39 OPD, Reviu LKPD Kabupaten dan RUA-PPAS	Manfaat : Tidak ada pengaruh terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran	dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan - Sistem pengendalian internal belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, kekurangan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini. - Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan.	berlembangnya proses pengawasan - Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas - Sosialisasi untuk para pemeriksa belum maksimal			- Pemeriksaan reviu laporan keuangan 39 OPD, Reviu LKPD Kabupaten dan RUA-PPAS	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19651024 199603 1 005

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

DINAS : **INSPEKTORAT DAERAH**
KABUPATEN : **HULU SUNGAI UTARA**
TAHUN : **2025**

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3	Output Kegiatan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi
	Output Sub Kegatan	Persentase ASN yang memenuhi sertifikat kepemimpinan dan penjenjangan
4	Analisas Situasi	- Jumlah pejabat eselon II, III dan IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 Orang laki-laki dan 3 Orang Perempuan - Jumlah APIP yang mengikuti diklat/pelatihan untuk assessment sebanyak 4 orang - Adapun faktor kesenjangan dalam mengikuti pelatihan maupun diklat yang diikuti oleh aparatur Inspektorat Daerah yaitu : • **Akses** : Dalam mengikuti pelatihan maupun diklat yang diikuti oleh aparatur Inspektorat masih mengacu pada kriteria yang netral gender yaitu terbuka bagi siapa saja yang mengikutinya sesuai dengan Tupoksinya. • **Partisipasi** : keikutsertaan aparat pengawasan perempuan dalam mengikuti diklat/pelatihan relatif rendah dibanding dengan laki-laki. • **Kontrol** : waktu pelatihan yang relati lama menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit perempuan yang terlatih • **Manfaat** : dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik perempuan dan laki-laki belum memadai. - Kesenjangan Internal : adanya kebijakan internal yang mewajibakan untuk melakukan ekspose/pemaparan atas hasil diklat yang diikuti melalui "Pelatihan Kantor Sendiri/PKS" - Kesenjangan Eksternal : - Lamanya diklat/pelatihan yang dilaksanakan antara 9-120 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan diklat dan berada di luar daerah - Kurangnya dukungan dari keluarga karena terlalu lama meninggalkan rumah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	ASPEK	URAIAN	
5	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Kegiatan : melakukan pendampingan bagi narasumber PKS dengan narasumber dari luar
			Tujuan : tersedianya narasumber yang berkualitas
		Aktivitas 2	Kegiatan : melakukan kegiatan diklat/pelatihan dilingkungan kantor sendiri (PKS).
			Tujuan : meningkatkan pengetahuan APIP
		Aktivitas 3	Kegiatan : memberikan pemahaman dan pengertian bagi aparatur perempuan dan keluarga yang bersangkutan bahwa betapa pentingnya mengikuti diklat/pelatihan
			Tujuan : meningkatkan kesadaran bagi APIP yang mengikuti Diklat
6	Alokasi Anggaran	Rp. 70.833.000,-	
7	Dampak/Hasil Output Kegiatan	Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan Dampak : Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan dan Pembinaan Bagi SKPD	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

DINAS : **INSPEKTORAT DAERAH**

KABUPATEN : **HULU SUNGAI UTARA**

TAHUN : **2025**

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3	Output Kegiatan	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi
4	Analisas Situasi	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan - Sedangkan jumlah aparatur APIP yang mengikuti bimbingan teknis 17 orang perempuan dan laki-laki sebanyak 24 orang. - Adapun faktor kesenjangan dalam mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah : • **Akses** : Dalam mengikuti bimbingan teknis baik Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan relatif masih terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun masih didominasi oleh laki-laki • **Partisipasi** : SDM pemeriksa dan aparat pengawasa perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. • **Kontrol** : Waktu Bimtek yang relatif lama menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit tenaga pengawasan perempuan terlatih. • **Manfaat** : Dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik perempuan dan laki-laki belum memadai. - Kesenjangan Internal : • Tingginya risiko tugas dibidang pengawasan • Pelaksanaan pengawasan yang lebih banyak dilaksanakan diluar kantor/lapangan • Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan khususnya terhadap isu-isu gender • Jumlah tenaga pemeriksa laki-laki pada Inspektorat Daerah banyak dari perempuan. - Kesenjangan Eksternal : - Lamanya bimbingan teknis yang dilaksanakan antara 5-13 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan bimtek dan berada di luar daerah - Pemahaman perangkat daerah akan indikator kinerja, khususnya indikator program dan kegiatan responsif gender masih belum memadai.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	ASPEK	URAIAN	
5	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Kegiatan : melakukan koordinasi dengan BPKSDM/BPKP dalam rangka pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur
			Tujuan : terlaksananya pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur
		Aktivitas 2	Kegiatan : memberikan kesempatan yang sama bagi SDM Aparatur Pengawasan baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kompetensinya pada Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengawasan
			Tujuan : SDM Aparatur perempuan yang mengikuti bimtek lebih banyak (60%)
		Aktivitas 3	Kegiatan : Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi SDM Aparatur Pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan
			Tujuan : meningkatkan SDM Kapasitas Aparatur Pengawasan
		Aktivitas 4	Memasukkan materi tentang Gender dan Indikator responsif gender dalam pengawasan program/kegiatan bimtek di kantor.
			Tujuan : Meningkatkan pengetahuan Aparatur Pengawas mengenai Isu-Isu Gender dan Indikator responsif gender.
6	Alokasi Anggaran	Rp. 2.056.490.000,-	
7	Dampak/Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya kapasitas tenaga aparatur pengawas dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga memberikan manfaat terhadap hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

DINAS : **INSPEKTORAT DAERAH**

KABUPATEN : **HULU SUNGAI UTARA**

TAHUN : **2025**

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program	Penyelenggaraan Pengawasan
2	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Sub Kegiatan	- Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan
3	Output Kegiatan	Jumlah Laporan Lakip dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direviu
4	Analisas Situasi	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan. - Sedangkan jumlah aparatur APIP sebanyak 30 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan - Adapun faktor kesenjangan dalam reviu laporan kinerja dan reviu laporan keuangan adalah : • **Akses** : Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai Tim Pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan dan minimnya informasi tentang Pengarustamaan Gender bagi Pemeriksa • **Partisipasi** : Perempuan lebih telaten, teliti dan memiliki keuletan • **Kontrol** : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan. • **Manfaat** : Tidak ada pengaruh terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. - Kesenjangan Internal : • Belum maksimalnya pemahaman pemeriksaan terhadap implementasi PPRG • Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk mefasilitasi pelaksanaan pemeriksaan • Keterbatasan anggaran. • Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya. • Telah menempatkan proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan. • Sistem pengendalian intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan hambatan serta penyimpangaan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini. • Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	ASPEK	URAIAN	
		- Kesenjangan Eksternal : Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati atau aparat Pengawas.	
			- Perubahan sistem politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan - Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak korupsi, transparansi dan akuntabilitas. - Sosialisasi untuk para pemeriksa belum maksimal
5	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Kegiatan : peningkatan pemeriksaan Reviu atas Dokumen LAKIP dan Laporan keuangan 39 OPD.
			Tujuan : meningkatnya persentase Laporan Perencanaan dan Keuangan Pemerintah yang baik sesuai aturan
		Aktivitas 2	Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur APIP
			Tujuan : meningkatnya SDM Aparatur APIP
		Aktivitas 3	Kegiatan : pelaksanaan Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi
			Tujuan : meningkatkan level SPIP dan MCP Korsupgah KPK RI
6	Alokasi Anggaran	Rp. 798.942.000,-	
7	Dampak/Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur APIP dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah.	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PAHRUDIN, S.Pd., MS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660104 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KERANGKA ACUAN KERJA

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Tahun Anggaran : 2025

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Program	Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Latar Belakang	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M-PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.
	Gambaran Umum	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 Orang laki-laki dan 3 Orang Perempuan Sedangkan jumlah aparatur APIP yang mengikuti diklat/pelatihan 4 orang . - Adapun faktor kesenjangan dalam mengikuti pelatihan maupun diklat yang diikuti oleh aparatur Inspektorat Daerah yaitu : • **Akses** : Dalam mengikuti pelatihan maupun diklat yang diikuti oleh aparatur Inspektorat masih mengacu pada kriteria yang netral gender yaitu terbuka bagi siapa saja yang mengikutinya sesuai dengan Tupoksinya. • **Partisipasi** : keikutsertaan aparat pengawasan perempuan dalam mengikuti diklat/pelatihan relatif rendah dibanding dengan laki-laki. • **Kontrol** : waktu pelatihan yang relati lama menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit perempuan yang terlatih • **Manfaat** : dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		perempuan dan laki-laki belum memadai. Kesenjangan Internal : adanya kebijakan internal yang mewajibkan untuk melakukan ekspose/pemaparan atas hasil diklat yang diikuti melalui "Pelatihan Kantor Sendiri/PKS" Kesenjangan Eksternal : - Lamanya diklat/pelatihan yang dilaksanakan antara 9-120 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan diklat dan berada di luar daerah - Kurangnya dukungan dari keluarga karena terlalu lama meninggalkan rumah.
	Alasan Kegiatan	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Diklat Pengawasan dan Pelatihan Kantor Sendiri di Lingkungan Inspektorat Daerah
	Batasan Kegiatan	Mengikuti diklat pengawasan dan pelatihan kantor sendiri dilingkungan Inspektorat Daerah.
Maksud dan Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan baik laki-laki maupun perempuan	
Indikator Keluaran	1. Persentase ASN yang memenuhi sertifikat kepemimpinan dan penjenjangan 2. Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat sebanyak 45 orang	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Memfasilitasi penyelenggaraan PKS maupun Pelatihan/Diklat baik berupa transport, uang saku maupun administrasi secara kesekurahan.	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Instansi Penyelenggara terkait
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Sekretariat Inspektorat subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jadwal	Pelaksanaan Bulan Februari- Desember 2025
Biaya	Rp. 70.833.000,-

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19691024 199603 1 005

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KERANGKA ACUAN KERJA

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran : 2025

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Program	SDM Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Latar Belakang	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana seluruh APIP harus mengikuti Bimtek/Diklat minimal 120 jam per tahun per APIP. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan pengaanggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.
	Gambaran Umum	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan - Sedangkan jumlah aparatur APIP yang mengikuti bimbingan teknis 17 orang perempuan dan laki-laki sebanyak 24 orang. - Adapun faktor kesenjangan dalam mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah : • **Akses** : Dalam mengikuti bimbinganTenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan relatif masih terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun masih didominasi oleh laki-laki. • **Partisipasi** : SDM pemeriksa dan aparat pengawasa perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. • **Kontrol** : Waktu Bimtek yang relatif lama

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		menyebabkan perempuan harus meninggalkan keluarga, sehingga lebih sedikit tenaga pengawasan perempuan terlatih. • **Manfaat** : Dukungan sarana dan prasarana untuk pengawasan baik perempuan dan laki-laki belum memadai. - Kesenjangan Internal : • Tingginya risiko tugas dibidang pengawasan • Pelaksanaan pengawasan yang lebih banyak dilaksanakan diluar kantor/lapangan • Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan khususnya terhadap isu-isu gender • Jumlah tenaga pemeriksa laki-laki pada Inspektorat Daerah banyak dari perempuan. - Kesenjangan Eksternal : - Lamanya bimbingan teknis yang dilaksanakan antara 5-13 hari kegiatan - Jauhnya tempat pelaksanaan bimtek dan berada di luar daerah - Pemahaman perangkat daerah akan indikator kinerja, khususnya indikator program dan kegiatan responsif gender masih belum memadai.
	Alasan Kegiatan	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Melakukan koordinasi dengan BKPSDM/BPKP dalam rangka pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur - Memberikan kesempatan yang sama bagi SDM Aparatur Pengawasan baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kompetensinya pada Bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengawasan. - Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi SDM Aparatur Pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan. - Memasukkan materi tentang Gender dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

		indikator responsif gender dalam pengawasan program/kegiatan bimtek di kantor.
	Batasan Kegiatan	Mengikuti Bimtek pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah.
Maksud dan Tujuan	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berwawasan gender dengan meningkatkan pengertian konsep Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi pengambil keputusan dan penyusun perencanaan serta semua SDM pengawas dalam melakukan reviu ARG.	
Indikator Keluaran	1. Persentase ASN yang memenuhi sertifikat kepemimpinan dan penjenjangan 2. Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti bimtek sebanyak 41 orang	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Memfasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi SDM Aparatur Pengawasan baik berupa transport, uang saku maupun administrasi secara keseluruhan.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Instansi Penyelenggara terkait	
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Sekretariat Inspektorat subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dan Sekretaris Inspektorat Daerah	
Jadwal	Pelaksanaan Bulan Februari - Desember 2025	
Biaya	Rp. 2.056.490.000,-	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. [illegible]024 199603 1 005

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KERANGKA ACUAN KERJA

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Program : Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan : 1. Reviu Laporan Kinerja
2. Reviu Laporan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

Program	Penyelenggaraan Pengawasan	
Sasaran Program	SDM Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 39 OPD	
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
Sub Kegiatan	1. Reviu Laporan Kinerja 2. Reviu Laporan Keuangan	
Latar Belakang	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.
	Gambaran Umum	- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 24 Orang laki-laki dan 17 Orang Perempuan. - Sedangkan jumlah aparatur APIP sebanyak 30 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. - Adapun faktor kesenjangan dalam reviu laporan kinerja dan reviu laporan keuangan adalah : • **Akses** : Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai Tim Pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan dan minimnya informasi tentang Pengarustamaan Gender bagi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Pemeriksa. • **Partisipasi** : Perempuan lebih telaten, teliti dan memiliki keuletan • **Kontrol** : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan, • **Manfaat** : Tidak ada pengaruh terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. - Kesenjangan Internal : • Belum maksimalnya pemahaman pemeriksaan terhadap implementasi PPRG • Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk mefasilitasi pelaksanaan pemeriksaan • Keterbatasan anggaran. • Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya. • Telah menempatkan proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan. • Sistem pengendalian intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan hambatan serta penyimpangaan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini. • Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan. - Kesenjangan Eksternal : - Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati atau aparat Pengawas. - Perubahan sistem politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

		- Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak korupsi, transparansi dan akuntabilitas. - Sosialisasi untuk para pemeriksa belum maksimal.
	Alasan Kegiatan	Meningkatkan SDM aparatur APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Peningkatan pemeriksaan reviu atas dokumen LAKIP dan laporan keuangan 39 OPD - Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur APIP - Pelaksanaan Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi
	Batasan Kegiatan	Aparatur APIP yang melakukan reviu laporan kinerja dan laporan keuangan
Maksud dan Tujuan	Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	
Indikator Keluaran	1. Jumlah LAKIP yang direviu 2. Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Memfasilitasi pelaksanaan reviu laporan kinerja dan reviu laporan keuangan, pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur APIP dan pelaksanaan evaluasi SPIP dan pencegahan korupsi.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 39 OPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Aparatur APIP, Irban Wilayah dan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Jadwal	Pelaksanaan Bulan Januari- Desember 2025	
Biaya	Rp. 798.942.000,-	

Amuntai, Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

FAHRUDIN, S.Hut., MS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19621024 199603 1 005

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2025



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2025

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dihaturkan ke Hadirat Allah SWT, Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini kami berharap semua rencana dapat terealisasi dengan baik dan terpadu serta mendapat dukungan dari semua pihak sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan bermanfaat bagi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. ADI ERMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701118 199101 1 002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PENGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pangan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 39

BAB V PENUTUP 52

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapain Renstra Perangkat Daerah..... 11

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan PErangkat Daerah..... 20

Tabel T-C.31. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 33

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun dan Perkiraan Maju Tahun 2026 43

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja SKPD ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Sekretariat Daerah secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien, dan sinergis dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi acuan, arahan kebijakan strategis pembangunan Sekretariat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, maka Renja Sekretariat Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk mengakomodir program/kegiatan ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025.
2. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD melalui :
    a. Pengolahan data dan informasi
    b. Analisa gambaran pelayanan SKPD
    c. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
    d. Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD
    e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
    f. Perumusan tujuan dan sasaran
    g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
    h. Perumusan kegiatan prioritas

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

j. Penyesuian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 /2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selatan Tahun 2005 – 2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2011 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 7);
35. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/318/KUM/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023 – 2026;
2. Sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025;
3. Menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun lalu (tahun 2024). Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) tahun 2023 dapat diihat dalam tabel T.C 29 berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	BAGIAN PEMERINTAHAN															
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**															
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Administrasi Tata Pemerintahan**	**400%**		**100%**	**299.480.700**	**100%**	**413.977.800**	**100%**	**299.480.700**	**100%**	**73,24%**				
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	9 Dokumen		3 Dokumen	92.252.200	3 Dokumen	173.599.400	3 Dokumen	92.252.200	100%	53,14%				
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	2 Dokumen		1 Dokumen	25.115.000	1 Dokumen	31.037.600	1 Dokumen	25.115.000	100%	80,92%				
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	12 Dokumen		4 Dokumen	182.113.500	4 Dokumen	209.340.800	4 Dokumen	182.113.500	100%	86,99%				
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**400%**		**3 Dokumen**	**22.307.500**	**100%**	**27.612.400**	**3 Dokumen**	**22.307.500**	**100%**	**80,79%**				
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	8 Dokumen		3 Dokumen	22.307.500	3 Dokumen	27.612.400	3 Dokumen	22.307.500	100%	80,79%				
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**															
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pembinaan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**400%**	**41.885.531.555**	**100%**	**9.689.188.887**	**100%**	**10.105.192.970**	**100%**	**9.689.188.887**	**100%**	**95,88%**				
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	50 Kegiatan	35.327.212.980	20 Kegiatan	8.602.772.087	22 Kegiatan	8.905.211.450	20 Kegiatan	8.602.772.087	90,91%	96,60%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*	40 Kegiatan	3.954.243.520	12 Kegiatan	556.885.200	12 Kegiatan	570.483.520	12 Kegiatan	556.885.200	100%	97,62%				
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	36 Kegiatan	2.604.075.055	9 Kegiatan	529.531.600	9 Kegiatan	629.498.000	9 Kegiatan	529.531.600	100%	84,12%				
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN															
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100%**	**2.411.978.320**	**100%**	**54.327.300**	**100%**	**59.555.000**	**100%**	**54.327.300**	**100%**	**91,22%**				
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Kali	2.411.978.320	2 Kali	54.327.300	2 Kali	59.555.000	2 Kali	54.327.300	100%	91,22%				
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-			**100%**	**2.485.205.554**	**100%**	**2.630.148.000**	**100%**	**2.485.205.554**	**100%**	94,49%				
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	1800 Kegiatan	10.829.873.500	450 kegiatan	1.531.286.630	450 Kegiatan	1.597.033.000	425 kegiatan	1.531.286.630	94,44%	95,88%				
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	1800 Naskah	6.497.924.100	450 naskah	769.165.724	450 naskah	804.179.500	432 naskah	769.165.724	96%	95,65%				
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	1800 Kegiatan	4.331.949.400	450 kegiatan	184.753.200	450 Kegiatan	228.935.500	432 kegiatan	184.753.200	96%	80,70%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM															
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**															
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan Kebijakan Perekonomian**		**2.739.431.500**	**100%**	**158.391.809**	**100%**	**241.021.500**	**100%**	**158.391.809**	**100%**	**65,72%**				
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	20 Dokumen	1.233.031.500	4 Dokumen	74.329.809	5 Dokumen	123.271.500	4 Dokumen	74.329.809	60,30%	60,30%				
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	16 laporan	1.105.400.000	3 Laporan	81.587.000	4 Laporan	105.400.000	3 Laporan	81.587.000	77,41%	77,41%				
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	8 Dokumen	401.000.000	1 Dokumen	2.475.000	2 Dokumen	12.350.000	1 Dokumen	2.475.000	50%	20,04%				
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam**		**1.130.000.000**	**100%**	**13.522.000**	**100%**	**59.260.000**	**100%**	**13.522.000**	**100%**	**22,82%**				
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	12 Dokumen	440.000.000	3 Dokumen	2.782.000	3 Dokumen	23.460.000	3 Dokumen	2.782.000	**100%**	11,86%				
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*	4 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	1.800.000	**100%**	40%				
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*	12 Dokumen	420.000.000	3 Dokumen	8.940.000	3 Dokumen	31.300.000	3 Dokumen	8.940.000	**100%**	28,56%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
	BAGIAN PEMBANGUNAN															
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**															
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**														
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*														
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*														
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*														
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**															
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa**			**100%**	**779.027.164**	**100%**	**849.746.900**	**100%**	**779.027.164**						
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	100%	1.300.000.000	100%	308.377.100	100%	313.352.000	100%	308.377.100	100%	98,41%				
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*			100%	300.444.264	100%	342.656.000	100%	300.444.264	100%	87,68%				
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*			100%	170.205.800	100%	193.738.900	100%	170.205.800	87%	87,85%				
	BAGIAN UMUM															
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**90.000.000**		**155.300.000**										
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*														
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*					40 orang	199.500.000	31 orang	155.300.000	78%	78%				
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	3.010.672.438		7.996.879.980										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*					30 Paket	161.244.000	30 Paket	146.626.000	100%	91%				
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*					12 Paket	990.153.550	12 Paket	688.019.001	100%	69%				
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*					10 Paket	114.601.600	10 Paket	79.406.700	100%	69%				
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*					10 Paket	110.457.500	10 Paket	109.754.000	100%	99%				
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*					70 Laporan	2.415.260.000	70 Laporan	1.769.704.500	100%	73%				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					350 Laporan	5.300.138.000	350 Laporan	5.203.369.779	100%	98%				
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**													
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*					22 unit	4.643.000.000	20 unit	3.310.150.000	91%	71%				
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*					10 unit	160.900.000	10 unit	137.025.000	100%	85%				
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*					40 unit	1.630.450.000	40 unit	1.579.040.000	100%	97%				
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*														
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**													
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*					12 laporan	43.478.000	12 laporan	36.500.000	100%	84%				
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*					12 laporan	1.166.498.176	12 laporan	987.985.215	100%	76%				
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*					22 unit	4.643.000.000	20 unit	3.310.150.000	91%	71%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*					10 unit	160.900.000	10 unit	137.025.000	100%	85%				
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*					40 unit	1.630.450.000	40 unit	1.579.040.000	100%	97%				
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*														
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**													
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*					12 laporan	43.478.000	12 laporan	36.500.000	100%	84%				
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*					12 laporan	1.166.498.176	12 laporan	987.985.215	100%	76%				
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*					12 laporan	221.380.800	12 laporan	168.683.200	100%	85%				
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	2.286.920.000		5.745.411.208										
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*					80 unit	1.818.688.500	80 unit	1.785.948.720	100%	98%				
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*					50 unit	310.115.000	50 unit	230.996.872	100%	74%				
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*					4 unit	4.403.960.000	4 unit	3.728.465.616	100%	85%				
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	51.000.000		913.365.514										
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*					12 paket	1.023.358.000	12 paket	913.365.514	100%	89%				
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*														
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	**100%**	**10.197.449.500**		**10.246.703.500**	**80 Orang**	**13.207.815.000**	**77%**	**10.246.703.500**	**96%**	**78%**				
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*														
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**580.847.500**		**400.000.000**										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10= (5+7+9)	11=(10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*						180.487.500			0%	0%				
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*					20 penerima	450.000.000	20%	400.000.000	100%	89%				
	BAGIAN ORGANISASI															
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Hasil Penataan Organisasi**		**1.507.267.600**	**100%**	**185.774.450**	**100%**	**376.816.900**	**100%**	**185.774.450**	**100%**					
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	8 Dokumen	856.498.000	2 Dokumen	94.781.950	2 Dokumen	214.124.500	2 Dokumen	94.781.950	**100%**	44,26%				
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	4 Dokumen	311.030.000	1 Laporan	62.942.500	1 Laporan	77.757.500	1 Laporan	62.942.500	**100%**	80,95%				
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	4 Dokumen	28.830.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	7.207.500	1 Dokumen	0	**100%**	0				
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	4 Dokumen	132.389.600	1 Dokumen	3.625.000	1 Dokumen	33.097.400	1 Dokumen	3.625.000	**100%**	10,95%				
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	12 Dokumen	178.520.000	3 Dokumen	24.425.000	3 Dokumen	44.630.000	3 Dokumen	24.425.000	**100%**	54,73%				
	BAGIAN HUKUM															
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**															
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan koordinasi Hukum**	**400%**	**3.826.639.050**	**100%**	**192.860.800**	**100%**	**315.639.050**	**100%**	**192.860.800**	**100%**	**61,10%**				
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	2500 Dokumen	1.120.040.000	625 Dokumen	16.105.000	625 Dokumen	20.040.000	625 Dokumen	16.105.000	100%	80,36%				
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	8 Kasus	1.598.374.050	2 Kasus	126.174.000	2 Kasus	237.374.050	2 Kasus	126.174.000	50%	53,15%				
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan*	2500 Dokumen	1.108.225.000	625 Dokumen	50.581.800	625 Dokumen	58.225.000	625 Dokumen	50.581.800	100%	86,87%				

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, pelaksanaan kapasitas pelayanan dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan dan koordinator penyelengaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan administratif kepada seluruh SKPD. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai pengambil kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antar Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai administratif, yakni dengan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD dilingkup pemerintah daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) bagian :
    1) Bagian Pemerintahan;
    2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3) Bagian Hukum;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) bagian :
    1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    2) Bagian Administrasi Pembangunan;
    3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) bagian :
    1) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
        a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
        b) Sub Bagian Keuangan;
        c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    2) Bagian Organisasi
    3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian :
        a) Sub Bagian Protokol;
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagai berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	
		Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2023	Th. 2024
1	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	80.50 (Nilai)	80,55 (Nilai)	80,60 (Nilai)	80,65 (Nilai)	76,60 (BB)	
2	Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1. Masih kurang dan perlu perbaikan terhadap kualitas penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Penerepan Reformasi Birokrasi masih belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal.
3. Masih terdapat keluhan serta saran dari masyarakat tentang pelayanan yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah guna perbaikan kualitas pelayanan.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
5. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Peningkatan sumber daya manusia aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
8. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
9. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan diatasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
10. Belum Optimalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semakin berkualitas, terciptanya perekonomian daerah yang semakin meningkat, meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah, terlaksananya prinsip−prinsip tata pemerintahan yang semakin baik, semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup serta meningkatnya perwujudan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan yang berkelanjutan. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 terarah pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, diberdayakannya lembaga ekonomi lokal, serta meningkatnya investasi dan permodalan. Kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 juga terintegrasi dengan kebijakan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

bidang sosial budaya serta pengembangan infrastruktur daerah yang dapat menunjang perkembangan di bidang perekonomian daerah.

Pada aspek pemerintahan yakni melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewajiban daerah guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perbaikan kinerja pemerintahan terus diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur, pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, serta terpeliharanya kerukunan hidup dalam suasana keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Prioritas dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RKPD. Adapun prioritas pembangunan pada bidang sosial budaya tahun 2025 terarah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Peningkatan Indeks Pembangunan manusia, dan Pengurangan Kemiskinan.

Prioritas dan Sasaran Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;
3. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagai berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
		SEKRETARIAT DAERAH				**16,234,831,983.00**					**16,235,481,983.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**16,234,831,983.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**16,235,481,983.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**16,234,831,983.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**16,235,481,983.00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-	-	**16,234,831,983.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-	-	**16,235,481,983.00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100 %	15,653,984,483.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	100 %	15,653,984,483.00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	192 Orang/bulan	15,653,984,483.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	192 Orang/bulan	15,653,984,483.00	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	*Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah*	100 % 100 %	580,847,500.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	*Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah*	100 %	581,497,500.00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	14 Orang/Bulan	180,847,500.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	14 Orang/Bulan	181,497,500.00	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	12 Orang/Bulan	400,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	12 Orang/Bulan	400,000,000.00	
		BAGIAN PEMERINTAHAN				**359,134,400.00**					**673,229,600.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**359,134,400.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**673,229,600.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**359,134,400.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**673,229,600.00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		-	-	**359,134,400.00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		-	-	**673,229,600.00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. HSU	-	-	340,522,000.00	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. HSU	-	-	654,617,200.00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					Penataan Administrasi Pemerintahan					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	2 Dokumen	113,559,400.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	2 Dokumen	263,555,000.00	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	1 Dokumen	19,037,600.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	1 Dokumen	19,037,600.00	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	4 Dokumen	207,925,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	4 Dokumen	372,024,600.00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. HSU	-	-	18,612,400.00	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kab. HSU	-	-	18,612,400.00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	2 Dokumen	18,612,400.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	2 Dokumen	18,612,400.00	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**8,927,519,105.00**					**16,742,777,300.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8,927,519,105.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**16,742,777,300.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**8,927,519,105.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**16,742,777,300.00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**-**	**-**	**8,927,519,105.00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**-**	**-**	**16,742,777,300.00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. HSU	-	-	8,927,519,105.00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. HSU	-	-	16,742,777,300.00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	25 Dokumen	7,706,701,105.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	25 Dokumen	14,599,877,700.00	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan*	20 Dokumen	701,920,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan*	20 Dokumen	1,409,002,500.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
				Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					*Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*			
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	18 Dokumen	518,898,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	18 Dokumen	733,897,100.00	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				**2,215,473,300.00**					**3,447,567,000.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**2,215,473,300.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**3,447,567,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**2,215,473,300.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**3,447,567,000.00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**2,215,473,300.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**3,447,567,000.00**	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	-	-	80,000,000.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	-	-	265,160,000.00	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	3 Orang	80,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	3 Orang	265,160,000.00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		-	-	2,135,473,300.00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		-	-	3,182,407,000.00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					Fasilitasi Keprotokolan					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	4 Laporan	1,202,723,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	4 Laporan	2,195,714,000.00	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	4 Laporan	689,279,500.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	4 Laporan	732,322,500.00	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Pendokumentasian Tugas Pimpinan					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	4 Laporan	243,470,800.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	4 Laporan	254,370,500.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				**358,429,800.00**					**797,826,400.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**358,429,800.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**797,826,400.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**358,429,800.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**797,826,400.00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**358,429,800.00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**797,826,400.00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. HSU	-	-	303,429,800.00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. HSU	-	-	742,826,400.00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	6 Dokumen	164,998,500.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	6 Dokumen	300,001,400.00	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	4 Laporan	123,431,300.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	4 Laporan	427,825,000.00	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	15,000,000.00			*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	-	15,000,000.00	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. HSU	-	-	55,000,000.00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. HSU	-	-	55,000,000.00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	25,000,000.00			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	5 Dokumen	25,000,000.00	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*	2 Dokumen	10,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*	2 Dokumen	10,000,000.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*	5 Dokumen	20,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*	5 Dokumen	20,000,000.00	
		BAGIAN PEMBANGUNAN				**811,000,000.00**					**810,903,550.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**811,000,000.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**810,903,550.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**811,000,000.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**810,903,550.00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**811,000,000.00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**810,903,550.00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. HSU	-	-	811,000,000.00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. HSU	-	-	810,903,550.00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	12 Dokumen	56,785,550.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	12 Dokumen	56,785,200.00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	15 Laporan	311,407,540.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	15 Laporan	311,407,200.00	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	8 Laporan	442,806,910.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	8 Laporan	442,711,150.00	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				**749,733,700.00**					**1,724,999,650.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**749,733,700.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,724,999,650.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**749,733,700.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,724,999,650.00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**749,733,700.00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**-**	**-**	**1,724,999,650.00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. HSU	-	-	749,733,700.00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. HSU	-	-	1,724,999,650.00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
			Kab.	*Jumlah Dokumen Hasil*	5	213,340,000.00		Kab.	*Jumlah Dokumen Hasil*	5 Dokumen	505,000,000.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
			HSU	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	Dokumen			HSU	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*			
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	5 Dokumen	342,655,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	5 Dokumen	680,000,000.00	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	50 Orang	193,738,700.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	50 Orang	539,999,650.00	
		BAGIAN UMUM				**15,675,411,374.00**					**15,440,747,590.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**15,675,411,374.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**15,440,747,590.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**15,675,411,374.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**15,440,747,590.00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**15,675,411,374.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**15,440,747,590.00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	-	-	185,847,500.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	-	-	185,000,000.00	
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	20 Dokumen	5,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	20 Dokumen	5,000,000.00	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	180,847,500.00		Kab. HSU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	180,000,000.00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	-	-	5,267,616,550.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	-	-	4,746,962,400.00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	102,001,200.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	101,996,700.00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	510,577,300.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	510,570,650.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	114,600,550.00			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	28 Paket	114,600,550.00	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	110,457,500.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	110,457,500.00	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	200 Laporan	1,606,305,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	200 Laporan	1,606,305,000.00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	200 Laporan	2,823,675,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	200 Laporan	2,303,032,000.00	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	4,500,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	4,010,379,750.00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Kab. HSU	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	5 Unit	2,250,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	5 Unit	1,761,906,000.00	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	10 Unit	500,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	10 Unit	499,788,750.00	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Kab. HSU	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	750,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	20 Unit	749,975,000.00	
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Kab. HSU	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	1,000,000,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	998,710,000.00	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	-	-	1,687,867,324.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	-	-	1,687,855,600.00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	55,430,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	55,430,000.00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	1,287,456,524.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	1,287,444,800.00	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	50 Laporan	344,980,800.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	50 Laporan	344,980,800.00	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	-	-	2,982,707,900.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	-	-	2,982,549,840.00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Kab. HSU	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	115 Unit	1,841,677,900.00		Kab. HSU	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	115 Unit	1,841,661,840.00	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	261,102,000.00			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	261,100,000.00	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Kab. HSU	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	7 Unit	879,928,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	7 Unit	879,788,000.00	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. HSU	-	-	1,051,372,100.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. HSU	-	-	1,828,000,000.00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	10 Paket	541,800,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	10 Paket	1,040,000,000.00	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	10 Paket	509,572,100.00		Kab. HSU	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	10 Paket	788,000,000.00	
		BAGIAN ORGANISASI				**283,833,400.00**					**1,209,487,400.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**283,833,400.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,209,487,400.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**283,833,400.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,209,487,400.00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**283,833,400.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**1,209,487,400.00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kab. HSU	-	-	283,833,400.00	Penataan Organisasi	Kab. HSU	-	-	1,209,487,400.00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	4 Dokumen	186,283,400.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	4 Dokumen	209,260,400.00	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
			Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	26,790,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	76,790,000.00	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	1 Dokumen	13,040,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	1 Dokumen	271,970,000.00	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen	13,090,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen	33,490,000.00	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	44,630,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	617,977,000.00	
		BAGIAN HUKUM				**215,635,000.00**					**503,864,500.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**215,635,000.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**503,864,500.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**215,635,000.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**503,864,500.00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**-**	**-**	**215,635,000.00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**-**	**-**	**503,864,500.00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. HSU	-	-	215,635,000.00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. HSU	-	-	503,864,500.00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					
			Kab. HSU	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	650 Dokumen	20,040,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	650 Dokumen	142,737,500.00	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					Fasilitasi Bantuan Hukum					

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	3		4	8	9	17
			Kab. HSU	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	2 Kasus	137,370,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	2 Kasus	259,381,000.00	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					
			Kab. HSU	*Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan*	650 Dokumen	58,225,000.00		Kab. HSU	*Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan*	650 Dokumen	101,746,000.00	
	JUMLAH					**45,831,002,062.00**	**JUMLAH**				**57,586,884,973.00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dari tabel tentang review rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 3 program dengan 18 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum SKPD berkoordinasi dengan Bappelitbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD.

Sekretariat Daerah tidak terdapat usulan program dan kegiatan usulan masyarakat yang terakomodir melalui Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bagian – Bagian yang ada dalam Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					
2					

Untuk program / kegiatan Sekretariat Daerah usulan melalui hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan tidak ada.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Sekretariat Daerah diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional (PN) pada RPJMN Tahun 2020-1024, yaitu untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing serta mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam Program Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada program Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah memiliki peran pada Program Prioritas :

A. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Meperkokoh Ketahanan Budaya bangsa dan Membentuk Maentalitas bangsa yang maju, Modern dan Berkarakter, dengan KP pada :

    1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif. Dari kegiatan prioritas tersebut Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :
        a. Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang ramah, cepat, efektif, efesien dan terpercaya;
        b. Penerapan Disiplin, Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dalam birokrasi.
    2. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental, dari Kegiatan Prioritas tersebut, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui fokus strategi, diantaranya:
        a. Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu;
        b. Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah.

B. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan KP pada :

    1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1. kebersamaan di kalangan umat beragama, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
    b. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;
    c. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kehidupan beragama, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan
    b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

C. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Penyederhanaan Eselonisasi;
    b. Penataan Jabatan Fungsional.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
    b. Penerapan SPBE terintegrasi.
3. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Perluasan implementasi sistem integritas;
    b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
    c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
4. Transformasi pelayanan publik, Sekretariat Daerah berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
    a. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
    b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
    c. Penguatan ekosistem inovasi;
    d. Penguatan pelayanan terpadu.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sasaran program jangka menengah Sekreatriat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;
3. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis.

Dalam tahun anggaran 2025, Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan sasaran strategis dalam mewujudkan birokrasi Sekretariat Daerah yang bersih, profesional dan produktif yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya pelayanan Publik yang prima	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan (SAKIP) Sekretariat Daerah	80.50 Nilai	80.55 Nilai	80.60 Nilai	80.65 Nilai
			Persentase Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	100%	100%	100%
			Persentase Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Capaian Target Indikator Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang melakukan Analisis Jabatan	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Aplikasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyediaan Sarana dan	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	6	7	8	9	10	11
			Prasarana sesuai kebutuhan				
			Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%
			Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian LPPD dan LKPJ	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang professional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah, maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD dan RPJMD.

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatanutama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, yaitu 3program dengan 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   a. Fasilitasi Keprotokolan
   b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   b. Pengadaan Mebel;
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   d. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

9. Administrasi Keuangan dan Operasinal Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah;
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   c. Pelaksanaan Medical chekup Kepala Daerah dan Wakil Kepala

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Daerah.

10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
    a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

11. Penataan Organisasi;
    a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan TataLaksana;
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan;
    a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
    b. Pengelolaan Administrasi Kewilayanan;
    c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
    a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;

3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
    a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual;
    b. Evaluasi,Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial;
    c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
    b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
    c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
    a. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;

2. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam;
   a. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan;
   b. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan danLingkungan Hidup;
   c. Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
   a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
   b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
   c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa.
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik;
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan akan melaksanakan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 18 kegiatan dan total pagu anggaran sebesar Rp. 57.586.884.973,-. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 tercantum dalam Tabel T-C.33 berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 33
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		SEKRETARIAT DAERAH			**16,235,481,983.00**				**17,655,125,400.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**16,235,481,983.00**				**17,655,125,400.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**16,235,481,983.00**				**17,655,125,400.00**
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)***	**100 %**	**16,235,481,983.00**			**100 %**	**17,655,125,400.00**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan bagi ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*	100 %	15,653,984,483.00			100 %	17,029,988,278.00
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan	15,653,984,483.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	192 Orang/bulan	17,029,988,278.00
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah*	100 %	581,497,500.00			100 %	625,137,122.00
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	181,497,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Orang/Bulan	205,137,122.00
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	400,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Orang/Bulan	420,000,000.00
		BAGIAN PEMERINTAHAN			**673,229,600.00**				**359,134,400.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**673,229,600.00**				**359,134,400.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**673,229,600.00**				**359,134,400.00**
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN**	***Persentase Terlaksananya***	**100 %**	**673,229,600.00**			**00 %**	**359,134,400.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
		DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	***tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah***						
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Administrrasi Tata Pemerintahan*	100 %	654,617,200.00			00 %	340,522,000.00
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	263,555,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	2 Dokumen	113,559,400.00
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	19,037,600.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	1 Dokumen	19,037,600.00
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	372,024,600.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4 Dokumen	207,925,000.00
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah*	100 %	18,612,400.00			100 %	18,612,400.00
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	18,612,400.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	2 Dokumen	18,612,400.00
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**16,742,777,300.00**				**16,742,777,300.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**16,742,777,300.00**				**16,742,777,300.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**16,742,777,300.00**				**16,742,777,300.00**
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah***	**100 %**	**16,742,777,300.00**			**100 %**	**16,742,777,300.00**
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	16,742,777,300.00			-	16,742,777,300.00
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	14,599,877,700.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	25 Dokumen	14,599,877,700.00
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	20 Dokumen	1,409,002,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	20 Dokumen	1,409,002,500.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
			Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	18 Dokumen	733,897,100.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	18 Dokumen	733,897,100.00
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			**3,447,567,000.00**				**4,320,000,000.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3,447,567,000.00**				**4,320,000,000.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**3,447,567,000.00**				**4,320,000,000.00**
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**3,447,567,000.00**			**-**	**4,320,000,000.00**
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	265,160,000.00			-	120,000,000.00
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	265,160,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	3 Orang	120,000,000.00
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	3,182,407,000.00			-	4,200,000,000.00
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	2,195,714,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	4 Laporan	2,200,000,000.00
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	732,322,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	4 Laporan	750,000,000.00
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	254,370,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	4 Laporan	1,250,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			**797,826,400.00**				**358,429,800.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**797,826,400.00**				**358,429,800.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**797,826,400.00**				**358,429,800.00**
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan***	**100 %**	**797,826,400.00**			**100 %**	**358,429,800.00**
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian*	100 %	742,826,400.00			100 %	303,429,800.00
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	300,001,400.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	164,998,500.00
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	427,825,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	123,431,300.00
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							
			0	0 0	15,000,000.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000.00
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam*	100 %	55,000,000.00			100 %	55,000,000.00
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	25,000,000.00
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10,000,000.00
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan	5 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	20,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
			Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			Sari			
		BAGIAN PEMBANGUNAN			**810,903,550.00**				**811,000,000.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**810,903,550.00**				**811,000,000.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**810,903,550.00**				**811,000,000.00**
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**	**810,903,550.00**			**-**	**811,000,000.00**
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	810,903,550.00			-	811,000,000.00
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	56,785,200.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	56,785,550.00
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	311,407,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		311,407,540.00
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	442,711,150.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Laporan	442,806,910.00
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			**1,724,999,650.00**				**611,000,000.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1,724,999,650.00**				**611,000,000.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1,724,999,650.00**				**611,000,000.00**
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**	**1,724,999,650.00**			**-**	**611,000,000.00**
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1,724,999,650.00			-	611,000,000.00
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	505,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	300,000,000.00
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	680,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	0.00
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	539,999,650.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	311,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
		BAGIAN UMUM			**15,440,747,590.00**				**16,719,296,065.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**15,440,747,590.00**				**16,719,296,065.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**15,440,747,590.00**				**16,719,296,065.00**
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)***	**100 %**	**15,440,747,590.00**			**100 %**	**16,719,296,065.00**
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian serta Peningkatan Kapasitas ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*	100 %	185,000,000.00			100 %	199,500,000.00
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	20 Dokumen	52,500,000.00
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	180,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	30 Orang	147,000,000.00
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan peralatan, perlengkapan dan komponen penunjang kegiatan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kab. HSU*	100 %	4,746,962,400.00			100 %	6,894,611,324.00
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	101,996,700.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	20 Paket	107,110,500.00
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	510,570,650.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	20 Paket	630,000,000.00
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	114,600,550.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	28 Paket	120,338,849.00
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	110,457,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	4 Paket	116,219,498.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	1,606,305,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	200 Laporan	1,717,905,000.00
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2,303,032,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	200 Laporan	4,203,037,477.00
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	4,010,379,750.00			100 %	2,447,420,000.00
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1,761,906,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5 Unit	682,500,000.00
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	499,788,750.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10 Unit	210,000,000.00
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	749,975,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	20 Unit	554,920,000.00
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	998,710,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5 Unit	1,000,000,000.00
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*	100 %	1,687,855,600.00			100 %	1,742,538,741.00
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55,430,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	45,652,163.00
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,287,444,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	1,351,905,778.00
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	344,980,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	50 Laporan	344,980,800.00
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dan layak pakai*	100 %	2,982,549,840.00			100 %	3,842,053,900.00
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit	1,841,661,840.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	115 Unit	1,841,677,900.00
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	261,100,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	25 Unit	267,876,000.00
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	879,788,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7 Unit	1,732,500,000.00
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan penunjang kegiatan KDH dan WKDH*	12 bulan	1,828,000,000.00			12 bulan	1,593,172,100.00
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,040,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10 Paket	1,051,372,100.00
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	788,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10 Paket	541,800,000.00
		BAGIAN ORGANISASI			**1,209,487,400.00**				**1,162,400,000.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1,209,487,400.00**				**1,162,400,000.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1,209,487,400.00**				**1,162,400,000.00**
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setda)***	**100 %**	**1,209,487,400.00**			**100 %**	**1,162,400,000.00**
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Penataan Organisasi*	100 %	1,209,487,400.00			100 %	1,162,400,000.00
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	209,260,400.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	4 Dokumen	350,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	76,790,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	1 Laporan	200,000,000.00
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	271,970,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	1 Dokumen	200,000,000.00
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	33,490,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	1 Dokumen	12,400,000.00
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	617,977,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	2 Dokumen	400,000,000.00
		BAGIAN HUKUM			**503,864,500.00**				**1,250,000,000.00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**503,864,500.00**				**1,250,000,000.00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**503,864,500.00**				**1,250,000,000.00**
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**	**503,864,500.00**			**-**	**1,250,000,000.00**
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.*	100 %	503,864,500.00			100 %	1,250,000,000.00
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	650 Dokumen	142,737,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650 Dokumen	461,000,000.00
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum							
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	259,381,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Kasus	500,000,000.00
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							
					101,746,000.00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		289,000,000.00
	J U M L A H				**57,586,884,973.00**	**J U M L A H**			**59,989,162,965.00**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, dalam menunjang visi dan misi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta target dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Dokumen Rencana Kerja 2025 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2025 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah dalm menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, maka setiap bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat mengakomodir program/kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program/ kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Amuntai, 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

SETDA

H. ADI LESMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701118 199101 1 002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala Daerah dalam menyelenggara pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta alokasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai organisasi perangkat daerah yang masuk di bidang pemerintahan umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean Governance*).

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta memfasilitasi terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah, berharap dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik sehingga pelayanan terhadap DPRD yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun untuk mengetahui rencana kegiatan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2025 ini selanjutnya sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan skala prioritas.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dilakukan oleh Sub Bagian Program yang melibatkan bagian-bagian lain yang ada di Sekretariat DPRD Kabupten Hulu Sungai Utara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor BD. 2022/No.17);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 mempunyai maksud:

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan RPJMD;
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan; dan
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh pejabat dan staf pelaksana agar dapat melaksanakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal;
3. Sebagai tolok ukur menganalisa/mengkaji secara objektif capaian kinerja Sekretariat DPRD selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Mayarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan. Gambaran umum realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Pegawai	15.514.025.325	14.818.054.981	95,51
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**21.954.176.402**	**20.473.357.906**	**93,25**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.000.000**	**0**	**0**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	0	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan dokuemen Perubaha RKA-SKPD	3.000.000	0	0
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.236.074.059**	**2.082.476.935**	**93,13**
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.236.074.059	2.082.476.935	93,13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**52.500.000**	**48.000.000**	**91,43**
8.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000	0	0
9.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.000.000	48.000.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**303.435.000**	**297.735.000**	**98,12**
10.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	33.435.000	28.735.000	85,94

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270.000.000	269.000.000	99,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.534.436.970**	**2.231.145.905**	**88,03**
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.778.500	55.970.000	85,09
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876.012.470	848.515.000	96,86
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	327.730.000	228.460.800	69,71
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	261.826.000	234.115.000	89,42
16.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	231.000.000	217.975.000	94,36
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.490.000	646.110.105	84,08
18.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-
19.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**571.893.428**	**493.970.447**	**86,37**
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	262.299.200	201.609.500	76,86
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	157.534.128	146.021.947	92,69
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.060.100	146.339.000	96,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.086.437.500**	**936.897.731**	**86,24**
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	962.937.500	846.232.731	87,88
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	75.400.000	61.820.000	81,99
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	43.100.000	23.945.000	55,56
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.900.000	98

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**14.776.356.765**	**14.023.902.080**	**94,91**
27.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.062.256.765	13.532.930.340	96,24
28.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	564.100.000	466.600.000	82,72
29.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000	24.371.740	16,25
	Layanan Administrasi DPRD	**387.042.680**	**359.229.808**	**92,81**
30.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	21.907.500	0	0
31.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	365.135.180	359.229.808	98,38
II.	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**20.347.137.300**	**18.742.332.954**	**94,91**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**934.822.100**	**639.517.100**	**68,41**
32.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	45.700.000	31.535.000	69
33.	Pembahasan Rancangan Perda	652.820.000	394.774.500	60,47
34.	Penyelenggaraan Kajian dan Perundang-undangan	5.000.000	0	0
35.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	227.112.100	213.207.600	93,88
36.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	4.190.000	0	0
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**325.475.000**	**250.150.000**	**76,86**
37.	Pembahasan KUA dan PPAS	53.025.000	43.830.000	82,66
38.	Pembahasan APBD	41.600.000	28.280.000	67,98
39.	Pembahasan APBD Perubahan	84.425.000	78.990.000	93,56
40.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.175.000	42.480.000	55,04
41.	Pembahasan Laporan Semester	12.500.000	0	0
42.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	56.750.000	56.570.000	99,68
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**264.025.000**	**142.565.000**	**54**
43.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	32.500.000	24.970.000	76,83
44.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	32.500.000	16.820.000	51,75
45.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	32.500.000	27.840.000	85,66

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

46.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	32.500.000	0	0
47.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	32.500.000	6.250.000	19,23
48.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	19.500.000	0	0
49.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	39.000.000	25.140.000	64,46
50.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	43.025.000	41.545.000	96,56
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**2.556.484.600**	**1.940.712.449**	**75,91**
51.	Pendalaman Tugas DPRD	2.242.575.00	1.712.817.449	76,38
52.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	37.159.600	12.000.000	32,29
53.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144.000.000	132.000.000	91,67
54.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120.000.000	71.145.000	59,29
55.	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.750.000	12.750.000	100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**857.175.000**	**721.041.700**	**84,12**
56.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.025.000	4.515.000	22,55
57.	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	19.950.000	0	0
58.	Pelaksanaan Reses	817.200.000	716.526.700	87,68
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**10.690.000**	**0**	**0**
59.	Penyusunan Kode Etik DPRD	5.690.000	0	0
60.	Pengawasan Kode Etik DPRD	5.000.000	0	0
	Pembahasan Kerjasama Daerah	**10.000.000**	**0**	**0**
61.	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	5.000.000	0	0
62.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.000.000	0	0
	Fasilitasi Tugas DPRD	**15.388.465.600**	**15.048.346.705**	**97,79**
63.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.259.135.000	14.986.989.205	98,22
64.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	16.830.600	6.960.000	41,35
65.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	65.000.000	36.257.500	55,78
66.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	25.000.000	18.140.000	72,56
67.	Fasilitasi Pelaksanaan Panitia Tugas Panitia Khusus	22.500.000	0	0
	TOTAL	**42.301.313.702**	**39.215.690.860**	**92,71**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dengan demikian sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Dari pengurusan pencapaian sasaran dapat diuraikan:

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam penguatan kelembagaan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam waktu 1 (satu) tahun.

Adapun hasil dari pelayanan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

1. Produk Hukum yang dihasilkan sebagai berikut:
    a. Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Komisi sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022,
    b. Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022,
    c. Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,
    d. Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023,

e. Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,
f. Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024,
g. Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,
h. Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan
i. Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dab Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Hulu Sungai Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

2. Data Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digambarkan sebagai berikut:
   a. Rapat Paripurna sebanyak 25 kali,
   b. Rapat Badan Musyawarah sebanyak 13 kali,
   c. Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali,
   d. Rapat Kerja sebanyak 39 kali,
   e. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 11 kali,
   f. Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 1 kali,
   g. Rapat Intern sebanyak 14 kali,
   h. Rapat Komisi I sebanyak 3 kali,
   i. Rapat Komisi II sebanyak 4 kali,
   j. Rapat Komisi III sebanyak 3 kali,
   k. Rapat Fraksi Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 kali, dan
   l. Rapat Fraksi Nasdem PDIP sebanyak 2 kali.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Mengingat kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan indikator kinerja indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 terhadap pelayanan Anggota DPRD berdasarkan hasil survey indeks kepuasannya sebesar **86,5%**, pencapaian dari hasil kinerja tersebut melebihi dari target kinerja Sekretariat DPRD, yaitu sebesar **86%**. Untuk tahun 2023 diproyeksikan agar Sekretariat DPRD dapat mempertahankan capaian kinerjanya pada tahun 2022 yakni sebesar 86,5%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka memfasiltasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat;
2. Peningkatan kuantitas sumber daya aparatur untuk pelayanan terhadap Anggota DPRD;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
5. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan keputusan DPRD;
6. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
7. Isu-isu strategis tentang dinamika lingkungan strategis dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/isntitusi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah:

a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan,

   Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

b. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,

   Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinergitas kelembagaan di daerah.

c. Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel,

   Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinaasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan, dengan demikian perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

   Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 yang disesuiakan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pada tahun 2025 rancangan awal RKPD khususnya program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah dilakukan review terhadap rancangan awal sebagaimana disajikan seperti pada tabel T-C 31. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan lampiran tabel diatas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2025 baik dari segi rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara dalam bentuk pokok-pokok pikiran.

Adapun rincian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana terlampir dalam table T-C 34.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2025 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadaian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, bersekeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasikan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan kreformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar International sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Pembangunan jangka menengah tahap ke empat atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025. Visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Provinsi Kalimantan Selatan adalah **"Kalimantan Selatan Maju 2025 dan Sejahtera sebagai wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri"** dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan social budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi daerah kearah industri dan perdangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relative merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. Visi pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2021-2026 yaitu:

"Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara"

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian **"Pembangunan Biru (Blue Development) menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan",** yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Biru (Blue Development) adalam Pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumber

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

daya, mempertahankan keberagaman (biodiversity), Inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelematan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa - jasa lingkungan.

2. Ekonomi Biru (Blue Economy) yaitu system ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dab efisienm tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (Economy Growth), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan lingkungan (Ecological Sustainability) yang dikenal dengan ”The Living Triangle“. Didalam Ekonomi Biru (Blue Economy) mengandung beberapa prinsip antara lain:
    a. Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin da mencapai keadailan social serta ekonomi yang berkelanjutan;
    b. Ekuitas dan keadilan ekonomi;
    c. Ekuitas antar generasi;
    d. Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko terhadap lingkungan, dampak lingkungan dan mencegah degradasi lingkungan;
    e. Hak untuk berkembang bagi semua komponen;
    f. Adanya kerjasama internasional;
    g. Informasi, partisipasi dan akuntabilitas;
    h. Adanya konsumsi dan produksi berkelanjutan;
    i. Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

j. Mendefiniskan kembali kesejahteraan;
k. Kesetaraan gender; dan
l. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.

4. Ketahanan, Kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energy yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragama, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
   a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial , ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
   b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
   c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya menigkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Beberapa prinsip pembangunan yang memperhatikan aspek kesejahteraan, berdaya saing, berdikari, berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan aktualisasi dari visi Kalimantan Selatan **MAPAN (Mandiri dan Terdepan)**. Visi **"Kalsel MAPAN (Mandiri dan Terdepan) lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing"** tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2025 berada dalam kondisi Mapan, yang berarti

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(baik, tidak goyah, stabil). Kondisi pembangunan yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Dengan demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan daya dukung. Dengan demikian definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan keadilan, sedangkan aspek-aspek kemapanan tersebut dapat dilihat dari segi: kemapanan ekonomi, kemapanan dalam kehidupan beragama, dan sebagainya. Diharapkan kemandirian dan keterdepanan dimaksud, akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Mapan terdiri dari 2 (dua) Unsur, yaitu **MANDIRI** dan **TERDEPAN** yang mengandung pengertian:

1. **MANDIRI** adalah terwujudanya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya penigkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dab social, yang dapat dilihat antara lain: kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan, kemandirian dari segi ketahanan pangan, dan kemandirian dari segi ketahanan energi.
2. **TERDEPAN**, artinya paling depan atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel yang selama ini dianonimkan dengan kata (Kalah Selalu), untuk bangkit menjadi salah satu provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga tentunya di harapkan secara nasional. Terdepan dapat diartikan dan dilihat dengan tingkat pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang dapat diraih minimal mendekati rata-rata nasional, dan bahkan diharapkan kedepannya bisa berada di atas rata-rata nasional.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berpedoman pada visi dan misi pembangunan yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026, yakni Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

“Kabupaten Hulu Sungai Utara MANTAP”

Ungkapan **MANTAP** merupakan akronim atau singkatan dari **MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS** dan **PRODUKTIF** yang terkandung pemahaman “Terciptanya keadaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, agamis serta lebih produktif dalam menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi masyarakat secara komunitas yang dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada point 1 (satu) yaitu : **”Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif “** yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif dengan sasaran “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya”. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 bertujuan untuk ***“Meningkatkan peran DPRD sesuai dengan Tri Fungsi DPRD”.*** Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah : ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.”*** Dengan indikator sasaran “***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”***

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tesebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi dalam adminstrasi umum

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

sesuai tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan dewan.

3. Meningkatnya Fasilitasi fungsi Penganggaran DPRD dan fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas Pemerintah di bidng tertentu yng selaras degan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan pejabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2023-2026, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Kegiatan:
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      c. Koordinasi dan Penyusunan dokuemen Perubaha RKA – SKPD;
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
   b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
   h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan;
   c. Pemeliharaan Meubeler;
   d. Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya;
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6. Administrasi Keuangan perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
7. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari sub kegiatan:
   a. Fasilitasi Keprotokolan.
   b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.
   c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Kegiatan-Kegiatan dan Sub Kegiatannya sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pembahasan Rancangan Perda;
   b. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
   c. Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   d. Penyelenggaraan Kajian dan Perundang-undangan;
   e. Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pembahasan KUA dan PPAS;
   b. Pembahasan APBD;
   c. Pembahasan APBD Perubahan;
   d. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   e. Pembahasan Laporan Semester;
   f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari sub kegiatan:
   a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
   b. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
   c. Pengawasan urusan Pemerinahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   d. Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari sub kegiatan:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
b. Pendalaman Tugas DPRD;
c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari sub kegiatan:
   a. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
   b. Pelaksanaan Reses;
   c. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyusunan Kode Etik DPRD;
   b. Pengawasan Kode Etik DPRD.
7. Pembahasan kerjasama Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
   b. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
8. Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari sub kegiatan:
   a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD;
   b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
9. Layanan Administrasi DPRD terdiri dari sub kegiatan:
   a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
   b. Fasilitasi Fraksi DPRD;
   c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.
10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terdiri dari sub kegiatan:
    a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
    b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
    c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar terfokus pada eksternal kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
2. Kegiatan Reses,
3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah,
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan
5. Studi Banding/Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah.

Dari semua kegiatan tersebut tidak ada yang bersinggungan langsung dengan tata kelola Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD terjadi karena menyesuaikan dengan rencana kebutuhan terkini Program dan kegiatan tersebut.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD didanai dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dari pos pendapatan lain-lain yang sah. Dapat dilihat pada Tabel T-C 33.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 secara umum. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini disusun untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Amuntai, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD,

Dra. M. SYARIF FAJERIAN NOOR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730401 199203 1002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2025



JALAN KHURIPAN NOMOR 21 TELP. (0527) 61468 AMUNTAI

TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)* mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya segenap unsur Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setiap tahunnya ditumpahkan dalam Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Penyusunan Rencana Kerja ini telah diverifikasi oleh Tim Bappedalitbang sehingga Rencana Kerjaini dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/karyawati dan manajemen Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, Juli 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,



H. M. Haridi, SP, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680915 199703 1 004

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2023)	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022 Tahun Lalu Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2023-2026	8
	2.2. Analisis Kinerja Bappedalitbang Kab. HSU.....	17
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang.....	40
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	54
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III	TUJUAN, SASARAN BAPPEDALITBANG	56
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang.....	60
	3.3. Strategi dan Kebijakan	62
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG.....	64
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan …..	64
BAB V	PENUTUP	95

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan didukung oleh data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja menghasilkan output kegiatan yang berkualitas tetapi juga akan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal demikian menjadikan perencanaan sebagai kebutuhan yang penting, mendasar dan utama. Apalagi dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah dan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pembangunanan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pembangunan maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pembangunan daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pemerintah tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renja ini dilaksanakan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui:
   a. Pengolahan data dan informasi,
   b. Analisis gambaran pelayanan,
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 berdasarkan Renstra,
   d. Isu-isu penting penyelanggaaran tugas dan fungsi,
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD,
   f. Perumusan tujuan dan sasaran,
   g. Perumusan kegiatan prioritas,
   h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja,
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang telah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan dalam menyusun indicator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Salah satu fungsi Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan bagi Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan terutama dalam bidang perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023– 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat mengenai

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

4.1. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB V PENUTUP.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2023-2026

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitaanya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Strategis, pada umumnya capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari tugas pokok adalah:
1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiataan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD), Rencana Strategis Bappedalitbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Bappedalitbang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023, pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukan dengan Anggaran Belanja

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sebesar Rp. 6.721.082.956,00 dengan realisasi besesar Rp. 5.885.922.284,00 atau 87,57%, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.575.066.456**	**4.120.512.972**	**90,06%**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48.322.100**	**42.263.150**	**87,46%**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.759.600	22.781.600	92,01%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.584.250	2.550.000	98,67%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.432.500	2.420.000	99,49%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.570.500	2.555.000	99,40%
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.564.250	2.405.000	93,79%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.411.000	9.551.550	71,22%
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.314.999.750**	**3.041.742.932**	**91,76%**
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.000.000	3.035.969.332	91,83%
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.999.750	5.773.600	64,15%
III	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**37.400.000**	**31.850.000**	**85,16%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.400.000	16.100.000	87,50%
10	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.000.000	15.750.000	82,89%
IV	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**597.442.540**	**539.318.755**	**90,27%**
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.807.300	11.571.000	83,80%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.237.090	157.359.500	98,82%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.856.150	21.521.500	72,08%
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.565.000	22.240.350	70,46%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.977.000	326.626.405	89,99%
V	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**134.625.216**	**134.088.000**	**99,60%**
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.625.216	134.088.000	99,60%
VI	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**311.815.100**	**231.269.247**	**74,17%**
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.420.000	7.020.000	67,37%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.504.000	95.006.647	69,60%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.150.000	13.900.000	34,62%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.741.100	115.342.600	92,47%
VII	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**130.461.750**	**99.980.888**	**76,64%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.369.750	85.100.488	73,76%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.092.000	14.880.400	98,60%
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**762.971.250**	**563.660.314**	**73,88%**
VIII	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**455.377.450**	**401.285.802**	**88,12%**
23	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.250.000	1.125.000	90,00%
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	24.791.400	20.467.000	82,56%
25	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	6.250.000	5.625.000	90,00%
26	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	21.095.600	20.529.000	97,31%
27	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.500.000	1.800.000	40,00%
28	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	397.490.450	351.739.802	88,49%
IX	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**8.040.000**	**0**	**0,00%**
29	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.040.000	0	0,00%
X	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**167.975.300**	**110.764.646**	**65,94%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
30	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.000.000	72.125.246	72,13%
31	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	67.975.300	38.639.400	56,84%
34	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**131.578.500**	**51.609.866**	**39,22%**
32	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	31.146.500	19.040.000	61,13%
33	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	49.808.000	11.372.000	22,83%
34	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.624.000	21.197.866	41,87%
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**438.665.740**	**319.551.293**	**72,85%**
XII	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**124.797.330**	**101.188.350**	**81,08%**
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.424.800	8.379.750	73,35%
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.835.200	5.712.000	97,89%
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.104.750	5.236.000	85,77%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3.779.850	2.079.000	55,00%
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.635.930	46.821.600	77,22%
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.349.800	6.240.000	98,27%
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.182.300	10.211.000	91,31%
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.484.700	16.509.000	84,73%
XIII	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**204.479.210**	**131.192.652**	**64,16%**
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.661.780	48.127.600	72,20%
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.188.450	5.725.000	56,19%
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.833.000	12.408.577	31,95%
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.549.980	35.112.000	78,81%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.566.000	4.475.000	98,01%
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.450.000	4.495.000	69,69%
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.230.000	20.849.475	62,74%
XIV	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**109.389.200**	**87.170.291**	**79,69%**
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.705.600	3.125.000	35,90%
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.850.000	5.850.000	100,00%
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.745.000	28.268.000	91,94%
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	38.000.500	25.427.500	66,91%
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.177.500	12.236.391	92,86%
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12.910.600	12.263.400	94,99%
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**944.379.510**	**882.197.705**	**93,42%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
XV	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**102.720.000**	**93.389.000**	**90,92%**
56	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	102.720.000	93.389.000	90,92%
XVI	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**484.443.750**	**452.891.150**	**93,49%**
57	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	232.163.750	224.726.150	96,80%
58	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	252.280.000	228.165.000	90,44%
XVII	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**357.215.760**	**335.917.555**	**94,04%**
59	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	139.899.770	133.233.754	95,24%
60	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	217.315.990	202.683.801	93,27%
Total		**6.721.082.956**	**5.885.922.284**	**87,57%**

Dari informasi tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi melebihi 60 persen. Namun jika di rinci sampai ke sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang di bawah 60 Persen adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 40.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.900.000,- atau 34,62 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan peralatan kantor yang terdiri dari pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer. Pemeliharaan disini bersifat insidentil, realisasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dilakukan apabila peralatan dan perlengkapan kantor mengalami kendala atau kerusakan saja.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.800.000,- atau 40,00 %. kegiatan ini merupakan rangkaian koordinasi penyusunan RKPD, dimana salah satunya adalah menyiapkan usulan untuk menjadi bahan musrenbang RKPD. Yang salah satu caranya adalah menggali aspirasi masyarakat di kecamatan. Kegiatan bersifat koordinasi yang dilaksanakan dalam untuk menyusun dan menyiapkan bahan untuk musrenbang RKPD.

b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 67.975.300,- terealisasi sebesar Rp.38.639.400,- atau 56,84 %. kegiatan ini merupakan kegiatan monitoring, evaluasi dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan Pembangunan daerah yang bersifat.koordinasi dan penginputan capaian kinerja melalui aplikasi EMONEV.

c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

- Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.808.000,- terealisasi sebesar Rp.11.372.000,- atau 22,83 %. Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah memastikan sistem aplikasi berjalan dengan lancar sehingga proses perencanaan penginputan usulan dan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan baik dan transparan. Secara kinerja sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam hal penyerapan anggaran ada beberapa sub rincian belanja yang belum dapat di realisasikan.

3. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.779.850,- terealisasi sebesar Rp. 2.079.000,-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

atau 55,00 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupaun perjalanan dinas. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 10.188.450,- terealisasi sebesar Rp. 5.725.000,- atau 56,19 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 38.833.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.408.577,- atau 31,95 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupaun perjalanan dinas. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 8.705.600 terealisasi sebesar Rp. 3.125.000,- atau 35,00 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupaun perjalanan dinas. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.
-

Sedangkan realisasi yang lebih dari 60 % merupakan komitmen dan wujud nyata dari Bappedalitbang untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan rencana kerja tahun anggaran 2025 dan perkiraan maju 2026, maka ada beberapa hambatan/masalah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum adanya kejelasan tata laksana kerja berkenaan dengan jabatan fungsional perencana dan fungsional peneliti pembangunan daerah;
2. Belum adanya sistem database yang dapat menghimpun seluruh hasil kajian dan penelitian secara terintegrasi.
3. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi dan pusat.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4. Tempat kerja yang kurang refresentatif.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD/RPD, Renstra Bappedalitbang, RKPD, Renja SKPD.

Secara umum target kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan hasil sebagaimana yang direncanakan. Adapun penjabaran capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel 2.2.1 tersebut dibawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan**	**400%**	**1.850.290.000**	**0%**	**0**	**100%**	**762.971.250**	**100%**	**563.660.314**	**100**	**73,88**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	678.398.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	455.377.450	1 Dokumen	401.285.802	100	88,12	
1	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	9 dokumen	94.580.000	0 dokumen	0	2 dokumen	1.250.000	2 dokumen	1.125.000	100	90	Bappeda litbang
2	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	n/a	91.200.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0	0	Bappeda litbang
3	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Berita Acara	80.000.000	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	24.791.400	1 Berita Acara	20.467.000	100	82,56	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Bappeda litbang
4	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	71.600.000	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	6.250.000	1 Berita Acara	5.625.000	100	90	Bappeda litbang
5	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	106.818.000	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	21.095.600	1 Berita Acara	20.529.000	100	97,31	Bappeda litbang
6	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 Usulan	18.200.000	0 Usulan	0	1 Usulan	4.500.000	1 Usulan	1.800.000	100	40	Bappeda litbang
7	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	9 dokumen	216.000.000	0 dokumen	0	2 dokumen	397.490.450	2 dokumen	351.739.802	100	88,49	Bappeda litbang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										85,71	69,77	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Tinggi	Sangat Rendah	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	400%	12.080.000	100%	0	100%	8.040.000	100%	0	100	0	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	9 Masukan	10.800.000	0 Masukan	0	2 Masukan	8.040.000	2 Masukan	0	100	0	Bappeda litbang
9	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1.280.000	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	Bappeda litbang
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	0	
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	400 Dokumen	672.000.000	100 Dokumen	0	100 Dokumen	167.975.300	100 Dokumen	110.764.646	100	65,94	Bappeda litbang
10	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	400.000.000	0 Laporan	0	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	72.125.246	100	72,13	Bappeda litbang
11	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	33 Laporan	272.000.000	0 Laporan	0	9 Laporan	67.975.300	9 Laporan	38.639.400	100	56,84	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pembangunan Daerah												
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										100	64,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Sangat Tinggi	Rendah	
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi SIPD	8 Dokumen	487.812.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	131.578.500	2 Dokumen	51.609.866	100	39,22	Bappeda litbang
12	5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4 Dokumen	106.580.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	31.146.500	1 Dokumen	19.040.000	100	61,13	Bappeda litbang
13	5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	181.232.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	49.808.000	1 Dokumen	11.372.000	100	22,83	Bappeda litbang
14	5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dolkumen	200.000.000	0 Dolkumen	0	1 Dolkumen	50.624.000	1 Dolkumen	21.197.866	100	41,87	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemerintah Kabupaten/Kota											
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	41,95	
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	200	96,64	
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD, dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD**	**400%**	**1.595.764.200**	**0%**	**0**	**100%**	**438.665.740**	**100%**	**319.551.293**	**100**	**72,85**	Bappeda litbang
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	400%	434.910.000	100%	0	100%	124.797.330	100%	101.188.350	100	81,08	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
15	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	28.080.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.424.800	1 Dokumen	8.379.750	100	73,35	Bappeda litbang
16	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	68 SKPD	28.080.000	0 SKPD	0	17 SKPD	5.835.200	17 SKPD	5.712.000	100	97,89	Bappeda litbang
17	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	18.600.000	0 Laporan	0	1 Laporan	6.104.750	1 Laporan	5.236.000	100	85,77	Bappeda litbang
18	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	15.120.000	0 Laporan	0	1 Laporan	3.779.850	1 Laporan	2.079.000	100	55	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	149.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	60.635.930	1 Dokumen	46.821.600	100	77,22	Bappeda litbang
20	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Rentra/renja bidang pembangunan manusia	40 SKPD	35.000.000	0 SKPD	0	10 SKPD	6.349.800	10 SKPD	6.240.000	100	98,27	Bappeda litbang
21	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	40 skpd	46.930.000	0 skpd	0	10 skpd	11.182.300	10 skpd	10.211.000	100	91,31	Bappeda litbang
22	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	4 Laporan	114.100.000	0 Laporan	0	1 Laporan	19.484.700	1 Laporan	16.509.000	100	84,73	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia											
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	82,94	
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi Perencanaan bidang perekonomian dan SDA	400%	723.297.400	100%	0	100%	204.479.210	100%	131.192.652	100	64,16	Bappeda litbang
23	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya	4 Dokumen	267.200.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	66.661.780	1 Dokumen	48.127.600	100	72,2	Bappeda litbang
24	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja	20 SKPD	78.798.600	0 SKPD	0	5 SKPD	10.188.450	5 SKPD	5.725.000	100	56,19	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Bidang Perekonomian	Bid.Perekonomian											
25	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	116.798.800	0 Laporan	0	1 Laporan	38.833.000	1 Laporan	12.408.577	100	31,95	Bappeda litbang
26	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	4 Laporan	100.000	0 Laporan	0	1 Laporan	44.549.980	1 Laporan	35.112.000	100	78,81	Bappeda litbang
27	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12 SKPD	40.400.000	0 SKPD	0	3 SKPD	4.566.000	3 SKPD	4.475.000	100	98,01	Bappeda litbang
28	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	12 SKPD	60.000.000	0 SKPD	0	3 SKPD	6.450.000	3 SKPD	4.495.000	100	69,69	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perangkat Daerah Bidang SDA	Renstra/Renja Bidang SDA											
29	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	160.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	33.230.000	1 Laporan	20.849.475	100	62,74	Bappeda litbang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										100	67,09	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen perencanaan SKPD Lingkup koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	400%	437.556.800	100%	0	100%	109.389.200	100%	87.170.291	100	79,69	Bappeda litbang
30	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	4 Dokumen	34.822.400	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.705.600	1 Dokumen	3.125.000	100	35,9	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan RKPD)											
31	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20 SKPD	24.240.000	0 SKPD	0	5 SKPD	5.850.000	5 SKPD	5.850.000	100	100	Bappeda litbang
32	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20 SKPD	122.980.000	0 SKPD	0	5 SKPD	30.745.000	5 SKPD	28.268.000	100	91,94	Bappeda litbang
33	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Laporan	152.002.000	0 Laporan	0	2 Laporan	38.000.500	2 Laporan	25.427.500	100	66,91	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
34	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	52.710.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.177.500	1 Dokumen	12.236.391	100	92,86	Bappeda litbang
35	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8 Laporan	50.802.400	0 Laporan	0	2 Laporan	12.910.600	2 Laporan	12.263.400	100	94,99	Bappeda litbang
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	80,43	
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi	
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		200	149,95	
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian**	**400%**	**1.244.960.395**	**0%**	**0**	**100%**	**944.379.510**	**100%**	**882.197.705**	**100**	**93,42**	Bappeda litbang
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan	4 dokumen	100.000.000	1 dokumen	0	1 dokumen	102.720.000	1 dokumen	93.389.000	100	90,92	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengkajian Peraturan	pemerintahan dan pengkajian peraturan											
36	5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4 Laporan	100.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	102.720.000	1 Laporan	93.389.000	100	90,92	Bappeda litbang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										100	90,92	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	0 dokumen	482.643.750	0 dokumen	0	3 dokumen	484.443.750	3 dokumen	452.891.150	100	93,49	Bappeda litbang
37	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	232.163.750	0 Dokumen	0	2 Dokumen	232.163.750	2 Dokumen	224.726.150	100	96,8	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
38	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250.480.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	252.280.000	1 Dokumen	228.165.000	100	90,44	Bappeda litbang
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	93,62	
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang dihasilkan	0 dokumen	662.316.645	0 dokumen	0	2 dokumen	357.215.760	2 dokumen	335.917.555	100	94,04	Bappeda litbang
39	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	139.899.770	0 Laporan	0	1 Laporan	139.899.770	1 Laporan	133.233.754	100	95,24	Bappeda litbang
40	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	522.416.875	0 Laporan	0	1 Laporan	217.315.990	1 Laporan	202.683.801	100	93,27	Bappeda litbang
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	94,25	
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
									Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200	185,63	
									Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten**	**400%**	**18.605.578.295**	**0%**	**0**	**100%**	**4.575.065.856**	**100%**	**4.120.512.972**	**100**	**90,06**	Bappeda litbang
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaandan capaian kinerja bappedalitbang yang disusun	400%	583.822.633	0%	0	100%	48.321.500	100%	42.263.150	100	87,46	Bappeda litbang
41	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	134.198.953	0 dokumen	0	2 dokumen	24.759.000	2 dokumen	22.781.600	100	92,01	Bappeda litbang
42	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	13.876.280	0 dokumen	0	1 dokumen	2.584.250	1 dokumen	2.550.000	100	98,67	Bappeda litbang
43	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	13.876.280	0 dokumen	0	1 dokumen	2.432.500	1 dokumen	2.420.000	100	99,49	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
44	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	13.876.280	0 dokumen	0	1 dokumen	2.570.500	1 dokumen	2.555.000	100	99,4	Bappeda litbang
45	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	13.876.280	0 dokumen	0	1 dokumen	2.564.250	1 dokumen	2.405.000	100	93,79	Bappeda litbang
46	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	394.118.560	0 laporan	0	6 laporan	13.411.000	6 laporan	9.551.550	100	71,22	Bappeda litbang
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,43	
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi dan laporan keuangan bappedalitbang	400%	13.272.312.000	0%	0	100%	3.314.999.750	100%	3.041.742.932	100	91,76	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
47	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1232 orang/bulan	13.224.000.000	0 orang/bulan	0	308 orang/bulan	3.306.000.000	298 orang/bulan	3.035.969.332	96,75	91,83	Bappeda litbang
48	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	48.312.000	0 laporan	0	1 laporan	8.999.750	1 laporan	5.773.600	100	64,15	Bappeda litbang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										98,38	77,99	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Sangat Tinggi	Tinggi	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	400%	236.192.000	0%	0	100%	37.400.000	100%	31.850.000	100	85,16	Bappeda litbang
49	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	101.992.000	0 paket	0	1 paket	18.400.000	1 paket	16.100.000	100	87,5	Bappeda litbang
50	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	134.200.000	0 orang	0	26 orang	19.000.000	17 orang	15.750.000	65,38	82,89	Bappeda litbang
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										82,69	85,2	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Tinggi	Tinggi	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	400%	2.413.642.535	0%	0	100%	597.442.540	100%	539.318.755	100	90,27	Bappeda litbang
51	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	79.573.487	0 paket	0	7 paket	13.807.300	7 paket	11.571.000	100	83,8	Bappeda litbang
52	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	153.534.090	0 Paket	0	8 Paket	159.237.090	8 Paket	157.359.500	100	98,82	Bappeda litbang
53	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 item barang	160.275.812	0 item barang	0	75 item barang	29.856.150	75 item barang	21.521.500	100	72,08	Bappeda litbang
54	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	120.846.026	0 paket	0	1 paket	31.565.000	1 paket	22.240.350	100	70,46	Bappeda litbang
55	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	1.899.413.120	0 laporan	0	2 laporan	362.977.000	2 laporan	326.626.405	100	89,99	Bappeda litbang
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	83,03	
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang yang disediakan sesuai kebutuhan	400%	134.625.216	0%	0	100%	134.625.216	100%	134.088.000	100	99,6	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pemerintah Daerah												
56	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatab yang disediakan	16 unit	134.625.216	0 unit	0	6 unit	134.625.216	6 unit	134.088.000	100	99,6	Bappeda litbang
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,6	
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	400%	1.463.746.911	0%	0	100%	311.815.100	100%	231.269.247	100	74,17	Bappeda litbang
57	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	63.758.420	0 laporan	0	1 laporan	10.420.000	1 laporan	7.020.000	100	67,37	Bappeda litbang
58	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	751.520.000	0 laporan	0	3 laporan	136.504.000	3 laporan	95.006.647	100	69,6	Bappeda litbang
59	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	225.271.475	0 laporan	0	1 laporan	40.150.000	1 laporan	13.900.000	100	34,62	Bappeda litbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
60	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	423.197.016	0 Laporan	0	1 Laporan	124.741.100	1 Laporan	115.342.600	100	92,47	Bappeda litbang
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	66,01	
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	400%	501.237.000	0%	0	100%	130.461.750	100%	99.980.888	100	76,64	Bappeda litbang
61	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 unit	447.557.000	0 unit	0	35 unit	115.369.750	35 unit	85.100.488	100	73,76	Bappeda litbang
62	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	53.680.000	0 unit	0	1 unit	15.092.000	1 unit	14.880.400	100	98,6	Bappeda litbang
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	86,18	
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi	
									Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			200	172,87	
									Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)						100	82,55	
		Predikat Kinerja (Program)						Sangat Tinggi	Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)						**96,16**	**87,57**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**6.721.082.356**		**5.885.922.284**			

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Bappedalitbang

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan di daerah selalu mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dengan APBD;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan SKPD terkait.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Seringnya terjadi perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar SKPD;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana.
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat yang menentukan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kemauan, integritas, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu dan berkualitas.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana setiap SKPD dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
    1) Sub Bagian Program dan Data
    2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur
d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**

   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
   2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
   3) Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
   4) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
   5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

   Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

   1) Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
   2) Merumuskan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan RPJMD diantaranya adalan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kerja.
   3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.

4) Menghimpun dan memperlajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas.
5) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
6) Mengkoordinasikan perumusan LPPD, LKPJ, Laporan keuangan, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya.
7) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.
8) Melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan.
9) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
10) Membina, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan.
11) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
12) Melaksanakan pengawasan terhadap pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dna pembinaan karir bawahan.
16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan SKPD guna terwujudnya tata kelola

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya.

18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan SKPD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
2) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
3) Penyusunan, pengelohan dan pelaporan pertanggungjawaban penyekengaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yan berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai dengan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggujawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat.
5) Menyelenggarakan urusan program.
6) Menyelenggarakan urusan data.
7) Menyelenggarakan urusan tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian)
8) Menyelenggarakan urusan keuangan
9) Menyelenggarakan urusan aset.
10) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Sekretariat.
11) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
12) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karis bawahan.
16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sekrertariat yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan Sekretariat guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik sesuai bidang tugasnya.
18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekretariat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur

Kepala bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd) bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
2. Koordinasi penyusunan renstra perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
3. Koordinasi pelaksanaan musrenbang rpjpd, rpjmd dan rkpd bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
4. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
5. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
6. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan k/l di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
7. Koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana kerja anggaran-dokumen pelaksanaan anggaran) di bidang Pemerintahan,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan perencanaan pembagunan daerah, penelitian dan pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk tekis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
8. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
10. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
11. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12. Mengoordinasikan pembinasan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) Kab/Kota.
13. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program, kegiatan dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
14. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
15. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
16. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
17. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
18. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
19. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang terkait bidang tugas sesuai kententuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
20. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial, budaya dan pembangunan manusia guna terwujudnya tata kelola Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang baik sesuai bidang tugasnya.
21. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
22. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

4. Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dengan fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Koordinasi dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
3. Koordinasi dan pengkajian kewilayahan.
4. Pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dna penganggaran di daerah.
8. Koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Koordinasi pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
10. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
12. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
13. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
14. Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
15. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
16. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten.
7. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
8. Melakukan analisa dan pengkajian perencaaan dan pendanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
10. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
11. Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
12. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

13. Mengkordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
14. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
15. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
16. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
17. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
18. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
19. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
21. Mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
22. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
23. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
24. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
25. Melaksanakan Standar Operasiobal Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
26. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
27. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
28. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai kentetuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
29. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
30. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan evaluasi dan informasi pembangunan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

daerah guna terwujudnya tata kelola Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang baik sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
32. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
34. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Penelitian dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkkordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
6. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
8. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten.
9. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.
10. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
11. Mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
12. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
13. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
14. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
15. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

16. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
17. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
18. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan guna terwujudnya tata kelola bidang Penelitian dan Pengembangan yang bai sesuai bidang tugasnya.
20. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
21. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Dalam tabel review Rancangan awal RKPD Tahun 2025, ada kebutuhan pendanaan yang belum teranggarkan. Pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN masih diperlukan penambahan untuk mengakomodir kemungkinan penambahan PPPK.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum ada usulan yang disampaikan dari masyarakat.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kebijakan yang ada pada RKP Tahun 2025, ada beberapa Prioritas Nasional yang menjadi titik berat pemerintah pusat.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
   Prioritas Nasional ini berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan fase awal dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah kedalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

1. PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan
    1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
    2) Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
    3) Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing
    4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
    5) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
    1) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
    2) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
    3) Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
    4) Penurunan Prevalensi Stunting
    5) Penurunan Angka Pernikahan Anak
    6) Peningkatan Prestasi Olahraga
    7) Pengembangan Budaya Daerah
3. PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
    1) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah
    3) Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
4. PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
    1) Penguatan Reformasi Birokrasi
    2) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
    3) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
    4) Pengembangan Satu Data Kalsel
    5) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
    6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
   1) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
   2) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi :
   a. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian : pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian.
      - Meningkatkan stabilitas ekonomi makro : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
      - Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

   b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
      - Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
      - Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi Masyarakat Kalimantan Selatan.
   c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
- Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan :

- Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi :

a. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :

- Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan Kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
- Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.

b. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
- Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
- Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

3. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi

a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan :

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
- Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung pendukung produksi lainnya Pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.

b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah kebijakan sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
- Meningkatkan system Distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distibusi yang efektif.

3. **2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang**

Penyusunan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2023-2026, dalam rangka mewujudkan program prioritas RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Sesuai dengan Renstra Bappedalitbang Tahun 2023 – 2026,

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2020-2024, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2024, perkiraan capaian tahun 2025, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2024, maka sasaran Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang teransparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pulu indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional, dan produktif	Indek reformasi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang teransparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappedalitbang	A
2.	Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian IKU RPD dengan nilai ≥ 76 % (tinggi)	87 % (Tinggi)
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	100 %
3.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian Litbang yang dapat dimanfaatkan	100 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3. Strategi dan Kebijakan

3.3.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah;
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan;
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian sesuai dengan permasalahan dan kondisi obyektif sumber daya daerah;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana;
7. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan kinerja kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan.

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas system akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Peningkatan konsistensi implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan;
3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan;
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

6. Meningkatkan keikut sertaan sumber daya manusia aparatur pada pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, fungsional maupun teknis;
7. Meningkatkan sistem prosedur dan standar kerja organisasi untuk optimalisi pencapaian kinerja.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan 4 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 61 sub kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.513.273.640,00. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dan perkiran maju tahun 2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
      2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
   D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      2) Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
   2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
   3) Pelaksanaan Konsultasi Publik.
   4) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
   5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
   6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.
   7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
   2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
   2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
   3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
   4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia.
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian.
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
7) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
   1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
   1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.
   2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.
   3) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
   1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
   2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif.
   3) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMETAPAN RENCANA KERJA ORGAN SKPD/PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME KEGIATAN PD	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELUM TERCAPAI TAHUN 2025		PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERA LAINNYA
							TARGET OPD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRAKIRAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											KUANTITATIF	KUALITATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
	1.01	PENELITIAN						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENELITIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten				100 %	10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
	1.01.01.01	Penyusunan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian Kinerja Penyelenggaraan yang tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian Kinerja Penyelenggaraan yang tepat waktu				100 % 1 Dokumen	10.000.000,00			Mendukung Kebijakan Umum Pemerintah Daerah	Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, dan Kebijakan yang berkaitan dengan 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik yang Inovatif	DPRD, Unsur Lembaga Pemerintahan Kabupaten HSU, Kantor Desa		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	1.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Pulo, Muli, Sungai Tabuk, Banjang, Amuntai Tengah, Amuntai Kota	BELANJA DAERAH (APBD)	Mendukung Kebijakan Umum Pemerintah Daerah	Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik yang Inovatif	DPRD, Unsur Lembaga Pemerintahan Kabupaten HSU, Kantor Desa		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	1.01.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan LAKIP														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen [illegible]				1 Dokumen	[illegible]	Kab. [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			Jumlah Dokumen [illegible]				1 Dokumen	[illegible]	Kab. [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			Jumlah Laporan [illegible]				[illegible] Laporan	[illegible]	Kab. [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / KONTRAK KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (RPJMD)	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN LALU	PENAMPAIAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN LALU	DATA/INFORMASI DUKUNGAN PENAMPAIAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BIAYA BERDASARKAN TARIF/SSH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	NOMOR ID DRK	PENDUKUNG	[illegible]		TARIF/SSH	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	Administrasi Umum Perangkat Daerah	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			[illegible]				[illegible] Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			[illegible]				[illegible] Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				4 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1 Laporan [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PENGUKURAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN (OPD)	KELAYAKAN KEGIATAN / KEGIATAN TAHUN BERJALAN	PENAMBAHAN / PENGURANGAN TARGET KEGIATAN OPD TAHUN BERJALAN	DATA/INFORMASI DUKUNGAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN BAGI MENGATASI TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KEWENANGAN	PENDANAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Pendidikan Penanggung Jawab Kegiatan [jenis unit kerja] Binaan				1 Unit	23.000.000,00			Kewenangan Provinsi untuk [Nama Urusan] yang [Tidak] Diserahkan ke Kabupaten/Kota	Di dukung dalam [Tidak] Ada Belanja Pusat untuk kegiatan yang Tidak/Ada Pada Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pusat	Kepemilikan		23.00	[illegible]
	2.01.01.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Pembelajaran Daerah	Dokumen Laporan Pengelolaan Sumber Pembelajaran Daerah				1 Dok	30.000.000,00			Kewenangan Provinsi untuk [Nama Urusan] yang [Tidak] Diserahkan ke Kabupaten/Kota	Di dukung dalam [Tidak] Ada Belanja Pusat yang [Ada] Pada Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pusat yang Tidak Pada Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pusat	Kepemilikan		30.000.000,00	[illegible]
	2.01.01.2.01.0001	Pengelolaan dan Pengembangan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan dan Sumber Pengunjung				1 Laporan	23.000.000,00	Kab. Kota/Jumlah Lokasi Kegiatan Tempat Rapat, dll	[illegible]	Kewenangan Provinsi untuk [Nama Urusan] yang [Tidak] Diserahkan ke Kabupaten/Kota	Di dukung dalam [Tidak] Ada Belanja Pusat untuk kegiatan yang Tidak/Ada Pada Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pusat yang Tidak Pada Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pusat	Kepemilikan		23.000.000,00	[illegible]
	2.01.01.2.01.0002	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Belajar Non Lainnya														

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]		[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
											[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN [illegible]		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN: TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS: [illegible]	PRIORITAS: [illegible]	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN [illegible]: TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Hulu Sungai Utara [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	Kab. Hulu Sungai Utara [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA SKPD TAHUN [illegible]	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	[illegible]		[illegible]
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Sistem Informasi Kinerja Unit Pengelola Barang Pertahanan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Way Kanan (Alam Bentuk Kecamatan, Kecamatan/Kelas Kab. Way Kanan Utara, Wonosobo, Tengah, Kecamatan	PENGAPUS HILI DINDA (PKU) DINDA (PKU) PENGETA SUNDARA KUNDA (NUM)	(Mengetahui / Menyetujui) (TNI/ Nama dan jabatan atasan/Kepala Unit Pengelola Barang Milik Daerah) (Jabatan Pangkat Nama NIP/NRP)	(Ia menang sebesar Yang Kinda Kini sebesar yang Pokok Hasil Pelayanan Publik dan Investasi Infrastruktur) (Tidak Bisa ditandatangani dan Pelayanan Publik yang tersedia)	SKPD (U.U. Instruksi Pengelola Kabupaten Kota) Sangat Baik			SALAH PERSELANAAN PEMBAYARAN DAN CHARAU PENGELOLAAN KAS PENGELOLAAN
A	0.0.1.01	PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENGELOLAAN PERSELANAAN PEMBAYARAN	Dokumen kesesuaian dan kelengkapan program APLIKASI SIPLAH Sangat Kinda Pemerintah (APP)				100 %	0.0.1.000.000,00							0.0.1.000.000,00	
	0.0.1.02.0.01	Kesesuaian Pengelolaan Kinda Perlengkapan dan Pelengkapan Internal	Dokumen dan Pendataan Program APLIKASI SIPLAH dan PPK Sangat Kinda Kesesuaian (SIPLAH) Lengkap Kondisi Pengelolaan Perlengkapan Pelengkapan				1 Set	1.00.000.000,00			(Mengetahui / Menyetujui) (TNI/ Nama dan jabatan atasan/Kepala Unit Pengelola Barang Milik Daerah) (Jabatan Pangkat Nama NIP/NRP)	(Ia menang sebesar Yang Kinda Kini sebesar yang Pokok Hasil Pelayanan Publik dan Investasi Infrastruktur) (Tidak Bisa ditandatangani dan Pelayanan Publik yang tersedia)	SKPD (U.U. Instruksi Pengelola Kabupaten Kota) Lengkap		1.00.000.000,00	SALAH PERSELANAAN PEMBAYARAN DAN CHARAU PENGELOLAAN KAS PENGELOLAAN
	0.0.1.02.0.01.0001	Kesesuaian Pengelolaan Dokumen Perlengkapan Pelengkapan Sangat Kinda Pemerintah (APP) (PK, SIPLAH, dan PPK)														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Perlengkapan Sangat Kinda Pemerintah yang Dikembalikan Perlengkapan (SIPLAH)				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Way Kanan (Alam, Wonosobo Tengah, Barang Kab	PENGAPUS HILI (PKU)	(Mengetahui / Menyetujui) (TNI/ Nama dan jabatan atasan/Kepala Unit Pengelola Barang Milik Daerah) (Jabatan Pangkat Nama NIP/NRP)	(Ia menang sebesar Yang Kinda Kini sebesar yang Pokok Hasil Pelayanan Publik dan Investasi Infrastruktur) (Tidak Bisa ditandatangani dan Pelayanan Publik yang tersedia)	SKPD (U.U. Instruksi Pengelola Kabupaten Kota) Sangat Baik		12.000.000,00	SALAH PERSELANAAN PEMBAYARAN DAN CHARAU PENGELOLAAN KAS PENGELOLAAN
	0.0.1.03.0.01.0001	Analisis dan Pengelolaan Sistem Informasi Perlengkapan Pelengkapan Sangat Kinda Pemerintah (APP)														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA SPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA SPD TAHUN 2023	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	Kab. Hulu Sungai Utara, [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	Kab. Hulu Sungai Utara, [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	Kab. Hulu Sungai Utara, [illegible]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1 Dokumen	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							1 Laporan									
	[illegible]	[illegible]														
							1 Laporan									
	[illegible]	[illegible]														
							1 Dokumen									
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							1 Laporan									
							1 Laporan									
							1 Laporan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				5 Dokumen	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	[illegible]														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN [illegible]	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN [illegible]	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN [illegible]		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
			[illegible]				1 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2023	[illegible]						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				1 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						[illegible]							[illegible]	
1	[illegible]	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	[illegible]	[illegible]			100 %	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			5 Dokumen	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PENGUKUR / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (KINERJA / KEUANGAN)	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN / OUTPUT	PENANDAAN CAPAIAN TARGET KEGIA / OPD TAHUN [illegible]	DATA/INFO KEGIATAN PENDAHULU					KELOMPOK SASARAN	PAGU/BIAYA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	NOMENCLATURE	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											UNGGULAN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[illegible]				1 paket	[illegible]	Kab. Tidi Kecil (Ibu), Kecamat Tengah Barang Kab.	PENGAPUTAN KELEMBAGA [illegible]	[illegible]	[illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat		[illegible]	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	[illegible]	Ekonomi dan Pengembangan Bisnis, Ekonomi Pembangunan	[illegible]				a. [illegible] b. [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NOMOR KODEFIKASI / KLASIFIKASI / KODE REKENING	TARGET (KUM. PERIODE PERTAMA - [illegible])	REALISASI (LAPORAN BULAN / TRIWULAN / [illegible])	PENAMBAH / (KURANG) TARGET REVISI (PERUBAHAN)	DAFTAR PRIOTAS DAN PENDANAAN Perubahan						KELOMPOK SASARAN	PENURUNAN BAJU MENGENAI TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	NOMENCLATURE	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
											(KUMULATIF)	(TAHUNAN)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Asisten Ekonomi Hasil Pembangunan dan Pengembangan Produksi dan Perdagangan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Ende Dumpit Utara, Ndona, Ndona Timur, Kecamatan Ende	PENGAPUTAN DOKUMEN	(Mendorong [illegible] Ende dan Ndona Timur, Kecamatan Ende [illegible] Ende)	01 - Pengadaan Kabid Kabid Lintas Kecamatan dan Pelayanan Dokumen Sarana Kota Ende [illegible] Kecamatan dan Pengadaan Ende Pelayanan Pelayanan [illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	3.03.02.2.01.0000	Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian														
			Asisten Ekonomi Hasil Pembangunan dan Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian				1 Dokumen	177.044.000,00	Kab. Ende Dumpit Utara, Ndona, Ndona Timur, Kecamatan Ende	PENGAPUTAN DOKUMEN (Rp.)	(Mendorong [illegible] Ende dan Ndona Timur, Kecamatan Ende [illegible] Ende)	01 - Pengadaan Kabid Kabid Lintas Kecamatan dan Pelayanan Dokumen Sarana Kota Ende [illegible] Kecamatan dan Pengadaan Ende Pelayanan Pelayanan [illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	3.03.02.2.11.0000	Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Perdagangan dan Perindustrian														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DAFTAR PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN Program/Kegiatan						[illegible]	PAGU/ALOKASI TAHUN 2024		[illegible]
							TARGET [illegible]	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	NOMENKLATUR	PRODUK KE			VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											[illegible]	[illegible]				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Jumlah Dokumen Hasil Penelaah Dan Pengembang An Kebijakan Pemberdayaan dan Rangkin				1 Dokumen	191.000.000,00	Kota, Nak Sungai Utara, Kecamat Tengah Kabupa Kan	PENGAPLIKA SELEKSIPEN [illegible]	[illegible] n dan Cara dan dan Sasar Jasa Rekre untuk Kecam. K ammadani Dayaan dan Bunda Lainnya [illegible]	[illegible] Cara Efektif yang Lingkun dan Berbag yang Pendidi n Tek Kreatif dan untuk dan Pelayan PUBL yang [illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Pengembangan Ilmu dan Teknologi	Jumlah Dokumen Ilmiah dan Teknologi yang [illegible]				1 Dokumen	[illegible]			[illegible] n dan Cara dan dan Sasar Jasa Rekre untuk Kecam. K ammadani Dayaan dan Bunda Lainnya [illegible]	[illegible] Cara Efektif yang Lingkun dan Berbag yang Pendidi n Tek Kreatif dan untuk dan Pelayan PUBL yang [illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	171.000.000,00	Kota, Nak Sungai Utara, Kecamat Tengah Kabupa Kan	PENGAPLIKA SELEKSIPEN [illegible]	[illegible] n dan Cara dan dan Sasar Jasa Rekre untuk Kecam. K ammadani Dayaan dan Bunda Lainnya [illegible]	[illegible] Cara Efektif yang Lingkun dan Berbag yang Pendidi n Tek Kreatif dan untuk dan Pelayan PUBL yang [illegible]	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Dissemination, sharing, Information, dan Marketing Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan, yang Berbasis Inovasi														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							1 Laporan									
							1 Laporan									

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman yang bersifat konseptual dan operasional dalam melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 ini didasarkan pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selalu sinergitas antara dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menginflementasikan Rencana kerja ini.

Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Penyusunan Renja memerlukan waktu yang cukup panjang sesuai, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

pembangunan dan keuangan daerah beserta perubahannya. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

b. pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;

c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparan akan lebih terwujud;

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

H. M. Haridi, SP, MP
NIP. 19680915 199703 1 004

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan kuasa-Nya jualah sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 1 (satu) tahun kedepan. Renja ini juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2023-2026, Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyajikan secara garis besar kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) selama 1 (satu) tahun kedepan, juga strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*betterperformance*). Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Amuntai, April 2024

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah,

RAHMAD FERIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197401161994031004

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKAD 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD 30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD 61

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD 63

BAB V PENUTUP 80

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara	32
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD	36
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara	41
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Tahun 2023-2026	62
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan 11BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	64

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk mengakomodir program kegiatan ke dalam perencanaan program kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2025.

Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Bupati Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah;

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kurun waktu satu tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 merupakan tahun ketiga tahapan Renstra 2023 - 2026.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Terwujudnya sinergi dan kesinambungan pencapaian tujuan dalam RENSTRA BPKAD dan RENJA BPKAD Tahun 2025.
3. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja 2025 ke dalam RKA BPKAD Tahun 2025.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja BPKAD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB V PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada Bab ini akan memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian Tahun Berjalan (Tahun 2024). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2023 dan capaian renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL 2.1 (T.C 29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DEARAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**95.00%**	**90.00%**	**95.00%**	**92.00%**	**97.00%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja BPKAD**	**95.00%**	**95.00%**	**95.00%**	**92.00%**	**97.00%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen erubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	10 Lap	100%
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD**	**95.00%**	**95.00%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Org/bln	39 Org /bln	39 Org /Bln	39 Org /bln	100%	39 Org /Bln	39 Org /Bln	100%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
5	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD**	**95.00%**	**99.18%**	**95.00%**	**99.18%**	**100%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi**	**95.00%**	**71.08%**	**95.00%**	**71.08%**	**74.82%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	39 Paket	39 Paket	39 Paket	100%	39 Paket	39 Paket	100%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan	5 Org	0 Org	5 Org	5 Org	100%	5 Org	5 Org	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	0 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**95.00%**	**92.99%**	**95.00%**	**92.99%**	**97.89%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	100%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	57 Paket	60 Paket	57 Paket	95%	60 Paket	60 Paket	100%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	10 Paket	95 Paket	95 Paket	95 Paket	100%	95 Paket	95 Paket	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	85 Lap	90 Lap	85 Lap	94.44%	90 Lap	90 Lap	100%
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.00%**	**94.84%**	**95.00%**	**94.84%**	**99.83%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	100 Lap	100 Lap	100 Lap	100%	100 Lap	100 Lap	100%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	100 Lap	100 Lap	100 Lap	100%	100 Lap	100 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	87 Lap	90 Lap	87 Lap	96.67%	90 Lap	90 Lap	100%
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.00%**	**68.01%**	**95.00%**	**68.01%**	**71.59%**	**95.00%**	**95.00%**	**100%**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	4 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	85 Unit	90 Unit	85 Unit	94.44%	90 Unit	90 Unit	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitas	1 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100%	90 Unit	90 Unit	100%
5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase SKPD yang menyusun perencanaan anggaran tertib dan akuntabel**	**90.00%**	**66,86%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perubahan PPAS	perubahan PPAS yang disusun								
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terselenggaranya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						daerah								
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	156 Dok	156 Lap	156 Lap	156 Lap	100%	156 Lap	156 Lap	100%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Laporan Realisasi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang pelaporan keuangan daerahnya tertib dan akuntabel**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan,Pendapatan LO, dan Beban	17 Dok	17 Dok	17 Dok	17 Dok	100%	17 Dok	17 Dok	100%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	7 Lap	7 Lap	7 Lap	7 Lap	100%	7 Lap	7 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi								
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakandan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pemerintah Daerah								
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	38 Orang	0	38 Orang	0	0%	38 Orang	38 Orang	100%
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yg dibina	14 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	100%	12 Lembaga	12 Lembaga	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentasse terselenggaranya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**	**90.00%**	**90.00%**	**100%**
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100%	3 Lap	3 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	6 Lap	6 Lap	100%
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100%	3 Lap	3 Lap	100%
				3										
5	02	03			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel**	**85.00%**	**90.00%**	**85.00%**	**76.20%**	**89.64%**	**85.00%**	**85.00%**	**100%**
5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase SKPD yang tertib**	**85.00%**	**86.08%**	**85.00%**	**67.83%**	**79.80%**	**85.00%**	**85.00%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						pengelolaan Barang Milik Daerah								
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lap	8 Lap	125 Lap	98 Lap	78.4%	125 Lap	125 Lap	100%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah LaporanHasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	125 Lap	52 Lap	52 Lap	52 Lap	100%	52 Lap	52 Lap	100%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang yang dilakukan Optimalisasi	52 Lap	31 Lap	52 Lap	31 Lap	60%	52 Lap	52 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renstra BPKAD Tahun 2023	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah									
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52 Lap	52 Lap	52 Lap	52 Lap	100%	52 Lap	52 Lap	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pada tabel 2.1 tersebut terlihat hampir semua program tingkat realisasinya sudah memenuhi target kinerja atau berhasil. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggap berhasil karena semua peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan telah dipenuhi sesuai keperluan. Sub Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan juga berhasil dimana semua laporan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur juga dikategorikan berhasil,

Pada program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah dikategorikan berhasil dan tidak ada kendala dalam kegiatannya. Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah salah satu Sub kegiatannya yaitu pengamanan aset/barang milik daerah dari yang ditargetkan yaitu penyertifikatan 125 parcil tanah sampai akhir tahun masih dalam di proses dikarenakan data tanah yang akan disertifikati masih kurang informatif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, karena itu tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

"**Persentase SKPD Yang Pengelolaan Keuangan Daerahnya Tertib dan Akuntabel**"

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tabel 2.2 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL 2.2 (T- C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	-	-	95%	95%	95%	95%	96.8%	-	95%	95%	Semua Laporan Kinerja dibuat sudah sesuai dengan ketentuan
2	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	-	-	95%	95%	95%	95%	94.2%	-	95%	95%	Semua laporan yg dibuat sudah sesuai dengan ketentuan
3	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	-	-	95%	95%	95%	95%	100%	-	85%	85%	Semua Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD telah diselesaikan
4	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	-	-	95%	95%	95%	95%	74.8%	-	95%	95%	Sedikitnya Bimtek & sosialisasi peraturan perundang2an yg diadakan instansi yg berkompeten sehingga BPKAD jg terbatas mengikutinya
5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	-	-	95%	95%	95%	95%	97.89%	-	90%	90%	Semua peralatan & perlengkapan kantor yg diperlukan sudah terpenuhi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95%	95%	95%	95%	99.8%	-	95%	95%	Listrik,air internet dan pelayanan terpenuhi
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95%	95%	95%	95%	71%	-	90%	90%	Penyediaan jasa pemeliharaan sudah terpenuhi
8	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	-	95%	95%	Semua SKPD membuat DPA SKPD tepat waktu
9	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	-	90%	90%	Semua SP2D yg diterbitkan telah dicairkan ke Bank Kalsel selaku kas daerah
10	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	-	-	90%	90%	90%	90%	86.2%	-	100%	100%	Semua SKPD wajib membuat & menyampaikan laporan keuangan SKPD yang akuntabel

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	-	100%	100%	Terselesaikannya semua kewajiaban Pemda Kab. HSU
12	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	85%	85%	85%	85%	79.8%	-	85%	90%	Semua SKPD melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan di yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 2.3
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN RENCANA 2025

No.	Permasalahan	Data Dukung	Follow Up /Tindak lanjut ke depan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
1.	Kurang / Masih terbatasnya sumber daya Aparatur di BPKAD	Dok Anjab (peta jabatan)	Penambahan jumlah Sumber daya Apratur di BPKAD	Prog. Penunjang Urusan Pemda Kab./Kota
2.	Keterlambatan Penetapan RKPD menyebabkan Jangka Waktu Penyusunan KUA PPAS sangat pendek mendekati batas akhir penyampaian sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.	Dokumen KUA dan PPAS	Berkoordinasi dengan Instansi terkait agar penyelesaian penyusunan RKPD bisa lebih cepat	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Permasalahan	Data Dukung	Follow Up /Tindak lanjut ke depan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
3.	Perubahan kebijakan terkait penganggaran pada masing-masing SKPD menyebabkan proses entryan pada aplikasi SIPD membutuhkan waktu yang lama, selain itu juga adanya pergantian operator yg bertugas melakukan entryan rincian sub kegiatan pada SKPD juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian penginputan data pada SIPD. sehingga penyusunan Perda dan Perbup Penjabaran APBD Murni berpotensi terlambat dari rencana yg telah ditetapkan.	Perda dan Perbup Penjabaran APBD Murni	Berkoordinasi secara inten dengan Operator SKPD baik melalui group WA maupun Tatap muka untuk mengetahui permasalahan/kendala yang mereka hadapi, sehingga bisa dicarikan solusi secara cepat dan tepat	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4.	Ruangan Kerja Yang kurang refresentatif mengurangi kenyamanan dalam bekerja dan pelayanan terhadap tamu yang sering datang utk berkonsultasi		Mengusulkan rehab ruangan /upgrade meubeler kantor	
5.	Kebijakan Daerah yang berubah-rubah yang kadang-kadang bertabrakan dengan regulasi yang ada, sehingga perlu dicarikan alternatif lain yang sesuai dengan regulasi. Hal ini tentunya menyita waktu dan tenaga.		Perlu lebih banyak membaca regulasi agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Permasalahan	Data Dukung	Follow Up /Tindak lanjut ke depan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
6.	Jumlah SDM yang terbatas tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang ada, sehingga membutuhkan waktu kerja tambahan dimalam hari.		Mengusulkan tambahan SDM yang berkompeten dan mempunyai integritas tinggi terhadap pekerjaan	
7.	Kurang Optimalnya respon SKPD terhadap pengumpulan Data RAB ASB baik Fisik dan non fisik utk penyusunan ASB Kab. HSU	Data ASB SKPD yang masuk	Perlu Komunikasi dan kerjasama Yang lebih intens antara BPKAD dan mitra SKPD terkait	
8.	Adanya anggaran Kas dibuat pada triwulan II sedangkan kegiatan di triwulan I		Di harapkan dalam pembuatan anggaran Kas di sesuaikan dgn kegiatan yg akan dilaksanakan dan lebih teliti lagi	Penyiapan, pelaksanaan pengedalian dan perbitan Anggaran Kas dan SPD
9.	Dalam penerbitan SP2D masih terdapat kesalahan Penyantuman rekening pihak III/rekening Bank yg bersangkutan dan telah di verifikasi oleh PPK SKPD		PPK SKPD harus lebih teliti lagi dlm melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan penerbitan SPM	
10.	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Anggaran Kas dan SPD		Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran Kas dan SPD	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Permasalahan	Data Dukung	Follow Up /Tindak lanjut ke depan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
11.	PPTK Sebagian besar tidak memiliki kartu Kendali		Diharapkan semua PPTK mempunyai Kartu Kendali	
12.	Data Aset masih belum informatif, di karenakan sebagian pengurus barang belum menguasai tata kelola BMD dengan baik	SK	Perlu adanya penambahan wawasan yg memadai baik dgn diadakannya sosialsasi Bimtek baik utk pengurus barang yg baru maupun yg lama	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD
13.	Masih banyak aset yg dalam kondisi rusak berat tetapi belum dilakukan penghapusan	Dokumen usulan dari SKPD	Meminta SKPD pengguna barang utk mengusulkan brg yg sdh berubah kondisi rusak berat	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD
14.	Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan pada SKPD pengguna barang	Sertifikat	Perlu adanya sosialisasi/ Bimtek terkait perencanaan BMD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah
15.	Masih terdapat Aset tanah yg belum bersifikat	Plang Nama	Meningkatkan lagi sinergi antara Pemkab HSU dan BPN Kab. HSU dlm hal percepatan persetifikatan Tanah	
16.	Masih terdapat Aset Tanah dan Bangunan yg belum dipasang Plang		Mamaksimalkan pemasangan Plang Pada asset tanah dan bangunan	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Permasalahan	Data Dukung	Follow Up /Tindak lanjut ke depan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
17.	Regulasi di bidang keuangan khususnya terkait Akuntansi dan pelaporan sangat dinamis		Melakukan koordinasi dan konsultasi dan penyesuaian system, prosedur dan kebijakan Daerah dgn peraturan Pemerintah pusat	Kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
18.	Sistem informasi manajemen keuangan yg dipegunakan dalam menyusun lporan berbasis Web sering terkendala jaringan internet		Perlu peningkatan kapasitas jaringan internet yg stabil	Kegiatan admistrasi umum perangkat daerah
19.	Kapasitas aparatur yg terkait dgn pelaporan keuangan, baik dibidang akuntansi maupun SKPD belum memadai		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melaui FGD, Bimtek, Workshop, dll	Diklat Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL 2.4 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM RUTIN					**PROGRAM RUTIN**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPKAD**	**Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**95%**	**41.114.903.788**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPKAD**	**Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**95%**	**41,114,907,438**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**BPKAD**	**Persentase Capaian Kinerja BPKAD**	**95%**	**55.378.550**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BPKAD**	**Persentase Capaian Kinerja BPKAD**	**95%**	**55,378,550**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.499.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3,499,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	3.557.850	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	3,557,850	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.629.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3,629,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen erubahan DPA-SKPD	1 Dok	3.526.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen erubahan DPA-SKPD	1 Dok	3,526,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	41.164.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	41,164,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**BPKAD**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD**	**95%**	**38.838.604.154**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BPKAD**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD**	**95%**	**38,838,604,154**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Org	38,790,604,954	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Org	38,790,604,954	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.999.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10,999,550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	36.999.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Lap	36,999,650	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**BPKAD**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD**	**95%**	**7.596.250**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BPKAD**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD**	**95%**	**7,599,900**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3.296.450	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3,300,100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4.299.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4,299,800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**BPKAD**	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah	**95%**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BPKAD**	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah	**95%**	**82,858,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Unit	82,858,000	Sub kegiatan baru karena penyesuaian kode rekening karena sebelumnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											disub kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**BPKAD**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi**	**95%**	**622.964.300**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BPKAD**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi**	**95%**	**622,964,300**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	73.180.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	73,180,000	
	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan	5 Org	7.994.300	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan20 O	5 Org	7,994,300	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	541.790.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	541,790,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**BPKAD**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**95%**	**667.273.794**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BPKAD**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**95%**	**688,951,794**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	380.163.194	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	401,841,194	Pergeseran pagu anggaran Pengadaan PC, Laptop, TV dan Sacnner
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	75.990.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	75,990,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	11.195.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	11,195,600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	199.925.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	199,925,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BPKAD**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana**	**95%**	**341.280.740**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKAD**	**Persentase pemenuhan sarana dan**	**95%**	**381,480,740**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	14.565.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	14,565,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	216.180.640	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	216,180,640	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	110.534.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	150,734,600	Pergeseran Pagu di sub Kegiatan Peralatan dan Mesin
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BPKAD**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara**	**95%**	**581.806.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKAD**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara**	**95%**	**437.070.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	20 Unit	187.166.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	40 Unit	207.630.000	Berdasarkan Perbup nomor 2 Tahun

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Jabatan		Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Jabatan		Pajak dan Perizinannya			2024 ttg Perubahan atas peraturan Bupati Hulu sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	244.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	79.500.000	Pergeseran pagu untuk dialihkan ke sub kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	149.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	149.940.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Dipelihara /Direhabilitas					yang Dipelihara /Direhabilitas			
	PROGRAM TEKHNIS SKPD					PROGRAM TEKHNIS SKPD					
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**BPKAD**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90%**	**252.766.494.661**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**BPKAD**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**90%**	**252,952,808,511**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu**	**90%**	**1.003.338.400**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu**	**90%**	**1,189,655,400**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang disusun	1 Dok	153.690.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang disusun	1 Dok	245,300,000	TIM Satgas SHS
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 Dok	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 Dok	12,500,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	87.274.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	87,274,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dok	749.874.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dok	844,581,000	Tim TAPD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel**	**90%**	**229.691.950**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel**	**90%**	**229,690,150**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	156 Dok	45.874.450	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	156 Dok	45,874,400	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK	12 Lap	89.317.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK	12 Lap	89,317,550	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	94.499.550	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	94,498,200	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel**	**90%**	**493.749.050**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel**	**90%**	493,747,700	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan LO, dan Beban	17 Dok	14.303.200	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan LO, dan Beban	17 Dok	14,303,200	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Lap	52.612.850	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Lap	52,612,700	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Lap	108.350.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Lap	108,349,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	75.244.200	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	75,243,500	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dok	87.589.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dok	87,588,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakandan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	18.259.800	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakandan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	18,259,700	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	24.320.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	24,320,000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	38 Orang	61.550.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	38 Orang	61,550,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kab/Kota yg dibina	14 Lembaga	51.520.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kab/Kota yg dibina	14 Lembaga	51,520,000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**BPKAD**	**Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**90%**	**251.039.715.261**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**BPKAD**	**Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**90%**	**251,039,715,261**	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil AnalisisPerencanaan dan PelaksanaanPembayaran Cicilan Pokok danBunga Pinjaman PemerintahDaerah	4 Lap	3.759.667.603	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil AnalisisPerencanaan dan PelaksanaanPembayaran Cicilan Pokok danBunga Pinjaman PemerintahDaerah	4 Lap	3,759,667,603	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	231.750.593.339	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	231,750,593,339	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	13.404.454.319	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	13,404,454,319	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Lap	2.125.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Lap	2,125,000,000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**BPKAD**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel**	**85%**	**758.101.600**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**BPKAD**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel**	**85%**	**758,101,100**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah**	**85%**	**758.101.600**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**BPKAD**	**Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah**	**85%**	**758,101,100**	
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Satuan Harga	1 Dok	45.659.800	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Satuan Harga	1 Dok	45,659,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	49.924.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Lap	49,924,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	208.965.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	208,965,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	125 Lap	252.784.600	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	125 Lap	252,784,300	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah LaporanHasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	52 Lap	78.514.600	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah LaporanHasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	52 Lap	78,514,600	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang yang dilakukan Optimalisasi	52 Lap	93.091.800	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang yang dilakukan Optimalisasi	52 Lap	93,091,800	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52 Lap	29.161.600	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	52 Lap	29,161,600	
					294.639.500.049					**294.825.817.049**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dalam perencanaan TA 2025 ini Bidang Aset BPKAD menambahkan 2 Sub Kegiat baru yaitu dan Penatausahaan BMD (Sensus BMD) hal ini di karenakan pentingnya pembinaan pejabat penatausahaan Keuangan dalam Laporan BMD SKPD karena regulasi mengenai penatausahaan keuangan dan asset yang sangat dinamis, sehingga di perlukan pembinaan yang sifatnya terus menerus. Dengan anggaran **Rp. 208.965.200,-** dan Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD dengan anggaran **Rp. 49.924.000,-**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 30 Desember 2013 dan Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan tahun 2024 mengacu kepada arah kebijakan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, serta dengan mengikuti perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional serta internasional. Dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 terarah pada :

1. Peningkatan produksi barang dan jasa yang berbasis pada potensi ekonomi lokal;
2. Meningkatnya lapangan kerja yang disertai penyerapan tenaga kerja;
3. Pemberdayaan dan revitalisasi lembaga ekonomi lokal;
4. Peningkatan investasi serta permodalan.

Adapun arah kebijakan ekonomi pada tahun 2024 diarahkan sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Meningkatkan efektivitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib dan akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan dan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Nilai SAKIP BPKAD.
2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya tertib dan akuntabel.
3. Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah:

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

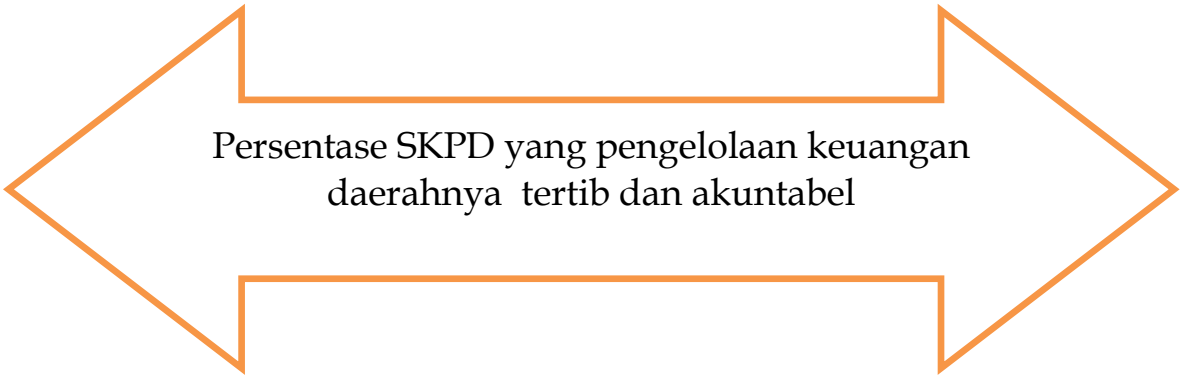
TABEL 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. HSU

VISI : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif						
MISI: Terwujudnya Sistem Pengelolaan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-			
1	2	3	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pelaksanaan dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan akuntabel, efektif dan efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %	95 %	95 %	95 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan Kinerja dan keuangan Daerah Kabupaten HSU yang akuntabel	Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel	90 %	90 %	90 %	90 %
Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Terlaksananya tertib administrasi dan ssstem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta barang milik daerah	Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	85%	85 %	85%	85 %

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin di capai yaitu :



Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merencanakan program dan kegiatan tahun 2025 yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Pada Tabel 4.1 berikut dapat dilihat Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU 2026 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				A	PROGRAM RUTIN								
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	95%	41,114,907,438	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	95%	39.637.252.030
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja BPKAD	BPKAD	95%	55,378,550	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	95%	55.378.550

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	1 Dok	3,499,500	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	3.499.500
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	1 Dok	3,557,850	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	3.557.850
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKAD	1 Dok	3,629,700	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	3.629.700
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen erubahan DPA-SKPD	BPKAD	1 Dok	3,526,700	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	3.526.700
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	BPKAD	10 Lap	41,164,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	10 Lap	41.164.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD	**BPKAD**	**95%**	**38,838,604,154**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**38.838.604.154**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	39 Org	38,790,604,954	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	39 Org	38.790.604.954
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	1 Lap	10,999,550	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Lap	10.999.550
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan	BPKAD	4 Lap	36,999,650	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	4 Lap	24.999.650

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD							
5	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah BPKAD	**BPKAD**	**95%**	**7,599,900**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**7.596.250**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Dok	3,300,100	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	3.296.450
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	4 Lap	4,299,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	4 Lap	4.299.800
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya Barang Milik Daerah**	**BPKAD**	**95%**	**82,858,000**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**0**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPKAD	2 unit	82,858,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	2 unit	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	**BPKAD**	**95%**	**622,964,300**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**107.419.300**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD	39 Paket	73,180,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	39 Paket	73.180.000
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan	BPKAD	5 Org	7,994,300	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	5 Org	7.994.300
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	50 Org	541,790,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	50 Org	26.245.000
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	**BPKAD**	**95%**	**688,951,794**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**317.110.600**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	20 Paket	401,841,194	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	20 Paket	30.000.000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	60 Paket	75,990,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	60 Paket	75.990.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	10 Paket	11,195,600	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	10 Paket	11.195.600
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	50 Lap	199,925,000	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	Pencapaian SDG's	50 Lap	199.925.000
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BPKAD**	**95%**	**381,480,740**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**323.280.740**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	12 Lap	14,565,500	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	12 Lap	14.565.500

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	12Lap	216,180,640	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	12Lap	216.180.640
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	12 Lap	150,734,600	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	12 Lap	92.534.600
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara**	**BPKAD**	**95%**	**437,070,000**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**95%**	**331.600.000**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD	20 Unit	207,630,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	20 Unit	151.908.000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD	20 Unit	79,500,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	90 Unit	159.700.000
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitas	BPKAD	1 Unit	149,940,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	90 Unit	19.992.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				B	**PROGRAM TEKHNIS SKPD**								
5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel**	**BPKAD**	**90%**	**252,952,808,511**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**90%**	**251.847.421.619**
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu**	**BPKAD**	**90%**	**1,189,655,400**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**90%**	**635.391.400**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang disusun	BPKAD	1 Dok	245,300,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	12.500.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 Dok	12,500,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	12.500.000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	BPKAD	1 Dok	87,274,400	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	87.274.400

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Penjabaran APBD							
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	1 Dok	844,581,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	523.117.000
5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel	**BPKAD**	**90%**	**229,690,150**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**90%**	**229.691.950**
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	156 Dok	45,874,400	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	156 Dok	45.874.450

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan,Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	12 Lap	89,317,550	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	12 Lap	89.317.950
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	BPKAD	12 Dok	94,498,200	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	12 Dok	94.499.550

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Instansi Terkait							
5	02	02	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	**BPKAD**	**90%**	493,747,700	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**90%**	**493.749.050**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan , Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan LO, dan Beban	BPKAD	17 Dok	14,303,200	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	17 Dok	14.303.200
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	4 Lap	52,612,700	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	4 Lap	52.612.850

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	7 Lap	108,349,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	7 Lap	108.350.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	2 Dok	75,243,500	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	2 Dok	75.244.200
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 Dok	87,588,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	87.589.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	02	2.03	09	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakandan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Dok	18,259,700	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	18.259.800
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Dok	24,320,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	24.320.000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	BPKAD	38 Orang	61,550,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	38 Orang	61.550.000
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yg dibina	BPKAD	14 Lembaga	51,520,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	14 Lembaga	51.520.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**BPKAD**	**90%**	**251,039,715,261**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**90%**	250.559.441.319
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	4 Lap	3,759,667,603	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	4 Lap	3.307.987.000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	3 Lap	231,750,593,339	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	3 Lap	231.722.000.000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	2 Lap	13,404,454,319	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	2 Lap	13.404.454.319

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	3 Lap	2,125,000,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	3 Lap	2.125.000.000
5	02	03			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel**	**BPKAD**	**85%**	**758,101,100**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	**85%**	**517.776.400**
5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan Barang Milik Daerah	**BPKAD**	85%	**758,101,100**	**Trans Umum-Dana Bagi Hasil**	**Pencapaian SDG's**	85%	**517.776.400**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga	BPKAD	1 Dok	45,659,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Dok	45.659.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Lap	49,924,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Lap	49.924.000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Lap	208,965,000	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	1 Lap	208.965.200
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	125 Lap	252,784,300	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	125 Lap	252.784.600
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah LaporanHasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	52 Lap	78,514,600	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	52 Lap	78.514.600
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yang yang dilakukan Optimalisasi	BPKAD	52 Lap	93,091,800	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	52 Lap	61.731.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	52 Lap	29,161,600	Trans Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian SDG's	52 Lap	29.161.600
									294.825.817.049				**294.639.500.049**

Jumlah Program = 3

Jumlah Kegiatan = 12

Sub Kegiatan = 51

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan salah satu alat perencana untuk mencapai tujuan dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;

b. Merencanakan berbagai program kegiatan ;

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak terkait berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja BPKAD.

Amuntai, April 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,



RAHMAT HERIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197401161994031004

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Jend. A. Yani No. 04 Amuntai Telp (0527) 61056 - 61788
Kode Pos 71414

RANCANGAN AKHIR
RENJA (RENCANA KERJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025



BANGGA BAYAR PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK BERSAMA
BANGUN BANUA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD juga disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2025. Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan..

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Rancangan Awal Renja BAPENDA, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan BAPENDA Kab HSU;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
   j. Pembahasan forum;

Penyesuaian dokumen Rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Perumusan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target kinerja Bapenda;
   b. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per bidang;
   c. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi satu kesatuan utuh Renja Bapenda.

1.2. Landasan Hukum

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (tentang Tahapan,) Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 20162021 tentang Perubahan Atas Peraturan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.
k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah dalam rangka memaksimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program dimasa yang akan datang.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Bapenda
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN BAPENDA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2025 dan Capaian Renstra 2025.

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. **8.815.755.034,00,-** dengan realisasi sebesar Rp. **852.484.740,00-**atau sebesar **9,67%**. Adapun hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
I.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.954.688.700,00,-**	**29.764.000,00,-**	**1,52%**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.954.688.700,00,-	29.764.000,00,-	1,52%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	28.228.000,00	1.358.000,00	4,81%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	861.129.200,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	17.040.000,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	193.675.300,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	70.340.000,00	11.022.000,00	15,67%
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	271.054.200,00	2.700.000,00	1,00%
	Penilaian Pajak PBB P2 dan BPHTB	152.381.000,00	0,00	0,00%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	350.491.000,00	14.684.000,00	4,19%
	Penagihan Pajak Daerah	10.350.000,00	0,00	0,00%
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.861.075.334.00,-**	**696,521,050,00,-**	**11,99%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.500.000,-**	**0,00,-**	**2,33%**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,-	0,00,-,-	2,33%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.956.408.079,00,-**	**584.075.164,00**	**0,13%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.954.908.079,00	584.075.164,00	1%
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun	1.500.000,-	0,-	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**272.747.850,00**	**30,038,310,00**	**15,30%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.269.650,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.738.500,00	1.890.000,00	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.978.700,00	3.965.150,00	0,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.761.000,00	24.183.160,00	0,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**70.680.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	70.680.000,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	50.000.000,00	0,00	0.00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**46.123.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	46.123.300,00	5	10,87%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**403.497.105,00**	**74,866,848,00**	**5,50%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.525.105,00	26.636.848,00	22%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.972.000,00	48.230.000,00	24,73%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**110.110.000,00**	**7,540,728,00**	**3,14%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.300.000,00	7,540,728,00	5%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8.950.000,00	0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	6.860.000,00	40,00	0,00%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
JUMLAH		**8.815.764.034.00**	**726.285.050.00**	**8,24%**

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja anggaran sebesar Rp. **726.285.050.00,-** dari anggaran sebesdar Rp **8.815.764.034.00,-** atau sebesar **8,24%.** Dari realisasi **8,24%.** tersebut masih kecil karena baru Triwulan I.

Adapun capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan Daerah	BB	BB	100%
2.	Meningkatnya Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD	1,91%	1,5%	79%
3.	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD	13,8%	18,73%	136%
4.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah PAD	151.552.203.799	153.645.369.639	101,38%
5.	Menurunnya Jumlah Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Tungggakan Pajak Retribusi Daerah	0,5%	2718%	136%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Pelayanan pembayaran pajak tunai dan non tunai.
2. Pelayanan pembayaran retribusi.
3. Pelayanan pembayaran penerimaan lain – lainnya.
4. Melakukan rapat – rapat , konsultasi dan koordinasi dengan dinas instansi terkait, mitra kerja dalam hal perencanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan pendataan, penilaian, penetapan, pembukuan, penagihan, monitoring,evaluasi, pengawasan, sosialisasi atau penyuluhan kepada para wajib pajak.
6. Melakukan konsultasi, koordinasi dan tukar menukar informasi dengan daerah atau provinsi lain dalam hal pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

Dari berbagai cara kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Badan Pendapatan Daerah untuk pajak dan retribusi daerah telah mencapai target yang ditentukan. Walaupun sudah tercapai target namun Badan Pendapatan Daerah akan tetap berusaha memaksimalkan penerimaan PAD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2025 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan kegiatan(Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)
1	2	3			4	5	6	9	10	11
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	80,00	100%	100%	80,00	80,00	80,00	0,00	79,67
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	9,67

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Laporan	12 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	7 Laporan	5 Lapo n
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**64,79%**	**64,79%**	**100%**	**0,13%**	**0,00%**
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	1	0,25
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Realisasi Kegiatan administrasi Kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	54,52%	54,52%	**100%**	0,00%	0,00%
5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	2 orang	1 Orang	1 Orang	10 Orang	0 Orang	0 Orang
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**100%**	**97%**	100%	93,05%	93,05%	**100%**	15,30%	15,30%
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	17 Jenis	4 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	0 Paket	10Paket
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	100%	4 Paket	3 Paket	3 Paket	4 Paket	0 Paket	0 Paket
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2Paket	90%	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0 Paket
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 Laporan	95%	75 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	75 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
5.02.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**100%**	100%	94,50%	94,50%	**100%**	10,87%	0,00%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	5 Unit	39 unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit	5 Unit	5 Unit	10,8[illegible]6
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi laporan**	**100%**	**100%**	100%	94,66%	94,66%	**100%**	5,50%	0,00%
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	100%	60 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	60 Laporan	22 Laporan	11,00%
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	80 Laporan	100%	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	0 Laporan	0,00%
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**95%**	100%	87,37%	87,37%	**100%**	3,14%	0,00%
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 Unit	95%	28 Unit	25 Unit	25 Unit	28 Unit	5 Unit	9,43%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit	95%	36 Unit	22 Unit	22 Unit	36 Unit	0 Unit	0 Ui
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
05.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**184.427.191.653,00**	**1.160.967.750,00**	**151.552.000.000,00**	**153.645.369.639,00**	**153.645.369.639,00**	**184.427.191.653,00**	**24.672.785.657,00**	**13,38**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**184.427.191.653,00**	**1.160.967.750,00**	**151.552.000.000,00**	**153.645.369.639,00**	**153.645.369.639,00**	**184.427.191.653,00**	**24.672.785.657,00**	**13,38**
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	2000 WP	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	1500 WP/WR	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	0 Laporan	0 Laporan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	2000 WP	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan	1500 Layanan	50 Layanan	50 Layan
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian,dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	1400 Objek Pajak	56889 NOP PBB P2	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	1400 Objek Pajak	40 Objek Pajak	40 Objek Pajak
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90750 Dokumen	30000 Ketetapan	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen	90750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	7112 Dokumen	112 Dokumen	11[illegible] Dokum

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran PAD. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2		3	4	5	6	7			8	9	12
1.	Nilai SAKIP		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	78,00	79,00	80,00	80,50	78,41	79,67	80,00	80,50	
2.	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	0,10%	0,10%	0,20%	0,21%	0,10%	0,15%	0,20%	0,21%	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dihadapkan pada permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut maka diidentifikasi tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi selama ini yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PAD antara lain :

Identifikasi tantangan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik, hal ini tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat tentang apa itu pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk apa pajak daerah dan retribusi daerah tersebut digunakan.
- Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya.
- Belum terintegrasinya aplikasi pajak dan retribusi daerah dengan baik.

Identifikasi peluang :

- Tuntutan kemajuan teknologi /pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Melakukan inovasi-inovasi baik pengembangan aplikasi sehingga dapat terintegrasi dengan baik ataupun pelayanan pendapatan.
- Adanya kesadaran Wajib Pajak yang menghitung dan meyetorkan sendiri kewajiban pajaknya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau isu - isu strategis yang dihadapi antara lain :

A. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

a. Perlunya peningkatan kualitas pendataan dan pendaftaran objek pajak, subyek pajak dan wajib pajak dengan cara pemutakhiran data, baik data pajak dan retribusi maupun data wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

b. Aplikasi perpajakan agar segera diintegrasikan.

c. Adanya regulasi pajak dan retribusi segera disesuaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

d. Peningkatan SDM dibidangnya.

B. Bidang Penetapan dan Penagihan

a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, retribusi dan PBB-P2.

Objek dari PBB-P2 ini adalah seluruh Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau jenis pajak ini mempunyai objek yang cukup banyak baik yang ada diperkotaan maupun pedesaan, sehingga masih banyak wajib pajaknya yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak disamping juga ada yang belum memahami arti kewajiban membayar pajak.

Hal tersebut menyebabkan piutang PBB-P2 ini semakin tahun semakin bertambah.

b. Belum adanya aturan yang mensyaratkan dalam setiap pengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Desa dengan melampirkan pelunasan PBB-P2 baik oleh PNS mapun masyarakat sebagai Wajib Pajak.

c. Aplikasi perpajakan yang ada belum terintegrasi dengan baik.

d. Penagihan belum dapat dilakukan secara optimal karena terbatasnya SDM yang ada.

C. Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi

a. Sarana dan Prasarana masih belum memadai.

b. Aplikasi belum terintegrasi dengan baik dan perlu pengembangan sesuai dengan keperluan dan perkembangan teknologi.

c. Masih diperlukan rekonsiliasi penerimaan secara manual dengan SKPD pemungut dan Kecamatan.

d. Masih Kurangnya SDM dan Tenaga IT dibidangnya.

Berdasarkan isu – isu strategis diatas, maka Badan Pendapatan Daerah selalu berupaya mengatasinya dengan melakukan langkah-langkah antara lain :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak dan wajib retribusi daerah agar berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara taat membayar pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak/ retribusi daerah.

2. Koordinasi atau kerjasama dengan Dinas instansi terkait atau instansi pemungut untuk membangun persepsi/komitmen dalam rangka pencapaian target pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan secara tunai maupun non tunai.

4. Meningkatkan pelaksanaan penagihan langsung terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengupayakan penghapusan tunggakan.

5. Aplikasi pajak dan retribusi yang ada segera dapat berintegrasi dengan baik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan merupakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2025. Pada Bab ini memuat tentang Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.31
Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Badan Pendapatan Daerah

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rincian Substansi Kegiatan	Kebutuhan Dana (RP)	Dukungan Terhadap Program Prioritas SAJIWA	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	184.427.191.653,00			Program ini mendukung Program prioritas SAJIWA yaitu HSU Juara Program OVOC dan Sinergis dengan Misi 01 yaitu Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya saing	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	184.427.191.653,00				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat tentang kesadaran membayar pajak	28.224.100,00		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	24 Laporan	Adanya kegiatan Opsen yang bekerja sama	2.328.346.050,00		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		dengan Samsat (Samsat Keliling) yang Dilakukan di seluruh Kecamatan			
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1500 Layanan	Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam membayar pajak baik secara langsung maupun online	17.040.000,00		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Melaksanakan pemungutan dan penagihan langsung kepada wajib Pajak /retribusi daerah pada jenis retribusi yang belum terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah (SIMPATDA) secara online	230.462.300,00		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	12 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, Bank Kalsel Pusat mengenai penambahan chanel pembayaran dalam rangka pengembangan ETPD	86.840.000,00		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian,dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi serta Surveillance check pemungutan pajak dan retribusi daerah serta benda berharga pada SKPD/Desa dan Sekolah	265.054.200,00		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	1400 Objek Pajak	Melaksanakan Penilaian Objek Pajak dengan Menggunakan Metode	274.199.800,00		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Perbandingan Harga, Nilai Perolehan Baru, Nilai Jual. Serta Melaksanakan Penyuluhan terkait Objek BPHTB dan PBB P2.			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90800 Dokumen	Menghitung Menetapkan Pajak, Membuat Laporan Perhitungan & Penetapan, Meneliti dan Memverifikasi data Pajak, Legalisasi Tanda Lunas Pajak.	364.342.000,00		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8112 Dokumen	Upaya untuk meningkatkan Penagihan Tunggakan Pajak, Menerbitkan Surat Teguran , Menerbitkan Surat Paksa, Penyitaan, Lelang dan Penyanderaan	603.455.000,00		
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	100%			Program ini mendukung Program prioritas SAJIWA yaitu HSU Madani Program GEMA (Generasi Maju Aparatur) dan Sinergis dengan Misi 04 yaitu Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	**Persentase Pemenuhan Sarana**	100%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**dan Prasarana Kerja**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	Membuat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	14.751.000,00		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	100%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	7.494.954.458,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Membuat Laporan Keuangan	1.500.000,00		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	100%				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.680.000,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0		
	Kegiatan Administrasi	**Persentase**	100%				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10 Paket	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.636.600,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	10 Paket	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	33.994.650,00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	8 Paket	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.602.100,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.143.400,00		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	100%		448.568.300,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya Yang Tersedia	25 Unit	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	448.568.300,00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	100%		403.497.105,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	60 Laporan	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.125.105,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	80 Laporan	MenyediakanJasa Pelayanan Umum Kanto	182.772.000,00		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	100%		110.110.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.300.000,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	36 Unit	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.188.000,00		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada Undang-undang nomor 23 pasal 285 tahun 2014 dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jika kita telusuri ketentuan pasal 285 tersebut maka diketahui bahwa diantara sumber pendapatan tersebut hanya " Pendapatan Asli Daerah " yang merupakan sumber pembiayaan pendapatan yang otonom, karena sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Landasan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah, sumber pendapatan ini dikelola dan didistribusikan secara langsung oleh pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan program-program / kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan distribusi pajak dan retribusi daerah akan berjalan baik, jika didukung sepenuhnya oleh masyarakat, ini hanya dapat terjadi apabila masyarakatnya telah mengerti, mengetahui apa dan bagaimana pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya.

Program prioritas pembangunan bidang urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi dimana sinergi dengan prioritas pembangunan nasional antara lain pembangunan bidang urusan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terutama untuk target pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan SKPD pemungut dan UPT Pendapatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2018, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai peranan penting dalam hal pengelolaan pendapatan terutama dari pajak dan retribusi daerah, dimana PAD merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal.

2. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran PAD.

3. Indikator juga merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh kegiatan. Keterkaitan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 2 Program Yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menyediakan Fasilitas-fasilitas penunjang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang menjadi tugas Pokok dan fungsi utama Badan Pendapatan Daerah.

Program ini terkait langsung dengan fungsi-fungsi pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini juga mendukung terwujudnya Sustainable Develovment Goals (SDGs) yaitu dengan menyediakan teknologi informasi pembayaran pajak daerah melalui sistem online. Pembayaran pajak secara online ini mengurangi penggunaan kertas, sehingga turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup 2(dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Program pertama adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini lebih banyak terpusat di Kantor Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan Program kedua adalah Pengolaan Pendapatan Daerah, Program ini sasarannya tersebar di seluruh Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat yang menjadi fokus sasaran adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki objek pajak yang menjadi kewenangan daerah.

Pada Rencana Kerja Bapenda tahun 2025, dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan **2 Program 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 13,247,579,063**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu indikatif pendanaan, RKPD tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan Badan Pendapatan Daerah dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah, maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

TABEL T-C.33

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Amuntai	80,00	13,247,579,063	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APBD		80,50	9.372.862.163
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	Amuntai	100%	14,751,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	Dana bertambah karena perlu adanya dana untuk konsultasi dan koordinasi, rapat dll, demi tercapainya target kinerja yg diharapkan	100%	28.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amuntai	18 Laporan	14,751,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	APBD	Dana bertambah karena perlu adanya dana untuk konsultasi dan koordinasi, rapat dll, demi tercapainya target kinerja yg diharapkan	18 Laporan - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen	3.000.000 25.000.000
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**Amuntai**	**100%**	**7.496.454.458**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**7.344.065.720**
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Amuntai	44 Orang/Bulan	7,494,954,458	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	Dana bertambah karena bertambahnya belanja insentif Opsen dan pegawai PPPK dan CPNS	44 Orang/Bulan	7.342.565.720
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Amuntai	1 Laporan	1.500.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD		1 Laporan	1.500.000
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Realisasi Kegiatan administrasi Kepegawaian**	**Amuntai**	**100%**	**20.680.000,00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**148.680.000**

5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Amuntai	1 Paket	20.680.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD		1 Paket	138.680.000
5.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Amuntai	0 Orang	0,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD	Dana di geser ke pengadaan barang, karena pegawai yg bertambah, maka fasilitas kantor pun bertambah	10 Orang	10.000.000
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**Amuntai**	**100%**	**632.376.750**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**263.697.547**
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Amuntai	10 Paket	36,636,600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	Untuk kenyamanan kerja, di pandang perlu untuk penyediaan perlengkapan kantor yg memadai. dan kebutuhan pegawai yg bertambah	10 Paket	25.000.000
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Amuntai	10 Paket	33,994,650	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD		10 Paket	50.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Amuntai	8 Paket	49,602,100	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	APBD		8 Paket	38.697.[illegible]
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amuntai	100 Laporan	512,143,400	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	Dana perlu bertambah karena untuk mencapai target PAD, perlu seringnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	150.000.000
5.02.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**Amuntai**	**100%**	**448,568,300**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**	**Dana bertambah karena perlunya Fasilitas yg memadai demi tercapainya target PAD, dan pegawai yg bertambah**	**100%**	**411.500.000**
5.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	Amuntai	25 Unit	448,568,300	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	APBD	Dana bertambah karena perlunya Fasilitas yg memadai demi tercapainya target PAD,	50 Unit	411.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								dan pegawai yg bertambah		
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi laporan**	**Amuntai**	**100%**	**308.897.105**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**403.497.105**
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Amuntai	60 Laporan	126,125,105	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	APBD		60 Laporan	117.525.105
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Amuntai	80 Laporan	182,772,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	Dana berkurang karena kebutuhan untuk tenaga administrasi Non PNS berkurang karena sdh di angkat PPPK	80 Laporan	285.972.000
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**Amuntai**	**100%**	**127.888.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**133.300.000**
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Amuntai	28 Unit	94,300,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD		28 Unit	54.300.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.0 2.09.000 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Amuntai	36 Unit	13,400,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	APBD		30 Unit	9.000 00
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Amuntai	1 Unit	20,188,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD	Dana bertambah karena keadaan gedung yg sudah tidak memadai, Cat gedung yang mulai pudar dan keramik yg mulai retak	1 Unit	70.000000
05.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Amuntai**	**184.427.191.653**	**4.197.963.450**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PAD**		**186.772.814.128,00**	**4.197.963.450**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Amuntai**	**184.427.191.653**	**4.197.963.450**	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**PAD**		**186.772.814.128,00**	**4.197.963.450**
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Amuntai	5 Laporan	28,224,100	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PAD	Dana di geser untuk kegiatan yg lebih penting, yaitu makmin di Sub Kegiatan Pendataan	10 Laporan	250.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Amuntai	24 Laporan	2,328,346,050	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PAD	Dana bertambah , karena perlunya data2 untuk mendukung tercapainya target yg diinginkan yaitu peningkatan PAD	24 Laporan	1000.000.000
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Amuntai	1500 Layanan	17.040.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PAD		1500 Layanan	100.000.000
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Amuntai	4 Laporan	230,462,300	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PAD		4 Laporan	226.303.700
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian Dan Verifikasi	Amuntai	12 Dokumen	86,840,000	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PAD		12 Dokumen	50.604.153
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan serta Pengendalian,dan Pengawasan Pajak Daerah	Amuntai	12 Dokumen	265,054,200	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PAD		12 Dokumen - Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi	120.000.000 100.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

									Pemerintah Daerah 12 Laporan - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2 Buah	100.000.000
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOPnya	Amuntai	1400 Objek Pajak	274,199,800	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PAD	Dana bertambah karena perlunya data2 untuk mendukung target yg ingin dicapai	1400 Objek Pajak	100.000.000
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Amuntai	90800 Dokumen	364,342,000	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	PAD	Dana bertambah karena perlunya data2 untuk mendukung target yg ingin dicapai	90800 Dokumen	353.191.000
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Amuntai	8112 Dokumen	603,455,000	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	PAD	Dana bertambah karena adanya pembelian mobil layanan	8112 Dokumen	150.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								penagihan , demi kelancaran penagihan		
JUMLAH (Rp.)				**13,247,579,063**						**11,282,839,225**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

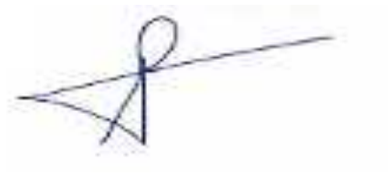
Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang, dengan partisipasi dan respon pemegang kegiatan. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi lingkungannya baik internal SKPD maupun lingkup Kabupaten.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini para pemangku kepentingan diharapkan mampu untuk lebih mengoptimalkan kinerja, yaitu kinerja yang terkait dengan profesionalitas manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan tetap berpegang pada azas efisien, efektif, transparan, akuntabel, hal ini diharapkan mampu memberikan akselerasi dalam proses pembangunan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan Rencana Kerja ini juga para aparatur Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai /memenuhi target sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.”

Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (RENSTRA 2025 – 2029).

Dengan kegiatan dan pendanaan yang direncanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Peningkatan Pendapatan sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Amuntai, Mei 2025
KEPALA BADAN PENDATAN DAERAH
Kabupaten Hulu Sungai Utara



BUDIA HENDRA, S.IP.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19870309 200701 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi “Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance)* maupun pelayanan prima (*excellence service*), semua instansi pemerintah dituntut untuk bekerja secara transparan, efektif-efisien, akuntabel, tanggap, adil, dan mempunyai visi strategis jauh ke depan. Prinsip-prinsip *good governance* harus didukung oleh lingkungan/ masyarakat agar dapat diterapkan dengan benar. Penerapan *good governance* di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 sebagai acuan penyusunan.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengacu pada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.

b. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. Melaksanakan Renstra tahun ketiga dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan
4.2 Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian target rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   1. Penyusunan Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). Program Kepegawaian Daerah

a. **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
   1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
   2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

b. **Mutasi dan Promosi ASN**
   1. Pengelolaan Mutasi ASN
   2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

c. **Pengembangan Kompetensi ASN**
   1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   2. Pengelolaan Assessment Center
   3. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

d. **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
   1. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
   3. Pembinaan Disiplin ASN
   4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3). Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. **Pengembangan Kompetensi Teknis**
   1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b. **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**
   1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 3 (Tiga) program yang terdiri dari 2 (Dua) program utama/ prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Adapun rincian realisasi program/ kegiatan utama seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Program/ Kegiatan Utama BKPSDM Kab. HSU Tahun 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2 (T-C-29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (Outcomes)/sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
											Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target renstra 2024 (%)
(1)						(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	7	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Penunjang																
Bidang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur																
5	03	01				**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	100%	**100 Persen**	**100%**
5	***03***	***01***	***2***	***01***			***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat***	***100%***		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	100%	**100 Persen**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								daerah								
5	03	01	2	01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dok		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	8 dokumen	6 Dokumen	100%
5	03	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	15 dokumen	10 Laporan	100%
5	***03***	***01***	***2***	***02***			***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah***	***100%***		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100%**	**100 Persen**	**100%**
5	03	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	434 orang/buan		840 Orang	840 Orang	100%	840 Orang	840 Orang	100%
5	03	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	18 Dokumen		2 Laporan	2 Laporan	100%	18 dokumen	2 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	***03***	***01***	***2***	***06***			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100%***		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100%**	**100 Persen**	**1**
5	03	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instralasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	14 Paket	4 Paket	100%
5	03	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	20 Paket	4 Paket	100%
5	03	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	47 Paket	4 Paket	100%
5	03	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
5	***03***	***01***	***2***	***08***			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan***	**100%**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100%**	**100 Persen**	**100%**
5	03	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1
5	03	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
2	***13***	***01***	***2***	***09***			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***		**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100%**	**100 Persen**	**100%**
5	03	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit		29 Unit	29 Unit	100%	30 Unit	29 Unit	100%
5	03	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 Unit		61 Unit	61 Unit	100%	62 Unit	61 Unit	100%
5	03	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
5	***03***	**02**	**2**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		90%		**100 Persen**	**92,5 Persen**	**92,5 Persen**	87%	**92,5 Persen**	**92,5 Persen**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	***03***	***02***	***2***	***01***			***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***Persentase terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***100%***		**100 Persen**	**76,4 Persen**	**76,4 Persen**	**100%**	**76,4 Persen**	**Persen**
5	03	02	2	01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50%	125 orang	1 Dokumen	50%
5	03	02	2	01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	250 Dokumen		171 Dokumen	227 orang	133%	25 Dokumen	227 orang	133%
5	03	04	2	01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 lembaga	100%	100 orang	1 lembaga	100%
5	03	04	2	01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	4055 Dok		3877 Dokumen	3390 dok	87,4 %	35 orang	3390 dok	87,4 %
5	***03***	***02***	***2***	***02***			***Mutasi dan Promosi ASN***	***Persentase terlaksananya mutasi dan Promosi ASN***	***90%***		**90 Persen**	**72,9 Persen**		**90%**	**72,9 Persen**	
5	03	02	2	02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,	250 Dokumen		725 Dokumen	525 dok	72,4 %	250 Dokumen	525 dok	72,4 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								jabatan pelaskana dan mutasi ASN antar daerah								
5	03	02	2	02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	500 Dokumen		700 Dokumen	646 dok	92,3 %	600 Dokumen	646 dok	92,3 %
5	***03***	***02***	***2***	***03***			***Pengembangan Kompetensi ASN***	***Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN***	***100%***		**100 Persen**	**116 Persen**	**116%**	**100%**	**116 Persen**	**116%**
							Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitanya	35 Orang		35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	35 Orang	100%
							Pengelolaan Asessment center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 Dokumen		45 Dokumen	55 Dokumen	122,2 %	1 Dokumen	55 Dokumen	122,2 %
5	03	02	2	03	01		Fasilitsi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	150 Orang		400 Orang	501 Orang	125%	150 Orang	501 Orang	125%
5	03	02	2	03	02		Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	100 Orang		-	-	-	100 Orang	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	***02***	***2***	***04***			***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana***	***100%***		400 Orang	501 Orang	125,25 %	**100%**	501 Orang	12 %
5	03	02	2	04	03		Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3666 Dokumen		100 Persen	104,6 Persen	104,6 %	3666 Laporan	104,6 Persen	104,6 %
5	03	02	2	04	05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	200 Orang		-	-	-	200 orang	-	-
5	03	02	2	04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	7 Orang		111 Orang	130 Orang	117,12 %	9 orang	130 Orang	117,12 %
5	03	02	2	04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	1 laporan	2 Laporan	100%
5	***04***	**02**					**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		***90%***		**85 Persen**	**82 Persen**	**96,5 %**		**82 Persen**	**96,5 %**
5	***04***	***02***	***2***	***01***			***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis***	***90%***		85 Persen	86 Persen	101,2 %	***87%***	86 Persen	101,2 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	04	02	2	01	03		Penyelenggaarn pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	70 orang		140 Orang	142 Orang	101,42 %	70 orang	142 Orang	10 %
5	***04***	***02***	***2***	***02***			***Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***Persentase penyelenggaraan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional***	***87%***		80 Persen	73 Persen	91,25 %	***83%***	73 Persen	91,25 %
5	04	02	2	02	07		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	110 orang		51 Orang	47 Orang	92,16 %	110 Laporan	47 Orang	92,16 %

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Untuk capaian hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Renstra BKPSDM (Tahun 2023) cukup berhasil dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan Proyeksi tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan SKPD menjalankan tujuannya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yaitu untuk tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Kualitas Profesionalisme Aparatur Sipil Negara serta Meningkatnya kualitas layanan informasi kepegawaian secara digital.

Sedangkan lingkup Bidang yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
4. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dalam tahun anggaran 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan Mewujudkan pemerintahan yang baik serta profesionalitas ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut table capaian pada Tahun 2023 :

Tabel II.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kab. HSU Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP BKPP	BB	BB	100
2.	Meningkatnya Kualitas Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase terpenuhinya usulan CASN berdasarkan Anjab dan ABK	50%	50%	100
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi	53%	53%	100
		Persentase Penanganan pelanggaran Disiplin	40%	40%	100
		Persentase penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kebutuhan dan kompetensi	81%	81%	100
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi kepegawaian secara digital	Persentase layanan kepegawaian yang bisa dilakukan secara digital	46%	46%	100

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, hamper semua target tercapai. Capaian hasil dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Indikator kinerja utama kesatu yaitu Nilai SAKIP BKPSDM

   Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Nilai SAKIP BKPSDM Target BB** dan realisasinya adalah BB. Sejak tahun 2019 Nilai SAKIP BKPSDM sudah mendapat BB. Sehingga pada tahun 2023 ini kami berusaha meningkatkan point keseluruhannya walaupun Nilainya tetap BB.

2. Indikator kinerja utama Kedua yaitu Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan hasil pemetaan jabatan.

   Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK. Dan sesuai Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi (1) Jabatan Fungsional (JF) dan (2) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Sedangkan untuk pengadaan PPPK Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Dimana dalam Peraturan Menteri sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) bahwa Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

   Berdasarkan pasal 5 Ayat (3) tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan perencanaan kebutuhan PPPK sesuai prioritas kebutuhan. Dimana usulan tersebut diperuntukkan untuk mengisi formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

   Realisasi kinerja untuk indikator pertama ini mencapai 100% dimana usulan formasi PPPK Tahun 2023 yang di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di setujui sebanyak 50%, dengan jumlah formasi untuk guru 375 formasi, kesehatan 350 formasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dan teknis 85 formasi. Persetujuan formasi ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dimana formasi yang banyak disetujui adalah formasi yang menjadi prioritas kebutuhannya seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan, sedangkan untuk formasi tenaga teknis baru akan ditargetkan pemenuhannya di tahun 2024. Karena memang dengan keluarnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 11 Oktober 2022, maka nama jabatan pelaksana di sudah harus di sesuaikan dengan Peraturan tersebut. Oleh karenanya penyusunan Anjab ABK dimasing-masing OPD harus disesuaikan dengan regulasi tersebut.

3. Indikator kinerja utama Ketiga yaitu Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi

   Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi yang tidak berkembang akan memberi dampak buruk terhadap kinerja organisasi.

   Ada 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh seorang ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

   Salah satu tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melakukan pengembangan kompetensi Aparatur di Kabupaten hulu Sungai Utara, dimana dalam melaksanakan fungsinya tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahunnya menganggarkan anggaran bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan mulai dari level Esellon IV untuk 1 orang, eselon III untuk 46 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dimana dengan ikutnya pejabat dari esellon IV sampai eselon III dapat meningkatkan kompetensi manajerial maupun kemampuan kepemimpinannya. Selain itu tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi melaksanakan uji kompetensi bagi 500 ASN dari pelaksana hingga esellon III yang pengujinya langsung berasal dari BKN pusat. Juga dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis bagi ASN BKPSDM melaksanakan sosialisasi untuk penyusunan kinerja aplikasi kinerja BKN dan pelaksanaan penatausahan dokumen kearsipan melalui Aplikasi SRIKANDI.

4. Indikator kinerja utama Keempat yaitu Persentase Penanganan pelanggaran Disiplin

   Pemerintah telah membuat acuan dalam penilaian kedisiplinan melalui PP N0. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah melalui PP tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam menerapkan peraturan disiplin ini. Tujuan peraturan disiplin yang di maksud adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran didalam pelaksanaan tugas PNS sehari-hari dan agar PNS mampu melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab, bersih serta bebas dari KKN.

   Dengan keluarnya PP Nomor 20 Tahun 2010 tersebut maka secara aturan hukum penerapan dan penegakkan disiplin aparatur sudah sangat jelas baik dari segi norma maupun dari segi sanksi yang harus dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan disiplin tersebut. Namun dalam tahap implementasi peraturan-peraturan tersebut terdapat hal-hal yang menghambat penegakan disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal-hal yang menghambat penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya seringnya terlambat hadir ke kantor, kurangnya sistem pengawasan, Kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan serta masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antara satu struktur unit kerja dengan struktur lainnya yang menyebabkan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa melaksanakan pembinaan disiplin dengan memberikan sosialisasi khususnya bagi Kasubag Kepegawaian tentang aturan-aturan dan mekanisme penjatuhan hukuman siplin sehingga dapat diterapkan di OPD nya masing-masing, selain itu setiap ada surat usulan penjatuhan hukuman yang di masukkan OPD ke BKPSDM secepatnya untuk dilakukan penelaahan dan ditindaklanjuti sebagai upaya BKPSDM melaksanakan fungsinya sebagai pembina disiplin ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tahun 2023 ditargetkan 4 usulan pelanggaran disiplin dapat di selesaikan pada tahapan kewenangan BKPSDM dan dari 4 usulan tersebut, ke-4 usulan telah dilakukan penelaahan, pemanggilan yang bersangkutan serta telah diteruskan ke Inspektorat Daerah untuk selanjutnya dilakukan proses lanjutan sesuai kewenangan Inspektorat. Sehingga capaian BKPSDM dapat tercapai sebesar 100% dimana jika dibandingkan dengan target renstra BKPSDM untuk tahun 2023 telah terealisasi sebesar 40%.

5. Indikator kinerja utama Kelima yaitu Persentase penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kebutuhan dan kompetensi.

   Tahun 2023, BKPSDM telah melaksanakan asisment bagi eselon II untuk jabatan staf ahli bagi 3 jabatan, Kepala Dinas UMKM dan Koperindag, Dinas Kominfo dan Persandian serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk lebih mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD yang ada.

   Selain itu selama tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kali pelantikan baik bagi jabatan Struktural Administrator dan Pengawas serta jabatan Kepala Sekolah.

   Realisasi indikator ini sampai akhir tahun mencapai 100% dikarenakan semua penempatan ASN sesuai dengan anjab dan ABK pada masing-masing OPD. Melalui anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Hasil dari anjab dan ABK dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6. Indikator kinerja utama Keenam adalah Meningkatnya kualitas layanan informasi

Instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi publik sangat erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikannya baik bagi masyarakat pada umumnya ataupun bagi para ASN di lingkungan instansinya. Namun selama ini pelayanan birokrasi diidentikan dengan prosedur yang berbelit, struktur organisasi yang gemuk dan lamban, kinerja yang rendah, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak memiliki standar pelayanan yang pasti.

Oleh karenanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia berupaya untuk meningkatkan layanan kepegawaiannya dengan memberikan layanan secara digital berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk transformasi digital, akan membebaskan pengelola kepegawaian dari beban tugas administrasi kepegawaian, karena telah dikelola secara digital, dan bisa terfokus pada pengembangan human capital, seperti perencanaan karir dan kompetensi pegawai.

Tahun 2023 jumlah layanan kepegawaian yang telah diterapkan secara teknologi digital adalah usul cuti, usul berkala, usul naik pangkat, pensiun, ijin belajar dan pencantuman gelar. Semua layanan nantinya terintegrasi dalam aplikasi SikON (Sistem Informasi Kepegawaian Online) yang terus di kembangkan oleh BKPSDM Kab. HSU berkerjasama dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kab. HSU. Dari target layanan digital dalam renstra BKPSDM 2023-2026, tahun 2023 telah memenuhi target kinerja dengan tersealisasikannya 6 layanan kepegawaian secara digital dari target Renstra sebesar 15 layanan. Artinya target kinerja BKPSDM tahun 2023 dapat tercapai sebesar 100%.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tabel T-C-30

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase terpenuhinya usulan CASN berdasarkan anjab dan ABK	-	-	50%	50%	50%	50%	50%		100%	100%	
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi	-	-	53.5%	54.9%	57.6%	60.3%	53.5%		100%	100%	
3	Persentase penanganan pelanggaran disiplin	-	-	44.4%	55.6%	66.7%	88.9%	44.4%		100%	100%	
4	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	-	-	81%	87.6%	93.9%	100.0%	81%		100%	100%	
5	Persentase layanan kepegawaian yang bisa dilakukan secara digital	-	-	40%	53.3%	66.7%	80.0%	40%		100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara teknis terurai mulai tahap rekrutmen CASN, menjadi ASN, mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, penerapan disiplin, peningkatan kapasitas dengan pendidikan formal, urusan kepangkatan, mutasi, sampai dengan pemberian hak pensiun bagi ASN. Oleh karenanya untuk mencapai tugas fungsinya tersebut BKPSDM memerlukan mekanisme yang tepat, peningkatan sumber daya aparatur dan sarana kerja yang menunjang sehingga pelayanan kepegawaian dapat optimal.

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi isu-isu penting dalam pencapaian tujuan pelayanan terbaik antara lain:

1. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai penyempurnaan Undang-Undang kepegawaian sebelumnya yang menuntut perubahan manajemen Aparatur Sipil Negara secara signifikan;
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengubah beberapa kewenangan dari kabupaten/kota kepada Provinsi;
3. Pelayanan kepegawaian yang telah di dukung SOP masih belum maksimal untuk prosedural, ketepatan dan waktu;
4. Belum optimalnya analisis formasi pegawai pada setiap OPD dan standar kompetensi ASN pada setiap jenjang pangkat, golongan dan jabatan;
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan formal sesuai kebutuhan OPD;
6. Belum maksimalnya upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap disiplin ASN;
7. Belum akuratnya database kepegawaian;
8. Belum optimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur berprestasi dan aparatur yang melanggar aturan.

RPJPN yang menjadi induk dari RPJMN 2020-2025 adalah RPJPN 2005-2025 yang diundangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam UU tersebut

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

diungkapkan bahwa pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas.

Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.

Disebutkan juga bahwa birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat.

Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government, e-procurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari Rancangan Awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara telah disesuaikan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu terdiri 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.5 (T-C-31). Reviu Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**HSU**	**100**	**4,979,459,940**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**HSU**	**100**	**4,979,459,940**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		***100%***	***117,619,727***	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		***100%***	***117,619,727***	
	Penyusunan Dokumen, Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		10 Dok	108,970,077	Penyusunan Dokumen, Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		10 Dok	108,970,077	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		15 Laporan	8,649,650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		15 Laporan	8,649,650	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase kualitas capain kinerja dan pengelolaan Keuangan Daerah**		***100%***	***4,285,954,403***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capain kinerja dan pengelolaan Keuangan Daerah**		***100%***	***4,285,954,403***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		434 orang/buan	4,277,219,303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		434 orang/buan	4,277,219,303	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		18 Dokumen	8,735,100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		18 Dokumen	8,735,100	
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		***100%***	***279,342,910***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		***100%***	***279,342,910***	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 Paket	8,117,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 Paket	8,117,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Paket	35,167,850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Paket	35,167,850	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	57,697,660	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	57,697,660	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 Laporan	178,360,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 Laporan	178,360,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**		100%	***198,607,100***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capain kinerja dan pengelolaan Keuangan Daerah**		100%	***198,607,100***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	68,527,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	68,527,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan listrik yang disediakan		1 Laporan	120,084,900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan listrik yang disediakan		1 Laporan	120,084,900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	9,994,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	9,994,800	
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		***100%***	***97,935,800***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		***100%***	***97,935,800***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		30 Unit	62,571,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		30 Unit	62,571,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		62 Unit	14,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		62 Unit	14,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	20,864,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	20,864,800	
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN**		90%	2,355,729,500	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN**		90%	2,355,729,500	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		***100%***	***536,615,500***	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		***100%***	***536,615,500***	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	329,067,500	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	329,067,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		250 Dokumen	63,095,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		250 Dokumen	63,095,000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi		1 Lembaga	30,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi		1 Lembaga	30,000,000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		3675	114,453,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		3675	114,453,000	
2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase terfasilitsainya mutasi dan promosi ASN**		***90%***	***467,734,000***	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase terfasilitsainya mutasi dan promosi ASN**		***90%***	***467,734,000***	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		250 Dokumen	239,543,400	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		250 Dokumen	239,543,400	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		500 Dokumen	228,190,600	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		500 Dokumen	228,190,600	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN		….. Dokumen	-	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN		….. Dokumen	-	
2	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase terlaksananya pengembangan Kompetensi ASN**		***100%***	***909,986,200***	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase terlaksananya pengembangan Kompetensi ASN**		***100%***	***909,986,200***	
	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapsitasnya		35 Orang	41,390,000	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapsitasnya		35 Orang	41,390,000	
	Pengelolaan Asessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Asessment Center		1 Dokumen	524,014,000	Pengelolaan Asessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Asessment Center		1 Dokumen	524,014,000	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan laporan fasilitasi sertifikasi jabatan		150 Orang	315,469,400	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan laporan fasilitasi sertifikasi jabatan		150 Orang	315,469,400	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		100 Orang	29,112,800	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		100 Orang	29,112,800	
2	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana**		***100%***	***441,393,800***	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana**		***100%***	***441,393,800***	
	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur		3666 Dokumen	83,154,000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur		3666 Dokumen	83,154,000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		…… orang	-	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		…… orang	-	
	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa		200 Orang	46,310,800	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa		200 Orang	46,310,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan		7 Orang	49,859,000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan		7 Orang	49,859,000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		1 Laporan	262,070,000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		1 Laporan	262,070,000	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia**		***90%***	***1,148,102,000***	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia**		***90%***	***4,376,102,000***	
3.1	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis**		***90%***	***74,000,000***	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis**		***90%***	**1.352.000.000**	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perngkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		70 orang	74,000,000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perngkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		70 orang	1.352.000.000	
3	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan**	**Persentase penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**		***87%***	***1,074,102,000***	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan**	**Persentase penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**		***87%***	**3.024.102.000**	Penambahan Bimtek

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan		110 orang	1,074,102,000	Pengelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan		110 orang	3.024.102.000	Penambahan Orientasi PPPK serta Diklat PIM
					8,483,291,440					**11,711,291,440**	

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. RAKHMADI PERMANA, MAP
NIP. 19721127 199203 1 004

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari table diatas dapat dilihat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa untuk program berjumlah 3 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan dan untuk total pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8,483,291,440 berdasarkan RKPD 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ada beberapa program/ kegiatan yang menjadi catatan penting untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Orientasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasal 32 Ayat (1), Orientasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK, untuk orientasi PPPK terhitung sebanyak 651 orang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang berdasarkan pengangkatan PPPK pada Tahun 2024 untuk tenaga Teknis sebanyak 72 orang, tenaga guru sebanyak 242 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 337 dengan penambahan anggaran Rp. 1.950.000.000,-

2. Bimtek RPJMD, RENSTRA & RENJA SKPD, terkait masa Pimpinan Daerah yang baru akan dilantik pada 2025, sesuai amanat UU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional. Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi. Di samping itu agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan.Maka perlu perencanaan yang tepat, rasional dan realitas. Sebagaimana yang diharapkan bisa memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. dan RPJMD dan Renstra SKPD merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan guna

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

mencapai pemerintahan Daerah Good Governance. Hal itu juga bermakna bahwa RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penganggarannya, dengan permintaan penambahan anggaran Rp. 426.000.000 masing-masing untuk Bimtek RPJMD, Renstra, dan Renja sehingga total anggaran yang dibutuhkan Rp. 426.000.000 x 3 kegiatan Bimtek menjadi Rp. 1.278.000.000,-

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang kecamatan maupun yang disampaikan melalui SIPD serta usulan pokir anggota dewan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menggalakkan upaya peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengimplementasikan Indeks Profesionalitas ASN. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kompetensi, manajemen talenta, karier pegawai ASN, serta pengelolaan jabatan fungsional sesuai perubahan UU ASN terbaru melalui UU 20 Tahun 2023. Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur dan Layanan. Selain itu, penerapan inovasi pelayanan secara elektronik (e-service) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan fungsional.
b. Transformasi pelayanan publik melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), pengutan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik , penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Persentase terpenuhinya usulan CASN berdasarkan Anjab dan ABK dengan target 50%;
2. Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi dengan target 57.6%;
3. Persentase Penanganan pelanggaran Disiplin dengan target 66.7%;
4. Persentase penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kebutuhan dan kompetensi dengan target 93.9 %;
5. Persentase layanan kepegawaian yang bisa dilakukan secara digital dengan target 66.7 %.

b. Sasaran :

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Terukur, Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kualitas Profesionalisme Aparatur Sipil Negara;

   Guna terwujudnya reformasi birokrasi yang baik, maka kualitas profesionalisme ASN menjadi sasaran penting untuk mewujudkannya. Kualitas profesionalisme itu dapat tercapai dimulai dengan pengadaan CASN, ASN yang didistribusikan, dalam rangka penataan, alihfungsi jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu, penerapan disiplin, peningkatan kompetensi ASN, pengisian jabatan structural, urusan pensiun.

2) Meningkatnya kualitas layanan informasi kepegawaian secara digital.

   Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi, BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi kepegawaian yang berkualitas, yaitu relevan, terkini, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkansebagai bahan untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi/computer seiring berlakunya UU ASN No. 5 Tahun 2014.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel III.1 : Tujuan dan Sasaran BKPSDM

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Rutin						
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah Daerah	Nilai SAKIP BKPP		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerina Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	31 Orang/ bulan	31 orang/ bulan	31 orang/ bulan	31 orang/ bulan
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	14 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	14 Paket	9 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Paket	18 Paket	20 Paket	24 Paket	25 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	47 Paket	24 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik yang disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	19 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya barang milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	33 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	62 Unit	62 Unit	62 Unit	62 Unit	62 Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	2.2. Meningkatnya Kualitas Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Persentase Penataan Manajemen ASN				**85.00%**	85%	87%	**90%**	**95%**
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN**	**85.00%**	85%	87%	**90%**	**95%**
				Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**100.00%**	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	125 orang	0 orang	125 orang	125 orang	125 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	25 Dokumen	28 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
				Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 orang	.... orang	100 orang	100 orang	100 orang
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang
				Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN**	90.00%	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	725 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	171 Dokumen	171 Dokumen	230 Dokumen	250 Dokumen	280 Dokumen
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3877 Dokumen	3877 Dokumen	3950 Dokumen	4055 Dokumen	4122 Dokumen
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Evaluasi hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Kinerja Aparatur	...Laporan	...Laporan	...Laporan	...Laporan	...Laporan
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	.....orang	....orang	....orang	....orang	....orang
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
				Pembinaan Disiplin PNS	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	11 orang	10 orang	9 orang	7 orang	5 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**85%**	**85%**	**87%**	**90%**	**95%**
				Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**85%**	**85%**	**87%**	**90%**	**95%**
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	62 orang	42 orang	70 orang	80 orang	80 orang
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**80%**	**80%**	**83%**	**87%**	**90%**
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	142 orang	10 orang	110 orang	110 orang	110 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa dan modal.

Pada Bab ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan Program Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksudkan sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 (T-C-33) di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1 (T-C-33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01				**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah**		**100**	**4,979,459,940**			**100 %**	**5,311,629,655**
5	***03***	***01***	***2***	***01***			***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***BKPSDM Kab. HSU***	***100%***	***117,619,727***	***APBD***		***100 %***	***38,027,184***
5	03	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. HSU	10 Dok	108,970,077	APBD		8 Dok	18,027,184
5	03	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM Kab. HSU	15 Laporan	8,649,650	APBD		15 Dok	20,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	***01***	***2***	***02***			***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah***		***100%***	***4,285,954,403***	***APBD***		***100 %***	***4,503,***
5	03	01	2	02	01		Penyusunan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM Kab. HSU	434 orang/ buan	4,277,219,303	APBD		31 orang/bulan	4,488,775,271
5	03	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan SKPD	BKPSDM Kab. HSU	18 Dokumen	8,735,100	APBD		18 Dok	15,000,000
5	***03***	***01***	***2***	***06***			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***BKPSDM Kab. HSU***	***100%***	***279,342,910***	***APBD***		***100 %***	***397,396,315***
5	03	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. HSU	4 Paket	8,117,400	APBD		14 Paket	12,608,750
5	03	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM Kab. HSU	12 Paket	35,167,850	APBD		25 Paket	139,126,180
5	03	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	BKPSDM Kab. HSU	12 Paket	57,697,660	APBD		47 Paket	45,661,385
5	03	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. HSU	1 Laporan	178,360,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
5	***03***	***01***	***2***	***08***			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan***	***BKPSDM Kab. HSU***	100%	***198,607,100***			***100 %***	***256,399,135***
5	03	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. HSU	12 Laporan	68,527,400	APBD		12 Laporan	96,368,665

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BKPSDM Kab. HSU	1 Laporan	120,084,900	APBD		1 Laporan	150,090,000
5	03	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BKPSDM Kab. HSU	1 Laporan	9,994,800	APBD		1 Laporan	9,940,470
5	***03***	***01***	***2***	***09***			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***BKPSDM Kab. HSU***	***100%***	***97,935,800***			***100 %***	***116,031,750***
5	03	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaknya	BKPSDM Kab. HSU	30 Unit	62,571,000	APBD		30 Unit	66,525,500
5	03	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BKPSDM Kab. HSU	62 Unit	14,500,000	APBD		62 Unit	14,506,250
5	03	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BKPSDM Kab. HSU	2 Unit	20,864,800	APBD		2 Unit	35,000,000
5	**03**	**02**					**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN***		90%	2,355,729,500			95%	2,620,038,475
5	***03***	***02***	***2***	***01***			***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***Persentase terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN***		***100%***	***536,615,500***			***100 %***	***1,365,108,004***
5	03	02	2	01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. HSU	1 Dokumen	329,067,500	APBD		1 Dok	915,108,004

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	02	2	01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM Kab. HSU	250 Dokumen	63,095,000	APBD		280 Dok	150,000,000
5	03	02	2	01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	BKPSDM Kab. HSU	1 Lembaga	30,000,000	APBD		1 Lembaga	50,000,000
5	03	02	2	01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM Kab. HSU		114,453,000	APBD		4122 Dok	250,000,000
5	***03***	***02***	***2***	***02***			***Mutasi dan Promosi ASN***	***Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN***	***BKPSDM Kab. HSU***	***90%***	***467,734,000***	***APBD***		***90%***	***273,984,630***
5	03	02	2	02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi antar daerah	BKPSDM Kab. HSU	250 Dokumen	239,543,400	APBD		250 Dokumen	192,791,750
5	03	02	2	02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM Kab. HSU	500 Dokumen	228,190,600	APBD		500 Dokumen	81,192,880
5	***03***	***02***	***2***	***03***			***Pengembangan Kompetensi ASN***	***Persentase terlaksananya pengembangan kompeteni ASN***	***BKPSDM Kab. HSU***	***100%***	***909,986,200***	***APBD***		***100 %***	***564,545,841***
5	03	02	2	03	01		Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitanya	BKPSDM Kab. HSU	35 Orang	41,390,000	APBD		35 Orang	17,638,000
5	03	02	2	03	02		Pengelolaan Asessment center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	BKPSDM Kab. HSU	1 Dokumen	524,014,000	APBD		25 Dokumen	405,116,256
5	03	02	2	03	03		Fasilitsi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	BKPSDM Kab. HSU	150 Orang	315,469,400	APBD		125 Orang	111,791,585

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	03	02	2	03	04		Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	BKPSDM Kab. HSU	100 Orang	29,112,800	APBD		100 Orang	30,000,000
5	***03***	***02***	***2***	***04***			***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terlaksana***	***BKPSDM Kab. HSU***	***100%***	***441,393,800***	***APBD***		***100 %***	***416,400,000***
5	03	02	2	04	03		Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur	BKPSDM Kab. HSU	3666 Dokumen	83,154,000	APBD		3666 Laporan	101,400,000
5	03	02	2	04	05		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	BKPSDM Kab. HSU	200 Orang	46,310,800	APBD		200 orang	30,000,000
5	03	02	2	04	07		Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	BKPSDM Kab. HSU	7 Orang	49,859,000	APBD		5 Org	100,000,000
5	03	02	2	04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM Kab. HSU	1 Laporan	262,070,000	APBD		1 Laporan	185,000,000
5	**04**	**02**					***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***		***BKPSDM Kab. HSU***	***90%***	***1,148,102,000***	***APBD***		***95%***	***790,000,000***
5	***04***	***02***	***2***	***01***			***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis***	***BKPSDM Kab. HSU***	***90%***	***74,000,000***	***APBD***		***95%***	***240,000,000***
5	04	02	2	01	03		Penyelenggaraan pengembangan kopetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelnggaraa urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKPSDM Kab. HSU	70 orang	74,000,000	APBD		80 Org	240,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	04	***02***	***2***	***02***			***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***Persentase penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***BKPSDM Kab. HSU***	***87%***	***1,074,102,000***	***APBD***		***90%***	***550,***
5	04	02	2	02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. HSU	110 orang	1,074,102,000	APBD		110 Org	550,000,000
Jumlah Anggaran											**8,483,291,440**				**8,721,668,130**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan Tabel 4.1 (T-C-33) rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 sebanyak 3 program, 11 kegiatan dan 30 subkegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan di Kabupaten dan seluruh kecamatan.

4.2 Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara diberikan Pagu Indikatif sebesar Rp. 8,483,291,440,00 dengan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 (T-C-33) sebelumnya.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Selain *input* yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. *Input* dan proses akan memberikan *benefit* dan *impact* kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mencermati berbagai aturan pelaksanaan serta petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya.

Menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, maka untuk itu kami berharap Masukan atau Saran yang membangun dari berbagai pihak.

Amuntai, April 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara

Drs. RAKHMADI PERMANA, MAP
NIP. 19721127 199203 1 004

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENJA
TAHUN
2025

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH







KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan data dan informasi mengenai Kerangka Kerja dan Keragaman dan Sumber daya Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam bagi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana sekaligus kebijakan Pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Kami merasa Renja ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan Renja ini yang diharapkan pelaksanaannya efektif. sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk mempunyai Rencana Kerja yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi kita semua, khususnya dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembangunan dan diucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan Renja, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Amuntai, Maret 2024
Kepala Pelaksana BPBD Kab. HSU

SYAMRANI, S.Sos M.AP
PEMBINA Tk. I / IVb
NIP. 19680602 199002 1 002

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**
PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2023 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28
2.5 Usulan Program Dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja BPBD 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD 46

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 46
4.2 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan 48
4.3 Uraian garis besar mengenal rekapitulasi program/kegiatan 50
4.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan prakiraan maju *(sesuai dengan pagu indikatif awal)* 53

BAB V PENUTUP 63

5.1. Penjelasan 63
52. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan 64
5.3 Rencana Tindak Lanjut 64

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Dalam kerangka legalisasi, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahap]

an, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Memenuhi amanat undang- undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005 – 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21). Rencana Pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah Terpilih, kemudian dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang no. 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPBD untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan di biayai APBD Propinsi dan APBN.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja BPBD, untuk penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikerjakan secara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sugai Utara :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): penyusunan peta jalan, Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah SDGs;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 2)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud :

1. Maksud

Maksud dari RENJA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam:

a. Mengintegrasikan program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis dan RPD, yang memasuki tahun ketiga periode renstra dan RPD;

b. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan capaian kinerja SKPD

c. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penanganan pengurangan risiko bencana

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Tujuan

Secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang meliputi aspek output dan dampak program sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program di masa yang akan datang.

Tujuan khususnya adalah diketahuinya output dan dampak program berkaitan dengan, Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Untuk menjabarkan rencana strategis Tahun Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sebagai dasar penyusunan RKA BPBD 2025
3. Sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan Penanganan pengurangan risiko bencana.
4. Pelaksanaan Fasilitasi Penanggulangan Bencana, Perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat bencana.
5. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, proses penyusunan, keterkaitannya antara Renja dengan dokumen RKPD, Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Propinsi serta Tindak Lanjutnya dengan proses penyusunanan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD yang Memuat Penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan penanggulangan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulanagan Bencana Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.3. Maksud dan tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana dan Hubungan dengan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.1 Sistematika Penulisan;

Mengemukakan sistematika Penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 terkait dengan pengaturan serta penjelasan isi dari setiap Bab.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023.

Mengemukakan capaian kinerja per bidang pada Badan Penanggulangan Badan Penanggulan Bencana Daerah serta pokok pokok kegiatan yang dilaksanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sub Bab ini menjelaskan isu strategis, prioritas kinerja dan permasalahan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Program yang dijalankan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan isu aktual Kabupaten Hulu sungai Utara serta Memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Mengemukakan usulan dari masyarakat yang prioritas dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ayang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Kab. HSU Tahun 2025 Membangun Komitmen dalam melaksanakan strategi pencapaian target sasaran pembangunan 2023-2026, menyusun strategi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan potensi kejadian bencana tahun 2025.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berisikan informasi sebagai berikut (dalam satu tabel) :

1. Indikator kinerja
2. Kelompok sasaran
3. Lokasi kegiatan
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

Bab VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

a. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
b. Rencana Tindak lanjut

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD Kab. Hulu Sungai Utara

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program /kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan Dalam tahun anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Namun ke 2 (dua) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 3 (tiga indikator kinerja dan realisasi sampai akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa ke 2 (dua) sasaran tersebut dapat dicapai dengan hasil baik.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode						Sasaran / Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun 2024	
										Target Renja SKPD 2023	Realisasi Renja SKPD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisai Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlesenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	8 dok	8 dok
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	-	-	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	16 dok	16 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Kinerja SKPD								
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	8 dok	8 dok
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	25 org	25 org	25 org	25 org	50 org	50 org
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	24 dok	24 dok
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	12 dok	12 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	2(
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	4 paket	4paket	4 paket	4 paket	8 paket	8 paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	20 paket	20 paket
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	24 paket	24 paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24 laporan	24 laporan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24 laporan	24 laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24 laporan	24 laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24 laporan	24 laporan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	27 kendaraan	27 kendaraan	27 kendaraan	27 kendaraan	52 kendaraan	52 kendaraan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	36 peralatan	36 peralatan	36 peralatan	36 peralatan	72 peralatan	72 peralatan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	4 gedung	4 gedung
						Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananinformasi rawan bencana (Kab.HSU)	-	-	100 oraang	100 oraang	100 oraang	100 oraang	200 orang	200 orang
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	-	-	100 orang	100 orang	100 orang	200 orang	400 orang	400 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Kawasan Tempat Tinggalnya							
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU)	-	-	540 orang	520 orang	520 orang	520 orang	1040 orang	1040 orang
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	40 oraang	20 oraang	20 oraang	20 oraang	40 oraang	40 oraang
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	24 dok	24 dok
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	20 buah	20 buah
						Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1000 orang	1000 orang
						Penguatan Kapasitas Kawasan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	-	-	1 kawasan /desa	1 kawasan /desa	1 kawasan /desa	1 kawasan /desa	2 kawasan /desa	2 kawasan /desa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Kesiapsiagaan Bencana								
						Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU)	-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1000 orang	1000 orang
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	24 dok	24 dok
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	-	4 sk	4 sk	4 sk	4 sk	8 sk	8 sk
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1000 orang	1000 orang
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	8 laporan	8 laporan
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1000 orang	1000 orang
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Penanggulangan Bencana di Daerah								
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	10 laporan	10 laporan
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan
						Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan,	-	-	-	-	-	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-	-	-	-	-	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, dengan intisari analisis kinerja nya adalah dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89% adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di sungai nagara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air. Untuk tahun 2023 tidak ada kebakaran lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama Tahun 2023.

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan program dan arah kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja mencakup penetapkan indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kinerja yang menggambarkan keberhasilan/kegagalan Badan Penanggulangan Bencana saat menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka target kinerja yang ingin di capai adalah Meningkatnya Nilai Sakip Kabupaten, Persentase Infrastruktur yang terbagun pascabenca, Persentase Desa Tangguh Bencana, Persentase Penurunan Titik Banjir Meningkatnya waktu tanggap penanganan bencana (Respontime).

Secara umum indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai tugas dan fungsinya telah tercapai, berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

1. Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

   Pencapaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja ditargetkan kategori “A” dengan nilai 81,21, untuk penilaian SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 dijadwalkan tahun 2022 setelah di evaluasi oleh inspektorat adalah untuk SAKIP 2022, yang mana nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah kataegori “A” dengan nilai 81,94 (untuk Sakip 2023 belum ada laporan pencapaian nilai sakip)

2. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana .

   Pencapaian Indikator Sasaran ini mencakup Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah. Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2023 yakni 126,00 dengan target 128,4 (lebih kecil lebih baik) sedangkan Indeks Ketahanan Daerah Capaiannya sebesar 0,44 dengan target 0,30 (lebih besar lebih baik).

   Strategi yang di tempuh yaitu Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana Daerah dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sedangkan arah kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana adalah meningkatkan kualitas dengan review dokumen rencana penanggulangan bencana.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pengukuran Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD

Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator	Sasaran Strategis	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai Sakip SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	A / 80.17	A / 80.20	A / 80.22	A / 80.25	A / 80.26	A / 80	A / 81.94	-	-	-	A / 81.94	
2	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Standar Nasional	-	128,4 (sedang)	128,4 (sedang)	128,3 (sedang)	128,3 (sedang)	128,3 (sedang)	126,00 (sedang)	126,00 (sedang)	-	-	-	126,00 (sedang)	
3	Indeks Ketahanan Daerah		Standar Nasional	-	0,25 (rendah)	0,30 (rendah)	0,35 (rendah)	0.38 (rendah)	0,40 (sedang)	0,32 (rendah)	0,44(rendah)	-	-	-	0,44(rendah)	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, Isu merupakan kondisi permasalahan yang sangat berpengaruh sebagai penentu dari eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan selain itu isu isu utama berkembang dalam Penanganan Penanggulangan Kebencanaan secara umum sudah baik. Walaupun pada dasarnya untuk kejadian bencana memang tidak dapat diprediksi sebelumnya, artinya ada kejadian alam yang diluar kemampuan manusia namun paling tidak kita sudah berusaha meminimalkan hal hal yang berakibat atau hal hal yang bias menimbulkan bencana.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang di akibatkan oleh factor alam maupun oleh manusia sendiri seperti membakar hutan dan lahan. Terkait dengan faktor alam yang pada dasarnya kita dapat mengkaji dari beberapa kejadian dari tahun ketahun yang telah leawat atau tahun sebelumnya. Demi mewujudkan keberhasilan Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping memperhatikan Strategi dan Faktor – faktor pendukung dan penghambat juga perlu penentuan isu isu strategi SKPD.

1. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
   a. Tingginya risiko bencana akibat perubahan iklim,
   b. Masih banyaknya kontruksi bangunan yang rawan banjir dan kebakaran
   c. Belum adanya kesadaran masyarakat yang membangun rumah di bantaran sungai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun bangunan gedung yang diikuti dengan perhatian terhadap daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, kebakaran, kekumuhan dan rawan kriminalitas.
   d. Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanggulangan bencana, Peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan
   e. Frekuensi kebakaran hutan dan lahan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk lebih spesifikasi secara umum review pelaksnaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sasaran program tahun yang telah lewat diarahkan untuk memantapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan kepada masyarakat yang kena bencana dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkena bencana. Maka dengan ini menganalisis hasil kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Sakip BPBD
2. Menurunnya Indeks Risiko Bencana
3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**Persentase Terlesenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	3,504,204,752	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**Persentase Terlesenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	3,555,204,752	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	192,326,123	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	243,326,123	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50,420,163	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	99,323,193	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	35,341,130	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	35,341,130	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	57,661,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	57,661,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100 %	2,817,951,729	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2,817,951,729	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2,688,991,229	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2,688,991,229	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	126,648,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	126,648,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,427,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,312,500	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan barang milik daerah	100 %	2,397,800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemenuhan barang milik daerah	100%	2,399,250	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2,397,800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2,399,250	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	77,114,300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	27,114,300	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	21,610,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	21,610,000	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	5,504,300	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	5,504,300	
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	6 orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	6 orang	50,000,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100 %	193,454,050	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100%	193,454,050	
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25,978,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25,978,300	
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	11,239,350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	11,239,350	
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	11,720,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	11,720,400	
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	144,516,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	144,516,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. HSU	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	55,760,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. HSU	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	55,760,000	
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	55,760,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	55,760,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,324,050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100,324,050	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	37,071,650	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	37,071,650	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52,380,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52,380,000	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	10,872,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	10,872,400	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	114,845,530	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	114,875,250	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 kendaraan	87,841,530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 kendaraan	91,935,250	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 peralatan	12,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 peralatan	12,500,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	14,504,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 gedung	10,440,000	
B	**Program Penanggulangan Bencana**	**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	1,631,048,913	**Program Penanggulangan Bencana**	**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana**	**100%**	4,009,923,913	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananinformasi rawan bencana (Kab.HSU)	100 orang	112,676,800	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananinformasi rawan bencana (Kab.HSU)	100 orang	112,676,800	
9.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	34,630,800	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	34,630,800	
9.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	78,046,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	78,046,000	
10	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU)	540 orang	489,123,300	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU)	540 orang	489,123,300	
10.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20 orang	34,171,100	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 orang	34,171,100	
10.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	139,793,400	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	139,793,400	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 buah	20,680,000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 buah	20,680,000	
10.5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	250,203,700	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	10,000,000	
10.6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 orang	19,838,000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. HSU	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 orang	19,838,000	
10.7	Penguatan Kapasitas Kawasan Penanggulangan Bencana	Kab. HSU	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan / desa	24,437,100	Penguatan Kapasitas Kawasan Penanggulangan Bencana	Kab. HSU	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan / desa	24,437,100	
11	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU)	500 orang	746,042,000	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. HSU	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU)	500 orang	3,174,917,000	
11.1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. HSU	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 laporan	5,250,000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. HSU	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 laporan	5,250,000	
11.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	405,030,000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	405,030,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	236,950,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	236,950,000	
11.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	76,812,000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 laporan	276,812,000	
11.5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40 orang	22,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20.000 orang	2,250,875,000	
12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. HSU	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	283,206,813	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. HSU	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana	100%	283,206,813	
12.1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	41,182,500	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	41,182,500	
12.2	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan	6 orang	94,576,563	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan	6 orang	94,576,563	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)			
12.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	3 lembaga	35,500,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	3 lembaga	35,500,000	
12.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. HSU	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	5 dokumen	31,052,500	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. HSU	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	5 dokumen	35,500,000	
12.5	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. HSU	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	45,395,250	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. HSU	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	45,395,250	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12.6	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	35,500,000	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	35,500,000	
				5.136.434.265					7,325,021,935	

Berdasarkan Analis Kebutuhan Anggaran SKPD , Anggaran Sub Kegiatan yang belum terakomodir penuh di ranwal renja :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: **Rp. 50.000.000,- (Kebutuhan Bimtek Perencanaan)**
2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi: **Rp. 250,203,700,- (Penyusunan Dokumen Renkon)**
3. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana : **Rp. 200.000.000,- (Kegiatan Posko Tanggap Darurat Bencana)**
4. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota : **Rp. 2,228,875,000 (Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana)**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5 Usulan Program Dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan

Untuk penelaahaan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Badan Penangulangan Bencana Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2025 belum menerima usulan.

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / HASIL REVIEW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

A. Telaahan Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal bahwa untuk pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Urusan Wajib tersebut meliputi 6 (enam) urusan salah satunya Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dalam hal ini termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan, yaitu urusan Trantibumlinmas. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, sebagaimana dalam ketentuan umum dalam peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sedangkan untuk standar tekhnis dan Petunjuk tekhnis operasionalnya ditetapkan oleh masing masing kementerian/lembaga pengampu SPM.

Penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 di mulai pada tahun 2019. Pemerintah Daerah sejak tahun 2019 akan di nilai dan dievaluasi dengan melihat tingkat pemenuhan SPM nya di daerah masing masing. Pelaksanaan penerapan SPM tahun 2021 di daerah dalam penerapannya masih menggunakan permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pelaksanaan penerapan SPM tahun 2022 dalam melakukan tahapan (i) Pengumpulan Data (ii). Penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dasar serta (iii). Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sudah menggunakan permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 tahun 2018, sedangkan untuk tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasarnya dilaksanakan sejak pada tahun 2023.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara Indonesia.

Arahan Presiden RI dalam Rakornas BNPB Tahun 2023 :

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal.
Pertama, yaitu sistem peringatan dini.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

"Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung," kata Presiden.

Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi.
Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

"Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ," ujarnya.

Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.

"Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kesimpulan dari arahan Presiden RI yakni :

1. Lakukan peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini.
2. Edukasi masyarakat. Latihan dan lain – lain harus dilakukan. Skenario harus disiapkan sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung.
3. Perhatikan tata ruang dan konstruksi. Ini dinas –dinas utamanya Dinas PU Daerah, Bappeda, harus menyiapkan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. BPBD dan Pemda sebagai ujung tombak penanggulangan bencana agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing – masing.
5. Siapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Gunakan sebesar – besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil.
6. Daerah harus masukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya.
7. Segera bagikan bantuan ke para korban, jangan ditumpuk di posko.
8. Sederhanakan regulasi kebencanaan dan lakukan manajemen kontrol dengan baik.

Arah Kebijakan Propinsi

Target capaian dan program prioritas Kepala Daerah berdasarkan RPD dalam bidang penanggulangan bencana Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menurunnya Indeks Risko Bencana dari 138 menjadi 135 menjadi target kepala daerah (Penurunan Skor 3 Point dari 5 tahun berjalan).
2. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana, dengan taget kenaikan IKD Indeks Kapasitas Daerah 0,01 per tahun menjadi Target dan Indikator Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Kinerja yang bertujuan sebagai berikut :

- Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
- Persentase Penanganan Pra Bencana.
- Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- Persentase Peningkatan Upaya Penanganan Darurat Bencana.

4. Tesedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dan Rencana dan recana kontijensi (RENKON) dari kondisi awal.

Visi BPBD Propinsi *KALIMANTAN SELATAN TANGGUH DAN TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA" dengan Misi :*

1. Mengembangkan SDM kebencanaan yang mampu menguasai teknologi dan rekayasa bidang penanggulangan bencana.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Merumuskan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan tata kelola kebencanaan dengan berbasiskan teknologi dan informatika.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja BPBD HSU

1. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta sasaran renja sesuai dengan RPD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih Potensial dan Produktif
2. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur di Daerah
3. Meningkatkan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
4. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam/Lahan yang Berkelanjutan

2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Meningkatkan penyelengaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur jalan pasca bencana
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Pengurangan lokasi banjir
5. Penanganan tanggap darurat dan bencana lainnya

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat di lihat pada tabel di bawah:

TABEL

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. HSU

	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI (Masalah)	ARAH KEBIJAKAN (Akar Masalah)	PROGRAM
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Sinergitas Perencanaan di Tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	2. Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana Daerah	1. Meningkatkan Kualitas dengan Review Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Indeks Ketahanan Daerah	2. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas	2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
   b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penanggulangan Bencana

6. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
    a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana
    b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
7. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
    b) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    c) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    d) Penyusunan Rencana Kontijensi
    e) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    f) Penguatan Kapasitas Kawasan Penanggulangan Bencana
8. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
    a) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
    b) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    c) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    d) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
    e) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
9. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    a) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
c) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
d) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
e) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
f) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

4.2 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/ kegiatan dan sub kegiatan

Untuk perumusan Program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diarahkan untuk mencaai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Hulu Sungai Utara. Berdasarkan latar belakang atas rangkaian peristiwa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam (banjir, kekeringan, angin putting beliung, tanah longsor) faktor non alam (kebakaran lahan,kebakaran pemukiman, wabah penyakit) ataupun bencana sosial (konflik sosial, teror) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Perlindungan terhadap masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan , pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sarana. Kegiatan tersebut sangat memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dengan didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Dalam penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan SKPD. Dan berdasarkan hasil Furom Konsultasi Publik untuk Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 bahwa hal hal yang di tindaklanjuti berdasarkan spesifikasi kegiatan adalah sebagai berikut :

Aspek Sosial Budaya

Permasalahan Sosial Budaya :

Penurunanan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Isu Strategis Aspek Sosial Budaya Yaitu :

Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Prioritas :

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana

Sasaran

Penurunan Indeks Resiko Bencana

Aspek Infrastruktur

Permasalahan Aspek Infrastruktur :

Penurunan Kualitas Lingkungan hidup dan rusaknya infrastruktur pascabencana alam

Isu Strategis Aspek Infrastruktur

Prioritas :

Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana

Sasaran aspek Infrastruktur

Peningkatan Indks Ketahanan Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.3 Uraian garis besar mengenal rekapitulasi program/kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan akan dilaksankan di tahun 2024 yakni sebanyak 2 (dua) dan Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 10 (Sepuluh) kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 41 (empat puluh satu).

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

N0	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 50, 420,093
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 35,341,130
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 57,661,800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2,688,991,229
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 126,648,000
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2,427,300
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2,397,800
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Rp. 21,610,000
		9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 5,504,300
		10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 50,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25,978,300

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	11,239,350
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	11,720,400
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	144,516,000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	55,760,000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	37,071,650
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	52,380,000
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	10,872,400
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	87,841,530
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	12,500,000
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	14,504,000
Program Penanggulangan Bencana					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Rp.	34,630,800
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp.	78,046,000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	34,171,100
		4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	139,793,400
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	20,680,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	250,203,700
		7	Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp.	19,838,000
		8	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	19,838,000
		9	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Rp.	24,437,100
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp.	5,250,000
		11	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	405,030,000
		12	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	236,950,000
		13	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp.	76,812,000
		14	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	22,000,000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	15	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	41,182,500
		16	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp.	31,052,500
		17	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	94,576,563
		18	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp.	35,500,000
		19	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kot	Rp.	45,395,250
		20	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	35,500,000
JUMLAH				**Rp.**	**5,136,434,265**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan prakiraan maju

(sesuai dengan pagu indikatif awal)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
RENJA SKPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Label (Tag)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlesenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Utara	100%	3,505,385,352	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	3,505,301,722	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100%	143,423,093	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	143,423,093	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	50,420,163			4 dokumen	50,420,163	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 dokumen	35,341,130			8 dokumen	35,341,130	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	57,661,800			4 dokumen	57,661,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah		100%	2,818,066,529	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	2,817,951,729	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 orang x 14 bulan	2,688,991,229			25 orang x 14 bulan	2,688,991,229	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	126,648,000			12 dokumen	126,648,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	2,427,300			1 laporan	2,312,500	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah		100%	2,397,800	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	2,399,250	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	2,397,800			1 laporan	2,399,250	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	77,114,300	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	77,114,300	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	21,610,000			1 paket	21,610,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		6 dokumen	5,504,300			6 dokumen	5,504,300	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 orang	50,000,000			6 orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah		100%	193,454,050	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	193,454,050	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	25,978,300			4 paket	25,978,300	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 paket	11,239,350			10 paket	11,239,350	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	11,720,400			12 paket	11,720,400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	144,516,000			12 laporan	144,516,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	55,760,000	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	55,760,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	55,760,000			1 unit	55,760,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	100,324,050	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	100,324,050	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	37,071,650			12 laporan	37,071,650	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	52,380,000			12 laporan	52,380,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	10,872,400			12 laporan	10,872,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	114,845,530	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	114,875,250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 kendaraan	87,841,530			27 kendaraan	91,935,250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36 peralatan	12,500,000			36 peralatan	12,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 gedung	14,504,000			2 gedung	10,440,000	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Hulu Sungai Utara	100%	1,631,048,913	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	100%	3,819,720,213	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananinformasi rawan bencana (Kab.HSU)		100 orang	112,676,800	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		200 orang	112,676,800	SPM/ Kemiskinan/ Gender/SD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

										C S
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 dokumen	34,630,800			1 dokumen	34,630,800	SPM/ SDG's
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		100 orang	78,046,000			200 orang	78,046,000	SPM/ Kemiskinan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU)		540 orang	489,123,300	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		560 orang	248,919,600	SPM/ Kemiskinan/ Gender/SDG's
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		40 orang	34,171,100			60 orang	34,171,100	SPM /Gender

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		12 dokumen	139,793,400			12 dokumen	139,793,400	SPM
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		10 buah	20,680,000			10 buah	20,680,000	SPM
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		1 dokumen	250,203,700			1 dokumen	10,000,000	SPM
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		500 orang	19,838,000			500 orang	19,838,000	SPM/ Gender
	Penguatan Kawasan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		1 kawasan / desa	24,437,100			1 kawasan / desa	24,437,100	SDG's
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU)		500 orang	746,042,000	x		500 orang	3,174,917,000	SPM/ Kemiskinan/ Gender/SDG's
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		1 laporan	5,250,000			12 laporan	5,250,000	SPM/ Kemiskinan/ Gender/SD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

										G's
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		4 sk	405,030,000			4 sk	405,030,000	SPM
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		500 orang	236,950,000			500 orang	236,950,000	SPM/ Kemiskinan/ Gender/SDG's
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		2 laporan	76,812,000			2 laporan	276,812,000	SPM
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		40 orang	22,000,000			20.000 orang	2,250,875,000	Kemiskinan/ Gender
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana		100%	283,206,813	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	283,206,813	Gender/ SDG's

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 dokumen	41,182,500			1 dokumen	41,182,500	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		1 dokumen	31,052,500			1 dokumen	31,052,500	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		6 Orang	94,576,563			5 data	94,576,563	Gender
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi		3 lembaga	35,500,000			3 lembaga	35,500,000	Gender

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kot	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana		1 Laporan	45,395,250			1 Laporan	45,395,250	SDG's
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 dokumen	35,500,000			1 dokumen	35,500,000	
JUMLAH					5,136,434,265				7,325,021,935	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

5.1. Penjelasan

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, community Basei Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelau-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradiGma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun ini adalah merupakan program tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hulu Sungai Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

52. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ada beberapa hal yang perlu ditanggapi terkait program dan kegiatan Penanggulangan Kebencanaan :

1. Menanggapi usulan masyarakat atas kejadian pascabencana antara lain bencana tanah longsor, banjir dan angin putting beliung, diharapkan untuk Penganggaran atau Dana tak terduga untuk Pasca Bencana tersebut agar dialokasikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar mengurangi kerumitan prosedur dalam bantuan pascabencana.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk kedaruratan, dalam hal ini fokus pada alat pemadam kebakaran seperti trail, mobil truck pemadam

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Renja 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping itu juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, Maret 2024
Kepala Pelaksana BPBD Kab. HSU

SYAMRANI, S.Sos M.AP
PEMBINA Tk. I / IVb
NIP. 19680602 199002 1 002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan petunjuk dan izin-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini merupakan dokumen untuk pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2025 dan rencana kerja ini juga mengacu pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, sehingga terdapat sinergitas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Amuntai, Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

H. AMBERANI, SH, MH
NIP. 19700421 199603 1 006

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 16

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 24

BAB V PENUTUP

Penutup 28

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
2. Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
3. Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
6. Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2025 merupakan pedoman dalam awal pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran untuk tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026, didalamnya terdapat penjabaran visi misi dan program prioritas pembangunan. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara tahun 2025 dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Pembinaan Kerukunan antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang memiliki sinergitas dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mencapai visi dan misinya dalam mendukung pelaksanaan di tahun 2025.

Melalui Rencana Kerja tersebut Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dapat diaplikasikan serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2024 adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Pasal 78 ayat (1.d) menyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan awal RKPD diperlukan penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2025 adalah :

- Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional;
- Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara;
- Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;
- Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan publik;

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat Uraian penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya, Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dan Rencana Tindak Lanjut.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep yang mana diperlukan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana **Tabel 2.1.1.** berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel 2. 1.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Urusan	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Umum	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,063,538,002.00**	**1,897,415,154.00**	**92%**
	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,656,359,854.00	1,529,442,096.00	92%
	1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	1,598,759,854.00	1,471,842,096.00	92%
	1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	57,600,000.00	57,600,000.00	100%
	1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	0%
	1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	0.00	0%
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282,211,400.00	267,995,805.00	95%
	1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	0.00	0.00	0%
	1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	13,070,400.00	10,878,075.00	83%
	1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	8,000,000.00	6,342,500.00	79%
	1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	261,141,000.00	250,775,230.00	96%
	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,733,748.00	45,779,948.00	81%
	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	20,071,380.00	14,327,500.00	71%
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	18,365,868.00	15,267,148.00	83%
	1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	18,296,500.00	16,185,300.00	88%
	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,233,000.00	54,197,305.00	79%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	49,983,000.00	40,055,305.00	80%
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	5,250,000.00	1,200,000.00	23%
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	13,000,000.00	12,942,000.00	99%
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**128,729,500.00**	**86,233,500.00**	**67%**
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	128,729,500.00	86,233,500.00	67%
2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	13,425,000.00	0.00	0%
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24,720,000.00	24,051,000.00	97%
2.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	61,325,000.00	37,563,500.00	61%
2.1.4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	6,989,500.00	6,449,000.00	92%
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**22,834,131,400.00**	**22,811,585,400.00**	**99%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	22,834,131,400.00	22,811,585,400.00	99%
3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	20,263,716,400.00	20,243,475,400.00	99%
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	2,570,415,000.00	2,568,110,000.00	99%
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**10,475,000.00**	**9,870,000.00**	**94%**
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10,475,000.00	9,870,000.00	94%
4.1.1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	10,475,000.00	9,870,000.00	94%
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**161,912,300.00**	**128,394,500.00**	**79%**
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	161,912,300.00	128,394,500.00	79%
5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	161,912,300.00	128,394,500.00	79%
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**374,383,000.00**	**293,710,000.00**	**78%**





	6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	374,383,000.00	293,710,000.00	78%
	6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	374,383,000.00	293,710,000.00	78%
	Total		25,573,169,202.00	25,242,208,554.00	99%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan **Tabel 2.1.2** diatas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di tahun 2023 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 sub Kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp 25,573,169,202.00 dan realisasi sebesar Rp 25,242,208,554.00 atau 99% sehingga dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan yang belum memenuhi target yang direncanakan pada Renja PD Tahun Lalu (2023)**

   Dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 sub Kegiatan tersebut, setelah pelaksanaannya bahwa Realisasi program/kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja hasil/keluara*n yang direncanakan pada Renja-PD Tahun Lalu (2023) sebanyak 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 sub Kegiatan (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi belum terlaksana karena tidak ada undangan Bimbingan teknis) dengan capaian keseluruhan 95%.

2. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau belum tercapai sepenuhnya target kinerja program/kegiatan, antara lain :

   - Anggaran yang disediakan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disediakan sesuai dengan struktur SOTK SKPD, Capaian realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena SOTK yang ada tidak terisi sepenuhnya pegawai yang ada pada Badan Kesbangpol Tahun 2023 hanya terisi 2 orang kasubag, 3 Kabid, dan 4 pelaksana
   - Anggaran Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi disediakan ternyata sampai akhir tahun tidak ada undangan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
   - Anggaran Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia sesuai dengan pilihan SSH ternyata harga pasaran lebih rendah dan realisasikan hanya sesuai keperluan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Anggaran Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia, ternyata beban tarif listrik, air, internet lebih rendah, yang dibayarkan sesuai tagihan perbulan kerana ASN dan tenaga kontrak hanya berjumlah 14 orang saja serta ruangan kantor nya masih kecil
- Anggaran Sub Kegiatan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tersedia, ternyata perallatan masih dalam kondisi baik
- Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedia, ternyata tamu yang datang tidak sesuai dengan perhitungan jumlah anggaran yang tersedia
- Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedia sesuai dengan pilihan SSH ternyata harga pasaran lebih rendah dan realisasikan hanya sesuai keperluan
- Capaian kinerja yang tidak tercapai dipengaruhi oleh adanya Sub kegiatan pada GNRM sebagian yang diundang tidak berhadir jadi realisasi keuangan tidak 100% terpenuhi yang mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi keuangan Anggaran secara penuh.
- Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tersedia, ternyata pada kegiatan tes urine pada ASN tidak terlaksana karena paket barang pada tes urine terkendala regulasi pengadaan barang
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tidak tercapai dipengaruhi oleh adanya Sub kegiatan pada Forkopimda sebagian yang diundang tidak berhadir jadi realisasi keuangan tidak 100% terpenuhi yang mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi keuangan secara penuh

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pencapaian target kinerja yang rata-rata sebagian besar telah mencapai target bahkan melebihi target sangat berimplikasi mendukung terhadap pencapaian target program RENSTRA pada akhir periode Tahun 2026.

Untuk program dan kegiatan yang belum mencapai target diharapkan dalam tahun rencana dan pelaksanaan berikutnya harus tercapai bahkan harus melebihi target agar pencapaian target RENSTRA pada akhir periode Tahun 2026 dapat tercapai.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap terget Renstra dapat tercapai.

Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026, bahwa dalam rangka mendukung pedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

terdapat keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja pada RPJMD Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dijelaskan dalam **tabel 2.2.1** berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Analisis Tingkat Kinerja

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sugai Utara dari tahun 2023-2026 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

- Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk perencanaan, pengendalian,dan evaluasi pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.

- Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan struktur perangkat daerah.
- Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

b. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- Peningkatan penyediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Selatan guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengoptimalkan pengimplementasian regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peningkatan pencapaian sasaran pembangunan baik dalam RPJMD dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang profesional.
- Peningkatan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang merupakan kegiatan yang dialihkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Masih rendahnya pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi
- Rendahnya partisipasi politik masyarakat
- Masih kurangnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 yang disusun

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Ahkir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
Melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam **tabel 2.4.1** berikut

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Usulan untuk program dan kegiatan kepada masyarakat Untuk usulan program dan kegiatan pada Renja tahun 2025 belum mengakomodir usulan dari masyarakat dan pokir dewan (para pemangku kepentingan)

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri (Halaman 010.A.1) dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut (Halaman 010.B.66 dan 010.B.67), yaitu :

1) Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri (4 indikator);
3) Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (2 indikator);
5) Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (2 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama;
7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa, yaitu :

a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan

b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

1. Tujuan :
   - Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
   - Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial agama di masyarakat
2. Sasaran :
   - Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
   - Terwujudnya tata kehidupan sosial agama yang harmoni

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen danindikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang diupayakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   2) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
    a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
        1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
    a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
        1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
    a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
        1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
        2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Rancangan Awal RENJA ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 disajikan dalam **tabel 4.1** berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD, KUA-PPAS, Renja-PD, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana tindak lanjut dari rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RENJA) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif danefisien.

Amuntai, Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. AMBERANI, SH, MH
NIP. 19700421 199603 1 006

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA

2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. RENJA Tahun 2025 ini merupakan salah satu media perencanaan yang memuat gambaran tentang program dan kegiatan yang akan kami kerjakan pada tahun anggaran 2025 mendatang. Diharapkan dengan adanya dokumen ini, segala bentuk kegiatan dapat lebih terarah dan fokus kepada tujuan yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Penyusunan dokumen perencanaan RENJA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini mengacu kepada dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan dokumen perencanaan RENJA masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap dokumen perencanaan ini ada manfaatnya, minimal sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai maupun yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga pembuatan dokumen perencanaan RENJA tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dokumen perencanaan ini pada masa yang akan datang.

Amuntai, April 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

JUMADI, S.AP, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19730608 199311 1 002

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL MUKA	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	.....	**1**
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	.....	**10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	.....	60
2.3 Isu-Isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD	.....	68
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	73
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	90
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	**91**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	91
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	.....	92
3.3 Program dan Kegiatan	.....	96
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	**98**
BAB V PENUTUP	.....	**110**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, maka prasyarat utama adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik *(good governance).* Dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan kepemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan perencanaan yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Salah satu penerapan sistem perencanaan instansi pemerintah adalah berupa dokumen Rencana Kerja (RENJA).

Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2025 ini masuk pada tahapan ke-1 (satu) dari dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2023-2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

36. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan;
37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
38. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 Rencana Stategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam menyusun dan melaksanakan sumber daya yang ada agar mampu menjawab tantangan perkembangan strategi regional, nasional maupun global. Serta menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan pembuatan dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat diketahui kebutuhan riil dalam melaksanakan serangkaian kebijaksanaan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai pemasalahan yang dihadapi.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV ini menjabarkan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian renja perangkat daerah tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi/telah memenuhi/yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi/Telah Memenuhi/Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Capaian
1	(Program) Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI/PAKET A, APK SMP/MTS/PAKET B dan Angka Melek Hurup	100%	100%
1.1	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD/MI/PAKET A	100%	96,37%
1.2	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP/MTs/PAKET B	100%	119,89%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Capaian
1.3	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APK PAUD	60,00 %	86,38%
1.4	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Melek Hurup	100%	100%
2	(Program) Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	76,00%	58,74%
2.1	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	100%	58,74%
3	(Program) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
3.1	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%
3.2	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%
3.3	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
3.4	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%
3.5	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%
3.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah	100%	100%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	100%	100%
4.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	100%	100%
4.2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional	100%	100%
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Capaian
5.1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, 79 (tujuh puluh sembilan) Sub kegiatan. Semuanya sangat menunjang pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi nya masih belum maksimal di antaranya adalah:

- Bencana Alam (seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang dll) berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan;
- Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran.
- Belum Optimalnya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang berpengaruh terhadap masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan merencanakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja di antaranya refocusing anggaran yang menyebabkan realisasi dari target tidak bisa mencapai 100%. Tindak Lanjut yang diperlukan dengan menganggarkan kembali kegiatan yang di refocusing di tahun berikutnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang masih direncanakan pada Renja Tahun 2025 ini perlu menjadi prioritas peningkatan kinerja dan pendanaan guna menunjang mengoptimalkan pencapaian target.

Sedangkan terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target dan melebihi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetap dipertahankan dengan mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki .

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disebutkan maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Tabulasi kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan;
- Membuat time line yang lebih mendetail terhadap semua program, kegiatan, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi;
- Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase APK PAUD, APK SD/MI/PAKET A, APK SMP/MTs/PAKET B dan Persentase Angka Melek Hurup**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.2.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase APK SD/MI/PAKET A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	100%
1.01.02.2.01.0006	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terbangun	0 Unit	4 Paket/Unit	32 Paket/Unit	32 Paket/Unit	100%	28 Unit	28 Unit	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0009	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Unit	18 Ruang	18 Ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.2.01.0010	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi	0 Ruang	0 Unit	2 Ruang	2 Ruang	100%	0 ruang	0 ruang	0%
1.01.02.2.01.0011	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah yang terehabilitasi sedang/ Berat	0 Ruang	3 Unit	7 Ruang	7 Ruang	100%	3 Unit/ruang	3 Unit/ruang	100%
1.01.02.2.01.13	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Terehabilitasi	0 Unit	3 Unit/ruang	1 Unit/ruang	1 Unit/ruang	100%	0 ruang	0 ruang	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0026	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SD	310 Orang	276 Orang	310 Orang	310 Orang	100%	310 Orang	310 Orang	100%
1.01.02.2.01.0027	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	522 Orang	586 Orang	8270 Orang	8270 Orang	100%	1162 Orang	1162 Orang	100%
1.01.02.2.01.0028	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan karakter	184 Sekolah	1150 Orang/sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	100%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0035	(Sub kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	552 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	184 O rang	184 O rang	100%
1.01.02.2.01.0037	(Sub Kegiatan) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	368 Orang	0 Orang	0%	368 Orang	368 Orang	100%
1.01.02.2.01.0038	(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	31 Dokumen	31 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0039	(Sub Kegiatan) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.02.2.01.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	100%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%
1.01.02.2.01.0048	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	4 Paket/Unit	28 Unit	28 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0051	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	7 Paket /ruang	36 Ruang	36 Ruang	100%	34 Ruang	34 Ruang	100%
1.01.02.2.01.0055	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24 Paket	12 Sekolah	567 Paket	567 Paket	100%	590 Paket	590 Paket	100%
1.01.02.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0014	(Sub Kegiatan)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang terehabilitasi	8 Ruang	21 Ruang	20 Ruang	20 Ruang	100%	17 Ruang	17 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0017	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100%	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0018	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Bangunan Laboratorium yang Terehabilitasi	0 Ruang	7 Ruang	7 Ruang	7 Ruang	100%	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0022	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas parkir yang Terehabilitasi sedang/ berat	1 Unit	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0%	0 Ruang	0 Ruang	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0024	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman dan ruang ibadah yang terehabilitasi	0 Unit	26 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	100%	12 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	100%
1.01.02.2.02.0032	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima beasiswa Berprestasi akademik SMP	593 Peserta Didik	661 Orang	593 Orang	593 Orang	100%	1454 Orang	1454 Orang	100%
1.01.02.2.02.0039	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SMP	114 Orang	49 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	66 Orang	66 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0040	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru SMP yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	155 Orang	938 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	590 Orang	590 Orang	100%
1.01.02.2.02.0041	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti kegiatan Pendidikan karakter dan terpenuhinya jumlah Guru mata Pelajaran	28 Satuan Pendidikan	4625 Siswa	28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	100%	28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	100%	31 Sekolah	31 Sekolah	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0048	(Sub Kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	70 0rang	70 0rang	100%
1.01.02.2.02.0050	(Sub kegiatan) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1.01.02.2.02.0051	(Sub kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	31 Dokumen	31 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0055	(Sub Kegiatan) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
1.01.02.2.02.0058	(Sub kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0%	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0%
1.01.02.2.02.0067	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	Paket	50 Paket	50 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100%
1.01.02.2.03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**	**62,00%**	**59%**	**90%**	**59%**	**65.56%**	**92.50%**	**92.50%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.03.0002	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	0 Unit	0 Sekolah	5 Unit	5 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.2.03.0015	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang PAUD	350 Orang	265 Orang	277 Orang	277 Orang	100%	277 Orang	277 Orang	100%
1.01.02.2.03.0016	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	500 Orang	0 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	275 Orang	586 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.03.0045	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah direhabilitasi sedang/ Berat	2 Unit	10 Gugus	2 Unit	2 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
1.01.02.2.03.0047	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK)	287 Satuan Pendidikan	369 Orang	2842 Orang	2842 Orang	100%	2842 Orang	2842 Orang	100%
1.01.02.2.03.18	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**100%**	**99,85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.2.04.0014	(Sub kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	464 Orang	464 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.04.0016	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	100 Orang	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.04.17	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**	**100%**	**74%**	**76%**	**59%**	**78%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.04.2.01	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik	100%	74%	80%	74%	92,84%	100%	100%	100%
1.01.04.2.01.0001	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah yang terhitung dan terpetakan	1 Dokumen	3104 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.04.2.01.0002	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina dan memiliki kinerja baik	1 Laporan	216 Orang	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
X.XX.01.2.01	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.01.2.01.0006	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.02.0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	31164 orang	2226 orang	31164 orang	31164 orang	100%	31164 orang	31164 orang	100%
X.XX.01.2.05	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.05.10	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.06.0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	20 Buah	35 Paket	35 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.2.06.0004	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang digunakan	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%	100%	100%	100%
1.01.01.2.06.0005	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	50 Paket	53 Buah	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.01.2.06.0006	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	4 Dokumen	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.06.0009	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD yang dilaksanakan	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%
X.XX.01.2.08	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.01.2.08.0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan keluar yang ditribusikan sesuai peruntukkannya	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.08.0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.2.08.0004	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.09	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%	75%	75,00	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
X.XX.01.2.09.02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	23 Unit	279 Buah	33 Unit	33 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
X.XX.01.2.09.06	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	0 Buah	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
1.01.01.2.09.0010	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	43 Unit	2 Buah	7 Unit	7 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021										
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
X.XX.01	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
X.XX.01.2.01	**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.01.2.01.00 06	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
X.XX.01.2.02	**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.01.2.02.0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 orang	2226 orang	31164 orang	31164 orang	100%	31164 orang	31164 orang	100%
X.XX.01.2.05	**(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.05.0010	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06	**(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.01.2.06.0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20 Buah	35 Paket	35 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.01.01.2.06.0004	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.06.0005	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	53 Buah	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	50 Paket	100%
1.01.01.2.06.0006	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%	4 Bahan Bacaan	4 Bahan Bacaan	100%
1.01.01.2.06.0009	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%
X.XX.01.2.08	**(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.08.0001	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.01.01.2.08.0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.01.01.2.08.0004	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.09	**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**75,00**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.01.2.09.0002	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	397 Unit	279 Buah	33 Unit	33 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
X.XX.01.2.09.06	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	0 Buah	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
1.01.01.2.09.0009	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Buah	7 Unit	7 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
1.01.02	**(PROGRAM) PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka rata-rata lama sekolah**	**8.17**	**7,76%**	**100%**	**93,84%**	**93,84%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.02.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase APK SD/MI Paket A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.00 06	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terbangun	0 Unit	4 Paket/Unit	32 Paket/Unit	32 Paket/Unit	100%	28 Unit	28 Unit	100%
1.01.02.2.01.00 09	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	2 Unit	18 Ruang	18 Ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.2.01.00 10	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang terehabilitasi	0 Ruang	0 Unit	2 Ruang	2 Ruang	100%	0 ruang	0 ruang	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0011	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah yang terehabilitasi sedang/ Berat	0 Ruang	3 Unit	7 Ruang	7 Ruang	100%	3 Unit/ruang	3 Unit/ruang	100%
1.01.02.2.01.13	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Terehabilitasi	0 Unit	3 Unit/ruang	1 Unit/ruang	1 Unit/ruang	100%	0 ruang	0 ruang	0%
1.01.02.2.01.0026	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SD	310 Orang	276 Orang	310 Orang	310 Orang	100%	310 Orang	310 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0027	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	522 Orang	586 Orang	8270 Orang	8270 Orang	100%	1162 Orang	1162 Orang	100%
1.01.02.2.01.0028	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan karakter	184 Sekolah	1150 Orang/sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	100%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%
1.01.02.2.01.0035	(Sub kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	552 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	184 O rang	184 O rang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0037	(Sub Kegiatan) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	368 Orang	0 Orang	0%	368 Orang	368 Orang	100%
1.01.02.2.01.0038	(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	31 Dokumen	31 Dokumen	100%
1.01.02.2.01.0039	(Sub Kegiatan) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.01.02.2.01.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	184 Sekolah	100%	184 Sekolah	184 Sekolah	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.01.0048	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	4 Paket/Unit	28 Unit	28 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%
1.01.02.2.01.0051	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	7 Paket /ruang	36 Ruang	36 Ruang	100%	34 Ruang	34 Ruang	100%
1.01.02.2.01.0055	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24Paket	12 Sekolah	567 Paket	567 Paket	100%	590 Paket	590 Paket	100%
1.01.02.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs Paket B**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0014	(Sub Kegiatan)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang terehabilitasi	0 Ruang	21 Ruang	20 Ruang	20 Ruang	100%	17 Ruang	17 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0017	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	3 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100%	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0018	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Bangunan Laboratorium yang Terehabilitasi	0 Ruang	7 Ruang	7 Ruang	7 Ruang	100%	4 Ruang	4 Ruang	100%
1.01.02.2.02.0022	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas parkir yang Terehabilitasi sedang/ berat	1 Unit	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0%	0 Ruang	0 Ruang	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0024	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman dan ruang ibadah yang terehabilitasi	0 Unit	26 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	100%	12 Unit/bangunan	12 Unit/bangunan	100%
1.01.02.2.02.0032	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima beasiswa Berprestasi akademik SMP	593 Peserta Didik	661 Orang	593 Orang	593 Orang	100%	1454 Orang	1454 Orang	100%
1.01.02.2.02.0039	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang SMP	114 Orang	49 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	66 Orang	66 Orang	100%
1.01.02.2.02.0040	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru SMP yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	155 Orang	938 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	590 Orang	590 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0041	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa yang Mengikuti kegiatan Pendidikan karakter dan terpenuhinya jumlah Guru mata Pelajaran	28 Satuan Pendidikan	4625 Siswa	28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	100%	28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.42	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	100%	31 Sekolah	31 Sekolah	100%
1.01.02.2.02.0048	(Sub Kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	70 0rang	70 0rang	100%
1.01.02.2.02.0050	(Sub kegiatan) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.02.0051	(Sub kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	31 Dokumen	31 Dokumen	100%
1.01.02.2.02.0055	(Sub Kegiatan) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
1.01.02.2.02.0058	(Sub kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0%	0 Satuan Pendidik	0 Satuan Pendidik	0%
1.01.02.2.02.0067	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	Paket	50 Paket	50 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
01.01.2.2.03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**	**62,00%**	**59%**	**90%**	**59%**	**65.56%**	**92.50%**	**92.50%**	**100%**
1.01.02.2.03.0002	(Sub Kegiatan) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	0 Unit	0 Sekolah	5 Unit	5 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.01.02.2.03.0015	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah peserta penerima insentif PTK Non PNS Jenjang PAUD	350 Orang	265 Orang	277 Orang	277 Orang	100%	277 Orang	277 Orang	100%
1.01.02.2.03.0016	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru PAUD yang mengikuti kegiatan kompetensi dan lomba PTK berprestasi	500 Orang	0 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	275 Orang	586 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.03.0045	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah direhabilitasi sedang/ Berat	2 Unit	10 Gugus	2 Unit	2 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
1.01.02.2.03.0047	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK)	287 Satuan Pendidikan	369 Orang	2842 Orang	2842 Orang	100%	2842 Orang	2842 Orang	100%
1.01.02.2.03.18	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.02.2.04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**	**100%**	**100%**	**99,85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.02.2.04.0014	(Sub kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	464 Orang	464 Orang	100%
1.01.02.2.04.0016	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	100 Orang	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.04.17	(Sub Kegiatan) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.04	**(PROGRAM) PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**	**100%**	**74%**	**76%**	**59%**	**78%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.04.2.01	**(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik**	**100%**	**74%**	**80%**	**74%**	**92,84%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.01.04.2.01.0001	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah yang terhitung dan terpetakan	1 Dokumen	3104 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
1.01.04.2.01.00 02	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang dibina dan memiliki kinerja baik	1 Laporan	216 Orang	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	**(PROGRAM) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
2.22.02.2.01	**(Kegiatan) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.02.2.01.0001	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	100%	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	100%
2.22.02.2.01.0002	(Sub Kegiatan) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	100%	I Event/Kegiatan	I Event/Kegiatan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
2.22.02.2.02	**(Kegiatan) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.02.2.02.0001	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan	100%	2 Event/Kegiatan	2 Event/Kegiatan	100%
2.22.05	**(PROGRAM) PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.05.2.01	**(Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target tahun 2024(%)
2.22.05.2.01.0002	(Sub Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang DimanfaatkanJumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	0 Buah	0 Buah	0 Buah	100%	0 Buah	0 Buah	100%
2.22.05.2.02	**(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.05.2.02.0003	(Sub Kegiatan) Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	6 Buah	6 Buah	6 Buah	100%	6 Buah	6Buah	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan dilakukan terhadap penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan indikator yang telah ditetap dalam Renstra tahun 2023-2026. Berdasarkan target kinerja tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2024 dan 2025

dapat dilihat pada tabel berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)															
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)		✓	7.43	7.55	7.67	8,03	8,70	7.37	7,53	7,76	7,77	7.67	8,03	8,70	
2	Harapan Lama sekolah		✓	14	14	14	13,36	13,58	12.88	12,91	12,93	13,19	14	13,36	13,58	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	✓	✓	87.50%	90.00%	92.50 %	60,00	62,00%	64.52%	58,96%	70,53%	86,38	92.50%	60,00%	62,00%	
4	Angka Melek Hurup	✓	✓	99.65%	99.85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	✓	✓	100%	100%	100%	88,50	89,00%	90.30%	87,65%	86,64%	86,76	100%	88,50%	89,00%	
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	✓	✓	88.58%	90.58%	92.58 %	81,50	82,00%	80.16%	81,31%	81,56%	82,13%	92.58%	81,50%	82,00%	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	✓		100%	100%	100%	98.5	99,00%	95.99%	98,10%	91,11%	90,52%	100%	98,50%	99,00%	
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	✓		100%	100%	100%	94,00	95,00%	92.56%	93,88%	141,83%	99,31%	100%	94,00%	95,00%	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100.37%	98,60%	93,84%	96,37%	100%	100%	100%	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	✓		100%	100%	100%	100%	100%	107.92%	107,03%	111,29%	119,89%	100%	100%	100%	
11	Angka Putus Sekolah SD		✓	0.20%	0.18%	0.16%	0,15	0,14%	0.04%	0,13%	0,86%	0,07%	0.16%	0,15%	0,14%	
12	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs		✓	100%	100%	100%	95,00	96,00%	98.55%	97,10%	100%	79,28%	100%	95.00%	96,00%	
13	Rata-rata Nilai ujian Nasional SD			7.1	7.15	7.2	-	-	7.6	8,26	-	-	7.2	0	-	
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	✓		-	-	1,81	59,00	58,89	-	-	1,74	60,97	1,81	59,00	58,89	
15	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	✓		-	-	1,70	48,00	44,19	-	-	1,64	42,56	1,70	48,00	44,19	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
14	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP			59%	60%	65%	-	-	70.65%	70,65%	70,65%	-	65%	0	-	
15	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	✓		90%	95%	100%	-	-	91.30%	91,85%	91,85%	-	100%	0	-	
16	Rata-rata Nilai Sikap siswa SD Minimal baik (pendidikan karakter)			100	100	100	-	-	100	100	-	-	100	0	-	
17	Persentasi Lembaga PAUD yang berakreditasi minimal B			97.50%	100%	100%	-	-	75.52%	74,44%	67,38%	-	100%	0	-	
18	Persentasi SD yang berakreditasi minimal B			97.50%	100%	100%	-	-	91.30%	91,85%	93,30%	-	100%	0	-	
19	Angka Putus Sekolah SMP		✓	0.11%	0.10%	0.09%	0,50		0.58%	1,42%	0,57%	0,09	0.09%	0,50%	0,49%	
20	Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA		✓	97.50%	100%	100%	95,00%	96,00%	97.64%	98,29%	100%	91,66%	100%	95.00%	96,00%	
21	Persentasi Sekolah SMP berakreditasi minimal B			100%	100%	100%	-	-	96.77%	93,55%	90,32%	-	100%	0	-	
22	Rata-rata Nilai ujian Nasional SMP			6.5	6.75	7	-	-	7.52	7,52	-	-	7,52	0	-	
23	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	✓		-	-	1,82	69,00	68,84	-	-	1,74	65,71	1,82	69,00	68,84	
24	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	✓		-	-	1,71	61,00	65,08	-	-	1,64	65,08	1,71	61,00	65,08	
25	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP			59%	60%	65%	-	-	58.06%	61,29%	60,00%	-	65%	0	-	
26	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	✓		90%	95%	100%	-	-	100%	100%	95%	-	100%	0	-	
27	Rata-rata Nilai Sikap siswa SMP Minimal baik (pendidikan karakter)			100	100	100	-	-	100	100	100	-	100	0	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
28	Persentase Guru bersertifikat pendidik			70%	80%	100%	76,00		67.65%	74,27%	70,16%	58,74	100%	76.00%	76.00%	
29	Persentase GTK PAUD,SD,SMP memperoleh Kejuaraan di Tk.Provinsi			100%	100%	100%	100%	-	60.00%	100%	100%	-	100%	0	-	
30	Persentase PTK yang mengikuti kegiatan PKB			79.03%	93%	95%	-	-	80.08%	81,62%	81,62%	-	95%	0	-	
31	Persentase guru sesuai dengan mapel/keahlian (Linear)			0%	terpenuhi	terpenuhi	-	-	0%	0%	terpenuhi	-	terpenuhi	0	-	
32	Persentase PTK yang memiliki indek kinerja baik			100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	100%	0	-	
33	Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan mencapai 80,00			81	82	83	-	-	90.3	94,51	94,51%	-	83	0	-	
34	Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	
35	Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan			-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas di dalam pengelolaan Pendidikan Dasar serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

B. Target Pencapaian Spm

Beberapa indikator tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi(SD/MI, SMP/MTs)	100%	Tahun 2023
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Tahun 2023
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Tahun 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

C. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupeten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs) (31,834)	100%	87,45%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (6.793)	100%	72,61%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (6,924)	100%	86,38%

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa :

a) Pencapaian tertinggi dari 3 Jenis Pelayanan dasar dibidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Dasar yaitu sebesar 87,45% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yaitu sebanyak 36.403 Orang dimana telah bersekolah di SD/MI, SMP/MTs sebanyak 31.834 orang sehingga didapat angka capaian sebesar 87,45% penduduk sudah bersekolah formal, dan pada pondok pesantren di bawah naungan Kemenag sebanyak 16.053 orang.

b) Pencapaian terendah dari 3 Jenis Pelayanan dasar dibidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 72,61% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap Tahun. Berdasarkan data Jumlah Penduduk usia 7-18 Tahun yaitu sebanyak 9.355 Orang dan telah bersekolah di pendidikan formal sebanyak 6.793 orang terdapat selisih sebesar 2.562 orang.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Capaian realisasi SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 86,38% yaitu dari jumlah penduduk usia 5-6 sebesar 8.016 orang dan Siswa usia 5-6 Tahun yang bersekolah di PAUD berjumlah 6.924 orang sehingga di dapat angka 86,38%.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran terkait SPM untuk urusan Pendidikan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		Capaian	Ket.
		Pagu Anggaran	Realisasi	(%)	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				
1.1	(Kegiatan)Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1.1.1	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2,857,518,800	2,491,908,455	87,21	Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan SPM
1.2	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.2.1	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2,707,902,200	2,330,554,000	86,06	Pemenuhan SPM PAUD yang Belum Sekolah/ Mengikuti Pendidikan PAUD
1.3	(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.3.1	(Sub Kegiatan)Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	835,800,000	835,800,000	100	Kegiatan Pemenuhan SPM Program Kesetaraan
	Jumlah	6,401,221,000	5,658,262,455	88.39	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

E. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Data Personil Dinas Pendidikan

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	33	S3 : - orang S2 : 12 orang S1 : 19 orang D3 : 2 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : 8 orang SMP : - orang SD : - orang	Gol I : 0 orang Gol II : 8 orang Gol III : 17 orang Gol IV : 6 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 5 orang Esl.IV : 11 orang	8 orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

F. Permasalahan Dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Bencana Alam (seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang dll) berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan.
2. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran .
3. Rendahnya realisasi Pendidikan Kesetaraan karena target usia hanya 7-18 tahun yang masuk dalam data perhitungan, sementara banyak penduduk usia lebih dari 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan.

Solusi :

1. Bersiap dengan segala kemungkinan bencana serta memperkuat jaringan koneksi internet untuk pembelajaran daring.
2. Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

Indikator capaian untuk perhitungan rentang umur yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan agar mencakup peserta didik yang berusia di atas 18 tahun agar bisa masuk hitungan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Isu strategis bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :
   - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
   - Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM;
   - Pemenuhan SPM Pendidikan belum optimal;
   - Sarana dan Prasarana pendidikan yang belum optimal dan belum memenuhi standar minimal;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Kebutuhan pendidik secara kuantitas memang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya sehingga diperlukan pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik yang tepat dan sesuai kebutuhan;
- Penyediaan layanan pendidikan yang setara, adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat;
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- Bencana Alam (seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang dll)bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan.
- Masih ada ada guru yang belum linear kualifikasi pendidikannya dengan tugas yang diampu sehinga mempengaruhi indikator penilaian SPM.
- Dinas pendidikan sekarang ini kekurangan pengawas mata pelajaran (sampai dengan tahun 2023 masih tersisa 4 orang pengawas mata pelajaran) atau masih kekurangan 5 orang pengawas mata pelajaran. Sedangkan untuk Pengawas satuan pendidikan sekolah dasar yang ada sebanyak 1 orang dan Pengawas satuan pendidikan sekolah menengah pertama 1 orang, kebutuhan sebanyak 18 orang atau masih kekurangan pengawas satuan pendidikan sekolah dasar sebanyak 16 orang.
- Banyak sekolah yang kekurangan guru kelas SD dan guru mata pelajaran, baik pada SD maupun SMP.
- Belum adanya kepastian anggaran yang dapat menjamin pembayaran tunjangan gaji guru Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Masih rendahnya pemberian kesejahteraan insentif kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan (yang diterima sekarang Rp 250.000,- per bulan).
- Masih banyaknya Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan yang belum mendapatkan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah.
- Masih rendahnya pemberian kesejahteraan (stimulant) kepada Kepala Sekolah dan Guru dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, khususnya di daerah terpencil (Paminggir).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Masih ada Pendidik PAUD (Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak) Yang masih belum linier Latar Belakang Pendidikannya.
- Masih ada orang tua yang masih enggan menyekolahkan anak usia 3 – 4 tahun di Lembaga / Satuan Pendidikan pada layanan Kelompok Bermain.
- Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki Kepala Sekolah defintif (permasalahan yang sudah terjadi beberapa tahun)
- Pengawas Mata Pelajaran SMP banyak yang pensiun, sementara perekrutan Pengawas Mata Pelajaran belum ada.
- Ada sekolah SMP yang beberapa tahun jumlah siswanya selalu kurang dari 60 orang.
- Masih kurangnya Tenaga Pengawas khususnya Jenjang SD karena adanya Pengawas yang memasuki Purna Tugas sehingga pengawasan dilapangan menjadi kurang maksimal
- Saat ini banyak Sekolah Dasar yang Kepala Sekolahnya di jabat oleh Pelaksana Tugas(Plt) disebabkan Kepala Sekolah yang definitif telah memasuki Purna Tugas juga.
- Masih banyak sekolah terutama Sekolah Dasar Negeri yang belum memiliki kepemilikan tanah yang memadai dan masih berupa surat pinjam pakai.
- Minimnya dana untuk pengembangan seni budaya sehingga dalam mencipta dan menggelar hasil karyanya pelaku seni harus menyesuaikan kebutuhannya dengan dana yang tersedia.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals) antara lain :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 5. Target Indikator Sdgs - Pilar Pembangunan Sosial

Target	Kode Indikator	Indikator SDGs	Keterangan	Kode Indikator SDGs Kab	Indikator SDGs Kab	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
									2019	2020	2021	2022	2023	
TUJUAN I: TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)														
	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	1.4.1 (g)	Persentase APM SD/MI/Paket A/Sederajat	DISDIK KAB. HSU	%	95,63	100	100	100	100	88,50	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				93.43	90.30	87.65	86,64	86,76	
	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	1.4.1 (h)	Persentase APM SMP/MTs/Paket B/ sederajat	DISDIK KAB. HSU	%	78,71	86.58	88.58	90.58	92.58	81,50	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				81.83	80.16	81.31	8.56	82,13	
TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA)														
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikaan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan effektif	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI yang terakreditasi minimal B	DISDIK KAB. HSU	%	98,09	95.00	97.50	100	100	100	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				91.30	91.30	89.89	91,30	91,32	
	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres)	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B	DISDIK KAB. HSU	%	90.91	100	100	100	100	100	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				90.63	96.77	90.91	90,32	90,34	
	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	4.2.3*	Persentasi APK PAUD	DISDIK KAB. HSU	%	67.92	85.00	87.50	90.00	90.00	60,00	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				68.02	64.52	58.96	70,53	86,38	
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	4.6.1.(a)	Persentase Angka Melek Hurup ≥ 15 tahun	DISDIK KAB. HSU	%	100.00	99.55	99.65	99.85	99.85	100	DISDIK KAB. HSU
					CAPAIAN				100	100	100	100.00	100.00	

- Atas capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Pendidikan, maka capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah atas capaian program nasional adalah pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, walaupun belum maksimal 100 % setiap satuan pendidikan memenuhi pemenuhan SPM ini. Tidak terpenuhi ini, bukanlah sesuatu sikap menyatakan terpenuhinya SPM tersebut, tetapi beberapa kegiatan program kami tahun 2023 tidak termasuk dalam indikator capaian SPM. Namun kegiatan ini sangat penting sesuai dengan kondisi exsting satuan pendidikan;
- Disamping hal tersebut diatas, capaian kinerja layanan tahun 2023 juga mempunyai dampak terhadap program internasional yakni program SDGS. Menghadirkan pemerataan layanan pendidikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan disemua satuan pendidikan adalah upaya yang kami lakukan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Tantangan/Hambatan (*Treath*)

Usaha peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya dihadapkan pada hambatan sebagai berikut :

a) Adanya pembatasan pembelajaran tatap muka karena adanya bencana alam.
b) Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
c) Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga anak terancam putus sekolah.
d) Belum adanya koordinasi yang sinergi secara optimal antar sektor-sektor pembangunan lainnya.

2. Peluang *(Opportunity)*

Peningkatan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah memberikan dasar sekaligus peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekarang ini. Peluang yang mendukung kegiatan tersebut :

a) Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah.
b) Peran aktif masyarakat desa dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat cukup tinggi.
c) Adanya pendidikan gratis dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu atau keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan baik Wajar 9 Tahun.
d) Tersedianya dana dalam usaha pelaksanaan kegiatan peningkatan Perkembangan tekhnologi informasi bidang pendidikan yang semakin maju.
e) Adanya kesempatan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalime.
f) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pendidikan secara sinergi dan berkelanjutan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

g) Adanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah dengan cara mengikuti program Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, B dan Paket C).

h) Tersedianya tenaga profesional dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang pendidikan.

i) Tersedianya sistem informasi data yang tepat dan akurat di bidang pendidikan.

j) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam usaha pembangunan pendidikan.

k) Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pembiayaan Pendidikan;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar yang professional;
4. Program Prioritas Budaya Lokal;
5. Pengembangan sistem pembelajaran, sistem peningkatan kualitas Pendidikan.manajemen, sarana prasarana dan optimalisasi potensi lingkungan untuk

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**203,624,133,134**	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**202,702,352,586**	
X.XX.01.2.01	***(Kegiatan) Perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah***		**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**90,861,550**	***(Kegiatan) Perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah***		**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**720,316,560**	
1.01.01.2.01.0006	***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	90,861,550	***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	720,316,560	
X.XX.01.2.02	***(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah***		**Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**199,660,901,566**	***(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah***		**Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**199,660,901,566**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.01.2.02.0001	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disdikbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 Orang/bulan	199,660,901,566	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disdikbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31164 Orang/bulan	199,660,901,566	
X.XX.01.2.05	***(Kegiatan) Administrasi kepegawaian perangkat daerah***		**Persentase Tertatanya Adminastrasi Keupegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**25,069,200**	***(Kegiatan) Administrasi kepegawaian perangkat daerah***		**Persentase Tertatanya Adminastrasi Keupegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**16,250,000**	
1.01.01.2.05.0010	***(Sub Kegiatan)*** Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	25,069,200	***(Sub Kegiatan)*** Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	16,250,000	
X.XX.01.2.06	***(Kegiatan) Administrasi umum perangkat daerah***		**Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**1,212,834,200**	***(Kegiatan) Administrasi umum perangkat daerah***		**Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**544,673,800**	
1.01.01.2.06.0002	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	574,353,250	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53,753,250	
1.01.01.2.06.0004	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan bahan logistik kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	119,610,150	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan bahan logistik kantor	Disdikbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	100,614,350	
1.01.01.2.06.0005	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	66,196,800	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	66,197,200	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.01.2.06.0006	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	41,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	41,000,000	
1.01.01.2.06.0009	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	411,674,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	283,109,000	
X.XX.01.2.08	***(Kegiatan) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1,894,501,618**	***(Kegiatan) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1,595,660,660**	
1.01.01.2.08.0001	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa Surat Menyurat	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	135,696,900	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa Surat Menyurat	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	107,972,450	
1.01.01.2.08.0002	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295,400,398	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224,400,460	
1.01.01.2.08.0004	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,463,404,320	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,263,287,750	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X.XX.01.2.09	***(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**739,965,000**	***(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**164,550,000**	
1.01.01.2.09.0002	***(Sub Kegiatan)*** penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan	Disdikbud	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	397 Unit	221,565,000	***(Sub Kegiatan)*** penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan	Disdikbud	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	397 Unit	126,190,000	
1.01.01.2.09.0006	***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdikbud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	12,130,000	***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdikbud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	12,130,000	
1.01.01.2.09.0009	***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	518,400,000	***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdikbud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	26,230,000	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	(Program) Pengelolaan Pendidikan		**Angka rata-rata lama sekolah**	**8.17**	**23,597,566,028**	**(Program) Pengelolaan Pendidikan**		**Angka rata-rata lama sekolah**	**8,03**	**15,333,875,500**	
1.01.02.2.01	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**Persentase APK SD/MI/PAKET A**	**100%**	**11,170,556,950**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**Persentase APK SD/MI/PAKET A**	**100%**	**5,593,934,750**	
1.01.02.2.01.0006	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	109,984,500	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	-	
1.01.02.2.01.0009	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdikbud	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	634,897,400	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Disdikbud	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	
1.01.02.2.01.0010	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	219,969,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	
1.01.02.2.01.0011	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	109,984,500	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.0013	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Disdikbud	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	219,969,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Disdikbud	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	-	
1.01.02.2.01.0026	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310 Orang	1,368,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310 Orang	1,368,000,000	
1.01.02.2.01.0027	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Sekolah Dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1162 Orang	373,296,500	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Sekolah Dasar	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	522 orang	220,937,100	
1.01.02.2.01.0028	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan	2,452,423,500	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan	2,374,380,700	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.0035	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	552 Orang	267,119,550	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	552 Orang	260,238,350	
1.01.02.2.01.0037	***(Sub Kegiatan)*** Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	58,920,000	***(Sub Kegiatan)*** Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	-	
1.01.02.2.01.0038	***(Sub Kegiatan)*** *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	1,324,544,600	***(Sub Kegiatan)*** *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	627,908,600	
1.01.02.2.01.0039	***(Sub Kegiatan)*** Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	142,470,000	***(Sub Kegiatan)*** Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	142,470,000	
1.01.02.2.01.0048	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	2,643,890,600	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0Unit	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.01.0051	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	604,887,800	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	360,000,000	
1.01.02.2.01.0055	***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Disdikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	66 Paket	640,200,000	***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Disdikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	24 paket	240,000,000	
1.01.02.2.02	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	***100%***	**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**4,482,869,067**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	***100%***	**Persentase APK SMP/MTs/PAKET B**	**100%**	**2,650,134,400**	
1.01.01.2.02.0014	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas yang Terehabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	497,040,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Ruang Kelas yang Terehabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	
1.01.02.2.02.0017	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	95,365,207	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Disdikbud	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	
1.01.02.2.02.0018	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Disdikbud	Jumlah Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	165,680,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Disdikbud	Jumlah Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.02.0022	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Disdikbud	Jumlah Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	55,680,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Disdikbud	Jumlah Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	111,360,000	
1.01.02.2.02.0024	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	542,040,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	-	
1.01.02.2.02.0032	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	593 Peserta Didik	826,250,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	593 Peserta Didik	826,250,000	
1.01.02.2.02.0039	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114 Orang	684,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114 Orang	684,000,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.02.0040	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	155 Orang	110,708,200	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	155 Orang	74,853,200	
1.01.02.2.02.0041	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembin	28 Satuan Pendidikan	662,400,000	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembin	28 Satuan Pendidikan	670,942,000	
1.01.02.2.02.0048	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	93 Orang	57,679,200	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62 orang	34,479,200	
1.01.02.2.02.0050	***(Sub Kegiatan)*** Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	23,200,000	***(Sub Kegiatan)*** Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.02.0051	***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31 Dokumen	131,484,000	***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	-	
1.01.02.2.02.0055	***(Sub Kegiatan)*** Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Disdikbud	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	23,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Disdikbud	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	23,000,000	
1.01.02.2.02.0058	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31 Satuan Pendidik	231,942,460	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31 Satuan Pendidikan	225,250,000	
1.01.02.2.02.0067	***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Disdikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	52 Paket	376,400,000	***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Disdikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	-	
01.01.2.2.03	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	60%	**Persentase APK PAUD**	**62%**	**6,202,971,761**	***(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	60%	**Persentase APK PAUD**	**62%**	**5,473,406,350**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2. 03.0002	***(Sub Kegiatan)*** Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	110,000,000		Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	-	
1.01.02.2. 03.0015	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	350 Orang	2,100,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	350 Orang	2,100,000,000	
1.01.02.2. 03.0016	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	275 Orang	311,731,600	***(Sub Kegiatan)*** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 orang	182,269,600	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.02.2.03.0045	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Disdikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	400,000,000	
1.01.02.2.03.0047	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	287 Satdik	3,581,240,161	***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Disdikbud	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	287 Satdik	2,791,136,750	
1.01.02.2.04	***(Kegiatan)Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	**100%**	**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**1,741,168,250**	**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**Persentase Melek Hurup**	**100%**	**1,616,400,000**	
1.01.02.2.04.0014	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	1,404,000,000	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	464 Orang	1,404,000,000	
1.01.02.2.04.0016	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	337,168,250	Jumlah Lembaga Paud dan Lembaga PNF yang dibina yang mengikuti lomba apresiasi GTK dan Lomba	Disdikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	212,400,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.04	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**563,497,346**	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**403,772,000**	
	(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**563,497,346**	**(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru Bersertifikat pendidik**	**78%**	**403,772,000**	
1.01.04.2.01.0001	***(Sub Kegiatan)*** Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	70,484,000	***(Sub Kegiatan)*** Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	23,084,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.01.04.2.01.0002	***Sub Kegiatan)*** Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	493,013,346	***Sub Kegiatan)*** Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	380,688,000	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				**1,680,608,281**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**872,287,050**	
2.22.02	**(Program) Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**1,526,875,031**	**(Program) Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**735,197,300**	
2.22.02.2.01	***(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**755,040,600**	***(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**	**100%**	**505,645,300**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.22.02.2.01.0001	***(Sub Kegiatan)*** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	370,133,400	***(Sub Kegiatan)*** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	127,482,400	
2.22.02.2.01.0002	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	384,907,200	***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	378,162,900	
2.22.02.2.02	***(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase keragaman seni budaya yang dilestarikan**	**100%**	**771,834,431**	***(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase keragaman seni budaya yang dilestarikan**	**100%**	**229,552,000**	
2.22.02.2.02.0001	***(Sub Kegiatan)*** Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	771,834,431	***(Sub Kegiatan)*** Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	229,552,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.22.05	**(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**153,733,250**	**(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**137,089,750**	
2.22.05.2.01	***(Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**65,952,250**	***(Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**75,482,250**	
2.22.05.3.01.0002	***(Sub Kegiatan)*** Penetapan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapakan	5 Objek	75,482,250	***(Sub Kegiatan)*** Penetapan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapakan	5 Objek	75,482,250	
2.22.05.3.01.0006	***(Sub Kegiatan)*** Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota	Disdikbud	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	6 Objek	65,952,250	***(Sub Kegiatan)*** Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota	Disdikbud	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	0	-	
2.22.05.2.02	***(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**87,781,000**	***(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100%**	**61,607,500**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.22.05.2.02.0003	***(Sub Kegiatan)*** Pemanfaatan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	87,781,000	***(Sub Kegiatan)*** Pemanfaatan Cagar Budaya	Disdikbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	61,607,500	
	TOTAL PAGU INDIKATIF				**29,804,903,223**	**TOTAL PAGU INDIKATIF**				**19,651,385,570**	
	TOTAL PAGU + GAJI				**229,465,804,789**	**TOTAL PAGU + GAJI**				**219,312,287,136**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan, SKPD juga memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang pendidikan berdasarkan pengumpulan informasi dan penelitian lapangan, serta melalui pengamatan musrenbang kabupaten, yang kemudian di usulkan berdasar usulan prioritas per kecamatan.

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tidak Menerima Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (POKIR DPRD) dan DARI Masyarakat tahun 2025 dikarenakan :

1. Usulan belum bisa terpenuhi di tahun 2025
2. Lokasi belum bisa dikondisikan dan tidak memungkinkan.
3. Adanya permasalah berupa sertifikat tanah yg belum selesai.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi untuk "menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)".

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Dalam visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih menekankan pada pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

Cita-cita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua difokuskan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manuasia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.
2. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
3. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebubayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang terbaru dan lebih aktual bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat dan seluruh stakeholders dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan Indikator Kinerta Utama. sehingga diharapkan dapat menghasilkan Perencanaan yang Berkesinambungan, Sinergis, Terpadu dan Akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika Pembangunan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah:

1. Melaksanakan segala urusan wajib Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyesuaikan prioritas dan perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki baik bidang pendidikan maupun kebudayaan dengan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025.
2. Memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui serangkaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif dan sesuai dengan kondisi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada saat ini yang memuat Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk merealisasikan Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2023-2026.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran jugamenjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ini sendiri ditentukan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Selanjutnya sasaran menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis daerah maka ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan.

Dalam upaya memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen pengganti terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 untuk urusan Pendidikan sebagai berikut :

1. Tujuan

   Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Indikator Tujuan

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Sasaran

   Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
4. Indikator sasaran

   Indikator sasaran adalah : a) Rata-rata lama sekolah; b) Harapan lama sekolah.
5. Strategi

   Strategi RKPD adalah : a) Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan; b) Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.
6. Arah kebijakan

   Arah kebijakan RKPD adalah : a) Meningkatkan Aksesbilitas pada semua jenis dan jenjang Pendidikan; b) Pengembangan manajemen sekolah; c) Peningkatan kompetensi Guru; d) Pemenuhan Standar Minimal Pendidikan (SPM); e) Pelestarian Cagar Budaya dan Nilai warisan tradisi.

Dengan demikian sangat dibutuhkan perwujudan sumberdaya manusia di daerah yang memuliki kualitas dan dapat bersaing dalam eksistensi kehidupan di era globalisasi, memiliki akses dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai kemajuan global serta dapat bersikap mandiri dalam kehidupan sosial baik dalam lingkungan regional, nasional bahkan internasional.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 3.1
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PERIODE RENSTRA 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2022)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
					2023	2024	2025	2026	
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1.Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A/82,17	A/82,18	A/82,19	A/82,20	A/82,21	A/82,21
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
4. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	6.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,75	8,03	8,17	8,31	8,45	8,45
			Harapan Lama sekolah	12,92	13,36	13,58	13,80	14,02	14,02
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	58,96	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98,60	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107,03	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	87,65	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,31	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12	98,10	98,50	99,00	99,50	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15	93,88	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00
			Persentasi Angka Putus Sekolah SD	0,13	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI SAAT INI (2022)	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
					2023	2024	2025	2026	
			Persentasi Angka Putus Sekolah SMP	0,46	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47
			Persentase Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	97,10	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00
			Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	98,29	98,00	98,50	99,00	99,50	100
			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,78	59,00	58,89	61,68	61,70	61,70
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,69	48,00	44,19	48,94	50,00	50,00
			Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,74	69,00	68,84	72,09	73,00	73,00
			Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,64	61,00	65,08	67,16	69,00	69,00
			Persentase Guru bersertifikat pendidik	74,24	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,51	98,00	98,50	99,00	99,50	100
			Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya	100	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Perumusan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025
- Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Jumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ada Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara berencana akan melaksanakan 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 dan sub kegiatan sebanyak 43, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. **219,312,287,136**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Rekap Program dan Kegiatan Renja Dinas Pendikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Pagu Anggaran + Gaji Tahun 2025	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)	**1**	**6**	**14**	**3,041,451,020**	**202,702,352,586**	
(Program) Pengelolaan Pendidikan	**1**	**4**	**22**	**15,333,875,500**	**15,333,875,500**	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1	8	5,593,934,750	5,593,934,750	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1	8	2,650,134,400	2,650,134,400	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1	4	5,473,406,350	5,473,406,350	
(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan (Nonformal/Kesetaraan)		1	2	1,616,400,000	1,616,400,000	
(Program) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	**1**	**2**	**403,772,000**	**403,772,000**	
(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	2	403,772,000	403,772,000	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
(Program) Pengembangan Kebudayaan	1	**2**	**3**	**735,197,300**	**735,197,300**	
(Kegiatan) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota		1	2	505,645,300	505,645,300	
(Kegiatan) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota		1	1	229,552,000	229,552,000	
(Program) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	**1**	**2**	**2**	**137,089,750**	**137,089,750**	
(Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		1	1	75,482,250	75,482,250	
(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		1	1	61,607,500	61,607,500	
Total	**5**	**15**	**43**	**19,651,385,570**	**219,312,287,136**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
X,XX,01	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**202,702,352,586**			**100%**	**271,592,825,868**
X,XX,01,2,01	**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**		**100%**	**720,316,560**			**100%**	**720,316,750**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,01,2,01,06	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdikbud	3 Laporan	720,316,560	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Laporan	720,316,750
X,XX,01,2,02	**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**199,660,901,566**			**100%**	**267,198,186,200**
1,01,01,2,02,01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdikbud	31164 Orang/ bulan	199,660,901,566	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,DAK NON FISIK-TGP PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD		31164 Orang/bulan	267,198,186,200

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
X,XX,01,2,05	**(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100%**	**16,250,000**			**100%**	**25,069,200**
1,01,01,2,05,10	(Sub Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	24 Orang	16,250,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		24 Orang	25,069,200
X,XX,01,2,06	**(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja**		**100%**	**544,673,800**			**100%**	**1,320,030,200**
1,01,01,2,06,02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdikbud	1 Paket	53,753,250	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	574,353,250
1,01,01,2,06,04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disdikbud	8 Paket	100,614,350	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		8 Paket	119,610,150

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,01,2,06,05	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdikbud	50 Paket	66,197,200	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Paket	132,392,800
1,01,01,2,06,06	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdikbud	4 Dokumen	41,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	82,000,000
1,01,01,2,06,09	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdikbud	50 Laporan	283,109,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Laporan	411,674,000
1,01,01,2,08	**(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**1,595,660,660**			**100%**	**2,030,198,518**
1,01,01,2,08,01	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdikbud	4 Laporan	107,972,450	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Laporan	271,393,800
1,01,01,2,08,02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdikbud	12 Laporan	224,400,460	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	295,400,398

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,01,2,08,04	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdikbud	12 Laporan	1,263,287,750	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	1,463,404,320
1,01,01,2,09	**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**		**100%**	**164,550,000**			**100%**	**299,025,000**
1,01,01,2,09,02	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disdikbud	23 Unit	126,190,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		7 Unit	221,565,000
1,01,01,2,09,06	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Disdikbud	17 Unit	12,130,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		17 Unit	25,000,000
1,01,01,2,09,10	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disdikbud	5 Unit	26,230,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5 Unit	52,460,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,02	**(PROGRAM) PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka rata-rata lama sekolah**		**8,03**	**15,333,875,500**			**8,03**	**21,880,579,621**
1,01,02,01	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase APK SD/MI Paket A**		**100%**	**5,593,934,750**			**100%**	**9,128,099,750**
1,01,02,2,01,26	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdikbud	310 Orang	1,368,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		**310 Orang**	2,736,000,000
1,01,02,2,02,27	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	522 Orang	220,937,100.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		**522 Orang**	373,296,500
1,01,02,2,01,28	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Disdikbud	184 Satuan Pendidikan	2,374,380,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		**184 Satuan Pendidikan**	2,452,423,500

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,02,2,01,35	(Sub Kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	552 Orang	260,238,350	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		552 Orang	267,119,550
1,01,02,2,01,38	*(Sub Kegiatan) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	5 Dokumen	627,908,600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5 Dokumen	1,324,544,600.00
1,01,02,2,01,39	*(Sub Kegiatan)* Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Disdikbud	2 Dokumen	142,470,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Dokumen	284,940,000.00
1,01,02,2,01,51	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	3 Ruang	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Ruang	1,209,775,600
1,01,02,2,01,55	(Sub Kegiatan) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Dididk yang Tersedia	Disdikbud	24 Paket	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA		24 Paket	480,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
						TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			
1,01,02,2,02	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase APK SMP/MTs Paket B**		**100%**	**2,650,134,400**			**100%**	**3,414,339,860**
1.01.02.2.0022	*(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir*	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	1 Unit	111,360,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	111,360,000
1,01,02,2,02,32	(Sub Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Disdikbud	593 Peserta Didik	826,250,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		593 Peserta Didik	826,250,000
1,01,02,2,02,39	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud	114 Orang	684,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		114 Orang	1,368,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,02,2,02,40	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	155 Oorang	74,853,200	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		155 Oorang	110,708,200
1,01,02,2,02,41	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Disdikbud	28 Satuan Pendidikan	670,942,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		28 Satuan Pendidikan	662,400,000
1,01,02,2,02,48	(Sub Kegiatan) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Disdikbud	62 Orang	34,479,200	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		62 Orang	57,679,200
1,01,02,2,02,55	(Sub Kegiatan) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasa, dan intoleransi	Disdikbud	2 kegiatan	23,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 kegiatan	46,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,02,2,02,58	*(Sub Kegiatan)* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Disdikbud	31 Satuan Pendidikan	225,250,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		31 Satuan Pendidikan	231,942,460
01,01,2,2,03	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase APK PAUD**		**62%**	**5,473,406,350**			**0.62**	**6,192,971,761**
1,01,02,2,03,15	(Sub Kegiatan) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Disdikbud	350 Orang	2,100,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		350 Orang	2,100,000,000
1,01,02,2,03,16	(Sub Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Disdikbud	500 Orang	182,269,600	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		500 Orang	311,731,600
1,01,02,2,03,45	(Sub Kegiatan) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Disdikbud	2 Unit	400,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	200,000,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,02,2,03,47	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Disdikbud	287 satuan Pendidikan	2,791,136,750	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		287 satuan Pendidikan	3,581,240,161
1,01,02,2,04	**(Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**		**100%**	**1,616,400,000**			**100%**	**3,145,168,250**
1,01,02,2,04,14	***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	464 Orang	1,404,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		464 Orang	2,808,000,000
1,01,02,2,04,16	(Sub Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Disdikbud	13 Satuan Pendidikan	212,400,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Satuan Pendidikan	337,168,250
1,01,04	**(PROGRAM) PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**		**78%**	**403,772,000**			**78%**	**563,497,346**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
1,01,04,2,01	**(Kegiatan) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Guru Bersertifikat Pendidik**		**78%**	**403,772,000**			**78%**	**563,497,346**
1,01,04,2,01,01	(Sub Kegiatan) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	1 Dokumen	23,084,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	70,484,000
1,01,04,2,01,02	(Sub Kegiatan) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdikbud	1 Laporan	380,688,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Laporan	493,013,346

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**872,287,050**				**1,744,466,100**
2,22,02	**(PROGRAM) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**		**100%**	**735,197,300**			**100%**	**1,438,286,600**
2,22,02,2,01	**(Kegiatan) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya**		**100%**	**505,645,300**			**100%**	**1,011,182,600**
2,22,02,2,01,01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Disdikbud	6 Objek	127,482,400	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Objek	254,856,800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
2,22,02,2,01,02	(Sub Kegiatan) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disdikbud	40 Orang	378,162,900	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		40 Orang	756,325,800
2,22,02,2,02	**(Kegiatan) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional**		**100%**	**229,552,000**			**100%**	**427,104,000**
2,22,02,2,02,01	(Sub Kegiatan) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Disdikbud	6 Objek	229,552,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Objek	427,104,000
2,22,05	**(PROGRAM) PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**100%**	**137,089,750**			**100%**	**306,179,500**
2.22.05.2.01	**(Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**100%**	**75,482,250**			**100%**	**188,964,500**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp,)
2.22.05.3.01.02	(Sub Kegiatan) Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapakan		5 Objek	75,482,250	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5 Objek	188,964,500
2,22,05,2,02	**(Kegiatan) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan**		**100%**	**61,607,500**			**100%**	**117,215,000**
2,22,05,2,02,03	(Sub Kegiatan) Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Disdikbud	6 Objek	61,607,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Objek	**117,215,000**
TOTAL PAGU + GAJI					**219,312,287,136**	**TOTAL PAGU + GAJI**			**295,781,368,935**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode Tahun 2025. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA dan akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini untuk merupakan rencana kerja tahunan yang menunjang tercapainya tujuan serta target dan sasaran pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPD dan RKPD.

Dalam hal ini kami akan berupaya untuk terus menyempurnakan dokumen perencanaan ini dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Diharapkan segala bentuk Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dapat lebih terarah dan terfokus kepada tujuan utama bangsa Indonesia yaitu untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

JUMADI, S.AP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730608 199311 1 002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						**17.804.719.045,00**							**15.140.478.965,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.318.510.817,00**							**10.408.062.509,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**14.318.510.817,00**							**10.408.062.509,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP SKPD Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)***	**-**			**82,07/A Poin 100 %**	**1.324.428.350,00**						**-**	**2.135.933.334,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP SKPD*	-			82.07 Poin	102.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	-	85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	87.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat*	-			2 org	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	-	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	100.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	-			100 %	128.565.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan	-	217.133.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	34.065.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		68.133.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	11.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	71.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		102.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	56.580.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah	-	118.873.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	56.580.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		118.873.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	-			100 %	771.604.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan	-	1.293.604.100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	249.604.100,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		249.604.100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	522.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan		1.044.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	-			100 %	165.078.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah	-	381.322.834,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	77.158.750,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		154.522.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	57.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		176.800.334,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif*** ***Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif*** ***Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif***	**-**			**80 %** **75 %** **75 %**	**594.990.350,00**						**-**	**895.000.000,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas nya*	-			270 org	212.498.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda	-	395.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			0				0 0	49.998.850,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	85.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		165.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				20 Orang	77.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		155.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepe mudaan (OKP) yang aktif dan difasilitasi*	-			40 OKP	382.491.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepemudaan	-	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				5 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepemudaan		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				10 Orang	182.491.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepemudaan		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi***	**-**			**7 Peringkat**	**12.199.092.117,00**						**-**	**7.127.129.175,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	225.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda	-	423.115.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		423.115.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti*	-			9 Kegiatan	132.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	797.503.175,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	132.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		797.503.175,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti*	-			14 Cabor	20.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Olahraga sebagai Mitra Kerja*	-			3 buah	11.556.641.117,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cabang Olahraga	-	5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	11.556.641.117,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cabang Olahraga		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yg Dibina*	-			14 Cabor	264.951.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	806.511.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	264.951.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		806.511.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Kwarcab Pramuka yang dibina* *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	-			1 Kwarcab 1 Kwarcab	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelajar	-	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelajar		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**280.000.000,00**							**560.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**280.000.000,00**							**560.000.000,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah***	**-**			**110000 Orang 110.000 Orang**	**55.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Dikembangkan*	-			8 Lokasi	55.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya***	**-**			**5 Jenis**	**215.000.000,00**						**-**	**430.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya*	-			5 dok	215.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penguatan sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat	-	430.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	215.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat		430.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti***	**-**			**2 Even 30 Orang**	**10.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelaku Pariwi sata yg Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			30 org	10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	X	**NON URUSAN**						**3.206.208.228,00**							**4.172.416.456,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.206.208.228,00**							**4.172.416.456,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR) Nilai SAKIP SKPD***	**-**			**100 % 82,07/A Poin**	**3.206.208.228,00**						**-**	**4.172.416.456,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			27 org	3.206.208.228,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	-	4.172.416.456,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.206.208.228,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		4.172.416.456,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	J U M L A H							**17.804.719.045,00**							**15.140.478.965,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

VERIFIED

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jl. H. Kurdi Yusni No.066
Telp. (0527) 61406 Amuntai, 71418

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Sebanyak-banyak puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Renja ini bertujuan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, sehingga hasil capaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, serta sebagai panduan bagi daerah, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian target Kinerja Bidang Kesehatan, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini dibuat, atas perhatiannya dan bantuannya diucapkan tarima kasih.

Amuntai, Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM
NIP. 19801020 201001 1 015

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023 … 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 38

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 43

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 44

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 69

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN 71

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 71

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehata 72

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN … 76

BAB V PENUTUP 101

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 15

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025 45

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 70

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KesehatanKabupaten Hulu Sungai Utara 73

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 77

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai acuan penyusunannya.Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 s.d 2026 yang berisi pedoman yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang kesehatan dan penilaian atas pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentu harus didukung oleh sumber daya yang efektif, tenaga kesehatan tercukupi dan fasilitas kesehatan memadai. Setiap tahun Dinas Kesehatan selalu mengusulkan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

rencana kegiatan dan anggaran kesehatan berdasarkan kebutuhan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020 -2024
9. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RPKD;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permenkes No. 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes 2020 - 2024;
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah mengoptimalkan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

peran Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam dibidang kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara khusus tujuan dari Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun Pertama dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara dilaksanakan untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan pencapaian target kinerja tahun 2023 dengan dan realisasi kinerja. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. *Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan*
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indicator:
      1) Jumlah Kematian Bayi

         Target pada renstra Tahun 2023 jumlah kematian bayi sebanyak 15 orang, sedangkan kondisi di Tahun 2023 jumlah kematin bayi sebanyak 60 orang.
      2) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sesuai standar

         Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 100%, dapat dicapai sebesar 91,19%.
      3) Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)

         Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 96%, dapat dicapai sebesar 90,87%.
      4) Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar

         Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 52%, dapat dicapai sebesar 100%.
      5) Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

         Target Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sebesar 100%, dapat dicapai sebesar 98.17%.

6) Angka Kematian Ibu

Target pada Tahun 2023 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup sebesar 100/100,000 KH, sedangkan kondisi kematian ibu adalah 197/100,000 Kelahiran Hidup (KH)

7) Angka Kematian Bayi

Target pada Tahun 2023 Angka Kematian Ibu per 1,000 kelahiran hidup sebesar 11/1,000 KH, sedangkan kondisi kematian bayi adalah 19,7/1,000 Kelahiran Hidup (KH)

8) Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk adalah gabungan dari balita kurus dan sangat. Prevalensi Kasus Gizi Buruk pada tahun 2023 adalah 10,3% dari target 7,3 %.

9) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Berdasarkan hasil kegiatan peningkatan status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, didapatkan prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2023 adalah 23,51% dengan target adalah 11 %.

10) Cakupan pemberian pelayanan orang dengan TB sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pada tahuin 2023 sebesar 65,24% dengan target 100%.

11) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000)

Pada tahun 2023 jumlah kasus Tuberkulosis adalah 420 orang dibagi 240.875 penduduk di kali 100.000 maka tingkat prevalensinya adalah 217 per 100.000 penduduk dengn target 162 per 100.000 penduduk.

12) Cakupan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV

Pada tahun 2023 Semua orang yang berisiko yang terdaftar telah dilakukan pemberian pemeriksaan HIV sebanyak 5.573

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

orang dari sasaran sebanyak 4.550 orang (81,64%) dari target 100%

13) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Target UCI pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 69,9 % atau sebanyak 153 Desa dari 219 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

14) Cakupan bayi imunisasi lengkap

Pada tahun 2023, sasaran sebanyak 3.041 bayi dan terealisasi sebanyak 2.195 bayi (72,2%). Hal ini menunjukan IDL di Kabupaten HSU belum memenuhi target sebesar 96%.

15) Cakupan pelayanan skrinning kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar

Sasaran pelayanan skrinning kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar berjumlah 147.621 jiwa dan yang teralisasikan berjumlah 70.382 jiwa atau 47,68% sedangkan target cakupan adalah 100%.

16) Cakupan pelayanan skrinning kesehatan warga negara (60 tahun keatas) sesuai standar

Sasaran pelayanan skrinning kesehatan warga negara (60 tahun keatas) sesuai standar berjumlah 21,582 jiwa dan yang teralisasikan berjumlah 16.007 jiwa atau 74,17 % sedangkan target cakupan adalah 100%.

17) Cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar

Sasaran pelayanan standar bagi penderita hipertensi berjumlah 69.338 jiwa dan yang teralisasikan berjumlah 21,241 jiwa atau 30,63% sedangkan target cakupan adalah 100%.

18) Persentase PHBS di RumahTangga

Pada tahun 2023, target RT ber PHBS sebesar 50% dan realisasi sebesar 46,92%.

19) Persentasi Industri Rumah Tangga yang telah dibina

Di tahun 2023, persentase IRT di Kabupaten Hulu Sungai

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Utara yang telah dibina sebesar 82,29% dari target yang ditetapkan 100%.

20) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada tahun 2023 berjumlah 215 desa/kelurahan dari 219 desa/kelurahan atau 98,2% dari target 100%.

21) Persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas

Program kesehatan lingkungan untuk kegiatan penyehatan air pada masyarakat dengan akses air minum sampai tahun 2023 ini sebesar 93,14% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

22) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Pada tahun 2023 Jumlah Puskesmas dan Pustu berjumlah 43 buah dan jumlah penduduk bedasarkan BPS Tahun 2023 adalah 226.727 sehingga rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk adalah 0.19 per 1000 penduduk dan targetnya adalah 0,2 per 1000 penduduk.

b. Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman

1) Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan

Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin pada tahun 2023 dilaksanakan pada semua sarana kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian 96% dari target 100%

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1) Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2023 adalah 0,13, sedangkan target adalah 0,98 per 1000 penduduk.

2) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Pada tahun 2023, rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah 2,1 per 10000 sedangkan target adalah 3,9 per 10000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

penduduk.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Persentase belanja langsung APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara bidang kesehatan

Prosentase Anggaran di luar gaji pada tahun 2023 adalah sebesar 10,4% dari APBD total Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan target adalah 10%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan

1) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2023, cakupan balita gizi buruk sebesar 100%.

2) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang dimaksud adalah Cakupan Pemberian Makanan Tambahan Pada Balita Kurus. Pada tahun 2023 cakupan PMT balita kurus sebesar 100%.

3) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penemuan kasus DBD yang ditangani sebesar 100% dengan 51 kasus di Tahun 2023.

4) Penderita diare yang ditangani

Penemuan kasus diare Tahun 2023 sebesar 49,23% atau 3.202 orang dari target 6.505 orang. Semua penderita (100%) diare dilakukan Penatalaksanaan kasus yang ditemukan sesuai standar baik di Sarana Kesehatan maupun di Rumah Tangga dengan LINTAS (Lima Langkah Tuntas) Diare.

5) Persentase Puskesmas yang terakreditasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tahun 2023, 100% Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanan survey re akreditasi dengan hasil 92,31% terakreditasi paripurna, dan 7,69% terakreditasi utama.

6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pada tahun 2023 semua pasien rujukan terlayani (100%).

7) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakt miskin

Di tahun 2023 semua kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I dilayani.

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman

1) Persentase toko obat dan apotik yang dibina

Persentase Apotik berizin yang telah dibina dari target indikator pembinaan apotik 100% (23 buah) dengan realisasi 100 % (23 buah). Toko Obat yang telah dibina dari target Indikator Pembinaan Toko Obat 100 % (8 buah) dengan realisasi 100% (8 buah) .

3. Realisasi Program/Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

1) Jumlah Kematian Ibu

Target pada renstra Tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 9 orang, sedangkan kondisi di Tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang.

2) Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 89%, dapat dicapai dengan realisasi 99,44%.

3) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 65,0%, dapat dicapai sebesar 68,26%.

4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 100%, dapat dicapai sebesar 166,54%

5) Cakupan Kunjungan Bayi

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 96%, dengan capaian sebesar 98.13%.

6) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Nakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

Target indikator ini di Tahun 2023 sebesar 95%, dapat dicapai sebesar 99,87%.

7) Prevalansi balita stunting (TB/U) *)

Pada tahun 2023 prevalensi balita stunting sebesar 19,54% dengan target yang ditetapkan sebesar 19,30%

8) Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar

Sasaran pelayanan kesehatan ODGJ berat berjumlah 337 jiwa dan yang teralisasikan berjumlah 616 jiwa atau 182,79% sedangkan target cakupan adalah 100%.

9) Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar penyandang DM

Sasaran pelayanan kesehatan sesuai standar penyandang DM berjumlah 2.674 jiwa dan yang teralisasikan berjumlah 3.001 jiwa atau 112,23%.

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Postif

Dari target penderita penyakit TBC berjumlah 462 orang yang positif kasus TB berjumlah 289 orang atau 62,55% dengan target yang ditetapkan sebesar 40%.

11) Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

Pada tahun 2023, dari target 321 sampel yang diperiksa yang memenuhi syarat hanya 276 sampel atau 85,98% dengan target yang ditetapkan sebesar 78%

12) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat

Pada tahun 2023 peserta JKN KIS berjumlah 234.114 dari

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

jumlah penduduk 234.642 atau 99,77% dengan target yang ditetapkan 95%.

13) Persentase penduduk yang memiliki akses jamban keluarga
Cakupan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akses sarana sanitasi yang layak atau jamban sehat pada tahun 2023 sudah mencapai akses 94,78% dengan target yang ditetapkan sebesar 65%

14) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan mendapatkan penilaian 81,03 dengan kategori sangat memuaskan (A).

4. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan*

1) Kematian bayi pada tahun 2023 disebabkan masih adanya berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia dan penyakit lainnya sehingga perlunya peningkatan kompetensi kepada petugas kesehatan (bidan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai standar terutama dalam penanganan komplikasi neonatus serta optimalisasi pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Ibu dan Keluarga.

2) Prevalensi gizi Buruk di Kab. HSU masih belum begitu membaik, asupan gizi yang kurang, pola asuh orang tua terhadap pemenuhan gizi anak serta masih perlunya peran sector terkait sehinggaberpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

3) Cakupan program penyakit menular dan tidak menular masih

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

belum mencapai target yang ditetapkan terutama pada program yang menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena target yang digunakan berupa target Proyeksi yang ditetapkan oleh Pusdatin, kurangnya koordinasi dalam hal pelaporan dari klinik mandiri, apotek dan praktek dokter di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melayani penderita hipertensi.

5. *Implikasi Yang timbul terhadap target capaian program Resntra Perangkat Daerah*

Implikasi yang timbul dengan tidak tercapainya target tahun 2023 pada beberapa indikator akan membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 2023-2026 harus bekerja lebih keras, komprehensif, fokus pada penuntasan pencapaian target Renstra 2023-2026 dengan menyusun skala prioritas kegiatan sekaligus akselerasi maupun inovasi pada program terkait serta penambahan program pada Renja berikutnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

a. Memprioritaskan anggaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target Renstra dan menyusun skala prioritas pada Renja Dinas Kesehatan.
b. Menyusun kegiatan inovatif atau merevisi/intervensi kegiatan yang sudah ada selama ini sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator program dimaksud.
c. Melakukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan berbasis data tervalidasi yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target renstra, dan SPM bidang kesehatan sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.
d. Meningkatkan koordinasi di segala jenjang/tingkat pada stakeholder, mitra kesehatan, lintas sektor lainnya serta antar Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit, IFK dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Puskesmas yang lebih intensif dalam rangka menyusun strategi peningkatan pencapaian target Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	**100%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunasn Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	100%	602 Orang/Bulan	602 Orang/Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Yang dilaksanakan								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	-	30 Orang	4 Orang	13,33%	30 Orang	30 Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi**	100%	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	36 Unit	36 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	65 Unit	15 Unit	65 Unit	32 Unit	49,23%	65 Unit	65 Unit	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dipelihara/Direhabilitasi								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit yang dibangun	-	0	1 Buah	1 Buah	100%	-	-	-
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah	1 Buah	-	-	-	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit								
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	15 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Buah							
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	30 Unit	27 Unit	90%	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	65 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	100%	65 Unit	65 Unit	100%
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin Yang disediakan	-	1 Paket	35 Paket	35 Paket	100%	-	-	-
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang disediakan	-	1 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	-	15 Unit	15 Unit	13 Unit	86,67%	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	**39 Unit**	52 Unit	52 Unit	16 Unit	30,76%	52 Unit	52 Unit	100%
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 Paket	26 paket	26 Paket	26 Paket	100%	26 Paket	26 Paket	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan**	100%		100%	80.76%	80,76%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3272 Orang	3344	3300 Orang	2722 Orang	82,48%	3272 Orang	3272 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3185 Orang	3918	3053 Orang	3035 Orang	99,41%	3185 Orang	3185 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3178 Orang	3448	3041 Orang	2974 Orang	97,80%	3178 Orang	3178 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14,904 orang	18601	14458 Orang	13158 Orang	91.01%	14,904 orang	14,904 orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.935 Orang	33000	34935 Orang	34297 Orang	98,17%	34.935 Orang	34.935 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144.942 Orang	38000	147590 Orang	70382 Orang	47,68%	144.942 Orang	144.942 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.324 Orang	16039	21582 Orang	16007 Orang	74,17%	23.324 Orang	23.324 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.626 Orang	73800	69338 Orang	21241 Orang	30,63%	22.626 Orang	22.626 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.928 Orang	3800	2674 Orang	3001 Orang	112,23%	3.928 Orang	3.928 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	370 Orang	458	337 Orang	616 Orang	182,79%	370 Orang	370 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2743 Orang	4000	817 Orang	533 Orang	65,24%	2743 Orang	2743 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5531 Orang	3000	5573 Orang	4550 Orang	81,64%	5531 Orang	5531 Orang	100%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	30 Dokumen	5 Dokumen	16,67%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	2 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	150 Dokumen	75%	200 Dokumen	200 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Mandiri dan Tradisional Lainnya								
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	255 Orang	255 Orang	337 Orang	605 Orang	179,52%	255 Orang	255 Orang	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	0 orang	26 Orang	0 Orang	0	26 Orang	26 Orang	100%
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	-	70 Dokumen	70 Dokumen	45 Dokumen	64,29%	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	26 Dokumen	26%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan puskesmas	-	-	10 Kegiatan	8 Kegiatan	80%	-	-	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen operasional pelayanan puskesmas	7 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	**100%**
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	**100%**
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	33,33%	12 Dokumen	12 Dokumen	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	3725 Orang	3725 Orang	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Puskesmas BLUD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		115 Dokumen	115 Dokumen	30 Dokumen	26,08%	10 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Komptensi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	**100%**
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	9 Orang	9 Orang	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	**100%**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	**50 Orang**	20 Orang	**50 Orang**	13 Orang	26%	50 Orang	50 Orang	**100%**
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	42 Unit	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persenatse Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	13 Dokumen	1 Dokumen	13 Dokumen	0 Dokumen	0%	13 Dokumen	13 Dokumen	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jajanan								
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	**25 Unit**	**25 Unit**	**25 Unit**	**25 Unit**	100%	**25 Unit**	**25 Unit**	**100%**
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	100%	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**100%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**100%**	5 Dokumen	5 Dokumen	**100%**
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	100%	**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	**100%**
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatantahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas KesehatanTahun 2022	
					Target Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Kesehatan tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota								
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**1 Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100%	**-**	**-**	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**14 Unit**	**14 Unit**	**14 Unit**	**14 Unit**	100%	**14 Unit**	**14 Unit**	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan melaksanakan misi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Kedua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah, dan misi Keempat yaitu Membangun Infrasturktur Daerah yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2023, mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas serta dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target dalam Renstra Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan pada tahun 2023 telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatandi wilayahnya sesuai permasalahan di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sasaran strategis ini mengacu pada SPM kesehatan dan RAD SDG's Kabupaten Hulu Sungai Utara serta tetap mengacu dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

Indikator kinerja makro bidang kesehatan selain umur harapan hidup (UHH) adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dikarenakan angka kematian ibu itu pembaginya adalah100.000 kelahiran hidup maka dalam hal ini digunakan jumlah absolut. Pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang dari 2.041 KH (197/100.000 KH), dan jumlah kematian bayi pada tahun 2023 adalah sebanyak 60 orang (19,7/1000 KH). Kondisi ini dibawah target daerah dan nasional.

Kematian Bayi terbanyak pada usia 0-6 hari yang menunjukkan kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan terhadap komplikasi neonatus masih perlu ditingkatkan dan juga perlu ditingkatkan kualitas pelayanan ANC, sistem rujukan serta pengetahuan ibu dan keluarga dalam kondisi tanda bahaya bayi baru lahir. Penyebab kematian bayi juga masih didominasi oleh Bayi dengan Berat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Badan Lahir Rendah (BBLR). Hal ini selain dipengaruhi oleh keterampilan dan kompetensi nakes dalam memberikan pelayanan juga terkait dengan sarana prasaran yang tersedia, status kesehatan ibu dan bayi terutama status gizi dan penyakit penyerta.

Alternatif solusi yang telah dilakukan maupun yang direncanakan bagi indikator kinerja yang belum tercapaidan sudah tercapai adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan, peningkatan kapasitas bidan desa selain masih menjalin kerjasama kemitraan dengan dukun kampung
2. Peningkatan bimbingan oleh dinas kesehatan kepada semua bidan dapat memberikan pelayanan optimal.
3. Jumlah kematian bayi yang masih tinggi maka harus mendapat perhatian serius agar tidak terjadi lagi peningkatan jumlah kematian melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan,pertolongan persalinan diupayakan di fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas bidan desa selain masih menjalin kerjasama kemitraan dengan dukun kampong, peningkatan kualitas Kunjungan Neonatus (KN), peningkatan kapasitas nakes dengan pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Sakit (MTBM, MTBS serta pendidikan perawatan bayi melalui kelas Ibu Hamil.
4. Mendekatkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter kandungan sehingga adanya komplikasi atau penyulit bisa segera diatasi dengan program kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.
5. Meningkatkan upaya promotof dan preventif bidang kesehatan
6. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam penanganan masalah kesehatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Menurunnya jumlah kematian ibu		2	9	8	6	5	8	6	6	5	
2	Menurunnya jumlah kematian bayi		52	15	14	13	12	68	60	50	45	
3	Cakupan kunjungan bayi			96	97	98	100	86,11	102,2	66	68	
4	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			65	66	67	68	64	105	100	100	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			100	100	100	100	162,3	166,5	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			95	96	97	98	84,39	105,1	95	96	
7	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar	100		100	100	100	100	74,14	91,2	85	86	
8	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100		89	90	92	94	84,01	99,4	89	90	
9	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	100		96	97	98	100	86,79	94.66	65	66	
10	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		59	60	61	62	65,32	92.95	59	60	
11	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100		80	80	90	90	80,61	98.17	100	100	
12	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		110	100	100	100	100	241	197	100	100	
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		16	11	10	9	8	20,5	19.7	15	14	
14	Prevalensi balita stunting (TB/U)		24	16	14	12	10	19,3	19,54	19,3	19	
15	Prevalensi kasus gizi buruk (BB/TB)			7,3	7	6,5	6,3	0,55	10.3	11	10,7	
16	Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)			11	10,7	10,4	10,1	11,38	23.51	20	18	
17	Cakupaan balita gizi buruk mendapatkan perawatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin			100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan			100	100	100	100	100	96	100	100	
20	Persentase industri rumah tangga yang dibina			100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase toko obat dan apotik yang dibina			100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Cakupan pelayanan skrinning kesehatan warga negara (15-59 tahun) sesuai standar	100		60	70	80	90	46,05	48.09	100	100	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
23	Cakupan pelayanan skrinning kesehatan warga negara (60 tahun ke atas) sesuai standar	100		45	60	70	80	28,27	38,9	100	100	
24	Cakupan pelayanan standar bagi penderita hipertensi	100		50	70	90	100	18,63	36	100	100	
25	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai penyandang DM	100		100	100	100	100	109,07	196,61	100	100	
26	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat	100		85	90	95	100	80,54	141,36	100	100	
27	Cakupan pemberian pelayanan orang dengan TB sesuai standar	100		100	100	100	100	24,16	51,88	100	100	
28	Cakupan pemberian pemeriksanaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV	100		100	100	100	100	77,62	81,66	100	100	
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			40	45	50	55	33,98	62,55	40	100	
30	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			162	165	167	170	139	217	65	100	
31	Proporsi kasus Tuberkulosis			85	85	85	85	91,71	50,66	85	100	
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	100	100	100	100	100	100	100	
33	Penderita diare yang ditangani			100	100	100	100	100	100	100	100	
34	Cakupan desa/kelurahan UCI			100	100	100	100	52,1	69,9	95	96	
35	Cakupan bayi imunisasi lengkap			96	97	98	100	76,49	72,2	95	96	
36	Persentase PHBS di rumah tangga			50	55	60	70	47,91	46,92	80	80	
37	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat			95	95	95	95	99,93	99,77	100	100	
38	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas			100	100	100	100	92,47	93.14	72	76	
39	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat			72	76	80	84	69,36	78,61	72	76	
40	Persentase penduduk yang memiliki akses jamban keluarga			65	66	67	68	91,84	94,78	70	90	
41	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM			100	100	100	100	98,2	100	100	100	
42	Persentase Puskesmas yang terkareditasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
43	Persentase keluarga sehat			54	54	54	54	26,58	26,58	64	64	
44	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,06	0,06	
45	Jumlah Puskesmas Yang di Bangun/ relokasi			1	2	3	4	0	0	1	1	
46	Rasio dokter per satuan penduduk			0,16	0,17	0,18	0,19	0,16	0,16	0,2	0,2	
47	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			3,6	3,7	3,8	3,9	2,26	3,62	4	4	
48	Persentase belanja langsung APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Bidang Kesehatan			10	10	10	10	19,73	20,87	10	10	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
48	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara			A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	A (81,03)		A(84)	A(84)	
49	Indeks Kepuasanan Masyarakat			80	81	82	83	81,16	76,61	79	80	
50	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarkat miskin		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Hasil program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2023 masih menyisakan PR sama dengan Tahun 2022. Berdasarkan laporan hasil kegiatan Tahun 2023, beberapa indikator kesehatan masih belum tercapai dan dalam hal ini menjadi isu penting di tahun berjalan dan yang akan datang, sehingga diperlukan upaya keras dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 2023 sumber daya baik tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti alat kesehatan, farmasi dan poskesdes masih belum mencukupi untuk pemerataan di daerah terpencil. Pentahapan untuk penambahan sumber daya setiap tahun selalu diusulkan, tetapi tidak semua dapat terealisasi. APBD daerah yang terbatas menjadi salah satu kendalanya. Tahun 2023, berbagai upaya terus dilakukan agar dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan seperti penyusunan *road map* pada kegiatan pengadaan sarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan, selain itu optimalisasi kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar berupa perencanaan untuk tenaga ASN. PPPK dan penugasan khusus.

Pencapaian SPM bidang kesehatan masih dibawah target yang ditetapkan juga menjadi isu penting pada Dinas Kesehatan. Indikator SPM merupakan indikator kinerja Pemerintah di bidang Kesehatan. Penetapan target sasaran berupa sasaran proyeksi menjadi salah satu kendala tidak tercapainya SPM Bidang Kesehatan. Pada tahun 2023, optimalisasi pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat yang dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu diperlukan formulasi isu penting berupa inovasi serta koordinasi lintas program dan lintas sektor agar dapat mengoptimalkan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pelayanan Dinas Kesehatan, antara lain:

1. Pengelolaan pencatatan dan pelaporan secara digital yang lebih optimal melibatkan tidak hanya unsur Pemerintahan namun juga sektor swasta
2. Sinergitas lintas program di internal Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
3. Sinergitas lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah, maupun stakeholder mitra kesehatan, pihak swasta dan masyarakat.
4. Optimalisasi SIK dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
5. Penguatan Tim Pembina Puskesmas serta Tim Pengawas Peraturan Daerah bidang kesehatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Dalam Rancangan Awal Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merencanakan 5 program dengan 22 kegiatan dan 73 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.300.827.095.185,00. Namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan lebih lanjut, pada RKPD Tahun 2025 dilakukan beberapa penyesuaian terhadap jumlah anggaran menjadi Rp.517.001.394.838,00

Secara rinci, perbandingan antara rancangan awal Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan pada RKPD Tahun 2025 dapat dilihat padatabel 2.3 berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	**Kab. HSU**	**A**	**80.602.657.102**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	**Kab. HSU**	**A**	**80.602.657.102**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja**	**Kab. HSU**	**100%**	**16.842.396**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja**	**Kab. HSU**	**100%**	**16.842.396**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	5 Dokumen	3.590.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	5 Dokumen	3.590.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunasn Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	6 Laporan	13.252.396	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunasn Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	6 Laporan	13.252.396	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan**	**Kab. HSU**	**100%**	**78.628.209.909**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan**	**Kab. HSU**	**100%**	**78.628.209.909**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	602 Orang/Bulan	76.682.029.569	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	602 Orang/Bulan	102.018.579.502	Penyesuaian dengna Perhitungan berdasarkan kondisi saat ini
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Orang/Bulan	49.532.191.465	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Orang/Bulan	58.278.710.785	Penyesuaian dengna Perhitungan berdasarkan kondisi saat ini

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
							(RSUD)				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	12 Dokumen	490.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. HSU	12 Dokumen	490.300.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	12 Dokumen	1,438.835.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	12 Dokumen	1,438.835.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	5 Laporan	8,324,040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	5 Laporan	8,324,040	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. HSU	2 Dokumen	8,720.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. HSU	2 Dokumen	8,720.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**0**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. HSU	5 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. HSU	5 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**491.188.120**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**491.188.120**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kab. HSU	5 Paket	100.069.920	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kab. HSU	5 Paket	100.069.920	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
		Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. HSU	3 Paket	31.238.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. HSU	3 Paket	31.238.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	5 Paket	39.816.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	5 Paket	39.816.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. HSU	12 Paket	48.811.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. HSU	12 Paket	48.811.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	12 Laporan	271.252.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	12 Laporan	271.252.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**48.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**48.500.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. HSU	2 Unit	48.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. HSU	2 Unit	48.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**693.744.583**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**693.744.583**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	12 Laporan	565.867.783	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	12 Laporan	565.867.783	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
		yang Disediakan					yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	127.876.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	127.876.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Kab. HSU**	**100%**	**724.172.094**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Kab. HSU**	**100%**	**724.172.094**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	34 Unit	158.418.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	34 Unit	158.418.450	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	36 Unit	9.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	36 Unit	9.150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	15 Unit	527.203.644	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	15 Unit	527.203.644	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	65 Unit	29.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	65 Unit	29.400.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	**Persentase Pelayanan Kesehatan yang**	**Kab. HSU**	**100%**	**48.951.621.872**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Persentase Pelayanan Kesehatan yang**	**Kab. HSU**	**100%**	**48.951.621.872**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**berkualitas**				**PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**berkualitas**				
2	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**3.536.447.870**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**3.536.447.870**	
	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab, HSU	1 Buah	11.284.522.000	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab, HSU	1 Buah	11.284.522.000	
						Pengembangan Rumah Sakit (Dinas Kesehatan)	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	Kab, HSU	1 Buah	147.941.880.000	Kegiatan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
							terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				
						Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. HSU	1 Buah	10.545.000.000	Analisa Kebutuhan
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. HSU	15 Unit	2.866.735,585	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. HSU	15 Unit	2.866.735,585	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. HSU	15 Unit	128.434.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. HSU	15 Unit	128.434.500	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. HSU	65 Unit	66.772.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. HSU	65 Unit	66.772.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. HSU	39 Unit	61.030.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. HSU	39 Unit	61.030.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. HSU	10 Paket	351.599.985	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. HSU	10 Paket	3,141,565,185	Belanja Obat selalu mengandalkan sumber pendanaan lain (DAK dan DAU), antisipasi ketika tidak menjadi Lokus lagi.
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. HSU	26 Paket	61.876.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. HSU	26 Paket	61.876.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan**	**Kab. HSU**	**100%**	**44.589.543.972**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan**	**Kab. HSU**	**100%**	**44.589.543.972**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	4104 Orang	53.632,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	4104 Orang	53.632,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. HSU	3918 Orang	119.609.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. HSU	3918 Orang	119.609.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
		Kesehatan Sesuai Standar					Kesehatan Sesuai Standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	3448 Orang	26.311.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	3448 Orang	26.311.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	18601 Orang	126.045.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	18601 Orang	126.045.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	33000 Orang	125.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	33000 Orang	125.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	38000 Orang	189.425.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	38000 Orang	189.425.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	16039 Orang	46.255.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	16039 Orang	46.255.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	73800 Orang	22.150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. HSU	73800 Orang	22.150.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	Kab. HSU	3800 Orang	39.010.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	Kab. HSU	3800 Orang	39.010.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Melitus	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Melitus	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. HSU	4000 Orang	135.547.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. HSU	4000 Orang	135.547.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. HSU	3000 Orang	48.119.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. HSU	3000 Orang	48.119.500	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. HSU	1 Dokumen	79.999.872	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. HSU	1 Dokumen	79.999.872	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	351.933.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	351.933.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. HSU	1 Dokumen	12.420.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. HSU	1 Dokumen	12.420.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. HSU	1 Dokumen	411.572.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. HSU	1 Dokumen	411.572.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. HSU	2 Dokumen	28.460.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. HSU	2 Dokumen	28.460.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. HSU	9 Dokumen	112.516.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. HSU	9 Dokumen	112.516.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. HSU	337 Orang	38.375.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. HSU	337 Orang	38.375.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. HSU	26 Orang	18.375.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. HSU	26 Orang	18.375.000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. HSU	10 Dokumen	65.440.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. HSU	10 Dokumen	65.440.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	42.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	58.331.195.200	Tindak lanjut rekomendasi DPRD agar peserta JKN dan KIS yang mendapatkan subsidi bertambah
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. HSU	1 Dokumen	107.979.400	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. HSU	1 Dokumen	107.979.400	
	Operasional	Jumlah Dokumen	Kab. HSU	7		Operasional	Jumlah Dokumen	Kab. HSU	7		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dokumen	68.110,000	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dokumen	68.110,000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. HSU	13 Unit	86.118.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. HSU	13 Unit	86.118.000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. HSU	12 Dokumen	277.140.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. HSU	12 Dokumen	277.140.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**42.294.800**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Kab. HSU**	**100%**	**42.294.800**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. HSU	6 Dokumen	42.294.800	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. HSU	6 Dokumen	42.294.800	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**783.335.230**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**783.335.230**	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. HSU	13 Unit	306.430.230	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. HSU	13 Unit	306.430.230	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	Kab. HSU	115 Dokumen	476.905.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	Kab. HSU	115 Dokumen	476.905.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Rujukan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				Rujukan	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**Kab. HSU**	**100%**	**708.243.346.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**Kab. HSU**	**100%**	**708.243.346.000**	
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Komptensi**	**Kab. HSU**	**100%**	**708.243.346**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Komptensi**	**Kab. HSU**	**100%**	**708.243.346**	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. HSU	2 Dokumen	83.473.346	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. HSU	2 Dokumen	83.473.346	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. HSU	9 Orang	397.800.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. HSU	9 Orang	2.095.800.000	Penganggaran gaji (jasa tenaga kesehatan) untuk tenaga medis/ paramedis/ kesehatan penugasan khusus dan program internship
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. HSU	12 Dokumen	226.970.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. HSU	12 Dokumen	226.970.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melaluo pendidikan dan pelatihan**	**-**	**-**	**0**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melaluo pendidikan dan pelatihan**	**Kab. HSU**	**100%**	**0**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	-	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. HSU	4 Orang	400.000.000	Penganggaran untuk beasiswa dokter Spesialis
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase penyelenggaraan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar**	**Kab. HSU**	**100%**	**73.918.400**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase penyelenggaraan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar**	**Kab. HSU**	**100%**	**74.333.025**	
4	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**-**	**-**	**0**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**Kab. HSU**	**100%**	**11.700.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	-	-	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Kab. HSU	42 Sarana	11.700.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persenatse Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan**	**Kab. HSU**	**100%**	**11.700.000**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persenatse Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan**	**Kab. HSU**	**100%**	**-**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. HSU	13 Dokumen	11.700.000	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. HSU	13 Dokumen	-	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	**Penerbitan Sertifikat yang diterbitkan untuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor**	**Kab. HSU**	**100%**	**26.750.000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk**	**Penerbitan Sertifikat yang diterbitkan untuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor**	**Kab. HSU**	**100%**	**26.750.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				**Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. HSU	1 Dokumen	26.750.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. HSU	1 Dokumen	26.750.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab. HSU**	**100%**	**7.040.900**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab. HSU**	**100%**	**7.040.900**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. HSU	1 Dokumen	7.040.900	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. HSU	1 Dokumen	7.040.900	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kab. HSU**	**100%**	**12.386.000**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kab. HSU**	**100%**	**12.386.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. HSU	1 Dokumen	12.386.000	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. HSU	1 Dokumen	12.386.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industry Rumah Tangga**	**Kab. HSU**	**100%**	**16.041.500**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industry Rumah Tangga**	**Kab. HSU**	**100%**	**16.041.500**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. HSU	26 Unit	16.041.500	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. HSU	26 Unit	16.041.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dilaksanakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**214.830.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dilaksanakan**	**Kab. HSU**	**100%**	**214.830.000**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**33.640.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**33.640.000**	
5	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	33.672.375	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. HSU	1 Dokumen	33.672.375	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**181.190.000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**100%**	**181.190.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target capaian kinerja**	**Pagu indikatif**	**Program/kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Loaksi**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. HSU	1 Dokumen	181.190.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. HSU	1 Dokumen	181.190.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**RSUD Pambalah Batung**	**100%**	**90.000.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**RSUD Pambalah Batung**	**100%**	**92.000.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**RSUD Pambalah Batung**	**100%**	**90.000.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**RSUD Pambalah Batung**	**100%**	**92.000.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Pambalah Batung	1 Unt	90.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Pambalah Batung	1 Unt	92.000.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Malang**	**100%**	**2.205.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Malang**	**100%**	**2.205.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Malang**	**100%**	**2.205.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Malang**	**100%**	**2.205.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Malang	1 Unt	2.205.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Malang	1 Unt	2.205.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Karias**	**100%**	**1.170.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Karias**	**100%**	**1.170.000.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					**DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Karias**	**100%**	**1.170.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Karias**	**100%**	**1.170.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Karias	1 Unt	1.170.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Karias	1 Unt	1.170.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Turak**	**100%**	**1.129.320.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sungai Turak**	**100%**	**1.129.320.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Turak**	**100%**	**1.129.320.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sungai Turak**	**100%**	**1.129.320.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Turak	1 Unt	1.129.320.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Turak	1 Unt	1.129.320.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Guntung**	**100%**	**475.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Guntung**	**100%**	**475.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Guntung**	**100%**	**475.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Guntung**	**100%**	**475.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Guntung	1 Unt	475.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Guntung	1 Unt	475.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Penunjang Pelayanan					Penunjang Pelayanan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Haur Gading**	**100%**	**1.260.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Haur Gading**	**100%**	**1.260.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Haur Gading**	**100%**	**1.260.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Haur Gading**	**100%**	**1.260.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Haur Gading	1 Unit	1.260.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Haur Gading	1 Unit	1.260.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Amt. Selatan**	**100%**	**2.676.589.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Amt. Selatan**	**100%**	**2.676.589.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Amt. Selatan**	**100%**	**2.676.589.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Amt. Selatan**	**100%**	**2.676.589.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Amt. Selatan	1 Unt	2.676.589.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Amt. Selatan	1 Unt	2.676.589.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Banjang**	**100%**	**1.160.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Banjang**	**100%**	**1.160.000.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Banjang**	**100%**	**1.160.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Banjang**	**100%**	**1.160.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Banjang	1 Unt	1.160.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Banjang	1 Unt	1.160.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Alabio**	**100%**	**3.163.650.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Alabio**	**100%**	**3.163.650.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Alabio**	**100%**	**3.163.650.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Alabio**	**100%**	**3.163.650.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Alabio	1 Unit Kerja	3.163.650.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Alabio	1 Unit Kerja	3.163.650.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Pasar Sabtu**	**100%**	**1.146.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Pasar Sabtu**	**100%**	**1.146.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Pasar Sabtu**	**100%**	**1.146.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Pasar Sabtu**	**100%**	**1.146.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pasar Sabtu	1 Unt	1.146.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Pasar Sabtu	1 Unt	1.146.000.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Danau Panggang**	**100%**	**2.408.142.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Danau Panggang**	**100%**	**2.408.142.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Danau Panggang**	**100%**	**2.408.142.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Danau Panggang**	**100%**	**2.408.142.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Danau Panggang	1 Unt	2.408.142.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Danau Panggang	1 Unt	2.408.142.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Babirik**	**100%**	**2.274.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Babirik**	**100%**	**2.274.000.000**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Babirik**	**100%**	**2.274.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Babirik**	**100%**	**2.274.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Babirik	1 Unt	2.274.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Babirik	1 Unt	2.274.000.000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Sapala**	**100%**	**388.000.000**	Penambahan Puskesmas yang berstatus BLUD
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Sapala**	**100%**	**388.000.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sapala	1 Unt	**388.000.000**	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Puskesmas Paminggir**	**100%**	**388.600.000**	Penambahan Puskesmas yang berstatus BLUD
						Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia**	**Puskesmas Paminggir**	**100%**	**388.600.000**	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Paminggir	1 Unt	388.600.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Pelayanan Kesehatan yang berkualitas**	**Puskesmas Sapala**	**100%**	**197.999.950**						
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya SPM Bidang Kesehatan**	**Puskesmas Sapala**	**100%**	**197.999.950**						
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Sapala	1 Dokumen	197.999.950						
	PROGRAM PEMENUHAN	**Persentase Pelayanan**	**Puskesmas**	**100%**	**193.410.000**						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Loaksi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana	
	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Kesehatan yang berkualitas**	**Paminggir**								
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya SPM Bidang Kesehatan**	**Puskesmas Paminggir**	**100%**	**193.410.000**						
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas Paminggir	1 Dokumen	193.410.000						
	TOTAL RANCANGAN AWAL				300.827.095.185	TOTAL ANALISIS KEBUTUHAN				517.001.394.838	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 merupakan penggabungan usulan dari hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta pelaksanaan Forum Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselaraskan dengan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Ada beberapa usulan langsung dari aspirasi masyarakat.

Usulan-usulan tersebut direkapitulasi dan dibahas pada rapat internal dalam pembahasan renja OPD sebelum dipaparkan pada Forum Renja Dinas Kesehatan dengan mengundang unsur DPRD, stakeholder dan seluruh OPD terkait untuk memberikan masukan atas usulan-usulan kegiatan Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2023-2026.

Berikut adalah usulan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

KECAMATAN AMUNTAI UTARA									
KODE	**URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN**	**USULAN KEGIATAN**		**PAGU**	**LOKASI**	**DETAIL LOKASI**	**SUMBER DANA**	**SYARAT KELENGKAPAN**	**STATUS/ CATATAN**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan								
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Rehabilitasi Puskesmas		Desa Guntung	Desa Guntung RT.02 Kec.Amuntai Utara Kab. HSU, Kab. Hulu Sungai Utara			Dianggarkan pada APBD 2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menyebutkan pada VISI 2 PRESIDEN: “Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi Stunting, Kematian Ibu, Kematian Bayi. Sedangkan Arah kebijakan adalah Pembangunan SDM yang meliputi:

1. PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK dengan kegiatan Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil, Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang semuanya bertujuan untuk Penurunan kematian ibu dan bayi dan Peningkatan kesehatan reproduksi
2. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING dengan kegiatan Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi yang meliputi Penurunan stunting, Konseling pengasuhandan Akses air minum dan sanitasi layak.
3. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN dengan kegiatan Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan hal ini terkait pada programImunisasi, Obat dan perbekalan kesehatan dan Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasionalyang terkait bidang kesehatan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu: “Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan manfaatan".

Adapun Strategi yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan makanan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ini sendiri ditentukan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan di KabupatenHulu Sungai Utara

Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai tindakan yang akan dilakukan. Sasaran pembangunan kesehatan yang merupakan sasaran strategis tahun 2023-2026 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) yang tertuang pada tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikakan dalam tabel sebagaimana beikut ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KesehatanKabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2		3	4	5	6	7	8	10
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A	A	A	A	A
2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	64,68	64,97	65,26	65,55	65,55
				Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Wasting)	11	10,70	10,4	10,1	9.8
				Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)	19,3	19	18,7	18,4	18,1
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	15	14	13	12	12
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	18	17	16	15	15
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	11	10	9	8	8
				jumlah Kematian Ibu (orang)	9	8	6	5	5
				Rasio posyandu per satuan balita	45	45	45	45	45
				Rasio puskesmas	1600	1600	1600	1600	1600
				Rasio Pustu	7750	7480	7240	7000	7000
				Rasio dokter per satuan penduduk	5000	5000	2500	2500	2500

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
				Rasio perawat per satuan penduduk	855	855	855	855	855
				Rasio Bidan Per Satuan Penduduk	1000	100	100	100	100
				Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 Jenis Nakes	55%	65%	85%	95%	95%
				Persentase Puskesmas Terpenuhi Dokter	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pertolongan persalinan di Fasilitas kesehatan	95%	96%	97%	98%	98%
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96%	97%	98%	100%	100%
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap	96%	97%	98%	100%	100%
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Terduga TBC (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus TBC (*Treatment Coverage*)	40%	45%	50%	55%	55%
				Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC (*Succses Rate*)	.>85%	.>85%	.>85%	.>85%	.>85%
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Berisiko HIV (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan kasus HIV yang ditemukan dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan penemuan dan penanganan kasus DBD	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan penemuan dan penanganan kasus Diare	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan nifas	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada lansia	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	96%	98%	98%	99%	99%
				Cakupan pelayanan skrining usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pelayanan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KESEHATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
		DINAS KESEHATAN			**504,236,708,161.00**					**467,328,675,758.00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**504,236,708,161.00**					**467,328,675,758.00**
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**223,204,214,787.00**				**-**	**224,034,244,732.00**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	177,291,669,185.00			-	-	177,942,933,930.00
		Pengembangan Rumah Sakit								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Buah	150,000,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150,000,000,000.00
		Pengembangan Rumah Sakit								
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Buah	12,000,000,000.00	RSUD Pambalah Batung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11,784,522,000.00
		Pembangunan Puskesmas								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Buah	10,760,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10,760,000,000.00
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	2,100,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,866,735,385.00
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15 Unit	128,434,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		128,434,500.00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	65 Unit	428,728,700.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		428,728,700.00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	39 Unit	61,030,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61,030,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40 Paket	1,751,599,985.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1,851,599,985.00
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket	61,876,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61,883,360.00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	45,359,032,072.00			-	-	45,256,892,272.00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4104 Orang	145,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		145,000,000.00
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3918 Orang	200,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200,000,000.00
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3448 Orang	200,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400,000,000.00
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18601 Orang	211,299,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		211,300,000.00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33000 Orang	100,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100,000,000.00
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38000 Orang	189,425,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		189,425,000.00
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16039 Orang	57,700,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57,700,000.00
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73800 Orang	22,150,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		22,150,000.00
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	39,010,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39,010,000.00
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	370 Orang	25,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25,000,000.00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4000 Orang	135,547,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		135,547,500.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3000 Orang	48,119,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48,119,500.00
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	79,999,872.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		79,999,872.00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400,000,000.00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20,000,000.00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	411,572,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		411,572,000.00
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	14,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		14,000,000.00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	112,516,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		112,516,000.00
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	337 Orang	25,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25,000,000.00
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	37,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		37,000,000.00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	65,440,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65,440,000.00
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	42,000,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		42,000,000,000.00
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	107,979,400.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		107,979,400.00
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	68,110,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		68,110,000.00
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	86,118,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		86,118,000.00
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	277,140,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		277,140,000.00
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	280,905,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		280,905,000.00
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	51,083,300.00			-	-	51,083,300.00
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	51,083,300.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		51,083,300.00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	502,430,230.00			-	-	783,335,230.00
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	306,430,230.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		306,430,230.00
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	15 Dokumen	196,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		476,905,000.00
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**	**2,648,708,346.00**				**-**	**2,806,243,346.00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	2,248,708,346.00			-	-	2,406,243,346.00
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	83,473,346.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		83,473,346.00
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	2,079,120,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,095,800,000.00
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	86,115,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		226,970,000.00
	1.02.03.2.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400,000,000.00			-	-	400,000,000.00
	1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	400,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400,000,000.00
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**	**73,918,400.00**				**-**	**73,918,400.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	11,700,000.00			-	-	11,700,000.00
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	13 Dokumen	11,700,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		11,700,000.00
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	26,750,000.00			-	-	26,750,000.00
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	26,750,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26,750,000.00
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	7,040,900.00			-	-	7,040,900.00
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	7,040,900.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7,040,900.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	12,386,000.00			-	-	12,386,000.00
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	12,386,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12,386,000.00
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	16,041,500.00			-	-	16,041,500.00
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 Unit	16,041,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16,041,500.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**364,998,800.00**				**-**	**283,640,000.00**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	114,999,800.00			-	-	33,640,000.00
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	114,999,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		33,640,000.00
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	249,999,000.00			-	-	250,000,000.00
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	249,999,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250,000,000.00
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**277,944,867,828.00**				**-**	**240,130,629,280.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	74,991,000.00			-	-	74,991,000.00
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	28,590,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28,590,000.00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	46,401,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		46,401,000.00
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	162,229,346,587.00			-	-	158,578,551,307.00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan	102,100,179,502.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		102,100,179,502.00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan	58,278,710,785.00	RSUD Pambalah Batung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		54,532,191,465.00
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	474,750,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		490,300,000.00
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,356,885,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1,438,835,500.00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	9,900,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8,324,040.00
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8,920,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8,720,800.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100,000,000.00			-	-	50,000,000.00
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100,000,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50,000,000.00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	479,553,700.00			-	-	491,188,120.00
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100,069,290.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100,069,920.00
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25,240,250.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		31,238,300.00
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38,464,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39,816,800.00
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44,826,160.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48,811,100.00
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,954,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		271,252,000.00
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	94,997,500.00			-	-	48,500,000.00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	94,997,500.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		48,500,000.00
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	534,480,800.00			-	-	693,744,583.00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	347,900,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		565,867,783.00
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186,580,800.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		127,876,800.00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,431,446,000.00			-	-	1,495,680,244.00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1,254,830,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1,279,926,600.00
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	15,500,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9,150,000.00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	137,616,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		177,203,644.00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	23,500,000.00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		29,400,000.00
	-	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**113,000,052,241.00**			**-**	**-**	**78,747,974,026.00**
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	92,000,000,000.00	RSUD Pambalah Batung	Pendapatan BLUD	-		57,200,521,785.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2,618,000,000.00	Puskesmas Sungai Malang	Pendapatan BLUD	-		2,618,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1,371,500,000.00	Puskesmas Sungai Karias	Pendapatan BLUD	-		1,371,500,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1,286,000,000.00	Puskesmas Banjang	Pendapatan BLUD	-		1,400,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	560,000,000.00	Puskesmas Guntung	Pendapatan BLUD	-		580,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1,117,000,000.00	Puskesmas Sungai Turak	Pendapatan BLUD	-		1,217,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1,230,000,000.00	Puskesmas Haur Gading	Pendapatan BLUD	-		1,230,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2,160,000,000.00	Puskesmas Amuntai Selatan	Pendapatan BLUD	-		2,260,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3,263,650,000.00	Puskesmas Alabio	Pendapatan BLUD	-		3,313,650,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1,457,406,078.00	Puskesmas Pasar Sabtu	Pendapatan BLUD	-		1,557,406,078.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2,424,896,163.00	Puskesmas Babirik	Pendapatan BLUD	-		2,424,896,163.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2,735,000,000.00	Puskesmas Danau Panggang	Pendapatan BLUD	-		2,735,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	388,000,000.00	Puskesmas Sapala	Pendapatan BLUD	-		420,000,000.00
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	388,600,000.00	Puskesmas Paminggir	Pendapatan BLUD	-		420,000,000.00	
	J U M L A H				**504,236,708,161.00**					**467,328,675,758.00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan ini disusun mengacu pada SPM kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta tetap mengacu dengan Renstra Kementerian 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

Dokumen Renja Dinas Kesehatan berisikan daftar program, kegiatan, strategi dan usulan anggaran kegiatan 2025. Diharapkan anggaran kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di luar gaji, sehingga pada waktu pengusulan Renja tahun berikutnya dapat menerapkan kegiatan berbasis anggaran, bukan anggaran berbasis kegiatan.Usulan rencana kegiatan yang inovatif, kreatif dan efektif tentu diharapkan setiap tahunnya dengan tetap mengkondisikan kemampuan daerah untuk anggaran kesehatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

Jl. Karya Manuntung Kota Raja Amuntai Telp. (0527) 61623
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71452

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja 2025 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 disusun sebagai penjabaran Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mmpunyai orientasi pada hasil yang diharapkan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja 2025 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara ini diharapkan dapat memberikan arah institusi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, April 2024
Kepala Dinas,

SURYA SUPI, SSTP, MPA
Pembina Tk. I
NIP. 19820102 200012 1 001

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI ---------- ii

DAFTAR TABEL ---------- iii

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1

1.1 Latar Belakang ---------- 1

1.2 Landasan Hukum ---------- 2

1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 6

1.4 Sistematika Penulisan ---------- 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU --- 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ---------- 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ---------- 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara ---------- 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ---------- 20

2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat ---------- 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ---------- 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ---------- 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ---------- 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ---------- 43

4.1 Program dan Kegiatan ---------- 43

BAB V PENUTUP ---------- 47

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023 ---------- 9

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ---------- 10

Tabel 2.3 Target Pencapaian SPM Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara---------- 14

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara---------- 15

Tabel 2.5 Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023 ---------- 18

Tabel 2.6 Populasi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di Kab. H. S. Utara ---------- 18

Tabel 2.7 Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2023---------- 18

Tabel 2.8 Populasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2023 ------- 19

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (Aspirasi Masyarakat) ---------- 24

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (Pokir Dewan)---------- 31

Tabel 2.11 Rekapitulasi Usulan Aspirasi dan Pokir Yang Disetujui ---------- 38

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Utara ---------- 41

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang antara lain :

a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan progam dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahunan 2025.

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diperlukan sebagai tahapan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mencapai sasaran yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
40. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
41. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 21).
43. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah:

1. Mengintegrasikan program pembangunan bidang sosial dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan RPD.
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan bidang sosial.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun ketiga Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh pejabat dan staf pelaksana agar dapat melaksanakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Sebagai tolak ukur menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evalusi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan pencapaian target Rentra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan proses usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dengan kesesuaian antara isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dana indikatif dan sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Dinas Sosial pada tahun 2023 didukung dengan program/kegiatan mencakup 6 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan, secara kumulatif capaian program/kegiatan (*output*) rata-rata hampir tercapai 100% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023

No.	URAIAN	APBD
1.	Jumlah Program	6
2.	Jumlah Kegiatan	15
3.	Jumlah Sub Kegiatan	32
4.	Alokasi Dana (Rp)	16.807.921.545,00
5.	Realisasi Keuangan (Rp)	14.168.122.704,00
6.	Keuangan (%)	84,29 %
7.	Fisik (%)	97,74 %

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan APBD sebesar **Rp. 16.807.921.545,00 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*)** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 14.168.122.704,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuha Ratus Empat Rupiah)*** atau **84,29%** dari pagu anggaran.

Realisasi 6 program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.122.542.495,00**	**2.558.303.869,00**	**62,06**	**91,48%**
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***15.729.700***	***10.182.000***	***64,73***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.335.000	6.382.000	68,37	2 dokumen
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.145.000	2.000.000	48,25	2 laporan
	3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.249.700	1.800.000	80,01	1 laporan
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***3.564.670.000***	***2.081.267.324***	***58,39***	***71,43%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.561.850.000	2.079.696.524	58,39	19 Orang
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.820.000	1.570.800	55,70	12 laporan
	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***1.394.700***	***280.000***	***20,08***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	375.000	0	0	2 laporan
	2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.019.700	280.000	27,46	1 laporan
	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***1.724.500***	***0***	***0***	***71,43%***
	1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.349.700	0	0	19 data
	2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	374.800	0	0	1 laporan
	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***180.717.500***	***158.645.652***	***87,79***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.996.400	12.551.500	73,85	7 paket
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.296.200	43.594.000	83,36	21 paket
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.972.200	8.574.100	78,14	19 paket
	4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.700	28.855.724	82,45	9 paket
	5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	65.453.000	65.070.327	99,42	12 laporan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***270.283.295***	***235.082.993***	***86,98***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.909.645	64.588.493	69,52	48 laporan
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.373.750	170.494.500	96,12	12 laporan
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***88.022.800***	***72.845.900***	***82,76***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.372.800	55.808.900	79,30	31 unit
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.750.000	12.195.000	99,41	3 unit
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.900.000	4.842.000	98,82	3 unit
II.	**Program Pemberdayaan Sosial**	**180.410.000**	**146.727.000**	**81,33**	**99,74%**
	1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***36.310.000***	***20.652.000***	***56,88***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	36.310.000	20.652.000	56,88	7 dok
	2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota	***144.100.000***	***126.075.000***	***87,49***	***99,49%***
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	139.955.000	124.875.000	89,23	210 Org
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.145.000	1.200.000	28,95	9 Org
III.	**Program Rehabilitasi Sosial**	**2.091.744.800**	**1.980.156.887**	**94,67**	**96,06%**
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	***485.744.800***	***465.406.887***	***95,81***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	485.744.800	465.406.887	95,81	320 Org
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	***1.606.000.000***	***1.514.750.000***	***94,32***	***94,33%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.606.000.000	1.514.750.000	94,32	166 Org

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik
IV.	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**9.747.541.600**	**9.168.570.448**	**94,06**	**85,81%**
	1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	***16.310.00***	***16.154.250***	***99,05***	***89,78%***
	1. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	14.660.000	14.504.250	98,94	28 Org
	2. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1.650.000	1.650.000	100	537 Org
	2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***9.731.231.600***	***9.152.416.198***	***94,05***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.654.000	96,54	38.486 Data
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.770.000	168.524.000	86,52	8.578 KPM
	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	9.526.461.600	8.974.238.198	94,20	402 Org
V.	**Program Penanganan Bencana**	**518.934.800**	**265.158.500**	**51,10**	**100%**
	1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota	***518.934.800***	***265.158.500***	***51,10***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	380.451.800	186.855.700	49,11	2.632 Org
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	138.483.000	78.302.800	56,11	227 Org
VI.	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**146.747.850**	**49.206.000**	**56,54**	**100%**
	1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	***146.747.850***	***49.206.000***	***33,53***	***100%***
	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	146.747.850	49.206.000	33,53	109 Makam
JUMLAH		**16.807.921.545**	**14.168.122.704**	**84,29**	**97,74**

Secara umum, capaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 Periode Pertama mencapai angka 97,74% atau dapat diartikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terlaksana dengan capaian yang sesuai dengan yang ditargetkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 *Standar Pelayanan Minimal*

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaran pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (millenium development goals).

Pola pengukuran capaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di kabupaten/kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.3 Target Pencapaian SPM Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Keterangan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **375** orang
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **472** orang
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yanTerpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **250** orang
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti **22** orang
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana alam&Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100%	Kepala Daerah tidak ada menetapkan bencana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebagai kejadian tanggap darurat bencana, sehingga capaiannya pada indikator ini 100%

2.2.2 *Kinerja Pelayanan Bidang Sosial Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020*

Capaian kinerja urusan sosial diukur dari 5 (lima) indikator kinerja kunci (IKK). Secara rinci capaian pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.4 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Keterangan
IKK Output				
1.	Rehabilitasi Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	778	142 lansia penerima bansos, 115 disabilitas penerima bansos, 86 ODGJ penerima bansos, 385 anak LKSA, 28 peserta pelatihan dipanti provinsi, 22 gepeng
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.185	a. Disabilitas = 1127 b. Anak = 118 c. Lanjut usia = 859 d. Gepeng = 85
		Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	0	Belum ada tim reaksi cepat
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1.125	126 lansia, 109 disabilitas, 85 ODGJ, 166 anak terlantar di LKSA, 16 anak PPRSAR Mulia Satria, 22 gepeng, 3 klien PPRSLU Budi Sejahtera, 2 klien PRSPD Iskaya Banaran, 10 klien ODGJ di RS PB dan ke sambang lihum Amuntai, Bantuan Atensi Budi Luhur 86, 232 anak penerima bantuan YAPI, 67 anak penerima Atensi disabilitas, Bantuan Atensi BBPPKS 178
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	1 buah mobil ambulan, 2 buah mobil Resque, dan 1 buah Truk Dapur Umum Lapangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	486	126 lansia, 109 disabilitas, 85 ODGJ, 166 anak terlantar di LKSA
		Jumlah rumah singgah/shelter tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.	1	Ada 1 rumah singgah
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.	18	14 anak PPRSAR, 2 anak disabilitas
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu.	183	Lansia 105, Disabiltas 78

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Keterangan
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.	0	Belum ada alat bantu di rumah singgah
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.	1	Kotak P3K
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.	0	Belum ada paket perbekalan kesehatan
		Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di rumah singgah.	0	Belum ada tenaga kesehatan tersedia di rumah singgah
		Jumlah pekerja sosial professional dan atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan.	11	(9 TKSK, 2 Peksos)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan atau pusat kesejahteraan sosial.	529	126 lansia, 109 disabilitas, 85 ODGJ, 166 anak terlantar di LKSA, 16 anak PPRSAR Mulia Satria, 22 gepeng, 3 klien PPRSLU Budi Sejahtera, 2 klien PRSPD Iskaya Banaran
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.	342	126 lansia, 109 disabilitas, 85 ODGJ, 4 gepeng
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.	10	5 disabilitas, 5 anak terlantar, 2 lansia
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	198	16 anak ke PPRSAR, 3 lansia klien PPRSLU, 2 disabilitas ke PRSPD Iskaya Banaran, 1 klien Budi Luhur, 10 ODGJ di rujuk ke RS PB, 166 anak LKSA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2	2 disabilitas terlantar
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.	22	5 disabilitas, 16 anak PPRSAR, 1 lansia
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	30	2 peserta pelatihan Iskaya Banaran, 1 disabilitas mental budi luhur, 8 odgj dirujuk ke sambang lihum, 16 klien pprsar mulia satria, 3 klien pprslu budi sejahtera
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan.	2.864	Kebakaran 230 jiwa, Angin Puting Beliung 228 jiwa, Banjir 2.367 dan Tanah Longsor 39 jiwa
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang.	230	Kebakaran 230 jiwa
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Tidak ada
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Tidak ada paket khusus
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikologis	-	Tidak ada korban yang membutuhkan psikososial
IKK Outcome				
1.	Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	31,92%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti yang terlayani **1.125** orang , dari **3524** orang populasi
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat da setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Jumlah korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran yang terlayani **2.864** orang dari **2.864** orang populasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.5 Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Bantuan sosial jaminan hidup lansia, disabilitas dan ODGJ	320 Org	
2	Bantuan sosial anak panti asuhan	166 Org	
3	Anak terlantar yang mengikuti pelatihan PPRSAR	16 Org	
4	Bantuan sosial bagi Gepeng	22 Org	
5	Lanjut usia yang dirujuk ke PPRSLU	3 Org	
6	Disabilitas mengikuti pelatihan di PRSPD Iskaya Banaran	2 Org	
7	ODGJ yang dirujuk ke RSPB Amuntai	10 Org	
8	Lansia dan disabilitas yang menerima alat bantu	183 Org	
9	Penerima layanan ATENSI PSBL Budi Luhur	86 Org	
10	Penerima bantuan YAPI	232 Org	
11	Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH)	13 Org	
12	Pemulangan Orang Terlantar (OT)	5 Org	
13	Anak Penerima ATENSI Disabilitas	67 Org	
Jumlah Total		**1.125 Org**	

Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2023

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan Pengemis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.6 Populasi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Lanjut Usia (lansia) Terlantar	1.210 Org	
2	Disabilitas Terlantar	1.600 Org	
3	Anak Terlantar	581 Org	
4	Gepeng	133 Org	
Jumlah Total		**3.524 Org**	

Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2023

Jumlah korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.7 Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kebakaran	230	
2	Banjir	2.367	
3	Angin Puting Beliung	228	
4	Tanah Longsor	39	
Jumlah Total		**2.864 Org**	

Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Perlindungan Sosial, 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggapan darurat bencana daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.8 Populasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kebakaran	230	
2	Banjir	2.367	
3	Angin Puting Beliung	228	
4	Tanah Longsor	39	
Jumlah Total		**2.864 Org**	

Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Perlindungan Sosial, 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Kekuatan (Strenghts)

yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara berkiprah ekspansif di dalam mewujudkan visi dan misinya, komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :

1. Adanya lembaga/dinas;
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur;
3. Adanya sarana dan prasarana;
4. Adanya program kerja;
5. Adanya dedikasi pegawai;
6. Jumlah mitra kerja (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang memadai.

B. Kelemahan (Weaknesses)

yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi didalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang ditemui antara lain;

1. Profesionalisme SDM masih kurang;
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai;
3. Koordinasi antar berbagai elemen internal dan eksternal belum optimal;
4. Belum adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
5. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

C. Tantangan

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung meningkat akibat wabah covid-19;
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi rawan banjir karena merupakan daerah rawa dan rawan kebakaran terutama di sekitar permukiman padat penduduk;
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sosial demi meningkatkan kesejahteraan sosial;
4. Kebutuhan verifikasi dan validitas data DTKS dituntut serba cepat dan akurat agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran;
5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
6. Adanya tuntutan pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat terhadap kinerja Dinas Sosial dalam rangka penyelarasan penyelenggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan percepatan penuntasan permasalah sosial;
7. Program-program penanganan masalah kemiskinan belum didukung dengan anggaran APBD yang memadai.

D. Peluang

yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara mewujudkan visi dan misinya. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UKM, EUP dan KUBE;
2. Adanya dana bantuan dari APBD Provinsi dan APBN;
3. Adanya aturan, juklak dan juknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, karang taruna;
5. Bantuan sosial terhadap masyarakat dapat tersalurkan tepat sasaran;
6. Pelaksanaan bimtek terhadap operator yang ditawarkan oleh provinsi maupun pusat;
7. Adanya ketentuan yang jelas peraturan perundang undangan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan masih mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana RPD Tahun 2023-2026 adalah :

1. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Peningkatan potensi produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penataan pasar;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan nilai tambah produk;
7. Peningkatan manajemen sektor jasa;
8. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
9. Peningkatan investasi daerah;
10. Peningkatan kemandirian berusaha/*entrepreneurship;*
11. Pemberdayaan ekomoni masyarakat miskin.

Demikian juga dengan arah pembangunan pada tahun 2025 mendatang, mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, dimana dokumen tersebut tidak berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih hanya meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan lebih bersifat perencanaan teknokratik.

Prioritas dan sasaran pembangunan bidang sosial budaya pada tahun 2025, diarahkan pada:

1. Peningkatan kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
    a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
    b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah;
    c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, dengan sasaran :
    a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
    b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting;
    c. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran :
    a. Pemerataan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
    b. Penurunan angka pernikahan anak;
    c. Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Salah satu prioritas dan sasaran pada bidang sosial budaya yang berkaitan dengan Dinas Sosial tahun 2025 adalah Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan.

Berdasarkan RKPD Tahun 2025, Dinas Sosial memperoleh pagu indikatif sebesar **Rp. 9.244.477.946,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*)**, yang digunakan untuk :

1. Belanja pegawai/gaji dan tunjangan;
2. Belanja operasional seperti SPPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan administrasi urusan pemerintah daerah lainnya;
3. Belanja Modal dan lain-lain.
4. Pelaksanaan urusan bidang sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial seperti pemberdayaan sosial dengan melaksanakan penguatan kapasitas PSKS; Perlindungan dan Jaminan sosial dengan melaksanakan bimbingan dan keterampilan berusaha bagi penduduk miskin, Pengumpulan Data PPKS dan PSKS; Penanganan Bencana dengan pemberian bantuan makanan dan sandang bagi korban bencana alam dan sosial; Pengelolaan TMP dan pemberian santunan bagi keluarga pahlawan/pendiri Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain pagu indikatif, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengelola Pagu Indikatif Lainnya yang peruntukannya digunakan untuk belanja Bantuan Sosial bagi lansia terlantar, disabilitas dan ODGJ, bantuan bedah rumah RS-RTLH, dan bantuan usaha ekonomi produktif berupa jukung, Mesin CIS dan bantuan modal usaha untuk keluarga miskin dan kurang mampu, serta bantuan kebutuhan pangan bagi anak terlantar pada LKSA sebesar **Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*)**, sehingga total pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 14.244.477.946,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).**

Namun pagu indikatif tersebut belum termasuk rencana peningkatan/penambahan SDM Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu rekrutmen Tenaga Pegawai Kontrak (TPK) menjadi CPNS ataupun PPPK.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 26 (dua puluh enam) orang TPK yang terdiri dari 16 (enam belas) orang tenaga administrasi dan 10 (sepuluh) orang TKSK, dengan rencana kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan sebesar **Rp. 188.500.000,00 *(Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*** per bulan, atau sebesar

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rp. 2.639.000.000,00 (*Dua milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta rupiah*) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun rekapitulasi hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD Kab. Hulu Sungai Utara

Usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara pada aplikasi SIPD-RI ada 69 (enam puluh sembilan) usulan. Pada umumnya usulan tersebut lebih mengarah kepada bantuan sosial untuk penangan fakir miskin, yaitu bantuan sosial RS-RTLH 20 usulan, bantuan sosial jukung 37 usulan, bantuan sosial purun 7 usulan, dan usulan bantuan sosial uang untuk ODGJ 5 usulan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan terarah serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan PPKS yang ditindaklanjuti dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menginventaris, mengakomodir, melakukan identifikasi dan verifikasi data pada setiap usulan untuk kemudian menjadikannya bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tahun berikutnya setelah hasil identifikasi dan verifikasi usulan tersebut dianggap layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan.

Namun mengingat usulan yang masuk setiap tahunnya pada kegiatan Musrenbang Kecamatan begitu banyak dan tidak berbanding lurus dengan alokasi yang tersedia pada Dinas Sosial, tentunya realisasi usulan tersebut tidak bisa dengan serta merta terakomodir pada tahun usulan tersebut namun Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan pengalokasian secara bertahap, terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan alokasi yang tersedia setiap tahunnya.

Adapun usulan masyarakat dan pokok pikiran Dewan yang bersesuaian pada aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (Aspirasi Masyarakat)

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Jarang Kuantan RT.01 sd RT.05, Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Cangkering, Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Kayakah, Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Kayakah, Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Bahadangan RT. 04, Kec. Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Patarikan RT. 02, Kec. Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
7	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Bahadangan RT. 03, Kec. Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
8	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Bahadangan RT. 03, Kec. Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Bahadangan RT. 04, Kec. Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
10	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa manarap RT.001, Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
11	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Manarap RT.006, Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 dapung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.250.000
12	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Pararain, Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
13	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Pararain, Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 dapung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.250.000
14	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sarang Burung Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
15	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Longkong RT 01-04 Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
16	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Panangah Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
17	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Haur Gading RT. 04, Kec. Haur Gading	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
18	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Palimbang Sari RT. 001 s/d RT. 005 Kec. Haur Gading	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 3.500.000
19	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Tabalong Mati Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 3.500.000
20	Rehabilitasi Sosial / Penyediaan Permakanan	Desa Tabalong Mati RT. 001, 002, 003 Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Org Bansos Uang	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 10.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
21	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Pamintangan Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
22	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Teluk Daun Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 40.000.000
23	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Telaga Bamban Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
24	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Tayur RT 01-04 Kec. Amuntai Utara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
25	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Tangga Ulin Hilir RT. 001 – RT. 005 Kec. Amuntai Tengah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
26	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jl. Keramat Desa Tangga Ulin Hilir RT. 002 Kec. Amuntai Tengah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
27	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jl. Keramat Desa Tangga Ulin Hilir RT. 003 Kec. Amuntai Tengah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit RS-RTLH	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Harus RT. 01 Kec. Amuntai Tengah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 dapung purun	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.250.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
29	Rehabilitasi Sosial / Penyediaan Permakanan	Muara Baruh RT.01 dan 03, Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Muara Baruh	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 org	ditolak
30	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Manarap RT.001, Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Manarap	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (Pokir Dewan)

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Kec. Sungai Pandan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Kembang Kuning Kec. Amuntai Tengah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Namang Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 dapung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 34.500.000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Tambalang Kecil Kec. Sungai Pandan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rukam Hilir Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
7	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rukam Hulu Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
8	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rukam Hilir Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 dapung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.250.000
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Teluk Buluh, Kecamatan Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
10	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Danau Terate, Kecamatan Banjang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
11	Rehabilitasi Sosial / Penyediaan Permakanan	Desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
12	Rehabilitasi Sosial / Penyediaan Permakanan	Desa Rantau Bujur, Kecamatan Banjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 20.000.000
13	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rukam Hilir Kec. Amuntai Selatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 dapung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 34.500.000
14	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Babirik Hulu Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 24.500.000
15	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 24.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
17	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Hambuku Hilir Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 21.000.000
18	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Parupukan Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 24.500.000
19	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 42.000.000
20	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Durait Hulu Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 21.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
21	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 bh Jukung	Setuju, agar menyampaikan proposal usulan ke Dinas Sosial untuk mengetahui BNBA yang diusulkan sehingga dapat dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan Rp. 17.500.000
22	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Hambuku Lima Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
23	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Hambuku Baru Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
24	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
25	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Murung Panti Hulu Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
26	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
27	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Murung Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
29	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
30	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Sungai Dalam Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
31	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Pajukungan Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
32	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
33	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rantau Karau Tengah Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
34	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rantau Karau Hulu Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
35	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Hambuku Tengah Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
36	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Padang Bangkal Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
37	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Hambuku Pasar Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/Kegitan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
38	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Rantau Karau Hilir Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak
39	Perlindungan dan Jaminan Sosial / Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Desa Teluk Sinar Kecamatan Babirik	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	--	ditolak

Tabel 2.11 Rekapitulasi Usulan Aspirasi dan Pokir Yang Disetujui

No.	Jenis Usulan	Asal Usulan & Banyak Usulan		Besar Anggaran	
		Aspirasi	Pokir	Aspirasi	Pokir
1.	Jukung	12 Bh	95 Bh	Rp. 42.000.000	Rp. 332.500.000
2.	Purun	3.000 dapung	5.000 dapung	Rp. 51.750.000	Rp. 86.250.000
3.	RS-RTLH	21 Unit	--	Rp. 420.000.000	--
4.	Permakanan	5 Org	30 Org	Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000
JUMLAH				**Rp. 523.750.000**	**Rp. 478.750.000**

Berdasarkan tabel 2.11 di atas, besar anggaran aspirasi masyarakat dan pokir dewan yang disetujui adalah sebesar **Rp. 1.002.500.000,00 (*Satu Milyar Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)**, yang sebagian diakomodir dari pagu indikatif lainnya yang peruntukannya digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dan sebagian lagi dari tambahan anggaran yang ditambahkan ke total pagu indikatif Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 **sebesar Rp. 113.025.000,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)**. Sehingga total pagu indikatif Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 14.216.477.625,00** (***Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah***). Hasil inputan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;

e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau

g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, serta didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Sosial.

Keterkaitan tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel III.1 di bawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Target Tujuan kondisi Akhir Tahun RPD (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	71.00	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	BB	BB	BB	BB
				SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL					
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB	BB	BB	BB
2.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin		Penurunan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin				
				SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL					
				Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	69,04	71,48	74,04	76,73

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Target Tujuan kondisi Akhir Tahun RPD (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
				Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	81,88	82,57	83,96	85,34
3.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah				
				SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL					
				Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	100	100	100	100

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang adsa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat orgenitas dan evektifitas pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian progran atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesipik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasdaran dan kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*Reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang di tetapkan telah tercapai. Penentuan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif kebenarannya.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini akan melaksanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan untuk mengimplementasikan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 14.216.477.625,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).**

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

g. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

h. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

i. *Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan :*
   1) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :

a. *Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :*
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b. *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota, dengan sub kegiatan :*
   1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
   2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :

a. *Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :*
   1) Penyediaan Permakanan;
   2) Penyediaan Sandang;
   3) Penyediaan Alat Bantu;
   4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
   5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
   6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
   7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
   8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

10) Pemberian Layanan Kedaruratan;

11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;

12) Pemberian Layanan Rujukan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat.

5. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1) Penyediaan Makanan;

2) Penyediaan Sandang;

3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;

4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;

5) Pelayanan Dukungan Psikososial;

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota, dengan subkegiatan :

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dan perkiran maju Tahun 2026 tercantum pada Lampiran 4.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Output Rencana Kerja Dinas Sosial adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Amuntai, April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SURYA SUPI, SSTP, MPA
Pembina Tk. I / IV.a
NIP. 19820102 200012 1 001

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lampiran 1

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
Bidang Urusan Sosial														
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**50.69**	**51%**	**100**	**251**	**251%**
1	*06*	*01*	*2.01*		*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	300%
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2	2	2	100%	2	6	50%
1	*06*	*01*	*2.02*		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	*100*	*100*	*100*	*71.43*	*71%*	*100*	*271*	*271%*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	26	27	19	70%	21	66	314%
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	300%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	*06*	*01*	*2.03*		*Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah*	*Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	2	2	100%	2	5	250%
1	*06*	*01*	*2.05*		*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100*	*100*	*100*	*71.43*	*71%*	*100*	*271*	*271%*
				02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43	42	0	0	0%	2	44	102%
1	*06*	*01*	*2.06*		*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	7	7	7	100%	1	15	115%
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	21	21	21	100%	20	62	295%
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	19	19	19	100%	1	39	1950%
				05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	9	9	9	100%	2	20	1000%
				09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	10	12	12	100%	25	47	94%
1	*06*	*01*	*2.07*		*Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase barang milik daerah yang terpenuhi*	*100*	*0*	*0*	*0*	0%	*100*	*100*	100%
				06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	0	0	0	0%	3	3	21%
1	*06*	*01*	*2.08*		*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	48	48	100%	48	144	300%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
1	*06*	*01*	*2.09*		*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	31	31	31	100%	31	93	2325%
				06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	3	3	100%	3	9	300%
				09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	0	3	3	0%	3	6	600%
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten (%)**	**100**	**100**	**100**	**99.84**	**100%**	**100**	**300**	**300%**
1	*06*	*02*	*2.02*		*Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7	7	7	7	100%	7	21	300%
1	*06*	*02*	*2.03*		*Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota*	*Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam pemberdayaan sosial*	*2.07*	*100*	*45.67*	*45.44*	*99%*	*100*	*245*	*11830%*
				01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	210	0	210	210	100%	10	220	105%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	0	10	9	90%	200	209	209%
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**300**	**300%**
1	*06*	*04*	*2.01*		*Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar*	*34.78*	*53.95*	*14.32*	*14.32*	*100%*	*20.55*	*88.82*	*255%*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	777	600	320	320	100%	300	1,220	157%
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35							
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20							
				04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35							
				06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120							
				07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat	50							
				08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15							
				09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	816							
				10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10							
				11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10							
				12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8	8	8	100%	10	26	260%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar**	**17**	**100**	**15.74**	**13.51**	**86%**	**17.00**	**131**	**0%**
1	*06*	*05*	*2.02*		*Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial*	*11,204*	*100*	*14*	*14.29*	*100%*	*100.00*	*214*	*2%*
				01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	35000	28060	35000	38486	110%	38060	104,606	299%
				03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8770	37663	9919	8578	86%	9919	56,160	640%
				04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	345	271	412	402	98%	295	968	281%
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**300**	**300%**
1	*06*	*06*	*2.01*		*Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota*	*Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2880	26101	26101	2632	10%	2880	31,613	1098%
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	89	89	227	255%	225	541	240%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**300**	**300%**
1	*06*	*07*	*2.01*		*Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	*Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*100*	*300*	*300%*
				02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	109	109	109	109	100%	109	327	300%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lampiran 2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Sosial**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**5,498,617,755.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Sosial**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**8,137,617,755.00**	
1.	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah***	***100***	***98,767,000.00***	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah***	***100***	***98,767,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	79,850,000.00	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	79,850,000.00	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	18,917,000.00	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	18,917,000.00	
2.	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100***	***3,700,592,698.00***	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100***	***6,339,592,698.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	3,696,302,898.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	6,335,302,898.00	
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	4,289,800.00	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	4,289,800.00	
3.	***Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah***		***Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel***	***100***	***2,400,000.00***	***Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah***		***Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel***	***100***	***2,400,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2,400,000.00	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2,400,000.00	
4.	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100***	***48,400,000.00***	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100***	***48,400,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43	48,400,000.00	1. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43	48,400,000.00	
5.	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100***	***685,777,700.00***	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100***	***685,777,700.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	22,909,600.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	22,909,600.00	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	129,137,700.00	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	129,137,700.00	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	45,874,600.00	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	45,874,600.00	
	4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	51,499,800.00	4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	51,499,800.00	
	5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	436,356,000.00	5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	436,356,000.00	
6.	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang terpenuhi***	***100***	***162,210,000.00***	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase barang milik daerah yang terpenuhi***	***100***	***162,210,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	162,210,000.00	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	162,210,000.00	
7.	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100***	***401,645,717.00***	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100***	***401,645,717.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	97,173,717.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	97,173,717.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	304,472,000.00	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	304,472,000.00	
8.	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100***	***367,744,640.00***	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100***	***367,744,640.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	249,744,640.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	249,744,640.00	
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	18,100,000.00	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	18,100,000.00	
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	99,900,000.00	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*1*	99,900,000.00	
9.	***Kegiatan Penataan Organisasi***		***Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi***	***100***	***31,080,000.00***	***Kegiatan Penataan Organisasi***		***Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi***	***100***	***31,080,000.00***	
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	31,080,000.00	1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*1*	31,080,000.00	
II.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Dinas Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten (%)**	**100**	**325,445,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Dinas Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten (%)**	**100**	**325,445,000.00**	
1.	***Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB***	***100***	***60,790,000.00***	***Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB***	***100***	***60,790,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7	60,790,000.00	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7	60,790,000.00	
2.	***Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota***		***Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam pemberdayaan sosial***	***2.07***	***264,655,000.00***	***Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota***		***Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam pemberdayaan sosial***	***2.07***	***264,655,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	240,035,000.00	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	240,035,000.00	
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	24,620,000.00	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	24,620,000.00	
III.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Dinas Sosial**	**Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**3,301,590,000.00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**3,301,590,000.00**	
1.	***Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***		***Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar***	***34.78***	***3,301,590,000.00***	***Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***		***Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar***	***34.78***	***3,301,590,000.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	777	2,925,045,000.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	777	2,925,045,000.00	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	18,716,000.00	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	18,716,000.00	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	75,180,000.00	3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	75,180,000.00	
	4. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25,494,000.00	4. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25,494,000.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35	131,537,000.00	5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35	131,537,000.00	
	6. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120	12,000,000.00	6. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120	12,000,000.00	
	7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50	7,500,000.00	7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50	7,500,000.00	
	8. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15	33,100,000.00	8. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15	33,100,000.00	
	9. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	816	33,352,000.00	9. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	816	33,352,000.00	
	10. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	12,600,000.00	10. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	12,600,000.00	
	11. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1,350,000.00	11. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1,350,000.00	
	12. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25,716,000.00	12. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	25,716,000.00	
IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Dinas Sosial**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar**	**17.00**	**3,725,869,400.00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Dinas Sosial**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar**	**17.00**	**3,725,869,400.00**	
1.	***Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial***	***11204***	***3,725,869,400.00***			***Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial***	***11,204***	***3,725,869,400.00***	
	1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	35000	54,998,000.00	1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	35000	54,998,000.00	
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8770	352,199,000.00	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8770	352,199,000.00	
	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	345	3,318,672,400.00	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	345	3,318,672,400.00	
V.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kab. HSU**	**Persentase Penanganan Bencana**	**100**	**1,231,406,300.00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kab. HSU**	**Persentase Penanganan Bencana**	**100**	**1,231,406,300.00**	
1.	***Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota***		***Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	***100***	***1,131,236,300.00***	***Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota***		***Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	***100***	***1,131,236,300.00***	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2880	370,516,500.00	1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2880	370,516,500.00	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	214,107,300.00	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	214,107,300.00	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	462,662,500.00	3. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	462,662,500.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	38,775,000.00	4. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	38,775,000.00	
	5. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150	45,175,000.00	5. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150	45,175,000.00	
2.	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***		***Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana***	***100***	***100,170,000.00***	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***		***Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana***	100	***100,170,000.00***	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	53	100,170,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	53	100,170,000.00	
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab. HSU**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100**	**133,549,170.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab. HSU**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**100**	**133,549,170.00**	
1.	***Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***		***Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan***	***100***	***133,549,170.00***	***Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***		***Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan***	***100***	***133,549,170.00***	
	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	109	133,549,170.00	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	109	133,549,170.00	
JUMLAH					**14,216,477,625.00**					**16,855,477,625.00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**14.216.477.625,00**							**10.538.242.097,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.216.477.625,00**							**10.538.242.097,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**14.216.477.625,00**							**10.538.242.097,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)***	**-**			**100 %**	**5.498.617.755,00**						**-**	**4.625.504.766,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah*	-			100 %	98.767.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/i Dinas Sosial	-	46.122.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	79.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/i Dinas Sosial		27.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	18.917.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/i Dinas Sosial		18.922.400,00	DINAS SOSIAL

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah*	-			100 %	3.700.592.698,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	3.458.231.049,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3.696.302.898,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		3.453.941.049,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.289.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		4.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel*	-			100 %	2.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	2.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		2.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	48.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	27.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	48.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		27.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja*	-			100 %	685.777.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	500.081.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	22.909.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		17.242.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	129.137.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		70.085.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	45.874.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		11.544.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	51.499.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		51.499.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	436.356.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		349.710.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpenuhi*	-			100 %	162.210.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	30.430.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	162.210.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		30.430.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	401.645.717,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	363.599.967,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	97.173.717,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		97.481.717,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	304.472.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		266.118.250,00	DINAS SOSIAL

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah*	-			100 %	367.744.640,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial	-	169.844.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	249.744.640,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kutai Kecil	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		119.922.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	18.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		25.030.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial		24.892.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Pelayanan Publik yang meningkat*	-			100 %	31.080.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial dan SKPD terkait	-	27.195.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	31.080.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Karyawan/Karyawati Dinas Sosial dan SKPD terkait		27.195.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten***	**-**			**100 %**	**325.445.000,00**						**-**	**325.445.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB*	-			100 %	60.790.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Pengurus Mesjid, Mushola / Langgar	-	60.790.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				7 Dokumen	60.790.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Pengurus Mesjid, Mushola / Langgar		60.790.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*	-			51.87 %	264.655.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	264.655.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	240.035.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		240.035.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Sertifikat	24.620.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		24.620.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar***	**-**			**100 %**	**3.301.590.000,00**						**-**	**1.589.090.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar*	-			15.67 %	3.301.590.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU	-	1.589.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				777 Orang	2.925.045.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		1.200.930.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	18.716.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	75.180.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		77.180.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25.494.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		35.810.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	131.537.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		122.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	7.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	33.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		30.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				816 Orang	33.352.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		56.140.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	12.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		6.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	1.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		1.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25.716.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Masyarakat Kab. HSU		15.640.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar***	**-**			**17,00 %**	**3.725.869.400,00**						**-**	**2.935.247.700,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial*	-			11204 KPM	3.725.869.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Fakir Miskin, PKH, Korban bencana alam dan sosial	-	2.935.247.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				35000 Orang	54.998.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Fakir Miskin, PKH, Korban bencana alam dan sosial		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8770 Keluarga	352.199.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting	Fakir Miskin, PKH, Korban bencana alam dan sosial		283.454.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				305 Orang	3.318.672.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Fakir Miskin, PKH, Korban bencana alam dan sosial		2.626.792.800,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Penanganan Bencana***	**-**			**100 %**	**1.231.406.300,00**						**-**	**947.669.300,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			100 %	1.131.236.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana	-	875.999.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				2880 Orang	370.516.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana		525.804.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				225 Orang	214.107.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana		237.844.800,00	DINAS SOSIAL

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	462.662.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana		25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	38.775.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana		36.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	45.175.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Korban Bencana		50.575.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana*	-			100 %	100.170.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Korban bencana alam dan sosial	-	71.670.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Orang	100.170.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Korban bencana alam dan sosial		71.670.000,00	DINAS SOSIAL

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola***	**-**			**100 %**	**133.549.170,00**						**-**	**115.285.331,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase pemeliharaan TMP*	-			100 %	133.549.170,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan	-	115.285.331,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				109 Makam	133.549.170,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Air Tawar	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan		115.285.331,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**14.216.477.625,00**							**10.538.242.097,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lampiran 4

Tabel C-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
					BIDANG URUSAN SOSIAL								
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Sosial**	**100**	**5,498,617,755.00**	**APBD**		**100**	**4,625,504,766.00**
1	*06*	*01*	*2.01*		*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah*		*100*	*98,767,000.00*	*APBD*		*100*	*46,122,400.00*
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	79,850,000.00	APBD		2	27,200,000.00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	18,917,000.00	APBD		2	18,922,400.00
1	*06*	*01*	*2.02*		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*		*100*	*3,700,592,698.00*	*APBD*		*100*	*3,458,231,049.00*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47	3,696,302,898.00	APBD		46	3,453,941,049.00
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	4,289,800.00	APBD		12	4,290,000.00
1	*06*	*01*	*2.03*		*Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah*	*Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel*		*100*	*2,400,000.00*	*APBD*		*100*	*2,400,000.00*
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	2,400,000.00	APBD		2	2,400,000.00
1	*06*	*01*	*2.05*		*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*100*	*48,400,000.00*	*APBD*		*100*	*27,600,000.00*
				02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		43	48,400,000.00	APBD		46	27,600,000.00
1	*06*	*01*	*2.06*		*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja*		*100*	*685,777,700.00*	*APBD*		*100*	*500,081,600.00*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	22,909,600.00	APBD		7	17,242,300.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	129,137,700.00	APBD		5	70,085,100.00
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	45,874,600.00	APBD		2	11,544,400.00
				05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	51,499,800.00	APBD		2	51,499,800.00
				09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	436,356,000.00	APBD		50	349,710,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*06*	*01*	*2.07*		*Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase barang milik daerah yang terpenuhi*		*100*	*162,210,000.00*	*APBD*		*100*	*30,430,000.00*
				06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	162,210,000.00	APBD		2	30,430,000.00
1	*06*	*01*	*2.08*		*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah*		*100*	*401,645,717.00*	*APBD*		*100*	*363,599,967.00*
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48	97,173,717.00	APBD		48	97,481,717.00
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	304,472,000.00	APBD		12	266,118,250.00
1	*06*	*01*	*2.09*		*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah*		*100*	*367,744,640.00*	APBD		*100*	*169,844,750.00*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4	249,744,640.00	APBD		4	119,922,750.00
				06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	18,100,000.00	APBD		3	25,030,000.00
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		1	99,900,000.00	APBD		1	24,892,000.00
1	*06*	*01*	*2.13*		*Kegiatan Penataan Organisasi*	*Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi*		*100*	*31,080,000.00*	APBD		*100*	*27,195,000.00*
				04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata		1	31,080,000.00	APBD		1	27,195,000.00
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten (%)**	**Kab. HSU**	**100**	**325,445,000.00**	**APBD**		**100**	**325,445,000.00**
1	*06*	*02*	*2.02*		*Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB*		*100*	*60,790,000.00*	*APBD*		*100*	*60,790,000.00*
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		7	60,790,000.00	APBD		7	60,790,000.00
1	*06*	*02*	*2.03*		*Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota*	*Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam pemberdayaan sosial*		*2.07*	*264,655,000.00*	*APBD*		*47.72*	*264,655,000.00*
				01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10	240,035,000.00	APBD		10	240,035,000.00
				05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		100	24,620,000.00	APBD		100	24,620,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**Kab. HSU**	**100**	**3,301,590,000.00**	APBD		**100**	**1,589,090,000.00**
1	*06*	*04*	*2.01*		*Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar*		*34.78*	*3,301,590,000.00*	APBD		*14.55*	*1,589,090,000.00*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		777	2,925,045,000.00	APBD		567	1,200,930,000.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		35	18,716,000.00	APBD		35	19,500,000.00
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		20	75,180,000.00	APBD		20	77,180,000.00
				04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10	25,494,000.00	APBD		10	35,810,000.00
				05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		35	131,537,000.00	APBD		35	122,090,000.00
				06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		120	12,000,000.00	APBD		120	12,500,000.00
				07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		50	7,500,000.00	APBD		50	10,000,000.00
				08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan		15	33,100,000.00	APBD		15	30,900,000.00
				09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		816	33,352,000.00	APBD		816	56,140,000.00
				10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		10	12,600,000.00	APBD		10	6,550,000.00
				11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10	1,350,000.00	APBD		10	1,850,000.00
				12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10	25,716,000.00	APBD		12	15,640,000.00
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar**	**Kab. HSU**	**17.00**	**3,725,869,400.00**	APBD		**6.70**	**2,935,247,700.00**
1	*06*	*05*	*2.02*		*Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pendataan/pemutakhiran data kemiskinan, PPKS dan PSKS*		*100.00*	*3,725,869,400.00*	APBD		*100.00*	*2,935,247,700.00*
				01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		35000	54,998,000.00	APBD		35000	25,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		8770	352,199,000.00	APBD		10414	283,454,900.00
				04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		345	3,318,672,400.00	APBD		269	2,626,792,800.00
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Bencana**	**Kab. HSU**	**100**	**1,231,406,300.00**	APBD		**100**	**947,669,300.00**
1	*06*	*06*	*2.01*		*Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota*	*Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*		*100*	*1,131,236,300.00*	APBD		*100*	*875,999,300.00*
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)		2880	370,516,500.00	APBD		2880	525,804,500.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa		225	214,107,300.00	APBD		225	237,844,800.00
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		5	462,662,500.00	APBD		5	25,500,000.00
				04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		50	38,775,000.00	APBD		50	36,275,000.00
				05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		150	45,175,000.00	APBD		150	50,575,000.00
1	*06*	*06*	*2.02*		*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	*Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana*		*100*	***100,170,000.00***	*APBD*			***71,670,000.00***
				02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		53	100,170,000.00	APBD			71,670,000.00
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**Kab. HSU**	**100**	**133,549,170.00**	APBD		**100**	**115,285,331.00**
1	*06*	*07*	*2.01*		*Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	*Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan*		*100*	*133,549,170.00*	APBD		*100*	*115,285,331.00*
				02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		109	133,549,170.00	APBD		1	115,285,331.00
JUMLAH									**14,216,477,625.00**				**10,538,242,097.00**

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Utara

SURYA SUPI, SSTP, MPA
Pembina Tk. I
NIP. 19820102 200012 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) di susun berdasarkan RPD HSU Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DPPPA HSU. Di mana Rencana Kerja DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan Pelaksanaan Tahun ke 3 (ketiga) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode Tahun 2025. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana program prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) (Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak;
20. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak;

26. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke II Undang-undang Perlindungan Anak;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
28. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan KLA;
29. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
30. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak;
31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
36. Peraturan Mentri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan KLA
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ;
39. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
41. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 No. 17)
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 No. 21)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara

mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya dimaksudkan untuk:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025.
b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.
c. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
e. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
f. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Harapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program dan kegiatan serta sub kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja (RENJA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten

Hulu Sungai Utara

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DPPPA Kab. HSU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA Kab. HSU

4.1 Program dan Kegiatan dan sub kegiatan

BAB V : PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2024

Dalam penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 7 (tujuh) program dan 21 (Dua puluh satu) kegiatan. Serta sub kegiatan 53 (Lima puluh tiga) Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan per bulan Desember Tahun 2023 dapat terealisasi 80,07% Sedangkan tingkat realisasi keuangan program/kegiatan menunjukkan kinerja yang baik sampai dengan bulan Desember 2023 dengan capaian 88,64%.

Jumlah program/kegiatan berdasarkan Rencana Perjanjian Kinerja DPPPA Tahun 2023 per bulan Desember 2023 yang tidak terlaksana adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal anggaran dari kegiatan tersebut dialihkan untuk menambah anggaran kegiatan lainnya karena tidak terpakai, pada proses perencanaan penganggaran APBD Perubahan Tahun 2023.

Secara fisik pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan. Penyerapan anggaran terbesar dari Bidang KHPK untuk program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan nilai 99,66 % dari anggaran Rp. 194.771.200,- sisa anggaran Rp. 669.870,-. Serapan terendah pada Bidang PPA untuk Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi Rp.298.247.946,- atau (80,72%) dari anggaran Rp.369.494.360,- hal ini disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Di Dalam

perencanaan pelaksanaan kegiatan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan target belanja Daerah sebesar RP. 3.481.950.796,- dengan Realisasi Rp. 3.086.551.107,- atau (88,64%). Belanja Operasinal sebesar Rp. 3.481.950.796,- dengan Realisasi Rp. 3.086.551.107,- (terdiri dari a. Belanja Pegawai Rp. 1.899.300.000,- dengan realisasi Rp. 1.636.385.080,- Belanja barang dan jasa Rp. 1.582.650.796,- dengan realisasi Rp. 1.450.166.027,-.

Untuk Anggaran Belanja tidak langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggarkan sebesar Rp. 1.899.300.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai pada Tahun 2023 dengan jumlah realisasi Rp. 1.636.385.080,- atau (86,16%) dari jumlah yang dianggarkan. Sisa anggaran berjumlah Rp. 262.914.920,- atau (13,84 %).

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. 3.086.551.107,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 1.899.300.000,- dan Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.582.650.796,-. Untuk tahun 2023 Belanja Modal Rp. 0,-.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.975.351.604	3.481.950.796	506.599.192
5.1	BELANJA OPERASI	2.975.351.604	3.481.950.796	506.599.192
5.1.1	Belanja Pegawai	1.899.300.000	1.899.300.000	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.076.051.604	1.582.650.796	506.599.192
5.2.	BELANJA MODAL	0	0	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	0	0	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	SURPLUS/ (DEFISIT)	3.481.950.796	3.481.950.796	506.599.192

Total realisasi APBD tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 3.086.551.107,- atau (88,64%). dengan total anggaran tahun 2023 Rp. 3.481.950.796

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk acaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat di liihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel : 3.1

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kab.HSU

No	Uraian	Kekerasan Terhadap Perempuan					Kekerasan Terhadap Anak				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	2	1	4	9	5	1	1	1	0	9
2	Psikis	7	1	0	9	5	0	7	2	3	10
3	Seksual	1	1	0	0		1	1	2	5	
4	Penelantaran	0	0	0	0		5	0	1	2	
5	Trafficking	0	0	0	0		0	0	0	0	
6	Eksploitasi	0	0	0	0		0	0	0	1	
7	Dan Lain-lain	0	0	0	1		0	0	6	6	9

Indikator lainnya dalam bidang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarafisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perempasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupten HSU

No	Uraian	Kekerasan Terhadap Perempuan					Kekerasan Terhadap Anak				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	2	1	4	9	5	1	1	1	0	9
2	Psikis	7	1	0	9	5	0	7	7	3	10
3	Seksual	1	1	0	0		1	1	1	5	
4	Penelantaran	0	0	0	0		5	0	0	2	
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Eksploitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7	Dan Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPPPA S.D TAHUN 2024 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERMENDARGI NOMOR 90 TAHUN 2019

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	08				Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100	87,89	100	0	0
2	08	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	0	0	0	93,22	100	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	**6**	**6**	**6**	**93.22**	6 Dokumen	0 Dukumen	**0**
2	08	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja yang dibuat	3 Laporan	**3**	**3**	**3**	**99,66**	3 Laporan	0 Laporan	**0**
2	**08**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	100	**100**	**100**	**100**	**86,16**	**100**	**0**	**0**
2	08	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gajih	26	**26**	**26**	**26**	**86,16**	**100**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
2	08	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	100	100	100	100	100%	0	0
2	08	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	100	100	100	100	100%	0	0
2	**08**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,83**	**100**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	99.87	10	0	0
2	08	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	96,80	50	0	0
2	08	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	500 Paket	500 Paket	99,02	500	0	0
2	08	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500 Paket	1500 Paket	1500 Paket	1500 Paket	99.94	1500	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5	0	0
2	08	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	99,63	26	0	0
2	**08**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan mebeler dan peraltan mesin lainnya**	**0 Unit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	08	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	**08**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**100**	**100**	**100**	**90,39 %**	**100**	**0**	**0**
2	08	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100 %	10	0	0
2	08	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78,35 %	12	0	0
2	08	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99,74 %	12	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**98,80 %**	**100**	**0**	**0**
2	08	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17	17	17	98,84	17	0	0
2	08	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	3	3	97,94 %	3	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8	8	8	100 %	8	0	0
2	08	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	**08**	**02**			**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19**	**75 %**	**75 %**	**75 %**	**75 %**	**99,26 %**	**100**	**0**	**0**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang dibina**	**38 Lembaga**	**38 Lembaga**	**38 Lembaga**	**38 Lembaga**	**99,26 %**	**38**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	2	2	99,20 %	2 Dokumen	0	0
2	08	02	2.01	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	99,37 %	52	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina**	12	12	12	12	**99,07 %**	**12**	**0**	**0**
2	08	02	2.02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	99,12 %	30	0	0
2	08	02	2.02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Permpuan dan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan	6 Organisasi	42	42	42	98,82 %	42	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	**08**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat**	**10 Kali**	**10 Kali**	**10 Kali**	**10 Kali**	**100**	**10**	**0**	**0**
2	08	02	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	**800**	0	0	0	0	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam 10 aksi berjarak	1 Dokumen	1	1	1	100 %	1	0	0
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**87,84 %**	**100**	**0**	**0**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan**	**10**	**10**	**10**	**10**	**99,03 %**	**10**	**0**	**0**
2	08	03	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	99,03 %	3	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	03	2.01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	20	18	18	99,04 %	4	0	0
2	**08**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**10 Kasus**	**10 Kasus**	**10 Kasus**	**10 Kasus**	**71,70 %**	**10**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10	10	10	10	96,13 %	10 Kasus	0	0
2	08	03	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10	10	10	71,32 %	10 Layanan	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang dibina**	**60 Lembaga**	**0**	**0**	**0**	**94,81 %**	**60**	**0**	**0**
2	08	03	2.03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10	10	10	99,51 %	10 Kasus	0	0
2	08	03	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan	0	70	20	20	94,03 %	10	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas								
2	08	03	2.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	10	10	10	100 %	10 Orang	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Meningkatnya persentase kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi kebiasan covid-19**	**100%**	**99**	**99**	**99**	**99,66 %**	**100**	**0**	**0**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga**	**10 Kali**	**10 Kali**	**10 Kali**	**10 Kali**	**99,22 %**	**0**	**0**	**0**
2	08	04	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	52 Perangkat Daerah	17	17	7	99,92 %	10	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	10	10	10	100 %	10	0	0
2	08	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	1	1	98,74 %	1	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**99,91 %**	**10**	**0**	**0**
2	08	04	2.02	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1	1	1	99,98 %	1	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	04	2.02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	2	2	2	99,73 %	2 Kegiatan	0	0
2	08	04	2.02	03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,94 %	2	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Data terpilah gender dan anak**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**98,02 %**	**2**	**0**	**0**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**98,02 %**	**2**	**0**	**0**
2	08	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2	2	2	98,02 %	2	0	0
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak**	**70 %**	**70 %**	**70 %**	**70 %**	**99,25 %**	**70**	**0**	**0**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan**	**Pemenuhan Indikator**	**85%**	**0**	**0**	**0**	**99,68 %**	**85**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					PHA pada Lembaga Pemerinta, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**KLA**								
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20	15	15	15	99,65 %	20	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7	7	7	100 %	7	0	0
2	**08**	**06**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Indikator KLA**	**60%**	**0**	**0**	**0**	**99,18**	**60**	**0**	**0**
2	08	06	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Anak	120	120	120	99,84 %	50	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30	30	30	99,87 %	30	0	0
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6	6	6	100 %	6	0	0
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	96,30 %	110	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusu Anak**	**Persentase Kasus yang tertangani pada anak**	**100 %**	**0**	**0**	**0**	**80,72 %**	**100**	**0**	**0**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah kasus pada Anak**	**10 Kasus**	**0**	**0**	**0**	**98,72 %**	**10**	**0**	**0**
2	08	07	2.01	03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	10 Kegiatan	0	0	0	0	10	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	07	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	5	5	5	97,26 %	5	0	0
2	08	07	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	5	5	5	98,90	5	0	0
2	08	07	2.01	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam	3 Orang	0	0	0	0	3	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					/program/ kegiatan pencegahan KTA	pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
2	**08**	**07**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani**	**10 Kasus**	**0**	**0**	**0**	**70,41 %**	**10**	**0**	**0**
2	08	07	2.02	05	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	10	99 %	10	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	07	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampian Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	10	64,15 %	10	0	0
2	**08**	**07**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**PIK Keluarga dan PATBM yang dibina**	**120 Lembaga**	**0**	**0**	**0**	**90,52 %**	**110**	**0**	**0**
2	08	07	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasaranan Layanan Bagi Anak Yang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak	0	110	110	110	93,32 %	110	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	07	2.03	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	10	10	88,98 %	10	0	0
2	08	07	2.03	04	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	70 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	08	07	2.03	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	15 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pencapaian indikator kegiatan pada DPPPA Kab. HSU rata-rata tercapai. Seperti peningkatan anggaran responsif gender pada tahun 2023. Keberhasilan pencapaian ini erat kaitannya dengan SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan dibuktikan dokumen Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) SKPD. Secara keseluruhan jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD per 31 Desember 2023 sebesar 6,4 % dari anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar dari Target 5 %. Sedangkan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan (DPPPA) per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.058.351.655**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio ARG Terhadap Anggaran Belanja DPPPA	5 %	6,4	128 %

Indikator Rasio ARG

Pencapaian target indikator Rasio ARG terhadap Anggaran Belanja DPPPA bersumber dari data GAP, GBS dan KAK dari Bidang KHPK, PPA, PHA dan UPTD-PPA yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tahun 2023.

Capaian target indikator Rasio ARG terhadap Anggaran Belanja DPPPA bersumber dari data GAP, GBS dan KAK Tahun 2023 yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Selain itu juga jumlah kasus/data kekerasan menurut kelompok umur dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan pada perempuan dengan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 10 orang dari jumlah penduduk perempuan sebanyak 80.755 orang dengan rasio 12,09.
2. Kasus kekerasan pada anak dengan jumlah anak (Penduduk Usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang di tangani instansi tingkat kabupaten/kota yang di dampingi sebanyak 28 orang dari jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) dari jumlah penduduk usia anak kurang 18 tahun 73,168 Anak dengan Persentase,0,039 %

Persentase pernikahan usia anak juga mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak 55 perkawinan menjadi 33 perkawinan pada tahun 2023. Dengan rincian laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 31 orang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPA Kab. HSU

Analisis Kinerja pelayanan DPPPA dilaksanakan dengan mengukur kinerja pelayanan sesuai kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Program sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan RPJMD HSU tahun 2023-2026 dan perjanjian kinerja, indikator kinerja utama DPPPA Kab. Hulu Sungai Utara adalah tercapainya sasaran jangka menengah. Capaian sasaran jangka menengah diukur dari indikator makro daerah yang tercantum di dalam RPJMD. Ada tiga indikator makro daerah yang tercantum dalam RPJMD yang dipantau setiap tahunnya,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

untuk mengetahui apakah kinerja daerah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Ketiga indikator itu adalah 1.) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)dari target 64,59 dengan capaian 70,36 atau persentase capaian 108,93-), 2.) Rasio KDRT target awal 0,026 dengan capaian 0,012 atau dengan rasio 75 3). Tingkat Capaian Status Kabupaten Layak Anak.targer awal nilai 600 dengan nilai capaian 632,50 atau persentase (105,41%) Kemudian target dibandingkan dengan realisasi, sehingga didapat persentase capaian masing-masing indikator. Persentase capaian sasaran jangka menengah adalah persentase rata-rata capaian masing-masing indikator. Target dan realisasi masing-masing indikator makro daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
1	Cakupan Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	-		78,15	78,20	78,25	78,30	78,15		78,25	78,30	
2	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	-		78,15	78,19	78,23	78,27	78,15		78,23	78,27	
3	Cakupan Layanan Bantuan Hukum	-		11	13	15	17	11		15	17	
4	Cakupan Layanan Kesehatan	-		31	33	35	37	31		35	37	
5	Cakupan Reintegrasi Sosial	-		15	18	21	24	15		21	24	
Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	-	√	9,61	9,65	9,69	9,73	9,61		9,69	9,73	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1	Persentase ARG terhadap Anggaran Belanja Langsung APBD	-	√	28,94	28,99	29,5	30,10	28,94	30.85	29,5	30,10	
2	Persentasi Kualitas Keluarga Perempuan	-	√	57,55	57,60	57,,65	57,,70	57,55	57,65	57,65	57,70	
3	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	-	√	6,19	6,17	6,15	6,13	6,19	7	6,15	6,13	
4	Persentase Kekerasan Terhadap Anak	-	√	0,012	0,010	0,08	0,06	0.04	0.0042	0,08	0,06	
5	Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak	-	√	2	2	2	2	2	2	2	2	
6 7	Persentase Pemenuhan Hak Anak	900	900	80,65	90,50	100	100	90,65	90.98	100	100	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Capaian sasaran jangka menengah ditargetkan 85–90%. Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa target yang diharapkan pada Tahun 2025 dapat terpenuhi, dari lima indikator semua mencapai angka 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja utama DPPPA dapat terpenuhi dengan baik pada Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara *mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 3 (tiga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *mempunyai fungsi* yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
b. *Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
c. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
d. *Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan*
e. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penjelasan dalam Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa ”Setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga teknis daerah mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga memiliki peranan dalam rangka membuka sudut pandang para stake holder mengenai prespektif gender dan anak serta mensosialisasikan pola pikir strategis dimana perempuan dan anak dapat dijadikan aset dan potensi penting dalam pembangunan.

Masalah krusial yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perlunya meningkatkan sistem ketersediaan data terpilah sebagai pembuka wawasan dengan pemilahan data berdasarkan gender agar proses penyusunan perencanaan dan implementasi program yang dilaksanakan terukur.

Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor merupakan metode terbaik untuk mendapatkan outcome program yang optimal. Kemampuan SDM aparatur untuk mendokumentasikan berbagai program dan kegiatan serta merekam, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan data tiap tahun dapat diinventarisir sebagai dasar perumusan kebijakan dan mengatasi berbagai isu-isu dan permasalahan.

Dari berbagai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang meliputi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa Permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6 (enam) Sub Urusan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan
   1) Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
   2) Kualitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam jumlah dan kemampuan teknis serta penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
   3) Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan program/ kegiatan dengan pelaksanaan anggaran.
   4) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
   5) Masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan
   1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah yaitu 70,36% dibandingkan kondisi ideal dengan daerah lain.
   2) Masih rendahnya Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Belanja Langsung APBD Kabupaten.
   3) Semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG, ditandai dengan 30 Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG meskipun tidak optimal.
   4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif meningkat, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi 7 orang atau 23,33% di tahun 2023 dari 5 orang atau

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

16,66% dari target 30% dari target 9 (sembilan) orang atau 30% anggota DPRD perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5) Belum semua desa memiliki posyandu lansia yang berpotensi lansia rentan menjadi korban KDRT.
6) Masih terbatasnya pemahaman di semua tingkatan terhadap kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
7) Masih kurang optimalnya koordinasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

c. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga

1) Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya data legalitas keluarga. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk satu layanan satu pintu berbasis hak anak berfungsi sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melayani Konseling Pra Pernikahan, Konseling Masalah Keluarga, Konseling Pengasuhan Anak dan Pendampingan Komunitas Anak. Mekanisme layanan Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terbagi menjadi layanan pasif dan aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Layanan ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia.
2) Masih belum maksimalnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. Permasalahan Sistem Data Gender dan Anak
   1) Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender pada SKPD terkait.
   2) Belum tersedianya data dan belum optimalnya kualitas data terpilah gender yang akurat sehingga menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender

e. Permasalahan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   1) Masih adanya anak yang belum memiliki akta kelahiran.
   2) Belum semua Kelurahan/Desa memiliki forum anak.
   3) Masih belum maksimalnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak.
   4) Belum semua sekolah ramah anak.
   5) Belum semua kecamatan dan desa memiliki ruang bermain ramah anak dan anak berkebutuhan khusus (ABK).
   6) Belum semua kecamatan memiliki Pusat Kreatifitas Anak.
   7) Belum tersedianya pemenuhan hak anak (pojok laktasi) di semua SKPD Kab. Hulu Sungai Utara.

f. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus anak
   1) Masih adanya kasus anak berhadapan dengan hukum.
   2) Belum terdatanya pekerja anak pada sektor informal.
   3) Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
   4) Belum tersedianya rumah aman untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.
   5) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam perlindungan anak, seperti anak pelabelan, anak terisolasi, dan anak terisolir.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6) Belum terlayaninya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang rentan KDRT.
7) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak termasuk korban TPPO.
8) Belum tersedianya sarana di tempat umum dan lembaga pemerintahan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
9) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah kasus KDRT.
10) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kelembagaan perlindungan hak anak.

g. Permasalahan terkait perlindungan perempuan
1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
2) Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
3) Masih belum terlatihnya penanganan kasus TPPO.
4) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk korban TPPO.
5) Masih terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia pada Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memfasilitasi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga di Desa/Kelurahan.
6) Belum tersedianya sarana di tempat umum dan lembaga pemerintahan untuk perempuan berkebutuhan khusus.
7) Belum tersedianya data dan pemberdayaan disabilitas perempuan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

yang mengakibatkan perempuan disabilitas rentan menjadi korban KDRT.

h. Permasalahan terkait data kekerasan perempuan dan anak
   1) Masih kurangnya sumber daya manusia pengelola data kekerasan perempuan dan anak.
   2) Masih lemahnya data dukung terhadap data anak pelabelan, anak terisolasi, anak terisolir, dan anak berkebutuhan khusus.
   3) Masih kurangnya data dukung terhadap data perempuan disabel korban kekerasan.
   4) Belum tersedianya data perempuan lansia rentan korban KDRT.
   5) Belum tersedianya data perempuan dan anak yang pernah mengalami perlakuan salah dan KDRT.

Permasalahan dan Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Dukungan sumberdaya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas di semua tingkatan.
3. Belum optimalnya bentuk-bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang berprespektif gender.
4. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, antara lain:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. layanan kesehatan perempuan dan anak, misalnya upaya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak.

b. layanan pendidikan dan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

c. upaya layanan bantuan/advokasi penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. upaya peningkatan kesejahteraan perempuan melalui berbagai pola pemberdayaan sebagai bekal memperoleh pekerjaan disemua sektor, termasuk peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.

Dari berbagai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang meliputi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa isu dan analisa/Permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan Pelaksanaa Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) secara Komprehensif.
2. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif, Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi;
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Masih tingginya kasus–kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) pekerja anak khusus di sektor informal, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan tahun ke 2 (kedua) RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

Tabel 2.4 (T.C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada kolom Hasil Analisis Kebutuhan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4 (T.C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja (%)**	**100 %**	**3.492.637.793**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja (%)**	**100**	**3.492.637.793**	
	1 **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**31.177.200**	**1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**31.177.200**	
	1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	16.799.900	1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPPA HSU	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	16.799.900	
	1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	14.377.300	1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	14.377.300	
	2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.752.907.194**	2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.752.907.194**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA HSU	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.752.907.194	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA HSU	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.752.907.194	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**DPPPA HSU**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**100 %**	**40.500.000**	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**100 %**	**40.500.000**	
	3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPA HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Set	12.000.000	3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPA HSU	12.000.000	30 Set	12.000.000	
	3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	28.500.000	3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten HSU	28.500.000	6 Orang	28.500.000	
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**DPPPA HSU**	**Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah.**	**100%**	**222.277.629**	**4**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah.**	**100%**	**222.277.629**	
	4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.274.700	4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.274.700	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.153.800	4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.153.800	
	4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Pake t	14.876.200	4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Pak et	14.876.200	
	4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPA HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500 Paket	30.031.300	4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPA HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500 Paket	30.031.300	
	4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2.100.000	4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2.100.000	
	4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupat en HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	168.841.629	4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupa ten HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	168.841.629	
	5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPPPA HSU**	**Tersedianya pengadaan mebeler dan peralatan mesin lainnya**	**6 Unit**	**44.500.000**	**5**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPPPA HSU**	**Tersedianya pengadaan mebeler dan peralatan mesin lainnya**	**6 Unit**	**44.500.000**	
	5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	DPPPA HSU	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	0 Unit	0	**5.1**	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	DPPPA HSU	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	0 Unit	0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPPA HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	6 Unit	44.500.000	5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPPA HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	6 Unit	44.500.000	
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**329.455.564**	**6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**329.455.564**	
	6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5.600.000	6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5.600.000	
	6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.427.564	6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.427.564	
	6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.428.000	6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.428.000	
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**71.820.206**	**7**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPPPA HSU**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**71.820.206**	
	7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	DPPPA HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	15.414.000	7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPA HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	15.414.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Dinas Jabatan										
	7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapalangan	DPPPA HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.287.400	7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapalangan	DPPPA HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.287.400	
	7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPPA HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.300.000	7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPPA HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.300.000	
	7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPA HSU	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	1 Unit	35.818.806	7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPA HSU	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	1 Unit	35.818.806	
2	**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**DPPPA HSU**	**Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19**	**75% APE**	**88.248.454**	**2 Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**DPPPA HSU**	**Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19**	**75% APE**	**88.248.454**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1 **Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah kelembagaan**	**38 Lembaga**	**39.250.600**	1 **Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah kelembagaan**	**38 Lembaga**	**39.250.600**	
	1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.412.600	1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.412.600	
	1.2 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	27.838,000	1.2 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah	27.838,000	
	2 **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**DPPPA HSU**	**Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina**	**12**	**48.271.054**	2 **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan**	**DPPPA HSU**	**Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina**	**12**	**48.271.054**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
	2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	40.451.800	2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	40.451.800	
	2.2 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Permpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPPA HSU	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	7.819.254	2.2 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Permpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPPA HSU	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	7.819.254	
	3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat**	**1**	**726.800**	**3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat**	**1**	**726.800**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3.1 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	726.800	3.1 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	726.800	
3	**Program Perlindungan Perempuan**	**DPPPA HSU**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**100 %**	**112.611.500**	**3 Program Perlindungan Perempuan**	**DPPPA HSU**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**100 %**	**112.611.500**	
	1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan**	**10 kasus**	**11.290.400**	**1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan**	**10 kasus**	**11.290.400**	
	1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	11.290.400	1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	11.290.400	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
	1.2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	0	1.2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	0		
	2	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**10 kasus**	**55.462.200**	**2**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**10 kasus**	**55.462.200**		
	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 kasus	18.481.000	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 kasus	18.481.000		
	2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	DPPPA HSU	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	10 kasus	9.000.000	2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan	DPPPA HSU	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	10 kasus	9.000.000		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang mendapat advokasi dan Pendampingan layanan perlindungan Perempuan	4 Perangkat Daerah	27.981.200	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang mendapat advokasi dan Pendampingan layanan perlindungan Perempuan	4 Perangkat Daerah	27.981.200	
3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah lembaga yang dibina**	**60 Lembaga**	**45.858.900**	**3** **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah lembaga yang dibina**	**60 Lembaga**	**45.858.900**	
	3.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	9.244.000	3.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	9.244.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	a										
	3.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70	34.214.900	3.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70	34.214.900	
	3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	2.400.000	3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	2.400.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**		**DPPPA HSU**	**Meningkatnya persentase kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi kebiasan covid-19**	**100 %**	**320.296.445**	**4**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**DPPPA HSU**	**Meningkatnya persentase kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi kebiasan covid-19**	**100 %**	**320.296.445**	
	1	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah pembinaan kualitas keluarga**	**10 Kali**	**100.355.745**	**1**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah pembinaan kualitas keluarga**	**10 Kali**	**100.355.745**	
		1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	50.262.800		1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	50.262.800	
		1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	DPPPA HSU	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Buah	3.463.000		1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	DPPPA HSU	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 buah	3.463.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kewenangan Kabupaten/Kota		yang Tersedia				Kabupaten/Kota		yang Tersedia			
	1.3	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	46.629.945	1.3	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	46.629.945	
2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**DPPPA HSU**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan**	**10 Lembaga**	**219.940.700**	**2**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan**	**10 Lembaga**	**219.940.700**	
	2.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	DPPPA HSU	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	36.621.600	2.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA HSU	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	36.621.600	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	2.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	46.757.100	2.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	46.757.100	
	2.4 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	136.562.000	2.4 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	136.562.000	
5	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**DPPPA HSU**	**Data terpilah gender dan anak**	**2 dokumen**	**11.928.000**	**5** **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**DPPPA HSU**	**Data terpilah gender dan anak**	**2 dokumen**	**11.928.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Jumlah dokumen**	**2 dokumen**	**11.928.000**	**1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah dokumen**	**2 dokumen**	**11.928.000**	
	1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	11.928.000	1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	11.928.000	
6	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**DPPPA HSU**	**Presentase pemenuhan Hak Anak**	**70%**	**265.055.630**	**6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**DPPPA HSU**	**Presentase pemenuhan Hak Anak**	**70%**	**265.055.630**	
	1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerinta, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Pemenuhan indikator KLA**	**85 %**	**30.718.200**	**1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerinta, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Pemenuhan indikator KLA**	**85 %**	**30.718.200**	
	1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah	DPPPA HSU	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	15	23.018.200	1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah	DPPPA HSU	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	15	23.018.200	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 dokumen	7.700.000	1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 dokumen	7.700.000	
2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**DPPPA HSU**	**Persentase Capaian Indikator KLA**	**60%**	**234.337.430**	**2**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Persentase Capaian Indikator KLA**	**60%**	**234.337.430**	
	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	45.333.200	2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	45.333.200	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	87.173.730	2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	87.173.730	
	2.3		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	33.217.500	2.3		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	33.217.500	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.4 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Dokumen	68.613.000	2.4 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Dokumen	68.613.000	
7	**Program Perlindungan Khusu Anak**	**DPPPA HSU**	**Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak**	**100%**	**113.484.600**	**7** **Program Perlindungan Khusu Anak**	**DPPPA HSU**	**Persentase Kasus yang Tertangani pada Anak**	**100%**	**113.484.600**	
	1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Menurunnya jumlah kasus pada anak**	**10 kasus**	**9.596.400**	**1** **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Menurunnya jumlah kasus pada anak**	**10 kasus**	**9.596.400**	
	1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Anak	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	3 Perangkat Daerah	4.796.600	1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Anak	DPPPA HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	3 Perangkat Daerah	4.796.600	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
		1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0		1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0		
		1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kerja sama lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	DPPPA HSU	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	10 Kegiatan	4.799.800		1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kerja sama lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	DPPPA HSU	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	10 Kegiatan	4.799.800	1.3

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPPPA HSU**	**Jumlah kasus anak yang tertangani**	**10 kasus**	**42.761.400**	**2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPPPA HSU**	**Jumlah kasus anak yang tertangani**	**10 kasus**	**42.761.400**	
	2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kasus	37.124.000	2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kasus	37.124.000	
	2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampian Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	5.637.400	2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampian Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	5.637.400	
	3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	**Desa dan Kelurahan**	**PIK keluarga dan PATBM yang dibina**	**120 lembaga**	**65.126.800**	**3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Desa dan Kelurahan**	**PIK keluarga dan PATBM yang dibina**	**120 lembaga**	**65.126.800**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						**Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						
	3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasaranan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	0	3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasaranan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	0	
	3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	3.3	Sub Kegiatan Pengambangan Lembaga Layanan AMPK Tingkat	DPPPA HSU	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana	70	34.844.400	3.3	Sub Kegiatan Pengambangan Lembaga Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana	70	34.844.400	3.3

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kabupaten/Kota		layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota							layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota			
3.4	.	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10	26.282.400			Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota	DPPPA HSU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10	26.282.400	
		TOTAL ANGGARAN				**4.493.381.793**			**TOTAL ANGGARAN**				**4.493.381.793**	

Keterangan :

Rencana Pagu 2025 : Rp. 1.740.474.599

Belanja tidak langsung (gaji ASN) : Rp 2.752.907.194

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menampung usulan pokok pikiran masyarakat dan usulan pokok pikiran dari DPRD Kab. HSU.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional Tahun 2025-2029 dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia1 yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2019.

Adapun visi Ir. Joko Widodo dan KH. Ma"ruf Amin adalah ***"Tewujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkerpribadian, berlandaskan gotong royong"***

Berdasarkan Rancangan RPJMN Tahun 2025- 2029 di tetapkan 7 Agenga Pembangunanan tahun 2025-2029 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana dan pertahanan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Visi kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memperhatikan visi dan misi (platform) presiden terpilih. Memperhatikan visi presiden terpilih tersebut, maka kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi kementrian PPPA tahun 2025-2029 yaitu :

" Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas dan Terlindungi dari Tindak Kekerasan "

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penyusunan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan ke-3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas perempuan dan anak. Perumusan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) juga memperhatikan isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan misi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA)

Tujuan adalah penjabaran visi kementrian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas,2014). Perumusan tujuan kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mendasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJPN tahun 2005-2025, dengan memperhatikan tugas dan fungsi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Tujuan yang ingin di capai kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
3. Meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA).

Terdapat dua poin penting di dalam agenda tersebut mengenai pembangunan yang melibatkan perempuan. Agenda pembangunan perempuan tersebut secara lugas dituangkan dalam 2 (dua) sub-agenda prioritas dengan agenda prioritas pertama (**Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**) yaitu Perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh karena itu, kita harus mendorong perempuan Indonesia makin memiliki peran penting dalam ranah keluarga maupun publik. Sebagai ibu bangsa, perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakan ekonomi keluarga dan masyarakat, diantaranya :

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan peranan dan keterwakilan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

perempuan dalam politik dan pembangunan.

2. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
3. Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu.
4. Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan.
5. Menfasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.
6. Menfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi menjadi wirausahawan.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.
8. Meningkatkan pelibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga.

Dari agenda prioritas kedua ***Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM*** sesuai dengan Kontitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.
2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebesan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.
4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.
6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.
8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini di mulai dari lingkungan yang ramah.
9. Meningkatkan kinerja dan kerjasama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Arah kebijakan nasional dan strategi pencapaian di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi: 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi: 1) Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

secara lengkap dan kontinyu; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera; 4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial); 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan 6) penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi: 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah**;** 2) Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/ pemerintah daerah; 4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan; 5) Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

disharmonis; 6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan; 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP**;** dan 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KTP**.**

3.1.2. Perlindungan Anak

Pertama, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi: 1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak; 3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5) Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.

Kedua, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi: 1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak; 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif; 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks local masyarakat; 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa; 8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.

Ketiga, peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi: 1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatan koordinasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan; 3) penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan 4) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

A. Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan Kesetaraan Gender sesuai RPJMD Tahun 2021-2025, dilaksanakan dengan prioritas pembangunan yakni ”Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua Bidang Serta Terjaminnya Kesetaraan Gender”. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan yang responsif gender dan anak dituangkan melalui Meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif, perlindungan perempuan dan anak melalui sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Komitmen terhadap pembangunan responsif gender melaui RPJMD Tahun 2021-2025
2. Melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menyusun Peraturan Gubernur.
3. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022.

B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu Strategi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Penguatan Kelembagaan

a) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA
b) Mengembangkan kerjasama dan jaringan kelembagaan PUG, PP dan PA.
c) Membentuk dan mengoptimalkan forum data yang melibatkan lintas sektor/lembaga terkait.
d) Meningkatkan kualitas bahan-bahan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk optimalisasi pelaksanaan PUG, PP dan PA.
e) Mengembangkan monitoring, evaluasi pelaksanaan PUG, PP dan PA.

2. Aspek Pemberdayaan

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur, pemangku kepentingan dan masyarakat) dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA;
b) Memanfaatkan dan mengefektifkan peran Pokja/gugus tugas PUG, PP dan PA untuk meningkatkan kapasitas *focal point*;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam mekanisme perencanaan pembangunan tingkat desa dan mekanisme program yang menjadi mainstreamnya;
d) Meningkatan kepedulian dan peran lembaga Pemerintah dan non Pemerintah (LSM, Masyarakat serta Dunia Usaha) dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, advokasi untuk pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan/anak dan pemenuhan hak-haknya;

3. Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak

a) Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas fasilitator layanan pengaduan.
b) Meningkatkan koordinasi penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan instansi vertical dan leading sector penyelenggara Standar Pelayanan Minimal
c) Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Aspek Penguatan Kebijakan

Dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, maka untuk memberikan kesatuan pandang dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan yaitu:

a) Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender;
b) Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
c) Mendorong Komitmen dari Pemerintah daerah untuk melakukan regulasi kebijakan yang responsif gender;
d) Mengintegrasikan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring dalam kebijakan/program/ kegiatan yang terformulasi pada penganggaran pada SKPD;
e) Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak.
f) Keserasian dan sinkronisasi kebijakan PUG, PP dan PA;

5. Aspek Pemenuhan Hak Anak

a) Pelaksanaan kebijakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai wujud pemenuhan 31 hak anak.
b) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran Tahun 2025 Berdasarkan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut pada tabel ;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI SAAT INI (2023)	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TARGET TAHUN 2025	KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
1.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik	Indeks reformasi Birokrasi	BB(0)	1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DP3A	BB/79,17	B/66	B/67.5
4.Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	66.12	9.Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks pemberdayaan gender(IDG)	70.65	72.70	78.85
				Persentase ARG	6,4	15	20
				Indeks pembangunan gender (IPG)	91.52	92.02	93.52
				Jumlah perkawinan anak (orang)	69	59	29
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40	0,40	0,43
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	60	60
				Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100
				Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	601	675	700
				Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	675	685	700

Sumber data : RAKORTEK PPPA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KAB HSU

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun kedudukan tahun rencana RKPD tahun 2025 ini masuk pada tahapan tahun pertama dari dokumen RPD. Program dan Kegiatan yang direncakan tahun 2025 sebanyak 7 Program 21 kegiatan 53 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 4.493.381.793

4.1 Program dan Kegiatan serta sub kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

2.1. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

3.2 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Administrasi umum perangkat daerah

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.2 Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.3 Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

4.4 sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.5 sub kegiatan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu

4.6 sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1. Sub Kegiatan pengadaan mebel

5.2. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lannya

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

6.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

6.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

6.3 Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

7.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

7.2 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

7.3 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

7.4 Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedumg kantor dan bangunan lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota

1.1 sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksaan PUG

1.2 Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksaan PUG termasuk PPRG

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik,ekonomi,hokum,social,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

2.1. Sub kegiatan penyediaan sosialiasasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi

2.2. Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,hukum,sosial,dan ekonomi

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

3.1. Sub kegiatan pengembangan komunikasi,informasi,dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

III. Program Perlindungan Perempuan.

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota

1.1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,program,dan kegiatan pencegahan,kekerasan terhaap perempuan lingkup Daerah kabupetn/kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2. Sub kgiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota

2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewengan kabupaten.kota

2.1 Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekkrasann kewenangan kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota

3.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prsarana layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap kewenangan kabupaten/kota

3.2. Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

3.3. Sub kegiatan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan komdisi khusus kewenangan kabupeten/kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota

1.2 Sub kegiatan pelaksanaan komunikasi,informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.3 Sub kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota

2.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

2.3 Sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota.

V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan penyediaan data gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak,

Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah,non pemerintah,dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembagabpemerintah,nonpemerintah,media dan dunia usaha kewenangan kabupetn/kota

1.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

2.1. Sub kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

2.2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.kota

2.3. Sub kegiatan pengembangan komunikasi,informasi,dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

2.4. Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerahbkabupaten/kota

VII. Program Perlindungan Khusus Anak,

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota

1.1 Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaankebijakan,program dan kegiatan pencegshsn kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

1.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota

2.1 Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

2.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan nagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

3.1 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

3.2 Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitaas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerahbkabupaten/kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta sub kegiatan DPPPA Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
2	**08**				**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daearah.**	**DPPPA HSU**	**100%**	**3.492.637.793**	**APBD**	**-**	**100%**	**3.492.637.793**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**31.177.200**	**APBD**	**-**	**100%**	**31.177.200**
2	08	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan D okumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPPA HSU	6 dokumen	16.799.900	APBD	-	6 dokumen	16.799.900
2	08	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPPA HSU	3 laporan	14.377.300	APBD	-	3 laporan	14.377.300
2	**08**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**DPPPA HSU**	**100%**	**2.752.907.194**	**APBD**	**-**	**100%**	**2.752.907.194**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	=08	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA HSU	100%	2.752.907.194	APBD	-	100%	2.752.907.194
2	**08**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**40.500.000**	**APBD**	**-**	**100 %**	**40.500.000**
2	08	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPPPA HSU	30 Set	12.000.000	APBD	-	30 Set	12.000.000
2	08	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Kabupaten HSU	6 Orang	28.500.000	APBD	-	6 Orang	28.500.000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah.**	**DPPPA HSU**	**100%**	**222.277.629**	**APBD**	**-**	**100%**	**222.277.629**
2	08	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	10 Paket	1.274.700	APBD	-	10 Paket	1.274.700
2	08	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	50 Paket	5.153.800	APBD	-	50 Paket	5.153.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	500 Paket	14.876.200	APBD	-	500 Paket	14.876.200
2	08	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPPPA HSU	1500 Paket	30.031.300	APBD	-	1500 Paket	30.031.300
2	08	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPA HSU	5 Laporan	2.100.000	APBD	-	5 Laporan	2.100.000
2	08	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten HSU	26 Laporan	168.841.629	APBD	-	26 Laporan	168.841.629
2	**08**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan mebeler dan peraltan mesin lainnya**	**DPPPA HSU**	**6 Unit**	**44.500.000**	**APBD**	**-**	**6 Unit**	**44.500.000**
2	08	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Mebel yang dibeli	DPPPA HSU	0 Unit	0	APBD	-	0 Unit	0
2	08	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	DPPPA HSU	6 Unit	44.500.000	APBD	-	6 Unit	44.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**329.455.564**	**APBD**	**-**	**100%**	**329.455.564**
2	08	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPA HSU	10 Laporan	5.600.000	APBD	-	10 Laporan	5.600.000
2	08	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPPPA HSU	12 Laporan	70.427.564	APBD	-	12 Laporan	70.427.564
2	08	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPPPA HSU	12 Laporan	253.428.000	APBD	-	12 Laporan	253.428.000
2	**08**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**DPPPA HSU**	**100%**	**71.820.206**	**APBD**	**-**	**100%**	**71.820.206**
2	08	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPPPA HSU	17 Unit	15.414.000	APBD	-	17 Unit	15.414.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapalangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPPPA HSU	3 Unit	16.287.400	APBD	-	3 Unit	16.287.400
2	08	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPPPA HSU	8 Unit	4.300.000	APBD	-	8 Unit	4.300.000
2	08	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peresentase Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	DPPPA HSU	0 Unit	35.818.806	APBD	-	0 Unit	35.818.806
2	**08**	**02**			**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Adaptasi Kebiasaan baru Covid-19**	**DPPPA HSU**	**75% APE**	**88.248.454**	**APBD**	**-**	**75% APE**	**88.248.454**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga**	**DPPPA HSU**	**38 Lembaga**	**39.250.600**	**APBD**	**-**	**38 Lembaga**	**39.250.600**
2	08	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	DPPPA HSU	3 Dokumen	11.412.600	APBD	-	3 Dokumen	11.412.600

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	02	2.01	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	43 Perangkat Daerah	27.838,000	APBD	-	43 Perangkat Daerah	27.838,000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Prima, Kelompok Usaha Rumahan dan GOW yang dibina**	**DPPPA HSU**	**12**	**48.271.054**	**APBD**	**-**	**12**	**48.271.054**
2	08	02	2.02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	30 Dokumen	40.451.800	APBD	-	30 Dokumen	40.451.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	02	2.02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Permpuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	20 Organisasi	7.819.254	APBD	-	20 Organisasi	7.819.254
2	**08**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi dan Edukasi yang diterima dimasyarakat**	**DPPPA HSU**	**1**	**726.800**	**APBD**	**-**	**1**	**726.800**
2	08	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	1	726.800	APBD	-	1	726.800
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**112.611.500**	**APBD**	**-**	**100 %**	**112.611.500**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**11.290.400**	**APBD**	**-**	**10 kasus**	**11.290.400**
2	08	03	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Dokumen	11.290.400	APBD	-	10 Dokumen	11.290.400
2	08	03	2.01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	0 Perangkat Daerah	0	APBD	-	0 Perangkat Daerah	0
2	**08**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus Perempuan yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**55.462.200**	**APBD**	**-**	**10 kasus**	**55.462.200**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DPPPA HSU	10 kasus	18.481.000	APBD	-	10 kasus	18.481.000
2	08	03	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 kasus	9.000.000	APBD	-	10 kasus	9.000.000
2	08	03	2.02	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat yang mendapat advokasi dan Pendampingan layanan perlindungan Perempuan	DPPPA HSU	4 Perangkat Daerah	27.981.200	APBD	-	4 Perangkat Daerah	27.981.200
2	**08**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang dibina**	**DPPPA HSU**	**60 Lembaga**	**45.858.900**	**APBD**	**-**	**60 Lembaga**	**45.858.900**
2	08	03	2.03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	DPPPA HSU	60 Laporan	9.244.000	APBD	-	60 Laporan	9.244.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	03	2.03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	DPPPA HSU	70	34.214.900	APBD	-	70	34.214.900
2	08	03	2.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Desa dan Kelurahan	10 Orang	2.400.000	APBD	-	10 Orang	2.400.000
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Meningkatnya persentase kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi kebiasan covid-19**	**DPPPA HSU**	**100 %**	**320.296.445**	**APBD**	**-**	**100 %**	**320.296.445**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga**	**DPPPA HSU**	**10 Kali**	**100.355.745**	**APBD**	**-**	**10 Kali**	**100.355.745**
2	08	04	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	4	50.262.800	APBD	-	4	50.262.800
2	08	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	1 Buah	3.463.000	APBD	-	1 Buah	3.463.000
2	08	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	1 Laporan	46.629.945	APBD	-	1 Laporan	46.629.945

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan**	**DPPPA HSU**	**10 Lembaga**	**219.940.700**	**APBD**	**-**	**10 Lembaga**	**219.940.700**
2	08	04	2.02	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	DPPPA HSU	1 Lembaga	36.621.600	APBD	-	1 Lembaga	36.621.600
2	08	04	2.02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	200 Orang	46.757.100	APBD	-	200 Orang	46.757.100
2	08	04	2.02	03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	1 Dokumen	136.562.000	APBD	-	1 Dokumen	136.562.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Data terpilah gender dan anak**	**DPPPA HSU**	**2 dokumen**	**11.928.000**	**APBD**	**-**	**2 dokumen**	**11.928.000**
2	**08**	**05**			**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**DPPPA HSU**	**2 dokumen**	**11.928.000**	**APBD**	**-**	**2 dokumen**	**11.928.000**
2	08	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPPPA HSU	2 dokumen	11.928.000	APBD	-	2 dokumen	11.928.000
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak**	**DPPPA HSU**	**70%**	**265.055.630**	**APBD**	**-**	**70%**	**265.055.630**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerinta, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemenuhan Indikator KLA**	**DPPPA HSU**	**85 %**	**30.718.200**	**APBD**	**-**	**85 %**	**30.718.200**
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	DPPPA HSU	15	23.018200	APBD	-	15	23.018200

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							
2	08	06	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	7 dokumen	7.700.000	APBD	-	7 dokumen	7.700.000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Indikator KLA**	**DPPPA HSU**	**60%**	**234.337.430**	**APBD**	-	**60%**	**234.337.430**
2	08	06	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	50 Orang	45.333.200	APBD	-	50 Orang	45.333.200

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	24 Dokumen	87.173.730	APBD	-	24 Dokumen	87.173.730
2	08	06	2.02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	6 Dokumen	33.217.500	APBD	-	6 Dokumen	33.217.500
2	08	06	2.02	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	110 Dokumen	68.613.000	APBD	-	110 Dokumen	68.613.000
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Kasus yang tertangani pada anak**	**DPPPA HSU**	**100%**	**113.484.600**	**APBD**	**-**	**100%**	**113.484.600**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**07**	**2.01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Menurunnya jumlah kasus pada Anak**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**9.596.400**	**APBD**	**-**	**10 kasus**	**9.596.400**
2	08	07	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	3 Perangkat Daerah	4.796.600	APBD	-	3 Perangkat Daerah	4.796.600
2	08	07	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	0 Dokumen	0	APBD	-	0 Dokumen	0
2	08	07	2.01	03	Sub Kegiatan Penguatan Kerja sama lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	DPPPA HSU	10 Kegiatan	4.799.800	APBD	-	10 Kegiatan	4.799.800

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**07**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani**	**DPPPA HSU**	**10 kasus**	**42.761.400**	**APBD**	-	**10 kasus**	**42.761.400**
2	08	07	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 kasus	37.124.000	APBD	-	10 kasus	37.124.000
2	08	07	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampian Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA HSU	10 Layanan	5.637.400	APBD	-	10 Layanan	5.637.400
2	**08**	**07**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**PIK Keluarga dan PATBM yang dibina**	**Desa dan Kelurahan**	**120 lembaga**	**65.126.800**	**APBD**	-	**120 lembaga**	**65.126.800**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	07	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasaranan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	0 laporan	0	APBD	-	0 laporan	0
2	08	07	2.03	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa dan Kelurahan	0 laporan	0	APBD	-	0 laporan	0
2	08	07	2.03	03	Sub Kegiatan Pengambangan Lembaga Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kab/Kota	Desa dan Keluaran	70	34.844.400	APBD	-	70	34.844.400

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan serta sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	08	07	2.03	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	10	26.282.400	APBD	-	10	26.282.400
TOTAL									**1.740.474.599**				**1.740.474.599**
TOTAL + GAJI ASN									**4.493.381.793**				**4.493.381.793**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja-PD) Tahun 2025 merupakan rancangan kerja tahun ke 2 (Kedua) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan, memastikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sektor terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka hal-hal strategis dan operasional yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Mendorong pengarusutamaan gender terimplementasi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dapat memberikan manfaat, akses, partisipasi dan kontrol yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong implementasi kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan pola-pola pemberdayaan bagi perempuan serta kelompok lansia rentan KDRT melalui program dan kegiatan SKPD yang berkesinambungan dan bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Memperkuat kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melaksanakan upaya pencegahan dan pelayanan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(TPPO) dengan harapan berkurangnya rasio kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak.

4. Mendorong peran swasta, masyarakat dan lembaga non government untuk berperan aktif mengambil inisiatif dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak yang bersinergi dengan pemerintah daerah.
5. Mendorong kompetensi Sumber Daya Manusia, aparatur dan kinerja lembaga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Demikian untuk dilaksanakan.

Amuntai, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

H. HERMANI JOHAN,SKM, MAP, MMKes
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19660717 198903 1 007

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

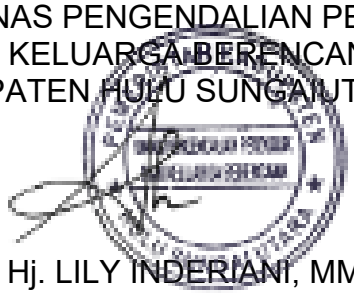
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan tersusunnya perubahan rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



dr. Hj. LILY INDERIANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19750507 200501 2 012

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-29
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2025 ini masuk pada tahapan ke-3 (tiga) dari dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2023-2026.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU tahun 2025 dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah yang diprioritaskan untuk pencapaian indikator tujuan peningkatan indeks pembangunan manusia dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :

a. Pengolahan data dan informasi
b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
h. Perumusan kegiatan prioritas.
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
j. Pembahasan Forum SKPD
k. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Hulu Sungai Utara Tahun 2023 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun ke-3 (tiga) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 - 2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan usulan 4 program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan dan disetujui sesuai Kebijakan Umum APBD untuk 4 program sebanyak, 13 kegiatan 13 dan 46 sub kegiatan sebanyak.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
c. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

a. Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal

b. Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

c. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

d. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

e. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

b. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
b. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
c. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
e. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
f. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

b. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

e. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

f. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**71%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.01.01	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	74,62%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.1.02.01.06	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	2 Laporan	40%
2.14.1.02.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	23 Orang	22 Orang	22 Orang	100%	23 Orang	18 Orang	**78,26%**
2.14.1.02.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan	100%
2.14.1.02.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	**0%**
2.14.1.02.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	0 Paket	100%	1 Paket	0	0%
2.14.1.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%
2.14.1.02.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0%
2.14.1.02.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.1.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	35 Laporan	0	0%
2.14.1.02.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.1.02.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.1.02.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
2.14.1.02.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Buah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	0	0%
2.14.1.02.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	111 Buah	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	0	0%
2.14.1.02.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	44 Buah	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	0	0%
2.14.1.02.09.011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	16 Buah	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**	**Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan**	**25 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)**	**-**	**19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)**	**19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)**	**100%**	**22 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)**	**19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)**	**86,36%**
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	**85%**	**-**	**65%**	**46%**	**70,51%**	**75%**	**46%**	**61,33%**
2.14.02.2.01	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal**	**60%**	**-**	**50%**	**50%**	**100%**	**55%**	**50%**	**90,91%**
2.14.02.2.01.09	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	25 Satuan Pendidikan	-	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%	25 Satuan Pendidikan	0	0%
2.14.02.2.01.12	Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	-	20 Organisasi	20 Organisasi	100%	20 Organisasi	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	-	20 Organisasi	20 Organisasi	100%	20 Organisasi	0	0%
2.14.02.2.02	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.14.02.2.02.08	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	5 Unit	0	0%
2.14.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	10 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Jumlah Peserta KB Baru / PB**	**5.188 Akseptor**	**39.70 Akseptor**	**5.086 Akseptor**	**1.984 Akseptor**	**39,01%**	**5.173 Akseptor**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Desa Yang Terjangkau Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana**	**219 Desa/ Kelurahan**	**219 Desa/ Kelurahan**	**219 Desa/ Kelurahan**	**219 Desa/ Kelurahan**	**100%**	**219 Desa/ Kelurahan**	**219 Desa/ Kelurahan**	**100%**
2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	50 Organisasi	50 Organisasi	100%	50 Organisasi	0	0%
2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0%
2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	0	0%
2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	0	0%
2.14.03.2.02	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina**	**28 Orang**	**-**	**21 Orang**	**21 Orang**	**100%**	**28 Orang**	**0%**	**0%**
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	96 Organisasi	96 Organisasi	100%	96 Organisasi	0	0%
2.14.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	0	0%
2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	219 Orang	-	219 Orang	219 Orang	100%	219 Orang	0	0%
2.14.03.2	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**		**10,45%**	**10%**	**10%**	**95%**			
		Persentase peserta KB baru pria		**0,55%**	**6%**	**2%**	**42%**			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	-	45 Laporan	45 Laporan	100%	24 Laporan	0	0%
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	552 Orang	200 Orang	691 Orang	691 Orang	100%	917 Orang	0	0%
2.14.03.2.03.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	10 Unit	10 Unit	100%	18 Unit	0	0%
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100%	20 Laporan	0	0%
2.14.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	-	-	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.03.2.04	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB**	**-**	**-**	**65%**	**65%**	**100%**	**65%**	**65%**	**100%**
2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	21 Dokumen	0	0%
2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	-	21 Kampung KB	21 Kampung KB	100%	21 Kampung KB	0	0%
02.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)**	**66,55%**	**-**	**62,44%**	**63,63%**	**101,91%**	**64,55%**	**63,63%**	**98,57%**
2.14.04.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB**	**75%**	**72,50%**	**70%**	**72,50%**	**103,57%**	**72%**	**72,50%**	**100,69%**
		Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	**70%**	**54,21%**	**65%**	**54,21%**	**83,40%**	**67%**	**54,21%**	**81%**
		Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	**65%**	**63,84%**	**60%**	**63,84%**	**106,40%**	**62%**	**63,84%**	**102,97%**
		Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	**5%**	**4,12%**	**5%**	**4,12%**	**82,40%**	**5%**	**4,12%**	**82,40%**
		Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa	**8%**	**33,44%**	**8%**	**33,44%**	**418%**	**8%**	**33,44%**	**418%**
2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1800 Unit	-	1546 Unit	1546 Unit	100%	1825 Unit	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.14.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100%	60 Orang	0	0%
2.14.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	723 Orang	723 Orang	100%	-	-	-
2.14.04.2.01.06	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115 Kelompok	40 Kelompok	120 Kelompok	120 Kelompok	100%	115 Kelompok	0	0%
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0	0%
2.14.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Capaian hasil pelaksanaan renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara unruk tahun pertama Renstra DPPKB Tahun 2023 cukup berhasil dengan baik, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/ kegagalan SKPD menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terdiri atas :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Keluarga Sejahtera

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/ PLKB)

Ruang lingkup pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari

1. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kesertaan ber-KB

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.2 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB	Nilai sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01	A* / 81,76*	100%
2.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif	68%	77,59%	114,10%
		Unmet Need (kebutuhan ber-KB	7,75%	5,89%	14,47%

Catatan : Bertanda bintang (*) Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja peserta KB aktif dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik menggunakan rumus 1 yaitu :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Sedangkan penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja unmet need (kebutuhan ber-KB) dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja menggunakan rumus 2 yaitu:

$$\%\ \text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2023 cukup berhasil.

Berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2023 :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB

   Pencapaian Indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori ”A dengan nilai 83,01”. Untuk Penilaian SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dijadwalkan tahun 2024 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2023 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2022, dimana nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah kategori ”A” dengan nilai 81,76.

2. Meningkatkan Kesertaan ber-KB

   Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS).

   Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 68% realisasi 77,59% atau 114,10% lebih dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 27.434 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 35.357 (Sumber: https://newsiga.bkkbn.go.id/) target nasional 62,92%, sedangkan pada tahun 2022 tercapai 73,80% dan tahun 2021 tercapai 81,57%.

   Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

   Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 7,75% realisasi 5,89% atau 131,58%, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 2.084 dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 35.357 (Sumber: https://newsiga.bkkbn.go.id/) target nasional 7,70%, sedangkan pada tahun 2022 tercapai 13,82% dan tahun 2021 tercapai 2,38%.

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditopang oleh beberapa sasaran kinerja yang ada di Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi, Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan yang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Eselon III, pada tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3 Realisasi Kinerja Eselon III Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan dan pengendalian pendudukf	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	100%
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	65%	45,83%	70,51%
2.	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta KB Baru / PB	5.086 Akseptor	1.984 Akseptor	39,01%
3.	Terwujudnya keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	62,44 Indeks (Skala 0-100)	63,63 Indeks (Skala 0-100)	101,91%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) DPPKB	-	-	A / 83,01	A / 83,51	A / 84,01	A / 84,51	A / 81,76	A* / 81,76*	A / 83,51	A / 84,01	Untuk Perkiraan proyeksi realisasi capaian 2022 s/d 2023 diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target Tahun 2024 dan 2025
2	Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	-	-	68%	69%	70%	71%	73,80%	77,59%	69%	70%	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-	-	7,75%	7,57%	7,3%	7%	13,82%	5,89%	7,57%	7,3%	

Catatan : Bertanda bintang (*)Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2023 adalah sebesar 77,59% atau 109,28% dari target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 71%, sedangkan untuk indikator menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 5,89% atau 118,85% dari target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 7%. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik melalui upaya memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program KKBPK bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB.

Dari program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 Program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun 2023 sebesar Rp. 4.384.715.000,00 dan setelah pergeseran (penambahan DAK Fisik dan Non Fisik) dan perubahan menjadi Rp. 9.703.512.830,00, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		%
	Anggaran	Realisasi	
BELANJA DAERAH	**9.703.512.830,00**	**8.904.370.076,00**	**91,76**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.707.958.230,00**	**3.409.391.043,00**	**91,95**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100**
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.270.568.600,00**	**3.022.030.415,00**	**92,40**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.263.485.000,00	3.015.691.615,00	92,41
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.083.600,00	6.338.800,00	89,49
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.405.000,00**	**8.955.000,00**	**86,06**
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.405.000,00	8.955.000,00	86,06
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**129.183.050,00**	**101.825.580,00**	**78,82**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.800,00	0,00	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.281.350,00	21.271.000,00	87,60
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.400.000,00	22.773.000,00	89,66
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	25.833.900,00	10.339.500,00	40,02
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.670.000,00	47.442.080,00	91,82
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**231.680.380,00**	**216.111.648,00**	**93,28**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.680.380,00	129.411.648,00	93,32
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00	86.700.000,00	93,23
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**60.121.200,00**	**54.468.400,00**	**90,60**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.163.200,00	23.143.800,00	85,20

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.508.000,00	19.134.600,00	93,30
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.450.000,00	9.190.000,00	97,25
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**433.870.000,00**	**331.096.555,00**	**76,31**
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**69.045.000,00**	**46.885.000,00**	**67,90**
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	48.555.000,00	36.595.000,00	75,37
Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10.515.000,00	4.215.000,00	40,09
Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	9.975.000,00	6.075.000,00	60,90
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**364.825.000,00**	**284.211.555,00**	**77,90**
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	13.595.000,00	8.891.000,00	65,40
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	9.975.000,00	15,54

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.830.000,00	59.105.500,00	88,44
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	160.200.000,00	160.200.000,00	100
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	46.040.055,00	76,73
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**3.416.176.400,00**	**3.154.789.678,00**	**92,35**
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**977.099.400,00**	**877.740.878,00**	**89,83**
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.400.000,00	80.400.000,00	66,78
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	163.999.400,00	145.835.000,00	88,92
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.400.000,00	128.400.000,00	98,47
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	481.900.000,00	469.505.878,00	97,43
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.400.000,00	53.600.000,00	66,67
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**896.620.000,00**	**832.408.800,00**	**92,84**
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	192.000.000,00	192.000.000,00	100
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	248.720.000,00	185.296.800,00	74,50

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	455.900.000,00	455.112.000,00	99,83
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**472.957.000,00**	**375.590.000,00**	**79,41**
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.250.000,00	34.902.000,00	91,25
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	203.801.000,00	190.870.000,00	93,66
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	181.906.000,00	104.055.000,00	57,20
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.900.000,00	11.891.000,00	92,18
Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	24.100.000,00	21.872.000,00	90,76
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**1.069.500.000,00**	**1.069.050.000,00**	**99,96**
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	744.000.000,00	743.550.000,00	99,94
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	325.500.000,00	325.500.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**2.145.508.200,00**	**2.009.092.800,00**	**93,64**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**2.145.508.200,00**	**2.009.092.800,00**	**93,64**
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	380.380.000,00	251.805.000,00	66,20
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.609.400,00	21.250.000,00	98,34
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.614.700.000,00	1.611.500.000,00	99,80
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	77.819.400,00	74.038.000,00	95,14
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.613.000,00	30.179.800,00	98,58
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20.386.400,00	20.320.000,00	99,67

Realisasi anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebesar Rp. 8.904.370.076,- atau 91,76% dari total anggaran sebesar Rp. 9.703.512.830,-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Persentase capaian tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Persentase capaian terendah terdapat pada Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 1.997.800,- atau 0% karena tidak ada Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang rusak, Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan realisasi Rp. 9.975.000,- dari anggaran Rp. 64.200.000,- atau 15,54%, karena jadwal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bersamaan dengan kegiatan yang lain.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB untuk tahun 2023 dapat dilihat bahwa :

1. Pencapaian indikator kinerja persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) telah berhasil tercapai sebesar 114,10% dari target yang ditetapkan 68% realisasinya mencapai 77,59%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Pencapaian indikator kinerja menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) telah berhasil tercapai sebesar 131,58%,dari target yang ditetapkan 7,75% realisasinya mencapai 5,89%

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu antara lain :

1. Adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sejak tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel.
2. Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil;
3. Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa
4. Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PKB/PLKB dan Lini Lapangan dalam pengelolaan program program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
5. Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja.
6. Adanya rapat koordinasi sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan
7. Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja agar dapat meningkatkan sosialisasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
8. Meningkatkan pelayanan KB dan penyuluhan KB metode MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9. Penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP
10. Meningkatkan kualitas kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR dan BKL (TRIBINA) melalui pelatihan kader dan pelatihan keterampilan.
11. Pembentukan rumah dataku dan sekolah siaga kependudukan (SSK)
12. Meningkatkan kegiatan lintas sektor di desa Kampung KB melalui kegiatan rapat tim pokja Kampung KB dengan tujuan semakin meningkatnya kegiatan lintas sektor di Kampung KB

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:

1. Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kebanyakan lahan rawa, sehingga akses ke desa-desa terpencil masih sulit untuk mensosialisasikan tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), seperti 7 buah desa yang ada di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Belum tercapaianya ratio antara desa binaan dengan PLKB dimana idealnya 1 PLKB/PKB menangani rata-rata 2 desa saja, sedangkan kondisi saat ini 1 PLKB/PKB menangani 5 sampai 6 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan pengangkatan PKB/PLKB merupakan kewenangan pusat
4. Rendahnya kesertaan KB baru /PB, sehingga perlu adanya operasional serta peningkatan kapasitas dan kemampuan PPKBD dan Sub PPKB serta kader untuk meningkatkan peserta KB Baru
5. Perlunya peningkatan kualitas kesertaan ber KB menjadi MKJP antara lain dengan penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6. Tidak semua keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia mengikuti kegiatan kelompok BKB, BKR, BKL hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan masih kurangnya SDM dan keterampilan kader dalam penyuluhan serta seringnya pergantian kader sehingga perlu mengoptimalkan kualitas dan peran serta kader.
7. Masih terbatasnya permodalan dan pemasaran bagi kelompok UPPKA solusinya perlu meningkatkan mitra kerja.
8. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam berbagai media dan metode sehingga pemahaman masyarakat tentang Program Bangga Kencana masih kurang, untuk mengatasinya diantaranya dengan cara meningkatkan dan memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa melalui kegiatan momentum strategis.
9. Meningkatkan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui kegiatan KIE sehingga Usia Kawin pertama wanita dapat lebih dari 21 tahun.
10. Meningkatkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Rendahnya kesertaan KB pria sehingga perlu mengoptimalkan peserta KB pria yang sudah ada sebagai motivator melalui pembinaan kelompok KB pria.
12. Angka Usia Kawin Muda yang relatif masih tinggi serta kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga sehingga perlu lebih meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kelompok kegiatan remaja, memaksimalkan fungsi Duta Genre (Generasi Berencana) dan Kelompok PIK Remaja.
13. Meningkatkan integrasi kampung KB dengan lintas sektor.
14. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan sehingga perlu penyempurnaan penyusunan kembali Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
15. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka DPPKB diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan Kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program Bangga Kencana menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024.
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Berkembang luasnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam kehidupan masyarakat sehingga informasi-informasi tentang program Bangga Kencana dapat lebih mudah diakses.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dalam upaya memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra DPPKB tahun 2023-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra DPPKB tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen pengganti terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Mengingat penyusunan RKPD tahun 2025 ini mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, maka materi kebijakan perencanaan pembangunan daerah ini lebih mengacu pada kebijakan yang lebih bersifat teknokratis. Hal ini karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 disusun tanpa adanya visi dan misi daerah sebagaimana dokumen RPJMD sebelumnya, karena Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 bukan produk yang dihasilkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih jadi dokumen RPD hanya meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang lebih bersifat perencanaan teknokratik.

Rancangan awal RKPD tahun 2025 ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam rangka melaksanakan berbagai urusan wajib ataupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan Indikator Capaian Kinerja tahun 2025 yang diinginkan pada Aspek Layanan Umum, Pelayanan Urusan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.7 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Kab. HSU

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

NO			BIDANG URUSAN / INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN AKHIR PERIODE 2026
II			ASPEK PELAYANAN UMUM			
	B		PELAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR			
	8.		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		1	Laju pertumbuhan penduduk (LLP)	0,70%	0,70%	0,67%
		2	Total fertility rate (TFR)	2,46	2,16	2,1
		3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52,5%	65%	85%
		4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	37,5%	65%	90%
		5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	4	5	6
		6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameterdanproyeksipenduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	15	25	40
		7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	13	19	28
		8	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	1,54	1,5	1,5
		9	Ratio Akseptor KB	92,10%	75%	90%
		10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	81,57%	82%	85%
		11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19)	NA	27	24
		12	Cakupan PasanganUsia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	NA	NA	NA
		13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	2,38%	7,75%	7%
		14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,15%	10%	13%
		15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontra sepsi	6,15%	12%	11%
		16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91,30%	80%	90%
		17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	86,50%	78%	85%
		18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86,70%	80%	88%
		19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	40%	50%	80%
		20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasisv	100%	100%	100%
		21	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan Perangkat Daerah Kb untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%
		22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	NA	NA	NA
		23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%
		24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%
		25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	17,8%	30%	35%
		26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100%	100%	100%
		27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	NA	NA	NA
		28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga	100%	100%	100%
		29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72,4%	72%	75%
		30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	NA	21 Tahun	21 Tahun
		31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBD es	0,62%	1%	1%
		32	I Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	NA	65	68

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan berbagai data dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan daerah pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan beberapa permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Tingginya angka kemiskinan serta belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

Sedangkan rumusan tujuan yang menjadi acuan dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 mendatang berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat
6. Meningkatnya perekonomian daerah
7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
10. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Terwujudnya pemerintahan yang bebas KKN
3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah
4. Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Meningkatnya pengendalian penduduk
11. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
12. Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis
13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa
14. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
15. Meningkatnya sektor pariwisata
16. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
17. Penurunan kemiskinan
18. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
20. Meningkatnya kesesuaian peruntukkan lahan
21. Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana.

Sedangkan Prioritas dan sasaran pada Bidang Sosial Budaya yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
   a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
   b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah
   c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting
c. Menurunnya angka kemiskinan.

3. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran :
   a. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
   b. Penurunan angka pernikahan anak
   c. Perencanaan penganggaran yang responsif gender.

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai tersebut di atas maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab DPPKB. Rencana Program dan Kegiatan ini terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 terdiri dari 4 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Program Pengendalian Penduduk

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil aspirasi masyarakat diforum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu untuk **"Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing"**, serta mendukung "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan". Dalam Program Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas :
   a. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
   b. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan Kegiatan Prioritas
   a. Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas :
   a. Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
   b. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;

b. perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;

c. peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;

d. peningkatan kompetensi PKB/PLKB;

e. penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan

f. penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif**.**

Sedangkan pada **Program Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, BKKBN memiliki peran pada Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari Kegiatan Prioritas tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya :

1. Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
3. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penyelarasan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

A. Penyelarasan Visi

"Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong".

Visi tersebut mengandung pengertian:

1. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.

2. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

4. Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

B. Penyelasaran Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

C. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

D. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya **Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)** dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya **Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)** 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya **kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed** 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya **Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun**, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya **Median Usia Kawin Pertama (MUKP)** dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. **Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.**

Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi :
    1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
    2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
    3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
    4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
    5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
    6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
    7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi :

   1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
   2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
   3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
   4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi :

   1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
   2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
   3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasarank husus.
   4) Peningkatan KB Pria.
   5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
   6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB

d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi :

   1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
   2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi :
   1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
   2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program BanggaKencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
   a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi
   b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan atas rumusan kebijakan
   c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
   a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
   b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN
   c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur

e. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi :

   a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif

   b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi

   c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi

   d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tertera diatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

Untuk mendukung arah kebijakan Nasional tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan upaya melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) serta Program Pengendalian Penduduk yang hasil akhirnya diharapkan dapat membantu pencapaian target kinerja sasaran strategis BKKBN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026, serta didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara**.**

Untuk target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 – 2026 yang terakomodir dalam Renstra DPPKB ditentukan dengan mengambil patokan berdasarkan target Provinsi Kalimantan Selatan dan target Nasional yang tercantum dalam (Rencana Strategis) RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Serta adanya perubahan data Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin anak dan hamil akan mempengaruhi data pencapaian Unmeet need dan peserta KB Aktif. Kemudian dengan adanya pendataan keluarga tahun 2021 menyebabkan penurunan data unmeet need dan peserta KB aktif sehingga mempengaruhi penetapan target unmeet need dan peserta KB aktif untuk tahun 2023-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait tujuan dalam Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta terintegrasi dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB
2. Meningkatkan Kesertaan ber-KB

Keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel berikut

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPJMD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	B / 70	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	B / 66	B / 66,5	B / 67	B / 67,5
				SASARAN RENSTRA DPPKB					
				Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01	A / 83,51	A / 84,01	A / 84,51
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
2.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	68,02	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,70	0,69	0,68	0,67
				SASARAN RENSTRA DPPKB					
				Meningkatnya Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif (%)	68	69	70	71
					Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)	7,75	7,57	7,3	7

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang diupayakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
      Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria

Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dilihat bahwa rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 4 Program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu indikatif anggaran diluar gaji dan tunjangan sebesar **Rp. 1.119.899.034,- (satu milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah)**. Sedangkan total pagu kebutuhan anggaran dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.797.213.034,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah). Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.415.052.217,00**							**4.742.823.953,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.415.052.217,00**							**4.742.823.953,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.415.052.217,00**							**4.742.823.953,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)***	**-**			**100 %**	**5.469.532.217,00**						**-**	**3.272.576.257,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah*	-			100 %	4.566.812.017,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	2.687.314.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	4.565.419.217,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		2.682.314.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.392.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	23.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	14.325.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	23.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		14.325.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja* -	-			100 %	428.213.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	298.145.857,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.292.850,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	64.809.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	18.417.650,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		50.145.857,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	317.243.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	242.797.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	179.355.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.197.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		74.355.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	-			100 %	201.910.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU	-	87.436.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	42.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		29.173.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	147.410.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		46.213.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		9.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur DPPKB Kab. HSU		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk***	**-**			**25 SSK 85 %**	**194.166.000,00**						**-**	**350.909.000,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal*	-			60 %	102.956.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU	-	137.085.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	18.422.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17.834.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				25 Satuan Pendidikan	47.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU		97.085.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				20 Organisasi	9.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				20 Organisasi	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Satuan Pendidikan dan Masyarakat HSU		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa*	-			100 %	91.210.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU	-	213.824.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				10 Dokumen	55.130.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		142.462.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				3 Unit	14.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		71.362.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	21.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Jumlah Peserta KB Baru / PB***	**-**			**5188 Akseptor**	**469.595.000,00**						**-**	**698.677.723,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Desa Yang Terjangkau Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana*	-			219 Desa/Kelurahan	126.613.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU	-	240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	76.055.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4 Dokumen	30.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	20.058.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina*	-			10 Orang	91.192.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU	-	138.748.652,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				219 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		90.748.652,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	73.192.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peserta KB baru pria* *Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	-			5,93 % 12 %	251.790.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU	-	319.929.071,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				24 Laporan	24.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		40.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				917 Orang	154.340.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		127.510.835,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				3 Laporan	1.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		1.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				30 Orang	1.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				20 Laporan	18.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		25.012.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				270 Orang	18.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		70.557.736,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		6.568.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	6.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		25.695.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				45 Orang	3.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				55 Orang	2.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholders, Mitra kerja, dan Masyarakat Kab. HSU		4.034.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)***	**-**			**66,55 Indeks (Skala 0-100)**	**281.759.000,00**						**-**	**420.660.973,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR* *Persentase Keluarga yang ikut UPPKS* *Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB* *Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL* *Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa*	-			70 % 5 % 75 % 65 % 8 %	281.759.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU	-	420.660.973,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	65.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	89.709.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				1800 Unit	33.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		65.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				60 Orang	37.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		125.160.973,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				60 Orang	3.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		6.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				60 Orang	3.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		6.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				85 Kelompok	48.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Stakeholders, Mitra kerja, Kelompok Kegiatan dan Masyarakat Kab. HSU		104.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**6.415.052.217,00**							**4.742.823.953,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan dalam penyusunan kerja program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun yang lalu, serta usulan program kerja tahun akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Renstra SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi dan berkelanjutan dengan stakeholder terkait.

Amuntai, 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dr. Hj. LILY INDERIANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19750507 200501 2 012

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat :
Jl Karya Manuntung Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan,
Telpon/Fax: (0527) 61903

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Untuk ini tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kepada semuapihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2025, dimana dalam penyusunannya mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan telah mengacu serta selaras dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. HSU tahun 2023 - 2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta dapat menjawab berbagai isu - isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga untuk itu diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Amuntai, Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TONY FITRIADY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780918 199711 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan
1.1 LatarBelakang..... 1
1.2 LandasanHukum..... 2
1.3 Maksud danTujuan 4
1.4 SistematikaPenulisan..... 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TahunLalu.....6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....22
2.3 Isu – Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPD 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 38

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4.1 Program dan Kegiatan 40

BAB V Penutup.....45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor8 tahun 2008 Pasal 27 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi " Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, dan Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya " serta berpedoman pada permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance)* maupun pelayanan prima (*service excellence*), semua instansi pemerintah dituntut untuk bekerja secara transparan, efektif-efisein, akuntabel, tanggap, adil, dan mempunyai visi strategik jauh ke depan. Prinsip-prinsip *good governance* harus didukung oleh lingkungan/masyarakat agar dapat diterapkan dengan benar. Penerapan Good Governance di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2025 disusun dengan berpedoman berpedoman pada Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 sebagai acuan penyusunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai UtarasertaPeraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor52Tahun 2017 tentang Susunan Organisasidan Tata KerjaPerangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 17);
23. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2025 guna untuk menjebarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Telaahan Terhadap usulan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan tehadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian target Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikaitkan dengan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017– 2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 5 (lima) Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 (tiga belas)kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, serta total anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 4.795.281.573**,-.** Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 penyerapan dana mencapai Rp.3.501.792.886,- atau 73,03%. Secara umum capaian target Kinerja dan target anggaran Dinas Kependudukan sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Tabel 1
ANGGARAN DAN REALISASI PER SUB KEGIATAN

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	8.100.000	100%	0	0,00	8.100.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	24.258.400	100%	0	0,00	24.258.400
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.075.000	100%	71.300.000	64,77	38.775.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.468.900	100%	1.140.460.678	56,28	886.008.222
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84.750.000	100%	83.400.000	98,41	1.350.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.174.563	100%	19.164.000	99,94	10.563
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	872.611.815	100%	793.086.750	90,89	79.525.065
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.462.367	100%	53.329.180	57,68	39.133.187
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.374.045	100%	39.513.638	83,41	7.860.407
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	100%	19.215.600	68,63	8.784.400
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.254.730	100%	178.348.380	96,79	5.906.350
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0		0	0,00	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.918.000	100%	26.152.000	93,67	1.766.000
14	Penyediaan Jasa	105.449.115	100%	98.947.450	93,83	6.501.665

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						
	Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik					
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.485.518	100%	96.342.000	72,72	36.143.518
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	86.875.000	100%	77.154.260	88,81	9.720.740
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.900.000	100%	15.956.200	80,18	3.943.800
18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	37.447.000	100%	37.261.000	99,50	186.000
Program Pendaftaran Penduduk						
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
19	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24.856.760	100%	22.640.000	91,08	2.216.760
20	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	76.637.500	100%	50.669.000	66,12	25.968.500
	Penataan Pendaftaran Penduduk					
21	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	7.425.000	100%	3.150.000	42,42	4.275.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
22	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	55.725.000	100%	51.225.000	91,92	4.500.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Program Pencatatan Sipil						
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
23	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	69.850.000	100%	69.722.000	99,82	128.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan						
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian					
24	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	599.907.860	100%	525.615.250	87,62	74.292.610
Penyusunan Profil Kependudukan						
	Penyusunan Profil Kependudukan					
25	Penyusunan Profil Data Perekembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.	53.275.000	100%	29.140.500	54,70	24.134.500
	Sub Jumlah	**3.702.874.415**	**100%**	**3.001.991.883**	**81,07**	**700.882.532**

Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 27.918.000,- dengan realisasi sub kegiatan sebesar Rp. 26.152.000 ,- (93,67 %). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti honorarium tim kegiatan penataan dan penyelamatan arsip, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya,belanja surat kabar/majalah dan belanja paket/pengiriman.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 105.449.115,- dengan realisasi sub kegiatan sebesar Rp. 98.947.450,- (93,83%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja telpon, air, listrik, belanja kawat/facsimile/intranet/TV kabel/TV satelit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.132.485.518,- dengan realisasi sub kegiatan sebesar 96.342.000,- (72,72%)

1.2. Kegiatan Administrasi Umum

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 92.462.367,-dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 53.329.180,- 57,68%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK). Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan karena kurangnya jumlah sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Normalnya tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di ampu oleh Pejabat Eselon IV (setara kasubbag) pada Sekretariat, namun pada Dinas Dukcapil Kab.HSU terjadi kekosongan pejabat struktural mulai dari sekretaris hingga seluruh kasubbag dan hanya ada staf pelaksana, dalam keadaan ini pimpinan mengambil kebijakan dengan menugaskan staf pelaksana yang ada untuk menjadi PPTK. Keterbatasan kompetensi PPTK menyebabkan adanya keterlambatan dalam hal eksekusi.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 47.374.045,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 39.513.638,- (83,41%).Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti Honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja cetak, dan dan belanja penggandaan.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 19.174.563,-dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 19.164.000,- (99,94 %). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering, dll).

d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.872.611.815,- dengan realisasi sebesar Rp. 793.086.750,- (90,89%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja peralatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan kelengkapan komputer, belanja bahan kelengkapan peralatan kerja/kantor, belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor.

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesarRp. 28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.215.600,- (68,63%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja makanan dan minumanrapat, belanja makanan dan minuman tamu yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil. Rendahnya serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas sumberdaya aparatur dan lambatnya proses eksekusi kegiatan.

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 184.254.730,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.348.380,-(96,79%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja perjalanan dinas luar daerah.

1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0 %).

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 37.447.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.261.000,- (99,50 %). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, upah jasa petugas jaga dan pengamanan, dan upah jasa petugas kebersihan kantor.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 86.875.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 77.154.260,- (88,81 %). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dan belanja pajak kendaraan bermotor.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 19.900.000,-dengan relisasi sebesar Rp. 15.956.200,- (80,18%). Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan sepertibelanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

1.5 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 24.258.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja jasa tenaga operator komputer.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 90.499.000,- denganrealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)

b. Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.110.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.300.000,- (64,77%). Rendahnya serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang ada serta kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut.

1.6Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 84.750.000,- dengan realisasi Rp. 83.400.000,- (98,41%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja ATK, belanja makan minum rapat, honorarium narasumber sosialisasi, belanja jasa kebersihan tempat sosialisasi dan belanja registrasi aplikasi zoom meeting.

1.7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki pagu anggaran sebasar Rp. 2.026.468.900 terealisasi sebesar Rp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.140.460.678,- (56,28%). Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan karna kurangnya jumlah SDM (PNS) pada Dinas Dukcapil Kab.HSU, lebih tepatnya hanya ada 12 orang PNS penerima gaji dan tunjangan.

2.1 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyahian Data Kependudukan sebesar Rp. 599.907.860,- dengan realisasi Rp. 525.615.250,- (87,62%). Pada tahun 2023kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja honorarium tim pelaksana kegiatan, belanja bahan kelengkapan komputer, belanja jasa pemeliharaan peralatan computer, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan upah jasa tenaga teknisi.

2) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

3.1 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain sebesar Rp. 53.275.000,- dengan realisasi Rp. 29.140.500,- (54,70 %). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan seperti honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja jasa pelayanan kebersihan, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah. Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan karna kurangnya jumlah SDM pelaksana kegiatan yang berakibat lambatnya proses eksekusi kegiatan.

4) Program Pencatatan Sipil

4.1 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

a.Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil sebesar Rp. 69.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.722.000,- (99,82%). Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan adalah honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja dokumentasi, publikasi dan dekorasi, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, dan belanja upah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5) Program Pendaftaran Penduduk

5.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebesar Rp. 24.856.760realisasi sebesar Rp. 22.640.000,- (91,08 %). Kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja perjalanan dinas dalam daerah.

b. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukansebesar Rp. 76.637.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.669.000,- (66,12%). Pada tahun 2023kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja perjalanan dinas dalam daerah dan honorarium panitia kegiatan sosialisasi KIA ke desa. Rendahnya serapan anggaran pada Sub Kegiatan ini disebabkan karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelaksana kegiatan tersebut, walaupun secara administrasi target sudah tercapai.

5.2 Penataan Pendaftaran Penduduk

b. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 7.425.000,- dengan realisasi Rp. 3.150.000,- (42,42 %). Kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja perjalanan dinas. Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan karna kurangnya jumlah SDM pelaksana kegiatan yang berakibat pada lambatnya proses eksekusi kegiatan.

5.3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 55.725.000,- dengan realisasi Rp. 51.225.000,- (91,92%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah honorarium panitia pelaksana kegiatan sosialisasi, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas dalam derah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran : 1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip Dinas Dukcapil	BB 80,00)	Belum ada evaluasi	-			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Darah	100%	70.37%	70,37%	3.907.604.453	2.749.631.136	70,37%
Sasaran : 2 Meningkatkan kualitas dan jumlah kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK	100%	100%	100%	164.644.260	127.684.000	77,55 %
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau pernah kawin yang memiliki KTP-el	100 %	98,3 %	98,3 %			
Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang berakta kelahiran	97 %	93,28%	96,16 %	69.850.000	69.722.000	99,82%
	Persentase Penduduk yang berakta kelahiran	64,62 %	59,40%	91,92%			
Sasaran : 3 Kualitas ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid	Jumlah stakeholder yang dapat mengakses mendapatkan informasi data kependudukan	15 SKPD	0 SKPD	0%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
yang dapat diakses oleh masyarakat							
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase alat pendukung SIAK dalam Kondisi Baik	100%	87,62	87,62 %	599.907.860	525.615.250	87,62%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Kependudukan yang dihimpun	17 Laporan	17 Laporan	100%	53.275.000	29.140.500	54,70 %

Dan sebagai penunjang kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjang dengan Anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dana APBD dan APBN (Dak Non Fisik) sebagai berikut:

Tabel 3

No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.031.228.900	1.143.180.678	888.048.222	56,28
2	Belanja Langsung	2.764.052.673	2.358.612.208	405.440.465	83,33
	T o t a l	**4.795.281.573**	**3.501.792.886**	**1.293.488.687**	**73,03%**

Realisasi anggaran tahun 2023 untuk belanja langsung mencapai **73,03%** dan tahun 2023 mencapai **75,36 %**dilihat dari capaian serapan anggaran terjadi penurunan **2,33%.** Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra sampai dengantahun 2023 dapat dilihat pada T-C-29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d 2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	0%	**0**	**100**	**100**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	01 penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat masuk dan surat keluar yg didistribusikan sesuai peruntukannya	0%	0	1200	1127	94%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	0%	0	5	5	100%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Persentase ATK yang digunakan	0%	0	51	45	88%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	0%	0	20	19	95%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase jaringan listrik dalam kondisi baik	0%	0	7	7	100%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	barang yang dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	0%	0	48	33	69%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	17 Penyediaan makan dan minum	Persentase realisasi pelaksanaan rapat	0%	0	25	22	88%	0%	0%	0%
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Persentase SPPD yang dilaksanakan	0%	0	43	31	72%	0%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								daerah									
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	**Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana kondisi baik**	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	09		Pengadaan Peralatan gedung kantor	barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	10		Pengadaan Mebeleur	barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	22		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	gedung dalam kondisi baik	0%	0	1	1	100%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	24		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0%	0	28	16	57%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 2	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0%	0	9	3	33%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 5	**Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi**	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 5	03		Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	persentase ASN yang dapat mengikuti Bimtek/diklat sesuai tupoksinya	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	100%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	0 6	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase dokumen/laporan yg diselesaikan tepat waktu	0%	0	5	5	100%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	1 5	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
						Bidang Pengelolahan data dokumen Kependudukan				0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	1 5	01		Pembangunan dan Penoperasian SIAK secara terpadu	Persentase jaringan SIAK yg terkoneksi secara online ke Kecamatan	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	1 5	06		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Persentase dokumen/laporan yg diselesaikan tepat waktu	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
						Bidang Pencatatan sipil				0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	1 5	11		Sosialisasi kebijakan kependudukan bidang catatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dapat disosialisasikan	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
						Bidang pendaftaran penduduk				0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
1	1 0	1	1 0	0 1	1 5	13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kegiatan yg dapat dimonitor dan dievaluasi	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	10	1	10	01	15	05		Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Persentase pelayanan pendaftaran kependudukan yang dapat disosialisasikan	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
						Program Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk			**Persentase Kepemilikan KTP-elektronik**	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
								Pengembangan pelaksanaan kebijakan pelayanan pendaftaran kependudukan	Persentase kebijakan pelayanan pendaftaran kependudukan yg disosialisasikan	0%	0	10	10	100%	0%	0%	0%
								Pengembangan pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	0	8000	11908	149%	0%	0%	0%
								Monitoring dan evaluasi kependudukan	Persentase kegiatan yg dapat dimonitor dan dievaluasi	0%	0	10	10	100%	0%	0%	0%
								Pengembangan database dan pendataan penduduk	Persentase data kependudukan yang dihimpun	0%	0	3200	5098	159%	0%	0%	0%
						Program Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil			**Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun**	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
								Pengembangan kualitas SDM dan kapasitas aparat pencatatan sipil	persentase ASN yang dapat mengikuti Bimtek/diklat sesuai tupoksinya	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
								Pengembangan kebijakan pelayanan akta pencatatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dapat disosialisasikan	0%	0	10	10	100%	0%	0%	0%
								Peningkatan pelaksanaan sidang isbat pendukung pencatatan kelahiran	Jumlah penduduk yang melakukan sidang isbat	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
						Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan			**Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan**	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
								Penyusunan pelaporan data dan informasi kependudukan	Persentase dokumen/laporan yg diselesaikan tepat waktu	0%	100	16	16	100%	0%	0%	0%
						Program Pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Tehnologi Informasi			**Persentase kondisi alat Sistem Informasi Pendukung SIAK**	0%	0	100	100	100%	0%	0%	0%
								Pembelajaran tenaga Operator SIAK	persentase operator siak yang mengikuti pembelajaran	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%
								Pengoprasian sistem informasi pendukung SIAK secara terpadu	Persentase jaringan SIAK yg terkoneksi secara online ke Kecamatan	0%	0	10	10	100%	0%	0%	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

JUMLAH ANGGARAN DISDUKCATPIL								0%	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PERMENDAGRI 90															
2	12	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	01	2	01	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	6 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	6 laporan	6 laporan	**100%**
2	12	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	**0**	0	0	-	-	**100%**
2	12	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi**	100%	55%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	12 orang	**22 Orang**	12 Orang	54,55%	22 orang	22 orang	**100%**
2	12	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah**	0%	89,92%	**100%**	100%	100%	100%	**1**	**100%**
2	12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialsiasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	0%	27 Kegiatan	**30 Kegiatan**	**30 Kegiatan**	**100%**	-	-	-
2	12	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**71,98%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	01	2	06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 Paket	7 Jenis Barang	7 Jenis Barang	7 Jenis Barang	**100%**	1 Paket	1 Paket	**100%**
2	12	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	barang yang dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	16 Paket	40 Jenis Barang	45 Jenis Barang	41 Jenis Barang	90.89%	16 Paket	16 Paket	**100%**
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang digunakan	1 Paket	38 Jenis Barang	51 Jenis Barang	29 Jenis Barang	57.68%	2 Paket	2 Paket	**100%**
2	12	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	1 Paket	21 Jenis Barang	21 Jenis Barang	18 Jenis Barang	83%	1 Paket	1 Paket	**100%**
2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlahrealisasi pelaksanaan rapat	12 Laporan	12 Kali	12 Kali	8Kali	69%	1 Laporan	1 Laporan	**100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2	1 2	0 1	2	0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD yang dilaksanakan	20 Laporan	9 SPPD	30 Laporan	30 Klaporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%
2	1 2	0 1	2	0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeruntah Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**0%**	**0%**	0	0	0%	0%	0%	0%
2	1 2	0 1	2	0 7	1 1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	0%	0%	0	0	0.00	0%	0%	**0%**
2	1 2	0 1	2	0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**77,68%**	100%	83,29%	0%	**100%**	**100%**	**100%**
2	1 2	0 1	2	0 8	0 1		penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yg didistribusikan sesuai peruntukannya	1200 Laporan	933 Surat	1200 Surat	1124 Surat	93.67%	1200 Surat	1200 Surat	**100%**
2	1 2	0 1	2	0 8	0 2		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet yang dibayar	12 Laporan	5 Langganan	5 Langganan	5 Langganan	100%	12 Laporan	12 Laporan	**100%**
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			0	0	0.00	,-		**100%**
2	1 2	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	**100%**	**44,90%**	100%	90,40%	0%	100%	100%	100%
2	1 2	0 1	2	0 9	0 1		Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26 Unit	12 Unit	28 Unit	25 Unit	88.81%	26 Unit	28 unit	**100%**
2	1 2	0 1	2	0 9	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	34 Unit	24 Unit	80.18%	15 unit	15 unit	**100%**
2	1 2	0 1	2	0 9	0 7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	gedung dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	1 unit	**100%**
2	1 2	0 2				**Program Pendaftaran Penduduk**		**Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100%**
								Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	**100%**	**99,82%**	**100%**	**100%**	**98.30**	**100%**	**100%**	**100%**
2	1 2	0 2	2	0 1		Pelayanan Pendaftan Penduduk		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	1 2	0 2	2	0 1	0 5		Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	data kependudukan yang dihimpun	3200 Dokumen	5800 Dokumen	3200 Dokumen	9078 Dokumen	283.70 %	3200 Dokumen	3200 Dokumen	**100%**
2	1 2	0 2	2	0 1	0 7		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Anak yang memiliki KIA	8000 Dokumen	11908 Dokumen	8000 Dokumen	9254 Dokumen	115.70 %	8000 Dokumen	8000 Dokumen	**100%**
2	1 2	0 2	2	0 2		**Penataan Pendafataran Penduduk**		**Pelayanan Pendafataran Penduduk Tertata dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	42.42%	100%	100%	**100%**
2	1	0	2	0	0		Penyusunan Tata Cara	Jumlah Dokumen Tata Cara	10 Dokumen	0%	10 Dokumen	4 Dokumen	42.42%	10 Dokumen	10 Dokumen	**100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	2	2		2	1		Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang dihimpun								
2	12	02	2	03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Pelayanan Pendafataran Penduduk Terselenggara dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100.00 %	100%	100%	**100%**
2	12	02	2	03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendafataran Penduduk yang dilaksanakan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100.00 %	10 Laporan	10 Laporan	**100%**
2	12	03				**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun**	**96%**	**97,98%**	**97%**	**93,28%**	**96.16%**	**98.00%**	**98%**	**100%**
							Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk	**71**	**53,97%**	**64,62%**	**59,40%**	**91.92%**	**70.00%**	**70.00%**	**100%**
2	12	03	2	01		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	03	2	01	01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dapat disosialisasikan	10 Laporan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	**100%**
2	12	04				**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase tersedianya informasi administrasi kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan yang diinput di Aplikasi SIAK	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah data penduduk yang disajikan	17 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
2	12	05				**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangandan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	dokumen/Laporan profil kependudukan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1.00**	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai kinerjanya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu proses penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan dalam mencapai suatu target kinerja.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tahun : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil Kab. HSU	BB (80,00)	BB (Belum dinilai)	
2.	Meningkatkan kualitas dan jumlah kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	87,50 %	100 %	114,29
		2. Persentase Penduduk yang berusia 17 th atau pernah kawin yg memiliki KTP-el	99,50 %	107,06 %	107,60
		3. Persentase Penduduk anak usia 0-18 th yang berakta kelahiran	87,50 %	93,10 %	106,40
		4. Persentase Penduduk yang berakta kelahiran	54,62 %	53,30 %	97,58
3.	Kualitas ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid.	Jumlah stakeholder yang dapat mengakses mendapatkan informasi data kependudukan	15 SKPD	11 SKPD	73,33

Tahun : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil Kab. HSU	BB (80,00)	BB (Belum dinilai)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	pemerintahan yg transparan akuntabel				
2.	Meningkatkan kualitas dan jumlah kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	88,50	101,33	114,50
		2. Persentase Penduduk yang berusia 17 th atau pernah kawin yg memiliki KTP-el	100,00	99,82	99,82
		3. Persentase Penduduk anak usia 0-18 th yang berakta kelahiran	90,00	97,98	108,87
		4. Persentase Penduduk yang berakta kelahiran	59,62	53,97	90,52
3.	Kualitas ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid.	Jumlah stakeholder yang dapat mengakses mendapatkan informasi data kependudukan	15 SKPD	11 SKPD	73,33

Tahun : 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil Kab.HSU	BB (80,00)	Belum Dinilai	-
2	Meningkatnya kualitas dan jumlah kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan	1. Persentase Kepala Keluarga yang memilik Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%
		2. Persentase Penduduk yang	100%	98.3%	98,3%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

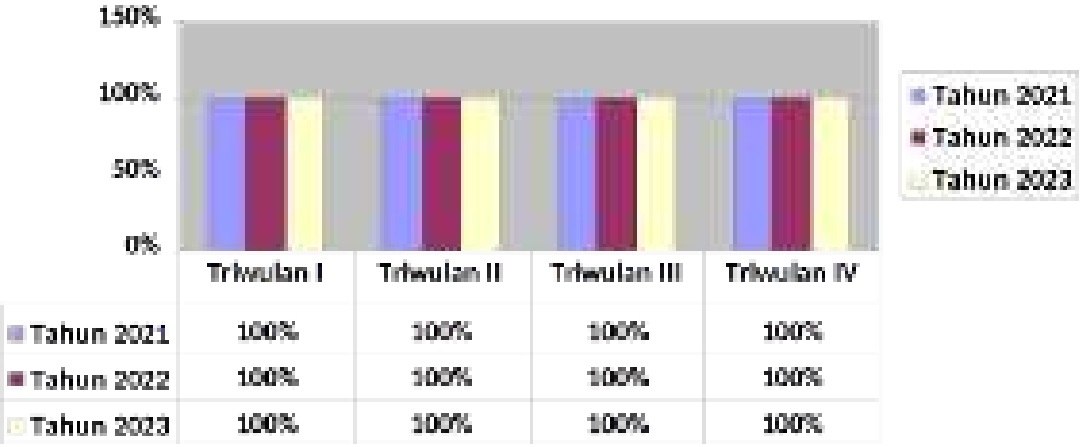
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	Sipil	berusia 17 th atau pernah kawin yang memiliki KTP-el			
		3. Persentase Penduduk anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran	97%	93,28%	96,16%
		4. Persentase Penduduk yang berakte kelahiran	64,62%	59,40%	91,92%
3.	Kualitas ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid.	Jumlah stakeholder yang dapat mengakses dan mendapatakan informasi data kependudukan	15 SKPD	11 SKPD	73,33%

1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2020 yang ditargetkan dalam Renstra2017-2023 sebesar 87,50 dan terealisasi sampai akhir tahun 2020 mencapai 100 % dengan jumlah 74.187 KK, pada tahun 2021 ditargetkan 88,50 % dan terialisasi 101,33 % dengan jumlah 74.482 KK, sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan jumlah 76.485 KK. Jumlah tersebut diambil berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I tahun 2023, yang mana kepemilikan KK sama dengan jumlah KK. Sedangkan dalam segi pelayanan penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2020 berjumlah 18.706 dokumen, pada periode tahun 2021 berjumlah 18.240 dokumen, dan pada tahun 2023 berjumlah 15.782.Sebagai perbandingan, jumlah kepemilikan KK dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Jumlah Kepemilikan Kartu Keluatga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



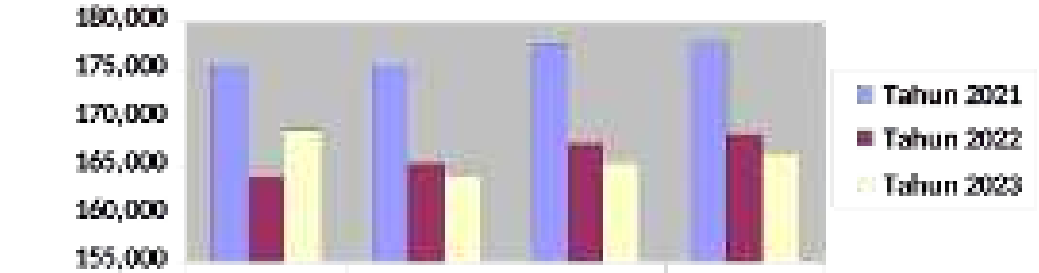
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tahun 2021	100%	100%	100%	100%
Tahun 2022	100%	100%	100%	100%
Tahun 2023	100%	100%	100%	100%

2. Persentase kepemilikan KTP-el adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau usia 17 tahun ke atas dan sudah nikah. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan tahun 2012 sampai 2023. Pelayanan perekaman/pencetakan KTP-el tahun 2020 ditargetkan dalam Renstra adalah 99,50 % dan terealisasi sampai akhir tahun 2020 sebesar 178.020 orang dari jumlah wajib KTP sebesar 166.587 orang (107,39%), dan untuk tahun 2021 ditargetkan 100 % dan terealisasi sampai akhir tahun 2021 sebesar 168.289 orang dari jumlah wajib KTP sebesar 168.597 orang (99,82%). Sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 166.242 orang dari jumlah wajib KTP sebesar 169.054 orang (98,34%) Capaian target kinerja kepemilikan KTP-el ini datanya diambil dari laporan kependudukan bulan Desember 2023. Sebagai perbandingan, jumlah perekaman KTP-el dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Jumlah Kepemilikan KTP EL



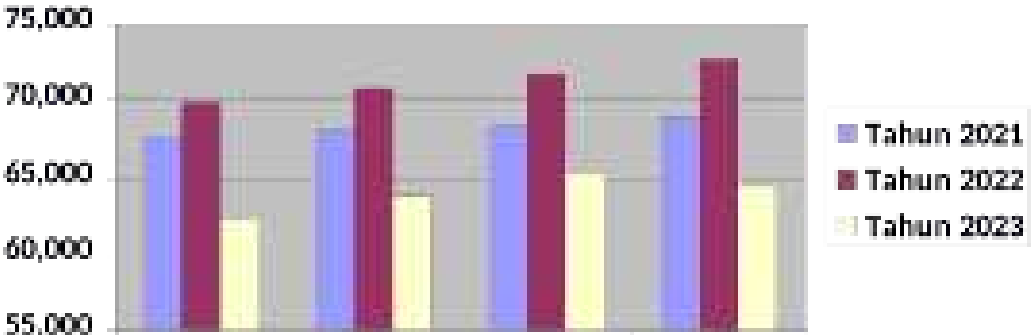
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tahun 2021	175,344	175,598	177,734	178,020
Tahun 2022	164,014	165,259	167,207	168,289
Tahun 2023	168,718	164,009	165,365	166,242

3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak usia 0-18 tahun pada tahun yang bersangkutan. Jumlah akta kelahiran tersebut merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun - tahun sebelumnya, batasan usia anak tersebut secara periodik selalu diupdate dengan kondisi terbaru yang mana anak yang usianya melebihi dari 18 tahun datanya dikeluarkan sedangkan anak yang baru lahir datanya harus dimasukan. Pada tahun 2020 persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun ditargetkan dalam renstra sebesar 87,50 % dan terealisasi sampai akhir tahun 2020 sebesar 94,28 % atau 68.917 orang dari jumah anak usia 0-18 tahun sebanyak 73.096 orang. Pada tahun 2021 ditargetkan dalam renstra 90,00 % dan terealisasi sampai akhir tahun 2021 sebesar 97,98 % atau 72.623 orang dari jumah anak usia 0-18 tahun sebanyak 74.118 orang.Sedangkan untuk tahun 2023 ditargetkan dalam renstra 97 % dan terealisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 93,28 % atau 64.469 orang dari jumah anak usia 0-18 tahun sebanyak 69.111 orang.Sebagai perbandingan jumlah penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

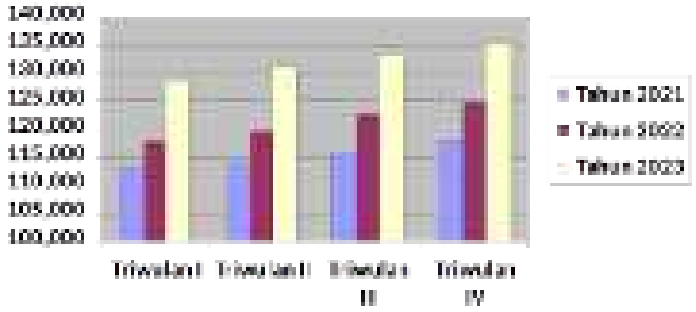


	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tahun 2021	67,687	68,109	68,527	68,917
Tahun 2022	69,842	70,794	71,701	72,623
Tahun 2023	62,149	63,732	65,133	64,469

4. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2020 yang ditergetkan sebesar 54,62 % sudah terealisasi mencapai 51,13 % atau 117.819 orang dari jumlah penduduk sebesar 230.410 jiwa, sedangkan untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 59,62 % sudah terealisasi mencapai 53,97 % atau 125.018 orang dari jumlah penduduk sebesar 231.635 jiwa. Pada tahun tahun 2023 ditargetkan sebesar 64,62% sudah terealisasi mencapai 59,40 % atau 135.336 orang dari jumlah penduduk sebesar 231.745 jiwa. Sedangkan untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2020 berjumlah 7.645 dokumen, pada tahun 2021 berjumlah 9.141 dokumen, dan pada tahun 2023 berjumlah 9.098 dokumen. Sebagai bahan perbandingan berikut grafik kepemilikan akta kelahiran penduduk.

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



5. Penerbitan Akta Kematian ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 442 orang, pada tahun 2021 untuk akta kematian ditargetkan sebanyak 600 orang dan terealisasi sebanyak 1.349 orang, sedangkan tahun 2023 untuk akta kematian ditargetkan sebanyak 600 orang dan terealisasi sebanyak 1.882 orangCapaian target ini tidak terlepas dari sosialisasi yang selalu dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya kepemilikan dokumen Akta Kematian bagi keluarga yang meninggal dunia.

Disamping itu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat diluar SPM antara lain :

1. Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian Non Muslim pada tahun 2023 ada 0 dokumen.
2. Penerbitan Akta perubahan pencatatan status anak pada tahun 2023 :
   - Perubahan nama : 246 orang
   - Perubahan peristiwa penting lainnya : 212 orang
   - Pembetulan akta (Kesalahan Redaksi) : 267 orang
   - Akta Kelahiran Rusak, Hilang dan terbakar : 244 orang
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) : 16.159 orang
4. Penerbitan Surat Pindah Datang ke luar daerah (Propinsi/Kabupaten), tahun 2023 penduduk yang pindah ke luar daerah sebanyak 5.007 orang dan penduduk yang datang dari luar daerah sebanyak 4.071 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023 (th n-2)	Tahun 2023 (th n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n 1)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil		BB (85,00)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	√	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara	√	40	50	60	70	43.17	50	60	70	
4	Persentase penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah kawin yang memiliki KTP-el	√	100	100	100	100	98.3	100	100	100	
5	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang ber akta kelahiran	√	92.5	97	98	99	93.2	97	95.5	99	
6	Persentase penduduk yang ber Akta Kelahiran	√	64.62	70	71	72	59.4	70	71	72	

Keterangan :
Pada Indikator "**Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang ber akta kelahiran**" terjadi perubahan target capaian yang semula pada renstra 94% di tahun 2023 menjadi 97%, 95,5% pada tahun 2025 menjadi 98%, 97,5% pada tahun 2025 menjadi 99%. Target yang ditetapkan mengacu pada target Nasional yang telah ditetapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan selama ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

a. Pada Sekretariat :
   - Kurangnya jumlah SDM, terutama kekosongan pejabat struktural menyebabkan banyak kegiatan lambat di eksekusi. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk sebagian besar adalah staf pelaksana, dengan kapasitas yang terbatas. Kurangnya SDM juga menyebabkan banyak tugas yang dilaksanakan secara tumpang tindih. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
   - Kurangnya jumlah SDM juga menjadi masalah yang sama pada Bidang ini. Selain melaksanakan pelayanan pada Dinas dan Mall Pelayanan Publik, sebagian SDM yang ada juga dikerahkan untuk melakukan pelayanan jemput bola ke lapangan untuk mengejar target nasional pelayanan pendaftaran penduduk.
   - Adanya refocusing pada anggaran pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang sehingga sulit untuk melakukan pemutakhiran dan memenuhi sarana penujang terutama untuk pelayanan.
   - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan, selalu menjadi catatan merah pada evaluasi pelayanan publik setiap tahunnya.
   - Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko KTP-el di pusat.
   - Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan jarak yang jauh, khususnya untuk wilayah Kecamatan Paminggir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

- Masih adanya pernikahan sebagian masyarakat yang tidak melaporkan ke KUA setempat sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak tidak dapat membuktikan buku nikah, dan data persyaratan lainnya tidak sinkron satu sama yang lainnya.
- Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran penduduk lanjut usia (Lansia) dan akta kematian penduduk, untuk meningkatkan hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelayanan jemput bola ke Desa-desa.

d. Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data :

- Kurangnya SDM dengan kompetensi yang terbatas menyebabkan kegiatan kerjasama pemanfaatan data tidak dapat di eksekusi secara maksimal.
- Mekanisme pengusulan kerjasama pemanfaatan data harus melalui persetujuan pusat dan memakan waktu yang cukup lama.
- Kurangnya anggaran menyebabkan beberapa inovasi pemanfaatan data tidak dapat direlaisasikan dengan optimal.
- Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi sistem informasi SIAK, untuk meningkatkan hal ini perlu adanya koniksitas jaringan dan kerjasama antar steckholder.
- Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan database Disdukcapil, hal ini perlu dilakukan peremajaan dan pemutahiran data serta pembuatan buku profil Kependudukan.

➢ **Tantangan dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :**

a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan jarak yang jauh, khususnya untuk wilayah Kecamatan Paminggir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
c. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko KTP-el di pusat.
d. Kurangnya jumlah SDM terutama pejabat struktural.

➢ **Peluang dalam meningkatkan pelayanan, antara lain :**

a. Adanya dukungan anggaran dari APBD dan pusat melalui dana DAK Non fisik (APBN);
b. Adanya regulasi untuk pengurusan administrasi kependudukan : tidak dipungut biaya/gratis dan peran birokrasi serta *stelsel* aktif (pelayanan langsung ke lapangan/jemput bola)
c. Adanya perkembangan teknologi IT.

➢ **Rekomendasi dan catatan strategis prioritas tahun yangdirencanakan :**

(1) Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran penduduk lanjut usia (Lansia) dan akta kematian penduduk, untuk meningkatkan hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelayanan jemput bola ke Desa-desa.

(2) Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi sistem informasi SIAK, untuk meningkatkan hal ini perlu adanya koniksitas jaringan dan kerjasama antar steckholder.

(3) Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan database Disdukcapil, hal ini perlu dilakukan peremajaan dan pemutahiran data serta pembuatan buku profil Kependudukan.

(4) Masih kurangnya pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai target, hal ini perlu adanya langkah-langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu terdiri 5Program,13 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan.Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (tabel T-C-31).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C-31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rencana Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN					**URUSAN**					
	DINAS DUKCAPIL KAB. HSU					DINAS DUKCAPIL KAB. HSU					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcatpil	Nilai SAKIP Kabupaten	100%	2,850,250,557	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcatpil	Nilai SAKIP Kabupaten	100%	6,158,500,994	
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah	100%	17,700,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah	100%	17,700,000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	17,700,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	6 Laporan	17,700,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			SKPD					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase SDM yang dapat emningkatkankapasitas sesuai tupoksi	100%	2,459,418,900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	100%	5,571,418,900	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dukcatpil	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2,459,418,900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dukcatpil	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	5,571,418,900	
					Tambahan :	Belanja Pegawai Gaji dan TPP serta Gaji PPPK : 1. Gaji dan TPP PNS 2. Gaji dan TPP PPPK				Rp 250.000.000 Rp 2.862.000.000	
iii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	100%	219,872,723	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor	100%	305,862,160	
3	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	8,174,563	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	19,164,000	
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	16 Paket	73,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	16 Paket	73,000,000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	56,536,565	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	56,536,565	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	22,161,595	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	22,161,595	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	10,000,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c			Kunjungan Tamu					Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	125,000,000	
					Tambahan :	SPPD Luar Daerah dalam rangka mengambil blanko dan Rakornas				75,000,000	
iv	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Dukcatpil	barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	100%	250,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeruntah Daerah	Dinas Dukcatpil	barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan	100%	250,000	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6Unit	250,000	
v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	119,508,934	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Dukcatpil	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	119,508,934	
10	penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 laporan	30,059,819	penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	30,059,819	
11	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89,449,115	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89,449,115	
vi	Pemeliharaan Barang	Dinas	Persentase sarana	100%	33,500,000	Pemeliharaan	Dinas	Persentase	100%	143,761,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcatpil	dan prasarana dalam kondisi baik			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcatpil	sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
12	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	20,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	50,000,000	
					Tambahan :	BBM				30,000,000	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	15,000,000	
					Tambahan :	Perawatan Peralatan Kantor Seperti AC, dll				11,500,000	
14	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Dukcatpil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	37,261,000	
					Tambahan :	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman Kantor				27,261,000	
II	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	100% 100%	58,125,000	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	100% 100%	88,125,000	
vii	Pelayanan Pendaftan Penduduk	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	30,375,000	Pelayanan Pendaftan Penduduk	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	30,375,000	
15	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan	3200 Dokumen	3,750,000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Pencatatan,	3200 Dokumen	3,750,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
16	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10 Laporan	26,625,000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10 Laporan	26,625,000	
viii	Penataan Pendaftaran penduduk	Dinas Dukcatpil	Pendaftaran penduduk tertata dengan baik	100%	3,750,000	Penataan Pendaftaran penduduk	Dinas Dukcatpil	Pendaftaran penduduk tertata dengan baik	100%	3,750,000	
17	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	10 Dokumen	3,750,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	10 Dokume n	3,750,000	
ix	Penyelenggaraan Pendaftan Penduduk	Dinas Dukcatpil	Pendaftaran penduduk tersekenggara dengan baik	100%	24,000,000	Penyelenggaraan Pendaftan Penduduk	Dinas Dukcatpil	Pendaftaran penduduk tersekenggara dengan baik	100%	54,000,000	
18	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	24,000,000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	54,000,000	
					Tambahan :	Tim Sosialisasi dan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk: 1. SPPD dalam				1. Rp 15.000.000 2. Rp 10.000.000 3. Rp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Daerah 2. Belanja Makan Minum 3. Honor Tim				5.000.000	
III	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun	98%	26,150,000	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun	98%	60,000,000	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk	71%				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk	71%		
x	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Pencatatan sipil terselenggara dengan baik	100%	26,150,000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Pencatatan sipil terselenggara dengan baik	100%	60,000,000	
19	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	10 laporan	26,150,000	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	10 laporan	60,000,000	
					Tambahan :	Sosialisasi dan Jemput Bola Pencatatan Sipil : 1. SPPD dalam Daerah 2. Belanja Makan Minum				1. Rp 23.850.000 2. Rp 10.000.000	
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase tersedianya informasi administrasi kependudukan	100%	477,000,000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase tersedianya informasi administrasi kependudukan	100%	657,000,000	
xi	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik	100%	477,000,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik	100%	657,000,000	
20	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	17 Dokumen	477,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	16 Doakumen	657,000,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Diolah dan Disajikan					Diolah dan Disajikan				
					Tambahan :	Perawatan Peralatan SIAK dan Jemput Bola Digital ID : 1. SPPD dalam Daerah 2. Belanja Perawatan / Peralatan Komputer 3. Ribbon dan Blanko KIA				Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Rp 120.000.000	
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase Kualitas Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100%	3,750,000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan	100%	35,000,000	
xii	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	3,750,000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Dukcatpil	Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	35,000,000	
21	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	3,750,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Dukcatpil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	35,000,000	
					Tambahan :	Sosialisasi dan Jemput Bola Pemanfaatan Data: 1. SPPD dalam Daerah 2. Belanja Makan Minum				Rp 21.250.000 Rp 10.000.000	
					3,415,275,557					**6,998,625,994**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunanmenyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja SKPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Dinas yang tugas pokoknyamemberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan, seperti pelayanan pendaftaran penduduk, pembuatan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Pindah datang Penduduk dan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran, Kematian, perkawinan, perceraian dan akta lainnya, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa operasional rutin dan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penjelasan kebijakan yg dilaksanakan yg berdasarkan kebijakan nasional.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2025, untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Agenda Nasional RPJMN tahun 2020-2025

Dalam Agenda Nasional RPJMN tahun 2020-2025 dirumuskan salah satuPrioritas Pembangunanyangberkaitan dengan Urusan Kependudukan yaitu "Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing".

Dari prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan".

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategi yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi visi-misi Kepala Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

visi-misi Kemendagri dan visi-misi DisdukcapilKB Propinsi Kalsel. Tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;

B. Sasaran :

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas KKN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta sasaran yang ingin dicapai, maka telah disusun rencana program dan kegiatan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 ini mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4.1.Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa dan modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

Adapun program dan kegiatan yang menunjang program nasional berupa penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan responsif gender, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengupayakan semaksimal mungkin agar semua penduduk diwilayah tersebut sudah tercatat dalam administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil, denganProgram dan kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan sipil dengan kegiatan :
   > Pengembangan kebijakan pelayanan akta pencatatan sipil.
2. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan :
   > Pengembangan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
   > Pengembangan Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksudkan sebagaimana diuraikan pada tabelT-C-33 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HSU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Tahun 2025				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						URUSAN										
						DINAS DUKCAPIL KAB. HSU										
2	**12**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Kabupaten**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**2,850,250,557**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**2,850,250,557**	**APBD**	
2	**12**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**17,700,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**17,700,000**	**APBD**	
2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas Dukcatpil	6 Laporan	17,700,000	**APBD**	Dinas Dukcatpil	6 Laporan	17,700,000	**APBD**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Kinerja SKPD										
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase SDM yang dapat emningkatkankapasitas sesuai tupoksi**	Dinas Dukcatpil	**100%**	**2,459,418,900**	**APBD**	Dinas Dukcatpil	**100%**	**2,459,418,900**	**APBD**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dukcatpil	22 Orang	2,459,418,900	APBD	Dinas Dukcatpil	22 Orang	2,459,418,900	APBD	
2	**12**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**219,872,723**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**219,872,723**	**APBD**	
2	12	01	2	06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Dinas Dukcatpil	1 Paket	8,174,563	APBD	Dinas Dukcatpil	1 Paket	8,174,563	APBD	
2	12	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Dukcatpil	16 Paket	73,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	16 Paket	73,000,000	APBD	
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Dukcatpil	8 Paket	56,536,565	APBD	Dinas Dukcatpil	8 Paket	56,536,565	APBD	
2	12	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Dukcatpil	9 Paket	22,161,595	APBD	Dinas Dukcatpil	9 Paket	22,161,595	APBD	
2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Dukcatpil	12 Laporan	10,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	12 Laporan	10,000,000	APBD	
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dukcatpil	20 Laporan	50,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	20 Laporan	50,000,000	APBD	
2	**12**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeruntah Daerah**	**barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**250,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**250,000**	**APBD**	
2	12	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Dukcatpil	1 Unit	250,000	APBD	Dinas Dukcatpil	1 Unit	250,000	APBD	
2	**1**	**0**	**2**	**0**		**Penyediaan Jasa**	**Persentase**	**Dinas**	**100%**	**11**	**APB**	**Dinas**	**100%**	**119,5**	**APB**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2	**1**		**8**		**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukcatpil**		**9,508,934**	**D**	**Dukcatpil**		**08,934**	**D**	
2	12	01	2	08	01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dukcatpil	1200 laporan	30,059,819	APBD	Dinas Dukcatpil	1200 laporan	30,059,819	APBD	
2	12	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Dukcatpil	12 Laporan	89,449,115	APBD	Dinas Dukcatpil	12 Laporan	89,449,115	APBD	
2	**12**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**33,500,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**33,500,000**	**APBD**	
2	12	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Dukcatpil	26 Unit	20,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	26 Unit	20,000,000	APBD	
2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Dukcatpil	11 Unit	3,500,000	APBD	Dinas Dukcatpil	11 Unit	3,500,000	APBD	
2	12	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Dukcatpil	1 Unit	10,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	1 Unit	10,000,000	APBD	
2	**12**	**02**				**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Kepemilikan KTP-elektronik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**58,125,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**58,125,000**		
2	**12**	**02**	**2**	**01**		**Pelayanan Pendaftan Penduduk**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**30,375,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**30,375,000**	**APBD**	
2	12	02	2	01	05	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Dukcatpil	3200 Dokumen	3,750,000	APBD	Dinas Dukcatpil	3200 Dokumen	3,750,000	APBD	
2	1	0	2	0	0		Jumlah Laporan	Dinas	10	26,625,000	APB	Dinas	10	26,625,000	APB	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	2	2		1	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcatpil	Laporan		D	Dukcatpil	Laporan		D	
2	**12**	**02**	**2**	**02**		**Penataan Pendaftaran penduduk**	**Pendaftaran penduduk tertata dengan baik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	**APBD**	
2	12	02	2	02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dinas Dukcatpil	10 Dokumen	3,750,000	APBD	Dinas Dukcatpil	10 Dokumen	3,750,000	APBD	
2	**12**	**02**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Pendaftan Penduduk**	**Pendaftaran penduduk tersekenggara dengan baik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**24,000,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**24,000,000**	**APBD**	
2	12	02	2	03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcatpil	10 Laporan	24,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	10 Laporan	24,000,000	APBD	
2	**12**	**03**				**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun** **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**26,150,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**26,150,000**	APBD	
2	**12**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Pencatatan sipil terselenggara dengan baik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**26,150,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**26,150,000**	APBD	
2	12	03	2	02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Dinas Dukcatpil	10 laporan	26,150,000	APBD	Dinas Dukcatpil	10 laporan	26,150,000	APBD	
2	**12**	**04**				**Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**	**Persentase tersedianya informasi administrasi**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**447,000,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**447,000,000**	APBD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							kependudukan									
2	**12**	**04**	**2**	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**447,000,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**447,000,000**	APBD	
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dinas Dukcatpil	17 Dokumen	447,000,000	APBD	Dinas Dukcatpil	16 Dokumen	447,000,000	APBD	
2	**12**	**05**				**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Laporan Data dan Informasi Kependudukan**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	APBD	
2	**12**	**05**	**2**	**01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	**APBD**	**Dinas Dukcatpil**	**100%**	**3,750,000**	APBD	
2	12	05	2	01	**02**	Penyusunan Profil Data Perkembangandan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Dukcatpil	1 Dokumen	3,750,000	APBD	Dinas Dukcatpil	1 Dokumen	3,750,000	APBD	
JUMLAH ANGGARAN DISDUKCAPIL										**4,371,125,557**				**7,521,439,148**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. *Input* dan proses akan memberikan *benefit* dan *impact* kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung dan tidak.langsung Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mencermati berbagai aturan pelaksanaan serta petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi dan Daerah.

Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penerapan *good governance* dilingkungan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih belum sempurna, maka untuk itu kami berharap masukan atau saran yang membangun dari berbagai pihak.

Amuntai, Maret 2024

.Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



TONY FITRIADY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780918 199711 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjaberan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Rencana ini akan menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan tugas pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga untuk itu diharapkan masukan dan saran yang Konstruktif guna Perbaikan dan Penyempurnaannya.

Amuntai, April 2024

Kepala Dinas,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

RIDALI HADI, SSTP. M.AP
NIP. 19840623 200212 1 001

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 24

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.... 36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD..... 48

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD..... 52

BAB V PENUTUP..... 56

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi / Kegiatan Utama Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023..... 9

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSU dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 13

Tabel 2.3 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023..... 25

Tabel 2.4 Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 27

Tabe. 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara 28

Tabe. 2.6 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023..... 30

Tabe. 2.7 Hasil penyesuaian target indikator Kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah Provinsi dan Nasional bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 34

Tabe. 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten HSU..... 41

Tabe. 3.1 Kesepakatan Desk unsur pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antar Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025..... 50

Tabe. 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026..... 56

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Meneghah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi "Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stakeholder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk penyempurnaan RKPD, dan untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Renstra SKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten HSU tahun 2025 yang mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Sosial Budaya yang diprioritaskan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Kesetaraan Gender,

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting; Menurunnya angka kemiskinan; Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; Penurunan angka pernikahan anak; Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 sebagai acuan penyusunan.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :

    a. Pengolahan data dan informasi
    b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
    c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
    d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
    e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
    f. Perumusan tujuan dan sasaran.
    g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
    h. Perumusan kegiatan prioritas.
    i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

j. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengacu pada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.

b. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 adalah:

1. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyrakat Dan Desa Tahun 2023-2026.
2. Sebagai Dasar dalam Penyusunan kebijakan Umum APBD Tahun 2025
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian target rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (tiga) program utama/ prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Adapun rincian realisasi program/ kegiatan utama seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Realisasi Program/ Kegiatan Utama DPMD Kab. HSU Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
A	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa				
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan jaminan kesehatan	15.540 orang/ bulan	14.629 orang/ bulan	94

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.2	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dok	1 Dok	100
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dok	4 Dok	100
1.4	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	1 Laporan	100
1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BumDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BumDesa dan LembagaKerjasama antar desa	4 Dok	4 Dok	100
1.6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen aparatur Hasil Pengelolaan aset desa	1 Dok	1 Dok	100
1.7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan Kapasitas	1 kali	1 kali	100
1.8	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	3 Desa	101 Desa	100
1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dok	1 Dok	100
B	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa				
2.1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok	100
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat				
3.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100
3.2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayaguna an Kelembagaan Lembaga Kemas yarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyan du, LPM dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayaguna an Kelembagaan Lembaga Kemas yarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	1 Dok	1 Dok	100
3.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	1 Dok	100
3.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaat -an Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalamPemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	100
3.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dok	5 Dok	100

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.2 (Tabel T-C-29) berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2 (T-C-29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA										
1	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Pengelolaa Keuangan*	*100%*	-	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Perangkat Daerah	***Daerah***								
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu	6 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Peruhahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	-	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	90%	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	100%
		Pelaksanaanpenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
		(Kegiatan) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana BMD SKPD	1 Laporam	-	1 Laporam	1 Laporam	100%	1 Laporam	1 Laporam	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Tersusunnya laporan BMD pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Penatausahaan BMD pada SKPD	Persentasi Penatausahaan BMD SKPD	100 %		100 %	100 %	100%	1 Laporam	1 Laporam	100%
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dolumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	90,62%	4 Paket	4 Paket	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
		(Sub Kegiatan) Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	3 Paket							
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***-***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	-	19 Unit	19 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	25 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.	**(Program) Peningkatan Kerja Sama Antar Desa**		**Persentase Kerjasama antar Desa yang aktif**	**100%**	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Fasilitasi Kerjasama antar Desa	***Persentase kerjasama antar Desa***	***100%***		***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalamkabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kerjasama Antara Desa Yang aktif	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Fasilitasi Pebangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3	**(Program) Administrasi Pemerintahan Desa**	**1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel** **2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa** **3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif**	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
	(Kegiatan) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	***1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel*** ***2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa*** ***3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif***	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 dok		1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah kepala Desa pengganti Antar Waktu yang terpilih	10 org	-	-	-	100%	10 org	10 org	100%
		Pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasita aparatur pemerintahan desa	214 orang	-	214 orang	214 orang	100%	214 orang	214 orang	100%
		Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
		pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	4 dok	-	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	214 orang	-	214 orang	214 orang	100%	214 orang	214 orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	50 desa	-	3 desa	3 desa	100%	40 desa	40 desa	100%
		fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		***1. Persenrtase desa yang memiliki LKD yang lengkap*** ***2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes***	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap**	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		Terlaksananyai penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan,Pemberdayaan danPendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan	1 dok	**-**	1 dok	1 dok	***100%***	1 dok	1 dok	***100%***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		masyarakat hukum adat	Masyarakat Hukum Adat								
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	-	2 lembaga	2 lembaga	***100%***	2 lembaga	2 lembaga	***100%***
		Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakatdan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dok	-	1 dok	1 dok	***100%***	1 dok	1 dok	***100%***
		Terlaksananya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	***100%***	2 Laporan	2 Laporan	***100%***
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 dok	-	5 dok	5 dok	***100%***	5 dok	5 dok	***100%***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Untuk capaian hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pertama Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tahun 2023) cukup berhasil dengan baik.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/ kegagalan SKPD menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dimaksudkan adalah Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
2. Bidang Pembangunan, Keuangan dan aset Desa
3. Bidang Pemerintahan Desa.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan sasaran strategis sebagai fungsi pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah dan Desa yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja SKPD
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan Desa dan Kelurahan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C-30) di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	meningkatnya akuntabilitas dan kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB (77.80 point)	B* (77,11 point)	100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang berkinerja baik (%)	100	100	100%
3.	Meningkatnya peran lembaga kemansyarakatan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan desa dan keluarahan	Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)	100	100	100%

Catatan : Bertanda bintang (*) Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2023 adalah Cukup berhasil.

Berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2023 :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja SKPD**

   Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kategori BB dengan Interpretasi "Sangat Baik" pada tahun 2023 tercapai dari target yang ditetapkan atau 100%, dikarenakan kebutuhan penyediaan dokumen dan laporan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa**

   Untuk IKU Persentase Desa yang berkinerja baik pada tahun 2023 sebesar 18,69 % atau 100 % dari target yang ditetapkan, Persentasi desa yang berkinerja baik sebanyak 40 Desa pada tahun 2023 sesuai dengan target IKU yang telah ditetapkan tercapai sebesar 18,69% atau 100% Pencapaian ini tentunya karena keberhasilan atau tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

3. **Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan Desa dan Kelurahan**

   Indikator kinerja utama ketiga pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yaitu persentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif, target untuk Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif sebanyak 40 Desa pada tahun 2023 sesuai dengan target IKU sebesar 18,26% dari Target atau 100%. Pencapaian ini tentunya karena keberhasilan atau tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2023 . Program/ kegiatan dimaksud diantaranya pembinaan untuk meningkatkan kepengurusan LPMD, pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan pelatihan BUMDes serta pelatihan TTG dan Lomba Inovasi TTG.

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh beberapa sasaran program yang ada di Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pembangunan, Keuangan dan aset Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja sama Desa, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-Bidang Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya kualitas penataa desa	Persentasi desa yang telah mempunyai Perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa	100%	100%	100%	
3.	Meningkatmya Kualitas Administrasi Keuangan Desa	Persentasi Desa yang menyampaikan RKPDes, APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan profil desa	100%	100%	100%	Kepala Bidang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.	Meningkatnya peran BUMDes dalam peningkatan perekonomian desa	Persentasi desa yang memiliki BUMDes yang aktif (usaha berjalan dan ada laporan kegiatan)	100%	100%	100%	Pembangunan, Keuangan dan aset desa
5.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemebrdayaan	Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap (ada Perdes tentang LKD dan SK pengurus)	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kerjasama desa
6.	Meningkatnya Peran Lembaga Kerjasama antar desa	Persentasi Lembaga kerjasama antar desa yang aktif (ada laporan kegiatan)	100%	100%	100%	
7.	Meningkatnya penggunaan TTG oleh Masyarakat	Persentasi Desa yang mempunyai Posyantekdes (SK Pembuatannya)	100%	100%	100%	

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Desa yang berkinerja baik	18,69 %	23,36 %	28,04 %	29,91 %	18,69 %	-	28,04 %	29,91 %	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2	Persentase Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yan aktif	18,26%	24,66 %	27,40 %	29,68 %	18,26 %	-	27,40 %	29,68 %	

Memasuki tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian Persentase desa yang berkinerja baik Yang Diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target Renstra 2023-2026 sebesar 100%, untuk pencapaian indikator Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang aktif adalah sebesar 100% dari target Renstra 2023-2026 sebesar 100%.

Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 terdiri dari 4 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun program/ kegiatan utama yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya diantaranya adalah desa yang berkinerja baik yaitu desa yang membuat dan menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD, Epdeskel, RKPDes, APBDes dan laporan realisasi APBDes, Laporan aset desa dan profil desa tepat waktu, dimana tahun 2023 targetnya adalah sebanyak 40 Desa atau 18,69%, tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk IKU Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, pada tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan sebesar 18,26% atau 40 Lembaga Kemasyarakatan desa yang memenuhi syarat lembaga yang aktif sudah tercapai 100%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari segi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 untuk anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.242.921.797,-. Dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, realisasi serapan program/kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 6.495.918.732,- atau dengan Persentase sebesar 89,69%. Adapun rincian realisasi program/ kegiatan dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Urusan	No	Program / Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.066.312.442**	**2.664.162.828**	**86,88**
	1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**11.648.800**	**7.816.600**	***67,10***
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.170.400	4.364.400	60,87
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1.300.000	1.300.000	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.012.400	352.200	34,79
		Koordinasi dan penyusunanlaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.166.000	1.800.000	83,10
	2	***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***2.497.809.550***	***2.139.226.480***	***85,64***
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.975.000	2.133.664.380	85,62
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5.834.550	5.562.100	**95,33**
	3	***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***1.219.800***	***930.000***	**76,24**
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1.219.800	930.000	**76,24**
	4	***Administrasi umum perangkat daerah***	***325.525.310***	***316.863.482***	**97,34**
		Penyediaan bahan logistik kantor	177.335.710	169.416.400	**95,53**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.134.000	3.030.500	**96,70**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145.055.600	144.416.582	**99,56**
	5	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***161.561.092***	***141.577.566***	**87,63**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.442.692	57.059.167	**74,64**
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	85.118.400	84.518.399	**99,30**
	6	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***68.547.890***	***57.748.700***	**84,25**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas jabatan	20.231.250	16.890.400	**83,49**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	35.394.350	32.029.300	**90,49**
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.462.400	4.370.000	**51,64**
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4.459.890	4.459.000	**99,98**
Urusan Pemerintahan Desa		**Program Peningkatan Kerja Sama Desa**	**11.362.200**	**7.686.900**	**67,65**
	7	***Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa***	***11.362.200***	***7.686.900***	**67,65**
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	11.362.200	7.686.900	**67,65**
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	**3.245.464.805**	**2.968.598.582**	**91,47**
	8	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***3.245.464.805***	***2.968.598.582***	**91,47**
		Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1.854.949.755	1.843.632.000	**99,39**
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	215.737.400	209.872.900	**97,28**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	53.040.000	47.738.000	**90,00**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	53.372.400	32.420.700	**60,74**
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	88.071.400	83.923.300	**95,29**
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	9.375.000	8.792.000	**93,78**
		pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	439.600.000	317.775.500	**72,29**
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	423.118.500	330.940.982	**78,21**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	108.200.350	93.503.200	**86,42**
		Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	**919.782.350**	**855.470.422**	**93,01**
	9	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	919.782.350	855.470.422	**93,01**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Keluarahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	51.742.700	41.161.000	**79,55**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Keluarahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	297.063.300	284.812.562	**95,88**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli desa	8.540.800	7.599.800	**88,98**
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	101.241.200	97.020.010	**95,83**
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	461.194.350	424.877.050	**92,13**
	Total		**7.242.921.797**	**6.495.918.732**	**89,69**

Dari tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 diatas menunjukan bahwa capaian kinerja realisasi keuangan masuk pada kategori tinggi dengan serapan mencapai 89,69%. Dari semua sub kegiatan ada 1 (satu) yang capaiannya rendah yaitu Sub Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan capaian 34,79%, Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut berupa rapat untuk penyusunan dokumen

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

perubahan, namun pada kenyataannya rapat dapat dilaksanakan berbarengan dengan rapat rutin lainnya sehingga realisasi untuk kegiatan ini kurang maksimal.

Untuk hasil kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 Antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.7

Hasil penyesuaian target indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Nasional

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	1000 Lembaga	-	214	214	214	214	214	-	11 Lembaga	11 Lembaga	
2	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	1500 Desa	-	4 Desa	6 Desa	8 Desa	10 Desa	4 Desa	-	8 Desa	10 Desa	
3	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	3000 Desa	-	214 Desa	214 Desa	214 Desa	214 Desa	214 Desa	-	1 Desa	1 Desa	
4	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	800 Desa	-	214 Desa	214 Desa	214 Desa	214 Desa	214 Desa	-	10 Desa	11 Desa	
5	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	4350 Orang	-	1307 Orang	1307 Orang	1307 Orang	1307 Orang	1307 Orang	-	30 Orang	40 Orang	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6	Persentase Desa Mandiri	19.64 %	-	1.8%	1.8%	2,3%	2,3%	1.8%	-	2,6%	2,6%	
7	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	10,88 %	-	3,3%	3%	3%	4%	3%	-	3%	4%	
8	Persentase BUM Desa Maju	8,28%	-	0,46 %	0,46 %	0,46 %	0,46 %	0,46 %	-	5%	5%	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut *empowerment* adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka semakin memperkuat posisi pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
d. Pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran strategis, yang dipandang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam pembangunan kedepan yaitu:

1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan dan pendayagunaan pembangunan kawasan;
4. Pembangunan usaha ekonomi dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah;
5. Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah;
6. Sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan belum optimal.

Selain itu, dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menemui beberapa Kendala atau permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. Permasalahan internal yaitu, kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, serta sarana dan prasana pendukung yang kurang memadai.
b. Permasalahan eksternal yaitu, belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, belum optimalnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahaan desa/kelurahan, belum optimalnya sumber daya manusia dalam mengembangkan lembaga usaha ekonomi masyarakat desa, belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Disamping itu, berdasarkan hasil Evaluasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan selama 1 (satu) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain sebagai berikut :

a. Kualitas Penyelenggaraan dan SDM Pemerintahan Desa/Kelurahan yang belum optimal;
b. Belum Optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Desa;
c. Belum optimalnya penguatan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
d. Belum Optimalnya Pembinaan terhadap pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan dan Aset Desa;
e. Belum berkembangnya usaha ekonomi di desa, dan;
f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan.
g. Percepatan Penyelesaian Batas Desa
h. Sensus Berbasis Dasawisma melalui aplikasi ZAQLI BERDOA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hulu Sungai Utara telah disesuaikan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu terdiri 3 (tiga) program utama dan 1 (satu) program penunjang. Dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 terdiri dari 4 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan Kerjasama antar desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun untuk Rencana kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.003.062.553-.

Untuk Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasarkan dari Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.8 (T-C-31) berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.8 (T-C-31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Asal (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	**Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 2. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian 3. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase BMD yang siap pakai**	**100%**	**4,185,779,200**	**Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 2. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian 3. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase BMD yang siap pakai**	**100%**	**5,441,584,730**	
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***11,142,100***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***100%***	***11,142,100***	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	3,990,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	3,990,700	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	7,151,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	7,151,400	
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD***	***100%***	***3,231,917,300***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD***	***100%***	***4,484,696,380***	
2.1	Penyusunan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	23 orang/Bulan	3,223,458,000	Penyusunan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	32 orang/Bulan	4,476,237,130	ASN 18+8 PPPK+6CPNS, Sesuai Anjab
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dok	1,957,200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dok	1,957,050	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	4,402,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	4,402,400	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan	18 laporan	2,099,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan (semester SKPD	18 laporan	2,099,800	
3.	***Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase BMD yang terkelola dengan baik***	***100%***	***5,999,800***	***Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase BMD yang terkelola dengan baik***	***100%***	***5,999,600***	
3.1	Koordinasi dan Penilaian barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milikdaerah pada SKPD	1 laporan	5,999,800	Koordinasi dan Penilaian barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milikdaerah pada SKPD	1 laporan	5,999,600	
4.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD***	***100%***	***8,719,600***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD***	***100%***	***8,719,600***	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas besera Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	7,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas besera Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	***1 paket***	7,500,000	
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penialaian kinerja pegawai	1 dok	1,219,600	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penialaian kinerja pegawai	1 dok	1,219,600	
5.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi Umum SKPD***	***100%***	***638,367,400***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi Umum SKPD***	***100%***	***625,360,910***	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	4 paket	10,688,750	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	4 paket	10,685,810	
5.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	4 paket	44,781,400	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	4 paket	52,260,300	
5.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	2,405,250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	2,403,000	
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	580,492,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	560,011,800	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Terlaksananya Pengadaan BMD Pada SKPD***	***100%***	***19,219,000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD***	***100%***	***23,000,000***	
6.1	Pengadaan Peralatan Dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin	3 Paket	19,219,000	tersedianya Peralatan Dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin	3 Paket	23,000,000	
7.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD***	***100%***	***196,373,500***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD***	***100%***	***203,832,800***	
7.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	1 laporan	1,650,600	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	1 laporan	1,650,600	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 laporan	64,604,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 laporan	72,063,800	Penambahan Beban Tagihan Listrik, karena ada bangunan baru dan penambahan kilometer baru
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	130,118,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	130,118,400	
8.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD***	***100%***	***74,040,500***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD***	***100%***	***78,833,340***	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	26,517,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	25,197,340	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	1 9unit	36,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	1 9unit	37,720,000	
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15 unit	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	6,000,000	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	5,123,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	9,916,000	
2.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA**	**Persentase lembaga kerjasama antar desa yang aktif**	**100%**	**35,999,800**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA**	**Persentase lembaga kerjasama antar desa yang aktif**	**100%**	**49,749,800**	
9.	***Fasilitasi Kerja sama antar Desa***	***Jumlah lembaga kerjasama desayang aktif***	***7 Desa***	***35,999,800***	***Fasilitasi Kerja sama ant.***	***Jumlah lembaga kerjasama desa yang aktif***	***7 Desa***	***49,749,800***	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerjasama Antara Desa Yang aktif	1 dok	18,000,000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Lembaga Kerjasama Antara Desa Yang aktif	1 dok	23,290,000	Adanya Pertemuan dengan seluruh Kades di lingkup Pemkab HSU
9.1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dok	17,999,800	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dok	26,459,800	Jumlah Tim Bertambah sehingga makan minum bertambah banyak orangnya
3.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif**	**100%**	**2,752,738,099**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif**	**100%**	**3,337,080,520**	
10	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif***	***100%***	***2,752,738,099***	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif***	***100%***	***3,337,080,520***	
10.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 dok	1,789,999,964	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 dok	2,075,640,000	Persediaan dan untuk tahun 2024 hanya mencukupi pembayaran iuran BPJS untuk 10 bulan, dan perhitungan perorang dihitung 4% dari OMR
10.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 dok	20,999,800	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 dok	103,238,800	pemberian penghargaan berupa laptop untuk desa yang berstatus mandiri (10)
10.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	2 dok	72,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	2 dok	71,999,900	
10.4	Pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasita aparatur pemerintahan desa	30 orang	60,000,000	Terlaksananya pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasita aparatur pemerintahan desa	30 orang	59,999,970	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10.5	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	1 laporan	41,999,400	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	1 laporan	41,999,200	
10.6	pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	4 dok	59,999,700	pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	4 dok	263,464,580	penambahan volume waktu Bimtek bumdes dan belanja perjalanan dinas untuk expo bumdes di propinsi, Hibah Penguatan Modal BumDes
10.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah kepala Desa pengganti Antar Waktu yang terpilih	10 org	81,632,660	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah kepala Desa pengganti Antar Waktu yang terpilih	10 org	81,632,330	
10.8	Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	1 dok	24,000,000	Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	1 dok	23,999,880	
10.9	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dok	35,112,030	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dok	48,111,720	
10.10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	214 orang	88,655,935	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	214 orang	88,655,580	
10.11.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	3 desa	334,627,400	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	76 Desa dan 5 kelurahan	334,627,470	
10.12	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dok	143,711,210	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dok	143,711,090	
4.	**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**1. Persenrtase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes**	**100%**	**1,028,545,454**	**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**1. Persenrtase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes**	**100%**	**3,201,423,450**	
11.	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota***	***1. Persenrtase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes***	***100%***	***1,028,545,454***	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota***	***1. Persenrtase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes***	***100%***	***3,201,423,450***	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	[illegible]	Terfasilitasinya [illegible]	1 Unit	[illegible]	Terfasilitasi [illegible]	Terfasilitasinya [illegible]	1 Unit	[illegible]	
1.1.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (BPD, RW, PKK, posyandu, LPM dan lembaga lainnya), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (BPD, RW, PKK, posyandu, LPM dan lembaga lainnya), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Lembaga	115.000.000	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan lembaga lainnya), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan lembaga lainnya), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Lembaga	115.000.000	Kegiatan pemerintahan kelurahan dan LPM
1.1.3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pemerintah desa dalam mengelola pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terfasilitasinya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pemerintah desa dalam mengelola pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 Unit	20.000.000	Terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pemerintah desa dalam mengelola pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terfasilitasinya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pemerintah desa dalam mengelola pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 Unit	20.000.000	Pemberdayaan Usaha UMKM pemerintah di Desa
1.1.4	[illegible]	Terfasilitasinya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 Laporan	30.000.000	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 Laporan	150.000.000	[illegible]
1.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Unit	115.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Unit	2.700.000.000	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Anggaran				8.000.000.000	Total			12.000.000.000	

Kepala Desa Pembentukan Disetujui dan Desa,
Kecamatan [illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari tabel 2.8 (T-C-31) tentang review rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 4 program dengan 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sesuai Pagu Indikatif Penyesuaian sebesar Rp. 8.003.062.553,-.

Berdasarkan hasil reviu sesuai analisis kebutuhan dana, maka anggaran yang diperlukan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2025 adalah sebesar *Rp.12.0298.838.500-,* penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar *Rp. 4.026.775.947,-*.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan (Musrenbang) di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengakomodir usulan masyarakat dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Adapun arah kebijakan nasional yang melekat pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dsesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah :

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Progrm Peningkatan Peningkatan Kerja sama antar Desa
- Program Pemerintahan Administrasi Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 sebagai dokumen pengganti terhadap RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Secara umum ada beberapa rumusan tujuan yang menjadi acuan dalam menetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan dokumen RPD, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam **Tujuan 1** Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dengan **Sasaran 1** Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta **Tujuan 4** Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan **sasaran 10** Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional dan arah kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP SKPD BB (78,50)
2. Persentase desa yang berkinerja baik dengan target 23,36%
3. Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan terget 24,66 %

Selain itu hasil kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 Antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2025
1	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	1000 Lembaga	-	214	11 Lembaga
2	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	1500 Desa	-	8 Desa	8 Desa
3	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	3000 Desa	-	214 Desa	1 Desa
4	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	800 Desa	-	214 Desa	10 Desa
5	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	4350 Orang	-	1307 Orang	30 Orang
6	Persentase Desa Mandiri	19.64 %	-	2,3%	2,6%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	10,88 %	-	3%	3%
8	Persentase BUM Desa Maju	8,28%	-	0,46 %	5%

b. Sasaran :

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Terukur, Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang diukur dengan persentase desa yang berkinerja baik;
2) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan desa dan kelurahan;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Kinerja Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 meliputi :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 4 sub kegiatan :
   1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
   3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran.
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerahpada perangkat daerah, dengan 1 Sub Kegiatan :
   1. Koordinasi dan penilaian barang milik Daerah SKPD
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan:
   1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
   2. Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan,yaitu :
   1. Penyediaan bahan Logistik Kantor;
   2. Fasilitasi Kunjungan tamu
   3. Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu :
   1. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2) Program peningkatan kerjsama antar Desa

i. Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa

1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

j. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pembinaan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
5. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
6. pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa
7. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa
8. Penyusunan Profil Desa
9. Fasilitasi pengelolaan aset desa
10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
11. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
12. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

k. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

1. Fasilitasi penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
3. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakatdan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
4. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Keluarga

Pada tahun 2025 ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan akan melaksanakan 4 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 Kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 12.029.838.500,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 5.441.584.730,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 6.588.253.770,- Adapun rumusan rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesavKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tercantum pada tabel 4.1. berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1 (T-C-33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 13 01	**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Kualitas kinerja dan capaian keuangan daerah 2. Persentase tata kelola administrasi Umum dan Kepegawaian 3. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu 4. persentase BMD yang siap pakai**		**100%**	**5,441,584,730**	**APBD**		**100%**	**5,568,194,190**
2 13 01 2 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***11,142,100***	***APBD***		***100%***	***29,311,000***
2 13 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMD Kab. HSU	6 dok	3,990,700	APBD		6 Dok	8,724,000
2 13 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. HSU	5 laporan	7,151,400	APBD		5 laporan	20,587,000
2 13 01 2 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD***		***100%***	***4,484,696,380***			***100%***	***4,487,015,930***
2 13 01 2 02 03	Penyusunan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. HSU	23 orang/Bulan	4,476,237,130	APBD		32 orang/bulan	4,476,237,130
2 13 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. HSU	1 dokumen	1,957,050	APBD		1 dokumen	2,688,250
2 13 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	DPMD Kab. HSU	2 laporan	4,402,400	APBD		2 laporan	2,688,250
2 13 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	DPMD Kab. HSU	18 laporan	2,099,800	APBD		18 laporan	5,402,300

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 13 01 2 03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***5,999,600***	***APBD***		***100%***	***5,999,600***
2 01 2 03 03	Koordinasi dan Penialian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah pada SKPD	DPMD Kab. HSU	1 laporan	5,999,600	APBD		1 laporan	5,999,600
2 01 2 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***8,719,600***	***APBD***		***100%***	***9,469,850***
2 13 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	DPMD Kab. HSU	-	7,500,000	APBD		1 jenis	8,250,000
2 13 01 2 05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penialaian kinerja pegawai	DPMD Kab. HSU	1 dok	1,219,600	APBD		100%	1,219,850
2 13 01 2 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terlaksananya administrasi Umum SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***625,360,910***	***APBD***		***100%***	***687,259,910***
2 13 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	DPMD Kab. HSU	4 paket	10,685,810	APBD		100%	52,581,260
2 13 01 2 06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	DPMD Kab. HSU	4 paket	52,260,300	APBD		100%	50,781,400
2 13 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	DPMD Kab. HSU	1 laporan	2,403,000	APBD		100%	3,405,250
2 13 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMD Kab. HSU	1 laporan	560,011,800	APBD		80%	580,492,000
2 13 01 2 07	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah***	***Persentase terlaksananya pengadaan BMD pada SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	**23,000,000**	***APBD***		***100%***	***39,219,000***
2 13 01 2 07 06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	DPMD Kab. HSU	3 Paket	23,000,000	APBD		4 Paket	39,219,000
2 13 01 2 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***203,832,800***	***APBD***		*100%*	***219,946,400***
2 13 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	DPMD Kab. HSU	1 laporan	1,650,600	APBD		1 laporan	2,650,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	DPMD Kab. HSU	1 laporan	72,063,800	APBD		1 laporan	77,178,000
2	13	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	DPMD Kab. HSU	1 laporan	130,118,400	APBD		1 laporan	140,118,400
2	***13***	***01***	***2***	***09***			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	***Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***78,833,340***	***APBD***		***100%***	***89,972,500***
2	13	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. HSU	1 unit	25,197,340	APBD		1 unit	40,250,000
2	13	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	DPMD Kab. HSU	19 unit	37,720,000	APBD		24 unit	49,722,500
2	13	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. HSU	15 unit	6,000,000	APBD		25 unit	14,268,750
2	13	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. HSU	1 unit	9,916,000	APBD		1 unit	8,330,000
2	**13**						**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2	**13**	**03**				**1.**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA**	**Persentase lembaga kerjasama antar desa yang aktif**	**DPMD Kab. HSU**	**100%**	**49,749,800**	APBD		**100%**	**100,000,000**
2	***13***	***03***	***2***	***01***		***1.1***	***Fasilitasi Kerja sama antar Desa***	***Persentase lembaga kerjasama antar desa yang aktif***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***49,749,800***	APBD		***100%***	***100,000,000***
2	13	03	2	01	01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	DPMD Kab. HSU	1 dok	23,290,000	APBD		1 dok	50,000,000
2	13	03	2	01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	DPMD Kab. HSU	1 dok	26,459,800	APBD		1 dok	50,000,000
2	**13**	**04**				**2.**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif**	**DPMD Kab. HSU**	**100%**	**3,337,080,520**				**3,442,730,645**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	***13***	***04***	***2***	***01***		***2.1***	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***1. Persentase desa yang menyampaikan LPPDes, LKPPDes, IPPDes, Laporan BPD dan Epdeskel 2. Persentase desa yang telah mempunyai perdes kewenangan desa dan penetapan batas desa 3. Persentase desa yang memiliki bumdes yang aktif***		**100%**	***3,337,080,520***				***3,442,730,645***
2	13	04	2	01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	DPMD Kab. HSU	1 dok	2,075,640,000	APBD		1 dok	2,170,000,000
2	13	04	2	01	03		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	DPMD Kab. HSU	1 dok	103,238,800	APBD		1 dok	103,238,800
2	13	04	2	01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	DPMD Kab. HSU	2 dok	71,999,900	APBD		2 dok	82,000,000
2	13	04	2	01	05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD Kab. HSU	214 orang	59,999,970	APBD		214 orang	65,000,000
2	13	04	2	01	06		Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	DPMD Kab. HSU	1 laporan	41,999,200	APBD		1 laporan	80,000,000
2	13	04	2	01	08		pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	Terselenggaranyaa pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerjasama antar desa	DPMD Kab. HSU	4 dok	263,464,580	APBD		4 dok	200,464,580
2	13	04	2	01	09		Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	DPMD Kab. HSU	1 laporan	81,632,330	APBD		1 laporan	81,632,330
2	13	04	2	01	11		fasilitasi penyusunan profil desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	DPMD Kab. HSU	1 dokumen	23,999,880	APBD		1 dok	23,999,880
2	13	04	2	01	13		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan aset desa	DPMD Kab. HSU	1 dok	48,111,720	APBD		1 dok	48,111,720
2	13	04	2	01	14		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD Kab. HSU	214 orang	88,655,580	APBD		214 orang	98,655,935

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	04	2	01	15		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	DPMD Kab. HSU	3 desa	334,627,470	APBD		40 desa	334,627,400
2	13	04	2	01	18		fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	DPMD Kab. HSU	1 dok	143,711,090	APBD		1 dok	155,000,000
2	**13**	**05**	**2**				**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**1. Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes**		**100%**	**3,201,423,450**				**2,386,363,100**
2	***13***	***05***	***2***	***01***			***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota***	***1. Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap 2. Persentase desa yang mempunyai posyantekdes***	***DPMD Kab. HSU***	***100%***	***3,201,423,450***	***APBD***			***2,386,363,100***
2	13	05	2	01	02		Fasilitasi penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terlaksananya penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	DPMD Kab. HSU	1 dok	89,936,000	APBD		1 dok	150,000,000
2	13	05	2	01	03		Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	DPMD Kab. HSU	1 Lembaga	133,687,350	APBD		1 Lembaga	250,000,000
2	13	05	2	01	05		fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakatdan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	Terlakananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakatdan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	DPMD Kab. HSU	1 dok	32,194,500	APBD		1 dok	40,000,000

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Proyeksi Thn 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x.xx.xx.x.xx.xx	Fasilitasi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan kehidupan sosial	Terfasilitasinya Fasilitasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan kehidupan sosial	DPMD Kab. HSU	2 laporan	150.269.800	APBD		2 laporan	151.000.000
x.xx.xx.x.xx.xx	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab. HSU	5 desa	2.758.335.800	APBD		5 desa	2.795.365.135
Jumlah Anggaran					12.023.838.500				11.697.387.935

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Utara

RAHMI MADE, SSTP.M.AP
NIP. 19840823 200212 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan Tabel 4.1 (T-C-33) rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 sebanyak 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan di Kabupaten, kecamatan, dan desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) kecamatan. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

a. Percepatan peningkatan status desa, yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan atau monitoring dan evaluasi tata kelola dana desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat tertata dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai regulasi yang berlaku yang pada gilirannya akan meningkatkan status desa itu sendiri.
b. Percepatan Penurunan Stunting, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembinaan Posyandu dan Pelatihan Kader Posyandu, serta melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, juga dengan mendorong penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan *Stunting* misalnya pada saat kegiatan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musdes) yang dilaksanakan di 20 (Dua puluh) desa.
c. Anggaran Responsif Gender, yaitu pada kegiatan Pembinaan untuk LKD Aktif di desa yang dilaksanakan di 50 (Lima Puluh) desa.
d. Penurunan Angka Kemiskinan, yaitu melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada lembaga Ketahanan Desa dengan meningkatkan peran RT, Posyandu, PKK Desa dan LPM serta karang taruna, selain itu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan atau monitoring dan evaluasi yang berlokasi di desa dengan mengutamakan desa-desa yang BUMdesa nya belum aktif dalam mengelola usahanya dan desa yang belum melakukan penyertaan modal dari dana desa sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai potensi yang

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ada di masyarakat yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian dari proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Selain *input* yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. *Input* dan proses akan memberikan *benefit* dan *impact* kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mencermati berbagai aturan pelaksanaan serta petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya.

Menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, maka untuk itu kami berharap Masukan atau Saran yang membangun dari berbagai pihak.

Amuntai, April 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

RIJALI HADI, SSTP.M.AP
NIP. 19840623 200212 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA
(RENJA)
2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU









PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) SKPD. Rancangan Awal Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD juga disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

(SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD pembangunan daerah Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Pereknomian yang diprioritaskan untuk Penanaman Modal dan Pelyanan perizinan dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Rancangan Awal Renja DPMPTSP, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan DPMPTSP Kab HSU;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
   j. Pembahasan forum;

Penyesuaian dokumen Rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Perumusan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target kinerja DPMPTSP;
   b. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per bidang;
   c. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi satu kesatuan utuh Renja DPMPTSP.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Awal (RANWAL) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (tentang Tahapan,) Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.
k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

L. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Bidang Ketenagakerjaan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program dimasa yang akan datang.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksad dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan anggaran sebesar Rp. **5.911.467.545,-** dengan realisasi sebesar Rp. **5.089.059.534,-** atau sebesar **86,09%**. Adapun hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
I.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**632.153.137,-**	**525.671.549,-**	**83,16%**
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	632.153.137,-	525.671.549,-	83,16%
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	632.153.137,-	525.671.549,-	83,16%
II.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**51.414.500,-**	**43.662.000,-**	**84,92%**
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	51.414.500,-	43.662.000,-	84,92%
	Sub Kegiatan Pelayanan Antarkerja	33.180.000,-	31.180.000,-	93,97%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18.234.500,-	12.482.000,-	68,45%
III.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**2.880.000,-**	**1.160.000,-**	**40,28%**
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.880.000,-	1.160.000,-	40,28%
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.880.000,-	1.160.000,-	40,28%
IV.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.615.894.658,-**	**4.077.896.664,-**	**88,34%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.750.000,-	13.245.000,-	89,80%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.750.000,-	13.245.000,-	89,80%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.031.845.000,-	3.534.189.852,-	87,66%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.031.845.000,-	3.534.189.852,-	87,66%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.334.500,-	170.907.993,-	98,03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.654.900,-	16.388.500,-	83,38%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.868.600,-	10.850.400,-	99,83%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.811.000,-	143.669.093,-	99,90%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.141.958,-	326.684.462,-	92,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.355.200,-	50.595.096,-	98,52%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.144.308,-	79.026.866,-	78,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.642.250,-	197.062.500,-	97,73%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.823.200,-	32.869.357,-	80,52%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.823.200,-	32.869.357,-	80,52%
V.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**56.236.750,-**	**55.184.000,-**	**98,13%**
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.236.750,-	55.184.000,-	98,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	56.236.750,-	55.184.000,-	98,13%
VI.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**27.000.000,-**	**26.862.150,-**	**99,49%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,-	26.862.150,-	99,49%
	Sub Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,-	26.862.150,-	99,49%
VII.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**7.430.000,-**	**7.387.000,-**	**99,42%**
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	7.430.000,-	7.387.000,-	99,42%
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.430.000,-	7.387.000,-	99,42%
VIII.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**494.777.400,-**	**328.309.071,-**	**78,59%**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	494.777.400,-	328.309.071	78,59%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	31.577.400,-	29.246.531	92,62%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	463.200.000,-	299.062.540,-	64,56%
IX.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**23.681.100,-**	**22.927.100,-**	**96,82%**
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	23.681.100,-	22.927.100,-	96,82%

	yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23.681.100,-	22.927.100,-	96,82%
	JUMLAH	**5.911.467.545,-**	**5.089.059.534,-**	**86,09%**

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja anggaran sebesar Rp. **5.089.059.534,-** dari anggaran sebesdar Rp. **5.911.467.545,-** atau sebesar **86,09%**. Dari realisasi **86,09%** tersebut realisasi pada Sub Kegiatan rata-rata sebesar 90% bahkan lebih. Realisasi yang rendah antara lain ada pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 64,56%, hal ini dikarenakan dana yang ada bersumber dari DAK Non Fisik yang anggarannya baru tersedia di Anggaran Perubahan, sehingga pencapaian realisasi anggaran terbatang waktu pelaksanaannya. Kemudian Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40,28% hal ini dikarenakan realisasinya bersifat insidentil yang mana apabila ada kejadian perselisihan hubungan industrial maka anggaran tersebut dapat direalisasikan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target Akhir Renstra	%
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	78	78,41	100,53	81	96,80
2.	Meningkatnya Investasi di daerah	Jumlah investasi yang direalisasikan (Rp. 000)	Rp. 20.000.000	Rp. 14.096.933	70,48	Rp. 80.000.000	17,62
3.	Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	77,50	89,29	110,23	82	108,89
4.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentasi pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan	2	3,64	166	8	45,50

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa kinerja pertama memiliki hasil yang sangat memuaskan dengan realisasi sebesar 103,68%. Untuk hasil kinerja kedua dengan realisasi kinerja 18,70%, ini menunjukan bahwa masih rendahnya daya serap dunia usaha terhadap angkatan kerja di daerah. Dan hasil kinerja yang ketiga sebesar 791,91% ini menujukan bahwa sangat tingginya realisasi dari investasi yang dilaporkan dunia usaha, dalam hal karena adanya kewajiban Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) dari BKPM RI.

Dari tabel di atas menunjukan kinerja SKPD yang sangat baik untuk 2 Kinerja Utama sedang 1 Kinerja Utama yang capaianya belum maksimal, sehingga masih banyak yang harus di laksanakan terutama yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan di Hulu Sungai Utara, yang mana merupakan keterkaitan dari segala sektor yang mempengaruhi dari rendahnya realisasi kinerja tersebut.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kedepannya agar kinerja yang kedua tersebut lebih baik lagi maka akan dilakukan peningkatan pelatihan tenaga kerja agar memenuhi standar dunia usaha, sehingga banyak menyerap tenaga kerja dari kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari :

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN	JUMLAH
1	NIB	4050
2	PBG	8
3	Izin Trayek	0
4	Izin Penutupan Jalan	36
5	Izin Usaha Tempat Parkir	31
6	Izin Mendirikan Rumah Sakit (mendirikan dan Operasional)	0
7	Izin Apotik	1
8	Izin Toko Obat	0
9	Izin Optikal	0
10	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0
11	Izin Klinik (mendirikan dan operasional)	2
12	Izin Laboratorium Klinik Pratama	0
13	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang	0
14	Izin Praktek Dokter Umum	31
15	Izin Dokter Internship	8
16	Izin Praktek Dokter Gigi	18
17	Izin Dokter Gigi Internship	1
18	Izin Dokter Spesialis	9
19	Izin Rekam Medik	2
20	Izin Praktek Psikologi Klinis	0
21	Izin Praktek Bidan	64
22	Izin Praktek Perawat	137
23	Izin Praktek Perawat Gigi	0
24	Izin Praktek Refraksionis dan Optisien	1
25	Izin Praktek Fisioterapis	0
26	Izin Praktek Tenaga Gizi	22
27	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	21
28	Izin Praktek Ahli Teknis Kefarmasian	26
29	Izin Praktek Apotiker	28
30	Izin Praktek Apotiker Pendamping	3
31	Izin Praktek Radiografer	6
32	Izin Praktek Sanitarian	10
33	Izin Praktek Perawat Anastesi	0
34	Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut	6
35	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

36	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat	3
37	Izin Praktek Tenaga Elektromedis	0
38	Izin Praktek Terapis Wicara	0
39	Izin Praktek Optometris	0
40	Izin Praktek Ortosis Prostesis	0
41	Izin Praktek Tukang Gigi	0
42	Izin Terdaftar Penyehat Tradisional	0
43	Izin Praktek Okupasi Terapis	0
44	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	0
45	Izin Unit Transfusi Darah, Bank Darah dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah	21
46	Izin REKLAME	8
47	Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang	0
48	Izin Penggilingan Padi/PHPB	0
49	Izin Praktek Dokter Hewan	0
50	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	0
51	Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
52	Izin Mendirikan Lembaga Kursus/Pelatihan (LKP)	0
53	Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal	0
54	Izin Mendirikan Sekolah Dasar (swasta)	0
55	Izin Mendirikan SLTP (swasta)	4550
	JUMLAH	

NO.	JENIS PELAYANAN NON PERIJINAN	JUMLAH
1	Kartu Pencari Kerja AK-I	584
2	TDUP	1
3	TDG – Tanda Daftar Gudang	64
4	TDI/UI	0
	JUMLAH	649

Dari data tabel diatas jumlah pelayanan perizinan yang diterbitkan sebanyak 4550 buah dan jumlah pelayanan non perizinan sebanyak 649 buah. Dari Pelayanan Perizinan jumlah terbanyak adalah izin Praktek Perawat sebanyak 137 buah atau 3,01% dan Pelayanan Non Perizinan jumlah terbanyak adalah Kartu Pencari Kerja/AK1 sebanyak 584 buah atau 89,98%.

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih di dominasi bidang UMKM, belum ada sektor Produksi dan Pengolahan skala besar;
2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam pengurusan perizinan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dan non perizinan dalam berusaha;

3. Masih sangat kurangnya dunia usaha dalam hal penyerapan tenaga kerja;
4. Masih belum tersedianya data penganggaran terbuka yang secara detil;
5. Jaringan internet yang tidak memadai;
6. Tidak adanya SDM yang memiliki kemampuan pengelolaan Teknologi Informasi;
7. Kurangnya instruktur LPK Swasta yang kompeten dan bersertifikat;
8. Banyaknya UMKM yang kurang mendapatkan pelatihan dalam hal kelayakan produk;
9. Masih rendahnya serapan tenaga kerja;
10. Masih rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja;
11. Kurangnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan kurangnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial;
12. Seringnya mendapatkan laporan terjadinya perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja/perusahaan.

2.4 Review Pada Ranwal RKPD

Karena masih belum terbitnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang menyediakan pagu indikatif anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga kami mengambil pagu berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 7.605.215.777,- dan ada penambahan sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga total pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp. 7.905.215.777,-

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

TABEL TC.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Amuntai	Nilai SAKIP SKPD	80.00	6,224,569,020.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Amuntai	Nilai SAKIP SKPD	80.00	6,224,469,340.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Amuntai	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	100%	35,000,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Amuntai	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	100%	34,962,500.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Amuntai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	35,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Amuntai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	34,962,500.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Amantal**	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**5,336,928,070.00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Amantal**	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**5,336,928,070.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Amantal**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Amantal**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Amantal**	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**100%**	**467,194,750.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Amantal**	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**100%**	**459,901,970.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Amantal**	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	6,750,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Amantal**	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	6,218,510.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Amantal**	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	20,944,750.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Amantal**	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	20,884,110.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Amantal**	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	35,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Amantal**	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	34,999,900.00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Amantal**	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	405,000,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Amantal**	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	357,749,440.00	Memenuhi kebutuhan listrik/pelatihan ASN
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Amantal**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**70,000,000.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Amantal**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**100%**	**70,000,000.00**	
	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	**Amantal**	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	7 Unit	70,000,000.00	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	**Amantal**	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	7 Unit	70,000,000.00	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Amantal**	**Realisasi laporan**	**100%**	**270,460,200.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Amantal**	**Realisasi laporan**	**100%**	**265,407,400.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	38,700,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	38,700,000.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	135,760,200.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	135,760,900.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan	106,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Amantal**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan	100,968,500.00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Amantal**	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**45,000,000.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Amantal**	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**97,270,000.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Basantal**	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	35,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Amantal**	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	87,270,000.00	Menyesuikan dengan Ketentuan yang berlaku tentang biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	**Amantal**	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelhara	30 Unit	10,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	**Amantal**	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelhara	30 Unit	10,000,000.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Amanat	Investasi yang direalisasikan	20 Milyar	90,614,648.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Amanat	Investasi yang direalisasikan	20 Milyar	90,598,150.00	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	100%	90,614,648.00	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	100%	90,598,150.00	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Amanat	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	2 Kegiatan Usaha	37,577,400.00	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Amanat	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	2 Kegiatan Usaha	37,577,400.00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Amanat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	8 Pelaku Usaha	28,037,248.00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Amanat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	8 Pelaku Usaha	28,037,000.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Amuntal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan usaha dan Pelaku Dilakukan inspeksi Lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	25 Kegiatan Usaha	25,000,000.00	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Amuntal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan usaha dan Pelaku Dilakukan inspeksi Lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	25 Kegiatan Usaha	24,999,750.00	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Amuntal	Persentasi Peluang Usaha yang dapat dipromosikan	100%	64,086,750.00	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Amuntal	Persentasi Peluang Usaha yang dapat dipromosikan	100%	64,084,700.00	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amuntal	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	1 Peluang Usaha	64,086,750.00	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amuntal	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	1 Peluang Usaha	64,084,700.00	
	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Amuntal	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	64,086,750.00	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Amuntal	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	64,084,700.00	
4.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Amuntal	Persentasi Kegiatan Investasi yang dapat diikuti	100%	27,000,000.00	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Amuntal	Persentasi Kegiatan Investasi yang dapat diikuti	100%	26,998,000.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	2 Kegiatan	27,800,000.00	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	2 Kegiatan	26,998,000.00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Amanat	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27,800,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Amanat	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	26,998,000.00	
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Amanat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	224,894,500.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Amanat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	224,776,000.00	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Terealisasinya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	100%	224,894,500.00	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Amanat	Terealisasinya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	100%	224,776,000.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Amantal	Jumlah Kegiatan Usaha yang memiliki pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	30 Kegiatan Usaha	224.834.560.00	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Amantal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	30 Kegiatan Usaha	224,776,000.00	
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Amantal	**Persentasi Ketersediaan Data dan Informasi yang Terintegrasi**	100%	90,000,000.00	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Amantal	**Persentasi Ketersediaan Data dan Informasi yang Terintegrasi**	100%	89,973,850.00	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Amantal	**Persentasi Data dan Informasi yang disediakan**	100%	90,000,000.00	**Kegiatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Amantal	**Persentasi Data dan Informasi yang disediakan**	100%	89,973,850.00	
	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Amantal	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	90,000,000.00	Sub Kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Amantal	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	89,973,850.00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

7.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing**	**2%**	**702,008,008.00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Amuntai**	**Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing**	**2%**	**1,157,936,768.00**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Amuntai**	**Persentasi tenaga kerja bersertifikat keahlian**	**33%**	**661,968,000.00**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Amuntai**	**Persentasi tenaga kerja bersertifikat keahlian**	**33%**	**1,156,968,768.00**	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Kluster kompetensi	**Amuntai**	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	144 Orang	661,968,000.00	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	**Amuntai**	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	144 Orang	1,156,968,768.00	Memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin untuk pelatihan serta mengakomodir usulan desa terkait pelatihan
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	**Amuntai**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**100%**	**16,000,000.00**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**Amuntai**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**100%**	**15,999,000.00**	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Amuntai**	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina	12 Lembaga	16,000,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Amuntai**	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina	12 Lembaga	15,999,000.00	
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	**Amuntai**	**Terealisasinya pelaksanaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**100%**	**25,000,000.00**	**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**Amuntai**	**Terealisasinya pelaksanaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**100%**	**24,971,000.00**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	**Amuntai**	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	5 Perusahaan	25,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	**Amuntai**	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	5 Perusahaan	24,971,000.00	

8.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Amuntai	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2%	110,936,463.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Amuntai	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2%	110,908,000.00	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Amuntai	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	100%	110,936,463.00	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Amuntai	Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja	100%	110,908,000.00	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	Amuntai	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	30 Orang	43,216,675.00	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	Amuntai	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	30 Orang	43,200,000.00	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Amuntai	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75 Orang	67,719,788.00	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Amuntai	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75 Orang	67,708,000.00	
9.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Amuntai	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	4%	70,237,788.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Amuntai	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan	4%	69,927,200.00	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Amuntai	Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan	100%	25,000,000.00	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Amuntai	Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan	100%	24,693,000.00	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Amuntai	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	5 Laporan	20,000,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Amuntai	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	5 Laporan	24,690,000.00	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota	**Amuntai**	**Termediasinya perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**45,237,788.00**	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota**	**Amuntai**	**Termediasinya perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**45,237,800.00**	
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah perselisihan yang di cegah	1 Perkara	45,237,788.00	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Amuntai**	Jumlah perselisihan yang di cegah	1 Perkara	45,237,800.00	
					7,605,215,777.00					**8,049,672,606.00**	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

Dari Hasil usulan musyawarah yang telah masuk kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk usulan tahun 2025 sesuai daftar di bawah ini :

No.	Pengusul	Desa	Permasalahan	Usulan	Alamat Pengusul
1.	Sarpani	Desa Kemuning Kecamatan Haur Gading	Guna meningkatkan perekonomian dan kebiasaan masyarakat Desa Kemuning	Pelatihan Teknik AC Split	Desa Kemuning Kecamatan Haur Gading
2.	Muhammad Muwardi, S.Sos	Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang	Kurangnya keterampilan kelompok perempuan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang
3.	M. Abdul Kadir	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara	Peningkatan Bumdes Perwetakan dengan Pelatihan Desain Grafis	Pelatihan Desain Grafis	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara
4.	M. Abdul Kadir	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara	SDM di bidang menjahit dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk menjalankan usaha di bidang menjahit	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara
5.	H. Rusdi	Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara
6.	Hamrani	Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara	Pelatihan Pengoperasian Komputer bagi Masyarakat Desa Panangkalaan	Pelatihan Pengoperasian Komputer Dasar	Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara
7.	Bahruddin	Desa Garunggang Kecamatan Banjang	Untuk meningkatkan pemahaman tentang pengoperasian komputer/laptop	Pelatihan Pengoperasian Komputer Dasar	Desa Garunggang Kecamatan Banjang
8.	Bambang Hermansyah	Desa Pawalutan Kecamatan Banjang	Kurangnya pengalaman yang dimiliki	Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional	Desa Pawalutan Kecamatan Banjang
9.	Mahyiddin	Desa Palanjungan Sari	Untuk meningkatkan SDM dan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Palanjungan Sari

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Kecamatan Banjang	mengurangi angka pengangguran di desa Palanjangan Sari		Kecamatan Banjang
10.	Rijali Rahman	Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah	Pengangguran merupakan masalah utama masyarakat pedesaan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah
11.	Rijali Rahman	Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah	Pengangguran merupakan masalah utama masyarakat pedesaan	Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional	Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah
12.	Muhyin	Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan	Kain Sasirangan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan

Dari 12 (dua belas) usulan desa yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka hanya 3 (tiga) usulan desa yang dapat diterima dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal karena keterbatasan perlatan dan instruktur pelaksana di Balai Latihan Kerja Amuntai.

Dari 3 (tiga) usulan yang diterima tersebut memerlukan anggaran biaya Rp. 65.00.000,- per paket pelatihan dengan jumlah keseluruhan biaya sebesar Rp. 195.000.000,-

Adapun kegiatan pelatihan usulan desa yang dapat diterima dan dilaksanakan seperti daftar di bawah ini :

No.	Pengusul	Desa	Permasalahan	Usulan	Alamat Pengusul
1.	Muhammad Muwardi, S.Sos	Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang	Kurangnya keterampilan kelompok perempuan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Sungai Bahadangan Kecamatan Banjang
2.	M. Abdul Kadir	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara	Peningkatan Bumdes Percetakan dengan Pelatihan Desain Grafis	Pelatihan Desain Grafis	Desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara
3.	Muhyin	Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan	Kain Sasirangan	Pelatihan Menjahit Dasar	Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah sasaran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, maka sejalan dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran ketiga adalah Meningkatnya Investasi, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang penanaman modal.

Kemudian menelaah sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka sejalan dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban dua urusan sekaligus yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal.

Tujuan yang termuat dalam Rencana Strategis yang ingin di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya peluang usaha penunjang investasi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Penciptaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja.

2.18.01.2.07.0005	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya	Kumulatif	7 Unit	70,000,000.00	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainya	APBD		7 Unit	70,000,000.00
2.18.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi laporan**	**Kumulatif**	**100%**	**270,446,200.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**270,446,200.00**
2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kumulatif	12 Laporan	38,700,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	APBD		12 Laporan	38,700,000.00
2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dimediakan	Kumulatif	12 Laporan	125,746,200.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	APBD		12 Laporan	125,746,200.00
2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dimediakan	Kumulatif	36 Laporan	106,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD		36 Laporan	105,000,000.00
2.18.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin**	**Kumulatif**	**100%**	**45,000,000.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**45,000,000.00**
2.18.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kumulatif	30 Unit	15,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD		30 Unit	15,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.18.01.2.05.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Amuntai	20 Unit	10,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	APBD		30 Unit	10,000,000.00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Investasi yang direalisasikan**	**Amuntai**	**20 Milyar**	**90,614,648.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**APBD**		**20 Milyar**	**90,614,648.00**
2.18.05.2.01	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal**	**Amuntai**	**100%**	**90,614,648.00**	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**APBD**		**100%**	**90,614,648.00**
2.18.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pengelolaan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Amuntai	2 Kegiatan Usaha	27,577,400.00	Sub Kegiatan Pengelolaan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	APBD		2 Kegiatan Usaha	27,577,400.00
2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Amuntai	8 Pelaku Usaha	28,037,248.00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	APBD		8 Pelaku Usaha	28,037,248.00

2.18.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan usaha dari Pelaku Ditakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan evaluasi perolehan kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Amanta	25 Kegiatan Usaha	25,000,000.00	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	APBD		25 Kegiatan Usaha	25,000,000.00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentasi Peluang Usaha yang dapat dipromosikan	Amanta	100%	68,086,750.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	APBD		100%	68,086,750.00
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan	Amantal	1 Peluang Usaha	68,086,750.00	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	APBD		1 Peluang Usaha	80,086,750.00
2.18.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Amantal	1 Dokumen	68,086,750.00	Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	APBD		1 Dokumen	68,086,750.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentasi Kegiatan Investasi yang dapat diikuti	Amantal	100%	27,000,000.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	APBD		100%	27,000,000.00
2.18.03.2.05	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan promosi yang dapat diikuti	Amantal	2 Kegiatan	27,000,000.00	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	APBD		2 Kegiatan	27,000,000.00

2.18.09.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Amanat	1 Dokumen	27,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	APBD		1 Dokumen	27,000,000.00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Amanat**	**81 Poin**	**224,804,500.00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**APBD**		**81 Poin**	**224,804,500.00**
2.18.04.2.01	**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terealisasinya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu**	**Amanat**	**100%**	**224,804,500.00**	**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**APBD**		**100%**	**224,804,500.00**
2.18.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tetap Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Amanat	30 Kegiatan Usaha	224,804,500.00	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	APBD		30 Kegiatan Usaha	224,804,500.00
2.18.09	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentasi Ketersediaan Data dan Informasi yang Terintegrasi**	**Amanat**	**100%**	**90,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**APBD**		**100%**	**90,000,000.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.18.06.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Data dan informasi yang disediakan**	**Amount**	**100%**	**90,000,000.00**	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**APBD**		**100%**	**90,000,000.00**
2.18.06.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah dikaji dan dimanfaatkan	Amount	6 Dokumen	90,000,000.00	Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	APBD		6 Dokumen	90,000,000.00
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2.07.01	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing**	**Amount**	**2%**	**1,002,958,008.00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**APBD**		**2%**	**1,002,958,008.00**
2.07.01.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentasi tenaga kerja bersertifikat kejuliran**	**Amount**	**33%**	**961,958,008.00**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**APBD**		**33%**	**961,958,008.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.07.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	Anumtal	144 Orang	961,968,608.00	Sub Kegalan Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	APBD		144 Orang	961,968,608.00
2.07.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**Realisasi pembinaan lembaga kerja swasta**	**Anumtal**	**100%**	**16,000,000.00**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta**	**APBD**		**100%**	**16,000,000.00**
2.07.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Anumtal	12 Lembaga	16,000,000.00	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	APBD	Memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin untuk pelatihan	12 Lembaga	16,000,000.00
2.07.03.2.03	**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**Terealisasinya pelaksanaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil**	**Anumtal**	**100%**	**25,000,000.00**	**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**APBD**		**100%**	**25,000,000.00**
2.07.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Anumtal	5 Perusahaan	25,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	APBD		5 Perusahaan	25,000,000.00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**	**Anumtal**	**2%**	**110,934,463.00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**APBD**		**2%**	**110,934,463.00**
2.07.04.2.01	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja**	**Anumtal**	**100%**	**110,934,463.00**	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**APBD**		**100%**	**110,934,463.00**

2.07.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AK	Amanat	30 Orang	43,214,675.00	Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja	APBD		30 Orang	43,214,675.00
2.07.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Amanat	75 Orang	67,719,788.00	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	APBD		75 Orang	67,719,788.00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan**	**Amanat**	**4%**	**70,237,788.00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**APBD**		**4%**	**70,237,788.00**
2.07.05.2.03	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengesahan PP/PKB di perusahaan**	**Amanat**	**100%**	**25,000,000.00**	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**APBD**		**100%**	**25,000,000.00**
2.07.05.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi serama hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi (antara lain [PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan UKS Bipartit] dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Amanat	5 Laporan	25,000,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi serama hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	APBD		5 Laporan	25,000,000.00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota	Termediasinya perselisihan hubungan industrial	Amunisi	100%	65,237,788.00	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota	APBD		100%	65,237,788.00
2.07.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	Amunisi	3 Perkara	65,237,788.00	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	APBD		3 Perkara	65,237,788.00
JUMLAH (Rp.)					7,965,215,777.00					7,965,215,777.00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD dan RPD. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2025 ini masuk pada tahapan ke-3 (Ketiga) dari dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Amuntai	80.00	6,224,569,020.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APBD		80.00	6,224,569,020.00
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	Amuntai	100%	35,000,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD		100%	35,000,000.00
2.18.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amuntai	12 Laporan	35,000,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	APBD		12 Laporan	35,000,000.00

2.18.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**Amanat**	**100%**	**5,336,928,070.00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**5,336,928,070.00**
2.18.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Amanat	462 Orang/Bulan	5,336,928,070.00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD		462 Orang/Bulan	5,336,928,070.00
2.18.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Realisasi paket penyediaan dan laporan**	**Amanat**	**100%**	**467,194,750.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**APBD**		**100%**	**467,194,750.00**
2.18.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Amanat	12 Paket	6,250,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	APBD		12 Paket	6,250,000.00
2.18.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Amanat	12 Paket	20,944,750.00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD		12 Paket	20,944,750.00
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Amanat	12 Paket	35,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	APBD		12 Paket	35,000,000.00
2.18.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amanat	55 Laporan	405,000,000.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	Memenuhi kebutuhan Barang/Pelatihan ASN	55 Laporan	405,000,000.00
2.18.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Realisasi pengadaan peralatan dan mesin**	**Amanat**	**100%**	**70,000,000.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**APBD**		**100%**	**70,000,000.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Outpat Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini adalah merupakan program tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hulu Sungai Utara. Di samping itu Renja juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Renja di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Dra. Hj. DAEUH BENGSU SUMARNI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641208 198503 2 007

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara 14

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKUPERINDAG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara..... 31

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

..... 32

BAB V PENUTUP 41

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

1. **Tabel T- C-29 Rekapitualasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan……. 6**

2. **Tabel T- C- 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara…….. 15**

3. **Tabel T- C- 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ……. 17**

4. **Tabel T- C- 32 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara …….. 28**

5. **Tabel T- C- 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026…… 34**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan dari bawah (*bottom up*) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga dari atas (*top down*) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Renja SKPD juga disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD pembangunan daerah Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Perekonomian yang diprioritaskan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi;
   b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

j. Pembahasan forum;

Penyesuaian dokumen Rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Perumusan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
   b. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per bidang;
   c. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi satu kesatuan utuh Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :02/M-IND/PER/1/2014 tetntang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (tentang Tahapan,) Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ttentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

l. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana trategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut,memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personeldan kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam upaya pencapaian misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan program dimasa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian RenstraDinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISKUPERINDAG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaganngan.

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10.501.186.118,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.473.101.090,00. Adapun rincian hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C-29

Rekapitualasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Program	Kegiaan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
a.		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.680.000,00**	**37.657.204,00**	97,36 %
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	38.680.000,00	37.657.204,00	97,36 %
b.		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.906.645.000,00**	**3.495.718.991,00**	71,24 %
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.906.645.000,00	3.495.718.991,00	71,24 %
c.		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**48.050.000,00**	**47.568.000,00**	99,00 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	13.000.000,00	12.900.000,00	99,23 %
		Sub Kegatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.050.000,00	34.668.000,00	98,91 %
d.		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**495.324.183,00**	**434.176.534,00**	**87,66 %**
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.399.800,00	12.417.600,00	80,63 %
		Sub Kegiatan Penyedia JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.231.308,00	102.568.809,00	66,94 %
		Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.716.075,00	116.407.525,00	94,09 %
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.977.000,00	202.782.600,00	99,90 %
e.		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.310.950,00**	**123.689.850,00**	**97,16 %**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.913.250,00	50.810.850,00	94,25 %
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	13.750.000,00	13.650.000,00	99,27 %
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.647.700,00	59.229.000,00	99,30 %
2.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				
a.		**Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya Dalam Daerah**	**11.610.000,00**	**11.006.000**	**94,80 %**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Kabupaten/ Kota			
		Sub Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	11.610.000,00	11.006.000	94,80 %
3.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				
a.		**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**11.610.000,00**	**7.815.000**	**67,31 %**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11.610.000,00	7.815.000	67,31 %
4.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				
A		**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**101.930.000,00**	**98.738.000**	**96,87 %**
		Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	101.930.000,00	98.738.000	96,87 %
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	**206.529.650,00**	**201.240.550,00**	**97,44 %**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
A		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	6.300.000,00	5.159.000,00	81,89 %
B		Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	15.319.900,00	14.228.500,00	92,88 %
C		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.525.000,00	20.441.000,00	99,59 %
D		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	164.384.750,00	161.412.050,00	98,19 %
6.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**775.577.775,00**	**753.281.463,00**	**97,13 %**
A		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	775.577.775,00	753.281.463,00	97,13 %
		Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**409.892.510,00**	**409.347.500,00**	**99,87 %**
A		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	409.892.510,00	409.347.500,00	99,87 %
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**1.946.711.000,00**	**550.366.000,00**	**28,27 %**
A		Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang	16.861.000,00	10.537.000,00	62,49 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
B		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.929.850.000,00	539.829.000,00	27,97 %
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**134.735.000,00**	**118.160.036,00**	**87,70 %**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	134.735.000,00	118.160.036,00	87,70 %
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**214.492.000,00**	**204.305.114,00**	**95,25 %**
A		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	214.492.000,00	204.305.114,00	95,25 %
10	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**1.025.758.050,00**	**936.170.848,00**	**1,27 %**
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	652.911.850,00	637.483.448,00	97,64 %
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	279.978.000,00	213.812.400,00	76,37 %
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	92.868.200,00	84.875.000,00	91,39 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
11	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**46,330,000**	**43.860.000,00**	**94,67 %**
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	46,330,000	43.860.000,00	**94,67 %**

Di lihat dari tabel di atas alokasi anggaran dana untuk belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 38.680.000,00 realisasi sebesar Rp. 37.657.204,00 atau 97, 36 %, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan kinerja dan laporan evaluasi.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp. 4.906.645.000,00 realisasi Rp. 3.495.718.991,00 atau 71,24%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp. 13.000.000,00 realisasi Rp. 12.900.000,00 atau 99,23%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan.

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran Rp. 35.050.000,00 realisasi Rp. 34.668.000,00 atau 98,91%, kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan konsultasi, makanan dan minuman rapat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dan tamu.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran Rp. 15.399.800,00 realisasi Rp. 12.417.600,00 atau 80,63%, kegiatan berupa surat masuk dan surat keluar yang disistribusikan sesuai peruntukkanya.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 15.399.800,00 realisasi Rp. 102.568.809,00 atau 66,94%, kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet serta langganan TV Kabel.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp. 123.716.075,00 realisasi Rp. 116.407.525,00 atau 94,09%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran Rp. 202.977.000,00 realisasi Rp. 202.782.600,00 atau 99,90%, kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan operasional kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran Rp. 53.913.250,00 realisasi Rp. 50.810.850,00 atau 94,25%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang dan pajak STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil dinas operasional atau lapangan.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. 13.750.000,00 realisasi Rp. 13.650.000,00 atau 99,27% kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemeliharaan Peralatan.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran 59.647.700,00 realisasi Rp. 59.229.000,00 atau 99,30%, kegiatan yang dilaksanakan berupa perbaikan gedung kantor.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Rp.11.610.000,00 realisasi Rp. 11.006.000,00 atau 94,80%, kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengawasan ketaatan dan ketangguhan Koperasi, KSP/ USP di Wilayah Kabupaten/ Kota.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Rp. 11.610.000,00 realisasi Rp. 7.815.000,00 atau 67,31%, kegiatan penilaian KSP/USP yang sehat dan berkualitas.

4. Program Pendidikan Pelatihan Perkoperasian

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi anggaran Rp. 101.930.000,00 realisasi Rp. 98.738.000,00 atau 96,87%, kegiatan berupa Bimbingan, Pelatihan, Penyuluhan mengenai pemahaman perkoperasian.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

a. Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro anggaran Rp. 6.300.000,00 realisasi Rp. 5.159.000,00 atau 81,89 %, kegiatan Pendataan terhadap keragaman jenis wirausaha

b. Sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, anggaran Rp. 15.319.900,00 realisasi Rp. 14.228.500,00 atau 92,98% kegiatan pemberdayaan UMKM melalui kemitraan.

c. Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro anggaran Rp. 20.525.000,00 realisasi Rp. 20.441.000,00 atau 99,59 %, kegiatan berupa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pembinaan terhadap pelaku usaha akan legalitas usaha/ perizinan.

d. Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro anggaran Rp. 164.384.750,00 realisasi Rp. 161.412.050,00 atau 98,19%, kegiatan berupa pemberian pelatihan terhadap Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan anggaran Rp. 775.577.775,00 realisasi Rp. 753.281.463,00 atau 97,13%, kegiatan berupa pengelolaan terhadap sarana Distribusi Perrdagangan

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

a. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan anggaran Rp. 409.892.510,00 realisasi Rp. 409.347.500,00 atau 99,87%, kegaiatan pengelolaan kebersihan dilingkungan pasar serta tertatanya keamanan dan ketertiban PKL

7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan anggaran Rp. 16.861.000,00 realisasi Rp. 10.537.000,00 atau 62,49% kegiatan berupa pendataan terhadap kestabilan Stok dan harga barang dan pokok dan barang penting di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara

b. Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota anggaran Rp. 1.929.850.000,00 realisasi Rp. 539.829.000,00 atau 27,97%, kegiatan operasi pasar murah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya tercapai 27,97% disebabkan karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 di bulan Desember 2023 khusus untuk pelaksaaan operasi pasar sehingga tidak bisa direalisasikan sebesar anggaran yang diterima, hanya sebesar Rp. 450.000.000,-. Karena hanya tersisa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

beberapa hari sebelum akhir tahun.

8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

   Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang anggaran Rp. 134.735.000,00 realisasi Rp. 118.160.036,00 atau 87,70% kegiatan berupa Pelayanan Unit Metrologi Legal, berupa tera ulang UUTP yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

   Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota anggaran Rp. 214.492.000,00 realisasi Rp. 204.305.114,00 atau 95,25%, kegiatan berupa Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berupa pameran promosi perdagangan

10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

    Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

    a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri anggaran Rp. 652.911.850,00 realisasi Rp. 637.483.448,00 atau 97,64%, kegiatan berupa pelatihan teknis, magang bagi IKM dan pameran.
    b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri anggaran Rp. 279.978.000,00 realisasi Rp. 213.812.400,00 atau 76,37%, kegiatan berupa pelatihan UPT produk industri daerah, magang bagi UPT dan hibah kepada kelompok IKM.
    c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat anggaran Rp. 92.868.200,00 realisasi Rp. 84.875.000,00 atau 91,39% kegiatan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada IKM

11. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional

    Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

    a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) anggaran Rp. 46.330.000,00 realisasi Rp.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

43.860.000,00 atau 94,67%, kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi pendataan.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah , Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

T-C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2026 (%)
1. Meningkatkan Implementasi Penerapan SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Diskuperindag	BB	BB (73,31)	100%	A (81)	90,5
2. Meningkatkan produksi IKM	Nilai Produksi	23.000.000.000,00	23,697,516,496 ,00	103.03	23.908.711.531,00	99,11
3. Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri	Persentase Pangsa Pasar untuk Pemasaran Produk Unggulan Daerah	50%	46%	92.00	65%	70,76
4. Meningkatkan Pembinaan	Persentase Koperasi Sehat	50%	41.07%	82.14	50%	82,14

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Terhadap Koperasi						
5. **Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku UMKM**	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	0.67%	1.03%	153.73	0.73%	141,06

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat dipastikan semua target dapat dicapai di atas 80%.

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah **berhasil.**

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaanlainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ;
2. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting ;
3. Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Pasar Tradisional ;
4. Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan bagi Pelaku UMKM ;
5. Peningkatan Pengawasan Koperasi ;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

2.4 Review pada Ranwal RKPD

Karena sudah terbitnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang menyediakan pagu indikatif awal anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 11.772.847.173 sedangkan kebutuhan anggaran pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 14.031.097.884 Perbedaan yang besar antara Anggaran di Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan Rancangan Awal RKPD masih terdapat kekurangan anggaran yang akan diusulkan dimana hal itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang tercantum

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dalam Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor untuk melengkapai sarana dan prasarana kerja.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan berupa Cetak Karcis untuk PKL dan Honorarium Petugas Pendataan Pedagang PKL se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota berupa Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar Murah berupa Barang yang akan di jual/ diserahkan kepada Masyarakat sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang berupa Pembelian Meja Tahan Getar + Kaki Meja untuk Laboratorium Metrologi, Bourjeu untuk Standar Pengujian Takaran Basah dan Kering, Troli Dorong dan Batu Bidur (Besi Cor (Hitam) Merek RC) untuk pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota berupa Pengenalan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah pada Tingkat Provinsi ataupun Nasional.
6. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat berupa sosialisasi penggunaan produk dalam negeri ke pelaku usaha.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	**Nilai SAKIP SKPD**	**A**	**7,935,594,908.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	Nilai SAKIP SKPD	**A**	**7,955,193,970.00**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. HSU**	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	**100%**	***55,870,000.00***	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. HSU**	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	**100%**	**55.639.000,00**	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi	6 Laporan	55,870,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi	6 Laporan	55.639.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentasi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	*6.150.801.310,00*	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. HSU**	Persentasi realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	**100%**	6,343,771,310.00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	6.150.801.310,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6.343.771.310,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab.HSU**	**Persentase realisasi Pegawai yang mengikuti Bimtek**	**100%**	***40.000.000,00***	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. HSU**	**Persentase realisasi Pegawai yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**112.225.000,00**	
	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Kab.HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Kab.HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	44.890.000,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	20.000.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	67.335.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab.HSU**	**Persentasi realisasi bahan logistik kantor**	**100%**	483,470,828.00	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.HSU**	**Persentasi realisasi bahan logistik kantor**	**100%**	**714.721.500,00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	37,000,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	284.553.500,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	446,470,828.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	430.168.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab.HSU**	Persentasi realisasi jasa kantor	**100%**	**971,107,295.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.HSU**	Persentasi realisasi jasa kantor	100%	**549,348,480.00**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	30,799,875.00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	61.148.130,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	215,569,295.00	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	183.960.700.00	
	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	301,738,125.00	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	0	
	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423,000,000.00	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.239.650,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab.HSU**	**Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**234,435,475.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.HSU**	**Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin**	**100%**	**179,488,680.00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	81,695,475.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	160,738,680.00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	47,650,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	18,750,000.00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Kab.HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil	100%	105,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Kab.HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Bangunan		itasi			Bangunan Lainnya					
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab. HSU	**Persentase KSP/USP, Koperasi yang Telah dilakukan Pemeriksaan**	**50%**	**11.600.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab. HSU	**Persentase KSP/USP, Koperasi yang Telah dilakukan Pemeriksaan**	**50%**	**11.482.000,00**	
	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. HSU**	**Jumlah koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan**	**28 Koperasi**	***11.600.000,00***	**Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. HSU**	**Jumlah koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan**	**28 Koperasi**	***11.482.000,00***	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Unit Usaha	11.600.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	28 Unit Usaha	11.482.000,00	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kab. HSU**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya**	**50%**	**11.600.000,00**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kab. HSU**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya**	**50%**	**11.592.500,00**	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. HSU**	**Jumlah Koperasi Sehat**	**30 Koperasi**	***11.600.000,00***	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. HSU**	**Jumlah Koperasi Sehat**	**30 Koperasi**	***11.592.500,00***	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian	30 Unit Usaha	11.600.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan	30 Unit Usaha	11.592.500,00	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya**	**50%**	**114.000.000,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya**	**50%**	**113.999.000,00**	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan Pelatihan**	**20 Koperasi**	***114.000.000,00***	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Koperasi yang diberikan pendidikan dan Pelatihan**	**20 Koperasi**	***113.999.000,00***	
	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 orang	114.000.000,00	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 orang	113.999.000,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Persentase UMKM Yang Dibina**		**218,259,750.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Persentase UMKM Yang Dibina**		**218,258,800.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan		**Jumlah UMKM yang Dibina**		***218,259,750.00***	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui**		**Jumlah UMKM yang Dibina**		***218,258,800.00***	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					**Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**					
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Lapora Basis Data	1 Laporan	17,561,422.00	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Lapora Basis Data	1 Laporan	17,561,400.00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Umkm	22,822,500.00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Umkm	22,822,400.00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80 UMKM	53,850,000.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80 UMKM	55,350,000.00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	124,025,828.00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	122,525,000.00	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Kab. HSU**	**persentase Sarana Distribusi Perdagangan**	**100%**	**1,703,210,739.00**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Kab. HSU**	**persentase Sarana Distribusi Perdagangan**	**100%**	**1,049,034,724.00**	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kab. HSU**	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan**		***614,845,707.00***	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. HSU**			***1.112,653,958.00***	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*24 Unit*	614,845,707.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kab. HSU**	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*24 Unit*	1.112,653,958.00	
	Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. HSU	**Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	100%	***1,088,365,032.00***	**Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		**Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	100%	***936,380,766.00***	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peng endalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*4 Dokumen*	1,088,365,032.00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	**Kab. HSU**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*4 Dokumen*	936,380,766.00	
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. HSU**	**persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	100%	**56,809,966.00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**KAB. HSU**	**persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	100%	**1,271,497,300.00**	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Kab. HSU**	**Jumlah Pemantauan harga dan stock bahan pokok**	***264 Laporan***	***56,809,966.00***	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**KAB. HSU**	**Jumlah Pemantauan harga dan stock bahan pokok**	***264 Laporan***	***1,271,497,300.00***	
	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	*264 Laporan*	25,291,966.00	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	264 Laporan	25,285,500.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Kec. 33 Kegiatan/ Kali	31,515,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Kec. 33 Kegiatan/ Kali	1,246,211,800.00	
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kab. HSU**	**Persentase pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU**	**100%**	**233,998,687.00**	**PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**KAB. HSU**	**Persentase pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU**	**100%**	**422,635,800.00**	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Kab. HSU**	**jumlah UTTP yang dilayani tera/ tera ulang atau pengawasan BDKT yang telah dilaksanakan**	1200 Unit	***233,998,687.00***	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. HSU**	**jumlah UTTP yang dilayani tera/ tera ulang atau pengawasan BDKT yang telah dilaksanakan**	1200 Unit	***422,635,800.00***	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.HSU	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera atau Tera Ulang	1200 Unit	233,998,687.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. HSU	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera atau Tera Ulang	1200 Unit	422,635,800.00	
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kab.HSU**	**Persentase pelaksanaan Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten**	**100%**	**145,962,423.00**	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. HSU	**Persentase pelaksanaan Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten**	**100%**	**635,621,000.00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		**jumlah promosi perdagangan yang diikuti**	*20 UMKM*	***145,962,423.00***	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab. HSU**	**jumlah promosi perdagangan yang diikuti**	*20 UMKM*	***635,621,000.00***	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	*20 UMKM*	145,962,423.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	*20 UMKM*	635,621,000.00	
10	**PROGRAM PEIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kab. HSU**	**persentase pelaksanaan Pendaftaran gudang**	**100%**	**14,418,200.00**	**PROGRAM PEIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Kab. HSU	**persentase pelaksanaan Pendaftaran gudang**	**100%**	**14,417,330.00**	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Kab. HSU**	**Jumlah Pemantauan dan pengawasan tanda Daftar Gudang**	50 Dokumen	**14,418,200.00**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Kab. HSU	**Jumlah Pemantauan dan pengawasan tanda Daftar Gudang**	50 Dokumen	**14,417,330.00**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Kab. HSU**	Jumlah Pendaftaran Gudang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	50 Dokumen	14,418,200.00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. HSU	Jumlah Pendaftaran Gudang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	50 Dokumen	14,417,330.00	
11	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase Peningkatan IKM**	**4,82%**	1,257,900,500.00	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase Peningkatan IKM**	**4,82%**	**1,257,874,910.00**	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pembangunan Industri**	**1 Dokumen**	***1,257,900,500.00***	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Pembangunan Industri**	**1 Dokumen**	***1,257,874,910.00***	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*10 Dokumen*	879,372,500,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*10 Dokumen*	879,363,750,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	*1 Dokumen*	239,220,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	*1 Dokumen*	239,218,160.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*5 Dokumen*	139,308,000.00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*5 Dokumen*	139,293,000.00	
12	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Informasi Data yang terupdate**	**100%**	**69,495,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Informasi Data yang terupdate**	**100%**	69,490,550.00	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Data IKM di HSU untuk mendukung SIINas**	*30 IKM*	***69,495,000.00***	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Data IKM di HSU untuk mendukung SIINas**	*30 IKM*	***69,490,550.00***	
	Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	69,495,000.00	Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	69,490,550.00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	JUMLAH TOTAL				Rp. 11,772,847,173.00	JUMLAH TOTAL		***Rp 14,031,097,884,00***			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

Dari Hasil usulan masyarakat yang telah masuk kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk usulan tahun 2025 sesuai daftar di bawah ini :

Tabel T-C-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pengusul	Usulan	Catatan
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Sungai Limas Kec. Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kelompok Pengrajin Berkah Rotan	Bahan baku kerajinan rotan besar	Usulan Masuk Langsung ke SKPD melalui Proposal
2			Kelompok Pengrajin Rotan Jaya	Bahan baku kerajinan rotan kecil	Usulan Masuk Langsung ke SKPD melalui Proposal
3			Kelompok Pengrajin Mekar Bambu	-Bahan baku kerajinan bambu	Usulan Masuk Langsung ke SKPD melalui Proposal
4		Desa Palimbang Sari RT.01 Kec. Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kelompok Sentra Kerajinan Palimbang Sari Berkarya	Mesin Tumbuk Purun	Usulan Masuk Langsung ke SKPD melalui Proposal
5		Jl. Tepian Sungai Tabalong Desa Harus Rt. 2 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu	Perkumpulan Kelompok Usaha Beruntung Jaya	-2 (dua) buah Mesin Saset Kulit -2 (dua) buah Mesin Jahit Cangklong - 2 (dua) buahMesin Jahit Typical Walking Foot 4 (empat) Mesin Jahit Typical	Usulan Masuk Langsung ke SKPD melalui Proposal

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Jumlah anggaran usulan Permohonan bantuan dari masyarakat

1. Usulan Permohonan Bantuan Bahan Baku Kerajinan Rotan Besar Kelompok Pengrajin Berkah Rotan Desa Sungai Limas RT. 002 Kecamatan Haur Gading yaitu 10.000 batang rotan besar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 69.000.000,-
2. Usulan Permohonan Bantuan Bahan Baku Kerajinan Rotan Kecil Pengrajin Rotan Jaya Desa Sungai Limas Kecamatan Haur Gading yaitu 5000 batang rotan paikat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.500.000,-
3. Usulan Permohonan Bantuan Bahan Baku Bambu Kelompok Pengrajin Mekar Bambu Desa Sungai Limas Kecamatan Haur Gading yaitu 3000 batang bambu dengan jumlah anggaran Rp. 48.000.000,-
4. Usulan Permohonan Bantuan Mesin Tumbuk Purun Desa Palimbang Sari Kecamatan Haur Gading dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.000.000,-
5. Usulan Permohonan Bantuan Mesin Penunjang Kreasi Anyaman Purun Perkumpulan Kelompok Usaha Beruntung Jaya Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah berupa mesin saset kulit, mesin jahit cangklong, mesin jahit typical walking foot dan mesin jahit typical dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 97.500.000,-

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2026-2029 salah satu pointnya adalah Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran keempat adalah Meningkatnya Koperasi Aktif, dan sasaran kelima adalah Pertumbuhan Pelaku UMKM, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang Koperasi dan UMKM.

Kemudian menelaah sasaran strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meningkatnya produksi industri kecil mikro, sehingga hal ini telah sejalan dengan kebijakan nasional tentang pengolahan non migas.

Menelaah sasaran strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020-2024 salah satu pointnya adalah Meningkatnya pasar produk dalam negeri, maka sejalan dengan itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai sasaran kedua adalah Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, disebutkan tujuan yang ingin di capai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Penerapan SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Meningkatkan produksi IKM

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri
4. Meningkatkan Pembinaan Terhadap Koperasi
5. Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku UMKM

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis yang ingin di capai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
2. Peningkatan nilai produksi
3. Meluasnya pemasaran produk unggulan dalam daerah
4. Meningkatnya Koperasi, KSP/ USP sehat
5. Pertumbuhan Pelaku UMKM

Keterkaitan antara Renstra K/L, RPD dan Renstra Diskuperindag

NO	Renstra K/ L	RPD Daerah	Renstra Diskuperindag
1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa	Meningkatkan produksi IKM
2.	Meningkatnya pasar produk dalam negeri		Meluasnya Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah di Dalam Negeri
3.	Menigkatkan daya saing Koperasi dan UMKM		Meningkatkan Pembinaan Terhadap Koperasi
			Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku UMKM

Dari tabel diatas sudah selaras antara Sasaran di Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 dan juga dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan peran anggaran pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan maka disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra. Pada penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini mengacu pada rancangan Renstra, RKPD dan RPD. Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2025 ini masuk pada tahapan ke-2 (Kedua) dari dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan Bidang/Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan								
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SKPD	KAB.HSU	A	**Rp 7,935,594,908**	APBD		A	**Rp 6,141,764,268**
3.31.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan	Kab. HSU	100%	***Rp 55,870,000***	APBD		*100%*	*Rp 67,044,000*
3.31.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	6 Laporan	Rp 55,870,000	APBD		6 Laporan	Rp 67,044,000
3.31.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	Kab. HSU	100%	**Rp 6,150,801,310**	APBD		100%	**Rp 6,150,801,310**
3.31.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	14 Bulan	Rp 6,150,801,310	APBD		14 Bulan	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.31.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek**	**Kab. HSU**	**100%**	Rp 40,000,000	**APBD**		**100%**	Rp 48,000,000
3.31.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. HSU	100%	Rp 20,000,000	**APBD**		100%	Rp 24,000,000
3.31.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	4 orang	Rp 20,000,000	**APBD**		4 orang	Rp 24,000,000
3.31.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi realisasi bahan logistik kantor**	**Kab.HSU**	**100%**	**Rp 483,470,828**	**APBD**		**100%**	Rp 424,265,640
3.31.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	15 Paket	Rp 37,000,000	APBD		15 Paket	Rp 54,400,000
3.31.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	45 Laporan	Rp 446,470,828	APBD		45 Laporan	Rp 369,865,640
3.31.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasi realisasi jasa kantor**	**Kab.HSU**	**100%**	**Rp 971,107,295**	**APBD**		**100%**	**Rp 1,102,861,003**
3.31.01.2.08	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	400 Laporan	Rp 30,799,875	APBD		400 Laporan	Rp 52,359,787
3.31.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. HSU	48 Laporan	Rp 215,569,295	APBD		48 Laporan	Rp 291,018,548
3.31.01.2.08.03	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	50 Laporan	Rp 301,738,125	APBD		50 Laporan	Rp 336,482,668

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.31.01.2.08.04	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	Rp 423,000,000	APBD		12 Laporan	Rp 423,000,000
3.31.01.2.09	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin**	**Kab.HSU**	**100%**	**Rp 234,345,475**	**APBD**		**100%**	**Rp 234,345,475**
3.31.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	4 Unit	Rp 81,695,475			4 Unit	Rp 81,695,475
3.31.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	75 Unit	Rp 47,650,000			75 Unit	Rp 47,650,000
3.31.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	100%	Rp 105,000,000			100%	Rp 105,000,000
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase KSP/USP, Koperasi yang Telah dilakukan Pemeriksaan**	Kab. HSU	**50%**	**11.600.000,00**			**50%**	**Rp 14,880,000**
2.17.03.2.01	***Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wil. anggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota***	**Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**	Kab. HSU	28 Koperasi	***11.600.000,00***			30 Koperasi	**Rp 14,880,000**
2.17.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kecamatan di Kab. HSU	28 Unit Usaha	11.600.000,00	APBD		28 Unit Usaha	Rp 14,880,000
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatannya**	**Kab. HSU**	**50%**	**11.600.000,00**	**APBD**		**30 Koperasi**	**Rp 20,970,000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.17.04.2.01	*Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Wil. Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota*	**Jumlah Koperasi Sehat**	**Kab. HSU**	30 Koperasi	11.600.000,00	APBD		*30 Koperasi*	Rp 20,970,000
2.17.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kecamatan di Kab. HSU	30 Unit Usaha	11.600.000,00	***APBD***		30 Unit Usaha	Rp 20,970,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya**	**Kab. HSU**	**50%**	114.000.000,00	APBD		**50%**	Rp 186,479,400
2.17.05.2.01	*Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wil. anggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota*	**Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan Pelatihan**	**Kab. HSU**	**20 Koperasi**	114.000.000,00	APBD		**20 Koperasi**	Rp 186,479,400
2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. HSU	80 orang	114.000.000,00	APBD		80 orang	Rp 186,479,400
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM yang dibina	Kab. HSU	0,71%	**218,259,750.00**	APBD		0,73%	**218,259,600.00**
2.17.07.2.01	*Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan*	Jumlah UMKM yang dibina	Kab. HSU	230 UMKM	**218,259,750.00**	APBD		300 UMKM	**218,259,600.00**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Laporan Basis Data	Kab. HSU	*1 Laporan*	17.561.422,00	APBD		*1 Laporan*	Rp 21,073,706
2.17.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. HSU	40 Umkm	22.822.500,00	APBD		40 Umkm	Rp 27,387,000
2.17.07.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. HSU	80 UMKM	53.850.000,00	APBD		*80 umkm*	Rp 64,620,000
2.17.07.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	*Kab. HSU*	100 Unit Usaha	124.025.828	APBD		*100 Unit Usaha*	Rp 148,830,994
3.30.02	PROGRAM PEIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaksanaan Pendaftaran gudang**	Kab. HSU	100%	14.418.200,00	APBD		100%	14.418.200,00
3.30.02.2.02	*Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	**Jumlah Pemantauan dan pengawasan tanda Daftar Gudang**	Kab. HSU	50 Dokumen	14.418.200,00	APBD		50 Dokumen	*14.418.200,00*
3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pendaftaran Gudang di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. HSU	50 Dokumen	14.418.200,00	APBD		50 Dokumen	14.418.200,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting**	*Kab. HSU*	100%	56,806,966.00	*APBD*		100%	56,806,966.00
3.30.04.2.02	*Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	**Jumlah Pemantauan harga dan stock bahan pokok**	Kab. HSU	264 Laporan	*56,806,966.00*	*APBD*		*48 Laporan*	*56,806,966.00*
3.30.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Kab. HSU	264 Laporan	25,291,966.00	APBD		*48 Laporan*	Rp 25,291,966

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Perdagangan							
3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	10 Kec. 33 Kegiatan/Kali	31,515,000.00	APBD		10 Kec.	31,515,000.00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU**	***Kab. HSU***	100%	**233,998,687.00**	*APBD*		100%	**233,998,687.00**
3.30.06.2.01	***Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	**jumlah UTTP yang dilayani tera/ tera ulang atau pengawasan BDKT yang telah dilaksanakan**	***Kab. HSU***	***1200 Unit***	***233,998,687.00***	*APBD*		1200 Unit	**233,998,687.00**
3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. HSU	1200 Unit	233,998,687.00	*APBD*		1200 Unit	233,998,687.00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaksanaan Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten**	Kab. HSU	100%	**145,962,423.00**	*APBD*		100%	**145,962,423.00**
3.30.07.2.01	***Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	**jumlah promosi perdagangan yang diikuti**	Kab. HSU	*20 UMKM*	***145,962,423.00***	*APBD*		*20 UMKM*	***145,962,423.00***
3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	Kab. HSU	*20 UMKM*	145,962,423.00	APBD		*20 UMKM*	145,962,423.00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**persentase Sarana Distribusi Perdagangan**	Kab. HSU	100%	**1,703,210,739.00**	APBD		100%	**1,703,210,739.00**
3.30.03.2.01	***Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi***	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan Terhadap Pengelola Sarana	Kab. HSU	*4 Dokumen*	***1,088,365,032.00***	APBD		*4 Dokumen*	***1,088,365,032.00***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Distribusi Perdagangan							
3.30.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. HSU	*4 Dokumen*	1,088,365,032.00	APBD		*4 Dokumen*	1,088,365,032.00
3.30.03.2.02	***Kegiatan pembangunan dan Pengelolaan saran distribusi perdagangan***	Persentase Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola	Kab. HSU	100%	***614,845,707.00***	APBD		100%	***614,845,707.00***
3.30.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dkelola	Kab. HSU	24 Unit	614,845,707.00	APBD		***24 Unit***	614,845,707.00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pendataan IKM untuk bahan Perencanaan dan Pembangunnan Industri**	**Kab. HSU**	**100%**	**1,257,900,500.00**	APBD			**1,881,603,500.00**
3.31.02.2.01	***Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***				***1,257,900,500.00***				***1,257,900,500.00***
3.31.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. HSU	*1 Dokumen*	879,372,500	APBD		*1 Dokumen*	879,372,500
3.31.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	Kab. HSU	*1 Dokumen*	239,220,000.00	APBD		*1 Dokumen*	239,220,000.00
3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. HSU	*1 Dokumen*	139,308,000.00	APBD		*1 Dokumen*	139,308,000.00
3.31.04.2.01	***Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk***				***69.450.000.00***				***69.450.000.00***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								
3.31.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		*10 Kecamatan*	69.450.000.00			*10 Kecamatan*	69.450.000.00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak pelaku- pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebiksanaan yang dimaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di samping itu Renja juga dapat memberikan umpat balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Renja di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruf staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Amuntai, April 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. KAMARUDIN, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19830806 200212 1 004

44

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya jua, Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen Rencana Kerja ini.

Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa yang akan datang, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Hulu Sungai Utara, Februari 2024

Kepala Dinas,

JONY RAKHMAN,ST,MT,MSc
Pembina
NIP. 19750609 200504 1 009

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 10

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2023..... 13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 13
A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 13
B. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2023 18
C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Tahun 2023 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 46

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 56
3.3. Program dan Kegiatan 58

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 61

V. PENUTUP 63

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian s/d Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara	8
Tabel 2.2.	Data media cetak nasional / lokal yang beredar di Hulu Sungai Utara	19
Tabel 2.3.	Data sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara	20
Tabel 2.4.	Data pemilik menara dan operator telekomunikasi yang beroperasi di Hulu Sungai Utara	22
Tabel 2.5.	Nama sub domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara	23
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026	25
Tabel 2.7.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara ……..	
Tabel 2.8.	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara …….	31
Tabel 2.9.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Tabel 2.10.	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025	47
Tabel 3.1.	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	54
Tabel 3.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ……	57

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1.	Cakupan layanan telekomunikasi di Hulu Sungai Utara	21
Gambar 2.2.	Grafik sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara	22
Gambar 2.3.	Data kepemilikan menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara	23
Gambar 2.4.	Monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi	28

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adanya peraturan perundang-undangan yang baru maka penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 selain mengacu pada Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 juga menyesuaikan dengan peraturan perundang-undagan tersebut khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Disamping itu, Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara harus terintegrasi dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, substansi Renja harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Pusat dan Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
n. Undang-Undangn Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

s. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.

u. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

x. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

y. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

z. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

aa. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;

bb. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

cc. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

dd. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

ee. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

ff. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

hh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;

ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika;

jj. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Startegis Pertahanan Nirmiliter;

kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

nn. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

rr. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

tt. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

uu. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;

vv. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

ww. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

xx. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;

yy. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

zz. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024;

aaa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;

bbb. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;

ccc. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Statistik Nasional;

ddd. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survey Statistik Sektoral;

eee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

fff. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

ggg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

hhh. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026;

iii. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

jjj. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0428/KUM/2018 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah DI Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

kkk. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

lll. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

mmm. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

nnn. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;

ooo. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

ppp. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

qqq. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tujuan Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.

rrr. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

sss. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

ttt. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pedoman mengenai arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah :

a. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.
b. Sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan**
  Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025**
  Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

- **BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
  Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Program dan Kegiatan;

- **BAB IV Rencana Kerja & Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara**
  Bab ini berisi Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan, Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan, Penjelasan jika Rumusan Program/Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dan Prakiraan Maju.

- **Bab V Penutup.**
  Bab ini berisi Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindaklanjut.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 85,25% yang termasuk dalam kategori predikat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 6.222.314.661,- atau sebesar 85,25% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 7.298.563.941,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023 uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

A. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran Rp. 50.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 39.666.000,00,- atau sebesar 79,33%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran Rp. 3.124.275.000,- realisasinya mencapai Rp. 2.414.060.331,-,- atau sebesar 77,27% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN, dari rencana anggaran Rp. 30.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 12.000.000,- atau sebesar 40,%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran Rp. 35.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 25.280.000- atau sebesar 73,23% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran Rp. 29.999.900,-,- realisasinya mencapai Rp. 27.628.000 atau sebesar 92,09% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Bahan/Material, dari rencana anggaran Rp. 20.275.250,00-,- realisasinya mencapai Rp. 20.177.530,00,- atau sebesar 99,52% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran Rp. 62.190.000,00,- realisasinya mencapai Rp. 61.123.000,- atau sebesar 98,28% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran Rp. 68.999.925,- realisasinya mencapai Rp. 63.277.000,- atau sebesar 91,63%, dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran Rp. 104.998.316,-,- realisasinya mencapai Rp. 96.706.640,- atau sebesar 92,10% dengan keluaran/realisasi fisik sesuai target yaitu 100%.
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran Rp. 30.000.000,-,- realisasinya mencapai Rp. 7.815.000,- atau sebesar 26,05%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari rencana anggaran Rp. 29.203.200,-,- realisasinya mencapai Rp. 26.247.000,-,- atau sebesar 89.88%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dari rencana anggaran Rp. 59.995.600,-- realisasinya mencapai Rp. 52.118.300,-,- atau sebesar 86,87%, dengan keluaran/realisasi fisik sebesar 100%.

2) Program Aplikasi Informatika 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran Rp. 550.693.600,-,- realisasinya mencapai Rp.499.843.866 ,-atau sebesar 90,77%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran Rp. 80.298.200,- realisasinya mencapai Rp. 72.650.000,-,- atau sebesar 90,48% dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dari rencana anggaran Rp. 119.692.200,- realisasinya mencapai Rp. 117.544.564,- atau sebesar 98,21% dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

3) Program Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 2.600.000,- realisasinya mencapai Rp. 2.100.000,- atau sebesar 80,77%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 687.595.300,- realisasinya mencapai Rp. 570.910.564,- atau sebesar 83,03%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 67.340.000,- realisasinya mencapai Rp. 66.090.000,- atau sebesar 98,14% dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pelayanan Informasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 317.119.400,- realisasinya mencapai Rp. 315.950.000,- atau sebesar 99,63%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Kegiatan Layanan Hubungan Media, dari rencana anggaran Rp. 1.524.385.850,- realisasinya mencapai Rp. 1.504.865.000,- atau sebesar 98,72%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dari rencana anggaran Rp. 30.690.000,- realisasinya mencapai Rp. 17.091.000,- atau sebesar 55,69%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dari rencana anggaran Rp. 61.640.000,- dengan keluaran/realisasi mencapai Rp. 58.745.197,- atau sebesar 95,30%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dari rencana anggaran Rp. 75.000.000,- realisasinya mencapai Rp. 67.903.000,- atau sebesar 90,54% dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dari rencana anggaran Rp. 24.159.600,- realisasinya mencapai Rp. 15.840.000 ,- atau sebesar 65,56%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 13.371.200,- realisasinya mencapai Rp. 8.522.000,- atau sebesar 63,73%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 108.022.400,- realisasinya mencapai Rp. 107.349.159,- atau sebesar 99,38%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dari rencana anggaran Rp. 18.655.600,- realisasinya mencapai Rp. 8.910.500,- atau sebesar 47,76%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 24.769.800,- realisasinya mencapai Rp. 22.176.420,- atau sebesar 89,53%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%;

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan Sub Kegiatan :

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran Rp. 32.593.600,- realisasinya mencapai Rp. 29.218.940,- atau sebesar 89,65%, dengan keluaran/realisasi fisik mencapai 100%.
-

B. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2023

Untuk Tahun anggaran 2023 ada program ataupun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang sudah disusun sebelumnya yakni :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi, dikarenakan recofusing pada perubahan anggaran tahun 2023.
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dikarenakan recofusing pada perubahan anggaran tahun 2023.

C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Tahun 2023

Selengkapnya lihat Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada Tabel 2.2. dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, ada beberapa item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu :

1. Media Massa Cetak Nasional/Lokal yang ada di daerah



Pelayanan dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media cetak seperti surat kabar, tabloid dan majalah nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terkait pelayanan langsung ke masyarakat berupa penyebarluasan informasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kemitraan berupa kerjasama publikasi/pemberitaan maupun liputan khusus dengan beberapa media cetak/elektronik yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hingga tahun 2023 media cetak nasional/lokal yang masuk dan beredar di Hulu Sungai Utara ada 12 judul, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Data media cetak nasional/ lokal yang beredar di Hulu Sungai Utara

No	Nama Media Cetak	Status	Alamat Redaksi
1	Kompas	Nasional	Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
2	Majalah Fakta	Nasional	Jl. Asem IV/12 Surabaya
3	Banjarmasin Post	Lokal	Jl. AS Musyaffa No. 16 Banjarmasin
4	Radar Banjarmasin	Lokal	Jl. A. Yani KM 26,900 Landasan Ulin Banjarbaru
5	Kalimantan Post	Lokal	Jl. DI Panjaitan No. 67 Banjarmasin
6	Barito Post	Lokal	Jl. Simpang Telawang No. 11 Banjarmasin
7	Kalsel Post	Lokal	Handil Bakti No. 01 A Batola
8	Aktual	Lokal	Jl. Kuin Utara No. 32 RT.16 Banjarmasin
9	Fokus Banua	Lokal	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Gg. Mufakat RT 01/08 Banjarmasin
10	Mata Banua	Lokal	Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 27 Banjarmasin

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

11	Demokrasi Plus	Lokal	Jl. H. Ali Gg. Rawa Indah RT. 5 Kelurahan Antasari Amuntai
12	Derap Kalimantan	Lokal	Jl. Mesjid Jami' No. 09 / 70 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin

2. Media Luar Ruang

Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang adalah berupa baliho, backdrop dan spanduk. Media luar ruang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa informasi kegiatan pemerintah daerah, ucapan selamat maupun himbauan kepada masyarakat.

3. Siaran Televisi Pemerintah Daerah



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengelola media penyiaran melalui televisi yaitu Kominfo TV. Kominfo TV bertahap akan diarahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu Amuntai TV yang saat masih dalam proses pengajuan ijin penyiaran.

4. Media Center



Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi melalui internet Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan ruang Media Center. Jumlah personal komputer (PC) yang disediakan sebanyak 6 (enam) unit dengan waktu pelayanan selama hari kerja mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita. Pelayanan diutamakan bagi pelajar dan mahasiswa.

5. Cakupan layanan telekomunikasi

Salah satu layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan telekomunikasi. Keberadaan sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan pendidikan. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan data/internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil segera dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus mempercepat pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

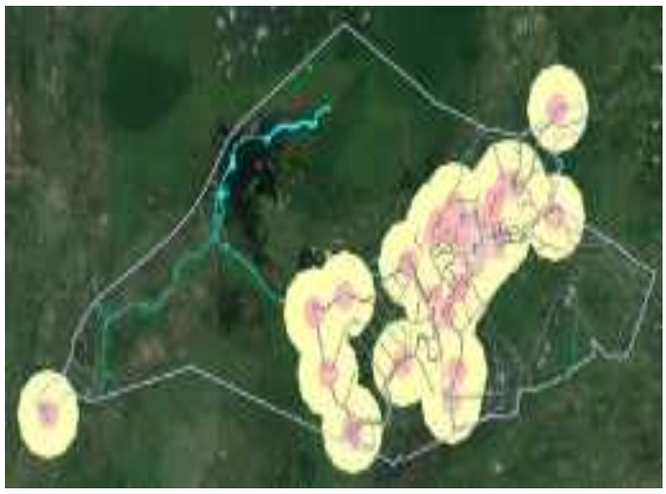
Dilihat dari luas wilayah, cakupan layanan telekomunikasi di Hulu Sungai Utara baru mencapai 64% pada tahun 2023. Di Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2023 baru terdapat 65 buah menara telekomunikasi yang tersebar di 10 kecamatan. Sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sedangkan cakupan layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Tabel 2.4. Data sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Menara
1	Amuntai Tengah	20
2	Amuntai Selatan	8
3	Amuntai Utara	8
4	Banjang	4
5	Babirik	5
6	Danau Panggang	4
7	Haur Gading	3
8	Paminggir	2
9	Sungai Pandan	9
10	Sungai Tabukan	2
Total		**65**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Gambar 2.1. Cakupan layanan telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



Di Hulu Sungai Utara terdapat 8 (delapan) perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan/ penyewaan menara telekomunikasi (tower provider). Menara tersebut umumnya diperuntukkan penempatan BTS milik perusahaan itu sendiri maupun disewakan kepada operator telekomunikasi (telco operator) lain. Di Hulu Sungai Utara terdapat 4 (empat) operator telekomunikasi yaitu Telkomsel, Indosat, XL, H3i. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi di Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5.

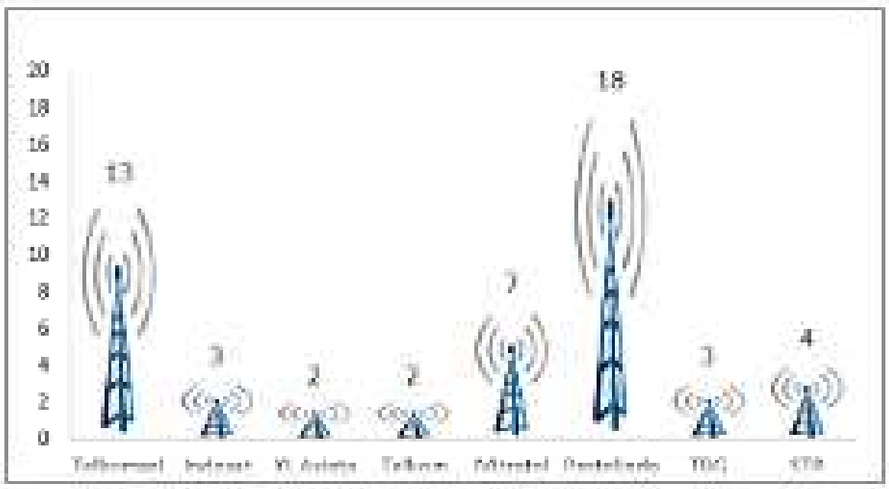
Tabel 2.5. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi yang beroperasi di Hulu Sungai Utara

No	Pemilik Menara	Jumlah Menara (Buah)	Operator Telekomunikasi
1	PT. Telkomsel Tbk	15	Telkomsel, XL
2	PT. Indosat Tbk	1	Telkomsel, Indosat, XL, H3i
3	PT. CMI	5	
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)	6	Telkomsel, Indosat, XL
5	PT. Sarana Menara Nusantara / Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)	27	Telkomsel, Indosat, XL, H3i
6	Tower Bersama Group (TBG)	6	Telkomsel, Indosat
7	PT. Solusi Tunas Pratama (STP)	5	XL
TOTAL		**65**	

Gambar 2.2. Grafik sebaran menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



Gambar 2.3. Data kepemilikan menara telekomunikasi di Hulu Sungai Utara



6. Persentase penduduk yang mengakses internet



Menurut data Kabupaten BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023, sebanyak 60,45% penduduk HSU berusia 5 tahun keatas menguasai telepon seluler (HP) dan 23,39% penduduk HSU berusia 5 tahun keatas mengakses internet.

Akses masyarakat terhadap internet makin meningkat setiap tahunnya. Kebanyakan masyarakat mengakses internet melalui telepon seluler yaitu sebesar 53%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin maraknya smartphone yang memungkinkan mengakses internet dengan lebih mudah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan untuk urusan Komunikasi dan Informatika bahwa di setiap daerah harus memiliki website pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun kegiatan pembangunan. Alamat website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah http://www.hulusungaiutarakab.go.id/

Sampai akhir tahun 2023 jumlah kunjungan ke website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai 331.939 kunjungan.

11. Pengelolaan Sub Domain

Sebagai pelaksana urusan komunikasi dan informatika di daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengelola sub - sub domain dari http://www.hulusungaiutarakab.go.id/ yaitu website SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan beberapa instansi lainnya.

Sampai akhir tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengelola 22 sub domain. Data nama sub domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Nama sub domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Nama Sub Domain	SKPD / Instansi
1	http://inspektorat.hulusungaiutara kab. go.id/	Inspektorat
2	http://bappeda.hulusungaiutaraka b.go.id/web/	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
3	http://bkpp.hulusungaiutarakab.go .id/	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	http://diskominfo.hulusungaiutara kab. go.id/	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	http://dispora.hulusungaiutarakab. go.id/	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
6	http://bpppa.hulusungaiutarakab. go.id/	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	http://dinkes.hulusungaiutarakab. go.id/	Dinas Kesehatan
8	http://dpuprp.hulusungaiutarakab.	Dinas Pekerjaan Umum,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	go.id/	Penataan Ruan dan Pertanahan
9	http://dispersip.hulusungaiutarakab.go. id/	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	http://dppkb.hulusungaiutarakab.go.id/	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	http://dishub.hulusungaiutarakab.go.id/	Dinas Perhubungan
12	http://ketahananpangan.hulusungaiutarakab.go.id/	Dinas Ketahanan Pangan
13	http://disdik.hulusungaiutarakab.go.id/	Dinas Pendidikan
14	http://diskan.hulusungaiutarakab.go.id/	Dinas Perikanan
15	http://dukcapil.hulusungaiutarakab.go. id/	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	http://pertanian.hulusungaiutarakab.go. id/	Dinas Pertanian
17	http://rspb.hulusungaiutarakab.go.id/	RSUD Pambalah Batung
18	http://jdih.hulusungaiutarakab.go.id/	Bagian Hukum
19	http://ortal.hulusungaiutarakab.go.id/	Bagian Organisasi
20	http://kelurahan-antasari.hulusungaiutarakab.go.id/	Kelurahan Antasari
21	http://kpu.hulusungaiutarakab.go.id/	KPU Hulu Sungai Utara*
22	http://kejari.hulusungaiutarakab.go.id/	Kejaksaan Negeri HSU*

Keterangan : *) difasilitasi sementara

12. WiFi gratis (Free Hotspot)



Untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan akses WiFi gratis (free hotspot) pada beberapa ruang terbuka publik di sekitar Kota Amuntai. Untuk sementara WiFi gratis dapat diakses pada lokasi Taman Junjung Buih, Siring Patung Itik dan ruang terbuka sekitar Lapangan Pahlawan pada hari Sabtu dan Minggu.

13. Media Sosial Pemerintah Daerah

Untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara beberapa akun media sosial yaitu :

a. Facebook

Fans Page Facebook resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikunjungi pada https://www.facebook.com/pemkabhulusungaiutara/



b. Instagram

Akun instagram resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan alamat https:// www.instagram.com/pemkabhsu/



c. Twitter

Akun twitter resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah @PemkabHsu. Akun twitter ini sudah terverifikasi (verified).



d. Youtube

Channel Youtube resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diakses pada alamat PEMKAB HULU SUNGAI UTARA atau https://www.youtube.com/channel/ UCU9dZQ6GZFxFu7_qe17YssQ;



14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Akan tetapi pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum bisa dilaksanakan karena belum tersedianya data kepemilikan menara yang valid dan adanya gugatan perusahaan pemilik menara terkait besaran retribusi

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pengendalian Menara Telekomunikasi. Akan tetapi pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum bisa dilaksanakan karena belum tersedianya data kepemilikan menara yang valid dan adanya gugatan perusahaan pemilik menara terkait besaran retribusi pengendalian menara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk itu dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011. Dengan adanya regulasi tersebut maka pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berhasil memungut retribusi pengendalian menara dari pemilik menara telekomunikasi (tower provider) yang beroperasi di Hulu Sungai Utara. Kegiatan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.4. Monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi





14. Pengelolaan data statistik sektoral



Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memegang urusan pemerintah daerah di bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Utara Dalam Angka Tahun 2022, Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022, Tinjauan Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2022, dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022.

15. Pengamanan informasi melalui persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian juga mendapat mandat sebagai pemegang urusan pemerintah daerah di bidang persandian. Selama kurun waktu berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara belum banyak kewenangan di bidang persandian yang bisa dilaksanakan mengingat keterbatasan personil, sarana prasarana persandian dan anggaran. Selama ini pelaksanaan tugas masih berkisar pada pengelolaan informasi yang bersifat rahasia secara terbatas. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara baru memiliki dua orang staf satu orang staf sudah mendapat pelatihan dasar Sandiman dan satu orang staf dalam persiapan pelatihan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya urusan pemerintahan daerah bidang persandian, sebagai pelaksana kewenangan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 046/217/Bangda tertanggal 17 Januari 2019 dengan perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian yang isinya menegaskan tentang tugas dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang persandian yang meliputi :

a. Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan pemerintah daerah;
c. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah
d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah
e. Membangun pola hubungan persandian antar organisasi pernagkat daerah kabupaten/kota.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dan Fungsi Dinas yang menyelenggarakan ururusan persandian yang meliputi :

a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
e. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
g. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;

Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2022-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.8 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Komunikasi, Informatika & Persandian	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentasi SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%
3	Persentase peningkatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (E-Government)	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%
4	Persentase peningkatan	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	pengelolaan statistik sektoral														
5	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan yang sedang berjalan, dapat dikatakan bahwa sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah berlangsung cukup baik. Akan tetapi sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintah daerah di berbagai wilayah, ada beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pelaksanaan urusan khususnya pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

a. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
c. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.
d. Pengelolaan Televisi masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian misi utama pemerintah daerah di bidang TIK yaitu : Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat serta meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*media center*), pengembangan pengelolaan televisi, serta keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (e-government) adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat mewajibkan diterapkan Open Source Software (OSS) diseluruh jajaran instansi pemerintah. Penerapan penggunaan OSS dapat menurunkan biaya pembelian perangkat lunak (khususnya penggunaan sistem operasi desktop dan jaringan) sehingga dapat menghemat anggaran pada setiap SKPD dalam pengadaan perangkat lunak. Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai penggunaan software ini kepada SKPD di Hulu Sungai Utara.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala Hal – hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TIK di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan TIK Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

Isu krusial lainnya dewasa ini adalah penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi non-profit melainkan juga digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan atau yang lebih dikenal dengan *e-Commerce / e- Business*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Hulu Sungai Utara untuk memanfaatkan internet bagi kepentingan ekonomi daerah yaitu dengan cara membangun situs *E- Commerce/E- Business* yang menampilkan berbagai produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau komoditi unggulan di Hulu sungai Utara sekaligus sebagai sarana promosi produk UMKM.

Menurut data *Special Reports Digital 2020*, jumlah pengguna Internet di Indonesia januari tahun 2020 telah mencapai 175.4 juta jiwa, jumlah pengguna internet di indonesia meningkat 25 juta (+17%) antara tahun 2019 dan 2020 dan penetrasi internet di Indonesia mencapai 64% pada Januari 2020. Penggunaan layanan belanja lewat Internet *(online shopping)* di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi penjualan lewat internet dan jumlah pengakses online shopping di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat. Oleh sebab itu kedepan kegiatan pembangunan TIK akan mulai diarahkan pada Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan perekonomian (profit) dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan membangun Media promosi produk / komoditas daerah di internet sekaligus membantu meningkatkan perekonomian UMKM daerah sebagai basis perekonomian rakyat.

Permasalahan yang menjadi kendala dan isu yang mendasari penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian diantaranya :

a. Kelembagaan pelaksanaan urusan persandian yang belum memadai

   Kelembagaan yang menangani urusan persandian tidak sesuai dengan hasil pemetaan urusan persandian, hal ini disebabkan level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecendrungan turun grade yang pada Pemerintah Daerah telah berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian.

   Tranformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan terhadap informasi RAHASIA, menjadi kegiatan untuk mengamankan infromasi secara keseluruhan, bukan hanya informasi rahasia tetapi seluruh informasi publik melalui pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

   Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terlebih munculnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) semakin

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tanggungjawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE, begitu pula dengan pembentukan ekosistem kabupaten pintar (smart regency) harus didukung dengan keamanan yang baik.

b. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah

Hal ini disebabkan belum masuknya isu dan permasalahan strategis tentang urusan persandian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga menyebabkan belum tersedianya dokumen perencanaan di bidang keamanan informasi termasuk belum adanya peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah sebagai bentuk kebijakan mikro tata kelola, manajemen, dan operasional penerapan keamanan informasi yang berisi regulasi, standar teknis dan pedoman. Selain itu koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah juga belum efektif.

Pengamanan informasi harus mampu untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan teknologi terkini dan masa mendatang diantaranya Mobil Internet, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence (AI) sehingga pengguna dengan dengan aman, efeketif dan efisien mengakses layanan SPBE dengan harapan dapat memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan dan transaksi keuangan.

c. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Dari hasil penilaian Indeks Keamanan Informasi dari tahun 2023, Pengelolaan Risiko di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi sebagaimana terlampir pada gambar berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



Sementara itu berdasarkan laporan *Indonesia Cyber Security Monitoring Report 2019* yang dilaporkan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, pada tahun 2019 sistem monitoring mata garuda mendeteksi adanya sekitar 290,3 juta serangan (intrusi) siber ke jaringan internet Indonesia. Terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data, diikuti dengan serangan menggunakan metoda malware. Dibanding besarnya jumlah serangan siber, jumlah aduan publik terkait insiden yang dialaminya relatif masih sangat kecil.

Berbeda dengan tahun tahun lalu, sistem monitoring mata garuda mendeteksi serangan terbesar pada tahun ini adalah serangan percobaan pembocoran data (attempted information leak). Serangan ini tidak langsung membuktikan bahwa pengumpulan data informasi berhasil dilakukan sehingga terjadi kebocoran data, akan tetapi merupakan sinyal dan indikasi bahwa percobaan kearah sana sudah dilakukan yang jika kondisinya ternyata sesuai dengan harapan hacker, memungkinkan terjadinya ekskalasi ke arah pengambil alihan sistem dan kebocoran data penting.

Serangan malware merupakan serangan kedua terbesar tahun ini, akan tetapi meskipun yang kedua dalam sembilan bulan dari dua belas bulan tahun ini, serangan malware selalu merupakan metoda serangan yang paling sering digunakan dan berada pada peringkat pertama.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



Hal ini tentu sanggat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta terganggunya pelayanan publik yang berbasis *e-government* kepada masyarakat karena sebanyak 52% dari 3.523 aduan publik insiden siber berasal dari sektor pemerintah.

d. Masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi

Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah dan pelaksana pengamanan informasi di Pemerintah Daerah diisi oleh personil yang kurang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK yang memadai, para personil sandi berkualifikasi ahli sandi yang menangani pengamanan informasi masih banyak yang belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mendukung pengamanan penyelenggaraan SPBE, dan pada umumnya belum tersertifikasi sesuai dengan standar. Terlebih belum adanya Fungsional sandiman dan Manggala Informatika sebagai jabatan fungional khusus yang menangani keamanan siber dan sandi di Pemerintah Daerah.

Permasalahan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengamanan informasi, karena ketersedian aparatur daerah yang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK sangat diperlukan disertai peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dalam mendukung pengamanan penyelenggaran SPBE.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Kurangnya kesadaran informasi ASN Pemerintah Daerah

Budaya kesadaran keamanan informasi masih beragam dan relatif rendah di kalangan instasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya berkaitan dengan strategi dan taktik dalam melaksanakan literasi keamanan informasi yang belum efektif dan terukur. Budaya literasi keamanan informasi perlu dilakukan untuk membangun sikap, pengetahuan, dan perilaku aparatur pemerintah. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia.

Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal ini yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan Internet of Things disekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi di dunia maya sehingga Perlindungan Data Pribadi juga dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.

f. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

Dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi terdapat standar atas sarana dan prasarana yang wajib atau harus dimiliki oleh pemerintah daerah terlebih metode, tools, dan teknik terkait keamanan informasi.

Saat ini dan kemungkinan mendatang pola menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi dengan kekuatan non militer yang dilakukan dengan cara non linier, tidak langsung dan bersifat proxy war. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan cara-cara berpikir yang tidak lazim karena sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Itulah sebabnya jenis ancaman perang saat ini memiliki spektrum yang sangat luas dan secara masif melalui berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ancaman non militer merupakan bagian dari ancaman nyata yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat dan merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya.

Ancaman non militer berdimensi teknologi diantaranya kejahatan siber yang meliputi pembobolan situs, pencurian data, penyebaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

virus/program jahat, kejahatan perbankan, penyadapan ilegal, pembajakan hak cipta, penyalahgunaan teknologi melalui berbagai media online untuk tujuan propaganda, intimidasi, penyebaran opini menyesatkan (HOAX) yang mendorong gerakan sosial bermotif politik atau motif lain yang mengancam kedaulatan negara.

Ancaman juga dapat dilakukan oleh hacker untuk membuat tidak berfungsinya peralatan atau fasilitas sistem tertentu atau terhentinya fasilitas seluruh sistem atau dikendailkan dari jarak jauh sehingga dapat dikendalikan sesusi kepentingannya.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Startegis Pertahanan Nirmiliter disebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu lini depan dalam postur pertahanan nirmiliter. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengamanan terhadap seluruh sistem informasi atau sistem elektronik pemerintah daerah.

Adapun Permasalahan Umum, isu strategis dan arah kebijakan terkait urusan Bidang Statistik antara lain :

a. Permasalahan umum terkait bidang statistik, diantaranya :
   - Belum adanaya SDM yang kompeten menangani Urusan Pemerintah Bidang Statistik
   - Masih belum optimalnya peran walidata dan forum masyarakat statistik daerah
   - Masih kurangnya infrastruktur untuk urusan pemerintah bidang statistik, saat ini ruangan hanya berukuran 2x3m^2, sarana dan prasarana pengolah data masih berbagi pakai dalam satu bidang
   - Masih kurangnya produk kompilasi data sektoral daerah
   - Belum optimalnya metadata statistik sektoral
   - Kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan statistik sektoral daerah

b. Dan beberapa isu strategis terkait bidang statistik ialah :
   - Perpres satu data indonesia (pasal 3), data yang dihasilkan produsen data harus :
     a. Memenuhi standar data
     b. Memiliki metadata

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk
d. Memenuhi kaidah interoperbilitas data

- Salah satu tujuan SDI (satu data indonesia) adalah mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan
- Hadirnya PMDN no. 90 tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

c. Lalu terkait arah kebijakan urusan bidang statistik, melakukan mapping program, kegiatan dan subkegiatan urusan pemerintahan bidang statistik :

- Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, kegiatan penyusunan dan pengumpulan data tinjauan perekonomian, serta kegiatan penyusunan analisis kewilayahan kab. hsu dimasukkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral
- Kegiatan sosialisai, penyusunan dan pengumpulan data statistik dimasukkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota dengan subbidang peningkatan kapasitas sdm pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- Menambahkan kegiatan penyelengaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota dengan subbidang :
  a. Membangun metadata statistik sektoral untuk penyediaan data sektoral pembangunan daerah
  b. Peningkatan kapasitas kelembangaan statistik sektoral untuk mewadahi forum masyarakat statistik daerah
  c. Pengembangan infrastuktur untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur bidang statistik
  d. Penyelenggaran otorisasi statistik sektoral di daerah untuk wadah operasional wali data

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun Anggaran 2025 diperoleh gambaran sebagai berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp. 3.697,187.785

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 5.757,357.644

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

II. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

➢ **Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Pengelolaan Aplikasi Informatika: Rp. 2.508.491.700

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 2.433.021.700

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

III. PROGRAM INFORMASI,KOMUNIKASI PUBLIK

- **Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Informasi,Komunikasi Publik : Rp. 2.751.139.700

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 3.095.935.880

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
  - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral: Rp. 64.249.600

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 64.249.600

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan InformasiPemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
  - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi: Rp. 73.819.000

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 514.651.600

VI. PROGRAM PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal Program Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota: Rp. 32.593.600

Hasil Review :

Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun 2025 sama dengan Rancangan Awal yakni total kebutuhan anggaran Rp. 54.053.600.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, kunjungan kerja anggota legislatif/reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan ini nantinya dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.10.
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	49.999.200,-	APBD	-
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.943.136.379,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	998.322.200,-	APBD	-
c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	99.773.600,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	Paket	29.997.000,-	APBD	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20.372.800,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	174.248.800,-	APBD	-
d	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64.990.000,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	89.997.645,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	74.903.600,-	APBD	-
e	Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfosan di Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	155.616.420,-	APBD	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		56.000.000,-	APBD	-
II	Program Aplikasi Informatika						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a	Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	149.935.000,-	APBD	-
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	163.830.000,-	APBD	-
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana	Kab. HSU	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	200.000.000,-	APBD	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. HSU	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	205.235.000,-	APBD	-
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	144.426.700,-	APBD	-
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	1.569.595.00,-	APBD	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

III	Program Informasi & Komunikasi Publik						
a	Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara						
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. HSU	Jumlah Media & Permohonan Informasi	Media / Permohonan Informasi	2.895.935.880,-	APBD	-
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. HSU	Jumlah KIM & Peliputan	KIM / Berita	200.000.000,-	APBD	-
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
a	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. HSU	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	64.249.600,-	APBD	-
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						
a	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	29.339.600,-	APBD	-
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	180.393.000,-	APBD	-
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Laporan	251.640.600,-	APBD	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	53.278.400,-	APBD	-
b	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	54.053.600,-	APBD	-

Tabel 2.11.

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SOPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**					
	Komunikasi dan Informatika					**Komunikasi dan Informatika**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**3.697.187.785**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**5.757.357.644**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah**		**50.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah**		**49.999.200**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	49.999.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**3.202.547.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**4.941.458.579**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.124.275.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.943.136.379	
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	78.272.000	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	998.322.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**207.451.950**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**324.392.200**	
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34.977.000	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	99.773.600	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	29.999.900	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	29.997.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20.275.050	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	20.372.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	122.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	174.248.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**182.191.835**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**		**229.891.245**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64.990.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64.990.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	89.999.035	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	89.997.645	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	27.202.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	74.903.600	
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**54.997.000**	**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**211.616.420**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	54.997.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	155.616.420	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Diskominfosandi Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		56.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Peningkatan angka indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**		**2.508.491.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Peningkatan angka indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**		**2.433.021.700**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**2.508.491.700**	**Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**2.433.021.700**	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	163.830.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	163.830.000	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	200.000.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	200.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	4 Unit	205.235.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	4 Unit	205.235.000	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	39 Perangkat Daerah	154.935.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	39 Perangkat Daerah	149.935.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	144.426.700	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	144.426.700	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	1.640.065.000	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	1.569.595.000	
	Program Informasi & Komunikasi Publik		**Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**		**2.751.139.700**	**Informasi & Komunikasi Publik**		**Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**		**3.095.935.880**	
	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara		**Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**		**2.751.139.700**	**Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**		**Persentasi SKPD Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**		**3.095.935.880**	
	Pelayanan Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Media&Permohonan Informasi	15 Media/ 5 Permohonan Informasi	2.318.602.400	Pelayanan Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Media&Permohonan Informasi	15 Media/ 5 Permohonan Informasi	2.895.935.880	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIM&Peliputan	2 KIM/720 Berita	432.537.300	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIM&Peliputan	2 KIM/720 Berita	200.000.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral**		**64.249.600**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral**		**64.249.600**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral**		**64.249.600**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Statistik Sektoral**		**64.249.600**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	64.249.600	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	64.249.600	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**106.412.600**	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**		**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**568.705.200**	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**73.819.000**	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**		**514.651.600**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	90% Dokumen	13.371.200	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	90% Dokumen	29.339.600	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	17.022.400	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	180.393.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	18.655.600	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	251.640.600	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 perangkat daerah	24.769.800	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 perangkat daerah	53.278.400	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Perbandingan Jumlah Entitas Teramankan dengan Jumlah Entitas PHKS**		**32.593.600**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perbandingan Jumlah Entitas Teramankan dengan Jumlah Entitas PHKS**		**54.053.600**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 perangkat daerah	32.593.600	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 perangkat daerah	54.053.600	
	Total				**9.127.481.385**	Total				**11.919.270.024**	

Catatan Penting :

1 Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dikarenakan cakupan layanan internet bandwith untuk data center/ruang server (NOC). Sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi (MCP) KPK RI yaitu, diwajibkan semua server aplikasi harus terpusat pada ruang server (NOC) dan layanan langganan internet/bandwith dikelola oleh dinas kominfo dan ditindak lanjuti dengan Perbup No.19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2 Untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang saling terkoneksi sesuai dengan Perbup No.19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Untuk tetap menjaga harmonisasi antara Pemkab. HSU dengan Mitra Media Massa Cetak dan Elektronik.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas “Impian Indonesia 2015-2025”, yaitu:

1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia,
2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika,
3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia,
4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi,
5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,
6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan
7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu:

1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,
3) Pemerataan Pembangunan, serta
4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Melalui Visi Indonesia 2045, Indonesia menargetkan untuk keluar dari kelompok negara *middle-income-trap* pada tahun 2036. Puncaknya, pada tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dengan PDB terbesar ke-5 dengan nilai USD 7,4 T (tujuh koma empat triliun dolar Amreika Serikat). Keempat pilar Visi 2045 tersebut diterjemahkan ke dalam Visi Misi Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Gambar III.1
Visi Misi Presiden 2020-2024

VISI

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”
	MISI
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8	Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Adapun arah kebijakan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah : peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, peningkatan kualitas data dan informasi, mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

3. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, realiabel, dan lengkap;
c. Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien;
d. Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas;
e. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, realiabel, dan lengkap;
d. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika;
e. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang terintegrasi di Hulu Sungai Utara;
f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.

Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Ket.
1	2	3	4
A	**Nasional**		
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan public	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan		
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital		
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan		
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer		
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah		
13	Penguatan pengamanan infrastruktur siber	Renstra BSSN 2020-2024	
14	Pembangunan dan penguatan computer emergency response team.		
15	Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber		
16	Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber		
17	Penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.		
18	Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Rentsra BPS 2020-2024	
19	Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi,		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN	
20	Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	
21	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	
B	**Provinsi Kalimantan Selatan**	
1	Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah	RPJMD Prov Kalsel Thn 2021 - 2026
2	Peningkatan kualitas sarana pelayanan public	
3	Peningkatan kualitas data dan informasi	
4	Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	
5	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan	

3. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

➢ **Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

III. PROGRAM INFORMASI,KOMUNIKASI PUBLIK

➢ **Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

- Pelayanan Informasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

➢ **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI

➢ **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

InformasiPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi & Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2022. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kab. HSU dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran memadai. Adanya renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran memadai. Adanya renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Hulu Sungai Utara , Februari 2024
KEPALA DINAS,

JONY RAKHMAN,ST,MT,M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19750608 200504 1008

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

Amuntai
2024

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Amuntai, Juli 2024

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI ---------- ii

DAFTAR TABEL ---------- iii

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1

1.1 Latar Belakang ---------- 1

1.2 Landasan Hukum ---------- 2

1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 5

1.4 Sistematika Penulisan ---------- 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2023 ---------- 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara ---------- 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ---------- 34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ---------- 53

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ---------- 76

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ---------- 76

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ---------- 79

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ---------- 81

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ---------- 81

BAB V PENUTUP ---------- 128

Lampiran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023 ----------	9
Tabel 2.2	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 ----------	10
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 ----------	16
Tabel 2.4	Target Indikator dan Realisasi Pencapaian SPM----------	29
Tabel 2.5	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM dengan jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari----------	31
Tabel 2.6	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM dengan jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik ----------	31
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara ----------	32
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ----------	38
Tabel 2.9	Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara----------	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ----------	80
Tabel 4.1	Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara ----------	87

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah yang antara lain :

a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 pada tahun berkenaan yang dijabarkan dalam bentuk dokumen RKPD;
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026 pada tahun berkenaan;
c. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
d. Program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan target dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan pendanaan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 s.d. 2026.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program, Kegiatan dan sub kegiatan dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam tahun 2025 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodir hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Ruang untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat pengembangan infrastruktur daerah sehingga mengungkit daya saing daerah sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diperlukan sebagai tahapan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mencapai sasaran yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dicabur sebagian dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangungan Nasional, yang diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;
36. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/318/KUM/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah:

1. Mengintegrasikan program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan RPD Tahun 2023-2026.
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan bidang infrastruktur dan tata ruang serta pertanahan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja yang merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
4. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh pejabat dan staf pelaksana agar dapat melaksanakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Sebagai tolak ukur menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026, Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Memuat review terhadap hasil evalusi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat kajian capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap RKPD

Membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan proses usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dengan kesesuaian antara isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Penataan Ruang. Dana indikatif dan sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian untuk pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Lampiran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 didukung dengan program/kegiatan mencakup 12 program, 19 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Secara kumulatif capaian program/kegiatan (*output*) rata-rata hampir tercapai 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023

No.	URAIAN	APBD
1.	Jumlah Program	12
2.	Jumlah Kegiatan	19
3.	Jumlah Sub Kegiatan	43
4.	Alokasi Dana (Rp)	197.871.876.431,00
5.	Realisasi Keuangan (Rp)	164.747.084.437,00
6.	Keuangan (%)	83,26%

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 197.871.876.431,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratur Tiga Puluh Satu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 164.747.084.437,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan Sisa anggaran sebesar Rp. 33.124.791.994,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilah Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 83,26%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL 2.2

Realisasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Program / Kegiatan	Fisik		Keuangan		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**13.121.520.817**	**11.205.367.817**	**85,40%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	76.899.800	54.634.800	71,05%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	24.000.000	20.546.800	85,61%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	52.899.800	34.088.000	64,44%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.535.330.997	4.119.111.383	90,82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 org/bln	35 orang	4.444.331.197	4.041.974.583	90,95%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	59.999.800	48.931.600	81,55%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	31.000.000	28.205.200	90,98%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	94.950.000	66.850.000	70,41%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65 paket	65 paket	34.950.000	34.020.000	97,34%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	12 orang	6 orang	60.000.000	32.830.000	54,72%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	6.126.721.470	6.075.495.386	99,16%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	5 paket	5.796.755.470	5.772.260.000	99,58%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	76 laporan	329.966.000	303.235.386	91,90%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	589.341.400	409.749.332	69,53%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	133.831.500	84.484.700	63,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	214.235.700	138.687.432	64,74%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	241.274.200	186.577.200	77,33%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.698.277.150	479.526.916	28,24%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Fisik		Keuangan		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	24 unit	99.525.000	57.601.991	57,88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5 unit	4 unit	1.508.764.750	360.159.925	23,87%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	-	-	0,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	30 unit	89.987.400	61.765.000	68,64%
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**35,29%**	**35,29%**	**19.804.995.115**	**17.631.153.614**	**89,02%**
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35,29%	35,29%	11.302.751.595	10.134.456.347	89,66%
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	0,17 km	0,3 km	613.694.000	536.850.000	87,48%
	Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 unit	2 unit	398.150.000	357.860.000	89,88%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	4 unit	2 unit	347.650.000	312.700.000	89,95%
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	22 km	5,5 km	9.943.257.595	8.927.046.347	89,78%
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35,29%	35,29%	8.502.243.520	7.496.697.267	88,17%
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	2 km	1,7 km	893.892.200	754.642.000	84,42%
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0,09 km	0,181 km	692.105.420	628.455.915	90,80%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	8,53 km	3,5 km	1.453.259.900	1.173.459.352	80,75%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	10,18 km	14 km	5.462.986.000	4.940.140.000	90,43%
3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**94%**	**91,94%**	**9.927.626.200**	**9.467.413.378**	**95,36%**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	94%	91,94%	9.927.626.200	9.467.413.378	95,36%
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500 m	828 m	9.927.626.200	9.467.413.378	95,36%
4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**91%**	**93,77%**	**7.676.506.000**	**7.398.241.624**	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	91%	93,77%	7.676.506.000	7.398.241.624	96,38%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Fisik		Keuangan		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	41 unit	63 unit	1.004.350.000	904.011.000	90,01%
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	10 M³/Hari	10 M³/Hari	6.672.156.000	6.494.230.624	97,33%
5	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**0%**	**2%**	**509.450.000**	**416.391.000**	**81,73%**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0%	2%	509.450.000	416.391.000	81,73%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	150 m	254 m	509.450.000	416.391.000	81,73%
6	**Program Pengembangan Permukiman**	**71,23%**	**71,23%**	**10.229.309.519**	**9.087.500.500**	**88,84%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	71,23%	71,23%	10.229.309.519	9.087.500.500	88,84%
	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 sistem jaringan	8 sistem jaringan	1.169.627.841	1.055.118.000	90,21%
	Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	58 sistem jaringan	58 sistem jaringan	9.059.681.678	8.032.382.500	88,66%
7	**Program Penataan Bangunan dan Gedung**	**5%**	**12,5%**	**9.239.369.021**	**8.039.778.045**	**87,02%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5%	12,5%	9.239.369.021	8.039.778.045	87,02%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Tenaga Ahli TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	15 dokumen	8 dokumen	285.306.250	84.893.595	29,76%
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23 dokumen	21 dokumen	5.144.734.600	4.556.074.900	88,56%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16 unit	16 unit	3.809.328.171	3.398.809.550	89,22%
8	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**51,3%**	**52,95%**	**126.536.222.259**	**101.183.160.766**	**79,96%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Program / Kegiatan	Fisik		Keuangan		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168,697 km	174,125 km	126.536.222.259	101.183.160.766	79,96%
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	16,29 km	15,111 km	17.960.332.000	17.074.084.850	95,07%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	17,2 km	53,552 km	95.178.357.164	72.390.708.605	76,06%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	1280 m	4104 m	13.397.533.095	11.718.367.311	87,47%
9	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**5,38%**	**7,53%**	**356.410.300**	**252.332.597**	**70,80%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	5,38%	7,53%	356.410.300	252.332.597	70,80%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20 orang	40 orang	156.497.800	117.619.155	75,16%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	50 orang	98 orang	175.352.500	119.623.442	68,22%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	150 orang	310 orang	24.560.000	15.090.000	61,44%
10	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**90%**	**87,62%**	**341.006.200**	**38.891.096**	**11,40%**
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90%	87,62%	199.850.200	25.509.096	12,76%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	199.850.200	25.509.096	12,76%
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90%	87,62%	141.156.000	13.382.000	9,48%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	141.156.000	13.382.000	9,48%
11	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**100%**	**100%**	**37.844.000**	**3.792.000**	**10,02%**
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	37.844.000	3.792.000	10,02%
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	1 berita acara	37.844.000	3.792.000	10,02%
12	**Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**70%**	**100%**	**91.617.000**	**23.062.000**	**25,17%**
	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%	100%	91.617.000	23.062.000	25,17%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	91.617.000	23.062.000	25,17%
Total				**197.871.876.431**	**164.747.084.437**	**83,26%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan dengan realisasi anggaran 54,72%. Hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut bersifat kondisional dan pada saat undangan Bimtek diterima tidak semua dapat dihadari/diikuti dikarenakan jadwal kegiatan Bimtek berbarengan dengan pekerjaan lain yang lebih prioritas. Namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan secara umum.
b. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar rendahnya realisasi dikarenakan alat besar masih dalam kondisi baik dan telah dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi. Pada sub kegiatan ini juga telah disiapkan upah operator alat berat tapi tidak bisa dibayarkan karena belum adanya peraturan mengenai petunjuk teknis pembayarannya.
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air mencapai target kinerja, akan tetapi pada beberapa sub kegiatan tidak mencapai target kinerja. Hal ini terjadi karena ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada faktor teknis yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti kondisi cuaca dan banjir sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan.
d. Program Penyelenggaraan Jalan capaian kinerja melebihi target, akan tetapi pada realisasi keuangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan biaya pemeliharaannya.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum realisasi kinerja sebesar 91,94%. Hal ini lebih rendah dari target kinerja yaitu 94%. Kurangnya capaian kinerja dikarenakan adanya penyesuaian data rumah tangga sesuai dengan hasil survei, selain itu juga dikarenakan masih adanya kendala dalam ketersediaan tanah/lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah realisasi kinerja mencapai 93,77%, melebihi dari target yaitu 91%.
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan realisasi kinerja sebesar 87,62% dari target kinerja sebesar 90%. Belum terpenuhinya capaian target karena belum selesainya proses revisi RTRW pada tahun 2023.
h. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan realisasi sebesar 100% dikarenakan tidak adanya konflik-konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat.
i. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee mencapai realisasi 100%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan realisasi sebesar 7,53% melebihi dari target yaitu 5,38%, akan tetapi secara keseluruhan realisasi ini masih dianggap kecil dan diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II. 3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangka Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	25%
01.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	25%
01.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6	50%
01.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu	8 laporan	0 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	2 laporan	8	100%
01.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	50%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2464 orang	0 orang	616 orang	490 orang	80%	616 orang	1106	45%
01.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	6	38%
01.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	6	38%
01.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	50%
01.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 paket	0 paket	65 paket	65 paket	100%	70 paket	135	52%
01.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	48 orang	0 orang	12 orang	6 orang	50%	12 orang	18	-
01.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	50%
01.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	0 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10	50%
01.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	0 laporan	45 laporan	76 laporan	169%	45 laporan	121	67%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	50%
01.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8	50%
01.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8	50%
01.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8	50%
01.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	50%
01.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	0 unit	22 unit	24 unit	109%	20 unit	44	55%
01.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 unit	0 unit	5 unit	4 unit	80%	7 unit	11	138%
01.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2	50%
01.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120 unit	0 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	60	50%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									0	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	142,5 %	0 %	35,29 %	35,29 %	100%	35,51 %	70,8	50%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	142,5 %	0 %	35,29 %	35,29 %	100%	35,51 %	70,8	50%
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,29 km	0 km	0,06 km	0,3 km	500%	0,06 km	0,36	124%
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu air yang dibangun	3 unit	0 unit	1 unit	2 unit	200%	1 unit	3	100%
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	8 unit	0 unit	4 unit	2 unit	50%	2 unit	4	50%
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1,84 km	0 km	3,8 km	5,5 km	145%	0,492 km	5,992	326%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	142,5 %	0 %	35,29 %	35,29 %	100%	35,51 %	70,8	50%
1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 km	0 km	1,2 km	1,7 km	142%	0,13 km	1,83	DIV/0!
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,29 km	0 km	0,07 km	0,181 km	259%	0,06 km	0,241	83%
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1,02 km	0 km	2,6 km	3,5 km	135%	0,21 km	3,71	364%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	6,18 km	0 km	14 km	14 km	100%	1,349 km	15,349	248%
									0	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	382 %	0 %	94 %	91,94 %	98%	96 %	187,94	49%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	382 %	0 %	94 %	91,94 %	98%	96 %	187,94	49%
1.03.03.2.01.06	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang perpipaan air bersih yang ditingkatkan	0 m	0 m	800 m	828 m	-		828	DIV/0!
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						6 unit	6	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan						392,5 liter/detik	392,5	
									0	
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		%				DIV/0!		0	DIV/0!
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan di Daerah Kabupatem/kota		%				DIV/0!		0	DIV/0!
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					-	1 unit	1	DIV/0!

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									0	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	370 %	0 %	91 %	93,77 %	103%	91 %	184,77	50%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	370 %	0 %	91 %	93,77 %	103%	91 %	184,77	50%
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0 unit	0 unit	60 unit	63 unit	105%		63	DIV/0!
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 M^3/Hari	0 M^3/Hari	10 M^3/Hari	10 M^3/Hari	100%		10	100%
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi						1 unit	1	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar						107 rumah tangga	107	
									0	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	158 %	0 %	2 %	2 %	100%	2 %	4	3%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	158 %	0 %	2 %	2 %	100%	2 %	4	3%
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	492 m	0 m	200 m	254 m	127%	200 m	454	92%
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota						3 sistem drainase perkotaan	3	
									0	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Jalan Permukiman dalam kondisi baik	301,4 %	0 %	71,23 %	71,23 %	100%		71,23	90%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Jalan Permukiman dalam kondisi baik	301,4 %	0 %	71,23 %	71,23 %	100%		71,23	90%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun	8 sistem jaringan	0 sistem jaringan	8 sistem jaringan	8 sistem jaringan	100%		8	100%
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara	16 sistem jaringan	0,0 sistem jaringan	58 sistem jaringan	58 sistem jaringan	100%		58	363%
									0	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	70 %	0 %	5 %	12,5 %	250%	5 %	17,5	90%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan berizin yang laik fungsi	70 %	0 %	5 %	12,5 %	250%	5 %	17,5	90%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	70 dokumen	0 dokumen	15 dokumen	8 dokumen	53%	15 dokumen	23	33%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	0 dokumen	23 dokumen	21 dokumen	91%	23 dokumen	44	733%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	3 unit	0 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	32	1067%
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang diubahsuaikan						19 Bangunan Gedung	19	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						11 dokumen	11	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	205,8 %	0 %	51,3 %	52,95 %	103%	51,3 %	104,25	90%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Dalam Kondisi Baik	676,7 km	0 km	168,697 km	174,125 km	103%	168,697 km	342,822	90%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	0 km	0,0 km	16,29 km	15,111 km	93%	0,1 km	15,211	DIV/0!
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	1,14 km	0 km	53,2 km	53,552 km	101%	3 km	56,552	4961%
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	380 meter	0,0 meter	4000 meter	4104 meter	103%	s jembatan	VALUE!	VALUE!
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun						0,01 km	0,01	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun						6 jembatan	6	
									0	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	25,36 %	0 %	5,38 %	7,53 %	140%	5,38 %	12,91	90%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	25,36 %	0 %	5,38 %	7,53 %	140%	5,38 %	12,91	90%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 orang	0 orang	40 orang	40 orang	100%	20 orang	60	75%
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	360 orang	0 orang	80 orang	90 orang	113%	90 orang	180	50%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	450 orang	0 orang	300 orang	310 orang	103%	20 lembaga	330	73%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	25,36 %	0 %	5,38 %	7,53 %	140%	5,38 %	12,91	90%
1.03.11.2.01.04	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan	3 dokumen		0	0	DIV/0!	1 dokumen	1	33%
									0	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Tertib Tata Ruang	360 %	0 %	90 %	87,62 %	97%	90 %	177,62	90%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	360 %	0 %	90 %	87,62 %	97%	90 %	177,62	90%
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2	50%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen			DIV/0!	1 dokumen	1	DIV/0!
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	360 %	0 %	90 %	87,62 %	97%	90 %	177,62	90%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	5 dokumen	6	30%
									0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								0	
02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								0	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	90%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	400 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	200	90%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	4 berita acara	0 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	100%	1 berita acara	2	50%
									0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	310 %	0 %	70 %	100 %	143%	70 %	170	90%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi	310 %	0 %	70 %	100 %	143%	70 %	170	90%
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2	50%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Adapun target, indikator dan realisasi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel Berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4 Target Indikator dan Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023	Realisasi Pencapaian 2023
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	94%	91,94%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	91%	93,77%

Ketercapaian pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.4 tidak terlepas dari alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran yang disediakan dalam rangka melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Jumlah Anggaran yang teralokasi dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari adalah sebesar Rp 9.927.626.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.467.413.378,00.

Jumlah Anggaran yang teralokasi dalam rangka Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebesar Rp 7.676.506.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.398.241.624,00.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi yakni adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak sarana dan prasarana yang telah terbangun namun mengalami kerusakan sehingga masyarakat yang telah memiliki akses terhadap standar pelayanan minimal menjadi tidak mendapat akses kembali.
2. Masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya enggan menggunakan akses yang diberikan karena sudah terbiasa menggunakan akses yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Ketersediaan lokasi untuk pembangunan sarana pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga pemenuhan akses belum dapat terlaksana.
4. Ketersediaan tanah sebagai sarana untuk melakukan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi yang masih terkendala/tidak tersedia.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Kurangnya jumlah Personil dalam pelaksanaan kegiatan penunjang SPM sehingga pelaksanaan belum optimal.
6. Kurangnya anggaran yang dapat memenuhi pelaksanaan SPM secara optimal dan menyeluruh.

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah desa serta instansi terkait sehingga didapatkan data yang lebih optimal untuk pemenuhan SPM.
2. Sosialisasi mengenai pemahaman koordinasi dan kerja sama dengan aparat desa dan kelompok masyarakat serta masyarakat penerima untuk pelaksanaan kegiatan penunjang SPM.
3. *Sharing cost* dengan pemerintah desa dan atau instansi lain dalam penyediaan sarana penunjang pelaksanaan SPM.
4. Penambahan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan penunjang SPM.
5. Melakukan pelatihan dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana pemenuhan SPM secara berkala kepada masyarakat penerima.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan SPM terdapat pada sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Untuk kegiatan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebagai bentuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan SPM terdapat pada sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Program dan kegiatan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM dengan Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

No	Program	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023
1.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 9.927.626.200,00	Rp 9.467.413.378,00

Tabel 2.6 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pencapaian SPM dengan Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

No	Program	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023
1.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 7.676.506.000,00	Rp 7.398.241.624,00

Untuk lebih jelas akan di sajikan dalam tabel 2.7 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	94	95	96	97	90,67	91,94	95	96	keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam pencapaian target
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91	92	93	94	93,62	93,77	92	93	Keselarasan antara data dengan sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dan menjadi dasar utama pemenuhan capaian kinerja

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Kekuatan (*Strenghts*)

yaitu situasi dan kondisi positif internal yang memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara di dalam mewujudkan pencapaian sasaran, komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :

1. Banyaknya tenaga lapangan yang bisa dipekerjakan.
2. Adanya ketentuan yang jelas peraturan perundang undangan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas
3. Indikator utama Dinas PUPR yang selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang ditemui antara lain;

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur, baik dalam pemenuhan jabatan administrator maupun sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi teknis lingkup PUPR.
2. Belum maksimalnya pengelolaan *database* urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan.
3. Belum lengkapnya dokumen rinci penataan ruang dan pertanahan sebagai acuan teknis pelaksanaan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Tantangan

yaitu situasi dan kondisi eksternal negatif yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara mewujudkan pencapaian sasaran SKPD. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dan jalan penghubung desa dalam kondisi rusak sedang dan berat.
2. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak dan air bersih layak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan lainnya.
4. Masih banyak sungai yang dangkal.
5. Masih rendahnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan pertanahan.
6. Belum maksimalnya peran organisasi profesi daerah di bidang konstruksi dalam mengembangkan ketenagakerjaan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

D. Peluang

yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara mewujudkan tujuan dan sasaran. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :

1. Adanya program – program pemerintah provinsi maupun pusat yang lokasi kegiatannya berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Adanya program – program pusat melalui program – program pemberdayaan masyarakat.
3. Faktor lokasi IKN yang menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu daerah penyangga IKN.
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, karang taruna, dan organisasi profesi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten HSU, merupakan data dukung dan pedoman dalam pembuatan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan prioritas dan sasaran yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian prioritas dan sasaran bidang infrastruktur, yaitu:

- Peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar, dengan sasaran :
  a. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :
  a. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan

Terhadap rancangan awal RKPD dilakukan analisis yang diantaranya terdapat beberapa penyesuaian, yaitu:

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN perlu penyesuaian besaran anggaran dikarenakan pemenuhan perhitungan jumlah pejabat struktural yang masih terdapat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kekosongan sebanyak 1 orang, pemenuhan penambahan usulan pegawai ASN dan perhitungan penambahan pegawai PPPK.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilakukan penyesuaian untuk pemenuhan kinerja sub kegiatan.
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan diperlukan pemenuhan biaya untuk pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pada tahun 2025.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai pemenuhan target kinerja.
- Sub kegiatan yang dilakukan berdasarkan data realisasi/kebutuhan tahun sebelumnya, kondisi terakhir/terbaru dan pemenuhan capaian target kinerja yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- Untuk penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS) baik itu dari ASB (Analisa Standar Belanja), SSH (Standar Satuan Harga), SBU (Standar Biaya Umum) dan HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) pada beberapa sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir; Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar memuat biaya pemeliharaan alat berat yang telah mengalami penambahan jumlah unit.
- Sub kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai; Normalisasi/Restorasi Sungai; Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa; Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis, dilakukan penyesuaian untuk pencapaian target kinerja.
- Sub kegiatan Pembangunan Jalan; Rehabilitasi Jalan; Pembangunan Jembatan; Rehabilitasi Jembatan dilakukan penyesuaian berdasarkan prioritas kondisi terakhir/terbaru yang harus ditangani dan juga penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan (SHS).
- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk rencana penyusunan dokumen Jakstrada Bidang Air Minum.
- Sub kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan berdasarkan prioritas pemenuhan SPM, target capaian SDG's, intervensi penanganan prevalansi stunting dan penanggulangan kemiskinan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Sub kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dilakukan penyesuaian dikarenakan untuk tahun 2025 belum bisa dilakukan kegiatan optimalisasi.
- Sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan direncanakan sebelumnya untuk mengakomodir usulan DAK, akan tetapi pada tahun 2025 Bidang Cipta Karya tidak mendapatkan DAK.
- Sub kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk rehabilitasi ringan dan operasional IPLT.
- Sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sebagai prioritas pemenuhan SPM, pemenuhan capaian SDG's, intervensi penanganan prevalansi stunting dan penanggulangan kemiskinan.
- Sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan dan penanganan kondisi drainase di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan prioritas untuk mengakomodir kebutuhan bangunan gedung kantor serta lanjutan pekerjaan rehabilitasi bundaran kota Amuntai.
- Dilakukan penyesuaian dikarenakan prioritas, kondisi terbaru/terakhir dan kebutuhan pemenuhan target kinerja untuk sub kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
- Adanya penyesuaian dan penambahan sub kegiatan/kegiatan dikarenakan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian pada sub kegiatan yang dipergunakan sesuai dengan sasaran dan output yang akan dilaksanakan.
- Penambahan kegiatan dikarenakan penyesuaian pemutakhiran nomenklatur sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004 pada Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota; Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota; Pembinaan Tertib

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi; Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota.

- Penambahan program/kegiatan lain yaitu pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya. Pada sub kegiatan ini juga mengalami penyesuaian pagu anggaran dari ranwal dikarenakan penyesuaian Standar Harga Satuan (SHS).
- Penambahan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004 pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yaitu sub kegiatan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Penataan Ruang.
- Sub kegiatan Penyusunan Peta Dasar sebagai penyusunan peta dasar RDTR perkotaan Amuntai Selatan.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan persetujuan RDTR Perkotaan Amuntai dan Perkotaan Alabio.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan yang besaran pendanaan sesuai dengan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.8 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dinas : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9.500.648.504**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. HSU**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8.910.116.694**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	90.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	89.999.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	59.999.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	100%	5.481.968.504	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	100%	5.702.982.104	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	616 orang/bulan	5.367.968.504	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	616 orang/bulan	5.568.088.504	Penyesuaian untuk pemenuhan kebutuhan ASN (Pejabat Struktural dan PPPK)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1000 dokumen	72.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. HSU	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	91.720.000	penyesuaian untuk pemenuhan kinerja sub kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	43.173.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100%	172.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100%	193.080.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 paket	112.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 paket	115.080.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. HSU	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis impelementasi peraturan perundang - undangan	12 orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. HSU	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis impelementasi peraturan perundang - undangan	13 orang	78.000.000	penambahan untuk bimtek perencanaan (Eselon II, Eselon III)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	100%	1.300.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD	100%	676.950.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	950.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	248.980.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	427.970.000	Penyesuaian pemenuhan target kinerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%	605.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD	100%	666.755.850	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	168.130.450	Penyesuaian sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan pemenuhan capaian target kinerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	215.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	211.591.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	265.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	287.033.800	Penyesuaian sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan pemenuhan capaian target kinerja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.851.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.580.349.040	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	101.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	163.910.000	Penambahan jumlah unit kendaraan yang dipelihara dibandingkan tahun sebbelumnya, dan karena ada perubahan SSH/SBU/HSPK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. HSU	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 unit	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. HSU	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 unit	1.039.646.000	pemeliharaan alat berat termasuk pemeliharaan excavator amphibious
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	60.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	235.763.540	Penyesuaian dengan kondisi yang lalu/saat ini dan kebutuhan pencapaian target kinerja
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	90.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 unit	141.029.500	Penyesuaian dengan kondisi yang lalu/saat ini dan kebutuhan pencapaian target kinerja
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kab. HSU**	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	35,73%	**9.217.115.530**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kab. HSU**	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	35,73%	**16.535.258.960**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	**35,73%**	4.100.826.400	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	**35,73%**	**8.122.828.400**	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. HSU	Panjang tanggul sungai yang dibangun	0,06 km	399.985.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. HSU	Panjang tanggul sungai yang dibangun	0,469 km	1.507.410.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 unit	501.993.000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 unit	688.306.000	Penyesuaian sesuai dengan kondisi dan SSH/SBU/HSPK

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 unit	605.440.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. HSU	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 unit	805.042.000	Penambahan unit pintu air yang direhabilitasi
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. HSU	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,492 km	2.593.408.400	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. HSU	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1,399 km	5.122.070.400	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	**35,73%**	5.116.289.130	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase luas areal sawah yang teraliri irigasi rawa**	**35,73%**	**8.412.430.560**	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0,13 km	1.599.996.200	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0,07 km	598.371.600	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	0,06 km	424.398.300	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	0,267 km	1.127.529.360	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	0,21 km	2.169.309.200	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	0,37 km	3.650.218.600	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,349 km	922.585.430	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. HSU	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,019 km	3.036.311.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik**	**51,492%**	**33.927.238.268**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik**	**51,492%**	**50.057.638.268**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		**Jalan dalam kondisi baik**	**169,317 km**	33.927.238.268	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**Jalan dalam kondisi baik**	**169,317 km**	**50.057.638.268**	
	Pembangunan Jalan	Kab. HSU	Panjang Jalan Yang Dibangun	0,02 km	1.500.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. HSU	Panjang Jalan Yang Dibangun	0,5 km	1.700.000.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja
	Rekonstruksi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direkonstruksi	0,01 km	1.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direkonstruksi	0,01 km	1.036.000.000	
	Rehabilitasi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direhabilitasi	3 km	25.427.238.268	Rehabilitasi Jalan	Kab. HSU	Panjang jalan yang direhabilitasi	10 km	36.894.293.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja dan prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan perhitungan kondisi saat ini
	Pembangunan Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang dibangun	2 jembatan	1.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang dibangun	2 jembatan	2.800.000.000	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja, kondisi saat ini dan SSH/SBU/HSPK
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	10 jembatan	5.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. HSU	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	20 jembatan	7.627.345.268	Penyesuaian sesuai dengan target kinerja dan prioritas sesuai dengan data kondisi saat ini
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI**	**Kab. HSU**	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	**380.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI**	**Kab. HSU**	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	**639.728.000**	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	230.000.000	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	229.986.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 orang	150.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 orang	149.998.000	Penyesuaian target kinerja
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. HSU	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	30.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. HSU	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	29.988.000	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 orang	50.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. HSU	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 orang	50.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	**150.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	**209.860.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	100.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	159.868.000	Penyesuaian sesuai kebutuhan dan SSH/SBU/HSPK
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. HSU	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 dokumen	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. HSU	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	49.992.000	
						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. HSU	**Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat**	**6,66%**	**199.882.000**	penambahan kegiatan karena kebutuhan pemenuhan pelaksanaan kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	49.994.000	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	49.994.000	
						Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. HSU	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	2 Lembaga	49.900.000	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	49.994.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kab. HSU	**Persentase akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**5.500.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kab. HSU	**Persentase akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**6.150.464.000**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**5.500.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum**	**96%**	**6.150.464.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	100.680.000	Rencana Penyusunan Dokumen Jakstrada Bidang Air Minum
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	392,5 liter/detik	2.100.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	392,5 liter/detik	100.680.000	Penyesuaian target kinerja
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	16 liter/detik	3.200.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 liter/detik	5.949.104.000	Penyesuaian target kinerja dan prioritas pemenuhan SPM serta pengentasan kemiskinan ekstrem
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 unit	100.000.000	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	Belum Ada Rencana Optimalisasi
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5 SR	50.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. HSU	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	0	Rencana Perluasan Untuk Mengakomodir Usulan DAK, dan di tahun 2025 tidak mendapatkan DAK
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Kab. HSU	**Persentase akses air limbah domestik**	**93%**	**10.500.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Kab. HSU	**Persentase akses air limbah domestik**	**93%**	**10.288.518.200**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik**	**93%**	**10.500.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik**	**93%**	**10.288.518.200**	
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. HSU	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	150.000.000	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. HSU	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	1.870.572.200	Penyesuaian target kinerja dan disesuaikan dengan kondisi saat ini
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	10 Rumah Tangga	100.000.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	5 Rumah Tangga	95.100.000	Untuk Operasional IPLT
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. HSU	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. HSU	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 unit	0	Disesuaikan kondisi saat ini
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	10.000.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	280 Rumah Tangga	8.189.594.000	Penyesuaian target kinerja
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	133.252.000	Penyusunan Draft Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Rangka Pembentukan UPT IPLT dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
7	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Kab. HSU	**Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota**	**20%**	**1.550.909.444**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Kab. HSU	**Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota**	**20%**	**1.980.130.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota**	**20%**	1.550.909.444	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota**	**20%**	1.980.130.000	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. HSU	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	15 m	250.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. HSU	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	0 m	0	Penyesuaian untuk prioritas kegiatan lainnya
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase lingkungan yang ditingkatkan	1 sistem drainase lingkungan	250.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase lingkungan yang ditingkatkan	0 sistem drainase lingkungan	0	Penyesuaian untuk prioritas kegiatan lainnya
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan	1 sistem drainase perkotaan	250.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan	0 sistem drainase perkotaan	0	Penyesuaian untuk prioritas kegiatan lainnya
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	2 sistem drainase perkotaan	550.909.444	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	5 sistem drainase perkotaan	1.980.130.000	Dalam Rangka Penanggulangan Genangan di wilayah perkotaan
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	1 sistem drainase perkotaan	250.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. HSU	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	0 sistem drainase perkotaan	0	Penyesuaian untuk prioritas kegiatan lainnya
8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Kab. HSU	**Persentase bangunan beri in yang laik fungsi**	**15%**	**10.473.208.420**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Kab. HSU	**Persentase bangunan beri in yang laik fungsi**	**15%**	**37.404.819.900**	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian I in Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. HSU	**Persentase bangunan beri in yang laik fungsi**	**15%**	10.473.208.420	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian I in Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Kab. HSU	**Persentase bangunan beri in yang laik fungsi**	**15%**	37.404.819.900	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	4.009.906.810	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	6 Bangunan Gedung	13.819.081.100	Untuk Mengakomodir Kegiatan-Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor dan bangunan gedung lainnya serta Lanjutan Rehabilitasi Bundaran Amuntai
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	4.009.906.810	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	0	Penyesuaian dengan prioritas dan kondisi
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dokumen	130.145.000	Penyusunan Draft Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara terkait Bangunan Gedung
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.083.422.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	23.155.751.000	Penyesuaian capaian target kinerja dan untuk mengakomodir Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan Bangunan Gedung kantor, dan bangunan gedung lainnya
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. HSU	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 dokumen	269.972.800	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. HSU	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 dokumen	299.842.800	Untuk Mengakomodir Kegiatan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Kab. HSU	**Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	10%	**1.000.000.000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Kab. HSU	**Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	10%	**5.318.811.000**	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata**	10%	1.000.000.000	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata**	10%	5.318.811.000	Kegiatan Ini dalam rangka Memfasilitasi Pekerjaan-Pekerjaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tidak dapat diakomodir Melalui Sub Kegiatan Lain. Yakni pada Program Pengembangan Permukiman
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 kawasan	1.000.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 kawasan	5.318.811.000	Penyesuaian pagu sesuai dengan target kinerja dan SSH/SBU/HSPK
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kab. HSU**	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**700.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kab. HSU**	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**1.048.389.800**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**500.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**499.231.000**	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	300.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	300.000.000	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Perkotaan Amuntai Selatan
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
						Penyusunan Peta Dasar	Kab. HSU	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	199.231.000	Penyusunan Peta Dasar RDTR Perkotaan Amuntai Selatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Tertib Tata Ruang	**90%**	**200.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**199.904.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	199.904.000	
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase Tertib Tata Ruang**	**90%**	**349.254.800**	penambahan kegiatan karena penyesuaian pemutakhiran nomenklatur dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
						Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	Perda RTRW Kab HSU target di 2024
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	249.996.000	RDTR Perkotaan Amuntai dan RDTR Perkotaan Alabio
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. HSU	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang - undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	99.258.800	Sosialisasi untuk masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
11	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**40.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**39.802.800**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	40.000.000	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	39.802.800	
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	40.000.000	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	39.802.800	
12	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	**92.000.000**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	**91.798.400**	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	92.000.000	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. HSU	**Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi**	**75%**	91.798.400	
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 dokumen	92.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 dokumen	91.798.400	penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan
					82.881.120.166					**138.465.476.022**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebenarnya sudah cukup menyentuh masyarakat yang dilihat dari banyaknya program dan kegiatan SKPD yang sama atau sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga program masyarakat bisa berjalan dengan baik. Program yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan pertumbuhan bagi ekonomi keluarga maupun peningkatan ekonomi pedesaan, serta adanya hubungan kerja sama antar pihak terkait dalam hal penyusunan program, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dari semua usulan masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk baik melalui aplikasi SIPD-RI maupun melalui proposal langsung yang diserahkan saat musrenbang, tidak semua usulan bisa direalisasikan pada tahun 2025 karena anggaran untuk mengakomodir usulan tersebut sangat terbatas. Adapun usulan masyarakat dan pokok – pokok pikiran DPRD yang terverifikasi dan diakomodir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pembuatan Gorong-gorong	Desa Rantau Karau Hulu Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	3 Titik	Sub kegiatan rehabilitasi drainase
2	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Cor Beton dan Dek Jalan	Desa Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3000 (1.000 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
					Kawasan Stategis lainnya
3	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Titian	Desa Danau Panggang RT.03, RT.04, RT.06 Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1440 (850 m x 1,8 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
4	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Rehab Total Titian	Desa Danau Panggang RT.07 Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	300 (150 m x 2 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
5	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Rehab Total Titian	Desa Pajukungan RT.04 Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	300 (150 m x 2 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
6	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Rehab Total Titian	Desa Sungai Namang RT.01 Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 (100 m x 2 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
7	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Desa	Desa Teluk Serikat Kec.Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
8	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Desa Panangian Kecamatan Amuntai Utara Menuju Kecamatan Banjang	Desa Penangian Kec. Amuntai Utara sampai dengan Desa Teluk Serikat Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	900 (300 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
9	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan/Betonisasi Gang	Jl. H. Abdul Hamidan Gang Swadaya RT.07 Kelurahan Antasari, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	750 (250 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
10	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jala Tepi Sungai Balangan	Desa Hulu Pasar RT.01 dan RT.02 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
11	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan dan Peninggian Jalan Lingkungan Gang Ar Raudah	Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	180 (120 m x 3 m x 0,5 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
12	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Desa Pematang Benteng	Desa Pematang Benteng RT.04 dan RT.05 Kec.Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1200 (400 m x 3 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
13	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Darus Shalihin	Desa Pangkalan Sari RT.03 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	945 (315 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
14	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan dan Pengecoran Jalan Lingkungan	Desa Tambalang Raya RT.03 Kec. Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	750 (250 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
15	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Cor Beton	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
16	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan	Desa Teluk Paring RT.04 Kec.Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
17	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Cor BetonGang lingkungan merupakan jalan alternatif yang sangat penting karena penghubung antar Dusun dan jalan menuju ke sekolah, pembangunan jalan	Desa Palimbangan RT.03 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	600 (150 m x 4 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
18	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Cor Beton jalan pada umumnya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan penumpang ke tempat tujuan di kota-kota yang dilalui atau yang dituju secara cepat, mudah, dan menyenangkan serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang	Desa Palimbangan Gusti RT. 04 dan RT.05 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
19	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Perumahan Grand Arrahman karena sering terjadi banjir	Desa Palimbangan RT.01 Kecamatan Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
20	Normalisasi/restorasi sungai - Pendalaman Sungai yang merupakan jalan menuju lahan pertanian	Desa Sungai Luang Hilir Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	3000 (500 m x 6 m)	Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
21	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Penghubung Antara Desa Sungai Tabukan dengan Desa Tambalang	Desa Sungai Tabukan RT.12 Kec. Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	420 (70 m x 6 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
22	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan Gang Simpang 4 Pangkalan Sari	Desa Pangkalan Sari RT.04 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	875 (250 m x 3,5 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
23	Rehabilitasi Jembatan - Rehab Pagar dan Lantai Jembatan Penghubung Desa Pematang Benteng dengan Desa Sungai Tabukan	Desa Pematang Benteng dan Desa Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	122,5 (35 m x 3.5 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
24	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan di Jl. Abdul MuthalIB Gang Flamboyan RT.09 Kebun Sari	Jl. Abdul Abdul Muthalib Gang Flamboyan Rt 09 Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	600 (200 m x 3 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
25	Rehabilitasi Jembatan - Rehab Jembatan Penghubung Desa Haur Gading dengan Desa Tambak Sari Panji	Desa Haur Gading dan Desa Tambak Sari Panji Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	150 (60 m x 2.5 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
26	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran dan Pengaspalan Jalan	Desa Pakacangan RT.06 Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	450 (150 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
27	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Berlubang Sering Tergenang Air Saat Hujan	Desa Pawalutan Rt. 02 Kecamatan Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	600 (150 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
28	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Betonisasi Jalan	Desa Danau Terati Rt. 02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
29	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan	Desa Danau Cermin Kecamatan Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
30	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Lanjutan Pembuatan Titian Desa	Desa Mawar Sari RT.01 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1000 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
31	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Lanjutan Pembuatan Jalan Desa	Desa Pinangkara RT.04 Kec. Amuntai Tengah, Kab.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1000 (500 m x 2 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
		Hulu Sungai Utara			
32	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Desa (Jalan Langga Maya)	Desa Sungai Sandung RT. 01 s. d RT.06 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4500 (1500 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
33	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Perbaikan jalan Desa berupa Cor/Aspal	Desa Pangkalan Sari RT.01 s.d RT.02 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	600 (200 m x 3 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
34	Pembangunan SPAM - Pembangunan SPAM Air Bersih dalam mendukung masyarakat memiliki perilaku hidup sehat	Desa Kandang Halang RT.03 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	2 Buah	Sub kegiatan Pembangunan SPAN Jaringan Perpipaan
35	Pembangunan Jalan - Pembuatan Jalan Desa pada Komplek Putra Ibu	Desa Kandang Halang RT.03 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 x x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
36	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan	Desa Manarap Hulu RT.01 Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	300 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
37	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan	Desa Bitin RT.05 Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	300 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
38	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Desa	Desa Telaga Silaba RT.04 Kec.Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	900 (300 m x 3 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
39	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Gang di RT.03 Desa Tangkawang	Desa Tangkawang RT.03 Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	125 (50 m x 2.5 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
40	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan	Desa Pamintangan RT.01 dan RT.02 Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	700 (200 m x 3.5 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
41	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan Menuju UPT. Perindagkop	Desa Teluk Baru Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	700 (200 m x 3.5 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
42	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan Negara Dipa	Gang Dahlia 1 RT. 13 Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	250 (100 m x 2.5 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
43	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pelebaran Jalan Abdi Praja	Desa Paminggir RT.04 Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30 (10 m x 3 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
44	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Perbaikan dan Pelbaran Jalan	Desa Sapala RT.09 Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 (100 m x 2 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
45	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan yang rusak mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat dan kegiatan pendidikan yang dilalui masyarakat	Desa Sungai Bahadangan, Kecamatan Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	300 Meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
46	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan yang rusak mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat dan kegiatan pendidikan yang dilalui masyarakat	Desa Pelanjungan RT. 01 Sari, Kecamatan Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	300 Meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
47	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan yang rusak mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat dan kegiatan pendidikan yang dilalui masyarakat	Desa Pandulangan RT. 03, Kecamatan Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	300 Meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
48	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peningkatan Jalan Dek pas.batu+cor Beton	Desa Tigarun RT. 03 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	800 (200 m x 4 m)	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
49	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pelebara jalan/gang dek pas batu+cor beton	Desa Kalintamui RT.02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	400 (200 m x 2 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
50	Pembuatan jalan/titian lingkungan perumahan - Pembuatan Titian Ulin	Kelurahan Sungai Malang RT 13 Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	300 (150 m x 2 m)	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
51	Pembuatan jalan/titian lingkungan perumahan - Pembuatan Titian Ulin	Desa Telaga Mas Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1 Buah	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Stategis lainnya
52	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Akses jalan rusak bagi masyarakat	RT 02-RT 03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 Meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
53	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Desa ini merupakan Prioritas Desa, karena sangat di perlukan Untuk Masyarakat Desa Keramat dan Masyarakat Desa sekitarnya, karena Jalan ini merupakan Jalan Alternatif bagi desa Keramat dan Desa Lain pada saat Hari Pasar, yakni hari minggu (Pasar Ahad).	Desa Keramat RT 001 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
54	Rehabilitasi Jembatan - Agar jembatan menjadi kokoh	Desa Palimbangan RT.003, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
55	Rehabilitasi Jembatan - Rehab jembatan penyeberangan tangkawang-tuhuran di RT 01 desa Tangkawang	Desa Tangkawang Rt 01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
56	Rehabilitasi Jembatan - Jembatan box rt 05	Desa Tangkawang Rt 05, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
57	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Titian Panjang Rusak Penghubung Beberapa Desa ke Kecamatan	Desa Jingah Bujur RT 02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
58	Pembangunan Jalan - Tidak adanya jalan akses penghubung antara jalan utama yang bisa dilewati mobil dengan jalan pinggir sungai	Desa Tambak Sari Panji RT.02 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
59	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - JALAN DESA BANYAK YANG BERLOBANG BEKAS BANJIR	DESA SUNGAI JANJAM RT.001-004, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
60	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan berlobang dan sering terkena banjir	Rt 03-04, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
61	Pembangunan Jalan - Sulitnya akses jalan warga sehingga perlunya di bangun Jalan Titian Beton RT 02 dengan Panjang 100 M Lebar 2,5 M dan Tinggi 3,5 M	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Desa Pinang Habang RT 02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
62	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan yang ada di RT 004 dan 005 merupakan jalan tranportasi masyarak dalan melakukan kegiatan perekonomian namun seiring waktu usia jalan tersebut sudah rusak dan banyak lobang ini merupakan suatu hal penghambat roda perekonomian Desa Manarap Hulu, sedangkan disisi lain anggaran Dana Desa tidak mampu untuk membiayai perbaikan berupa Pengaspalan jalan tersebut	RT 004 dan RT 005, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
63	Pembangunan Drainase Permukiman - Air mengendap lebih lama di wilayah pemukiman. karena tidak adanya saluran pembuangan	Teluk Daun RT 03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota	- -	Sub kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
64	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - PENGASPALAN JALAN DESA	DESA HAMBUKU BARU RT.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
65	Rehabilitasi Jembatan - Jembatan Yang Tidak Bisa Di Gunakan Oleh Masyarakat Karena Sudah Lama dan Banyak Mengalami Kerusakan	Jl, Keramat RT.001, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
66	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - jalan Desa Gampa Raya menuju ke RT.3 apabila musim penghujan tiba dipastikan jalan selalu terendam banjir, Kondisi tersebut mengakibatkan aktifitas anak sekolah tidak bisa menggunakan jalan tersebut dan aktifitas warga pun tidak melakukan kebutuhan sehari hari tidak bisa	Desa Gampa Raya RT.03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
67	Rehabilitasi Jembatan - Kondisi jembatan rentan mengalami kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. sedangkan jembatan tersebut merupakan akses utama aktifitas ekonomi masyarakat sehari-hari menuju pasar selasa.	Jl. Parindra RT. 5 Desa Pematang Benteng Kecamatan Sungai Tabukan Kab HSU., Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
68	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan ini rusak dan sebagian jalan masih berupa tanah, yang mana hanya bisa di lalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua saja, dan diperparah lagi apabila banjir datang(akses terputus). hal ini sangat membahayakan bagi warga yang melaluinya. jalan tersebut memutus akses jalan antar desa dan kecamatan sungai tabukan ke sungai pandan, sebaliknya pun juga seperti itu. Jalan ini juga di gunakan sebagai akses perekonomian warga (nelayan dan petani). Kalau memutar memerlukan waktu yg lama dan jauh.	Jl. Sepakat RT. 5 sampai Jl. Pulau Bahagia RT. 12 Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
69	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalannya sudah rusak dan berlobang, akan membahayakan warga yang melaluinya. di tambah lagi di saat banjir jalan tersebut tidak dapat di lalui kerna ada titik yang terendam cukup dalam/akses terputus. untuk memutar ke jalan lain memerlukan waktu dan jarak yg lumayan jauh. Besarnya biaya yang diperlukan dan keterbatasan anggaran dana desa. maka kami ajukan usulan ini. terima kasih	Jl. Timbuk Habu RT. 010 dan RT. 011 Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
70	Pembangunan Jembatan - Jembatan Penghubung antar Desa sudah rusak	Desa Lok Suga RT 01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
71	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi rawa - PENANGANAN PERMASALAHAN GULMA BERUPA SUSUSPAN GUNUNG (MIMOSA PIGRA L) GUNA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI PANEN PADI DAN JUGA PENINGKATAKATAN KESEHJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SETEMPAT	DESA SUNGAI HAJI RT 03 , Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	- -	Sub kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai
72	Rehabilitasi Jembatan - Kondisi pondasi dan lantai jembatan rusak sangat mengkhawatirkan pengguna terutama untuk kendaraan roda 4. Jembatan Bakubung merupakan warisan dan simbol kedua desa, terakhir kali di rehab sekitar tahun 2000. sudah 20 tahun lebih tidak diperbaiki secara menyeluruh	Desa Pematang Benteng Hilir RT.003 RW.001, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
73	Pembangunan Jalan - Tidak adanya jalan penghubung antara Desa Danau Terati ke Desa Murung Karangan dan saat banjir, transportasi,ekonomi,pembangunan di perdesaan terhambat dan sulit mencari mata pencaharian/pendapatan sehari-hari	Desa Danau Terati RT.01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
74	Pembangunan Jalan - Jika jalan tersebut rusak dan banjir, Maka transportasi,ekonomi,pembangunan di perdesaan terhambat dan sulit mencari mata pencaharian/pendapatan sehari-hari	Desa Danau Terati RT.02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
75	Rehabilitasi Jembatan - Permohonan Rehab Jembatan ini dilakukan karena jembatan yang merupakan akses antarRT ini mulai rusak, baut, panggar, galagarnya sudah mulai lepas, lantainya sudah banyak yang patah sehingga banyak tambalannya. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya jalur darat oleh warga RT 1 menuju ke kecamatan. jika jembatan ini rusak maka warga RT 1 kemungkinan besar akan terisolasi.	Jalan Kali Utar Desa Rintisan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
76	Pembangunan Jalan - Permohonan Pembangunan jalan Desa ini dilakukan karena jalan merupakan akses utama desa menuju kecamatan mulai rusak dan sering terendam banjir sehingga tidak bisa dilalui sampai hamipr 3 bulan lebih. Baut, panggar, galagarnya sudah mulai lepas, lantainya sudah banyak yang patah sehingga banyak tambalannya. Jalan ini merupakan akses satu-satunya jalur darat oleh warga Desa menuju ke kecamatan. Sudah 3 tahun terakhir jalan ini sering terendam banjir sehingga warga terisolasi paling lama 6 bulan	Jalan Kali Utar RT 002 Desa Rintisan, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
77	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - askes jalan di desa murung karangan rt 03 susah dilewati di musim hujan dan musim banjir ke tempat wisata relegi yaitu kubah makan syekh said sulaiman maka dari itu kami mengusulkan untuk pengocoran jalan menuju makam syekh said sulaiman itu sepanjang 600 meter	desa murung karangan rt 03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
78	Pembangunan Jalan - Ada beberapa titik jalan rusak di wilayah lingkungan RT 03 yang meliputi pemukiman, kantor Kepala Desa, SMA 1 Amuntai Utara, kantor BPP, Kantor KB, KUA, PAUD , Kantor Kecamatan, Koramil & Polsek	Teluk Daun, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
79	Pembangunan Jalan - Peninggian jalan (Cor beton) dari simpangan Gg. Durian sampai Depan Gedung Desa	Jln. H. Saberan effendi Gg. Durian RT. 007 , Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
80	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Sangat Licinnya Jalan Gang Pada Musim Hujan Yang Membuat Beberapa Warga Jadi Korban Terpelisit	Teluk Cati RT.001 - RT.04, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
81	Rehabilitasi Jembatan - Pondasi kayu dan lantai jembatan yang menghubungkan antara desa galagah hulu dan desa pematang benteng hilir sudah sangat mengkhawatirkan serta sudah selama 22 tahun sejak direhab total belum diperbaiki	Desa galagah hulu, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
82	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Keungan Desa tidak mampu mengarahkan keperbaikan jalan tersebut	RT.03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
83	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Rusak dan Berlobang	Jalan Tembus Simpang Tiga Telaga Silaba RT.03 , Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
84	Rehabilitasi Jembatan - Jembatan kurang layak pakai dan sebagian rusak	RT.03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
85	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan rusak sebagian berlobang dan sering terendam air ketika air sungai naik	RT.01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
86	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan berdebu, rusak parah, batu batu yang tajam, Sering terendam Banjir, Paska banjir jalan becek dan tidak bisa diakses warga	RT.01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
87	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Rusak Akibat Tergenang Banjir	RT.01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
88	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Setiap musim penghujan dua aliran sungai Balangan dan sungai Tabalong selalu meluap mengakibatkan jalan utama desa dan jalan alternatif yang dimaksud dalam proposal ini sebagian terendam cukup lama, terutama di RT 2 yang mengakibatkan akses jalan terputus. Hal ini dapat teratasi apabila jalan alternatif di RT 1 bisa di cor dan yang RT 2 bisa ditingkatkan/ditinggikan.	Desa Pandulangan Kecamatan Banjang RT 1 dan 2, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
89	Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir - Untuk mempermudah arus air masuk dan keluar dan untuk kelancaran masyarakat bercocok tanam/ bertani.	Desa Padang Basar Hiir RT 04, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa	- -	Sub kegiatan Pembangunan pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
90	Rehabilitasi Jembatan - Titian nya rusak sering terendam banjir, bnyak papan yang patah dan bergoyang serta berlobang besar, ADD tidak cukup untuk kegiatan rehababilitasi	RT 01 ke RT 02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan
91	Pembangunan WC Sehat - masih belum banyak rumah yang memiliki Wc sehat	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04,RT 05, RT 06,RT 07,RT 08, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	- -	Sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
92	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan pengaspalan jalan	Jalan H. Hasan RT. 5, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
93	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Gang Keluarga	Jalan Patmaraga RT. 6, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
94	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Gang Sejiran	Jln. Patmaraga RT. 6, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
95	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Gang Senada	Jalan Patmaraga RT. 6, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
96	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Gang Tembusan	Jln. Patmaraga RT. 6, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
97	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Peninggian dan Pengaspalan Jalan Gang Titian	Jln. Norman Umar RT. 6, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
98	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan Gang H. Nor Abdullah	Jln. Norman Umar RT. 7, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
99	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran Jalan Gang Lisdawati	Jln. Norman Umar RT. 7, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
100	Pembangunan Jalan - Penambahan Jalan/Gang Baru di dalam Gang Berunai	Jln. Soewandi Sumarta RT. 9, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
101	Pembangunan Jalan - Pembuatan Jalan/Gang Baru di dalam Gang Rahmad	Jln. Soewandi Sumarta RT. 9, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
102	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Perbaikan Jalan Marjuki / Aulia Komplek Nusa Indah 1	Jln. Soewandi Sumarta RT. 10, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
103	Rehabilitasi Jembatan - Kayu ulin jembatan sudah banyak yang patah sehingga sulit untuk di lewati	Kaludan kecil RT 001 kecamatan Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
104	Pembangunan Jalan - Peningkatan Gang H. Ihat RT. 003 sering terendam banjir dimusim hujan	Gang H. Ihat RT. 003, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
105	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Penyemenan Jalan Desa	Desa Bitin RT.005, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
106	Pembangunan Jalan - Jl. SMPN 7 RT. 001 sering tergenang banjir dan menghambat aktifitas masyarakat	Jl. SMPN 7 RT. 001, Kab. Hulu Sungai Utara	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	200 meter	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
107	Pembangunan Jembatan - Mengingat semakin banyaknya penduduk kedua desa dan hanya ada 1 Jembatan penghubung antara desa Paminggir Seberang ke Desa Paminggir, maka perlunya untuk menambah 1 lagi Jembatan Penghubung antar 2 Desa yang bisa dilewati pejalan kaki, roda 2 dan roda 4, untuk memperlancar aktifitas masyarakat	Desa Paminggir Seberang RT. 006 dan Desa Paminggir RT. 008, (2.526372^{o}S 114.870837^{o}E), Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60 meter	Sub kegiatan Pembangunan Jembatan
108	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan atau Titian rusak berat, sehingga sulitnya dilewati oleh Anak - anak Sekolah dan Masyarakat	RT. 004, titik koordinat (2,39'S 115,03'E), Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
109	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - peninggian jalan karna sering banjir	babirik hilir rt.003, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
110	Rekonstruksi Jalan - Jalan utama Desa Pandulangan yang ada dipinggir sungai sering longsor yang mengakibatkan air sungai masuk ke pemukiman dan lahan pertanian saat banjir..	Desa Pandulangan RT 2, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
111	Pompa Air - Karena kurangnya sarana air bersih ke rumah-rumah warga maka kami mengusulkan untuk di bangunkan pompa air (menara air) dengan ukuran tanah 4x4m dan tinggi 10m	RT.02 Desa Kembang Kuning Kecamatan Amuntai tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jumlah Rumah Tangga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum	- -	Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
112	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan utama desa panjang 1500m dan lebar 4 m	RT 01, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
113	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Pengecoran jalan uta desa akses rusak dan banjir	Rt 03, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
114	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan rusak	Rt.1-3, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
115	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Akses jalan menuju sekolah Dasar Desa nelayan yang masih tanah yang mengakibatkan saat hujan sering tergenang air dan becek mengakibatkan mengganggu para pelajar menuju ke tempat sekolah	Jl. Nelayan RT 3, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
116	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Jalan Rusak Parah	RT.01 sd RT.02, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan
117	Pembangunan Jalan - Jalan Akses Rusak	RT02 dekat Kubah, Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	200 meter	Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Dari tema dan sasaran RKP Tahun 2025 juga ditetapkan beberapa Agenda Pembangunan dan Prioritas Nasional untuk tahun 2025, yaitu:

A. Agenda Pembangunan

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

B. Prioritas Nasional

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur

Selain dari agenda pembangunan dan prioritas nasional, pemerintah juga memiliki beberapa target capaian yang ditetapkan untuk dipenuhi sampai dengan pemerintahan Kabupaten/Kota. Target capaian yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSU adalah pencapaian SDGs, penanggulangan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting, kegiatan yang responsif gender dan pencapaian SPM.

Program/kegiatan pencapaian SPM adalah kegiatan yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengganggaran. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSU tahun 2025 program/kegiatan yang termasuk dalam SPM adalah Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program dan Kegiatan tersebut juga menjadi program/kegiatan dalam percepatan penurunan stunting sebagai intervensi sensitif.

Untuk pemenuhan pencapaian target penanggulangan kemiskinan ekstrim juga menggunanakan program/kegiatan yang sama dengan pencapaian SPM dan penurunan stunting ditambah dengan program/kegiatan lain yaitu: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran responsif gender adalah bagian dari pengarusutamaan gender yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa perspektif gender dan kesetaraan gender menjadi bagian dalam semua kebijakan. Bedasarkan pemahaman tersebut maka bisa disimpulkan bahwa semua program/kegiatan/sub kegiatan seharusnya dilakukan analisis ARG, akan tetapi sebagai pemenuhan awal dipilih *sample* untuk dilakukan analisis ARG yaitu pada sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan; sub kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; sub kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*) adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di bumi. Ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk dalam pilar ekonomi dan pilar lingkungan hidup. Pada pilar ekonomi untuk PUPR termasuk dalam Tujuan/*Goal* 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; dengan indikator Kondisi Mantap Jalan Nasional. Untuk indikator ini meskipun merupakan indikator yang berkaitan dengan PUPR akan tetapi dikarenakan wewenang jalan nasional tidak berada pada Kabupaten/Kota maka baik target,capaian maupun pelaksanaan pekerjaan tidak ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSU.

Pada pilar lingkungan hidup, PUPR terkait di 2 Tujuan/*Goal* yaitu Tujuan 6 dan Tujuan 11. Tujuan 6 adalah Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman (6.1.1); indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun (6.2.1); dan indikator Proporsi Pengambilan Air Baku Bersumber dari Air Permukaan Terhadap Kesediaannya (6.4.2.(b)). Program/kegiatan untuk pencapaian tujuan SDGs pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSU yaitu Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2025 dengan Visi Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam beberapa misi dan dibuat beberapa tema tahun RKPD. Untuk Tahun 2025 TujuanPembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

a. Meningkatnya toleransi dan nilai – nilai keagamaan;
b. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
c. Meningkatnya perekonomian daerah;
d. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
e. Menurunnya tingkat pengangguran;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan;
g. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah;
h. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
i. Meningkatnya ketahanan bencana.

Untuk mengimplementasikan prioritas Daerah Kalimantan Selatan dibuatlah arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Untuk bidang infrastruktur termuat dalam Tujuan Pembangunan:

1. Meningkatnya pemerataan pembagunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar;
   2) Meningkatnya konektivitas antar kawasan;
   3) Terwujudnya pembangunan kawasan – kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

Tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan Sasaran adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah;
3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan;
4. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman;
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi;
6. Meningkatkan kesesuaian peruntukan lahan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel III. 1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	Kondisi Akhir Renstra
1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD	A	A
2. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas / konektivitas wilayah	1. Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik (%)	51,492	51,599
		2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan	1. Persentase Luas Areal sawah yang terlayani jaringan irigasi kondisi baik (%)	35,73	35,96
		3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	1. Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum (%)	96	97
			2. Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik (%)	93	94
		4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	1. Persentase SDM jasa konstruksi yang bersertifikat (%)	6,66	7,30
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan	1. Persentase Tertib Tata Ruang (%)	90	90

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan dan isu – isu strategis, prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan memperhatikan evaluasi hasil renja tahunan, RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan. Pada penyusunan program dan kegiatan yang ada pada dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini mengacu pada program dan kegiatan yang ada pada RKPD kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 – 2026. Selain itu juga dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap sub kegiatan sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sehingga terdapat penambahan kegiatan baru untuk dapat mengakomodir penyesuaian sub kegiatan tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 akan melaksanakan 12 (dua belas) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan untuk mengimplementasikan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian SDG's, pencapaian SPM, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan/pengentasan stunting dan dilakukan analisis gender (ARG).

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 138.465.476.022** (***Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah***). Untuk total pagu

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dana ini diluar program, kegiatan dan sub kegiatan yang di biayai oleh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) dan Insentif Fiskal Tahun 2025.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA,

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    f. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA),

7. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    q. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
    r. Normalisasi/Restorasi Sungai
    s. Pembangunan Tanggul Sungai
    t. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
8. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan **:**
    u. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
    v. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
    w. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
    x. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM,

9. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    y. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
    z. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
    aa. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    bb. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
    cc. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
    dd. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
    ee. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ff. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

VI. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG,

12. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan :

gg. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

hh. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

ii. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

jj. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Recana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

13. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

kk. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

VIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN,

14. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

ll. Pembangunan Jalan

mm. Rekonstruksi Jalan

nn. Rehabilitasi Jembatan

oo. Pembangunan Jembatan

pp. Rehabilitasi Jalan

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,

15. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan:

qq. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

rr. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ss. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

16. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    tt. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
    uu. Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
17. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan sub kegiatan:
    vv. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota
    ww. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
    xx. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
    yy. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

X. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG,

18. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    zz. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
    aaa. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Penataan Ruang
19. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    bbb. Penyusunan Peta Dasar
    ccc. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
20. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    ddd. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

XI. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN,

21. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    eee. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

XII. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

22. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    fff. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dan perkiran maju Tahun 2026 dilakukan pemetaan berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta perubahnya yang di rumuskan pada tabel di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel IV. 1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**138.465.476.022,00**							**83.827.827.083,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**138.333.874.822,00**							**83.687.827.083,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**138.333.874.822,00**							**83.687.827.083,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)***	-			**100 %**	**8.910.116.694,00**						-	**8.994.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	-			100 %	89.999.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	59.999.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD*	-			100 %	5.702.982.104,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	5.517.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				616 Orang/bulan	5.568.088.504,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		5.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	91.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	43.173.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD*	-			100 %	193.080.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	115.080.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	78.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Pegawai DPUPR Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD*	-			100 %	676.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	248.980.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	427.970.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD*	-			100 %	666.755.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	168.130.450,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	211.591.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	287.033.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		265.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	1.580.349.040,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU	-	1.852.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	163.910.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				8 Unit	1.039.646.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	235.763.540,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	141.029.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai DPUPR Kab. HSU		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa***	**-**			**35,73 %**	**16.535.258.960,00**						**-**	**10.138.827.083,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa*	-			35,73 %	8.122.828.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	4.510.909.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				3 Unit	805.042.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		665.984.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1,399 KM	5.122.070.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		2.852.749.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,469 KM	1.507.410.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		439.983.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	688.306.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		552.192.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa*	-			35,73 %	8.412.430.560,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	5.627.918.043,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,07 KM	598.371.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.759.995.820,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0,267 KM	1.127.529.360,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Kabupaten Hulu Sungai Utara		466.838.130,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0,37 KM	3.650.218.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Infrastruk tur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konekti vitas Wilayah	Kabupaten Hulu Sungai Utara		2.386.240.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				2,019 KM	3.036.311.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi	Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.014.843.973,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase akses sistem penyediaan air minum***	**-**			**96 %**	**6.150.464.000,00**						**-**	**6.200.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum*	-			96 %	6.150.464.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	6.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	100.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				392.5 Liter/Detik	100.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	5.949.104.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				0 Unit	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***persentase akses air limbah domestik***	**-**			**93 %**	**10.288.518.200,00**						**-**	**10.500.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik*	-			93 %	10.288.518.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU	-	10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1.870.572.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				5 Rumah Tangga	95.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				280 Rumah Tangga	8.189.594.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	133.252.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kab. HSU		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota***	**-**			**48 %**	**1.980.130.000,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota*	-			20 %	1.980.130.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				5 Sistem Drainase Perkotaan	1.980.130.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***persentase bangunan berizin yang laik fungsi***	**-**			**15 %**	**37.404.819.900,00**						**-**	**8.600.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan yang berizin laik fungsi*	-			15 %	37.404.819.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	8.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				6 Bangunan Gedung	13.819.081.100,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				0 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	130.145.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	23.155.751.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				15 Dokumen	299.842.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya***	**-**			**10 %**	**5.318.811.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.318.811.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	5.318.811.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik***	**-**			**51.492 %**	**50.057.638.268,00**						**-**	**34.700.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jalan dalam Kondisi baik*	-			169,317 Km	50.057.638.268,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	34.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.5 KM	1.700.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.01 KM	1.036.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				20 Jembatan	7.627.345.268,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2.800.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	36.894.293.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat***	-			**6.66 %**	**639.728.000,00**						-	**655.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat*	-			6,66 %	229.986.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	149.998.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	29.988.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	209.860.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU	-	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	159.868.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Orang	49.992.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	199.882.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU	-	240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				20 Paket Pekerjaan	49.994.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				20 Bangunan Konstruksi	49.994.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				2 Lembaga	49.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				20 Badan Usaha	49.994.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah	Tenaga Konstruksi Kab. HSU		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase Tertib Tata Ruang***	**-**			**90 %**	**1.048.389.800,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Tertib Tata Ruang*	-			90 %	349.254.800,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	249.996.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	99.258.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	499.231.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	199.231.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tertib Tata Ruang*	-			90 %	199.904.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	199.904.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Utara		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**131.601.200,00**							**140.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**131.601.200,00**							**140.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi***	**-**			**100 %**	**39.802.800,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi*	-			100 %	39.802.800,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	39.802.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi***	**-**			**80 %**	**91.798.400,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi*	-			80 %	91.798.400,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	91.798.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara		95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							**138.465.476.022,00**							**83.827.827.083,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 mengacu pada RPD 2023 – 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 serta Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja ini juga merupakan manifestasi dari respon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang – bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi.

Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan perancangan penerapan *Good Governance* di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka revitalisasi diri maupun organisasi. Terlepas dari segala penjabaran yang disampaikan, disadari bahwa pasti terdapat kekurangsempurnaan di dalam tulisan ini, oleh karena itu kami siap menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai modal perbaikan penulisan dan kinerja organisasi.

Amuntai, Juli 2024

Kepala Dinas,

Ir. AMOS SILITONGA, ST., MMT.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KELENGKAPAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2025
(Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Hari/Tanggal : 4 April 2024

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
	BAB.I (Pendahuluan)				
	1.1. Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas Renja SKPD,_Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD,Renstra PD,Renja Provinsi ,K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√	-	
	1.2. Landasan Hukum	Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Perda,dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	√	-	Mohon ditambahkan terkait regulasi SPM terbaru
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja SKPD	√	-	
	1.4. Sistematika Penyusunan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen	√	-	
	BAB.II (Hasil Evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun Lalu)				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1)	√	-	perhatikan Tahun n-2 (Tahun 2021) untuk tahun rencana 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
	- Tabel T-C-29	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun berjalan	√	-	mohon diberi penjelasan terhadap kegiatan/kegiatan yang tidak dilaksanakan dan realisasi yang belum tercapai
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi capaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK	√	-	Lengkapi dan buatkan tabelnya
	- Tabel T-C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	√	-	Lengkapi sesuaikan target SPM
	2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Memuat Permasalahan dan Hambatan PD dlm pelaksanaan Tupoksi, Dampaknya terhadap pencapaian visi misi, tantangan dan peluang dlm meningkatkan pelayanan SKPD, serta rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dlm perumusan program kegiatan yang dirumuskan	√	-	
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Proses perbandingan antara RKPD dengan analisis kebutuhan dan penjelasan temuan apakah ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD	√	-	Lengkapi
	- Tabel T-C-31	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD	-	√	Berkaitan dengan pagu menunggu hasil perhitungan ulang.
	- Tabel T-C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan	√	-	Lengkapi tabelnya
	BAB.III (Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah)				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tufoksi SKPD	√	-	
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tufoksi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD	√	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
	BAB.IV (Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah)				
	4.1. Program dan Kegiatan	Berisi penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan, rekapitulasi program kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD	√	-	Sesuaikan pagu indikatif (menunggu hasil perhitungan ulangan)
	- Tabel T-C-33	Tabel rumusan program kegiatan PD	√	-	Sesuaikan/lengkapi
	BAB.V (Penutup)		√	-	
	Ketentuan lain :				
1	Mencantumkan indikator dan target kinerja program ,kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten (Kepmendagri 50-589 Tahun 2021)		√	-	
2	Memuat Pokok-pokok pikiran dewan dan hasil Musrenbang Kecamatan		√	-	Lengkapi
3	Memuat kegiatan Peningkatan IPM		-	-	
4	Memuat kegiatan Penurunan Kemiskinan		√	-	Lengkapi
5	Memuat kegiatan Penurunan Stunting		√	-	
6	Memuat kegiatan yang responsif gender		√	-	
7	Memuat kegiatan untuk pencapaian SDG's		√	-	Lengkapi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
8	Memuat kegiatan untuk pencapaian SPM		√	-	Lengkapi
9	Memuat kegiatan terkait Percepatan Penanganan COVID-19		-	-	
10	Memampakan tabel Rumusan Program dan Pendanaan Renstra 2023-2026, Tabel 6.2 (Kerangka Pendanaan dan Program) dan Tabel 7.2 (Indikasi Program Prioritas yg dibertai kebutuhan pendanaan)		√	-	
11	Pengembalian Renja perbaikan setelah verifikasi	Penyempurnaan Rancangan Renja Dinas PUBR paltu 30 April 2024 dan di input aplikasi SIPD			
	Catatan/Pendapat :	Program 12, Kegiatan 22			

No	SKPD	Nama	Jabatan Dlm SKPD	Tanda Tangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Romeir Evie Febria KR	Kasubag. Program dan Data	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hj. Hairiyah, ST	Kabid. Jaskon	
3	Tim Verifikasi	Fahrudin Noor, ST	Perencana Ahli Muda	
4	Tim Verifikasi	Ir. Eko Yudhi Hariantо, ST. MT	Perencana Ahli Muda	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 11 Pebruari 2024

Nomor : 000.7.2.4/[illegible]/DPUPR
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penyesuaian Nomenklatur Sub Kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepada :
Yth. Bappedalitbang HSU
cq. Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

di -
Amuntai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Ranwal RKPD 2025 dan adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan maka kami memohon agar dapat menambahkan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Penambahan sub kegiatan baru ini dikarenakan untuk dapat menyesuaikan antara target pelaksanaan pekerjaan dengan indikator sub kegiatan pemutakhiran. Sedangkan Indikator Sub Kegiatan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan target pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. A. Yani No. 14 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

Amuntai, 2 April 2024

Nomor : 000.7.2.4/105/DPUPR
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penyesuaian Nomenklatur Sub Kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kepada :
Yth. Bappedalitbang HSU
cq Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

di -
Amuntai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Rancangan RKPD 2025 dan adanya penutakhiran nomenklatur sub kegiatan maka kami memohon agar dapat menambahkan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Penambahan sub kegiatan baru ini dikarenakan untuk dapat menyesuaikan antara target pelaksanaan pekerjaan dengan indikator sub kegiatan pemutakhiran. Sedangkan indikator Sub Kegiatan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan target pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19681001 199703 1 009

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024

...D : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Pemutakhiran	Keterangan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penambahan Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan 2024 (pada DPA Murni belum ada dan tidak ada pada Renstra)
Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Penambahan sub kegiatan (tidak ada pada Renstra)

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

TABEL PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN BARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode						Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		4	5	7	8	8	10	11
						BIDANG CIPTA KARYA									
1	03	09				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem	10,00%	1.000.000.000,00	10,00%	1.000.000.000,00	10,00%	1.000.000.000,00	Penyesuaian penomplekkan nomenklatur sub kegiatan (sebelumnya Program Pengembangan Permukiman)
1	03	09	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diatur	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diatur	2 Kawasan	1.000.000.000,00	2 Kawasan	1.000.000.000,00	2 Kawasan	1.000.000.000,00	
1	03	09	2	01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diatur	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Perkotaan, Kawasan Sistem Permukiman Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Diatur	2 Lokasi	1.000.000.000,00	2 Lokasi	1.000.000.000,00	2 Lokasi	1.000.000.000,00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		4	5	7	8	9	10	11
BIDANG JASA KONSTRUKSI															
1	03	11				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah SDM Jasa Konstruksi bersertifikat / Jumlah SDM Jasa konstruksi x100 %	5,51		5,68		1,35		
1	03	11	2	04		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi yg di Awasi / Jumlah Keseluruhan Paket Pekerjaan Konstruksi x 100 %			15,00	250.000.000,00	30,00	200.000.000,00	Penyelesaian permohonan rekomendasi satu kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan
1	03	11	2	04	0004	Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 paket pekerjaan	50.000.000,00	70 paket pekerjaan	80.000.000,00	
1	03	11	2	04	0005	Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 bangunan	50.000.000,00	20 bangunan	50.000.000,00	
1	03	11	2	04	0006	Sub kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	7 Lembaga	50.000.000,00	3 Lembaga	50.000.000,00	
1	03	11	2	04	0007	Sub kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dievaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dievaluasi Tertib Usaha	23 badan usaha	50.000.000,00	30 badan usaha	50.000.000,00	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rumus Indikator	2024		2025		2026		Keterangan
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1						2	3		4	5	7	8	9	10	11
URUSAN PERTAMBANGAN DAN TATA RUANG															
1	03	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang sesuai tata ruang x 100%	93%		93%		93%		
1	03	12	2	01		Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang sesuai tata ruang x 100%	93%	180.000.000,00	93%	180.000.000,00	93%	450.000.000,00	Penyesuaian penyebutan/nomenklatur sub kegiatan dengan penyesuaian kegiatan
1	03	12	2	01	0008	Penyelenggaraan Penetapan Rencana RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi penetapan substansi RDTR Kota/Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi penetapan substansi RDTR Kota/Kabupaten/Kota	0	-	1	180.000.000,00	1	450.000.000,00	
1	03	12	2	01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kota/Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kota/Kabupaten/Kota	1	180.000.000,00	0	-	0	-	
1	03	12	2	01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup/a RDTR Kota/Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup/a RDTR Kota/Kabupaten/Kota	0	-	0	-	1	180.000.000,00	
1	03	12	2	01	0012	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	0	-	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	

Tabel ini bisa ditambah untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Tabel Kinerja yang telah ada.
Penambahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini dimaksudkan penyesuaian antara nomenklatur pada struktur tersebut dengan Sub Kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilakukan

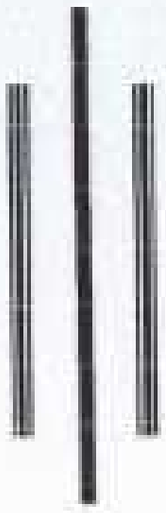
April 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. ANGGA SAPUTRA, ST, MMT
NIP. [illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Norman Umar (Terminal Banua Lima) Telp./Fax (0527) 61048
Email : dinas.perhubunganhsu@gmail.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kebersamaan dari segenap mitra kerja akhirnya Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan dan tugas pembantu.

Sebagai implementasi dari peran tersebut diatas, maka perlu disusun sebuah Rencana Kerja agar tercipta sinergitas antara perencana, penganggaran, pembangunan/ pengadaan dan pengawasan pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Substansi Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengacu pada RPJM Daerah yang memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas kebijakan, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan. Akhirnya atas dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Amuntai, April 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. HAMDANI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650701 198602 1 007

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

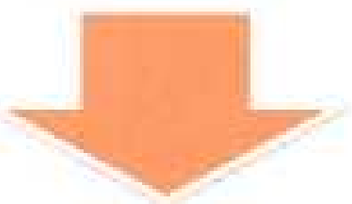
	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN (2023)	II-6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubugan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	III-21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	IV-27
BAB V PENUTUP	V-32
LAMPIRAN RKA	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023	II-8
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-13
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-16
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-19
Tabel	Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 kabupaten Hulu Sungai Utara	II-19
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	III-24
Tabel T-C.33	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara	IV-28
Tabel	Tagging Terkait Anggaran Kemiskinan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	IV-33
Tabel	Rekap Terkait Anggaran Responsif Gender Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	IV-34
Tabel	Target Indikator Sdgs Dinas Perhubungan - Pilar Pembangunan Ekonomi	IV-35

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I



PENDAHULUAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Rancangan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra 2023 - 2026 dan pedoman yang memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia 4421);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

29. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagaimana yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

BAB 2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Renstra yaitu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2023 – 2026.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan 10 kegiatan yang berisi 17 sub kegiatan dan total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 Sebagai Berikut :

Dari pos pendapatan diperoleh sebesar Rp. 876.611.000,- dari target Rp. 750.100.000,- (116,86%) dengan perincian sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

   Retribusi jasa umum direalisasikan sebesar Rp. 452.595.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000,- jadi mencapai (139,26%), dengan perincian sebagai berikut:

   - retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 110.800.000,- dari target Rp 75.000.000,- (147,73%)
   - retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 341.795.000,- dari target Rp. 250.000.000,- (136,71%)

2. Retribusi Jasa Usaha

   Retribusi jasa usaha direalisasikan sebesar Rp. 424.016.000,- dari target sebesar Rp. 425.000.000,- (99,76 %) dengan perincian sebagai berikut :

   - retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 3.150.000,- dari target Rp 10.000.000,- (31,5 %)
   - retribusi terminal sebesar Rp.15.690.000,- dari target Rp. 10.000.000,- (156,9 %)
   - retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 401.800.000,- dari target Rp. 400.000.000,- (100,34 %)
   - retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp. 3.800.000,- dari target Rp. 5.000.000,- (76 %)
   - Retribusi izin trayek sebesar Rp. 0,- dari target Rp.100.000,- (0%) ini karena untuk trayek angkutan pedesaan sudah tidak ada lagi, karena masyarakat sudah memiliki transportasi sendiri dan untuk angkutan sudah tidak layak.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN (2023)

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sedangkan belanja secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.730.358.562,- dari Rp. 18,676.284.216,- yang dianggarkan (89,58%) dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp. 2.718.366.141,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.528.200.000,- jadi mencapai (77,04%).

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja barang dan jasa direalisasikan sebesar Rp. 7.786.918.656,- dari yang dianggarkan sebesar Rp 8.727.276.981,- jadi mencapai (89,22%).

   c. Belanja Hibah

      Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp. 1.363.500.000,- dari yang dianggarkan sebesar 1.363.500.000,- jadi mencapai (100%).

2. Belanja Modal
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

      Belanja modal untuk peralatan dan mesin direalisasi sebesar Rp. 2.729.320.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.779.002.000,- jadi mencapai (98,21 %).

   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

      Belanja modal untuk gedung dan bangunan direalisasi sebesar Rp. 1.952.253.765,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.095.365.000,- mencapai (93,17%).

   c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

      Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direalisasikan sebesar Rp. 180.000.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 182.940.000,- mencapai (98,39%).

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERHUBUNGAN DAN PENGAWASAN REGISTRASI SIM TAHUN 2023

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Lembar .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PPSUD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebauan Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja PPSUD) tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Kinerja (RKPD) tahun (2025)	Realisasi Kinerja (RKPD) tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.01	01	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	20 Laporan	18 Laporan	100%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/ bulan	100%	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) (lima) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD) (1) tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Kerja SKPD tahun (2023)	Realisasi Kerja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01	1.01	(1)	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	18	01	2.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2.04	(2)	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	8 paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
2	18	01	2.04	(5)	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64 Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100%
2	18	01	2.04	(6)	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
2	18	01	2.04	(8)	- Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64 paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	16 Paket	100%
2	18	01	2.04	(9)	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	15 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100%	60 Laporan	15 Laporan	100%
2	18	01	2.05		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2.09	(2)	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renstra OPD) tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Kinerja (SKPD) tahun (2024)	Realisasi Kinerja SKPD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	01	2.09		Penyelenggaraan Bidang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayar & terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2.09	02	- Penyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 unit	33 Unit	33 Unit	100%	33 Unit	33 unit	100%
2	15	01	2.09	06	- Penyelenggaraan Penelitian dan Mitigasi Lainnya	Jumlah Penelitian dan Mitigasi Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	21 Unit	100%
2	15	01	2.09	08	- Penyelenggaraan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1 Unit	1	1	1	1	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Terwujudnya terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan baik**	**98%**	**88%**	**100%**	**88%**	**88%**	**100%**	**88%**	**95%**
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Kondisi Penggunaan Jalan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2.01	03	- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	32 Kegiatan	8 Kali Kegiatan	8 Kali Kegiatan	8 Kali Kegiatan	100%	36 Kali Kegiatan	8 Kali Kegiatan	100%
2	15	02	2.01		Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Berfungsinya rekomendasi fasilitas Lalu Lintas	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	90%
2	15	02	2.01	02	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terawat	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD/IKK) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja) OPD/IKK tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Kinja SKPD tahun (2025)	Realisasi Kinja SKPD tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi dan Terpelihara	84 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	42 Unit	100%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Terciptanya kenyamanan dan keselamatan terminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Dipelihara (Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 unit	100%
2	15	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase terbinanya pelaksanaan dengan baik**	**95%**	**95%**	**95%**	**94%**	**99%**	**98%**	**98%**	**99%**
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Penetapan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya kenyamanan, keselamatan, kelancaran dan ketersediaan LLASD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pemberlakuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pemberlakuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
2	15	03	2.18		Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Penyelenggaraan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terciptanya keberadaan dan kondisi pos Jaringan	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	95%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD/RPJPD) Tahun 2029	Rerelasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja OPD/RPJPD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Kinerja SKPD tahun (2023)	Realisasi Kinerja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	15	03	2.13	03	-	Pengawasan dan Pemeliharaan Peralatan Setpat dan Utama	Jumlah peralatan setpat dan utama yang beroperasi dan terpelihara	5 Buah	3 Buah	5 Unit	5 Buah	100%	5 Unit	5 Unit	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni transportasi yang efektif berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, ketersediaan aksesbilitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam Pelayanan masyarakat di bidang perhubungan.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar minimal	IKK	Target Renstra Dishub				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai sakip Dinas Perhubungan	-	-	A	A	A	A	A	-	A	A	-
2	Desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	-	-	96.80	97.26	97.72	98.17	96.35	96.80	97.26	97.72	-
3	Tingkat pemanfaatan terminal (%)	-	-	85.29	90.47	95.14	99.07	72.90	74.95	90.47	95.14	-
4	Tingkat pemanfaatan dermaga (%)	-	-	60.73	62.83	64.92	66.97	57.70	58.62	62.83	64.92	-
5	Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan (%)	-	-	74.09	76.49	78.89	81.30	54.66	32.70	76.49	78.89	-

Pada Tahun 2025 untuk indikator kinerja utama "Nilai Sakip Dinas Perhubungan" di targetkan mendapatkan kategori A, dengan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat berserta tim yang terkait, untuk realisasi sampai akhir tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena untuk hasil penilaiannya akan ditetapkan di tahun 2024 sehingga belum dapat di realisasikan. Sedangkan untuk Nilai Sakip 2022 adalah kategori A (82,25 poin).

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi" sebesar 96,80% dari target yang telah ditetapkan RPD pada tahun 2023 sebesar 96,80% sehingga persentase Capaian realisasi dari target tahun tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2023 telah tercapai dengan perbandingan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi berjumlah 212 desa dari jumlah desa se Kabupaten sebanyak 219 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang didukung dengan kegiatan pembersihan alur sungai sehingga memperlancar alur transportasi sungai.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase tingkat pemanfaatan terminal" pada tahun 2023 sebesar 74,95% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 83,93% sehingga persentase capaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar %. Dengan formulasi perhitungan Jumlah angkutan umum yang masuk ke terminal perminggu dibagi jumlah angkutan se Kabupaten. Dengan jumlah yang di data oleh bidang angkutan dan terminal yang berjumlah 19248 buah angkutan umum yang masuk/beraktivitas sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) dari 5 buah terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta di dukung dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2023 sudah baik.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase tingkat pemanfaatan dermaga" pada tahun 2023 sebesar 58,62% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 60,88% sehingga persentase capaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar 96,30%. Dengan formulasi perhitungan jumlah angkutan sungai yang bersandar di dermaga perminggu dibagi jumlah angkutan sungai se kabupaten. Dengan jumlah yang di data oleh bidang angkutan dan kepelabuhan yang jumlah angkutan sungai yang bersandar di dermaga sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) berjumlah 24960 buah dari 25 buah dermaga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta didukung dengan sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau. Hal ini menunjukan bahwa kinerja tahun 2023 sudah baik.

Realisasi indikator kinerja utama "Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan" pada tahun 2023 sebesar 32,70% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 (78,62%), sehingga persentase Capaian realisasi dari target tahun 2023 sebesar 41,60%. Dengan formulasi perhitungan jumlah angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah angkutan umum yang wajib uji tahun 2023. Hasil tersebut diperoleh dengan dukungan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah angkutan yang lulus uji sampai triwulan IV (Januari s.d Desember) berjumlah 416 unit dari target di tahun 2023 berjumlah 1000 unit angkutan yang lulus uji. Ini karena terhitung pada tanggal 1 juli 2022 dan efektif di awal tahun 2023 untuk semua unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak diperkenankan untuk melaksanakan uji kelaikan bagi kendaraan yg Over Dimension Over Load (ODOL). Dengan pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan - kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan lingkungan, sehingga akan terciptanya angkutan umum yang standar layak

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

jalan bagi keselamatan dan di dukung dengan adanya kegiatan razia gabungan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen layak jalan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, terutama di bidang teknis, karena banyak tenaga teknis di Dinas Perhubungan yang akan pensiun, sehingga di perlukan pelatihan bagi tenaga pengganti di bidang teknis tersebut.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang darat
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana bidang sungai dan danau
4) Perlunya rehabilitasi beberapa sarana dan prasarana di bidang darat dan sungai dan danau, karena sebagaian sudah mulai rusak atau tidak layak pakai.
5) Masih kurangnya kesadaran para supir untuk masuk ke terminal dan melaporkan jumlah penumpangnya.
6) Masih kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk melaporkan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dalam kapal baik ketika datang maupun ketika berangkat.
7) Masih adanya kapal yang beroperasi dimana tingkat keselamatan penumpang kurang diperhatikan (sangat diabaikan).
8) Untuk alur sungai masih adanya pembangunan jembatan di alur Sungai Nagara dan Sungai Luang Kecamatan Babirik, dimana ruang bebas di atas permukaan air sangat rendah sehingga mengganggu kapal berlayar pada saat kondisi air sungai dalam, hal tersebut berlangsung setiap tahun.
9) Adanya kebiasaan masyarakat yang berada disepanjang aliran sungai, apabila membersihkan lahan pertanian berupa enceng gondok dan gulma lainnya di buang ke sungai, dan limbah kayu dan bambu beserta rantingnya yang hanyut dibawa air akibat erosi di alur sungai baik dari Sungai Tabalong dan Balangan sehingga mengakibatkan alur sungai diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penyempitan bahkan tertutup oleh limbah tersebut.
10) Adanya penambahan PJU yang dilimpahkan Disperkim LH ke Dishub.
11) Masih kurangnya Alat pengujian serta sarana dan prasarana yang mendukung di UPT PKB Banjang untuk melengkapi syarat akreditasi dari B ke A.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sama halnya dengan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini, RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SKPD : Dinas Perhubungan Kab. HSU

Lembar ... dari ...

Rancangan Awal RKPD						Analisa Hasil Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	30.803.397	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	30.803.397	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	838.996.000	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	838.996.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bula n	4.688.769.444	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bula n	4.688.769.444	
4	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.680.000	4	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.680.000	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9.998.000	5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9.998.000	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.422.340	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.422.340	
7	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	53.738.571	7	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	53.738.571	
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	179.619.556	8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	179.619.556	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rancangan Awal RKPD						Analisa Hasil Keberatan						Catatan Penting
No.	Program / kegiatan / Sub. Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Induk Dishub dan UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148.532.500	9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Induk Dishub dan UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148.532.500	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	216.008.978	10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	216.008.978	
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10.000.000	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10.000.000	
12	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 kali kegiatan	669.486.500	12	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 kali kegiatan	669.486.500	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	197.180.000	14	Sub Kegiatan Penyediaan Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	197.180.000	
14	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan	Kabupaten HSU	Jumlah Penerangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	23 Unit	5.127.171.000	15	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan	Kabupaten HSU	Jumlah Penerangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	23 Unit	5.127.171.000	
15	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal pelabuhan, hulu pasar, pasir mas, sungai pandan,batahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	97.175.600	16	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal pelabuhan, hulu pasar, pasir mas, sungai pandan,batahi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	97.175.600	

16	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Penetapan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ijin penetapan pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	186.700.858	17	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Penetapan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten HSU	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetapkan Ijin Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	186.700.858
17	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten HSU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	2 Unit	200.000.000	18	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten HSU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	1 Unit	200.000.000	
18	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Beringin Balook, Danau Panggang dan Sungai Pandan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	11.376.675	19	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Beringin Balook, Danau Panggang dan Sungai Pandan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	11.376.675	
	Jumlah				12.511.121.158		Jumlah				12.511.121.158	

Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa pagu sub kegiatan yang berbeda dari rancangan awal RKPD dengan hasil analisis rencana kebutuhan anggaran tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada rancangan awal RKPD pagu total 18 sub kegiatan sebesar Rp. 12.511.121.158,-

Pada bidang LLAJ di sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota terdapat kebutuhan penambahan anggaran untuk Pembuatan ZoSS di sekolah yang ada pada Jalan Kabupaten sebesar Rp. 200.000.000,- dan Meterisasi PJU sebanyak 30 buah (@Rp. 6.000.000 x 30) dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan pada Bidang LLASD dibutuhkan Kapal Patroli Sungai untuk menunjang kinerja untuk survei dan pengawasan alur sungai yang ada di Daerah Kab. HSU.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengumpulan informasi dari beberapa penelitian tersebut terkait usulan program dan kegiatan untuk Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat di lihat di tabel berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Pregram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Hulu Sungai Utara

SKPD : Dinas Perhubungan

No	Prog/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Desa Sungai Binuang, Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Desa Kalimramai RT.01 &02, Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas		

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel

Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Urusan Bidang Perhubungan					
No	Nama Dewan	Program	Kegiatan	Usulan	Lokasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan, 2020- 2024 maka Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi,
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Adapun 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi,
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan,

Dengan berlandaskan pada isu strategis dan capaian/kesuambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta strategi pembangunan yang telah dirumuskan, maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1

SS 1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

Tujuan 2

SS 2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

SS 3. Meningkatnya Kinerja Pelayananan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan 3.

SS 4. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan

Tujuan 4

SS 5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

SS 6. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

SS 7. Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten

SS 8. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas

Tujuan 5:

SS 9. Meningkatnya Inovasi Terapan Bidang Perhubungan

SS 10. Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi.

Adapun sesuai rumusan sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 fokus yaitu

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan dibentuk untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing".

Dinas perhubungan secara khusus mendukung misi pembangunan kempat yaitu "Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya" dengan Prioritas Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas.

Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi regional dan nasional yang terpadu, tertib dan lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau, efektif dan efisien. Untuk mendukung produksi dan perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha, pengembangan wilayan, peningkatan dinamika pembangunan serta untuk memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa agar mampu mengantisipasi perkembangan perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan usaha nasional.

Strategi transportasi saat ini cukup pesat perkembangannya baik di darat, laut dan maka Strategi dimasing-masing subsektor sebagai berikut :

I. Transportasi Darat
   a. Angkutan Jalan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tujuan pembangunan transportasi jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan meningkatkan ketancaran/ kemudahan aksesibilitas daerah terisolir kewilayah berkembang serta mendukung pengembangan kawasan strategis dengan meningkatkan kondisi jalan dari kelas III menjadi kelas II, merealisasikan angkutan massal di wilayah Metropolitan Banjarbakula serta peningkatan pelayanan transportasi, penataan struktur dan penyederhanaan sistem perizinan.

b. Angkutan Sungai dan Danau

Pengembangan transportasi sungai dan danau di Kalimantan Selatan diarahkan pada peningkatan kondisi alur pelayaran, baik lebar dan kedalamannya dermaga/ pelabuhan maupun fasilitas keselamatan pelayaran untuk lebih menjamin keselamatan dan kelancaran angkutan, mengupayakan pelayanan angkutan sungai mendapatkan subsidi pemerintah.

e. Angkutan Penyeberangan

Pengambangan transportasi angkutan penyeberangan pada daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman dan handal.

Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yang akan diformulasikan rencana strategis, untuk menciptakan sistem transportasi handal, aman, nyaman dan selamat.

Kebijakan pengembangan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Maka dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, sistem transportasi dikembangkan ke arah terpadunya intra dan antar moda transportasi baik darat, laut maupun udara.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan perencanaan jangka Pendek Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan dan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur wilayah. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Tujuan dan Sasaran yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai sakip Dinas Perhubungan	A (81.95)	A (82.25)
2	Meningkatnya pemerataan pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur dasar	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur dasar	21-40 (Sedang)	N/A
				Desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	97.72	96.80
				Tingkat pemanfaatan terminal (%)	95.14	74.95
				Tingkat pemanfaatan dermaga (%)	64.92	58.62
				Penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan (%)	78.89	12.70

Pada indikator sasaran Nilai Sakip di tahun 2025 mempunyai target mendapatkan nilai Sakip dengan kategori A (81,95) serta sampai akhir periode renstra 2023 – 2026 dengan kategori A (82), untuk mewujudkan target tersebut maka SKPD Dinas Perhubungan akan lebih meningkatkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Data awal yang ada pada tahun 2023 jumlah desa yang dapat terhubung oleh moda transportasi darat maupun sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 212 desa dari jumlah desa se kabupaten berjumlah 219 desa dengan persentase sebesar (96,80%), dengan menargetkan di tahun 2025 ini capaian peningkatan desa yang terhubung dengan moda transportasi sejumlah 214 desa (97,26%) dari jumlah 219 desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan di dukung instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, dengan adanya peningkatan desa yang terhubung dengan moda transportasi juga akan mempengaruhi kelancaran jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang kepedesaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

yang akan berdampak peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan serta terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996), dengan adanya isu strategis tentang kurangnya pemanfaatan terminal di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka Dinas Perhubungan sebagai instansi yang terkait memiliki target untuk lebih meningkatkan fungsi terminal, dengan jumlah total angkutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 535 buah, pada tahun 2025 dengan target jumlah angkutan yang masuk ke dalam terminal perminggu berjumlah 479 buah dengan persentase 89,53% sampai dengan target akhir periode renstra 2023 – 2026 sebesar persentase 92,34%, dengan adanya peningkatan angkutan yang masuk ke terminal sehingga akan ada peningkatan aktivitas di terminal yang akan berdampak meningkatnya fungsi terminal dengan didukung dengan program dan kegiatan agar terminal lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat.

Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan/merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan Cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum ataupun saluran kotor. Pada indikator sasaran tingkat pemanfaatan dermaga pada tahun 2025 dengan target jumlah angkutan sungai yang bertambat/bersandar berjumlah 570 buah dari total angkutan sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 887 buah (64,26%) dan sampai dengan target akhir periode renstra 2023 – 2026 dengan target capaian persentase sebesar 65,95%, dengan di dukung program dan kegiatan agar lebih meningkatkan fungsi dermaga bagi masyarakat.

Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak terdapat, terutama para angkutan umum sehingga terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor human error maupun dari segi teknis angkutan tersebut, sehingga perlunya pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan - kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan lingkungan. Maka Dinas Perhubungan sebagai instansi yang terkait memiliki target adanya peningkatan jumlah angkutan yang lulus uji disetiap tahun nya dan jumlah angkutan umum wajib uji sebanyak 1272 unit angkutan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan pada tahun anggaran 2025 ini SKPD Dinas Perhubungan memiliki target jumlah angkutan yang lulus uji berjumlah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1100 unit atau persentase sebesar (86,48%), sehingga akan terciptanya angkutan umum yang standar layak jalan bagi keselamatan pengemudi dan penumpang ataupun pengguna jalan lainnya.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana kerja Dinas Perhubungan meliputi program dan kegiatan . Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan Kebutuhan anggaran sangat penting dalam melaksanakan program dan kegiatan dan dapat diusulkan melalui pendanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1						*Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18					**BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
3	18	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KERJA**	-	100%	8,215,575,725	-	-	100%	4,280,895,500
3	*18*	*01*	*2*	*01*		*Kegiatan Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**Nilai SAKIP**	-	100%	28,663,837	-	-	100%	145,090,302
3	18	01	2	01	0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Diskah	18 Laporan	30,863,837	APBD	-	18 Laporan	145,480,842
3	*18*	*01*	*2*	*02*		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Belanjaan penunggangkawan actual dengan rencana anggaran dan*	-	100%	3,327,739,444	-	-	100%	3,327,737,500
3	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskah	27 Orang/bulan	4,088,703,444	APBD	-	27 Orang/bulan	3,122,737,500
3	18	01	2	02	0015	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Okskah	12 Dokumen	838,999,000	APBD	-	12 Dokumen	789,000,000

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2	*10*	*01*	*2*	*06*		*Kegiatan Administrasi Umum*	*Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum*	-	*100%*	*290.473.496*	-	-	*100%*	*264.730.463*
2	10	01	2	06	1002	Sub Kegiatan penyediaan gedung dan peningkatan kantor	Jumlah Paket Pemenuhan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Disbah	8 Paket	25.000.000	A2SBO	-	8 Paket	15.000.000
2	10	01	2	06	1003	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	Disbah	10 Paket	9.990.000	A2SBO	-	10 Paket	11.990.100
2	10	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	Disbah	1 Paket	34.422.540	A2TBO	-	1 Paket	34.422.540
2	10	01	2	06	0005	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disbah	10 Paket	55.710.571	A2SBO	-	10 Paket	52.750.725
2	10	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Dalam dan luar daerah	10 Laporan	190.619.936	A2SBO	-	10 Laporan	180.579.000
2	*10*	*01*	*2*	*08*		*Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Urusan Pemerintah Daerah*	-	*100%*	*148.552.560*	-	-	*100%*	*148.552.560*
2	15	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekda Dalam dan UPTD	12 Laporan	148.552.560	A2SBO	-	12 Laporan	148.552.560
2	*10*	*01*	*2*	*09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedia dan terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-	*100%*	*226.958.972*	-	-	*100%*	*129.314.020*
2	10	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dikeluarkan Pajak dan	Disbah	40 Unit	219.108.974	A2SBO	-	40 Unit	114.314.020

2	18	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21 Unit	10.000.000	APBD	-	21 Unit	9.000.000
2	18	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara	Unit	0 Unit	-	APBD	-	0 Unit	-
2	19	02				**PROGRAM PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	-	98%	5.877.271.100	-	-	98%	5.500.205.564
2	*19*	*02*	*2*	*00*		***Kegiatan Penunjang Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota***	***Terlaksananya Kewalaran Penggunaan Jalan Raya***	-	*100%*	*333.846.500*	-	-	*100%*	*213.846.500*
2	19	02	2	01	0001	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten /Kota	9 kali kegiatan	161.846.500	APBD	-	9 kali kegiatan	213.846.500
2	*19*	*02*	*2*	*02*		***Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota***	***Berfungsinya Sekunder Perlikhan Lalu Lintas***	-	*100%*	*5.293.331.600*	-	-	*100%*	*5.210.375.464*
2	19	02	2	02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	Kabupaten /Kota	1 Unit	167.180.900	APBD	-	1 Unit	165.204.464
2	19	02	2	03	0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kabupaten /Kota	21 Unit	5.127.131.000	APBD	-	21 Unit	5.087.171.000
2	*19*	*02*	*2*	*03*		***Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C***	***Terlaksananya kewenangan dan terlaksana terminal***	-	*100%*	*17.173.000*	-	-	*100%*	*142.173.000*
2	19	02	2	19	0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Terminal pelanggsran, bola pasar, pasar desa, sungai, (sesuai kelas)	8 Unit	17.173.000	APBD	-	8 Unit	142.173.000

2	19	03				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Terlaksanya Pelayaran dengan Baik	-	85%	618.176.333	-	-	85%	284.840.695
2	19	03	2	07		***Kegiatan Penataan Lintas Penyeberangan dan Pemanfaatan Penggunaan untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Terciptanya Kenyamanan, Keselamatan, kemudahan dan kelancaran LLAJR***	-	100%	186.799.858	-	-	100%	172.686.120
3	19	03	2	07	0004	Pengendalian dan Pengevaluasian Antaran Daerah Bangun, Dasar dan Penyeberangan dan Penarangan Penggunaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengevaluasian Jaringan Trayek Bangun, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengevaluasian pemanfaatan Penggunaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten HSU	12 Laporan	186.799.858	APBD	-	12 Laporan	172.686.120
2	19	03	2	13		***Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Uji Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau***	***Terciptanya keberadaan dan keselamatan dermaga***	-	100%	325.376.479	-	-	100%	325.376.479
2	19	03	2	13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	Kabupaten HSU	1Unit	500.000.000	APBD	-	-	-
3	19	03	2	13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dioperasikan dan dipelihara	Dermaga Bakalik, Danau Panggang dan Sungai Paidau	3 Unit	31.374.473	APBD	-	3 Unit	31.374.473
						JUMLAH				**12.511.333.158**		**JUMLAH**		**9.999.241.760**

Jumlah Program : 3
Jumlah Kegiatan : 10
Jumlah Sub Kegiatan : 18

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

TAGGING TERKAIT ANGGARAN KEMISKINAN TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Fokus Prioritas	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13.0002	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000	APBD Kab/Kota

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

REKAP KEGIATAN YANG RESPONSIF GENDER
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
				2025	
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp	365.846.500,00
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp	5.127.171.000
3	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lalu Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	186.799.858,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

MATRIK 1 : TARGET INDIKATOR SDGs - PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

TARGET	KODE	INDIKATOR	KETERANGAN	KODE KAB.	INDIKATOR KAB.	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET					INSTANSI PELAKSANA
									2023	2024	2025	2026	2027	
TUJUAN 9 : BERDIRI, BIDANG DAN INFRASTRUKTUR (MENGANGGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH MENGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI)														
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Indikator nasional yang sesuai dengan global			DISHUB KAB. HSU	orang		1718	1739	1880	1901	2042	DISHUB KAB. HSU
	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global			DISHUB KAB. HSU	buah	0	1	-	-	-	-	DISHUB KAB. HSU

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V



PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketuatan dan disiplin para penyelenggara satuan kerja perangkat daerah dan dukungan dari penyelenggara satuan kerja daerah lainnya serta masyarakat secara umum.

Dengan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah di bidang Perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja satuan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian rencana kerja ini dibuat untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang.

Amuntai, April 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. HAMDANI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650701 198602 1 007

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-SELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	:
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Penatausahaan, Penggunaan, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DPA	:
Jenis Layanan	:
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Prakiraan Maju	: Rp. 0,00
Perkiraan Maju	: Rp. 39.600.139,00
Alokasi 2026	: Rp. 140.466.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Biaya yang Dibutuhkan	Rp. 39.600.139,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan
Hasil	Persentase Nilai SAKIP	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.600.139,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.600.139,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.600.139,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.600.139,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.600.139,00
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.813.100,00
	[#] Belanja Penggandaan Hasil Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.813.100,00
	[-] Fotocopy dan Jilid					Rp. 5.813.100,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas HVS F4 / A4	6943	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.777.200,00
	Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas HVS A4 / F4	1000	Lembar	1.200,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Sebara Lembar Hitam, Lapis Plastik Transparan Muka...	27	Pulpen	85.000,00	0 %	Rp. 693.100,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	10	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat Hard Cover Spesifikasi : Ampel Landing, Lapis Plastik Transparan, HVS	4	Buah	99.250,00	0 %	Rp. 830.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.990.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nutrisi Desa : Desa Transisi Umum-Desa Reg Hasil					Rp. 24.990.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.990.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak Acara Tingkat Kabupaten	150	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 21.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : snack	200	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.803.100,00

Kota, [illegible]
Kepala Dinas Perhubungan

H. HAMDANI, S.Sos, M.AP
NIP. 196507071988031007

Penetapan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HAFIDZ, SP., MP	196806151997031004	Wakil Ketua	
2	Drs. KHAIRUSSALIM	19700421 199403 1 009	Anggota	
3	WAJUPRANDIYAN, S.ST.MAP	19691101 200003 1 007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MS	19691224 199803 1 005	Anggota	
5	RUSMI, SH	19731002 200601 1 007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, PERPUSNAS
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Kepangkat Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
DPA	: -
Jenis Layanan	: -
Tahun Perencanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Perangkat Daerah	: Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Rancan 2025	: Rp. 4.888.783.444,00
Rancan 2026	: Rp. 5.133.717.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.888.783.444,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan
Hasil	Persentase kehadiran pelanggung jawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.888.783.444,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.888.783.444,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.888.783.444,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.888.083.444,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.834.666.136,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.991.167.820,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Keterangan	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.891.997.840,00
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp. 1.891.997.840,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.891.997.840,00	0 %	Rp. 1.891.997.840,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 133.106.295,00
	[#] Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.106.295,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp. 133.106.295,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	133.106.295,00	0 %	Rp. 133.106.295,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 190.373.618,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 171.738.734,00
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.738.734,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 171.738.734,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	171.738.734,00	0 %	Rp. 171.738.734,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 18.634.861,00
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.634.861,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 18.634.861,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	18.634.861,00	0 %	Rp. 18.634.861,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 180.819.200,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 180.819.200,00
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.819.200,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 180.819.200,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	909.074.250,00	0 %	Rp. 180.819.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 870.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 870.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 870.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 870.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	330.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 55.014.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 47.268.800,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.268.800,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 47.268.800,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	47.268.800,00	0 %	Rp. 47.268.800,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 7.965.200,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Pengelolaan Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.984.200,00
	[-] Tunjangan Pengelolaan Umum PPPK					Rp. 7.984.200,00
	Belanja Tunjangan Pengelolaan Umum PPPK	1	Tahun	7.984.200,00	0 %	Rp. 7.984.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 113.272.310,80
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 100.805.019,80
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.805.019,80
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp. 100.805.019,80
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	100.805.019,80	0 %	Rp. 100.805.019,80
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 12.470.724,00
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.470.724,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp. 12.470.724,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	12.470.724,00	0 %	Rp. 12.470.724,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 135.255.448,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 122.606.448,00
	[#] Tunjangan PPh ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.606.448,00
	[-] Tunjangan PPh PNS					Rp. 122.606.448,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	122.606.448,00	0 %	Rp. 122.606.448,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 1.800.300,00
	[#] Tunjangan PPh ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.300,00
	[-] Tunjangan PPh PPPK					Rp. 1.800.300,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	1.800.300,00	0 %	Rp. 1.800.300,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 100.000,00
5.1.01.01.20.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 50.000,00
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp. 50.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.01.01.20.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 50.000,00
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 50.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.264.696.800,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.811.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.875.900.000,00
	[+] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.900.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja PNS					Rp. 1.875.900.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	1.875.900.000,00	0 %	Rp. 1.875.900.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 35.000.000,00
	[+] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja PPPK					Rp. 35.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	35.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 80.600.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 80.600.000,00
	[+] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.600.000,00
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS					Rp. 80.600.000,00
	Tunjangan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	80.600.000,00	0 %	Rp. 80.600.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp. 13.800.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp. 13.800.000,00
	[+] Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS					Rp. 13.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1	Tahun	13.800.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 214.680.000,00
5.1.01.03.07	Bekerja Honorarium					Rp. 214.680.000,00
5.1.01.03.07.0001	Bekerja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 214.680.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 214.680.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp. 6.240.000,00
	Honorarium Bendhara Pengeluaran (termasuk Bendahara BOS) atau Bendahara Penerimaan (jika ada) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	12	Orang / Bulan	520.000,00	0 %	Rp. 6.240.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 10.080.000,00
	Honorarium Bendhara Pengeluaran (termasuk Bendahara BOS) atau bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 m...	12	Orang / Bulan	1.890.000,00	0 %	Rp. 10.080.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp. 35.328.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Bukan Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 65 mi...	12	Orang / Bulan	2.010.000,00	0 %	Rp. 24.120.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang					**Rp. 12.000.000,00**
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai aset yang dikelola di atas Rp 65 Miliar sam...	12	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Honorarium PPK					**Rp. 19.080.000,00**
	Honorarium Panitia Pemeliharaan Perlengkapan (PPK) SKPD Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	18	Orang / Bulan	1.060.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 121.440.000,00**
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	11	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 18.120.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 ju...	30	Orang / Bulan	1.030.000,00	0 %	Rp. 43.560.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 mi...	12	Orang / Bulan	1.810.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 mil...	36	Orang / Bulan	2.310.000,00	0 %	Rp. 83.080.000,00
					Jumlah :	Rp. 4.606.760.444,00

Kab. Pulau Sangat Utara,
Kepala Dinas Pendidikan

H. HAMDANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19840101198603 1007

Pencatatan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HAMDI, SP, MP	19680101198703 1004	Wakil Ketua	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Name	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	[illegible] SHARUDDIN,M	19720831199403 1008	Anggota	
3	HAJERIANSYAH, S.ST,MAP	19830131 201003 1007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MH	19691224 199803 1005	Anggota	
5	HUSNI, SH	19721030 200312 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	1.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	1.13.0.00.0.00.21.0001 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	-
Program	1.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	1.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.13.01.2.02.0009 Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
DPA	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 838.950.400,00
Alokasi 2026	Rp 268.800.000,00

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 838.950.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase kelancaran pemrosesan/penerbitan sesuai dengan mekanisme anggaran dan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	1.13.01.2.02.0009 Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kriteria / Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 830.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 830.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 830.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.700.000,00
5.1.02.01.01.0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bensin Pas					Rp. 7.700.000,00
	[#] Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.700.000,00
	[-] Belanja Meterai					Rp. 7.700.000,00
	Meterai Rp. 10.000 Spesifikasi : Standar PDE PADONE SA Rp 10.000,	770	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 777.012.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 774.900.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 234.900.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 234.900.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi Pendidikan Non PNS					Rp. 15.900.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi Pendidikan	1 x 12	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi Program Non PNS					Rp. 85.800.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi Program	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi Umum Bidang LLAJ Non PNS					Rp. 19.000.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi Umum	1 x 12	Orang Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi Umum Bidang LLAJD Non PNS					Rp. 19.000.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi Umum Bidang LLAJD	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi Umum Non PNS					Rp. 66.000.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi Umum	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Pembantu Administrasi UPT PKB Manjang Non PNS					Rp. 108.000.000,00
	Belum Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Pembantu Administrasi UPT PKB Manjang	6 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 324.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 324.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jasa Jaga Pengamanan Monitoring Speedboat					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jaga Pengamanan Monitoring Speedboat	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Malam					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Jaga Malam Kantor Induk Dishub	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Malam Kantor UPT PKB Banjarej					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Jaga Malam Kantor UPT PKB Banjarej	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa petugas jaga pengamanan dan pemeriksaan kendaraan di lokasi/ua Kantor PKB					Rp. 180.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Jaga Pengamanan Pemeriksaan Kendaraan di Lokasi/...	15 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	[-] Jasa petugas jaga pengamanan traffic light, warning light & jalur satu arah Kantor PKB					Rp. 342.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Jaga Pengamanan Traffic Light, Warning Lig...	19 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 342.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 36.000.000,00
	[F] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000,00
	[-] Jasa Dokter Bus					Rp. 36.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Dokter Bus Dishub Non PNS	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.110.400,00
5.1.02.03.01.0005	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.382.400,00
	[F] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.382.400,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.382.400,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Untuk Non ASN	48 x 1x	Orang Bulan	2.400,00	0 %	Rp. 1.382.400,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.728.000,00
	[F] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.728.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.728.000,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Untuk Non PNS	48 x 1x	Orang Bulan	3.000,00	0 %	Rp. 1.728.000,00
5.1.02.04	Belanja Pelatihan Kinas					Rp. 54.158.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Pelatihan Kinas Dalam Negeri					Rp. 54.158.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Pelatihan Dinas Kinas					Rp. 54.158.000,00
	[F] Belanja Pelatihan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 54.158.000,00
	[-] Belanja Pelatihan Dinas Dalam Daerah					Rp. 54.158.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Spesifikasi : Pejabat Eselon II	46	Orang / Kegiatan	333.000,00	0 %	Rp. 15.300.000,00
	Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV/PNS Dan Lulusan IV	232	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 34.800.000,00
					Jumlah :	Rp. 838.900.400,00

Kab. Hulu Sungai Utara,
Kepala Dinas Pendidikan

H. HANDANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19661127198402 1 001

Pembulatan	:	
Tanggal	:	
Lokasi	:	
1.		
2.		
dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIS, SP, MP	19680918199703 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. ISNA RUSSALIM	19730427 199802 1006	Anggota	
3	NAJEHANSYAH, S.ST, MAP	19821018 200301 1007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MS	19691004 199603 1005	Anggota	
5	RUSNI, SH	19731 20 200312 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PPKD	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterkaitan Dokumen	: Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2007	: Rp. 0,00
Alokasi 2008	: Rp. 25.691.830,00
Alokasi 2009	: Rp. 15.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.691.830,00
Keluaran	Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Penataan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.691.830,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.224.330,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					Rp. 600.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium					Rp. 600.000,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 600.000,00
	[#] Honorarium PPBJ Pengadaan Peralatan Kelengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 600.000,00
	[-] Honorarium PPBJ Pengadaan Peralatan Kelengkapan Kantor					Rp. 600.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Surat tanda pelaksanaan (akhir pengadaan)	1	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.344.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.344.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.344.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.344.200,00
	[#] Belanja Kelengkapan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.644.550,00
	[-] Belanja Kelengkapan Komputer					Rp. 18.644.350,00
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	4	Buah	180.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Mouse Spesifikasi : Logitech	3	Dash	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning 003 Black	12	Botol	145.000,00	0 %	Rp. 1.704.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam 003 Cyan	12	Botol	123.000,00	0 %	Rp. 1.704.000,00
	Catridge Spesifikasi : Tinta Printer HP 121 Colour	16	Buah	180.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Cartridge Spesifikasi : Tinta Canon PIXMA Black	11	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Mouse Pad Spesifikasi : Bahan Standard	1	Buah	42.150,00	0 %	Rp. 42.150,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 14.497.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 14.497.800,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 14.497.800,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 9.497.800,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 9.497.800,00
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.497.800,00
	[-] Pengadaan Peralatan Komputer Kantor					Rp. 9.497.800,00
	Laptop Spesifikasi : Processor AMD Ryzen 3 3200U 16GB SSD Vega 512 GB PC	1	Unit	9.497.800,00	0 %	Rp. 9.497.800,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perangkat Personal Computer					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.000.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan Komputer Kantor					Rp. 5.000.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Printer, Copy dan Scan, Fax Wifi ADF WiFi, PPN Dll...	1	Buah	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 20.081.000,00

Kepala Unit...
Penanggung Jawab Pembukuan

DINAS PERIKANAN

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARTATI, SP, MP	19680301 [illegible]	Wakil Ketua	
2	Drs. KHAIRUSSALIM	19730421 [illegible]	Anggota	
3	WAHYUNINGSIH, S.ST.MAP	19691216 [illegible]	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MS	19691024 [illegible]	Anggota	
5	RUDINI, SH	19731202 [illegible]	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-SELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENYUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
NPW	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Perpustakaan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.996.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.996.287,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %
Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 9.996.400,00
Keluaran	Jumlah Paket Penyediaan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket
Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/desa
Kelompok Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Penyediaan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.996.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.996.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.996.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.796.400,00
5.1.02.01.21	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.796.400,00
5.1.02.01.21.0005	Belanja Alat Makan untuk Kegiatan Kantor-Rapat/Bekal untuk Kegiatan Bakar Lainnya					Rp. 9.796.400,00
	[#] Belanja Pengadaan Aset Tetap dan Bukan Pembentuk Operasi Dinas - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.796.400,00
	[-] Belanja Pengadaan Kelengkapan dan Bahan Pembentuk					Rp. 9.796.400,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Gulung Spesifikasi : Selesai Pilgub	38	Pcs/m	4.500,00	0 %	Rp. 189.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : Selesai Pilgub	63	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 1.652.000,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai	7	Buah	25.500,00	0 %	Rp. 181.500,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Sapu Ijuk	7	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 245.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Alat Pel Lantai	23	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 920.000,00
	Cobek Pembersih Kaca Spesifikasi : cling 425ml	10	Botol	38.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : cling 5 Liter	10	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Pembersih Porselen Spesifikasi : cling Porselen	10	Botol	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi : Refill Alkohol Window Cleaner	5	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Penyegar Ruangan Spesifikasi : Penyegar Ruangan Gelas Biasa Sedang	24	Pcs/m	45.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Hand Soap Spesifikasi : Sabun Refill Botol Lunget Botol	24	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Sikat Spesifikasi : Sikat Lantai	5	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Sikat Cuci Piring Spesifikasi : Refill	25	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Kompor Gas Spesifikasi : Rinnai Refill	3	Buah	516.300,00	0 %	Rp. 1.550.900,00
5.1.02.00	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan Kebersihan					Rp. 1.000.000,00
	[4] Pembayaran Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor (Pembulan Desember) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.200.000,00
	[-] Pembayaran Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor (Multi Bulan Sebelumnya)					Rp. 1.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Rambu Sampah Spesifikasi : (1 s.d 100 Orang	10	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 8.000.000,00

Mura
Kepala Perhitungan

Pontianak	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIS, CP, MP	19630315 198703 1010	Wkil Ketua	
2	Dra. HJA RUSSALIM	19710927 199803 2005	Anggota	
3	NAZEMIYAH, S.ST,MP	1968121 6199003 2007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Kel., MS	19691224 199803 1005	Anggota	
5	RUSMI, SH	19731005 200501 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	2.15.0.00.0.00.01.0006 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	-
Program	2.15.01 PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.15.01.2.06.0004 Pengelolaan Barang Logistik Kantor
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum\Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan Kegiatan	Apabila Dinas Perlu/Lengkapi dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 24.429.450,00
Alokasi 2026	Rp. 30.000.345,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.429.450,00
Keluaran	Jumlah Paket Belanja Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Pengelolaan Barang Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum\Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Belanja Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.429.450,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.429.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.429.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.429.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.429.450,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.300.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum\Dana Bagi Hasil					Rp. 8.300.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 8.300.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan Spesifikasi : Kursi	5	Buah	3.350,00	0 %	Rp. 58.100,00
	Pintu Spesifikasi : Semua Ukuran 3ft	2	Pak	60.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Pita Tik Nyala Hitam Merah Spesifikasi : Baru	3	Roll	17.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Gunting Spesifikasi : Standard	2	Roll	53.500,00	0 %	Rp. 117.000,00
	Spidol DAP P Spesifikasi : Semua Standard	3	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Spidol Mama Kecil Spesifikasi : Semua Standard	3	Lusin	12.500,00	0 %	Rp. 22.200,00
	Spidol White Board Spesifikasi : Semua Standard	2	Lusin	110.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Semua Baik	21	Buah	6.500,00	0 %	Rp. 136.500,00
	Stapler Spesifikasi : Tanggung	5	Buah	45.600,00	0 %	Rp. 364.000,00
	Stapler Spesifikasi : Kuat	12	Buah	31.100,00	0 %	Rp. 373.200,00
	Stempel Spesifikasi : Nama Lokasi	5	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 625.000,00
	Tempat masukan kas Spesifikasi : Nampu bisa Ada	20	Buah	21.500,00	0 %	Rp. 327.000,00
1.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.007.480,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.007.480,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 1.007.480,00
	Kertas Foto Spesifikasi : 210 x 30	2	Rim	36.200,00	0 %	Rp. 72.480,00
	Kertas Kalkir Manila Putih Spesifikasi : Standar	5	Lembar	3.900,00	0 %	Rp. 19.500,00
	Kertas Stiker Spesifikasi : Sesuai Data Print	5	Pak	56.480,00	0 %	Rp. 282.400,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	Ambil	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gsm isi 500	10	Rim	50.000,00	0 %	Rp. 4.868.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 gsm isi 500	20	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Kertas Photo Sticker A4 Spesifikasi : Sebelah Anyker	10	Pak	61.700,00	0 %	Rp. 617.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.734.700,00
	[+] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.734.700,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 1.734.700,00
	Cetak Buku Agenda Surat Keluar Spesifikasi : Buku isi 50 Lembar Kuarto, ukuran A4, Hard Cover	2	Buah	64.350,00	0 %	Rp. 128.700,00
	Amplop DAMRI Spesifikasi : Ukuran Panjang	5	Pak	83.400,00	0 %	Rp. 417.000,00
	Amplop Surat Biasa Bergambar Spesifikasi : Standar	4	Pak	88.800,00	0 %	Rp. 355.200,00
	Amplop Surat Besar Spesifikasi : 110 x 240 mm 80 Rim	1	Rim	190.800,00	0 %	Rp. 778.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.355.300,00
	[#] Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 357.000,00
	[-] Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 357.000,00
	Baki Double Tray spesifikasi : Bahan Alloy uk 100 ember	10	Buah	32.700,00	0 %	Rp. 327.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.998.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 5.998.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 Lembar	8	Pcs	68.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Map File Spesifikasi : Bahan Goodtext	10	Pcs	89.250,00	0 %	Rp. 892.500,00
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas	28	Pak	30.100,00	0 %	Rp. 842.800,00
	Map Dokter Spesifikasi : Warna sesuai, warna bebas	24	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Map Plastik Lipat Spesifikasi : Warna Bebas	9	Lusin	142.900,00	0 %	Rp. 778.500,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Semester Genap / [illegible]	7	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 141.400,00
	Refill [illegible]	60	Buah	11.900,00	0 %	Rp. 869.000,00
	Refill [illegible]	67	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.868.663,00
	Binder Clip	10	Kotak	69.900,00	0 %	Rp. 699.991,00
	Penghapus	2	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Cutter Besar	4	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 112.000,00
	Dusting	8	Buah	28.783,00	0 %	Rp. 230.764,00
	[illegible]	10	Pcs	48.000,00	0 %	Rp. [illegible]
	[illegible]	10	Pcs	70.000,00	0 %	Rp. 748.080,00
	[illegible]	2	Pcs	65.900,00	0 %	Rp. 126.800,00
	[illegible]	15	Buah	11.328,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Papercilip Tegonal Clip	10	Pak	43.160,00	0 %	Rp. 431.600,00
	[illegible]	4	Buah	38.600,00	0 %	Rp. 356.200,00
	Penggaris	4	Batang	8.463,00	0 %	Rp. 47.263,00
	Penggaris	2	Batang	17.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
	Penggaris	1	Batang	20.000,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Penghapus Papan Tulis	2	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 35.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincí Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Lubang Spesifikasi : Bahan Imex Folio	5	Lusin	104.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Map Snelhechter (Kertas) Spesifikasi : Sinkra Jaya	4	Pak	101.000,00	0 %	Rp. 404.000,00
	Map Snelhechter (Plastik) Spesifikasi : Sinkra Sempol	4	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Map Dos Plastik Spesifikasi : Tas Jinjit	10	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Buku ekspedisi/pengiriman Spesifikasi : isi 100 lembar	6	Buah	20.700,00	0 %	Rp. 124.200,00
					Jumlah :	Rp. 24.450.400,00

Sungai Utara, ...
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH KABUPATEN ...
DINAS PERHUBUNGAN
KEP. U. OKU UTARA

..., S.Sos, M.AP
... 1998021007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HAFIDZ, SP, MP	19680915199703 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. ROSIDI ZEDAL,M	19720421199403 1006	Anggota	
3	RAZEBANSYAH, S.ST,MAP	19681010199303 1007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MSi	19691004199803 1003	Anggota	
5	RUSNI, SH	19701202200801 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERSANDIAN
Unit Organisasi	2.15.3.00.2.00.01.3008 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	-
Program	2.15.01 PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.15.01.2.06.0005 Pengelolaan Barang Dokumen dan Perlengkapan
DPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. HULU Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan Sasaran	Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 71.602.700,00
Alokasi 2026	Rp. 72.156.705,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Biaya yang dibutuhkan	Rp. 71.602.700,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Dokumen dan Perlengkapan yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi (Hasil)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.15.01.2.06.0005 Pengelolaan Barang Dokumen dan Perlengkapan
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Dokumen dan Perlengkapan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.602.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.602.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.602.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 71.602.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.701.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetak					Rp. 33.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 33.000.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 33.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak warna foto di kertas Spesifikasi : Setara 3 x 10 cm/m	4	Rim	179.100,00	0 %	Rp. 716.400,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Hijau Dasar Warna	130	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Amplop Cetak Besar Elevasi Spesifikasi : Sesuai Standart	5	Pak	179.700,00	0 %	Rp. 898.500,00
	Cetak Amplop Kecil Spesifikasi : Standar	4	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Cetak Warna A4HVS Spesifikasi : Sekian Standar	1	Pak	168.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Cetak Kertas Elevasi Spesifikasi : Standar Kantor	9	Pak	109.889,00	0 %	Rp. 1.207.900,00
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi : Sesuai Standar	60	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Cetak warna dan Spesifikasi : F4 standar	800	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Cetak Kartu Nomor Surat Spesifikasi : Sesuai Standar	4	Buah	172.500,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : standar	10	M2	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : Sesuai Kunci	5	Rim	29.000,00	0 %	Rp. 144.200,00
	cetak kartu undangan Spesifikasi : standar	11,00	Pak	35.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum>Dana Bagi Hasil					Rp. 14.893.400,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 14.893.400,00
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas HVS F4 / A4	14154	Lembar	489,00	0 %	Rp. 9.771.906,00
	Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas HVS A4 / 54	3080	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 3.708.000,00
	Jasa Biaya Spesifikasi : Dalam Lokasi Hitam, Laptik Warna / Komputer Mobil	10	Paket	25.000,00	0 %	Rp. 1.253.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 17.883.800,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.883.800,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

No. Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak					Rp. 17.683.800,00
	Kertas Perkasa Spesifikasi : Id 100 Lbr/Pak	972	Pak	18.200,00	0 %	Rp. 17.682.600,00
					Jumlah :	Rp. 17.683.700,00

Pembulungan

DINAS PERHUBUNGAN

S.Sos, M.AP

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIS, SP, MP	19680913 199702 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. IDHAR USMALMI	19730421 199403 1005	Anggota	
3	MUDRIANSYAH, S.ST,MAP	19801216 199503 1197	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MS	19801004 199903 1003	Anggota	
5	IRJAN, SH	1671 202203 1 001	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0005 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.30 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.30.0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan Ruasan	: Asisten Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Kinerja 2024	: Rp. 0,00
Kinerja 2025	: Rp. 176.849.000,00
Kinerja 2026	: Rp. 180.625.000,00

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Data yang dibutuhkan	Rp. 170.849.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan
Hasil	Persentase Terselenggaranya Sarana Prasarana Aparatur sesuai Standar	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.30.0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Dari Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 176.849.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 176.849.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 176.849.000,00
5.1.02.01	Belanja Jasa					Rp. 53.000.000,00
5.1.02.01.21	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.000.000,00
5.1.02.01.21.0002	Belanja Jasa Tenaga Pembungkus					Rp. 53.000.000,00
	[0] Operasional Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah, Provinsi dan Pusat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 53.000.000,00
	[-] Operasional Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah, Provinsi dan Pusat					Rp. 53.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Operasional Perjalanan ke Luar Daerah (dalam Provinsi) Spesifikasi : Staf / THS	[illegible]	Orang / Hari	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
[illegible]	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. [illegible]**
[illegible]	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. [illegible]**
[illegible]	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. [illegible]**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. [illegible]**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi					**Rp. [illegible]**
	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Fungsional (PPNS Gol. III)	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon III / PPNS Gol. [illegible]	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi					**Rp. [illegible]**
	Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Fungsional (PPNS Gol. IV)	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / (PPNS Gol. [illegible])	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi					**Rp. [illegible]**
	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PPNS Gol. IV	[illegible]	Orang / Kegiatan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sosialisasi Pelatihan Ir-K-PMI Sub Kegiatan	2	Orang / Kegiatan	1.800.000,00	0 %	Rp. 13.251.000,00
					Jumlah :	Rp. 119.349.000,00

Kepala Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

[illegible], S.Sos, M.AP
[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIS, SP, MP	196408151997031014	Wakil Ketua	
2	Drs. [illegible]	197304211994021008	Anggota	
3	NAJEMANSYAH, S.ST, MAP	1968[illegible]	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MSi	19[illegible]1003	Anggota	
5	RUSAL, SH	19[illegible]1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
OPD	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi BTH	: Rp. 0,00
Alokasi BBA	: Rp. 140.999.587,00
Alokasi BOP	: Rp. 139.440.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Tersedianya sarana Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
		Rp. 140.999.587,00
Masukan	Dana yang telah/akan	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	12 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 140.999.587,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.999.587,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 140.999.587,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.871.380,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.871.380,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 11.133.700,00
	[1] Belanja Alat Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.133.700,00
	[-] Belanja Alat Listrik Kantor					Rp. 11.133.700,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Spesifikasi : TL Model Natural Pipih (PS) 18 Watt	15	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 1.035.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED Bohlam Philips 12 Watt	10	Buah	34.100,00	0 %	Rp. 341.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED 9 watt	13	Buah	58.800,00	0 %	Rp. 764.500,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : NYMHY 2 x 1,5 m	115	Meter	16.100,00	0 %	Rp. 1.759.180,00
	Lampu Sein Spesifikasi : Sanwa Transfer 035	24	Unit	37.000,00	0 %	Rp. 0.547.000,00
	Klem Lampu Sorong Spesifikasi : Stainless	40	Buah	5.750,00	0 %	Rp. 634.000,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 3G 2 x 2,5 mm	100	Meter	15.800,00	0 %	Rp. 2.870.000,00
	Saklar Spesifikasi : Kuningan	20	Buah	23.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	Saklar Gandeng Spesifikasi : Stopkontak Broco	203	Buah	22.300,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED 7 watt	25	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Alat Bantuan untuk Kegiatan Kantor-Kantor/Aktivitas untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.445.800,00
	[0] Belanja Alat Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.445.800,00
	[-] Belanja Alat Listrik Kantor					Rp. 1.445.800,00
	Kabel Roller Spesifikasi : Kabel NY	17	Buah	39.000,00	0 %	Rp. 663.000,00
	Saklar Spesifikasi : Hitachi 4A 3d 2	30	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Saklar Spesifikasi : Kitachi 4A 3d 2	18	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 382.800,00
5.1.00.00	Belanja Jasa					Rp. 127.279.087,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 127.279.087,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.280.800,00
	[0] Belanja Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.280.800,00
	[-] Belanja Air					Rp. 6.280.800,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tarif Air Minum PDAM Spesifikasi : Kelompok II Rumah Tangga A4 Pemakaian 1 s.d 10 M3	1013	M3	8.200,00	0 %	Rp. 0.000.000,00
6.1.02.02.01.0001	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 99.779.087,00
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 99.779.087,00
	[-] Belanja Listrik					Rp. 99.779.087,00
	Tarif Listrik Spesifikasi : Golongan P-1/TR daya di atas 2200 VA	9.1000	Kwh	1.522,00	0 %	Rp. 77.779.087,00
	Tarif Listrik Spesifikasi : Golongan P-2/TR untuk penerangan jalan umum	11000	Kwh	1.700,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
6.1.02.02.01.0003	Belanja Koneksi Faksimili/Internet TV Berlangganan					Rp. 28.000.000,00
	[#] Belanja Langganan Internet dan TV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 28.000.000,00
	[-] Belanja Langganan Internet dan TV					Rp. 28.000.000,00
	Tarif TV Kabel Berlangganan Spesifikasi : TV Kabel Lokal	12	Unit / Bulan	40.000,00	0 %	Rp. 0.000.000,00
	Internet Indihome Spesifikasi : SP 1/8 Mbps (Paket Harga sudah termasuk PPN)	12	Per Bulan	875.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Internet Indihome Spesifikasi : Bywan 100 Mbps	12	Paket	467.000,00	0 %	Rp. 5.604.000,00
	Internet Indihome Spesifikasi : SP 100 Mbps (Paket Harga sudah termasuk PPN)	12	Buwan	614.000,00	0 %	Rp. 7.416.000,00
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 600.000,00
	[-] Belanja Telepon					Rp. 600.000,00
	Tagihan Telpon Spesifikasi : Tagihan Telpon Pos	12	Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
					Jumlah :	Rp. 140.836.087,00

DINAS PERHUBUNGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	:	
[illegible]	:	
[illegible]	:	

1.

2.

Dst.

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. MUHAMMAD HARTADI, SP, MP	19680815198720100	Wakil Ketua	
2.	Drs. KHAIRUSSALIM	19730421199403100	Anggota	
3.	MAJIDAH SYAH, S.E.,M.AP	19681019199303100	Anggota	
4.	PAHRIZAL, S.Hut., MS	19691004199603100	Anggota	
5.	RUSNI, SH	19731202200501000	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0 30.5.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
DPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Perhubungan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	: Rp. 3,00
Alokasi 2025	: Rp. 215.065.660,00
Alokasi 2026	: Rp. 111.215.436,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.065.660,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dikeluarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kelompok Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dikeluarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Hasil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 215.065.660,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 215.065.660,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.065.660,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.465.960,00
5.1.02.01.21	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.465.960,00
5.1.02.01.21.0003	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 28.465.960,00
	[2] Belanja BBM Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.415.140,00
	[-] Belanja BBM Genset					Rp. 11.415.140,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Oli Mesin Spesifikasi : Gard Gear 118	48	Liter	80.000,00	0 %	Rp. 3.474.000,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	321	Liter	17.940,00	0 %	Rp. 5.758.140,00
	[#] Belanja BBM Kendaraan Operasional Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak					Rp. 17.000.823,00
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas					Rp. 17.000.823,00
	Bahan Bahan Minyak Spesifikasi : Pertamax	1063	Liter	17.940,00	0 %	Rp. 17.000.820,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 168.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 168.000.000,00
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 120.480.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 120.480.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp. 17.720.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Provinsi Kalimantan Selatan Spesifikasi : Roda Empat	1	Unit / Tahun	17.720.000,00	0 %	Rp. 17.720.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					Rp. 30.870.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Provinsi Kalimantan Selatan Spesifikasi : Double Gardan	1	Unit / Tahun	30.870.000,00	0 %	Rp. 30.870.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Mobil Kepala Dinas					Rp. 42.750.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Selatan Spesifikasi : Hybrid Roda 6	1	Unit / Tahun	42.750.000,00	0 %	Rp. 42.750.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua					Rp. 3.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua					Rp. 3.000.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua	20	Unit / Tahun	450.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03.03.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 27.110.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 27.110.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6					Rp. 27.110.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Roda 6 Spesifikasi : Roda 6	1	Unit / Tahun	27.110.000,00	0 %	Rp. 27.110.000,00
5.1.02.03.03.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 93.540.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 93.540.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Operasional Speed Boat					Rp. 93.540.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Spread Mooring Operasional - Spread Mooring	1	Unit / Tahun	30,048,000.00	5 %	Rp. 30,048,000.00
					Jumlah :	Rp. 210,696,960.00

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Dinas PERHUBUNGAN

Ir. [illegible], S.Sos, M.SP
NIP. 19691115 [illegible]

Ditetapkan di	:	
Tanggal	:	
Operator	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARTA, SP. MP	19680819 [illegible]	Wakil Ketua	
2	Drs. SYAMSUSSALAM	19730421 [illegible]	Anggota	
3	MAULIDWAN FAHLEVI, S.ST.MAP	19851018 [illegible]	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., M.Si	19821004 [illegible]	Anggota	
5	RUSNI, SH	19721203 [illegible]	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 1.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.13.01 PROGRAM PENGADAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.13.01.2.09.0008 Pemeliharaan Perpustakaan Wilayah Lainnya
OPD	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Perpustakaan dan UPTD Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan)	100 %
Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan dan Materi Lainnya yang Dipelihara	01 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.13.01.2.09.0008 Pemeliharaan Perpustakaan Wilayah Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan dan Materi Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	Jenis	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.03.01.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 10.000.000,00
	[5] Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp. 10.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

No. Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	16	Unit / Tahun	350.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Belanja Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Perawatan Komputer Notebook	10	Unit / Tahun	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Belanja Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	11	Unit / Tahun	150.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
					Jumlah :	Rp. 10.000.000,00

Kepala Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

[illegible], S.Sos, M.AP

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HANDI, SP, MP	19680915 [illegible]	Wakil Ketua	
2	Drs. HAMPELSALIM	19730421 [illegible]	Anggota	
3	HAJERIANSYAH, S.ST,MAP	19801216 [illegible]	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MP	19801004 [illegible]	Anggota	
5	RUSNI, SH	19731202 [illegible]	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	[illegible]
Bidang Urusan	[illegible]
Unit Organisasi	[illegible]
Sub Unit Organisasi	-
Program	[illegible]
Kegiatan	[illegible]
Sub Kegiatan	[illegible]
DPA	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Pengguna Angkutan Umum Kab. Hulu Sungai Utara
Rincian 2021	Rp. 0,00
Rincian 2022	Rp. [illegible]
Rincian 2023	Rp. [illegible]

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. [illegible]
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan dokumen yang mendukung SDGs Indikator	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	[illegible]
Sumber Pendanaan	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. [illegible]
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. [illegible]
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. [illegible]
5.1.01.33	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					Rp. [illegible]
5.1.01.33.07	Belanja Honorarium					Rp. [illegible]
5.1.01.33.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa					Rp. [illegible]
	[5] Belanja Gaji Transportasi Jumlah Hdj Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. [illegible]
	[-] Honorarium PPK [Gaji Transportasi Jumlah Hdj]					Rp. [illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Surat tugas pembentukan panitia pengadaan	1	Orang / Bulan	580.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 631.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 631.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 180.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Perbantuan					Rp. 180.000.000,00
	[#] Jasa Petugas Pelaksana Penertiban Pengaturan Jalur Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 154.000.000,00
	[-] Jasa Penertiban Parkir Tercatat					Rp. 15.000.000,00
	Jasa Penertiban Harus Terparkir Spesifikasi : Penertiban Parkir liar di Jalan Umum	120	Orang / Kendaraan	100.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Jasa Pengaturan Jalur Jalan					Rp. 154.000.000,00
	Jasa Pengaturan Jalur Spesifikasi : Pengaturan lalu lintas di jalan Daerah untuk jamaah Haji	7000	Orang / Kegiatan	22.000,00	0 %	Rp. 154.000.000,00
	[-] Jasa Pengaturan Kir Luar Daerah untuk Jamaah Haji					Rp. 8.000.000,00
	Jasa Pengaturan Jalur Spesifikasi : Pengaturan Jalur Kir Luar Daerah Untuk Jamaah Haji	23	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru					Rp. 30.000.000,00
	Jasa Petugas Jaga Posko Spesifikasi : Posko Lebaran, Natal, Tahun Baru	300	Orang / Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perusahaan dan Mesin					Rp. 337.500.000,00
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 325.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Transportasi Jamaah Haji Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 154.000.000,00
	[-] Transportasi Angkutan Petugas Jamaah Haji					Rp. 9.000.000,00
	Sewa Transportasi Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Petugas Jamaah Haji	9	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Transportasi Angkutan Jamaah Haji					Rp. 320.000.000,00
	Sewa Transportasi Spesifikasi : Kendaraan roda 6 (Bus) Angkutan Jamaah Haji	16	Unit	20.000.000,00	0 %	Rp. 320.000.000,00
5.1.02.02.04.0017	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 12.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Transportasi Jamaah Haji Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 12.000.000,00
	[-] Sewa Truk Angkutan Barang Jamaah (Tas Koper)					Rp. 12.000.000,00
	Sewa Transportasi Spesifikasi : Truk pengantar Barang Jamaah Haji	4	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Truk Angkutan Barang Jenis Lain					Rp. 3.900.000,00
	Sewa Transportasi Spesifikasi : Truk angkutan Barang Jenis Lain Hal	1	Unit	3.900.000,00	0%	Rp. 3.900.000,00
					Jumlah :	Rp. 332.190.000,00

Kepala Dinas Perhubungan

[redacted]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. MUHAMMAD HAFIDZ, SIT, MT	19000915198311001A	Wakil Ketua	
2	Dra. KHAIRUL ISNAUN	19780421198402100S	Anggota	
3	NAUDRAWISYAH, S ST MAP	19681019198603100?	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., MS	19831004198503100A	Anggota	
5	RUSNI, SH	19710902006011007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterkaitan Dengan	: Pengawas Lalu Lintas di jalan raya Kab. Hulu Sungai Utara
Rancangan 2024	: Rp. 0,00
Rancangan 2025	: Rp. 468.840.000,00
Rancangan 2026	: Rp. 142.824.488,00

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Oleh	87 %
		Rp. 468.840.000,00
Masukan	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota yang Tersedia	1 Unit
Hasil	Pelaksanaan Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kelompok Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 468.840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.840.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.840.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.840.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengelolaan Barang/Jasa					Rp. 3.840.000,00
	[2] Penyusunan PJU Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 600.000,00
	[-] Honor PPBJ Penyusunan PJU di Desa Sungai Rimang					Rp. 600.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Buat lengkapi persyaratan pokmil pengadaan	1	Orang / Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	[#] Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 880.000,00
	[-] Honorarium PPK] Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross					Rp. 880.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Buat lengkapi persyaratan pokmil pengadaan	1	Orang / Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	[#] Pengadaan Warning Light Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 880.000,00
	[-] Honor PPTK] Pengadaan Warning Light di Desa Kalimanah					Rp. 880.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Buat lengkapi persyaratan pokmil pengadaan	1	Orang / Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 484.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 297.000.000,00
5.2.03.15	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 297.000.000,00
5.2.03.15.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 297.000.000,00
5.2.03.15.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 170.000.000,00
	[#] Pengadaan Warning Light Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 170.000.000,00
	[-] Pengadaan Warning Light di Desa Kalimanah					Rp. 170.000.000,00
	Pengadaan Warning Light Spesifikasi : Lebar 2 Kaki 30 cm, Tiang Galvanis, Panel dan Kot...	2	Unit	85.000.000,00	0 %	Rp. 170.000.000,00
5.2.03.12.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp. 127.000.000,00
	[#] Pemasangan PJU Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 127.000.000,00
	[-] Pemasangan PJU di Desa Rungal Mekuning					Rp. 127.000.000,00
	Pemasangan PJU Spesifikasi : Tiang dan panel Controller 10 watt, tinggi 6 Meter...	30	Titik	2.900.000,00	0 %	Rp. 127.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 166.500.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 166.500.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 166.500.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 158.000.000,00
	[#] Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 158.000.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Marka Jalan & Zebra Cross					Rp. 7.500.000,00
	Jasa Konsultan Pengawasan Marka Jalan Zebra Cross Spesifikasi : Konsultan Pengawasan Marka Jalan Zebra Cross	1	Paket	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

No. Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Konsultan Perencana Marka Jalan & Zebra Cross					Rp. 9.900.000,00
	Jasa Konsultan Perencana Marka Jalan Zebra Cross Spesifikasi : Konsultan Perencana Marka Jalan Zebra Cross	1	Paket	9.900.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	[-] Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross					Rp. 190.000.000,00
	ABB 004, Pembuatan Marka Jalan dan Zebra Cross Spesifikasi : Marka Jalan dan Zebra Cross	500	M2	400.000,00	0 %	Rp. 190.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 499.340.000,00

Kepala Dinas
Pekerjaan Perencanaan

Dr. [illegible], S.Kom, M.M
NIP. [illegible]

Penetapan/Perubahan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIDI, SP., MP	19680810 199703 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. ISNIRUSDIANA	197304211994031005	Anggota	
3	WAJEPWATTAN, S.ST.MAP	19681010 199803 1007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hut., M.Si	19681004 199803 1005	Anggota	
5	RUSNI, SP.	19721202 200901 2007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Kelang Urusan	: 2.15 URUSAN PENGEMBANGAN BUDAYA, PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.5.80.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SUAU
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
BKU	: -
Jenis Lokasi	: -
Sumber Pembiayaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi Pemerintah Jalan Dana Perangkat Lalu Lintas dan Retribusi Transportasi Umum
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pengguna Lalu Lintas di jalan raya Kab. Hulu Sungai Utara
Anggaran 2024	: Rp. 0,00
Rancangan 2026	: Rp. 3.882.180.300,00
Anggaran 2026	: Rp. 6.867.171.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	80%
Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 3.882.180.300,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	51 Unit
Hasil	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi dan Alokasi Pendapatan Jalan Dana Perangkat Lalu Lintas dan Retribusi Transportasi Umum
Lokasi	: - Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kelompok Sub Kegiatan	: - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Anggaran	:

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Nilai Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.682.108.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.682.108.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.682.108.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 482.726.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 430.726.000,00
5.1.02.01.01.0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 430.726.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Mutu dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 430.726.000,00
	[-] Alat Listrik PJU					Rp. 430.726.000,00
	Pasang Spesifikasi : 10 Ampere	200	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 10.400.000,00
	Isolasi Kabel (Electric Tape) Spesifikasi : 3 m	5	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 575.000,00
	Isolasi 3x2mm Spesifikasi : Sahara Maximax	150	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 2.595.000,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : NYYHY 2 x 1,5mm Merk Kabel nyelekit	6	Roll	1.610.000,00	0 %	Rp. 10.890.000,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Sakura Clamp NYM 2 x 1,5 mm	10	Pcs	1.681.800,00	0 %	Rp. 16.818.000,00
	Acidter Spesifikasi : Indikator	70	Buah	96.838,00	0 %	Rp. 6.217.580,00
	Paving Lampu Spesifikasi : Tempel	800	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 7.760.800,00
	Paving – Tiebeling Spesifikasi : Biasa Gambling	500	Set	38.000,00	0 %	Rp. 19.180.000,00
	Kabel SR Spesifikasi : 2x1,5mm	1000	Meter	17.000,00	0 %	Rp. 35.800.000,00
	Kabel Ties Spesifikasi : Panjang, lebar 100cm	50	Pcak	85.500,00	0 %	Rp. 4.241.250,00
	Kapasitor Spesifikasi : Sakura xxxxx	150	Buah	80.300,00	0 %	Rp. 12.045.000,00
	Klem Lampu Spesifikasi : Nacil Pck. Isi ka. 10 isi 100.	180	Dus	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keterangan	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alam Lampu Gang Spesifikasi : Standar	180	Buah	21.700,00	0 %	Rp. 3.906.000,00
	Kontaktor Spesifikasi : Minimal	30	Buah	147.683,00	0 %	Rp. 33.525.000,00
	Lampu Spesifikasi : Sonic HPI-T 250 W	70	Buah	460.000,00	0 %	Rp. 32.200.000,00
	Lampu Spesifikasi : Hop Jalur, 100 watt (Merk T)	60	Buah	833.800,00	0 %	Rp. 45.859.000,00
	Lampu Spesifikasi : Hop Jalan, 50 watt (Merk T)	90	Buah	617.500,00	0 %	Rp. 55.000.000,00
	Lampu Spesifikasi : Lampu Biang, merk / Type	600	Meter	26.600,00	0 %	Rp. 15.908.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED Sakura Philips 45 Watt	600	Buah	1.60.500,00	0 %	Rp. 69.000.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED Sakura Philips 12 Watt	180	Buah	54.100,00	0 %	Rp. 9.413.000,00
	Lampu LED Spesifikasi : Sakura Philips Merk 45 Watt	24	Buah	862.500,00	0 %	Rp. 22.700.000,00
	Lampu Hi Spesifikasi : 30 watt	60	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	MCB Spesifikasi : 10, 16, 20, 32 Ampere	100	Buah	172.300,00	0 %	Rp. 17.269.000,00
	Panel Box Spesifikasi : Kuat/Baik	7	Buah	1.725.000,00	0 %	Rp. 12.075.000,00
	Saklj Spesifikasi : Ajas (Tarikan Kabel SF)	47	Buah	46.300,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Stang Lampu Spesifikasi : Besar Besi 1 1/2 Inch (2,5 meter)	47	Buah	301.063,83	0 %	Rp. 9.720.000,00
	Stang Lampu Spesifikasi : Sedan Besi 1 1/2 Inch (4meter)	33	Buah	216.833,33	0 %	Rp. 6.975.000,00
	Tiang Spesifikasi : 10 A	10	Buah	875.000,00	0 %	Rp. 8.850.000,00
	Tiang Listrik Spesifikasi : 400 W	30	Buah	431.300,00	0 %	Rp. 12.939.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Consultant Supervision Specification : Ahli Lingkungan	20	Unit	33.000.00	0 %	Rp. 660.000,00
	Lampu Kap Gedung Specification : 45W/ 45W	40	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Lampu Sorot Specification : LED 100 watt	11	Buah	625.000,00	0 %	Rp. 6.775.000,00
	Kamerton Specification : Stainless	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Kabel Listrik Specification : NYY 2 x 6 Sqmm, Sekura ETERNA	5	Unit	1.501.500,00	0 %	Rp. 7.508.500,00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 82.000.000,00
5.1.02.01.03.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 82.000.000,00
	[4] Belanja Komponen Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Bercahaya) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Mata dan Sarana Transportasi Lainnya					Rp. 27.000.000,00
	[-] Belanja Komponen Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Bercahaya)					Rp. 27.000.000,00
	Rambu Merah Specification : WL-400 DC	2	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Segmen Lampu Aspek Specification : 30 Cm/LED/220V ac	2	Buah	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Segmen Lampu Aspek Specification : 30 Cm/LED/12V dc	2	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Modul Lampu Aspek Specification : 30 Cm/LED/220V ac	1	Buah	1.100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Modul Lampu Aspek Specification : 30 Cm/LED/12V dc	1	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Segmen Lampu Aspek Specification : 20 Cm/LED/220V ac	1	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Segmen Lampu Aspek Specification : 20 Cm/LED/12V dc	1	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Modul Lampu Aspek Specification : 20 Cm/LED/220V ac	1	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Modul Lampu Aspek Specification : 20 Cm/LED/12V dc	1	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Belanja Komponen Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Tak Bercahaya) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Mata dan Sarana Transportasi Lainnya					Rp. 55.000.000,00
	[-] Belanja Komponen Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Tak Bercahaya)					Rp. 55.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dana Operasional Biaya Spesifikasi : Almunium 5 mm dgn Perkerasa Drawing	10	Buah	600.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Tiang Rambu Spesifikasi : Pipa Galvanis 5.00"	10	Buah	750.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Dana Rambu PPPU Spesifikasi : Aluminium tebal 5 mm	5	Buah	2.500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.157.440.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.132.840.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Kenangunan Pemeliharaan dan Bencana Umum					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pemangunan PSU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Pemangunan PSU					Rp. 5.000.000,00
	Upah Pengawas UP Spesifikasi : Non PNS	100	Trip	50.000,00	0%	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Umum					Rp. 20.619.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 10.619.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan					Rp. 10.619.000,00
	Upah Tukang Kebun (UP) Spesifikasi : Non PNS	200.0	Unang	9.000,00	0 %	Rp. 10.619.000,00
	[#] Belanja Jasa / Upah Pengawas, Teknisi Lampu PJU/PJL Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 10.800.000,00
	[-] Belanja Jasa / Upah Pengawas, Teknisi Lampu PJU/PJL					Rp. 10.000.000,00
	Upah Pasang Tambah Lampu 60W Spesifikasi : Pekerja Non PNS	100	Titik Lampu	100.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 96.409.090,90
	[#] Belanja Jasa / Upah Pengawas, Teknisi Lampu PJU/PJL Non ASR Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 86.409.090,90
	[-] Belanja Jasa / Upah Pengawas, Teknisi Lampu PJU/PJL					Rp. 21.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Pengawas Teknisi Lampu PJU/PJL	12	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[-] Belanja Jasa / Upah Teknisi Lampu PJU/PJL					Rp. 64.800.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Teknisi Lampu PJU/PJL	3 x 12	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 64.800.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 2.972.000.000,00
	[#] Belanja Pekering PJU/PJL Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkat Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 2.972.000.000,00
	[-] Alat Listrik PJU					Rp. 2.972.000.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Lainnya Spesifikasi : Sebagian P.J.P.T.P. untuk pembangunan jalan umum	175.000	Km	1.780,00	0 %	Rp. 311.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Lembur					Rp. 31.228.080,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Mutu dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 31.228.080,00
	[-] Belanja Lembur					Rp. 31.228.080,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan IV	39	Orang / Jam	30.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan III	69	Orang / Jam	90.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan II	93	Orang / Jam	34.000,00	0 %	Rp. 1.812.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Non ASN	366	Orang / Jam	20.000,00	0 %	Rp. 7.320.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan IV	40	Orang / Hari	41.800,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan III	80	Orang / Hari	37.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan II	93	Orang / Hari	30.000,00	0 %	Rp. 2.790.000,00
	Belanja Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur Non ASN	370	Orang / Hari	21.000,00	0 %	Rp. 11.470.000,00
5.1.03.03.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 4.800.000,00
5.1.03.03.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp. 4.800.000,00
	[#] Sewa Tempat Lokasi CCTV Online & Power Supply Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Mutu dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 4.800.000,00
	[-] Sewa Tempat Lokasi CCTV Online & Power Supply Listrik					Rp. 4.800.000,00
	Sewa Tempat Lokasi CCTV Online & Power Supply Listrik Spesifikasi : Internet IP Publik CCTV Online	48	Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.080.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.080.800,00
5.1.02.03.02.3046	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 42.080.800,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PKB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Mutu dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 42.080.800,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PKB					Rp. 12.800.000,00
	Pemeliharaan Kalibrator Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : pengecekan dan pengaturan emisi dan asap	12	Unit	1.066.666,00	0 %	Rp. 12.800.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kewenang	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuatan Pemetaan Aset Kab Uji Sasaran/Misal : Penanaman dan Bahan Alat Uji	1	Paket	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
					Jumlah :	Rp. 3.662.194.900,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HABIBI, SP, MP	19660415 199703 1004	Wakil Ketua	
2	DRS. KHAIRUSSALIM	19720421 199803 1005	Anggota	
3	NAZERIANSYAH, S.ST, MAP	19851210 200902 1007	Anggota	
4	RAHMADIN, Drs, M.Si	19661220 199803 1001	Anggota	
5	RUSNI, SH	19731202 200901 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0000.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.08.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan	: 2.15.08.2.03.0001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
DPA	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan Kegiatan	: Pengguna Terminal Angkutan Barang Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	: Rp. 0,-00
Alokasi 2025	: Rp. 17.169.680,00
Alokasi 2026	: Rp. 102.113.680,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terlaksanakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.169.680,00
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang rehabilitasi dan terpelihara	5 Unit
Hasil	Persentase Terminal yang di rehabilitasi dan dipelihara	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.08.2.03.0001 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.169.680,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.169.680,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.169.680,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 808.680,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 808.680,00
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 808.680,00
	[5] Belanja Pendidikan Kebencanaan dan Bahan Pendamah (Terminal) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Antar Daerah					Rp. 808.680,00
	[ ] Belanja Pendidikan Kebencanaan dan Bahan Pendamah (Terminal)					Rp. 808.680,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

No. Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai	2	Unit	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	2	Buah	28.500,00	0 %	Rp. 57.000,00
	Sikat Sanggah Spesifikasi : Sikat Sanggah	2	Buah	35.500,00	0 %	Rp. 71.000,00
	Alat Pel Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2	Buah	40.500,00	0 %	Rp. 81.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Sabun Wipol Pel/Ekl	2	Botol	35.500,00	0 %	Rp. 71.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 16.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan UPTD dan Terminal Spesifikasi : Pembayaran Honorer Kantor Daerah					Rp. 12.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kebersihan Terminal					Rp. 12.000.000,00
	Jasa Petugas Kebersihan Terminal Spesifikasi : Terminal Pasarminas, Pelabuhan, Pasar, Pasar Mini, Bongo..	60	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor UPT dan Pendes					Rp. 4.000.000,00
	Jasa Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : UPTD Rio Pakava	12	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 17.199.500,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HAFIS, SP, MP	19680315199703 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. ADHARI USMAN, M	19720407199403 1005	Anggota	
3	SAIFFUDDIN, S.ST, MAP.	19661016199003 1007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Pd., MS	19691224199003 1009	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	[illegible] SH	197312222000031007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.19.5.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.07 Pemerapan Lintas Penyelenggaraan dan Pengusahaan Penggunaannya untuk Kapal yang Melayani Penyelenggaraan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Penerapan Pengusahaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
APBD	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan Sasaran	: Pengguna Angkutan Sungai dan Danau Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi SBH	: Rp. 0,00
Alokasi DAK	: Rp. 155.705.000,00
Alokasi DAK	: Rp. 170.868.185,00

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terlaksananya Pelayanan dengan Baik	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.705.000,00
Keluaran	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan dan pemeriksaan Pengusahaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Persentase monitoring dan pengendalian alur sungai yang dilaksanakan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Nm Kegiatan	: 2.19.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Penerapan Pengusahaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan dan pemeriksaan Pengusahaan untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

[illegible]	:	
Anggaran	:	
[illegible]	:	

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HAFIDZI, SP. MP	19680915199003 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. M HERUSSALIM	19730402 199803 1005	Anggota	
3	MUHRIMAN RYAN, S.ST.MAP	1968121619930 21001	Anggota	
4	HAMRUSNI, S.Hut., MS	19691224 199803 1005	Anggota	
5	RUSNI SH	19731202200501 1001	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.15 URUSAN PERDAGANGAN BARANG PERTUMBUHAN
Unit Organisasi	2.15.0.00.3.08.01.8000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	-
Program	2.15.01 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	2.15.0.0.2.15.0002 Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Sub Kegiatan	2.15.0.0.2.15.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
BPUD	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	Pengurus Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terlaksanya Pelayaran dengan Aman	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit
Hasil	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.15.0.0.2.15.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengelolaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pembangunan Pelabuhan Sungai Desa Sungai Durak Kec. Babirik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium PPTK Pembuatan Pondasi Desa Sungai Durak Kec. Babirik					Rp. 680.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : Saat terjadi pelelangan pejabat pengadaan	1	Orang / Bulan	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
5.2	BELANJA MODAL					Rp. [illegible]
5.2.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. [illegible]
5.2.05.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. [illegible]
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. [illegible]
5.2.05.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pelabuhan Bandara					Rp. [illegible]
	[#] Pembangunan Pelabuhan Sungai Desa Sungai Duren Kec. Batin Ik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. [illegible]
	[-] Kenaikan Pengawasan Tambatan Perahu Desa Sungai Duren					Rp. [illegible]
	Jasa Konsultan Pengawasan Tambatan Perahu Spesifikasi : Konsultan Pengawasan Tambatan Perahu	1	Paket	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
	[-] Kenaikan Perencana Tambatan Perahu Desa Sungai Duren					Rp. 19.700.000,00
	Jasa Konsultan Perencana Tambatan Perahu Spesifikasi : Konsultan Perencana Tambatan Perahu	1	Paket	19.700.000,00	0 %	Rp. 19.700.000,00
	[-] Pembangunan Pelabuhan Sungai Desa Sungai Duren Kec. Batin Ik					Rp. [illegible]
	Jasa Pembangunan Tambatan Perahu Spesifikasi : Tambatan Perahu	1	Unit	[illegible]	0 %	Rp. [illegible]
					Jumlah :	Rp. [illegible]

Lihat Perhitungan

[illegible]

Perhatikan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIDI, SP, MP	19680315 200703 1004	Wakil Ketua	
2	Drs. KHAIRUDDIN, M	19730421 199403 1005	Anggota	
3	NAJERMANSYAH, S.ST, MAP	19681016 200003 1007	Anggota	
4	SYAMSUDIN, S.Hut., MS	19671224 199303 1006	Anggota	
5	RUSNI, SH	19731202 200501 1007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	1.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	1.15.0.00.0.00.01.0008 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	-
Program	1.15.09 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN
Kegiatan	1.15.09.2.15 Penyelenggaraan dan Penertiban Ijin Penyelenggaraan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Sub Kegiatan	1.15.09.2.15.0003 Penggelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
DPMA	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Penggguna Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau Kab. Hulu Sungai Utara
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 40.367.800,00
Alokasi 2026	Rp. 31.374.475,00

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pemerintah Terfasilitasinya Pelayanan dengan Baik	99 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.367.800,00
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terkoperasi dan Terpelihara	3 Unit
Hasil	Pemenuhan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dioperasikan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	1.15.09.2.15.0003 Penggelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terkoperasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.367.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.367.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.367.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 617.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 617.800,00
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 617.800,00
	[F] Belanja Peralatan Kelengkapan dan Bahan Pembersih (Dekranga) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 617.800,00
	[-] Belanja Peralatan Kelengkapan dan Bahan Pembersih (Dekranga)					Rp. 617.800,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tarif Spesifikasi : Dapur Lama	5	Buah	22.300,00	0 %	Rp. 109.580,00
	Tarif Spesifikasi : kamar kecil	4	Buah	30.808,00	0 %	Rp. 115.232,00
	Bak Air Bersih Spesifikasi : Untuk Dapur	4	Buah	35.900,00	0 %	Rp. 140.600,00
	Alat Pel Spesifikasi : Alat Pel Lantai	3	Buah	40.300,00	0 %	Rp. 80.600,00
	Pembelah Lantai Spesifikasi : Untuk Alat Pel	3	Buah	30.800,00	0 %	Rp. 337.780,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kecil	1	Buah	41.200,00	0 %	Rp. 41.200,00
5.1.02.03	Belanja Jasa					Rp. 27.000.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.000.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 9.000.000,00
	[#] Jasa Pemeliharaan Kebersihan Bermaga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.000.000,00
	[-] Jasa Pemeliharaan Kebersihan Bermaga					Rp. 9.000.000,00
	Jasa petugas kebersihan bermaga Spesifikasi : Kebersihan Dermaga Gubuk, Desa Panggang, Sungai	36	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.03.01.0037	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Speedboat					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Jaga Speedboat	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.750.000,00
5.1.03.03.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.750.000,00
5.1.03.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.750.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.750.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Jauh ke Kecamatan (Survei,monitoring, pemeliharaan, pengadaan barang (LAGD dll)					Rp. 12.750.000,00
	Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten Spesifikasi : Petugas Kapten 2	20	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 9.450.000,00

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjabaran Dinas Biaya Dalam Kabupaten / Operasional : Pasanan Dalam 5 5/1/1963 Gol Golongan IV	49	Orang / Kegiatan	153.000,00	0 %	Rp. 7.350.000,00
					Jumlah :	Rp. 48.987.600,00

Kepala Dinas Pemberdayaan
DINAS PEMBERDAYAAN
Hj. [illegible], S.Sos, M.AP
[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. MUHAMMAD HARIS, SP., MP	19650315 198703 1034	Ketua Komisi	
2	Drs. KHAIRUSSALIM	19730421 199403 1030	Anggota	
3	MUSRAWIYAH, S.ST.MAP	19831016 200031007	Anggota	
4	FAHRUDIN, S.Hum., MS	19691004 199803 1005	Anggota	
5	RUSMI, SH	19701003 200011007	Anggota	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan dengan hirarki perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan memiliki Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja perangkat daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yakni a) persiapan penyusunan;b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan;d) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatandan sub kegiatan baik yang termuat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai operasionalisasi RKPD yang disertai upaya peningkatan kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 3 (dua) dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

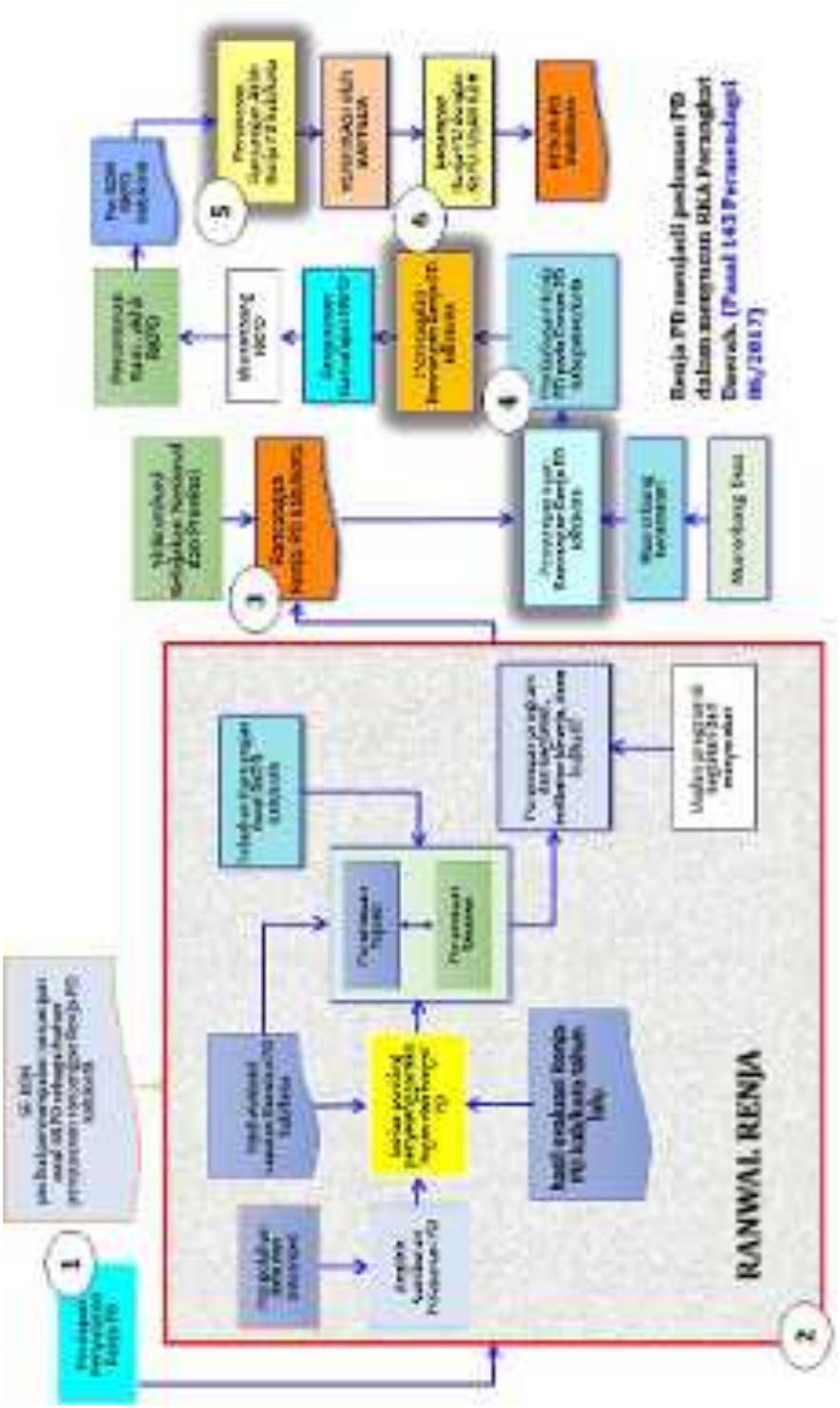
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja. Selain itu Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 juga harus

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas lintas SKPD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 dan RAPBD tersebut adalah Rencana Kerja SKPD yang telah ditetapkan dan telah dipedomani RKPD yang telah ditetapkan nantinya.

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA PD KABUPATEN/KOTA



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 berpedoman pada beberapa regulasi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPerpanjanganPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679), sebagaimana beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Hulu Sungai Utara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032;
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
35. Peratruan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026; dan
36. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 disusun dengan maksud :

a. Menjabarkan arah rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara selama satu tahun kedepan;
b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan pagu indikatif untuk jangka waktu satu tahun kedepan;
c. Sebagai landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan keselarasan perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

tugas pokok dan fungsinya serta hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai alat/perangkat dalam manajemen perencanaan yang efektif, efesien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil yang akan dilaksanakan serta menyajikan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis

Pendanaan atau anggaran dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan salah satu indikator keberhasilan SKPD terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam waktu yang bersangkutan. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAK) Bidang Perumahan. Belanja daerah yang masuk dalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yang pelaksanaannya diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 17.528.036.920,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.721.353.886,- atau mencapai 89,69%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Menurut DPA (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**6,081,963,690**	**5,255,770,756**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7,903,000**	**7,103,000**	**89.88**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,675,000	3,493,000	**95.05**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	138,000	135,000	**97.83**
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,815,000	1,800,000	**99.17**
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	690,000	450,000	**65.22**
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,585,000	1,225,000	**77.29**
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5,162,487,500**	**4,458,923,342**	**86.37**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,162,200,000	4,458,833,342	**86.37**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	287,500	90,000	**31.30**
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**366,938,240**	**305,112,977**	**83.15**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,126,300	12,780,000	**70.51**
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130,923,940	80,197,300	**61.25**
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217,888,000	212,135,677	**97.36**
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**342,135,500**	**312,614,268**	**91.37**
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,812,000	147,959,868	**89.23**
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	6,085,000	**67.61**
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167,323,500	158,569,400	**94.77**
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202,499,450**	**172,017,169**	**84.95**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173,099,450	143,857,169	**83.11**
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,400,000	28,160,000	**95.78**
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**61,350,000**	**60,105,000**	**97.97**
2.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**57,600,000**	**56,550,000**	**98.18**
2.1.1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	57,600,000	56,550,000	**98.18**
2.2	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**3,750,000**	**3,555,000**	**94.80**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3,750,000	3,555,000	**94.80**
3	**Program Kawasan Pemukiman**	**226,837,400**	**217,167,900**	**95.74**
3.1	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**226,837,400**	**217,167,900**	**95.74**
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	226,837,400	217,167,900	**95.74**
4	**Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh**	**592,437,400**	**583,696,830**	**98.52**
3.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**592,437,400**	**583,696,830**	**98.52**
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	592,437,400	583,696,830	**98.52**
5	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**319,882,800**	**271,619,700**	**84.91**
5.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**319,882,800**	**271,619,700**	**84.91**
5.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	310,882,800	262,669,700	**84.49**
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	9,000,000	8,950,000	**99.44**
6	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**470,736,300**	**464,660,000**	**98.71**
6.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**8,300,000**	**5,692,000**	**68.58**
6.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	8,300,000	5,692,000	**68.58**
6.2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**462,436,300**	**458,968,000**	**99.25**
6.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	462,436,300	458,968,000	**99.25**
7	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**282,903,250**	**249,720,000**	**88.27**
7.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**282,903,250**	**249,720,000**	**88.27**
7.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	43,140,000	29,672,000	**68.78**
7.1.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	239,763,250	220,048,000	**91.78**
8	**Program Pengelolaan Keanekagaman Hayati (Kehati)**	**1,364,929,350**	**1,137,485,200**	**83.34**
8.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**1,364,929,350**	**1,137,485,200**	**83.34**
8.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,364,929,350	1,137,485,200	**83.34**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**9,820,730**	**7,525,000**	**76.62**
9.1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**9,820,730**	**7,525,000**	**76.62**
9.1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	9,820,730	7,525,000	**76.62**
10	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**46,435,200**	**43,585,000**	**93.86**
10.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**46,435,200**	**43,585,000**	**93.86**
10.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30,310,200	27,820,000	**91.78**
10.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,125,000	15,765,000	**97.77**
11	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**77,903,500**	**44,696,000**	**57.37**
11.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**77,903,500**	**44,696,000**	**57.37**
11.1.1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	77,903,500	44,696,000	**57.37**
12	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**67,800,000**	**66,406,000**	**97.94**
12.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**67,800,000**	**66,406,000**	**97.94**
12.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	67,800,000	66,406,000	**97.94**
13	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**11,510,000**	**10,380,000**	**90.18**
13.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**11,510,000**	**10,380,000**	**90.18**
13.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	11,510,000	10,380,000	**90.18**
14	**Program Pengelolaan Persampahan**	**7,913,527,300**	**7,308,536,500**	**92.35**
14.1	**Pengelolaan Sampah**	**7,913,527,300**	**7,308,536,500**	**92.35**
14.1.1	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	52,407,500	46,962,000	**89.61**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

14.1.2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7,861,119,800	7,261,574,500	**92.37**
	TOTAL	**17,528,036,920**	**15,721,353,886**	**89.69**

Sumber : Dinas Perkim & LH Kab. HSU Tahun 2023

Berdasarkan realisasi kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 pada umumnya dengan tingkat serapan anggaran yang cukup baik, meskipun terdapat sub kegiatan dengan serapan anggaran rendah (57.37%) yaitu sub Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

2.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Realisasi kinerja berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan program dan kegiatan tahun 2023 adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaadalah program yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional SKPD dengan capaian kemajuan 86.42%. Dari 5(lima) kegiatan yang ada pada program ini cukup baik. Serapan tidak terserap adalah di sub kegiatan gaji dimana realisai sebesar Rp 4.458.833.342 tidak terserap sebesar Rp 703.366.658 dari pagu Rp 5.162.200.000.
b. Program pengembangan perumahan yang ditargetkan untuk tahun 2023 dapat dicapai sebesar 96.49%. Melalui sub kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani telah tersusun 1 dokumen identifikasi rumah dilokasi rawan bencana/potensi program pemerintah daerah meliputi 141 unit rumah sepanjang aliran sungai Negara meliputi Desa Pamintangan, Kelurahan Paliwara dan Kelurahan Murung Sari.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Program kawasan permukiman dengan indikator jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dengan realisasi 94.80%. Melalui program ini telah disalurkan bantuan social peningkatan 10 unit rumah tidak layak huni.

d. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh dengan indikator Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki dengan realisasi 95.74%. Melalui program ini telah disalurkan bantuan social peningkatan 30 unit rumah tidak layak huni.

e. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) persentase PSU pada perumahan dalam kondisi baik yangcapaian kinerjanya 84.49%.

f. Program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator persentase ketersediaan data perencanaan lingkungan hidup yang capaian realisasi 83.91%. Melalui program ini juga telah disusun KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RTRW.

g. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator nilai IKLH yang ditargetkan 67.7 point dan capaian yang diperoleh nilai 64.74 point. Dan untuk UPT Laboratorium Lingkungan telah mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji sebanyak 26 dokumen.

h. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) dengan target kinerja 100% pengelolaan keanekaragaman hayati telah mencapai 100% karena program ini adalah pemeliharaan/pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

i. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) ditargetkan 1 usaha/kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3, ternyata pada tahun 2023 ada 4 usaha/kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3, hal ini karena adanya pemenuhan persyaratan akrediatasi bagi puskesmas yang mensyaratkan Puskesmas harus memiliki izin pengelolaan TPS LB3.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

j. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah 100%, dimana jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana sebanyak 31 usaha/kegiatan dari target 25 usaha/kegiatan.

k. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator persentase pendidikan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ditargetkan 85% dan capaian 85% pada tahun 2023.

l. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator persentase penghargaan yang diterima masyarakat yang ditargetkan 100%, dan capaian 0% pada tahun 2023. Karena tidak ada pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten yang diterima masyarakat pada tahun 2023.

m. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dimana jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani pada tahun 2023 adalah 4 kasus dari target 3 kasus.

n. Program pengelolaan persampahan dengan indikator peningkatan persentase sampah yang terkelola 0.10%. Sedangkan capaian 0% karena tidak ada peningkatan persentase sampah yang terkelola pada tahun 2023.

Capaian kinerja terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**100%**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dok	1 dok
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	0
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD	1 dok	1 dok
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DKA-SKPD	1 dok	1 dok
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	1 lap
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	0	0
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD**	**100%**	**80%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 org/bln	41 org/bln
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	1 lap
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi umum PD**	**100%**	**100%**
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	2 paket

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	7 paket
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 lap	69 lap
1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12 lap
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 lap	2 lap
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 lap	1 lap
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opersional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40 unit	36 unit
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam**	**100%**	**100%**
2.1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program**	**100%**	**100%**
2.1.1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 dok	1 dok
2.2	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	3 lap	2 lap
3	**Program Kawasan Pemukiman**	**Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya**	**10%**	**3.46%**
3.1	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani**	**2 Ha**	**0**
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	10 unit rumah	10 unit rumah
4	**Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh**	**Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman**	**1%**	**0.70%**
4.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh**	**2 Ha**	**0**
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	30 unit rumah	30 unit rumah
5	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**30%**	**6.65%**
5.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase penyelenggaraan PSU perumahan**	**100%**	**0%**
5.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang funsi hunia	1 lokasi	0 lokasi
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 lap	0 lap
6	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**
6.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumeninformasi lingkungan yang tersusun**	**1 dok**	**1 dok**
6.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penerapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 dok	1 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6.2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu**	**2 dok**	**2 dok**
6.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD dan dokumen KLHS RTRW Kabupaten/Kota yang disusun	2 dok	2 dok
7	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**
7.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan**	**12 dok**	**12 dok**
7.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut	2 dok	2 dok
7.1.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	10 dok	26 dok
8	**Program Pengelolaan Keanekagaman Hayati (Kehati)**	**Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**
8.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**
8.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten?kota	4.2 Ha	4.2 Ha
9	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100%**	**10%**
9.1	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3**	**1 usaha/keg**	**4 usaha/keg**
9.1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	1 lap	1 lap

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**	**100%**	**10%**
10.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana**	**25 usaha/keg**	**31 usaha/keg**
10.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dok	2 dok
10.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasai izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	1 lap
11	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase pendidikan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**5%**	**5%**
11.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**85%**	**85%**
11.1.1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	180 orang	264 orang
12	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase penghargaan yang diterima masyarakat**	**100%**	**0**
12.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten**	**1 penghargaan**	**0**
12.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrofi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	0
13	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

13.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan**	**100%**	**100%**
13.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 dok	4 dok
14	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Peningkatan persentase sampah yang terkelola**	**0.10%**	**0%**
14.1	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**98.62%**	**44,54%**
14.1.1	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	1 lap	1 lap
14.1.2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	25.501,02 Ton	15.102,71 ton

2.1.2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Pada akhir tahun 2023 capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

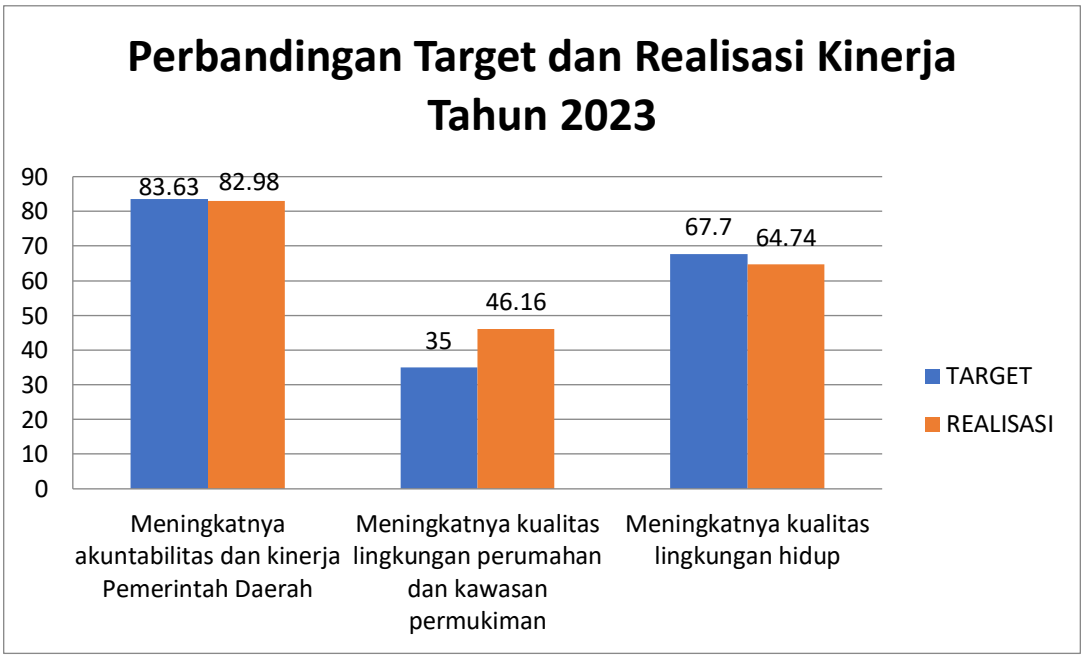
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukimandan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara	83.63	82.98	99.22	***Sangat Tinggi***
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas	35	46.16	131.89	***Sangat Tinggi***
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.7	64.74	95.63	***Sangat Tinggi***

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik2.1
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

a. Untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditargetkan 83.63 poin dan capaian sebesar 82.98 poin selisih 0.65 poin.
b. Untuk indikator persentase kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas, ditargetkan 35% dengan realisasi capaian kinerja mencapai 46.16% ini artinya ada selisih 11.16% dari target yang ditetapkan. Dari sisi pencapaian terhadap target termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Sampai tahun 2023 rumah layak huni sebanyak 53.087 unit dari jumlah rumah yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 menurut laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebanyak 57.500 unit
c. Untuk indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH) ditargetkan 67.7 atau termasuk dalam cemar sedang dan capaian realisasi kinerja 64.74 atau selisih 2.96 poin dari target dan termasuk kategori nilai IKLH sedang.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=10/4)*
1.04.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**81.37%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dok	2 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	2 dokumen	1 dok	1 dok
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	1 dokumen	1 dok	1 dok
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	1 dokumen	0	0	**0**	1 dokumen	1 dok	1 dok
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	1 dokumen	1 dok	1 dok
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DKA-SKPD	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	1 dokumen	1 dok	1 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	1 dokumen	1 lap	1 lap	**100**	1 laporan	1 lap	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	0	12 kali	0	0	**0**	4 laporan	1 dok	1 dok
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	**100%**	100%	**100%**	**80%**	**1**	100%	**80%**	**80%**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 org/bln	100%	60 org/bln	41 org/bln	**68**	60	40 org/bln	40 org/bln
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	1 dokumen	1 lap	1 lap	**100**	1	1 lap	1 lap
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum kantor	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	100%	3 paket	2 paket	**67**	5	1 paket	1 paket
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	100%	10 paket	7 paket	**70**	10	1 paket	1 paket
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 lap	77%	45 lap	69 lap	**153**	20	50 lap	50 lap
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	100%	12 lap	12 lap	**100**	12	12 lap	12 lap
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 lap	100%	2 lap	2 lap	**100**	2	1 lap	1 lap
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 lap	100%	2 lap	1 lap	**50**	2	1 lap	1 lap
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**	99,09 %	**100%**	**100%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opersional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40 unit	110 unit	40 unit	36 unit	**90**	100 unit	76 unit	unit
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100%	1 unit	1 unit	**100**	1 unit	1 unit	1 unit
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	**100**	**75%**	**100%**	**100%**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
1.04.02.2.01.05	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	1 dokumen	1 dok	1 dok
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan**	**100%**	0 rekomendasi	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
1.04.02.2.05.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	3 lap		3 lap	2 lap	**67**	3 laporan	1 lap	1 lap
1.04.03	**Program Kawasan Pemukiman**	**Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya**	**10%**	**62 unit**	**10%**	**0.34%**	**3**	**62 unit**	**10.00%**	**10.00%**
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani**	**2 Ha**	15%	**2 Ha**	**0**	**0**	15%	**0**	**0**
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	10 unit rumah	0 unit	10 unit rumah	10 unit rumah	**100**	10 unit	10 unit rumah	10 unit rumah
1.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman kumuh**	**Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman**	**1%**		**1%**	**0.70%**	**70**	**1.00%**	**1.00%**	**1.00%**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh**	**2 Ha**		**2 Ha**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	30 unit rumah		30 unit rumah	30 unit rumah	**100**	10 unit	30 unit rumah	3… rumah
1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**30%**	**60%**	**30%**	**0%**	**0**	**60%**	**30%**	**30%**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase penyelenggaraan PSU perumahan**	**100%**	60%	**100%**	**0%**	**0**	100%	**100%**	**100%**
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang funsi hunia	1 lokasi	0 paket	1 lokasi	0 lokasi	**0**	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
1.04.05.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 lap		1 lap	0 lap	**0**	1 laporan	1 lap	1 lap
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumeninformasi lingkungan yang tersusun**	**1 dok**	1 dokumen	**1 dok**	**1 dok**	**100**	1 dokumen	**1 dok**	**1 dok**
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penerapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	**100**	1 dokumen	1 dok	1 dok
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu**	**2 dok**		**2 dok**	**2 dok**	**100**	**2 dok**	**2 dok**	**2 dok**
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD dan dokumen KLHS RTRW Kabupaten/Kota yang disusun	2 dok		2 dok	2 dok	**100**	2 dok	2 dok	2 dok
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**50 poin**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan**	**12 dok**	2 dokumen	**12 dok**	**12 dok**	**100**	12 dokumen	**12 dok**	**12 dok**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut	2 dok	6 kali	2 dok	2 dok	**100**	2 dokumen	2 dok	2 dok
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	10 dok	28 parameter	10 dok	26 dok	**260**	10 dokumen	20 dok	20 dok
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekagaman Hayati (Kehati)**	**Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik**	**100%**	**3.01%**	**100%**	**100%**	**100**	**100.00%**	**100%**	**100%**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik**	**100%**	12 lokasi	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	4.2 Ha	14 lokasi	4.2 Ha	4.2 Ha	**100**	18.59	4.2 Ha	4.2 Ha
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100%**	**8 kegiatan**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan limbah B3**	**1 usaha/keg**	0 rekomendasi	**1 usaha/keg**	**4 usaha/keg**	**400**	4 usaha dan/atau kegiatan	**1 usaha/keg**	**1 usaha/keg**
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	1 lap	0 rekomendasi	1 lap	1 lap	**100**	2 laporan	1 lap	1 lap
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**	**100%**	**88%**	**100%**	**80%**	**80**	**100%**	**80%**	**80%**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana**	**25 usaha/keg**	25 usaha/kegiatan	**25 usaha/keg**	**31 usaha/keg**	**124**	25 usaha dan/atau kegiatan	**44 usaha/keg**	**44 usaha/keg**
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang	1 dok	0 buah	1 dok	2 dok	**200**	100 Dokumen	2 dok	2 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		diberikan								
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasai izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	25 buah	1 lap	1 lap	**100**	1 laporan	1 lap	1 lap
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase pendidikan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**5%**	**77%**	**5%**	**5%**	**100**	**5%**	**5%**	**5%**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**85%**	8 kali	**85%**	**85%**	**100**	85%	**85%**	**85%**
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	180 orang	380 orang	180 orang	264 orang	**147**	180 orang	200 orang	200 orang
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase penghargaan yang diterima masyarakat**	**100%**	**3.55%**	**100%**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten**	**1 penghargaan**	13 sekolah	**1 penghargaan**	**0**	**0**	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrofi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	13 sekolah	1 entitas	0	**0**	1 entitas	1 entitas	1 entitas
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**100%**	**5 kasus**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan**	**100%**	5 kasus	**100%**	**100%**	**100**	100%	**100%**	**100%**
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 dok	5 kasus	3 dok	4 dok	**133**	6 dokumen	4 dok	4 dok

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Peningkatan persentase sampah yang terkelola**	**0.10%**	**68.49%**	**0.10%**	**0%**	**0**	**0,1**	**0%**	**0%**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**98.62%**	75%	**98.62%**	**58.41%**	**45**	98,62	**60.00%**	**60.00 %**
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	1 lap	75%	1 lap	1 lap	**100**	1 laporan	1 lap	1 lap
2.11.11.2.01.07	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	25.501,02 Ton	35.280,75 ton	25.501,02 Ton	15.102,71 ton	**59**	25.501,02 Ton	20.000 ton	20.000 ton

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasar 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaianSPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam SPM bidang perumahan rakyat, pemerintahan daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan rakyat yang terdiri atas :

a. Jenis pelayanan dasar :
    1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
    2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. Mutu pelayanan dasar :
    1. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
    2. Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
4. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
5. Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
6. Kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

c. Penerima pelayanan dasar

1. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
2. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas SPM bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 belum ada karena kriteria penerima pelayanan dasar tidak ada disebabkan tidak adanya bencana yang ditetapkan melalui SK Bupati. Melalui Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Untuksub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Program Kabupaten/Kota, telah dilakukan identifikasi rumah dilokasi rawan bencana atau berpotensi terkena program pemeritah daerah dimana jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana sebanyak 165 rumah sepanjang aliran sungai negara meliputi Kelurahan Kebun Sari, Desa Palampitan Hulu dan Desa Palampitan Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai target dan capaian SPM untuk bidang perumahan rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel2.5
Target dan CapaaianSPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan,KawasanPemukimandan LingkunganHidup Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Keterangan
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh layak huni	100%	100%	140 rumah sepanjang aliran sungai negara meliputi Kelurahan Murung Sari, Desa Paliwara dan Desa Pamintangan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	Tidak ada program pemerintah daerah kabupaten yang berdampak terhadap relokasi pemukiman masyarakat

Analisis kinerja pelayanan didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023. Analisis kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(13)*	*(14)*	*(14)*	*(15)*
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	83.63	83.73	83.83	83.93		83.32	82.98	82.98	83.73	83.73	
2	Persentase kawasan perumahan dan pemukiman yang berkualitas	-	-	35	36	37	38	96.29	98.55	92.52	46.16	47	48	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			67.7	67.96	67.97	67.98		65.04	63.12	64.74	63.54	69.16	
4	Indeks kualitas air	-	-	56	57	59	60	60	55	50	50.67	69.99	70.79	
5	Indeks kualitas udara	-	-	89.52	89.62	89.7	89.8	89.11	89.4	89.03	92.13	69.7	70.1	
6	Indeks kualitas lahan	-	-	40.39	41.58	41.6	41.65	-	-	37.73	40.39	64.35	64.54	
7	Persetase jumlah sampah yang terkelola	-	-	98.62	98.62	98.62	98.62	72.9	65.42	72	58.41	45	46	
8	Persentase cakupan area pelayanan	-	-	64.59	64.59	64.59	64.59	57.99	64.59	68.49	64.59	64.59	64.59	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu adanya strategi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup secara efektif dan efesien perlu mempertimbangkan, menganalisa dan memperhatikan beberapa kendala dan kegagalan terhadap pencapaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada awal bab.

Dengan memperhatikan isu permasalahan pembangunan dan gambaran tugas pokok dan fungsi serta pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya data base bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Sistem drainase belum terintegrasi secara menyeluruh;
4. Masih adanya kawasan kumuh;
5. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
6. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;
7. Belum maksimalnya data base persampahan baik penanganan dan pengurangan sampah;
8. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan;
9. Masih rendahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga;
10. Masih rendahnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R;
11. Pengelolaan berbasis masyarakat (TPS 3R) dan Bank Sampah belum berfungsi optimal;
12. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat meningkatnya aktivitas kegiatan masyarakat;

13. Belum optimalnya pengawasan lingkungan terhadap usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar;
14. Belum optimalnya data base bidang lingkungan hidup;
15. Masih terdapatnya usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan;
16. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
17. Sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap;
18. Sumber daya manusia yang terbatas;
19. Kapasitas daya tampung tampung TPA yang overload; dan
20. Infrastruktur pendukung pengelolaan masih terbatas.

Gambaran kondisi perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap potensi, masalah, peluang dan tantangan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

1. Tantangan
    a. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    b. Penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;.
    c. Masih ada dan tumbuhnya kawasan kumuh baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan;
    d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan RTH publik/taman;
    e. Perbaikan rumah tidak layak huni yang masih banyak;
    f. Semakin menurunnya kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia;
    g. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
    h. Penanganan sampah masih relatif tinggi dan pengurangan masih belum optimal;
    i. Program 3R dan Bank sampah masih belum optimal;
    j. Kapasitas daya tampung TPA Tabing Liring yang saat ini sudah over kapasitas;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

k. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;
l. Lemahnya sanksi penegakan hukum di bidang lingkungan;
m. Inkonsistensi dan tumpang-tindih peraturan perundangan-undangan pengelolaan lingkungan baik di Pusat dan Daerah; dan
n. Kurangnya koordinasi antar sektor, antar lembaga, antar kepentingan

2. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan pelayanan adalah :

a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penanganan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan lingkungan hidup;
b. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat baik bidang perumahan rakyat dan bidang lingkungan hidup; dan
c. Terbentuknya pengolahan sampah berbasis masyarakat (3R) dan Bank Sampah.

Beberapa isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi SKPD antara lain :

a) Permukiman kumuh yang berkembang baik di perkotaan maupun di pedesaan;
b) Rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan dan pedesaan;
c) Kebutuhan ruang terbuka hijau publik;
d) Sistem pengelolaan persampahan; dan
e) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 ditetapkan beberapa prioritas daerah beserta sasaran yang diinginkan yang tercakup dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan yakni bidang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. Adapun prioritas daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk prioritas daerah tahun 2024 adalah peningkatan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran adalah:

a. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan.

Hasil review rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD belum memuat tentang program yang akan dilaksanakan hanya memberikan gambaran pagu indikatif dan indikator kinerja utama daerah yang nantinya harus ditunjang dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD. 2 (dua) indikator kinerja utama daerah yang akan ditopang melalui program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah (1) Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar dan (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 dibawah ini.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	18,637,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	18,637,500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	14,362,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	14,362,500	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 ob	4,917,003,044	Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 ob	4,917,003,044	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 paket	17,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. HSU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 paket	17,500,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 org	55,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 org	55,000,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	13,679,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	13,679,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	86,010,550	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	86,010,550	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6,095,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6,095,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48,270,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48,270,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. HSU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	6,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	190,322,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	190,322,000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. HSU	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	100%		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	1 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	550,000,000	Mobil Ke a Dinas
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	2,140,000,000	1 buah mobil skylif dan 2 buah mobil pick up
	Pengadaan Mebel	Kab. HSU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit		Pengadaan Mebel	Kab. HSU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	327,200,000	Pembelian 2 buah mesin jahit dan 1 buah mesin obras (untu PDU), 1 unit pencacah sampah plastik, 10 unit mesin pengepres sampah plastik dan 1 buah mesin compressor
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	172,994,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	172,994,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lap	178,870,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lap	178,870,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	77,507,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	77,507,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 unit	163,172,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 unit	163,172,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	23,250,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	23,250,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	33,320,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	33,320,000	
2	Program Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%	-	Program Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%	-	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	100%		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	100%		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dok	50,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dok	50,000,000	
2.2	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan	100%		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 lap	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 lap	85,000,000	Pembuatan rangka baliho pengumuman terkait urusan perumahan
3	Program Kawasan Permukiman	Kab. HSU	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10%	-	Program Kawasan Permukiman	Kab. HSU	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	10%	-	
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%		
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	2 dok	356,000,000	Penyusunan/Revie w/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	2 dok	712,000,000	Jasa konsultansi penyusunan dokumen RP2KPKPK Kab. HSU dan jasa konsultansi review dokumen RP2KPKP Kab. HSU
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2 Ha		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2 Ha		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	100,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	100,000,000	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. HSU	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1%	-	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. HSU	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1%	-	
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	2 Ha		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	2 Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 unit	200,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. HSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 unit	200,000,000	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Kab. HSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	35%	-	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Kab. HSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	35%	-	-
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	100%		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	100%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. HSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	360,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. HSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	360,000,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 lap	57,600,000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 lap	57,600,000	
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	-	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	-	
6.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu	1 dok		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu	1 dok		
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dok	122,480,000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. HSU	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dok	244,960,000	Pravalidasi dan validasi KLHS RTRW dan RDTR
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	-	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	-	
7.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	2 dok		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	2 dok		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dok	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dok	200,000,000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu	20 dok	200,500,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	20 dok	350,500,000	Pembuatan dokumen izin lingkungan UPT Labling

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			yang Dilaksanakan					Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kab. HSU	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100%	-	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kab. HSU	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	100%	-	
8.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik	100%		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik	100%		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. HSU	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.2 Ha	1,136,497,785	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. HSU	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.2 Ha	1,136,497,785	
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kab. HSU	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	-	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kab. HSU	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	-	
9.1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. HSU	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 dok		Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. HSU	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 dok		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 usaha dan/atau keg	15,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. HSU	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 usaha dan/atau keg	15,000,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. HSU	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. HSU	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	100%	-	
10.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan di tahun terlaksana	25 usaha/keg%		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan di tahun terlaksana	25 usaha/keg%		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. HSU	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 dok	43,015,800	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. HSU	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 dok	43,015,800	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	43 Badan Usaha	30,000,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	43 Badan Usaha	30,000,000	
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. HSU	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5%	-	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. HSU	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5%	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	85%		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	85%		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	7,560,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	7,560,000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 org	227,348,500	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 org	227,348,500	
12	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. HSU	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100%	-	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. HSU	Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	100%	-	
12.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	1penghargaan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	1penghargaan		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 entitas	50,500,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 entitas	205,500,000	Hadiah bagi sekolah peraih Adiwiyata dan hadiah Desa Proklim
13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	-	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. HSU	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

13.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	100%		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	100%		
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	52,070,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. HSU	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	52,070,000	
14	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. HSU	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0.10%		Program Pengelolaan Persampahan	Kab. HSU	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	0.10%		
14.1	Pengelolaan Sampah	Kab. HSU	Persentase jumlah sampah yang terkelola	38.00%		Pengelolaan Sampah	Kab. HSU	Persentase jumlah sampah yang terkelola	38.00%		
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. HSU	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15000 ton	4,522,332,355	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. HSU	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15000 ton	5,063,335,330	Penambahan anggaran BBM, suku cadang dan pemeliharaan terkait adanya penambahan armada mobil truck dan kendaraan roda tiga

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. HSU	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25.81 ton	78,500,000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. HSU	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25.81 ton	303,700,000	Pembelia[illegible]20 bh komposte[illegible]50[illegible] tempat sa[illegible] beroda, 20 se[illegible] tempat sampah terpilah lima, pembuatan dokumen jakstrada
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. HSU	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000 ton	1,231,292,600	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. HSU	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000 ton	1,634,106,650	Penambahan anggaran BBM, suku cadang dan pemeliharaan terkait adanya penambahan armada excavator dan beroperasi kembaliny dozer yang rusak
Jumlah					**15,072,691,734**					**20,117,388,759**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Serta Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perencanaan pembangunan yang baik tidak hanya bersifat *top down* saja, melainkan perpaduan yang selaras antara perencanaan *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan pembangunan yang bersifat partisifatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan perencanaan pembangunan dengan menampung aspirasi dari masyarakat yang dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan dan terakhir tingkat kabupaten, dengan adanya musrenbang diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terserap oleh Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi yang ditangani. Usulan yang diusulkan oleh masyarakat pada umumnya diarahkan untuk peningkatan rumah tidak layak huni, peningkatan jalan lingkungan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum seperti perbaikan atau pembuatan bak sampah/TPS. Usulan kegiatan yang dihimpun yang bersumber dari musrenbang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C. 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Kendaraan roda 3	Jalan Danau Terati Desa Patarikan, Kab. Hulu Sungai Utara (AKHYAR)	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	1 unit	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jalan Kali Utar RT 01 dan RT 02 , Danau PanggangKab. Hulu Sungai Utara (SARIANSYAH)	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	10 unit	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Selain adanya usulan dari masyarakat yang ditampung melalui juga ada pokok pikiran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain :

Tabel T-C. 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Kota Raden Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
3	Kendaraan roda 3	Desa Patarikan, Kecamatan Banjang	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	4 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
4	Kendaraan roda 3	Desa Danau Terate, Kecamatan Banjang	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Cangkering Kec. Amuntai Selatan	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	15 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Simpang Empat Kec. Amuntai Selatan	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	5 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Rukam Hulu Kec. Amuntai Selatan	peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	5 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Patarikan, Desa Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Sungai Bahadangan, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Beringin, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
12	Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Murung Padang, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Teluk Buluh, Kecamatan Banjang,	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Teluk Serikat, Desa Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Pulau Damar, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
19	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Kaludan Besar, Kecamatan Banjang	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
22	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	3 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
23	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran
24	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh (PB dan PK)	Desa Danau Ceramin, Kecamatan Amuntai Tengah	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	2 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id

Telahaan terhadap 2 usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat kecamatan dan 22 pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada SKPD. Khusus untuk penyediaan sarana pengelolaan sampah di wilayah Kota Amuntai lebih diarahkan partisipasi masyarakat untuk mematuhi jadwal pembuangan, sedangkan untuk desa yang belum terlayani mendorong pemerintah desa untuk menyediakan sendiri dan fasilitasi dari SKPD untuk pengelolaan sampah desa.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 :

a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m^3/kapita/tahun;
b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan (disesuaikan dengan masa Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup):

Tahun 2020 – 2024

1) 88% Pelayanan Air Minum, ***menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha)***, dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 128 Triliun
2) ***Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit***, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Keberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yang diarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari periode terakhir dari acuan rencana pembangunan nasional yang diterjemahkan dalam Tema RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong". Arah kebijakan dan Strategi tersebut lebih jauh meliputi :

1) Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman*Smart living* yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatanpenyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu ***perwujudan permukiman layak huni***, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

   Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

   Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

   a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
   b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
   c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

   Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah :

   a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam Menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
   b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
   c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan :

a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; ***(2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah***/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dankebutuhan khusus lainnya; ***(3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan***, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;(4) Dukungan pengembangan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sistem rumah umum *(public housing)* melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020–2024. Untuk tahun 2024 target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2024)
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat		
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%)	89,93
		2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	58,71

Sumber : Renstra Kementerian PUPR, 2020

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.1.2 Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK dan berhubungan langsung dengan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah ***Prioritas Nasional (PN) (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim***.Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi :
   1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
b. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi :
   1) Pembangunan rendah karbon
   2) Pemulihan lahan berkelanjutan
   3) Pengelolaan limbah

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi :

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: ***(1) pemantauan kualitas udara, air*** dan air laut, (2) pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan, (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (4)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan, (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;

b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, ***(2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik***, (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK), dan (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu;

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis KLHK 2020-2024 dan yang menjadi target di tahun 2024 dan terkait dengan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target kinerja KLHK Tahun 2025-2045 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Target(2025)
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.68

Sumber : Renstra Kementerian KLHK, 2020

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan lingkungan hidup;
b. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan lingkungan hidup.
c. Mendukung peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni; dan
d. Mendorong pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun untuk mewujudkan tujuan dan penyelenggaraan pembangunan sesuai urusan yang dibebankan dan melalui penyusunan rencana kerja adalah :

a. Mendorong terciptanya kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
b. Melaksanakan Norma Standar Panduan Manual (NSPM) di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
c. Mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman;
d. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni;
e. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan; dan
f. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk rencana kerja tahun 2025 dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 sehingga hasil operasionalisasi kegiatan pada renja akan berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada kedua dokumen perencanaan tersebut.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 meliputi 14 program, 22 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup beserta UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tebing Liring dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
        - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
   - Sub Kegiatan : P engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
   - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan
   a. Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Sub Kegiatan :Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

b. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
   - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. Program Kawasan Permukiman
   a. Kegiatan :Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan : Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
   b. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
      - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
      - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
      - Sub Kegiatan : Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    a. Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
        - Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    a. Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    a. Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3
        - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup (PPLH)
    a. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
        - Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Peningkatan Pendidikan, Pelataan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
    a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    a. Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    a. Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
14. Program Pengelolaan Persampahan
    a. Kegiatan : Pengelolaan Sampah
        - Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengangkutan
        - Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
        - Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 meliputi 14 program, 22 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup beserta 2 (dua) UPTD yakni Laboratorium Lingkungan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tebing Liring.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 bersumber dari dana APBD Kabupaten. Rumusan program dan kegiatan tersebut sebagai operasionalisasi untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebesar Rp. 20.067.388.759,- *(Dua Puluh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah),* ini sudah termasuk untuk gaji dan tunjangan PNS, dimana gaji dan tunjangan PNS usulkan sebesar Rp. 4.917.003.044,- *(Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah.*

Adapun rumusan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.33 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup								20.849.668.886,00					18.703.099.550,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.908.878.792,00					8.353.735.250,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								10.908.878.792,00					8.353.735.250,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.062.927.642,00					6.135.855.250,00
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17.837.500,00					33.000.000,00
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	100 %	16.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.637.500,00
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	1.437.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	14.362.500,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.077.554.542,00					5.100.000.000,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang/bulan	100 %	5.077.554.542,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.100.000.000,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								85.250.000,00					31.250.000,00
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop sesuai tupoksi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	70 Paket	100 %	17.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	21.250.000,00
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop sesuai tupoksi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Orang	100 %	67.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	10.000.000,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								360.030.600,00					427.943.050,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	100 %	13.665.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.679.400,00
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	100 %	95.445.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	134.280.550,00
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	6.550.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.095.100,00
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	48.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.976.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000,00
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum PD	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	190.123.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	217.888.000,00
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19.500.000,00					20.000.000,00
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase terlaksananya pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	19.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								351.715.000,00					351.864.600,00
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Disperkimlh)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 % 100 %	172.993.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	172.994.600,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Disperkimlh)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 % 100 %	178.722.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178.870.000,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								151.040.000,00					171.797.600,00
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	36 Unit	100 %	56.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	77.507.600,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	37.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	37.720.000,00
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	55 Unit	100 %	11.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	11.150.000,00
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	33.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.320.000,00
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Unit	100 %	12.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	12.100.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								111.360.000,00					111.360.000,00
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								101.360.000,00					101.360.000,00
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani													
						Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	50.680.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	50.680.000,00
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	50.680.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.680.000,00
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								10.000.000,00					10.000.000,00
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
						Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	10.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	10.000.000,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								358.100.000,00					360.000.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								358.100.000,00					360.000.000,00
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
						Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Dokumen	10 %	358.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	360.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								3.404.601.600,00					756.520.000,00
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								3.404.601.600,00					756.520.000,00
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
						Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 %	155 Unit Rumah	2 Ha	3.319.999.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	155 Unit Rumah	671.520.000,00
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh													
						Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 %	50 Orang	2 Ha	84.601.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang	85.000.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								971.889.550,00					990.000.000,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								971.889.550,00					990.000.000,00
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
						persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Lokasi	100 %	229.839.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	230.000.000,00
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan													
						persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	3 Lokasi	100 %	634.449.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi	650.000.000,00
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
						persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	2 Laporan	100 %	107.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 Laporan	110.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.940.790.094,00					10.349.364.300,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								9.940.790.094,00					10.349.364.300,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								331.601.000,00					350.000.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								331.601.000,00					350.000.000,00
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
						persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	331.601.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								652.793.000,00					680.000.000,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								652.793.000,00					680.000.000,00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
						persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	200.000.000,00
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													
						persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	120.000.000,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Dokumen	14 Dokumen	352.793.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	360.000.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								1.284.747.350,00					1.300.000.000,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								1.284.747.350,00					1.300.000.000,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
						persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4.2 Ha	100 %	1.284.747.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.2 Ha	1.300.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								15.000.000,00					20.000.000,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3								15.000.000,00					20.000.000,00
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
						Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	4 usaha dan/atau kegiatan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	20.000.000,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								112.985.800,00					112.985.800,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								112.985.800,00					112.985.800,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
						Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	34 usaha dan/atau kegiatan	43.015.800,00	Lain-lain Pendapatan		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	43.015.800,00
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
						Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	43 Badan Usaha	34 usaha dan/atau kegiatan	69.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Lain-lain Pendapatan		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	43 Badan Usaha	69.970.000,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								240.751.000,00					372.908.500,00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								240.751.000,00					372.908.500,00
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
						Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 %	1 Dokumen	85 %	42.309.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	95.060.000,00
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 %	200 Orang	85 %	198.442.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Orang	277.848.500,00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								118.000.000,00					120.000.000,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								118.000.000,00					120.000.000,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
						Persentase penghargaan yang diterima masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Entitas	3 Penghargaan	118.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	120.000.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								52.070.000,00					118.470.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								52.070.000,00					118.470.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Pengaduan	100 %	52.070.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Pengaduan	118.470.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								7.132.841.944,00					7.275.000.000,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								7.132.841.944,00					7.275.000.000,00
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan													
						Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,10 %	15000 Ton	60 %	5.373.133.104,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15000 Ton	5.500.000.000,00
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
						Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,10 %	25.81 Ton	60 %	123.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25.81 Ton	125.000.000,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
						Peningkatan persentase sampah yang terkelola	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,10 %	15000 Ton	60 %	1.636.388.840,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000 Ton	1.650.000.000,00
												TOTAL	**20.849.668.886,00**					**18.703.099.550,00**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kesesuaian tupoksi, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu dipahami secara komprehensif oleh semua komponen di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan ini masih bersifat indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional ke dalam perencanaan kerja tahunan.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun anggaran 2025, telah disusun dan senantiasa sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Harapan atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 sedangkan beberapa kegiatan yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja instansi maka diusulkan beberapa kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui pagu anggaran yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut yang direncanakan dilaksanakan tahun 2025 diluar pagu anggaran sehingga perlu penambahan anggaran, kegiatan tersebut adalah :

a. Penambahan anggaran Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk pembelian mobil dinas kepala dinas karena mobil kepala dinas yang ada sudah tidak layak sebesar Rp 500.000.000,-.

b. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk pembelian 1 buah mobil skylif jarak jangkau 16 meter sebesar Rp 1.800.000.000,- dan 2 buah mobil pick up sebesar Rp 340.000.000,- .

c. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pembelian 2 buah mesin jahit sebesar Rp 14.400.000,- , 1 buah mesin obras sebesar Rp 7.400.000,- , 1 unit pencacah sampah plastik sebesar Rp 30.400.000,- , 10 unit mesin pengepres sampah plastik sebesar Rp 250.000.000,- dan 1 buah mesin compressor sebesar Rp 25.000.000,- .

d. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk Pembuatan rangka baliho pengumuman terkait urusan perumahan sebesar Rp 75.000.000,- .

e. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP untuk Jasa konsultansi penyusunan dokumen RP2KPKPK Kab. HSU dan jasa konsultansi review dokumen RP2KPKP Kab. HSU sebesar Rp 356.000.000,-

f. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang untuk pravalidasi dan validasi KLHS RTRW dan RDTR Rp. 122.480.000,-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

g. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk pembuatan dokumen izin lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Disperkimlh Kab. HSU sebesar Rp 150.000.000,-.

h. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk pembelian alat listrik dan upah pasang untuk lampu hias taman/jalan/jembatan sebesar Rp 110.900.127,-.

i. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Hadiah bagi sekolah peraih Adiwiyata, hadiah Desa/Kelurahan peraih Proklim dan Hadiah lomba kebersihan antar SKPD sebesar Rp 155.000.000,-

j. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan berupa penambahan anggaran BBM, suku cadang dan pemeliharaan terkait adanya penambahan armada mobil truck dan kendaraan roda tiga sebesar Rp 541.002.975,-

k. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSKL/PLTSa, RDF, pusat pengumpusan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan berupa berupa pembelian 20 buah komposter sebesar Rp 100.000.000, , 50 buah tempat sampah beroda sebesar Rp 80.000.000,-, 20 set rompat sampah tergilah lima sebesar Rp 100.000.000,- dan, pembuatan dokumen jaksetrada sebesar Rp 26.200.000.

l. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional berupa Penambahan anggaran BBM, suku cadang dan pemeliharaan terkait adanya penambahan armada excavator dan hemperasi kembalimy dozer yang rusak sebesar Rp 402.814.050,-

Amuntai, April 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. Hasanah Johan, SKM, MAP, MMKes
Nip. 19660717 198903 1 007

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2025

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke Hadirat Allah SWT, Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini kami berharap semua rencana dapat terialisasi dengan baik dan terpadu serta mendapat dukungan dari semua pihak sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan serta dapat meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.

Amuntai , 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hj. SITI FIKRIYAH, SP, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 200701 2 018

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PENGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 43
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pangan Masyarakat .. 57

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 61

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 63

BAB V PENUTUP 76

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Anggaran 2023…. 8
Tabel 2.2 Data skor PPH ketersediaan berdasarkan angka Sementara Tahun 2023..... 10
Tabel 2.3 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Korban Pasca Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023..... 16
Tabel 2.4 Data Bulanan Aspek Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan tahun 2023 20
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapain Renstra Perangkat Daerah..... 26
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan PErangkat Daerah 41
Tabel T-C.31. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 46
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun..... 57
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun dan Perkiraan Maju Tahun..... 65

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Reviu Kelengkapan Dokumen Renja SKPD Tahun 2025 (sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja SKPD ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan ketahanan pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien, dan sinergis dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan menjadi acuan, arahan kebijakan strategis pembangunan ketahanan pangan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk mengakomodir program/kegiatan ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025.
2. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisa gambaran pelayanan SKPD
   c. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
h. Perumusan kegiatan prioritas
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
j. Penyesuian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan kebijakan Pembangunan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan gizi, pada pasal 26 " upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan";
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Presiden RI No 22 tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembanguanan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah,
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 /2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

25. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 -2024);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2011 Nomor 21).
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 Nomor 28)
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 7);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun ke-3 (tiga) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan dan
1.4 Sistematika Penulisan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Terdiri atas :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Terdiri atas :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

- Catatan yang perlu mendapat perhatian.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana Tindak Lanjut

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu.

Dukungan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan Anggaran adalah sebesar **Rp. 3.344.491.624,-** dengan realisasi sebesar Rp. **2.950.853.364**,- (**88,23%**) yang terdiri dari Belanja Operasional **Rp. 2.947.873.364,,-** (88,22%) dan Belanja Modal **Rp. 2.980.000,-** (99,33%), dengan rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.1
Rincian Anggaran dan Realisaasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
BELANJA			
BELANJA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai	**2.325.650.983,00**	**2.010.709.954,00**	**86,46**
Belanja Barang dan Jasa	**1.015.840.641,00**	**937.163.410,00**	**92,25**
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL	**3.341.491.624,00**	**2.947.873.364,00**	**88,22**
BELANJA MODAL			
Belanja modal peralatan dan mesin	**0,00**	**0,00**	**0**
Belanja modal gedung dan bagunan	**3.000.000,00**	**2.980.000,00**	**99,33**
JUMLAH BELANJA MODAL	**3.000.000,00**	**2.980.000,00**	**99,33**
JUMLAH BELANJA	**3.344.491.624,00**	**2.950.853.364,00**	**88,23**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

A. Capaian Kinerja untuk Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah dengan target kinerja 79,36

Program yang mendukung pencapaian kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah adalah :

1) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

Kegiatan ini berupa pendampingan di 6 kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) yang tersebar di 3 kecamatan yaitu :

- LPM Karya Bersama desa Kutai Kecil Kec. Amuntai Selatan
- LPM Pelita Tani Desa Putat Atas Kec. Sei Pandan
- LPM Sejahtera Desa Teluk Sinar Kec. Sei Pandan
- LPM Mandiri Desa Hambuku Baru Kec. Babirik
- LPM Bangkit Bersama Desa Sei Dalam Kec. Babirik
- LPM Sinar Padi Desa Pajungan Hambuku Baru Kec. Babirik

Adapun tujuan dari pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat adalah :

a. Meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya; dan
b. Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan.

Untuk LPM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 15 Lumbung,

2). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sub Kegiatan :

1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Analisis Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 ini, angka target produksi tahun ke n, angka tetap kabupaten tahun n-1 dan angka sementara kabupaten tahun ke n.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kelompok yang paling dominan menyediakan tingkat ketersediaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dari angka perkiraan 2023, angka tetap 2022 dan angka sementara 2023 adalah kelompok pangan padi-padian. Jika dibandingkan dengan angka ketersediaan ideal sebesar 2100 kkalori, maka kelompok padi-padian angka ketersediaannya sudah lebih dari 2200 kkal (> 100 %).

Bisa diartikan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ketersediaan pangan sangat tinggi terhadap nilai produksi tanaman pada kelompok padi-padian khususnya tanaman padi, sehingga jika produksi tanaman padi mengalami penurunan langsung berimbas pada tingkat ketersediaan pangan kabupaten.

Dari analisis ini juga diketahui bahwa tingkat ketersediaan kelompok pangan lainnya masih dibawah rata-rata, sehingga perlu kebijakan untuk meningkatkan nilai produksi kelompok-kelompok pangan yang lainnya tersebut.

ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN (PPH) TINGKAT KETERSEDIAAN

Tabel 2.2

Data Skor PPH Ketersediaan Berdasarkan Angka Sementara Tahun 2023

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2.014	91,6	0,5	45,8	25,0	25,0	
2.	Umbi-umbian	25	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	
3.	Pangan Hewani	322	14,7	2,0	29,3	24,0	24,0	
4.	Minyak dan Lemak	229	10,4	0,5	5,2	5,0	5,0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
5.	Buah/biji berminyak	3	0,1	0,5	0,1	0,1	1,0	
6.	Kacang-kacangan	11	0,5	2,0	1,0	1,0	10,0	
7.	Gula	126	5,7	0,5	2,9	2,5	2,5	
8.	Sayuran dan buah	16	0,7	5,0	3,5	3,5	30,0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	2.747	124,9		88,4	**61,7**	100,0	

AKE = 2200 kkal/kap/hari

Dari nilai PPH tersebut diketahui bahwa keragaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sangat rendah, dimana dari 9 (sembilan) kelompok pangan yang ada 4 kelompok pangan yang sudah memenuhi skor PPH yaitu kelompok pangan padi-padian , kelompok pangan hewani, gula, dan Sayuran dan Buah. Kondisi ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan wilayah pertanian dan perikanan.

Selain itu perlu dilakukan suatu upaya/kegiatan untuk memenuhi kebutuhan data pangan – pangan non produksi (data impor) dan data pangan yang dijual keluar kabupaten (ekspor). Dari nilai PPH tersebut diketahui bahwa keragaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah . Untuk itu perlu dilakukan upaya/kegiatan memenuhi kebutuhan data pangan – pangan non produksi (data impor) dan data pangan yang di jual keluar kabupaten (ekspor).

1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya

Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat Konsumen Tahun 2023.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kenaikan harga pangan secara makro yang berdampak pada besarnya pengeluarann keluarga / rumah tangga untuk pangan yang akan mempengaruhi ketahanan pangan di rumah tangga. Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen/ masyarakat, jadi sub kegiatan ini adalah menunjang kegiatan Pemerintah Pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar dalam rangka untuk pengendalian inflasi daerah dan menghadapi Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pasar murah/operasi pasar yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) – Amuntai, Polres Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu :

1. Pasar Murah dalam rangka Pengendaliam Inflasi Daerah dan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dilaksanakan di 10 Kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Utara pada Bulan Maret 2023
2. Pasar Murah dalam rangka Milad STIA- Amuntai yang ke-31
3. Pasar Murah Dalam rangka Cooling System menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.
4. Pasar Murah dalam rangka Pengendaliam Inflasi Daerah dan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dilaksanakan di 10 Kecamatan di 20 lokasi se kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2023.

Realisasi anggaran pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya sebesar 97,30% dari Pagu Anggaran Rp.36.505.000,-

1.3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pengumpulan data akses pangan dilakukan di semua kecamatan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, kecuali di kecamatan Paminggir karena di kecamatan ini tidak ada penggilingan padi. Data akses pada semua penggilingan yang dikumpulkan adalah data Jumlah gabah yang digiling, stok dan harga beli Gabah Kering Panen (GKP) , stok dan harga beli Gabah Kering Giling (GKG), stok dan harga jual beras, asal pembelian serta tujuan penjualan.

Pengumpulan data dilakukan setiap minggu selain untuk mengetahui jumlah gabah yang digiling juga untuk mengetahui stok gabah maupun beras yang dapat diakses oleh masyarakat.

Adapun target untuk data penggilingan per kecamatan sebanyak 10 buah akan tetapi tidak semua kecamatan memenuhi target tersebut, karena banyak penggilingan yang sudah tidak lagi beroperasi. Sehingga pada tahun 2023 jumlah penggilingan yang aktif dan bisa di data hanya sebanyak 58 buah dari target 90 buah atau sebesar 64,4 % keadaan ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 64 buah atau 71,1 %, ini disebabkan rendahnya produksi padi karena gagal tumbuh dan gagal panen.

Pengambilan data dilakukan setiap 1 bulan sekali mencakup jumlah / asal pembelian, jumlah / tujuan penjualan serta stok setiap komoditas pada setiap akhir bulan, harga pangan utama yang dipantau mencakup :

- Gabah (ciherang,siam pandak, unus mutiara)
- Beras (ciherang,Siam Pandak, unus mutiara)
- Jagung (pipilan kuning)
- Kacang (kedelai,Tanah, Hijau)
- Ubi (kayu, Jalar)
- Cabe (merah besar, rawit lokal,merah keriting,tiung/taji)
- Bawang (Merah, Putih)
- Minyak Goreng (Curah kuning, bimoli)
- Tepung Terigu (kiloan)
- Daging Sapi
- Daging Ayam (ras, Kampung)
- Telur (ayam ras, ayam kampung, itik pantai, itik tambak)
- Ikan : (Betok, kembung, tongkol, baung, bandeng, mas, nila, Patin, sepat siam)
- Gula Pasir (kiloan,Gulaku)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sementara itu untuk kegiatan Pemantauan harga dilaksanakan setiap minggu pada 10 (sepuluh) kecamatan mencakup harga di produsen maupun konsumen. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan di sepuluh (10) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara , dengan sampel tiap kecamatan pada setiap komoditas pangan sebanyak 3 pedagang grosir dan apabila tidak ada pedagang grosir maka diambil pedagang yang skala jualnya lebih besar dibandingkan dengan pedagang eceran lainnya. Jenis komoditas yang dipantau :

1. Beras
2. Kedelai
3. Kacang Tanah
4. Kacang Hijau
5. Ubi Kayu
6. Ubi Jalar
7. Daging Ayam Ras
8. Daging Ayam Kampung
9. Daging Sapi
10. Telur Ayam Ras
11. Telur Itik
12. Telur Ayam Kampung
13. Bawang Merah
14. Bawang Putih
15. Cabe Merah
16. Gula
17. Minyak
18. Tepung Terigu

Pada tahun 2023, jumlah komoditas yang dipantau sebanyak 18 (delapan belas) jenis masih sama dengan tahun 2022, tetapi kegiatan pemantauan harga ini bertujuan untuk mengetahui informasi perkembangan harga antar waktu dan antar wilayah di kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga dengan mengetahui perkembangan harga bisa menyusun dan mengambil kebijakan di bidang pangan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 99,31% dari jumlah pagu Rp.63.225.841,-

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengembangan cadangan pangan pemerintah di daerah mengacu kepada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sedangkan pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana social dan atau menghadapi keadaan darurat.

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Mekanisme penyalurannya dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan selanjutnya disampaikan kepada kepada Dinas Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas menetapkan volume gabah/ beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana, selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran gabah/ beras kepada Bupati dan Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

Awal tahun 2023 stock gabah kering giling pada gudang cadangan pangan pemerintah sebanyak 1.956,8 kg dan pada tanggal 22 November 2023 dilaksanakan pengadaan sebanyak 10.000 kg dan pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan lagi pengadaan gabah kering giling sebanyak 2.000 kg, jadi total pengadaan gabah pada tahun 2023 sebanyak 12.000 kg (12 ton) lebih banyak dibanding pada tahun 2022 sebanyak 6.750 kg gabah, adapun penyaluran cadangan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Korban Pasca Bencana Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

TANGGAL PENYALURAN	KECAMATAN	DESA	PENYALURAN		SISA CPP (KG GABAH)	KETERANGAN
			BERAS (KG)	GABAH (KG)		
01 JANUARI 2023	SALDO AWAL			1.558,8		SISA STOK AWAL TAHUN
11 JANUARI 2023	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUR	252	403,2	1.553,6	KEBAKARAN
14 FEBRUARI 2023	AMUNTAI TENGAH	DATU KUNING	198	316,8	1.236,8	KEBAKARAN
15 FEBRUARI 2023	BANJANG	PULAUNGAN HULU	108	172,8	1.064	PUTING BELIUNG
15 FEBRUARI 2023	DANAU PANGGANG	RINTISAN	48	76,8	987,2	PUTING BELIUNG
17 FEBRUARI 2023	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS	168	268,8	718,4	PUTING BELIUNG
17 FEBRUARI 2023	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	126	201,6	516,8	KEBAKARAN
24 FEBRUARI 2023	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BUNTING	36	57,6	459,2	KEBAKARAN
	BPBD	BPBD	150	240	219,2	BANTIR
27 NOVEMBER 2023	AMUNTAI UTARA	TAYUR		10.000	10.219,2	PENGADAAN
28 NOVEMBER 2023	AMUNTAI UTARA	MURUNG KARANGAN DAN MUARA BARUH	225	360	9.859,2	LONGSOR
29 NOVEMBER 2023	HAUR GADING	TUHURAN DAN TELUK HAUR	72	115,2	9.744	KEBAKARAN DAN LONGSOR
1 DESEMBER 2023	BANJANG	SARUNGGANG DAN KALINTIMUI	630	1.008	8.736	KEBAKARAN
2 DESEMBER 2023	DANAU PANGGANG	BITIN DAN PANDAMAAN	1.116	1.785,6	6.950,4	KEBAKARAN
2 DESEMBER 2023	AMUNTAI SELATAN	TELAGA HANYAR DAN MAHAR	90	144	6.806,4	KEBAKARAN
4 DESEMBER 2023	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG, PASAR SENIN, SUNGAI MALANG DAN PALIMBANG	1.386	2.217,6	4.588,8	KEBAKARAN DAN LONGSOR
4 DESEMBER 2023	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS, BANYU TABIR DALAM, TAPUS DALAM DAN PANGKALAN SARI	585	936	3.652,8	KEBAKARAN DAN PUTING BELIUNG
18 DESEMBER 2023	AMUNTAI TENGAH	PIRANG HARANG	234	374,4	3.278,4	PUTING BELIUNG
18 DESEMBER 2023	AMUNTAI SELATAN	PULAU TAMBAK	90	144	3.134,4	KEBAKARAN
18 DESEMBER 2023	AMUNTAI UTARA	PAKACANGAN	36	57,6	3.076,8	PUTING BELIUNG
20 DESEMBER 2023	HAUR GADING	TUHURAN	99	158,4	2.918,4	PUTING BELIUNG
27 DESEMBER 2023	AMUNTAI SELATAN	KOTA BARU	234	374,4	2.544	KEBAKARAN
28 DESEMBER 2023	DANAU PANGGANG	TELAGA MAS	108	172,8	2.371,2	PUTING BELIUNG
28 DESEMBER 2023	AMUNTAI TENGAH	DANAU CERMIN	729	1.166,4	1.204,8	
28 DESEMBER 2023	AMUNTAI UTARA	TAYUR		2.000	3.204,8	
	SISA GABAH/BERAS		Sisa Beras 2.003 kg		Sisa Gabah 3.204,8 kg	

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, cadangan pangan pemerintah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengalami darurat dan kerawanan pangan pasca bencana seperti kebakaran dan banjir, puting beliung dan tanah longsor. Untuk besaran / banyaknya gabah / beras yang diberikan untuk korban 18 kg beras / jiwa untuk korban pasca bencana kebakaran sedangkan untuk korban pasca bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor sebanyak 9 kg beras/ jiwa.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Cadangan pangan yang ada di gudang CPP sebanyak 13.956,8 kg gabah kering giling. Gabah yang disalurkan berupa beras untuk korban pasca bencana, seperti bencana kebakaran, banjir, angin puting beliung dan tanah longsor yang terjadi di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2023, dengan total penyaluran sebanyak 10.752 kg atau sebesar 77,04 %, jadi sisa gabah di gudang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai tanggal 31 Desember sebanyak 3.204,8 kg. Untuk realisasi anggran adalah 96,62% dari jumlah pagu Rp.168.496.388,-

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi,

Sub Kegiatan *:*

3.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Kegiatan ini menyediakan data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat dengan tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein. Kegiatan ini dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) desa dengan karakter wilayah pertanian, perikanan dan wilayah lainnya dengan sasaran wilayah di kecamatan.

Sedangkan untuk jumlah sasaran per desa adalah 10 KK (Kepala Keluarga). Dari hasil kegiatan tersebut pada tahun 2023 diperoleh data Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan skor **83,7** dengan tingkat kecukupan konsumsi rata-rata **1.863,2** kkal/kap/hari dari konsumsi protein rata-rata 46,8 gram, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan skor 83,2 dengan tingkat kecukupan konsumsi energi rata-rata 1.820,4 kkal/kap/hari dan konsumsi protein rata-rata 46,8 gram, berdasar WNPG X, 2012 kebutuhan energi/kalori adalah sebesar 2.000 kkal / 52 gr protein.

Pola konsumsi masyarakat kita masih kurang beragam, rata-rata masyarakat kita hanya mengkonsumsi nasi, ikan di tambah sedikit sayur

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dan buah. Sementara untuk kelompok pangan yang lainnya sangat jarang dikonsumsi. Hal tersebut bukan mereka tidak mengetahui akan pentingnya pola konsumsi yang beragam sesuai yang di anjurkan tetapi rata-rata mereka memilih yang gampang atau praktis untuk dimakan dan tingkat ekonomi juga sangat mempengaruhi.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dengan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan memfasilitasi kegiatan pengolahan hasil pangan lokal.
2. Melaksanakan promosi dan sosialisasi B2SA secara terencana dan berkelanjutan (massif) ke masyarakat luas di berbagai acara dan kegiatan strategis, maupun melalui berbagai media (cetak, elektronik, media sosial dan media luar ruang) terutama melalui pemasangan baliho atau billboard B2SA di lokasi-lokasi strategis
3. Melakukan gerakan konsumsi pangan lokal dengan menggunakan bahan baku pangan lokal untuk konsumsi pada setiap pertemuan sesuai dengan Surat Himbauan dari Badan Pangan Nasional RI Nomor 139/PK.01.02/ K/ 8/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Penganekaragaman pangan merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Guna mendorong percepatan penganekaragaman pangan, maka perlu dilakukan secara fokus baik di sisi hulu maupun hilir. Dari sisi hulu dilakukan dengan peningkatan penyediaan berbagai jenis dan aneka ragam pangan, sehingga tidak tergantung hanya pada salah satu jenis bahan pangan saja. Dari sisi hilir, strategi yang dilakukan meliputi pengembangan pengolahan pangan lokal berbasis industri rumah tangga,

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

inovasi resep menu khas nusantara, serta kampanye atau gerakan sosialisasi dan promosi untuk mengubah mindset masyarakat dalam pola konsumsi pangan.

Sejalan dengan itu, dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya berupa promosi olahan pangan lokal dan penerapan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Praktek Pengolahan Pangan Lokal. Melalui praktek ini diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas dan inovasi yang membuat olahan pangan yang menarik, cita rasa tinggi, dan bernilai gizi, tetapi nilai komersialnya juga menjadi perhatian, sehingga ada nilai ekonomi yang diperoleh. Hal ini sangat beralasan, agar pemanfaatan pangan lokal dapat terus berkelanjutan.

Kegiatan Praktek Pengolahan pangan lokal

Kegiatan Praktek Pengolahan makanan non beras non terigu adalah salah satu upaya untuk melaksanakan penganekaragaaman pengolahan pangan bagi masyarakat dengan memanfaatkan pangan lokal yang mengandung gizi yang tinggi dan dengan harga yang terjangkaau serta aman dikonsumsi. Pelaksanaan kegiatan praktek pengolahan pangan lokal ini dengan sasaran kegiatan adalah desa lokus stunting.

Peserta Praktek Pengolahan Pangan Lokal adalah terdiri dari ibu – ibu hamil, Ibu Menyusui, Ibu – ibu yang mempunyai anak balita, Kader Posyandu dan TP. PKK di desa yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang per desa atau kelurahan.

Pelaksanaan Praktek Pengolahan Pangan Lokal bertempat di : Desa Datu Kuning di Kecamatan Amuntai Tengah, Desa Murung Kupang di Kecamatan Babirik, Desa Teluk Sinar di Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Danau Terate Kecamatan Banjang.

Jenis makanan pangan lokal yang dipraktekkan adalah Ongol – Ongol, Cendol Segar Nutrijell Labu Kuning, Bolu Kukus Ubi, Bolu Kukus Labu Kuning, Es Jagung Lumer.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3). Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

***Sub Kegiatan* :**

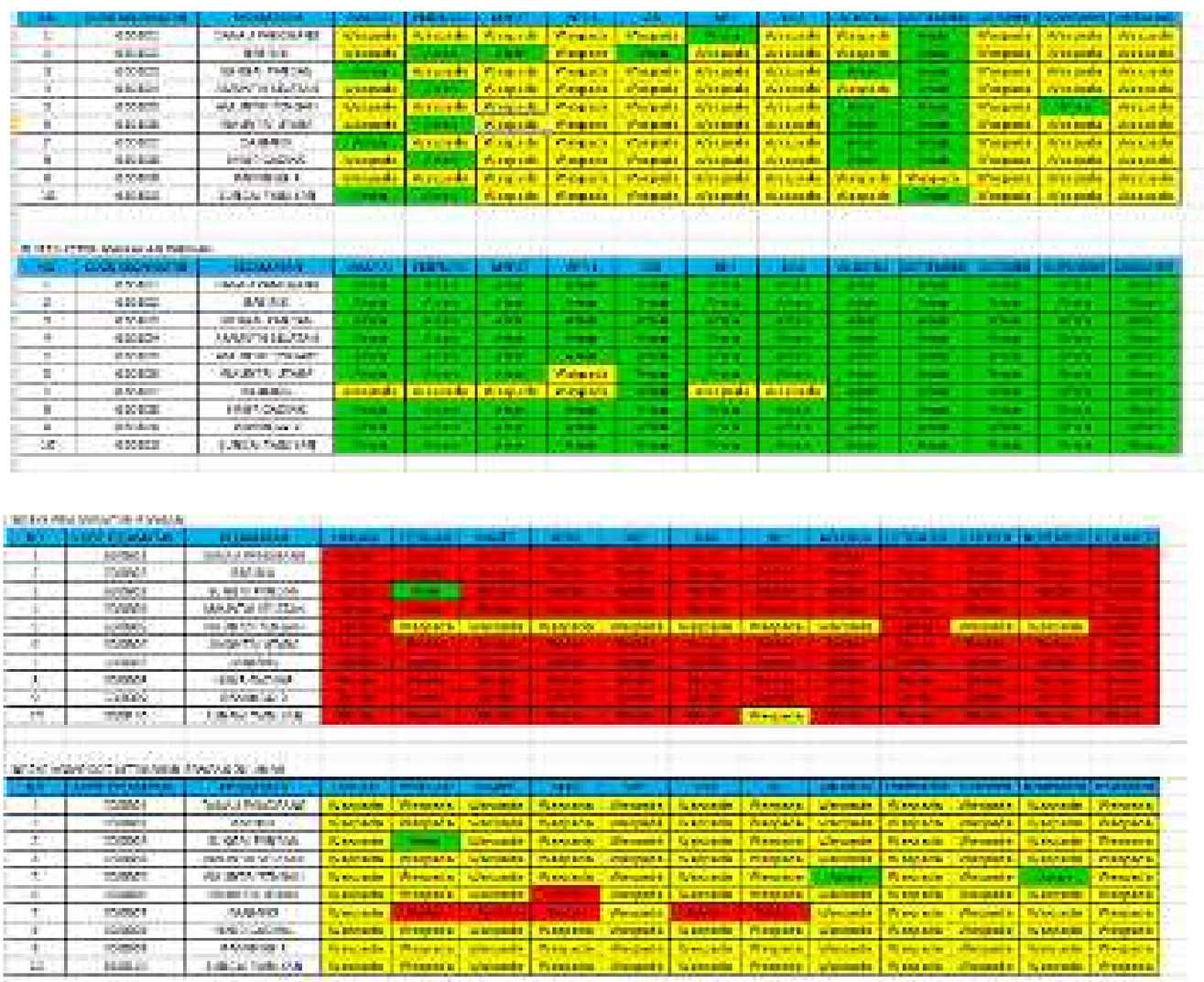
1.1 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kegiatan ini merupakan penyusunan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) bulanan yang merupakan analisis dari 3 pilar ketahanan pangan yaitu : ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Aspek Ketersediaan : Data luas tanam bulanan perkecamatan (Dinas Pertanian)
- Aspek Akses : Data harga beras bulanan perkecamatan (Bidang Distribusi dan CPP, DKP)
- Aspek Pemanfaatan Pangan : Data status gizi balita bulanan perkecamatan (Dinas Kesehatan)

Dari data bulanan tersebut dijadikan laporan tahunan SKPG

Tabel 2.4 Data Bulanan Aspek Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan tahun 2023



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Keterangan :

	=	Aman		=	Rawan
	=	Waspada		=	Laporan tidak masuk

2. *Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota,

Kegiatan dilaksanakan di 9 Desa yang merupakan Desa Rentan Pangan, dari hasil analisis FSVA tahun 2022, yang mana jumlah desa rentan pangan sejumlah 19 desa. Ditahun 2023 karena keterbatasan dana hanya dilaksanakan di 9 desa yaitu di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan, Desa Gampa Raya Kecamatan Sungai Tabukan, Desa Keramat Kecamatan Amuntai Selatan, Desa Rukam Hilir Kecamatan Amuntai Selatan, Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan, Desa Murung Padang Kecamatan Banjang, Desa Patarikan Kecamatan Banjang dan Desa Pandulangan Kecamatan Banjang, sedangkan yang 10 desa akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kegiatannya berupa pelatihan, dengan peserta ibu rumah tangga miskin sebanyak 25 peserta, yang termasuk dalam kategori desil 1 sampai desil 3. Setiap desa dilaksanakan kegiatan selama 3 hari. Adapun materi yang diajarkan adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan Pengolahan telor asin aneka rasa
b. Pelatihan Pembuatan minyak albumin dari ikan haruan
c. Pelatihan Pembuatan sosis dan abon/rabuk dari ikan haruan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rentan pangan melalui pemberdayaan ibu – ibu dengan demo pengolahan pangan, yang mana nantinya bisa diperuntukkan untuk pemenuhan gizi keluarga dan dijual guna menambah pendapatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kegiatan Pendampingan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dilaksanakan pada 4 (empat) Desa yang tersebar pada 3 Kecamatan yaitu Desa Rantau Bujur Tengah Kecamatan Sungai Tabukan (Replikasi 2010), Desa Sungai Nyiur Kecamatan Babirik (Replikasi 2011), Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang (Replikasi 2013), Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang (Replikasi 2013).

4). Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan :

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ kota

Sub Kegiatan :

1.1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar berkaitan dengan kinerja Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagai pelaksana Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tim tersebut telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/252/KUM/2023 Tanggal 26 April 2023 Tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan terhadap pelaku usaha beras berkemasan yang sudah memiliki Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan yaitu UD. Norhidayah, Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Sungai Pandan dan UD Suka Makmur, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik.

1.2 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengupayakan agar pelaku usaha beras kemasan memiliki Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, temu teknis dan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Pelaku usaha

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

yang telah menerima Penyuluhan/sosialisasi dan pembinaan adalah UD. Norhidayah, Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Sungai Pandan; UD Suka Makmur, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik; UD. Cahaya, Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang; UD. Usaha Karya, Desa Pihaung, Kecamatan Haur Gading; Penggilingan Padi (UD. Bahrani), Desa Kaludan Besar, Kecamatan Banjang. Tanggal 11 Oktober 2023 pelaku usaha UD Suka Makmur, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik telah memiliki Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan : 630802010011023.

Untuk mewujudkan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Kab. Hulu Sungai Utara kearah yang lebih baik maka tanggal 12 Desember 2023 melalui kegiatan Temu Teknis Keamanan Pangan dijalin langkah koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Prop. Kalsel, Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. HSU (DPMPSP) sebagai Instansi terkait dan Pelaku usaha beras berkemasan. Pertemuan yang dilaksanakan adalah sebagai upaya meningkatkan kepastian usaha dan daya saing PSAT oleh pelaku usaha.

1.3 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah tahap awal adalah melakukan pendataan pelaku usaha komoditi sayuran di Kecamatan Banjang, Babirik, Sungai Pandan dan Amuntai Tengah.namun belum ada yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan rekomendasinya untuk diajukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Kalimantan Selatan.

1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengujian dengan metode rapid test kit terhadap residu pestisida (kualitatif) telah dilaksanakan di Pasar Babirik , Pasar Unggas dan Pasar Buah Candi tanggal 21 dan 22 Nopember 2023. Ada 16 jenis komoditas yang diuji yaitu tomat, cabe rawit, cabe merah besar, cabe

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

merah keriting, Cabe kering, Bawang merah, Bawang prei, Kembang Kol, Apel, Anggur merah, Lengkeng, Pir, Buah Naga, Buah Mangga, Bawang Putih, dan Daun Sop. Hasil uji menunjukan bahwa sayuran di Pasar Babirik aman terhadap residu pestisida; Sayuran di Pasar Unggas Tidak Aman terhadap residu Pestisida pada sayuran Tomat Negara (Kab. HSS), dan Bawang Putih; Selanjutnya Buah Pir di Pasar Buah Candi Tidak Aman terhadap residu pestisida. Secara umum Pangan Aman 81,25 %

Adapun indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan ini adalah peningkatan komoditas pangan segar yang aman di konsumsi dengan target 5 % dengan realisasi sebesar 12,5% dan capaian kinerja 250%. Kemungkinan penyebab tingginya angka ini sebagai berikut:

- Bahwa keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan seperti sayuran/buah-buahan terhadap residu pertisida di sentra produsen, distributor, pengumpul dan pengecer masih dalam batas yang ditolerir.
- Pengambilan sampel dilakukan tidak pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, sehingga permintaan masyarakat terhadap sayuran dan buah-buahan biasa saja. Umumnya pada hari Besar tersebut terjadi lonjakan permintaan. Hal ini yang menyebabkan banyak perlakuan terhadap sayuran/buah-buahan tersebut sehingga tidak aman dikonsumsi.

Target yang ingin dicapai sampai tahun 2026 dengan presentase peningkatan komoditas yang aman dikonsumsi sebesar 5% per tahun adalah 16 komoditas. Namun tahun 2022 dengan target 6,7% terealisasi 20% artinya target 15 komoditas yang aman hanya tercapai 10 komoditas. Ternyata pada tahun 2023 dapat dicapai sebesar 12,5% dengan kata lain terjadi peningkatan sebanyak 3 komoditas yang aman dikonsumsi, yaitu menjadi 13 komoditas. Artinya pada tahun 2023, target 13 komoditas telah tercapai. Diharapkan tahun berikutnya terjadi peningkatan komoditas paling sedikit 1 komoditas sehingga tahun 2026 tercapai target komoditas yang aman dikonsumsi.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Indikator dari Program ini adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target 76,2% dengan realisasi 81,5% dan capaian kinerja 106,53% dengan penjelasan capaian kenaikan persentase tersebut kemungkinan disebabkan perlakuan oleh petani terhadap tanaman sayuran/buah-buahan yang tidak menggunakan pestisida berbahan kimiawi. Selain itu juga kemungkinan disebabkan panen usaha tani sayuran pada musim kemarau, dimana resiko serangan hama penyakit sangat berkurang bila dibandingkan usaha tani pada musim penghujan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat**	**100%**	**130.475.673**	**0%**	**0**	**22.2 %**	**15.417.396**	**22,20%**	**15.403.000**	**100**	**99,9**			15.403.000	0,12
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Yang dibina	9 kelompok	130.475.673	0 kelompok	0	2 kelompok	15.417.396	2 kelompok	15.403.000	100	99,9			15.403.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	8 Laporan	130.475.673	0 Laporan	0	1 Laporan	15.417.396	1 Laporan	15.403.000	100	99,9			15.403.000	0,12
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Ketersediaan**	**64.72 Poin**	**1.942.001.071**	**0 Poin**	**0**	**62.72 Poin**	**423.173.026**	**61,7 Poin**	**414.055.505**	**98,4**	**97,9**			414.055.505	0,21
		Skor PPH Konsumsi	85 Poin		0 Poin		83.6 Poin		83,7 Poin		100,1				0	DIV/0!

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	294.76 %	594.473.343	0%	0	267.75 %	117.728.142	268,34%	114.760.121	100,2	97,5				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4 Laporan	130.200.509	0 Laporan	0	3 Laporan	17.997.300	3 Laporan	16.450.700	100	91,4				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	361.231.403	0 Laporan	0	1 Laporan	36.505.000	1 Laporan	35.519.910	100	97,3			35.519.910	0,10
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	88 Dokumen	103.041.431	0 Dokumen	0	22 Dokumen	63.225.842	22 Dokumen	62.789.511	100	99,3			62.789.511	0,61
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	43.3 %	432.024.459	0%	0	5%	168.496.388	7,20%	162.800.400	144	96,6			162.800.400	0,38
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	60 Ton	432.024.459	0 Ton	0	10 Ton	168.496.388	12 Ton	162.800.400	120	96,6				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan PPH Konsumsi	2%	915.503.269	0%	0	0.6 %	136.948.496	0,50%	136.494.984	83,33	99,7				
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Telaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapital Per Tahun	4 Laporan	171.894.659	0 Laporan	0	1 Laporan	37.509.000	1 Laporan	37.445.798	100	99,8				
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28 Kelompok	743.608.610	0 Kelompok	0	4 Kelompok	99.439.496	4 Kelompok	99.049.186	100	99,6				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa Rentan Rawan Pangan**	**8%**	**1.214.838.763**	**0%**	**0**	**6.45 %**	**176.861.427**	**7,31%**	**151.358.843**	**113**	**85,6**			151.358.843	0,12
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teresedianya Peta Kerentanan Pangan	4 Laporan	331.441.824	0 Laporan	0	1 Laporan	27.338.500	1 Laporan	24.795.700	100	90,7			24.795.700	0,07
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4 Dokumen	331.441.824	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.338.500	1 Dokumen	24.795.700	100	90,7			24.795.700	0,07
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Rentan Manjadi Tahan Pangan	8	883.396.939	0	0	2	149.522.927	3	126.563.143	150	84,6			126.563.143	0,14

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	883.396.939	0 Laporan	0	2 Laporan	149.522.927	2 Laporan	126.563.143	100	84,6			126.563.143	0,14
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**80%**	**180.514.464**	**0%**	**0**	**76.2 %**	**32.152.139**	**81,25%**	**31.335.350**	**107**	**97,5**				
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar	20	180.514.464	0	0	5	32.152.139	12,5	31.335.350	250	97,5				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	4 Dokumen	22.059.867	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.512.300	2 Dokumen	1.450.000	100	95,9			1.450.000	0,07
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	39.676.069	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.036.339	1 Dokumen	13.726.200	100	97,8			13.726.200	0,35
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	24.218.610	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.905.000	0 Dokumen	1.825.000	0	95,8			1.825.000	0,08

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	73 sampel	94.559.918	0 sampel	0	16 sampel	14.698.500	16 sampel	14.334.150	100	97,5				
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah (Dinas Ketahanan Pangan)**	**400%**	**10.104.030.723**	**0%**	**0**	**100%**	**2.696.887.663**	**98,67%**	**2.336.700.666**	**98,7**	**86,6**			2.336.700.666	0,23
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	400	426.427.874	0	0	100	64.148.550	100	61.909.530	100	96,5			61.909.530	0,15

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	120.630.233	0 Dokumen	0	6 Dokumen	17.644.050	6 Dokumen	17.479.300	100	99,1			17.479.300	0,14
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	4 Laporan	159.835.059	0 Laporan	0	1 Laporan	22.900.000	1 Laporan	21.271.430	100	92,9			21.271.430	0,13
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	145.962.582	0 Laporan	0	10 Laporan	23.604.500	10 Laporan	23.158.800	100	98,1			23.158.800	0,16

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan	400%	8.786.969.995	0%	0	100%	2.358.522.633	90,24%	2.042.249.545	90,24	86,6			2.042.249.545	0,23
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/ bulan	8.612.985.700	0 Orang/bulan	0	210 Orang/ bulan	2.325.650.983	169 Orang/bulan	2.010.709.954	80,48	86,5			2.010.709.954	0,23
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76 Laporan	173.984.295	0 Laporan	0	19 Laporan	32.871.650	19 Laporan	31.539.591	100	96			31.539.591	0,18

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	400%	321.173.451	0%	0	100%	130.562.200	100%	127.691.910	100	97,8			127.691.910	0,40
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	35.660.079	0 paket	0	4 paket	5.999.795	4 paket	5.931.600	100	98,9			5.931.600	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	24 paket	106.273.217	0 paket	0	6 paket	43.046.405	6 paket	41.517.450	100	96,5			41.517.450	0,39
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	179.240.155	0 Laporan	0	12 Laporan	81.516.000	12 Laporan	80.242.860	100	98,4			80.242.860	0,45

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400%	377.838.244	0%	0	100%	94.809.680	100%	72.089.631	100	76			72.089.631	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	187.804.064	0 laporan	0	12 laporan	65.245.000	12 laporan	43.641.631	100	66,9			43.641.631	0,23
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	92 Laporan	190.034.180	0 Laporan	0	23 Laporan	29.564.680	23 Laporan	28.448.000	100	96,2			28.448.000	0,15

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Provinsi/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Pencapaian Program Dan Kegiatan s / d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400%	191.621.159	0%	0	100%	48.844.600	103,13%	32.760.050	103,1	67,1			32.760.050	0,17
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 unit	176.650.756	0 unit	0	16 unit	45.844.600	17 unit	29.780.050	106,3	65			29.780.050	0,17
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	14.970.403	0 unit	0	1 unit	3.000.000	1 unit	2.980.000	100	99,3			2.980.000	0,20

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan OrganisasI, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Program dan Data; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2023 (thn n-1)	Th. 2024 (thn n)	Th. 2025 (thn n+1)	Th. 2026 (thn n+2)	Th. 2023 (thn n-2)	Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n+1)	
1	Nilai Sakip SKPD			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah			79,36	82,90	79,86	80,11	74,23	*)	79,86	80,11	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Penurunan Indeks Ketahanan Pangan terjadi akibat menurunnya 3 (tiga) aspek ketahanan pangan. Pada tahun 2022 **aspek ketersediaan** sebesar 90,79 menurun menjadi 70,54 pada tahun 2023, hal ini disebabkan penurunan produksi padi di HSU pada tahun 2021 berdasarkan angka tetap adalah 86.019,80 ton, sedangkan tahun 2022 berdasarkan angka sementara produksi padi berjumlah 37.836 ton terjadi penurunan produksi sebesar 48.183 ton, selain itu juga terjadi penurunan produksi komoditas jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Untuk **aspek keterjangkauan** terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,02 menjadi 90,36 pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena meningkatnya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, pada tahun 2021 sebesar 14,75% menjadi 16,65% pada tahun 2022. Persentase pengeluaran untuk pangan digunakan sebagai salah satu indicator untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Hasil penelitian Rashidi *et.al* (2021) menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga mempunyai hubungan langsung dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Deaton dan Muellbauer, 1980). Pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indicator ketahanan pangan karena makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan, berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Jika distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65% dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010).

Untuk **aspek pemanfaatan** terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 68,76 menjadi 64,91 pada tahun 2023, hal ini disebabkan meningkatnya angka stunting sebesar 7,10%, dari tahun 2021 sebesar 20,90% menjadi 28,00% pada tahun 2022. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badan menurut umurnya berada di bawah standar WHO yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Menurut laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting : 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang Kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2) Pelayanan antenatal Care dan Post Natal Care yang kurang berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang karena harga makanan bergizi yang relative mahal; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang ada dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Stabilisasi ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam usaha menurunkan tingkat kerawanan pangan

   Isu stabilisasi ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapat perhatian. Walaupun produksi pangan di kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum tersedia cukup.

   Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kabupaten Hulu Sungai Utara surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun. Hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

   Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

   Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih cukup tinggi yang diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar perdesaan, potensi sumber daya yang rendah serta adanya bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah

2. Mewujudkan sistem distribusi yang efisien dan menjaga stabilisasi harga pangan dan pasokan pangan

   Isu sistem distribusi yang efisien diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting.

Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menguhubungkan produsen dan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Meningkatkan promosi dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

   Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih belum maksimal yang ditunjukkan dengan angka pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi. Problematika gizi masyarakat seperti stunting, wasting dan obesitas.

   Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang bergam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

   Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat salah satunya dilaksanakan dengan menggencarkan promosi pangan lokal.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan

   Saat ini masih ditemukan sampel sayuran/ buahan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di pasar yang mengandung residu pestisida, dalam jangka panjang dapat menggangu kesehatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Untuk itu pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditingkatkan, serta belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NAMA SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Kab. HSU**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)**	**100**	**3.795.032.638**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Kab. HSU**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)**	**100**	**3.974.400.189**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**121.700.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**121.700.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	30.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	30.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	46.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	46.500.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	45.200.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	45.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**	**100**	**3.015.811.210**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**	**100**	**3.159.366.761**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.935.811.210		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	3.079.366.761	Penambahan anggaran untuk honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 laporan	80.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 laporan	80.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian**			**100**	**108.350.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian**			**100**	**108.350.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 paket	40.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 paket	40.500.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9 orang	67.850.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9 orang	67.850.000	
	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah			**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**293.382.039**	**Adiministrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	**100**	**293.382.039**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	69.450.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	69.450.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	26.093.140		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	26.093.140	
		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	6 paket	60.000.000		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	6 paket	60.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	137.838.899		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	137.838.899	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**136.789.389**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**125.711.389**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	37 laporan	65.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	37 laporan	65.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 laporan	71.789.389		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 laporan	60.711.389	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah			**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah**			**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**146.890.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 buah	85.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 buah	123.390.000	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	8.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Persentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi**	**100**	**19.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi**	**100**	**19.000.000**	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	19.000.000		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	19.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat**	33,30%	**44.377.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**Kab. HSU**	**Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat**	33,30%	**44.377.700**	
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenanagan daerah kabupaten / kota			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	3	44.377.700	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenanagan daerah kabupaten / kota			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	3	44.377.700	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik	3 laporan	44.377.700		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik	3 laporan	44.377.700	
	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**Kab. HSU**	**Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan**	**6,39%**	**198.393.150**	**PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Kab. HSU**	**Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan**	**6,39%**	**309.877.850**	
	Penyusunan Peta dan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			**Tersedianya Peta Kerentanan Pangan**	**1 dokumen**	**66.842.700**	**Penyusunan Peta dan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**			**Tersedianya Peta Kerentanan Pangan**	**1 dokumen**	**153.327.400**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dokumen	66.842.700		Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dokumen	153.327.400	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			**Jumlah Desa yang Rentan Menjadi Tahan Pangan**	2 Desa	**131.550.450**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**Jumlah Desa yang Rentan Menjadi Tahan Pangan**	2 Desa	**156.550.450**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 laporan	131.550.450		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 laporan	156.550.450	Penambahan penangan an desa lokus rawan pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN**	**64,22**	**901.953.139**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN**	**64,22**	**1.002.478.246**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan			**Persentase Ketersediaan Pangan Utama**	**284,72%**	285.505.843	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**			**Persentase Ketersediaan Pangan Utama**	**284,72%**	301.030.950	
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	59.463.700		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	59.463.700	
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 dokumen	108.570.950		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 dokumen	149.570.950	Upah petugas Entri Harga dan Pasokan
		Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 dokumen	117.471.193		Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 dokumen	91.996.300	
	Pegelolaan dan Keseimbangann Cadangan pangan Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	50,13%	**328.972.468**	Pegelolaan dan Keseimbangann Cadangan pangan Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah	50,13%	**388.972.468**	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24 ton gabah (15 ton beras)	328.972.468		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24 ton gabah (15 ton beras)	388.972.468	Penambahan gabah dan upah giling

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI**	**84,7 poin**		**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**		**Kab. HSU**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI**	**84,7 poin**		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi			**Peningkatan Skor PPH Konsumsi**	**0,5 poin**	**287.474.828**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi**			**Peningkatan Skor PPH Konsumsi**	**0,5 poin**	**312.474.828**	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 laporan	61.446.045		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 laporan	86.446.045	Meningkatkan angka skor PPH Konsumsi tahun 2025
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	12 Kelompok	226.028.783		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	12 Kelompok	226.028.783	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Kab. HSU**	**Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**88%**	**134.305.220**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Kab. HSU**	**Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**88%**	**134.305.220**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			**Persentase Peningkatan Keamanan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar**	**5%**	134.305.220	**Pelaksanaan PengawasanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase Peningkatan Keamanan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar**	**5%**	134.305.220	
		Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 dokumen	27.184.100		Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 dokumen	27.184.100	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.292.200		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.292.200	
		Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	17 dokumen	76.828.920		Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	17 dokumen	76.828.920	
J U M L A H						**5.074.061.847**	**J U M L A H**					**5.465.439.205**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Penambahan anggaran dari Rancangan Awal RKPD berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan sebagai berikut :

1. Penambahan dana untuk sub kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan dari Rp 108.570.950,- menjadi Rp 149.570.950,- untuk upah petugas entri harga pangan.
2. Penambahan dana untuk sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Rp 328.972.468,- menjadi Rp 388.972.468,- untuk penambahan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) pembelian gabah dan upah giling yang dikonversikan ke beras sebanyak 15 ton.
3. Penambahan dana untuk sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun dari Rp 61.446.045,- menjadi Rp 86.446.045,- untuk meningkatkan angka skor PPH Konsumsi tahun 2025.
4. Penambahan dana untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota dari Rp. 131.550.450,- menjadi Rp. 156.550.450,- untuk penambahan penanganan desa lokus rawan pangan
5. Penambahan dana untuk sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dari Rp.66.842.700,- Menjadi Rp. 153.327.400,- Untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)
6. Penambahan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari Rp. 85.000.000,- Menjadi Rp. 123.390.000,- untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda empat.
7. Penambahan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 2.935.811.210,- menjadi Rp. 3.079.366.761,- untuk honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausaha Keuangan, PPTK, Bendahara Pengelurahan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan.
1	2	3	4	5	6

Untuk program / kegiatan Dinas Ketahanan Pangan usulan melalui hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan ***tidak ada***

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional mencanangkan Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tanggung dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong sebagai tindak lanjut dari Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yaitu Terwujudkan tatakelola sistem pangan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, dilakukan dengan beberapa langkah konkrit sebagai misi Badan Pangan Nasional yaitu penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan, pengentasan kerawanan pangan dan gizi, menjamin keamanan dan mutu pangan segar, optimalisasi pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif, serta pengelolaan Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah pusat di bidang pangan, berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan Dinas Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten/kota.

Badan Pangan Nasional sebagai institusi yang berwenang di bidang pangan berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2021 memiliki fungsi :

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

5. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. Pengembangan system informasi pangan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Undang-undang Nomor 18/2012 tentang Ketahanan Pangan sebagai landasan hukum terpenuhinya pangan bagi warga sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari *tersedianya* pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, marata dan *terjangkau* serta tidak bertentangan dengan agama, kayakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Fokus pembangunan Sektor Unggulan Pangan dan Pertanian 2020 – 2024 adalah melanjutkan pencapaian target RPJMN 2015 - 2019 (NAWACITA) dan menjadikan komponen utama dalam membangunan perekonomian kokoh yang berdasarkan keunggulan di berbagai wilayah dengan didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2024 yang diolah pada 21 Januari 2024, bahwa angka inflasi year on year (yoy) merujuk pada angka 2,61%. Diketahui, minggu ke-3 perkembangan inflasi secara nasional cenderung mengalami penurunan, dengan angka 2,61%, inflasi di Indonesia harus terus diwaspadai dengan melakukan langkah intervensi.

Langkah yang dilakukan misalnya dengan pemberian bantuan sosial, melakukan Gerakan pasar murah, dan upaya-upaya lain untuk menstabilkan harga, kerja sama antar daerah, serta subsidi transportasi dari daerah surplus ke daerah minus.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan historis 2020-2023 selalu terjadi inflasi pada bulan Januari, dengan tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya (Desember). Sebagian besar kabupaten/kota juga mengalami inflasi, serta beberapa komoditas pangan bergejolak beberapa kali muncul sebagai penyumbang dil inflasi Januari.

Tingkat Inflasi nasional bulan Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) turun dari inflasi bulan November 2,86%. Inflasi bergejolak juga turun dari 7,59 menjadi 6,73%. komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 0,53% (yoy). Bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.

Dengan inflasi yang menurun ini memberikan harapan pada 2024. Kondisi inflasi dapat lebih baik lagi untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil dalam meredam laju inflasi.

Untuk meningkatkan tata Kelola system pangan yang inklusif, Tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui tiga aspek yaitu keterjangkauan, ketersediaan, dan kemanfaatan.

Untuk mencapainya ditentukan langkah konkrit strategis Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

No.	Kebijakan	Sasaran Strategis	Strategi
1.	Menjamin ketersedia-an pangan	Terpenuhi-nya kebutuhan pa-ngan se-cara opti-mal	- Penguatan cadangan/stok pangan nasional melalui Perum BULOG dan - BUMN Pangan - Pengendalian impor dan ekspor pangan - Penguatan infrastruktur, memperpanjang umur simpan, dan menjaga stok pangan Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
2.	Menjamin keterjang kauan pangan	Terwujudn ya stabilisasi dan harga pangan	- Penguatan Sistem Logistik Pangan - Nasional Stabilisasi harga pangan di produsen - dan konsumen Perluasan akses informasi - ketersediaan, pasokan, dan harga pangan Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, BUMN/BUMD Pangan)
		Terentas-kannya kerawa-	- Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi -

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No.	Kebijakan	Sasaran Strategis	Strategi
		nan pangan dan gizi	Penyaluran pangan bergizi untuk - daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana - Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat
3.	Menjamin pemanfaatan pangan	Terjamin-nya kea-manan dan mutu pangan segar	- Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan - Peningkatan kapasitas stakeholder sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar
		Meningkat-nya kua-litas kon-sumsi ma-syarakat	- Penganekaragaman komsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) - Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan - local. Pengendalian pemborosan pangan (food waste)
4.	Aspek pendu-kung	Pengem-bangan Data dan Informasi Pangan	- Integrasi data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk - pangan strategis - Platform pangan berbasis data driven Pemanfaatan informasi ikim untuk pengamanan ketersediaan pangan
		Terwujudn ya birokrasi Ba-dan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientas i pelayanan prima	- Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, - deregulasi dan digitalisasi. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	A / 83.7
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pendapatan Perkapita	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	83,05

Adapun Program dan indikator yang mendukung untuk pencapaian Indicator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

No	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
PILIHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	33,3
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	6,39
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	64,22
		Skor PPH Konsumsi	84,7
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	88

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

1. Mendukung pencapaian kepala daerah melalui penyusunan rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis;
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, serta infrastruktur dalam kerangka RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Adanya sumber-sumber pendanaan yang menunjang untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) program yaitu :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   - Program Penanganan Kerawanan Pangan
   - Program Pengawasan Keamanan Pangan
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksankan pada tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan yaitu :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penyebaran lokasi pelaksanaan dan sasaran Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di beberapa Desa Lokus Stunting dan Desa yang memiliki Rumah tangga miskin , Pengusaha penggilingan padi , korban bencana alam dan kebakaran, pedagang sayur dan buah

Total Kebutuhan Pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari Dana APBD, dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp.2.411.547.336, - dan dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp. 3.079.366.761,-

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2025 mengakomodir Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program dan Kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, dilaksanakan secara sinergi dan terpadu baik antar maupun inter sektor, agar lebih efektif dan efisien, untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.490.914.097,00				5.541.248.089,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.490.914.097,00				5.541.248.089,00	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)		100%	3.974.400.189,00				4.007.311.179,00	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	**121.700.000,00**				**127.688.331,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	34.719.463,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	1 Laporan	46.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	46.500.000,00	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	10 Laporan	45.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	46.468.868,00	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Tertatanya Administrasi Keuangan		100%	**3.159.366.761,00**				**2.998.887.180,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	18 Orang/bulan	3.079.366.761,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.935.811.210,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	19 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	63.075.970,00	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Tertatanya Administrasi Kepegawaian		100%	**108.350.000,00**				**118.350.000,00**	
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	81 Paket	40.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	50.500.000,00	
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	9 Orang	67.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	67.850.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	**293.382.039,00**				**430.456.779,00**	
2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	5 Paket	69.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.450.000,00	
2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	4 Paket	26.093.140,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.093.140,00	
2 09 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	6 Paket	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	87.072.000,00	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah,	60 Laporan	137.838.899,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	247.841.639,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sungai Malang							
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi		100%	**19.000.000,00**				**40.000.000,00**	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	1 Unit	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**125.711.389,00**				**157.128.389,00**	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	37 Laporan	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	85.339.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	80 Laporan	60.711.389,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Laporan	71.789.389,00	
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**146.890.000,00**				**134.800.500,00**	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	17 Unit	123.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	94.800.500,00	
2 09 01 2.09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	1 Unit	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	1 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat		33,30%	44.377.700,00				75.475.202,00	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina		3 buah	**44.377.700,00**				**75.475.202,00**	
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	44.377.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	3 Laporan	75.475.202,00	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Skor PPH Ketersediaan		84,7 Poin 64,22 Poin	1.027.953.138,00				943.780.671,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		284,72 Poin	**326.505.843,00**				**285.505.843,00**	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	117.471.193,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	117.471.193,00	
2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	149.570.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	108.570.950,00	
2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	59.463.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	59.463.700,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah		13,3 Poin	**388.972.468,00**				**370.800.000,00**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Ton	388.972.468,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24 Ton	370.800.000,00	Penurunan Kemiskinan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Skor PPH Konsumsi Persentase Ketersediaan Pangan Utama		0,5 284,72	**312.474.827,00**				**287.474.828,00**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	86.446.045,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	61.446.045,00	Pencapaian SDG's
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	226.028.782,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	226.028.783,00	Penurunan Stunting, Penurunan Kemiskinan, Responsif Gander

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan desa rentan rawan pangan		7,41%	309.877.850,00				380.127.400,00	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan Pangan		1 Peta	**153.327.400,00**				**153.327.400,00**	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	153.327.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	153.327.400,00	Penurunan Kemiskinan
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan		2 Desa	**156.550.450,00**				**226.800.000,00**	
2 09 04 2.02 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	156.550.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	, 226.800.00000	Responsif Gender, Pencapaian SDG's
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan		78,40%	134.305.220,00				134.553.637,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Tagging Belanja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar		5%	**134.305.220,00**				**134.553.637,00**	
2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.292.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.292.200,00	Penurunan Stunting, Responsif Gander
2 09 05 2.01 0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	76.828.920,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	76.828.920,00	
2 09 05 2.01 0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	- Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	27.184.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	27.432.517,00	
TOTAL					**5.490.914.097,00**				**5.541.248.089,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, maka setiap bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program kegiatan, baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat mengakomodir program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yang perlu mendapat perhatian khusus pada Rencana Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025 ini adalah:

1. Pemetaan dan Pemutahiran Data Daerah Rentan Rawan Pangan
2. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
3. Terbatasnya petugas yang trampil dan ahli dibidang analisis ketahanan pangan dan pengolah hasil pangan lokal, dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan segar
4. Pemantauan stok pasokan dan harga pangan

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Pelaksanaan Survei FSVA dan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan
2. Pengisian Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah
3. Menfasilitasi kegiatan pengolahan hasil pangan lokal dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan serta uji sampel pangan segar asal tumbuhan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

4. Melaksanakan pemantauan stok pasokan dan harga pangan.

Amuntai, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Hj. SITI FIKRIYAH, SP, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 19670703 198903 1 018

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**5.490.914.097,00**							**5.541.248.089,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.490.914.097,00**							**5.541.248.089,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.490.914.097,00**							**5.541.248.089,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)***	**-**			**100 %**	**3.974.400.189,00**						**-**	**4.007.311.179,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	-			100	121.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	SKPD	-	127.688.331,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	SKPD		34.719.463,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	46.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		46.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	45.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	SKPD		46.468.868,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan*	-			100	3.159.366.761,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	2.998.887.180,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	3.079.366.761,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		2.935.811.210,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	80.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		63.075.970,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian*	-			100	108.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	118.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	40.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		50.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	67.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		67.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja*	-			100	293.382.039,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	430.456.779,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	69.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		69.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	26.093.140,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		26.093.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	60.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		87.072.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	137.838.899,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		247.841.639,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pesentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi*	-			100	19.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	19.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100	125.711.389,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	157.128.389,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	65.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		85.339.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Laporan	60.711.389,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		71.789.389,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100	146.890.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD	-	134.800.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	123.390.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		94.800.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	SKPD		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat***	**-**			**33,3 %**	**44.377.700,00**						**-**	**75.475.202,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina*	-			3	44.377.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Anggota Kelompok Lumbung (Masyarakat)	-	75.475.202,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	44.377.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Anggota Kelompok Lumbung (Masyarakat)		75.475.202,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor PPH Ketersedian Skor PPH Konsumsi***	**-**			**64,22 Poin 84,7 Poin**	**1.027.953.138,00**						**-**	**943.780.671,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	-			284,72	326.505.843,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, SKPD	-	285.505.843,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	117.471.193,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, SKPD		117.471.193,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				2 Dokumen	149.570.950,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, SKPD		108.570.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	59.463.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, SKPD		59.463.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Cadangan pangan Daerah*	-			9	388.972.468,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat terdampak bencana	-	370.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				15 Ton	388.972.468,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat terdampak bencana		370.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Peningkatan Skor PPH Konsumsi*	-			0,5	312.474.827,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat Desa Lokus Stunting	-	287.474.828,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	86.446.045,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat Desa Lokus Stunting		61.446.045,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	226.028.782,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat Desa Lokus Stunting		226.028.783,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Penurunan desa rentan rawan pangan*** ***Persentase Desa Rentan Rawan Pangan***	**-**			**6,39 %** **6,39 %**	**309.877.850,00**						**-**	**380.127.400,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersedianya Peta Kerentanan Pangan*	-			1	153.327.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat	-	153.327.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	153.327.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat		153.327.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan*	-			2	156.550.450,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat	-	226.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	156.550.450,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat		226.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan***	**-**			**88 %**	**134.305.220,00**						**-**	**134.553.637,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar*	-			5	134.305.220,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Pelaku Usaha Beras Berkemasan, Pedagang Sayur dan Buah	-	134.553.637,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.292.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Pelaku Usaha Beras Berkemasan, Pedagang Sayur dan Buah		30.292.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				17 Dokumen	76.828.810,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Pelaku Usaha Beras Berkemasan, Pedagang Sayur dan Buah		76.828.920,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	27.184.210,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat, Pelaku Usaha Beras Berkemasan, Pedagang Sayur dan Buah		27.432.517,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							**5.490.914.097,00**							**5.541.248.089,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KELENGKAPAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2025
(Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Maret 2024

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
	BAB I (Pendahuluan)				
	1.1. Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD,Renstra PD,Renja Provinsi /K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPD	✓		
	1.2. Landasan Hukum	Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Perda,dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	✓		Perlu diperbarui yang sudah berubah dan/atau ditambah yang belum ada
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja SKPD	✓		
	1.4. Sistematika Penyusunan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen	✓		
	BAB II (Hasil Evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun Lalu)				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1)	✓		Hasil evaluasi prog/keg/sub keg diperangkat sesuai dengan hasil yang dicapai pada tabel TC-29
	- Tabel T-C-29	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun berjalan	✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi capaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK			
	- Tabel T-C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	✓		
	2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Memuat Permasalahan dan Hambatan PD dlm pelaksanaan Tupoksi, Dampaknya terhadap pencapaian visi misi, tantangan dan peluang dlm meningkatkan pelayanan SKPD, serta rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dlm perumusan program kegiatan yang dirumuskan	✓		

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Uraian		Kesesuaian		Tindak Lanjut
			Ada	Tidak Ada	
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Proses perbandingan antara RKPD dengan analisis kebutuhan dan penjelasan temuan apakah ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD	✓		Ada perbedaan anggaran antara RKPD dan analisis kebutuhan seperti di catatan
	- Tabel T-C-31	Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		
	- Tabel T-C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan	✓		
	BAB.III (Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah)				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tufoksi SKPD	✓		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tufoksi PD	✓		
	BAB.IV (Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah)				
	4.1. Program dan Kegiatan	Berisi penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan, rekapitulasi program kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD (Pada Renja)	✓		
		Tagging Program dan Kegiatan Sesuai dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Pada Aplikasi SIPD-RI	✓		
	- Tabel T-C-33	Tabel rumusan program kegiatan PD	✓		
		Pagu Belanja Pegawai (Kesesuaian dengan PAGU ranwal RKPD)	✓		
		Pagu Belanja Lainnya (Kesesuaian dengan PAGU Ranwal RKPD)	✓		
		Pagu Belanja Modal akan disesuaikan dengan Usulan Masyarakat & POKIR (jumlah yang di akomodir SKPD sesuai dengan pada Tabel TC-32)	✓		
	BAB.V (Penutup)				
	Ketentuan lain :				
1	Mencantumkan indikator dan target kinerja program		✓		Diisi pada tabel rumusan prog/keg/sub keg dengan tagging apakah mendukung kemiskinan, stunting, responsif gender, SDG's, dan/atau SPM
2	Memuat Pokok-pokok pikiran dewan dan hasil			✓	
3	Memuat kegiatan Penurunan Kemiskinan		✓		
4	Memuat kegiatan Penurunan Stunting		✓		
5	Memuat kegiatan yang responsif gender		✓		
6	Memuat kegiatan untuk pencapaian SDG's		✓		
7	Memuat kegiatan untuk pencapaian SPM		✓		
8	Memuat kegiatan pendanaan program dan		✓		

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Uraian	Kesesuaian		Tindak Lanjut
		Ada	Tidak Ada	
9	Kesesuaian pendanaan program dan kegiatan Renja	✓		
10	Pengembalian Renja perbaikan setelah verifikasi			

Catatan/Pendapat :

Ada penambahan anggaran untuk 4 sub kegiatan yang totalnya sebesar 125.525.107, yaitu sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (sesuai kesepakatan target Rakorlak)
4. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun

No	SKPD	Nama	Jabatan Dlm SKPD	Tanda Tangan
1	Perwakilan SKPD	Hj. Siti Fikriyah, S.P, M.A.	Kepala Dinas	
2	Perwakilan SKPD	Sarlina Hidayati, STP.	Kasubag Program dan Data	
4	Tim Verifikasi	Sri Jamilatul Khairah, STP., M.Si.	Perencana Ahli Muda	
5	Tim Verifikasi	M. Alamsyah, S.Pt.	Perencana Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025

Jl. Basuki Rahmat No. 9 Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kallmantan Selatan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3[illegible] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pnenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah, dengan daftar Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Wajib :

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektor Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Perangkat Daerah lainnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN..... iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penyusunan 4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD 5
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah 25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 43
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BABA V. PENUTUP 58

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Alokasi Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 8

Tabel 2. Realisasi Keuangan Per Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 9

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara 14

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara 26

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 34

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara 36

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 44

Tabel 8. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 49

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pohon Kinerja (Cascading) Tahun 2025 8

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintahan yang demokratis, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efisien. Oleh karenanya manajemen pemerintahan yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perecanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan (*guide line*) berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eskternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan dapat akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh perangkat daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi.
   b. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah.
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
   d. Isu-isu penting penyelanggaaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
   f. Perumusan tujuan dan sasaran.
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   h. Perumusan kegiatan prioritas.
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
   j. Pembahasan forum perangkat daerah.
   k. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

   Renja Dinas Pertanian merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – Perangkat Daerah), dimana merupakan bagian dari penyusunan RAPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan pertanian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Pendanaan

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Mengacu kepada RPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
   3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
      - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Ternak, benih/Bibit Hijauan Pakan ternak
   4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
      - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   1. Pengembangan Prasarana Pertanian
      - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
   2. Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
   - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan
   - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
   - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
   - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
   - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6) Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

7) Program Penyuluhan Pertanian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
   - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
   - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Dukungan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari dana APBD Kabupaten untuk Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 25.270.473.072,- yang terdiri dari belanja operasi Rp. 24.371.635.412,- dan belanja modal Rp. 898.837.660,-. Berikut rincian alokasi belanja pada tahun anggaran 2023 :

Tabel 1. Rincian Alokasi Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1.	**Belanja Operasi**	**21.955.408.632**	**24.371.635.412**	**2.416.226.780**	**11,00**
	a. Belanja Pegawai	14.990.350.723	15.511.052.503	520.701.780	3,47
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.150.263.409	4.079.919.219	(70.344.190)	(1,69)
	c. Belanja Hibah	2.814.794.500	4.780.663.690	1.965.869.190	69,84
2.	**Belanja Modal**	**1.920.500**	**898.837.660**	**896.917.160**	**46.702,27**
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.920.500	728.837.660	726.917.160	37.850,41
	b. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		170.000.000	170.000.000	100
Total Belanja		**21.957.329.132**	**25.270.473.072**	**3.313.143.940**	**15,09**

Dari tabel di atas terlihat, pengalokasian dana sebelum perubahan untuk pelaksanaan pembangunan pertanian sebesar Rp. 21.957.329.132,-, kemudian terjadi kenaikan anggaran pembangunan pertanian sebesar Rp. 3.313.143.940,- (15,09 %) menjadi Rp. 25.270.473.072,-.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Besarnya alokasi anggaran per program dan kegiatan serta realisasinya untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Realisasi Keuangan Per Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.430.430.955**	**1.896.122.512**	**78,02**
1.1.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.793.890.895**	**1.363.897.352**	**76,03**
1.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuaidengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	141.977.750	116.253.750	**81,88**
1.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.651.913.145	1.247.643.602	75,53
1.2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**82.248.280**	**74.034.000**	**90,01**
1.2.1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	82.248.280	74.034.000	90,01
1.3	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**151.090.500**	**127.439.260**	**84,35**
1.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	108.984.000	91.444.760	83,91
1.3.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	42.106.500	35.994.500	85,48
1.4.	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**403.201.280**	**330.751.900**	**82,03**
1.4.1	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	30.253.990	15.929.500	52,65
1.4.2	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	372.947.290	314.822.400	84,41
2.	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**4.402.719.812**	**3.747.075.168**	**85,11**
2.1.	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**162.488.500**	**146.144.700**	**89,94**
2.1.1	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	162.488.500	146.144.700	89,94
2.2.	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.212.954.212**	**3.579.626.868**	**84,97**
2.2.1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	237.895.510	209.264.250	87,96
2.2.2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.561.430.558	2.969.487.318	83,38

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	54.234.144	52.812.300	97,38
2.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	359.394.000	348.063.000	96,85
2.2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	237.895.510	209.264.250	87,96
2.3.	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**27.277.100**	**21.303.600**	**78,10**
2.3.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	27.277.100	21.303.600	**78,10**
3.	**PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**264.118.216**	**236.228.500**	89,44
3.1.	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**79.762.257**	**68.762.000**	86,21
3.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	79.762.257	68.762.000	86,21
3.2.	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**11.350.000**	**8.883.000**	**78,26**
3.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	11.350.000	8.883.000	78,26
3.3.	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**86.027.249**	**79.302.500**	**92,18**
3.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20.543.627	16.824.000	81,89
3.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	65.483.622	62.478.500	95,41
3.4.	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**86.978.710**	**79.281.000**	**91,15**
3.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8.714.320	7.609.000	87,32
3.4.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	61.972.370	57.317.500	92,49
3.4.3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	16.292.020	14.354.500	88,11
4.	**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**351.320.670**	**300.251.300**	85,46
4.1.	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**351.320.670**	**300.251.300**	85,46
4.1.1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	343.655.320	297.084.300	86,45
4.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	7.665.350	3.167.000	41,32

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perkebunan			
5.	**PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**3.509.200**	**1.475.000**	**42,03**
5.1	**Penerbitan izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.509.200**	**1.475.000**	**42,03**
5.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	3.509.200	1.475.000	42,03
6.	**PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.503.145.196**	**1.463.783.883**	**97,38**
6.1.	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.503.145.196**	**1.463.783.883**	**97,38**
6.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	251.815.300	239.898.250	95,27
6.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	664.994.900	645.921.962	97,13
6.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	586.334.996	577.963.671	98,57
7.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.315.229.023**	**13.083.549.342**	**80,19**
7.1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**167.776.038**	**148.960.360**	**88,79**
7.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.178.800	4.767.500	92,06
7.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.636.600	3.459.000	95,12
7.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.459.800	3.173.000	91,71
7.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	131.682.200	115.305.360	87,56
7.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.818.638	22.255.500	93,44
7.2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.481.177.503**	**12.330.093.376**	**79,65**
7.2.1.	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.481.177.503	12.330.093.376	79,65
7.3.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.043.560**	**27.510.000**	**65,43**
7.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.043.560	27.510.000	65,43
7.4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18.510.250**	**16.970.000**	**91,68**
7.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.510.250	16.970.000	91,68
7.5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**353.331.760**	**337.168.569**	**95,43**
7.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.965.500	1.868.000	31,31
7.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.154.100	98.885.000	96,80
7.5.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.747.900	10.432.900	75,89
7.5.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.500.000	211.237.669	99,88
7.5.5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.964.260	14.745.000	73,86
7.6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa**	**149.474.512**	**139.122.000**	**93,07**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.595.312	115.581.000	95,84
7.6.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.879.200	23.541.000	81,52
7.6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.915.400**	**83.725.037**	**81,35**
7.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.715.400	73.065.037	79,66
7.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.200.000	10.660.000	95,18
Jumlah		**25.270.473.072**	**20.728.485.705**	**82,03**

Secara umum pelaksanaan program oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 berjalan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 dari target keuangan sebesar Rp. 25.270.473.072,- dapat terealisasi sebesar Rp. 20.728.485.705,- atau 82,03%, khusus untuk belanja langsung (anggaran pelaksanaan program dan kegiatan) sebesar Rp. 9.789.295.569,- dapat terealisasi Rp. 8.398.392.329,- atau 85,79 % dan target fisik 100 % dapat terealisasi 90,99 %.

Dari tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 diatas menunjukan bahwa ada terdapat 4 sub kegiatan yang capaiannya rendah, yaitu :

1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian 52,65 % karena adanya pengadaan alat/bahan yang telah terpenuhi dari bantuan APBD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan capaian 41,32 % karena tidak maksimalnya sosialisasi pencegahan,penanganan kebakaran lahan disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (ASN) yang melaksanakan kegiatan.
3. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan capaian 42,03 % karena adanya pembatasan keluar masuknya ke perusahaan perkebunan tetapi dari perusahaan selalu melakukan koordinasi ke dinas pertanian.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 31,31 % karena ada sebagian pengadaan yang pagu anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan harga ditingkat pasar (adanya kenaikan harga yang tinggi).

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 terkait pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**	**2,6%**		**0,5%**	**1%**	**200**	**0,7 %**	**1,7 %**	**65,38 %**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**	**253%**		**60%**	**60%**	**100**	**63%**	**123 %**	**48,62 %**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	48 laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan	24 Laporan	50 %
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan	24 Laporan	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDG hewan dan tumbuhan yang berkembang**	**12 komoditas**		**3 Komoditas**	**3 Komoditas**	**100**	**3 Komoditas**	**6 Komoditas**	**50 %**
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 dokumen	8 Dokumen	50 %
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan mutu benih/ bibit ternak dan pakan ternak**	**26 %**		**5%**	**5%**	**100**	**7%**	**12 %**	**46,15 %**
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16 laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 laporan	8 Laporan	50 %
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	48 laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan	24 Laporan	50 %
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya**	**266 %**		**65%**	**65%**	**100**	**67 %**	**132%**	**49,62 %**
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	11 ton		2 Ton	2 Ton	100	3 ton	5 Ton	45,45 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	48 laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan	24 Laporan	50 %
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**17,5 %**		**2,5 %**	**2,5 %**	**100**	**2,5 %**	**5 %**	**28,57 %**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Indeks keberlanjutan lahan pertanian**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan /LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	2 Dokumen	66,67 %
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik**	**63 unit**		**25 unit**	**23 unit**	**92**	**15 unit**	**38 unit**	**60,32 %**
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	9 unit		1 unit	1 unit	100	2 unit	3 unit	33,33 %
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	26 unit		20 unit	18 unit	90	6 unit	24 unit	92,31 %
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit		1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 unit		3 unit	3 unit	100	5 unit	8 unit	38,09 %
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang**	**16 wilayah**		**4 Wilayah**	**4 Wilayah**	**100**	**4 wilayah**	**8 Wilayah**	**50 %**
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	50 %
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian penyakit hewan**	**34,3 %**		**7,3%**	**7,8%**	**106,85**	**8 %**	**15,8%**	**46,06 %**
		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	**346 %**		**85%**	**93,50%**	**110**	**86 %**	**17,95%**	**51,88 %**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan diberantas**	**360 %**		**90%**	**90%**	**100**	**90 %**	**180%**	**50 %**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase hewan dan produk hewan yang keluar masuk yang bebas penyakit	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat kesembuhan hewan dari penyakit**	**360 %**		**90%**	**90%**	**100**	**90%**	**180%**	**50 %**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Lapoan	24 Laporan	50 %
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**346 %**		**85%**	**85%**	**100**	**85%**	**170%**	**49,13 %**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran dan Produk Hewan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam**	**380 %**		**95%**	**98%**	**103,16**	**95%**	**193%**	**50,79 %**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**380 %**		**95%**	**98%**	**103,16**	**95%**	**193 %**	50,79 %
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1600 Ha		400 Ha	400 Ha	100	400 Ha	800 Ha	50 %
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha		50 Ha	50 Ha	100	50 Ha	100 Ha	50 %
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase izin usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**200%**	**50 %**
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**200%**	**50 %**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.06.2.01.01	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	**50 %**
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**100 %**		**25%**	**25%**	**100**	**25%**	**50 %**	**50 %**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Unit		9 Unit	9 Unit	100	9 Unit	18 Unit	50 %
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	789 unit		189 Unit	189 Unit	100	200 unit	389 Unit	49,30 %
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	36 unit		9 Unit	9 Unit	100	9 unit	18 Unit	50 %
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai perundangan	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokumen	50 %
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	24Laporan	50 %
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan administrasi keangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	604 orang/bulan		151 Orang / Bulan	151 Orang / Bulan	100	151 orang/bula	302 Orang / Bulan	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

								n			
X.XX.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	50 %
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	50 %
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik**	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	39 paket		9 Paket	9 Paket	100	10 paket	19 Paket	48,72 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket		6 Paket	6 Paket	100	10 paket	16 Paket	44,44 %
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	37 paket		7 Paket	7 Paket	100	10 paket	17 Paket	45,95 %
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Laporan		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Laporan	24 Dokumen	50 %
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Disediakan								
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	**400 %**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**200%**	**50 %**
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 unit		40 Unit	40 Unit	100	40 unit	80 Unit	50 %
X.XX.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	368 unit		92 Unit	92 Unit	100	92 unit	184 Unit	50 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

a. Pelayanan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
b. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman pangan
c. Pelayanan penyediaan sarana produksi peternakan
d. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman perkebunan
e. Pelayanan penyediaan sarana produksi tanaman hortikultura
f. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
g. Pelayanan penyuluhan pertanian
h. Pelayanan data dan informasi pertanian.

Sedangkan kelompok sasaran dari pelayanan tersebut adalah petani, kelompok tani dan peternak, gabungan kelompok tani, penangkar benih, kelompok usaha bidang pertanian dan stakeholder bidang pertanian.

Pada dasarnya kinerja pelayanan perangkat daerah dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, maka target kinerja pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.

Secara umum indikator kinerja Dinas Pertanian telah tercapai dengan hasil-hasil yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2026	
1.	Produksi padi	-	Ton	110.495	111.034	113.602	114.150	37.128	80.859	113.602	114.150	
2.	Produksi jagung	-	Ton	526	559	576	594	163	458	576	594	
3.	Produksi kacang tanah	-	Ton	494	508	520	533	21	55	520	533	
4.	Produksi cabe besar	-	Ton	198	214	230	245	170	216	230	245	
5.	Produksi cabe rawit	-	Ton	124	136	143	149	136	155	143	149	
6.	Produksi karet	-	kg	409.000	412.000	413.000	415.000	403.486	405.000	413.000	415.000	
7.	Produksi daging ternak besar	-	Kg	371.758	386.644	401.751	416.639	380.445	381.968	401.751	416.639	
8.	Produksi daging ternak kecil	-	Kg	8.762	9.035	9.307	9.580	8.458	8.536	9.307	9.580	
9.	Produksi daging ternak unggas	-	Kg	2.558.380	2.791.681	3.024.982	7.385.034	2.348.871	2.559.560	3.024.982	7.385.034	
10	Produksi telur unggas	-	Kg	7.032.737	7.149.794	7.267.227	3.258.282	7.090.123	7.199.517	7.267.227	3.258.282	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain:

a. Pengembangan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yaitu:

1) Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) masih terbatas dan belum optimal.
2) Masih kurangnya Ketersediaan benih unggul bermutu
3) Terbatasnya pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk berimbang
4) Terbatasnya ketesediaan alat mesin pertanian bagi petani /kelompok tani.
5) Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga kerusakan tanaman akibat bencana alam masih cukup besar, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) masih perlu diwaspadai.
6) Lemahnya daya beli petani terhadap sarana produksi.
7) Belum berkembangnya sistem pemasaran yang dapat memberikan margin keuntungan bagi petani.
8) Belum berkembangnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha dalam bidang pertanian.

b. Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produksi peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

1) Kurangnya jumlah bibit ternak yang berkualitas
2) Rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam budidaya peternakan serta pola pikir/perilaku peternak masih tradisional.
3) Usaha pengolahan hasil peternakan yang belum optimal.
4) Masih adanya kejadian kasus penyakit pada hewan dan ternak.
5) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyedia bahan pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
6) Belum optimalnya pengembangan wilayah sumber bibit ternak itik.

c. Prasarana dan Sarana Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana pertanian yaitu:

1) Belum optimal Pemanfaatan jaringan irigasi dalam peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2) Kurang terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat desa dan jaringan irigasi tingkat usahatani.
3) Rendahnya daya beli petani untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) dan kurangnya tenaga terampil dalam mengoperasikan dan memperbaiki/pemeliharaan alsintan.
4) Pemanfaatan pupuk bersubsidi masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
5) Terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian.

d. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan penyuluhan pertanian yaitu:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
2) Kinerja kelembagaan tani yang belum optimal.
3) Belum meratanya kompetensi penyuluh pertanian.
4) Terbatasnya akses petani terhadap informasi pertanian.

e. Kondisi Data, Koordinasi, Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam lemahnya koordinasi, tidak sinkronnya sistem perencanaan dan lemahnya ketersediaan data yang tepat dan akurat yaitu:

1) Belum berkembangnya sistem perencanaan yang terpadu yang terintegrasi dari semua aspek pendukungnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2) Masih lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian.
3) Masih lemahnya kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian.
4) Masih lemahnya ketersediaan data secara cepat, tepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 tetap diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan yang dimaksudkan untuk terciptanya rasa keadilan di masyarakat, fungsi pembangunan yang terarah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan guna terciptanya kemandirian di masyarakat. Dengan berlandaskan keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka rumusan strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sampai tahun 2026 ini adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
4. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan
5. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
6. Peningkatan kualitas dan pelayanan data dan informasi kependudukan
7. Optimalisasi jangkauan jaringan internet
8. Optimalisasi jaringan intranet
9. Peningkatan Kualitas Pendapatan Daerah
10. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan
11. Peningkatan budaya baca dan literasi
12. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya
13. Peningkatan promosi kesehatan
14. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
15. Peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting
16. Peningkatan keberdayaan masyarakat
17. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
18. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
19. Peningkatan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak
20. Peningkatan penyelenggaraan keluarga berencana
21. Peningkatan prestasi olahraga
22. Pengembangan organisasi kepemudaan
23. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
24. Peningkatan ketahanan sosial
25. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
26. Peningkatan keamanan ketertiban umum
27. Revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan
28. Efektivitas manajemen pengelolaan pasar
29. Pemberdayaan IKM, UMKM dan koperasi

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

30. Peningkatan pelayanan sektor jasa
31. Pengembangan pariwisata local
32. Penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
33. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
34. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
35. Meningkatkan cakupan layanan air bersih, layak dan aman
36. Meningkatkan cakupan sanitasi layak dan aman
37. Meningkatkan layanan persampahan
38. Meningkatkan jalan dalam kondisi baik
39. Meningkatkan akses pelayanan transportasi darat dan sungai
40. Pencegahan dan penurunan tingkat kekumuhan di permukiman
41. Pengurangan rumah tidak layak huni
42. Peningkatan kualitas air
43. Peningkatan kualitas udara
44. Peningkatan kesesuaian tata ruang
45. Mengoptimalkan kajian resiko bencana daerah
46. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana penjabaran di atas, maka rumusan arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah;
2. Pengembangan instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan;
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan kebijakan daerah;
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Peningkatan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Penguatan kualitas sistem pengawasan daerah;
7. Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip;
8. Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah;
9. Peningkatan kompetensi aparatur;
10. Peningkatan pencapaian SPM dan SOP;
11. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Penyediaan internet Broadband cepat dan terjangkau;
13. Integrasi jaringan antar instansi;
14. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan PAD;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

15. Meningkatkan aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
16. Pengembangan manajemen sekolah;
17. Peningkatan kompetensi guru;
18. Pemenuhan standar minimum pendidikan (SPM);
19. Peningkatan koleksi buku dan fasilitas perpustakaan;
20. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan karakter;
21. Pelestarian cagar budaya dan nilai warisan tradisi;
22. Pengembangan kreativitas kesenian;
23. Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
24. Peningkatan persediaan obat dan perbekalan kesehatan;
25. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
26. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
27. Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak dan remaja;
28. Peningkatan kualitas kesehatan lansia;
29. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil;
30. Peningkatan gizi bayi dan balita;
31. Optimalisasi tekhnologi tepat guna (TTG);
32. Optimalisasi potensi dan aset desa;
33. Optimalisasi kawasan perdesaan;
34. Pengembangan kebijakan gender;
35. Pemenuhan hak-hak anak;
36. Peningkatan akses perempuan dalam pemerintahan, ekonomi dan politik;
37. Pengembangan strategi komunikasi resiko perkawinan anak;
38. Pendampingan terhadap keluarga yang potensial melakukan perkawinan anak;
39. Peningkatan partisipasi KB aktif;
40. Pendataan dan fasilitasi pasangan usia subur yang ingin be KB;
41. Peningkatan ketahanan keluarga;
42. Pemerataan fasilitas dan kualitas olahraga;
43. Pembinaan klub olahraga;
44. Perbaikan manajemen pembibitan atlet;
45. Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan;
46. Peningkatan kualitas dan kreativitas pemuda;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

47. Peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat;
48. Peningkatan kerukunan ummat beragama;
49. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum dan pencegahan perkembangan kriminalitas;
50. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum;
51. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
52. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
53. Penguatan ketahanan pangan daerah;
54. Penataan pasar;
55. Peningkatan kapasitas SDM dan nilai tambah produk;
56. Peningkatan manajemen sektor jasa;
57. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
58. Peningkatan investasi daerah;
59. Peningkatan kemandirian berusaha/enterpreneurship;
60. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
61. Meningkatkan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
62. Peningkatan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat;
63. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
64. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
65. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
66. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
67. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih layak dan aman;
68. Perluasan dan pemeliharaan jaringan perpipaan kabupaten;
69. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
70. Mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan prinsip keberlanjutan;
71. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
72. Pemasangan dan pemeliharaan marka jalan;
73. Pemeliharaan alur sungai dan rambu sungai;
74. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;
75. Meningkatkan kualitas rumah layak huni;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

76. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran sungai, air tanah dan rawa;
77. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi pencemaran udara;
78. Pengendalian pemanfaatan peruntukkan lahan yang sesuai RTRW;
79. Meningkatkan kualitas dengan review dokumen rencana penanggulangan bencana;
80. Pembentukkan desa tangguh bencana.

Secara sistematis penjabaran isu strategis, tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, Ekonomi Kreatif dan jasa	Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Semua Kecamatan	0,7%	2.221.993.630	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Semua Kecamatan	0,7%	2.221.993.630	
		Persentase peningkatan populasi ternak	Semua Kecamatan	1,2%			Persentase peningkatan populasi ternak	Semua Kecamatan	1,2%		
2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Semua Kecamatan	5%	5.802.880.500	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Semua Kecamatan	4%	5.802.880.500	
3.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Semua Kecamatan	9%	262.191.993	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan	Semua Kecamatan	8%	262.191.993	
		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Semua Kecamatan	87%			Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Semua Kecamatan	86%		
4.	Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT	Semua Kecamatan	95%	547.445.000	Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT	Semua Kecamatan	95%	547.445.000	
5.	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Semua Kecamatan	100%	20.900.000	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis	Semua Kecamatan	100%	20.900.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6.	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%	664.166.500	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%	664.166.500	
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%			Persentase SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	10%		
		Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	25%			Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Semua Kecamatan	25%		
7.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pertanian	Semua Kecamatan	100 %	2.161.659.501	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pertanian	Semua Kecamatan	100	2.161.659.501	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		151 orang/bulan	18.961.785.990	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		151	18.961.785.990	
Jumlah					**30.643.023.114**	**Jumlah**				**30.643.023.114**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, dengan program dan kegiatan pada masingmasing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program, kegiatan dari masyarakat dan usulan pokok – pokok pikiran DPRD yang diampu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025 tertuang dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**		
			Persentase peningkatan populasi ternak		
1.1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**		
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pompa Air	Teluk Daun kec. Amuntai Utara		1 buah	
1. 2	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya		
1.2.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		
	Bibit Ternak Itik Lokal	Tabalong Mati kecamatan amuntai utara			
2.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Persentase peningkatan prasarana pertanian**		
2.1	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik**		
2.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
	Jalan Usaha Tani	Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Tambak Sari Panji Kecamatan Haur Gading		1 paket	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Jalan Usaha Tani	Desa Panawakan Kecamatan Haur Gading		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Hilir Mesjid Kecamatan Sungai Tabukan		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Rantau Bujur Tengah Kecamatan Sungai Tabukan		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Babirik Hulu Kecamatan Babirik		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Sungai Turak Dalam Kecamatan Amuntai Utara		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Kamayahan Kecamatan Amuntai Utara		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Teluk Buluh Kecamatan Banjang		1 paket	
	Jalan Usaha Tani	Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara		1 paket	
2.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
	Lantai Jemur	Desa Manarap kecamatan Danau Panggang		1 buah	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		
	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Telaga Mas kecamatan Danau Panggang		1 paket	
3.	**Program Penyuluhan Pertanian**				
3.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				
3.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
	Pondok Pertemuan	Sungai Durait Tengah kecamatan Babirik		1 buah	
	Pondok Pertemuan	Desa Sungai Papuyu kecamatan Babirik		1 buah	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional Tahun 2025

Strategi Nasional Pembangunan Pertanian 2016-2025 adalah kebijakan sektoral yang bertujuan untuk mencapai hasil-hasil berikut di bidang pertanian dalam sepuluh tahun, beserta konsekuensi ekonomi, sosial dan lingkungan:

(i) produktivitas pertanian yang tinggi;
(ii) efisiensi penggunaan air irigasi;
(iii) tingginya penggunaan teknologi;
(iv) tingginya kemitraan antara sektor publik dan swasta;
(v) pemasaran pertanian kompetitif yang menghubungkan produksi dengan permintaan di pasar internal dan eksternal;
(vi) sistem mutu dan akreditasi nasional yang diakui secara internasional;
(vii) produksi dan pemasaran pertanian untuk ekspor terutama terkait dengan kebutuhan pangan di pasar Teluk;
(viii) kemandirian pangan yang tinggi;
(ix) tingginya integrasi dengan sektor ekonomi lain;
(x) meningkatnya kemampuan menghadapi risiko; dan
(xi) pemerataan pendapatan pembangunan pertanian.

Tujuan keseluruhan dari Strategi ini adalah pembangunan berkelanjutan sumber daya pertanian yang akan melestarikan keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan di negara tersebut, mendukung iklim investasi di sektor ini dan menciptakan hubungan erat antara produksi dan permintaan pasar. Tujuan ini akan menghasilkan pengurangan migrasi dari satu negara ke kota lain dan jaminan keamanan pangan yang lebih besar bagi seluruh negara, serta manfaat ekonomi dari peningkatan ekspor.

Strategi ini, dengan menganalisis unsur-unsur penting, tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mempertimbangkan 6 bidang: (i) Sumber Daya Pertanian; (ii) Sektor Kekayaan Tanaman; (iii) Sektor Kekayaan Hewan; (iv)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sektor Hutan dan Padang Rumput; (v) Bidang Pemasaran; dan (vi) Mendukung inisiatif

Untuk menjadikan pertanian, kehutanan dan perikanan lebih produktif dan berkelanjutan, Strategi ini menyediakan: (i) mendorong konservasi dan pengurangan fragmentasi lahan pertanian; (ii) menjaga kualitas tanah pertanian dan kapasitas produktifnya melalui pemantauan pencemaran tanah dan air tanah, memperkenalkan metode pemanenan air di lahan penggembalaan dan penerapan teknologi pemanenan air hujan pada tingkat air terjun kecil; (iii) meningkatkan kualitas dan efisiensi air irigasi dengan memperkenalkan varietas tanaman hortikultura dan pastoral dengan hasil tinggi dalam kondisi kekeringan, menggunakan air non-konvensional dan melindunginya dari polusi dan salinitas; (iv) perbaikan sistem drainase air irigasi di Lembah Yordan; (v) penggunaan pestisida pertanian yang aman; (vi) memperluas pertanian bernilai tinggi; (vii) memfasilitasi akses terhadap air olahan; (viii) melindungi tutupan hutan; (ix) mengembangkan panduan dan program bagi petani ikan

Untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, tindakan utama ditujukan pada: (i) mendorong pembiakan keluarga; (ii) peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pedesaan juga peningkatan konsumsi produk hewani, sistem pinjaman kecil untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran serta pembiayaan program pedesaan.

Untuk memungkinkan sistem pertanian dan pangan yang lebih inklusif dan efisien, Strategi ini bertujuan untuk: (i) melindungi produk dalam negeri dari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh produk impor; (ii) menghubungkan produksi dengan permintaan di pasar ekspor dengan fokus khusus pada permintaan di negara-negara Teluk yang berupaya mendapatkan akses ke kelompok berpendapatan tinggi di pasar tersebut dan membuka pasar Rusia untuk ekspor pertanian; (iii) mendukung proyek-proyek pembangunan di Kegubernuran melalui koperasi dan, secara umum, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya kerja sama.

Bertujuan untuk meningkatkan ketahanan penghidupan terhadap bencana, kebijakan ini berfokus pada: (i) pengurangan penggurunan lahan pertanian dengan memasukkan kembali wilayah-wilayah terlantar dan melakukan reklamasi wilayah-wilayah baru; (ii) introduksi varietas tanaman toleran kekeringan; (iii) pengembangan langkah-langkah perlindungan hutan dan jalur hijau; (iv) penerapan teknologi difusi air dan konservasi tanah; (v) perlindungan padang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

rumput dan penggembalaan, termasuk penerapan siklus pastoral; dan (vi) perlindungan habitat keanekaragaman hayati.

Sedangkan dalam bidang Tata Kelola, lembaga-lembaga tersebut diminta untuk melakukan intervensi, melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan, melakukan pemantauan untuk mengurangi pelanggaran terhadap sumber air permukaan dan air tanah, meningkatkan pengelolaan pasokan air irigasi, mendukung program pelatihan bagi tenaga kerja terampil, mendorong perluasan profesi pertanian dan menghubungkan mereka dengan sektor pertanian. pasar tenaga kerja, memperluas payung sistem pelacakan tanaman dan menerapkan kontrol kualitas pada sektor pertanian dan peternakan.

Telaahan terhadap Strategi Nasional Pembangunan Pertanian 2016-2025 tersebut memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia.

b. Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Strategi pembangunan pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan produksi pertanian dengan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian,dengan arah kebijakan :
   - Pengawasan dan penataan peredaran sarana - prasarana pertanian
   - Pengendalian dan pengawasan mutu benih dan obat-obatan
   - Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan (Itik Alabio, dan Kerbau Rawa), tumbuhan dan mikroorganisme
   - Peningkatan penyediaan mutu benih dan bibit
   - Pengembangan dan Pengelolaan Kelapa Sawit berbasis RAD KSB
2. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan arah kebijakan :
   - Penjaminan kesehatan hewan
   - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan
   - Peningkatan kesejahteraan hewan
3. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dengan arah kebijakan Pengendalian, pencegahan dan penanganan bencana pertanian
4. Peningkatan perizinan usaha pertanian, dengan arah kebijakan Peningkatan penerbitan izin usaha pertanian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan kelembagaan ekonomi pertanian, dengan arah kebijakan Pengembangan Kapasitas Penyuluh dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Korporasi Petani berbasis Food Estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu berupaya meningkatkan nilai tambah, daya saing hasil industri dan pertanian berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan daerah yang berasal dari Dokumen RPD Tahun 2023-2026 dan dari hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah serta adanya isu-isu baru yang yang harus direspon dalam dokumen perencanaan tahun 2025 maka ditetapkanlah prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan Tahun 2025, Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Infrastruktur dasar, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan konektivitas wilayah;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif;
5. Peningkatan pelayanan bencana, mitigasi bencana, Kualitas Lingkungan Hidup dan konsistensi tata ruang;
6. Penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.

Selanjutnya untuk menggambarkan kinerja pembangunan satu tahun kedepan dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan daerah sesuai dengan target indikator yang ditetapkan, maka ditentukan tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yaitu "***Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat".***

Guna mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 4 (empat) tahun mendatang, maka tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah :

1) Meningkatkan produksi hasil pertanian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang pertanian

Sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, adalah :

1) Tersedianya produksi tanaman pangan utama
2) Tersedianya produksi tanaman hortikultura utama
3) Tersedianya produksi tanaman perkebunan utama
4) Tersedianya produksi hasil peternakan utama
5) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertanian.

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Bidang Pertanian	Tersedianya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utama	Produksi padi (ton)	113.602
			Produksi jagung (ton)	576
			Produksi kacang tanah (ton)	520
			Produksi cabe besar (ton)	230
			Produksi cabe rawit (ton)	143
			Produksi karet (ton)	413
		Tersedianya produksi peternakan utama	Produksi daging ternak besar (kg)	401.751
			Produksi daging ternak kecil (kg)	9.307
			Produksi daging ternak unggas (kg)	3.024.982
			Produksi telur unggas (kg)	7.267.227
2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	A

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
   - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
   - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
   - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
   - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengembangan Prasarana Pertanian
   - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
   - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B

b. Pembangunan Prasarana Pertanian
   - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya

c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

d. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6) Program Perizinan Usaha Pertanian

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

7) Program Penyuluhan Pertanian

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan produksi peternakan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan:

1. Prioritas Pembangunan Nasional "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru"
2. Proritas Pembanguan Provinsi "Penguatan Sektor Industri, UMKM,Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkuaitas dan Energi Berkelanjutan"
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten "Penguatan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan"

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 8. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	**Urusan Pilihan**								
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
3.27.02	**Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**		**0,7 %**	2.221.993.630	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**0,7 %**	2.221.993.630
		Persentase peningkatan populasi ternak		**1,2 %**	**488.132.340**			**1,2 %**	**488.132.340**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**		**63 %**	**1.733.861.290**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**65 %**	**1.733.861.290**
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kecamatan	12 Laporan	92.453.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan IPM	12 Laporan	92.453.250
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kecamatan	12 Laporan	1.334.571.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Peningkatan IPM - Penurunan Stunting - Penurunan Kemiskinan	12 Laporan	1.334.571.540
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Semua Kecamatan	ton	75.336.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan IPM	1 Dokumen	75.336.500
3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Semua Kecamatan	12 laporan	231.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Peningkatan IPM - Penurunan Kemiskinan	4 Dokumen	231.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan mutu benih / bibit ternak dan pakan ternak**		**7 %**	**147.687.940**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**7 %**	**147.687.940**
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Semua Kecamatan	4 Laporan	111.751.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Penurunan Kemiskinan	4 Laporan	111.751.440
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan / Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Semua Kecamatan	12 Laporan	35.936.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Peningkatan IPM - Responsif gender	12 Laporan	35.936.500
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya**		**67 %**	**340.444.400**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**67 %**	**340.444.400**
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Semua Kecamatan	12 Laporan	319.028.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Peningkatan IPM - Penurunan Kemiskinan	3 Ton	319.028.400
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Semua Kecamatan	3 ton	21.416.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan IPM	12 Laporan	21.416.000
3.27.03	**Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**		**4 %**	**5.802.880.500**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**5 %**	**5.802.880.500**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Indeks keberlanjutan lahan pertanian**		**100%**	**235.145.500**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**100%**	**235.145.500**
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	74.660.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Peningkatan IPM	1 Dokumen	74.660.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola							
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Semua Kecamatan	1 Dokumen	160.485.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah			160.485.500
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik**		**24 unit**	**5.551.560.000**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**		19 unit	**5.551.560.000**
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan	16 Unit	4.373.660.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Peningkatan IPM - Responsif gender	8 unit	4.373.660.000
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kecamatan	2 Unit	672.990.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Peningkatan IPM	6 unit	672.990.000
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Semua Kecamatan	1 Unit	425.890.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Peningkatan IPM - Responsif gender	3 unit	425.890.000
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta beroperasi	Semua Kecamatan	1 Unit	79.020.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Peningkatan IPM	1 unit	79.020.000
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang**		**4 Wilayah**	**16.175.000**	Pendapatan Transfer Antar Daerah		**4 Wilayah**	**16.175.000**
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Semua Kecamatan	4 Laporan	16.175.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Peningkatan IPM - Responsif gender	4 Laporan	16.175.000
3.27.04	**Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penurunan kejadian penyakit hewan**		**8 %**	**262.191.993**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**9 %**	**262.191.993**
		Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat		**86 %**	**83.909.600**			**87 %**	**83.909.600**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan**	**Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan**		**90 %**	**76.659.257**	**Pendapatan Asli Daerah**		**90 %**	**76.659.257**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**diberantas**				**(PAD)**			
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	12 laporan	76.659.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan IPM	12 laporan	76.659.257
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase hewan dan produk hewan yang masuk dan keluar yang sesuai dengan persayaratan teknis**		**100%**	**11.350.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100 %**	**11.350.000**
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Semua Kecamatan	12 laporan	**11.350.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	**11.350.000**
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit**		**90%**	**90.273.136**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**90%**	**90.273.136**
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Semua Kecamatan	12 Laporan	19.816.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	19.816.174
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Semua Kecamatan	12 Laporan	70.456.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	70.456.962
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**		**86%**	**83.909.600**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**87 %**	**83.909.600**
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Semua Kecamatan	12 Laporan	60.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Peningkatan IPM - Responsif gender	12 Laporan	60.660.000
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kecamatan	Dokumen	10.458.530	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	10.458.530

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						(PAD)			
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Semua Kecamatan	Unit Usaha	12.791.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 unit usaha	12.791.070
3.27.05	**Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian**	**Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT**		**95%**	**547.445.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**95%**	**547.445.000**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase luas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT**		**95%**	**547.445.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**95%**	**547.445.000**
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Semua Kecamatan	400 Ha	335.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Peningkatan IPM - Penurunan Kemiskinan	400 Ha	335.195.000
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kecamatan	250 Ha	204.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Peningkatan IPM - Penurunan Kemiskinan	250 Ha	204.450.000
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kecamatan	50 Ha	7.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Peningkatan IPM	50 Ha	7.800.000
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Memenuhi Persyaratan Teknis**		**100%**	**20.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		100%	**20.900.000**
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase penerbitan Izin Usaha Pertanian yang memenuhi persyaratan**		**100%**	**20.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		100%	**20.900.000**
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Semua Kecamatan	12 Laporan	20.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Peningkatan IPM	12 Laporan	20.900.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya**		**10%**	**664.166.500**	**Lain-lain Pendapatan**		10%	**66[illegible]**
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya		**10%**				10%	
		Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya		**25%**				25%	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian**		**100%**	**664.166.500**	**Lain-lain Pendapatan**		**100%**	**664.166.500**
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan	9 Unit	197.350.000	Lain-lain Pendapatan	- Peningkatan IPM - Responsif gender	9 Unit	197.350.000
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kecamatan	200 Unit	139.250.000	Lain-lain Pendapatan	- Peningkatan IPM - Responsif gender	200 Unit	139.250.000
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Semua Kecamatan	9 Unit	149.504.000	Lain-lain Pendapatan		9 Unit	149.504.000
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Semua Kecamatan		152.062.500		- Peningkatan IPM - Responsif gender		152.062.500
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Semua Kecamatan		26.000.000				26.000.000
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pertanian**		**100%**	**21.123.445.491**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**21.123.445.491**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu**		**100%**	**218.193.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**218.193.500**
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. HSU	3	3.150.000	Dana Transfer		3 Dokumen	3.150.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat		Dokumen		Umum-Dana Bagi Hasil			
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. HSU	1 Dokumen	1.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.575.000
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. HSU	1 Dokumen	1.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.575.000
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. HSU	1 Dokumen	1.954.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.954.500
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. HSU	1 Dokumen	1.954.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.954.500
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	12 laopran	64.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 laopran	64.855.000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. HSU	12 laporan	38.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 laporan	38.550.000
3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. HSU	Data	104.579.500				104.579.500
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi keuangan dengan baik**		**100%**	**18.961.785.990**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**18.961.785.990**
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	151 Orang/ bulan	18.961.785.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		151 Orang/ bulan	8.961.785.990
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik**		**100%**	**6.000.000**	**Dana Transfer Umum-Dana**		**100%**	**6.000.000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

						Bagi Hasil			
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. HSU	4 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	6.000.000
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik**		**100%**	**210.655.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**210.655.000**
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. HSU	1 paket	118.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 paket	118.260.000
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Kab. HSU	12 dokumen	19.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 dokumen	19.450.000
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. HSU	2 orang	22.945.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 orang	22.945.000
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. HSU	10 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 orang	50.000.000
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi umum dengan baik**		**100%**	**817.641.650**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**817.641.650**
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	10 Paket	5.048.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Paket	5.048.200
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	10 Paket	204.279.550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Paket	204.279.550
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. HSU		5.999.900				5.999.900
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. HSU	10 Paket	84.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Paket	84.175.000
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	12 Laporan	498.639.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	498.639.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. HSU	12 Dokumen	19.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah**		**100%**	**510.259.351**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**510.259.351**
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	234.873.751	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	234.873.751
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 Laporan	275.385.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	275.385.600
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik**		**100%**	**398.910.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**		**100%**	**398.910.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. HSU		42.750.000				42.750.000
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	92 Unit	115.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		92 Unit	115.440.000
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	40 Unit	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Unit	25.500.000
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	9 unit	215.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		9 unit	215.220.000
TOTAL BELANJA					**30.643.023.114**				**30.643.023.114**

Jumlah Program : 7 Program
Jumlah Kegiatan : 20 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 57 Sub Kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V.

PENUTUP

Dalam pembiayaan pembangunan pertanian, peran anggaran pemerintah di samping sebagai stimulus investasi di sektor pertanian, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pertanian juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan usulan dari masyarakat tani yang menginginkan adanya perubahan dari pola usaha tani yang selama ini telah mereka lakukan. Sehingga dengan berbagai sentuhan dalam pengembangan usaha tani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang pada giliran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteran petani di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun 2025 serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

LAMPIRAN

POHON KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RPD
Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2023 - 2026

Tujuan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 – 2026

Meningkatnya perekonomian daerah

Sasaran RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023– 2026

Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa

Indikator Kinerja :

Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp.)

SASARAN 1.

Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Pertanian) :

Meningkatanya produksi tanaman pangan utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Produksi tanaman padi (ton)
- Produksi tanaman jagung (ton)
- Produksi tanaman kacang tanah (ton)

Kinerja Eselon III (Kabid Tanaman Pangan) :

- Meningkatkan rata-rata hasil produksi per hektar (produktivitas) tanaman pangan
- Meningkatkan perlindungan tanaman pangan
- Menekan tingkat kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen

Indikator Kinerja :

- Produktivitas padi (ku/ha)
- Produktivitas jagung (ku/a)
- Produktivitas kacang tanah (ku/ha)
- Persentase luas hnaman pangan yang dapat dikendalikan dari serangan OP (%)
- Persentase luas tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap dampak perubahan iklim (%)
- Persentase tingkat kehilangan hasil tanam tanaman pangan (%)

Kinerja Eselon III (Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian) :

- Terwujudnya ketersediaan prasarana pertanian
- Terwujudnya ketersediaan sarana pertanian

Indikator Kinerja :

- Persentase ketersediaan prasarana pertanian (%)
- Persentase ketersediaan sarana pertanian (%)

Kinerja Eselon III (Kabid Penyuluhan) :

- Meningkatkan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja :

- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
- Persentase kelompok tani yang dapat meningkatkan produksi tanaman pangan (%)

SASARAN 2.

Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Pertanian) :

Meningkatnya produksi tanaman hortikultura utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Produksi tanaman cabe besar (ton)
- Produksi tanaman cabe rawit (ton)

Kinerja Eselon III (Kabid Perkebunan dan Hortikultura) :

- Meningkatkan rata-rata hasil produksi per hektar (produktivitas) tanaman hortikultura
- Meningkatkan Pengendalian OPT dan DPI

Indikator Kinerja :

- Produktivitas tanaman cabe besar (ku/ha)
- Produktivitas tanaman cabe rawit (ku/ha)
- Persentase luas tanaman hortikultura yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan DPI (%)

Kinerja Eselon III (Kabid Penyuluhan) :

- Meningkatkan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja :

- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
- Persentase kelompok tani yang dapat meningkatkan produksi tanaman hortikultura (%)

SASARAN 3.

Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Pertanian) :

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Produksi tanaman karet (ton)

Kinerja Eselon III (Kabid Perkebunan dan Hortikultura) :

- Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan utama
- Meningkatkan pengendalian OPT dan DPI

Indikator Kinerja :

- Produktivitas tanaman karet (ku/ha)
- Persentase luas tanaman perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan DPI (%)

Kinerja Eselon III (Kabid Penyuluhan) :

- Meningkatkan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja :

- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
- Persentase kelompok tani yang dapat meningkatkan produksi tanaman perkebunan (%)

SASARAN 4.

Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Pertanian)

Meningkatnya produksi hasil peternakan Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Produksi daging ternak besar (kg)
- Produksi daging ternak kecil (kg)
- Produksi daging ternak unggas (kg)
- Produksi telur unggas (kg)

Kinerja Eselon III (Kabid Peternakan) :

Meningkatkan populasi ternak

Indikator Kinerja :

- Populasi ternak besar (ekor)
- Populasi termak kecil (ekor)
- Populasi ternak unggas (ekor)

Kinerja Eselon III (Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) :

- *Meningkatkan Kesehatan ternak*
- *Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner*
- *Meningkatkan retribusi pelayanan rumah potong hewan*

Indikator Kinerja :

- *Persentase penurunan kejadian penyakit hewan (%)*
- *Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi (%)*
- Retribusi pelayanan rumah potong hewan (rupiah)

Kinerja Eselon III (Kabid Penyuluhan) :

- Meningkatkan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja :

- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
- Persentase kelompok tani yang dapat meningkatkan produksi hasil peternakan (%)

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERTANIAN HULU SUNGAI UTARA

Masrai Syawfajar Nejar, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19691220 199703 1 005

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja

Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2025







PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERIKANAN
Jl. Sukmaraga No. 062 Kel. Sungai Malang Telp. (0527)61639 Fax (0527)61415
Amuntai 71418

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3[illegible] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pnenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah, dengan daftar Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Wajib :

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan :
1. Inspektor Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Perangkat Daerah lainnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini menyajikan: Data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara; Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; Penelaahan rancangan awal RKPD; Perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan perumusan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 selaras dengan program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa yang akan datang.

Amuntai, Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kab. Hulu Sungai Utara,

Hj. BALUH BUNGSU SUMARNI, MAP
NIP. 19641208 198503 2 007

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-4
1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara II-6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-7
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-8
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-8

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD III-7

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan IV-1
4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan IV-1
4.3. Kesesuaian Antara Rumusan Program dan Kegiatan Dengan Rancangan Awal RKPD IV-7
4.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Perkiraan Maju IV-8

BAB V. PENUTUP V-1

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
Lampiran 2. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara
Lampiran 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023……. II-1
2. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023.....…….. II-2
3. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2023..……...……... II-3
4. Capaian Kinerja Usaha Perikanan Yang Diawasi Tahun 2023……..…….…….. II-3
5. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara…… II-6
6. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara…..……. II-9
7. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara…….....……. III-6
8. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara…….....……. III-7
9. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....……. IV-2

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan Ranwal Rentra Diskan 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam kontek pembangunan perikanan, Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara dituntut untuk memfasilitasi dalam pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan. Sebagai penjabaran dalam tahapan kebijakan operasional maka dirumuskan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Hulu Sungai Utara, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian terkait.

Dalam penyusunannya, Renja disusun dengan berbagai tahapan atau kegiatan yang meliputi : Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan; Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; Penelaahan rancangan awal RKPD; Perumusan tujuan dan sasaran; Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; dan Perumusan program dan kegiatan prioritas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025 ini merupakan periode tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2023-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Dinas.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansu Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepada Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;
28. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/318/KUM/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini adalah :

1. Mengintegrasikan program pembangunan perikanan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis;
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan perikanan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;
2. Sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan perikanan, pedoman dan alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perikanan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025, Proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang sistematika penulisan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Memuat hasil analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan.

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta tingkat kinerja Pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan proses, dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan proses usulan program/kegiatan pemangku kepentingan dengan kesesuaian antara isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan, kesesuaian rumusan program/kegiatan dengan rancangan awal RKPD. Rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

A. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan : kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidaya ikan, pengelolaan pembudidaya ikan

Indikator capaian kinerja program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya adalah produksi perikanan budidaya. Adapun capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Produksi perikanan budidaya (ton)	9.809,78	9.521,97	97

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja produksi perikanan budidaya antara lain :

a. Pengembangan ikan lokal dilaksanakan melalui memperbanyak kegiatan demcara baik aspek perbenihan maupun pembesaran, Meningkatkan keterampilan/keahlian petugas dan pembudidaya melalui pelatihan, magang dan studi banding;
b. Mencarikan akses pasar yang berkesinambungan;
c. Menggiatkan program pakan mandiri bagi pembudidaya;
d. Peningkatan optimalisasi kinerja SDM di Balai Benih Ikan Banjang;
e. Menumbuhkan kampung-kampung perikanan dengan berbasis spesifikasi ikan lokal dan ikan introduksi yang sudah berkembang didesa-desa pelaku usaha perikanan masing-masing;
f. Mencarikan teknologi sistem pengairan untuk kolam-kolam rawa yang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

hanya memanfaatkan air hujan.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap, dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan antara lain : Kegiatan pengeloaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program ini adalah jumlah produksi perikanan tangkap. Adapun target dan capaian kinerja jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	12.326,48	12.325,95	99

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan dalam memenuhi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan pelestarian;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya petani penangkap ikan agar memahami pentingnya sumberdaya perikanan sehingga kualitas dan kuantitas hasil perikanan dapat dijaga kelestariannya;
3. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan hukum perikanan;
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perikanan;
5. Memperbanyak kegiatan restocking (pengkayaan stock).

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dilaksanakan melalui tiga (3) kegiatan antara lain : Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Kecil, Pembinaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program ini adalah jumlah produksi hasil olahan perikanan. Adapun target dan capaian kinerja jumlah produksi hasil olahan perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (kg)	117,755	157,280	133,56

B. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki satu (1) kegiatan yaitu : Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program adalah usaha perikanan yang diawasi. Adapun target dan capaian kinerja peran serta POKMASWAS terhadap Usaha Perikananan yang diawasi.

Tabel 4. Capaian kinerja usaha perikanan yang diawasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Usaha Perikanan yang diawasi (kecamatan)	2	2	100

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah :

a. Banyaknya pembudidaya yang menghentikan kegiatan budidaya akibat harga pakan yang berfluktuatif, hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi jika dibandingkan dengan harga jual yang rendah;
b. Kualitas air yang cenderung mengalami penurunan sehingga mengakibatkan tingginya mortalitas pada saat proses budidaya;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

c. Kematian ikan pada komoditas yang biasanya tahan terhadap kondisi perairan, sehingga banyak pembudidaya tidak melakukan aktivitas budidaya;
d. Perkembangan komoditas lokal yang terkendala terhadap pakan rucah sudah diatasi oleh petani akan tetapi terkendala dimasalah permodalan dan mesin pencacah pakan rucah;
d. Tugas dan fungsi BBI Banjang yang sekiranya dapat mensupport keperluan benih yang bermutu di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena jumlah benih dan jenis komoditas yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan benih di Kab. Hulu Sungai Utara.

B. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja sebagai berikut :

a. Kelompok yang dilakukan pembinaan telah mencapai target;
b. Melaksanakan lomba kelompok perikanan berprestasi;
c. Memberikan penghargaan kepada petani perikanan yang berprestasi;
d. Dilaksanakannya Temu UKM perikanan;
e. Pelaksanaan sosialisasi tentang perikanan dapat dilaksanakan kepada pelaku usaha perikanan;
f. Pengujian produk hasil perikanan;
g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk terhadap keaktifikan kelompok dalam upaya menjaga perairan umum mereka secara mandiri;
h. Melakukan perbaikan dan pelatihan terhadap kelompok sehingga terbuka wawasan dan pola pikir mereka.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Tahun 2023 ini perlu menjadi prioritas pendanaan guna menunjang mengoptimalkan pencapaian target pada tahun terakhir Renstra Dinas Perikanan.

Sedangkan terhadap Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

melebihi kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetap dipertahankan dengan mengoptimalkan sumber dana dan sumberdaya yang ada.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Program pakan mandiri dan pakan alami yaitu pemenuhan pakan dengan cara memproduksi pakan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan pembuat pakan yang banyak ditemui dan mudah didapat oleh petani, serta pengembangan pakan alami seperti magot dan cacing sutra;
b. Mencarikan akses pasar yang berkesinambungan dengan cara mengatur pola tanam, jenis ikan yang dipelihara, memberikan informasi pasar, menyelenggarakan perbenihan dan pengakajian pembesaran komoditas lain selain patin dikolam;
c. Pengembangan ikan lokal melalui kegiatan demcara baik aspek perbenihan maupun pembesaran;
d. Peningkatan SDM aparatur dan pelaku usaha melalui pelatihan, magang dan studi banding, reward dan punishment yang jelas, fasilitas serta operasional Balai Benih Ikan agar kedepan dapat meningkatkan jumlah dan jenis benih yang dihasilkan;
e. Optimalisasi kolam-kolam rawa, dengan memanfaatkan mesin pompa air.
f. Melakukan demcara tangkap lestari dalam upaya merubah perilaku nelayan dalam menangkap ikan yang pada akhirnya kegiatan berdampak terjaganya perairan dari tindakan illegal fishing
g. Melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan kesadaran akan pelestarian sumberdaya perikanan;
h. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan penegakan hukum atas tindakan illegal fishing;
i. Pengkayaan stock ikan lokal;
j. Koordinasi dengan dinas provinsi mengingat kebijakan akan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya perikanan berada di provinsi.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s/d Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis indikator yang diukur pada sektor perikanan adalah produksi perikanan budidaya; produksi perikanan tangkap dan peningkatan kapasitas dan kualitas kelompok. Menurut analisis kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sudah terlaksana dengan baik dimana terlihat dari kinerja-kinerja yang strategis dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat perikanan dapat berhasil dilaksanakan akan tetapi belum optimal meningkatkan produksi. Adapun Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	(%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (ton)	12.326,48	12.329,56	12.332,64	12.335,73	12.325,95	99	12.332,11	12.335,20	Banyaknya areal penangkapan ikan yang ditutupi oleh supsupan gunung mengakibatkan areal penangkapan semakin menyempit, komoditas hasil tangkapan ternyata banyak ditemui ikan nila dan patin dengan ukuran yang cukup besar kondisi ini mengakibatkan banyaknya komoditas local yang sudah jarang ditemui
Cakupan bina kelompok (%)	10	10	10	10	10	100	10	10	Sinergi antara Dinas dengan Penyuluh Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi peyuluhan kelompok perlu ditingkatkan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Jumlah sentra produksi perikanan (Unit)	3	3	3	3	3	100	3	3	Optimalisasi pembinaan dan sosialisasi serta bekerjasama dengan stakeholde terkait dan penyuluh perikanan dalam usaha peningkatan prduksi perikanan.
Cakupan wilayah yang terpantau dan terawasi (%)	10	10	10	10	10	100	10	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan, membentuk Pokmaswas di desa desa yang potensial Penangkapan Ikan, bekerja sama dengan Penyuluh dan melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis untuk Pokmaswas tentang peraturan-peraturan di bidang perikanan.
Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ SAKIP(Kategori)	B	B	BB	BB	A	Kategori	A	A	Pengukuran secara berkala yang dilakukan perlu dibarengi dengan reward dan punishment.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara :

1) Penurunan produksi perikanan budidaya, salah satu faktor penyebabnya akibat tingginya mortalitas terhadap ikan yang ditebar akibat dari waktu tebar yang tidak sesuai, kualitas benih, banyak petani yang tidak melaksanakan aklimatisasi terhadap benih yang ditebar serta masih adanya kondisi kematian total akibat terserang hama penyakit ikan, harga pakan yang berfluktuatif cenderung meningkat;
2) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada secara lestari dan berkelanjutan;
3) Nilai tukar nelayan, dengan diketahui nilai tukar nelayan memudahkan kita untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan
4) Masih rendahnya sumberdaya manusia di tingkat pelaku usaha perikanan sehingga diperlukan pembinaaan, sosialisasi dan diseminasi teknologi;
5) Masih adanya kegiatan illegal fishing sehingga berdampak terhadap produksi perikanan tangkap;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan masih mengacu pada Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan produksi, pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa.

Pada tahun 2025 pembangunan tidak lagi mengacu pada visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026 karena dokumen RPD bukan produk yang dihasilkan oleh kepada dan wakil kepala daerah terpilih sehingga RPD hanya meliputi tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang sifatnya perencanaan teknoktatik.

Sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Dinas adalah meningkatkan perekonomian daerah, sedangkan sasaran pembangunan adalah meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa. Indikator Tujuan yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Tahun 2025 yaitu pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkam indikator sasaran adalah Nilai PDRB Sektor Pertanian.

Rencana program, indikator, target indikator dan pagu indikatif pendanaan pada Dinas Perikanan Tahun 2025 yakni total pagu indikatif pendanaan Dinas Perikanan sebesar **Rp. 2.489.907.135,-**. Terdapat penyesuaian pagu indikatif dari pagu anggaran indikatif pada RPD dan Renstra, hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk gaji disesuaikan dengan rasionalisasi berdasarkan TA 2024 yaitu sebesar **Rp. 4.167.619.282,-**, sehingga total pagu yang dikelola sebesar **Rp. 6.657.526.417,-.**

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya mengakomodir usulan-usulan tersebut maka Dinas Perikanan meyeleraskan dengan mengedepankan skala prioritas, ketersediaan anggaran dan kesesuaian terhadap peraturan serta kesesuaian dengan Program/Kegiatan nasional seperti pembangunan infrastruktur publik, pengentasan kemiskinan dan peningkatan produksi perikanan.

Usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang masuk pada Dinas Perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kab. Hulu Sungai Utara melalui :Usulan yang masuk lewat Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah, Usulan Aspirasi Masyarakat lewat Musrenbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, usulan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (POKIR DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan Program/Kegiatan yang masuk ke Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 24 usulan, yang terdiri dari 13 usulan masuk ke sekretariat daerah/Dinas Perikanan, 5 usulan musrenbang kecamatan dan 6 usulan POKIR DPRD.

Adapun rincian usulan berdasarkan urutan prioritas dan yang dapat diakomodir sebanyak 18 usulan dan 6 usulan ditolak. Usulan yang diterima masih memerlukan verifikasi pendahuluan untuk menilai kecukupan atas kelengkapan administrasi dan teknis, sebelum di akomodir pada Renja SKPD. Kelengkapan administrasi seperti proposal, terdaftar di Dinas (kusuka atau kelompok). Sedangkan secara teknis meliputi kepemilikan usaha perikanan pemohon.

Pada umumnya usulan masyarakat yang masuk meminta bantuan untuk kegiatan kelompok pembudidaya dan kelompok usaha bersama perikanan tangkap berupa sarana prasarana usaha budidaya dan pengkapan ikan. Usulan program dan kegiatan belum bisa diakomodir secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pemberian hibah, kesesuaian dengan kriteria aministrasi dan teknis, serta ketersediaan pagu anggaran pada Dinas Perikanan.

Adapun Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.323,64 Ton		
	Kegiatan Pengelolaan Penangapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah daerah terdalam yang berpotensi dikelola oleh			
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	7 Unit	497.129.000	
a)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Beruntung Jaya Desa Paminggir Kec. Paminggir				Proposal Masuk Ke Dinas

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Cahaya Abadi Desa Sungai Durait Hilir Kec. Babirik				Proposal Masuk Ke Dinas
c)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Cahaya desa Kota Raden Hilir Kec.Amuntai Tengah				Proposal Masuk Ke Dinas
d)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Maju Bersama Desa Tampakang Kec. Paminggir				Proposal Masuk Ke Dinas
e)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Usaha Baru Desa Babirik Hilir Kec. Babirik				Proposal Masuk Ke Dinas
f)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Maju Bersama Desa Tampakang Kec. Paminggir				Proposal Masuk Ke Dinas
g)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Sumber Telaga Desa Tapus Kec. Amuntai Tengah				Proposal Masuk Ke Dinas
h)	Permohonan Bantuan Sarana dan Alat Tangkap	KUB Tuntung Pandang Desa Darussalam Kec. Danau Panggang				Proposal Masuk Ke Dinas
i)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Rawa Muda Desa Padang Darat Kec.Amuntai Selatan				Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Kecamatan (SIPD RI)
j)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Walut Putih Desa Padang Darat Kec. Amuntai Selatan				Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Kecamatan (SIPD RI)
k)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Hidup Baru Desa Telaga Hanyar Kec.Amuntai Utara				Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Kecamatan (SIPD RI)
l)	Permohonan Bantuan Jukung	KUB Karya Nyata Desa Rukam Hulu Kec. Amuntai Selatan				Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Kecamatan (SIPD RI)
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9.811,74 Ton		
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina			
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota		Jumlah prasarana pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	7 Unit	382.449.250	
a)	Permohonan bantuan keramba	Pokdakan Bangun Bersama Desa Rantau Karau Hulu Kec. Sungai Pandan				Proposal Masuk Ke Dinas
b)	Permohonan Pengadaan Benih, Pakan Ikan dan Probiotik buatan cair	Pokdaktan Berkat Kawan Desa Teluk Buluh Kec. Banjang				Proposal Masuk Ke Dinas
c)	Permohonan Pengadaan Benih, Pakan Ikan dan Probiotik buatan cair	Pokdakan Bumi Ikan Nusantara Kel. Kebun sari Kec. Amuntai Tengah				Proposal Masuk Ke Dinas
d)	Permohonan Pengadaan Benih, Pakan Ikan dan Probiotik buatan cair	Pokdakan Kali Balangan Barokah Desa Lok Bangkai Kec. Banjang				Proposal Masuk Ke Dinas
e)	Permohonan Pengadaan Benih, Pakan Ikan dan Probiotik buatan cair	Pokdakan Sungai Jingah Desa Datu Kuning Kec.Amuntai Tengah				Proposal Masuk Ke Dinas

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f)	Permohonan bantuan keramba	Pokdakan Nusa Indah Desa Sei Luang Hili Kec. Babirik				Proposal Masuk Ke Dinas
g)	Permohonan Pengadaan Benih, Pakan Ikan dan Probiotik buatan cair dan serbuk	Pokdakan Maju Jaya Lestari Desa Muara Baruh Kec. Amuntai Utara				Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Kecamatan (SIPD RI)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daftar usulan Pokok Pikiran (POKIR) yang masuk SKPD Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Daftar usulan Pokok Pikiran (POKIR) yang masuk SKPD Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara melalui aplikasi SIPD-RI

No	Tanggal Pengusul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Hasil Rapat Evaluasi
1	21-02-2024	H. A. Al Gifari	Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tanggap, jukung, alat bantu penangkapan)	Bantuan jukung untuk Desa Rukam Hilir 10 Buah	Desa Rukam Hilir, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan
2	21-02-2024	H. A. Al Gifari	Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tanggap, jukung, alat bantu penangkapan)	Bantuan jukung untuk Desa Rukam Hulu 5 Buah	Desa Rukam Hulu, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan
3	25-02-2024	Sutoyo Sandi	Bantuan Sarana Prasarana Budidaya (Pakan, Benih, Obat-obatan)	Usaha Bersama Budidaya Ikan Nila Keramba Nila Dan System Keramba Nila	Desa Baruh Tabing, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan
4	25-02-2024	Sutoyo Sandi	Uji mutu, Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil perikanan dari pengolahan, packing sampai pada pendaftaran usaha	Usaha Bersama Budidaya Ikan Nila Keramba Nila Dan System Keramba Nila	Desa Pandulangan Rt.02, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	05-03-2024	Sutoyo Sandi	Bantuan Sarana Prasarana Budidaya (Pakan, Benih, Obat-obatan)	Usaha Bersama Budidaya Ikan Nila Keramba Nila Dan Sistem Keramba Nila	Desa Baruh Tabing Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan
6	05-03-2024	Sutoyo Sandi	Uji mutu, Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil perikanan dari pengolahan, packing sampai pada pendaftaran usaha	Usaha Bersama Budidaya Ikan Nila Keramba Nila Dan Sistem Keramba Nila	Desa Pandulangan RT.02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara	Dinas Perikanan belum bisa memberikan bantuan karena tidak ada kelompok perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dala Renja PD tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, dokumen RPJPD tahun 205-2025, serta Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045, sebagai tindaklanjut amanat Permendagri No. 86 Tahun 2027 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelahaan terhadap dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Renja PD Tahun 2025 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) yakni :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabiitas.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Melanjutkan hilirisasi dan menembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi seerta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penyusunan Renja Tahun 2025 mendasarkan pada Renstra Dinas Perikanan 2023-2026, dimana Renstra yang disusun telah mempedomani dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Selain mengacu pada Renstra PD dan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, Renja juga menyelaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan agar apa yang ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perwujudan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun arah dan kebijakannya.

Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat diakses dan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sudah tercantum dalam Rencana Kerja Dinas.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut: 1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan"; 2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional"; 3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan 4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;

2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Adapun program pada Renstra KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4) Program Kualitas Lingkungan Hidup;
5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
6) Program Dukungan Manajemen;

Adapun program pembangunan perikanan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan di Kabupaten adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Sedangkan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan merupakan merupakan kewenangan pusat dan provinsi akan tetapi Dinas Perikanan di Kabupaten masih melaksanakan pembinaan.

Kegiatan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektifdan akuntabel

3.1.2 Telaah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Telaahan kebijakan terhadap arah kebijakan pembangunan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan masih mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 -2026 dengan misi yang di emban oleh Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kal-Sel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai gerbang ibukota. Adapun arah kebijakan pembangunan perikanan yakni pada Misi 2 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Tujuan Implementasi strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1) menumbuh kembangkan budidaya berbasis masyarakat, ramah lingkungan dan berlandasan IPTEK; 2) mengembangkan perikanan penangkapan yang bertanggungjawab, efisien, terintegrasi (sistem sentra) dan penerapan teknologi tepat guna; 3) mengembangkan investasi, memperluas jaringan pasar, meningkatkan mutu, diversifikasi produk olahan dan konsumsi ikan masyarakat; 4) rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; 5) pengendalian dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Program Pembangunan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dari program pembangunan perikanan yang dilaksanakan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Sedangkan program yang berkaitan dengan pembangunan perikanan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi menjadi kewenangan Propinsi adalah Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 7. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi pada Kab. Hulu Sungai Utara

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Ket.
A	**Kebijakan Nasional**		
1	Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan	Renstra KKP RI 2020-2024	
2	Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat	Renstra KKP RI 2020-2024	
3	Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan	Renstra KKP RI 2020-2024	
4	Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait	Renstra KKP RI 2020-2024	
5	Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan	Renstra KKP RI 2020-2024	
B	**Kebijakan Provinsi**		
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan sasaran meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Renstra DKP 2021-2026	
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector kelautan dan perikanan	Renstra DKP 2021-2026	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan ekosistem dan perairan wilayah pesisir serta penguatan ketahanan bencana	Renstra DKP 2021-2026	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Arah kebijakan pembangunan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatnya produksi yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

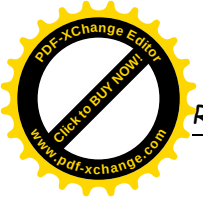
Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan pembangunan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 adalah Meningkatkan produksi perikanan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan sentra produksi perikanan;
2) Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perikanan
3) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan;
4) Meningkatkan tata kelola sumberdaya kelautan yang bertanggungjawab
5) Meningkatan pengawasan dan pengendalian preventif pemanfaatan sumberdaya perikanan
6) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan dan
7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

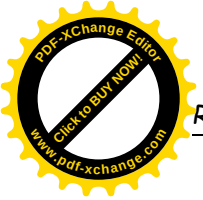
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Meningkatkan produksi perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	1. Meningkat sentra produksi perikanan	**Produksi Perikanan (ton)**	21.319,67		22.136,26	22.140,32	22.144,38	22.148,45
			Produksi perikanan tangkap (ton)	12.319,39		12.326,48	12.329,56	12.332,64	12.335,73
			Prduksi perikanan budidaya (ton)	9.362,39		9.809,78	9.810,76	9.811,74	9.812,72
			Pembangunan kampung perikanan	-	-	Study Kelayakan	Masterplan & Bisni plan	Detail Engineering Design	Pembangunan
			Pembangunan pengolahan skala mikro kecil	-	-	1	2	2	2



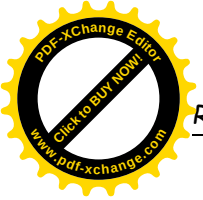


			Pembangunan pakan alami (magot)	-	-	-	1	1	1
			Pengembangan fasiltas dan layanan UPT Dinas (lokasi)	1	1	1	1	1	1
		2. Meningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan	Nelayan yang meningkat kapasitas kemampuan teknis usahanya (orang/tahun)	-	-	20	20	20	20
			Pembudidaya ikan yang meningkat kapasitas kemampuan teknis usahanya (orang/tahun)	-	-	20	20	20	20
			Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kapasitas kemampuan teknis usahanya (orang/tahun)	-	-	20	20	20	20
		3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok usaha perikanan yang naik kelas kelompoknya (kelompok)	54	10	6	10	10	10
			Kelompok usaha perikanan yang telah menerima dan memanfaatkan paket bantuan hibah (kelompok)	-	-	10	25	25	25





		4. Meningkatkan tata kelola sumberdaya kelautan yang bertanggungjawab	Proposi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%/tahun)	-	-	98,00	98,10	98,15	98,20
			Persentase kawasan yang terjaga yang telah direstocking sumberdaya ikannya (%)	-	-	100	100	100	100
		5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian preventif pemanfaatan sumberdaya perikanan	Masyarakat yang telah melek peraturan perundang-undangan dibidang perikanan (orang)	-	-	250	300	350	400
			Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku (%)	-	-	100	100	100	100
			Persentase kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) perikanan aktif (%)	-	-	100	100	100	100
			Persentase cakupan wilayah perairan umum yang terpantau dari aktifitas illegal fishing (%)	-	-	100	100	100	100
		6. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan	Pengolahan yang memiliki tahapan sertifikat kelayakan usaha (SKP)	-	-	-	1	1	1





			Unit pengolahan albumin ikan gabus haruan skala mikro kecil (unit)	-	-	1	1	1	1
			Unit pengolahan tepung ikan sklaa mikro kecil (unit)	-	-	-	1	1	1
			Kampanye Gemarikan (kali)	-	-	10	10	10	10
		7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ SAKIP (nilai)	83,87	83,87	83.95	84,15	84,25	84,35
			Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (nilai)	81,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPD tahun 2023 – 2026 dan RPD tahun 2025 yang materi kebijakannya lebih mengacu pada kebijakan yang bersifat teknokratis yang mana dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 di susun tanpa adanya visi dan misi serta mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yatu meningkatkan perekonomian daerah, dengan indikator tujuan ; a) pendapatan perkapita ADBH (Rp) ; b) pendapatan perkapita ADHK (Rp); dan c) laju pertumbuhan ekonomi (%); serta d) pengeluaran perkapita (Rp).
2. Sasaran yaitu meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa, dengan indikator sasaran : a) pertumbuhan PDRB sertor pertanian (%); b) pertumbuhan PDRB sertor perdagangan (%) dan c) pertumbuhan PDRB sektor perindustian (%) serta d) pertumbuhan PDRB sertor jasa lainnya (%);
3. Arah kebijakan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan; dan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berikut diuraikan mengenai Program dan Kegiatan Sesuai Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menindaklanjuti atas keluarnya

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Adapun program dan kegiatan sesuai RPD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 9. Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Utara.

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan		
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)
	1) Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kab/kota yang tersedia (dokumen)
	2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)
	3) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit)
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok)
	1) Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)
	2) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)
	3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan pembiayaan kemitraan usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya (unit usaha)
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang meningkat kapasitasnya (kelompok)
	1) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)
	2)Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan,bantuan pembiayaan kemitraan usahanya (kelompok)
	3) Pemberian pendampingan kemudahan akses Ilmu pengetahuan teknologi & informasi Serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina (%)
	1) Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Daerah kab/kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen)
	2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (unit)
	3) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (unit)
	4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)
	5) Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (orang)
	6) Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidayaan ikan (dokumen)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	7) Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan (unit)
3.	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Usaha perikanan yang diawasi (kecamatan)
	Kegiatan Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan peraturan yang ditetapkan (%)
	1) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau saha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)
	2) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kab/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Kg)
	Kegiatan penerbitan daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)
	1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan skala usaha dan resiko (dokumen)
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase bimbingan persiapan dan fasilitasi pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro (%)
	1) Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota	Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1) Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)
	2) Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)
Non Urusan (Rutin)		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah (%)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas perikanan (dokumen)
	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (laporan)
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja dinas yang telah diverifikasi/direkonsilisasi oleh instansi terkait (%)
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dimiiki unit kerja dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan (%)
	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)
	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)
	2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)
	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)
	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (paket)
	4) Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)
	5) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)
	6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)
	7) Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan (%)
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)
	2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)
	3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)
	4) Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)
	3) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan merupakan implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah & Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

4.3. Kesesuaian Antara rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila dilihat dari rumusan yang ada terjadi kesesuaian antara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

program dan kegiatan yang digunakan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Dimana dalam rancangan awal RKPD tahun 2025 ini program dan kegiatan berkesesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku.

4.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Perkiraan Maju

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, menggunakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutahirkan menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Guna pencapaian indikator kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang merupakan periode awal Renstra ditunjang dengan 5 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten, yang pagunya sudah ditetapkan dalam ranwal RKPD tahun 2025.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran 3.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana strategis, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dapat dieliminir dan mampu diatasi serta telah diupayakan pemecahannya.

Pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan langkah awal dari tahapan perencanaan pembangunan perikanan ditahun yang akan datang. Hal-hal yang bersifat pembangunan lanjutan maupun permasalahan-permasalahan yang sebagian besar terselesaikan merupakan prioritas utama untuk diprogramkan pada Tahun 2025. Sebagai upaya menindaklanjuti pembangunan daerah yang tidak dapat terakomodir melalui pendanaan APBD Kabupaten, maka diupayakan melalui pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan pusat/APBN.

Adapun kaitan pelaksanaan pada prinsipnya kerangka pembangunan tahunan tidak terlepas dari rencana pembangunan lima tahunan (Renstra 2023 – 2026) dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sentra produksi perikanan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perikanan
3. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan;
4. Meningkatkan tata kelola sumberdaya kelautan yang bertanggungjawab
5. Meningkatan pengawasan dan pengendalian preventif pemanfaatan sumberdaya perikanan
6. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Besar harapan kami bahwa, Rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimasa-masa yang akan datang.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12335.7 Ton	449.265.417	12323.8 Ton	0	12326.5 Ton	588.000.350	0 Ton	9.115.000	0 Ton	23.824.000	0 Ton	42.733.100	12326 Ton	268.438.600	12326 Ton	268.438.600	100,00	45,65	12326 Ton	268.438.600,00	99,92	59,75	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	392.2 %	179.365.417	0 %	0	98.05 %	545.150.000	24 %	5.789.000	54 %	9.961.000	71 %	25.360.100	98,05 %	227.878.100	98,05 %	227.878.100	100,00	41,80	98.05 %	227.878.100,00	25,00	0,00	
1	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	57.817.817	0 Dokumen	0	3 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	2.390.000	0 Dokumen	3.686.000	0 Dokumen	8.134.100	3 Dokumen	14.905.100	3 Dokumen	14.905.100	100,00	99,37	3 Dokumen	14.905.100,00	25,00	25,78	Dinas Perikanan
2	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	36 Unit	2.047.600	0 Unit	0	6 Unit	511.900.000	0 Unit	2.877.000	0 Unit	4.638.000	0 Unit	13.621.000	8 Unit	192.943.000	8 Unit	192.943.000	133,33	37,69	8 Unit	192.943.000,00	22,22	9.422,89	Dinas Perikanan
3	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	16 Unit	119.500.000	0 Unit	0	4 Unit	18.250.000	0 Unit	522.000	0 Unit	1.637.000	2 Unit	3.605.000	4 Unit	20.030.000	4 Unit	20.030.000	100,00	109,75	4 Unit	20.030.000,00	25,00	16,76	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			111,11	82,27			24,07	3.155,14	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Meningkat Kapasitas	20 Kelompok	269.900.000	0 Kelompok	0	5 Kelompok	42.850.350	0 Kelompok	3.326.000	0 Kelompok	13.863.000	8 Kelompok	17.373.000	8 Kelompok	40.560.500	8 Kelompok	40.560.500	160,00	94,66	8 Kelompok	40.560.500,00	40,00	0,00	
4	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	77.500.000	0 Orang	0	50 Orang	17.500.000	0 Orang	2.456.000	50 Orang	10.293.000	50 Orang	13.803.000	50 Orang	15.623.000	50 Orang	15.623.000	100,00	89,27	50 Orang	15.623.000,00	25,00	20,16	Dinas Perikanan
5	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	40 Kelompok	146.500.000	0 Kelompok	0	10 Kelompok	15.450.350	0 Kelompok	435.000	0 Kelompok	3.135.000	10 Kelompok	3.135.000	10 Kelompok	15.163.500	10 Kelompok	15.163.500	100,00	98,14	10 Kelompok	15.163.500,00	25,00	10,35	Dinas Perikanan
6	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Unit Usaha	45.900.000	0 Unit Usaha	0	5 Unit Usaha	9.900.000	0 Unit Usaha	435.000	0 Unit Usaha	435.000	0 Unit Usaha	435.000	5 Unit Usaha	9.774.000	5 Unit Usaha	9.774.000	100,00	98,73	5 Unit Usaha	9.774.000,00	25,00	21,29	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	95,38			25,00	17,27	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			260,00	136,46			32,50	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	9812.72 Ton	2.037.950.000	9520.22 Ton	0	9809.78 Ton	283.210.000	0 Ton	0	0 Ton	19.483.000	0 Ton	90.814.520	9521,97 Ton	255.914.726	9521,97 Ton	255.914.726	97,07	90,36	9521.97 Ton	255.914.726,00	97,04	12,56	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkat Kapasitas	20 Kelompok	269.650.000	0 Kelompok	0	5 Kelompok	48.260.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	8.193.000	3 Kelompok	14.592.500	5 Kelompok	44.947.100	5 Kelompok	44.947.100	100,00	93,14	5 Kelompok	44.947.100,00	25,00	0,00	
7	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	40 Kelompok	90.750.000	0 Kelompok	0	10 Kelompok	6.260.000	0 Kelompok	0	4 Kelompok	3.825.000	6 Kelompok	6.136.000	10 Kelompok	6.252.600	10 Kelompok	6.252.600	100,00	99,88	10 Kelompok	6.252.600,00	25,00	6,89	Dinas Perikanan
8	3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	14 Kelompok	31.900.000	0 Kelompok	0	4 Kelompok	5.500.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	3.856.000	3 Kelompok	4.262.000	4 Kelompok	4.864.000	4 Kelompok	4.864.000	100,00	88,44	4 Kelompok	4.864.000,00	28,57	15,25	Dinas Perikanan
9	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16 Kelompok	147.000.000	0 Kelompok	0	4 Kelompok	36.500.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	512.000	3 Kelompok	4.194.500	4 Kelompok	33.830.500	4 Kelompok	33.830.500	100,00	92,69	4 Kelompok	33.830.500,00	25,00	23,01	Dinas Perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	93,67			26,19	15,05	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	400 %	1.768.300.000	0 %	0	100 %	234.950.000	15 %	0	25 %	11.290.000	40 %	76.222.020	100 %	210.967.626	100 %	210.967.626	100,00	89,79	100 %	210.967.626,00	25,00	0,00	
10	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	86.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.096.000	0 Dokumen	5.391.000	3 Dokumen	17.785.000	3 Dokumen	17.785.000	100,00	88,93	3 Dokumen	17.785.000,00	25,00	20,68	Dinas Perikanan
11	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32 Unit	895.000.000	0 Unit	0	2 Unit	65.000.000	0 Unit	0	0 Unit	3.000.000	0 Unit	3.158.000	2 Unit	64.031.000	2 Unit	64.031.000	100,00	98,51	2 Unit	64.031.000,00	6,25	7,15	Dinas Perikanan
12	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	565.000.000	0 Unit	0	5 Unit	100.000.000	2 Unit	0	2 Unit	0	3 Unit	54.238.270	3 Unit	91.702.876	3 Unit	91.702.876	60,00	91,70	3 Unit	91.702.876,00	15,00	16,23	Dinas Perikanan
13	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	66.800.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	16.700.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.710.000	0 Dokumen	3.269.750	1 Dokumen	12.124.750	1 Dokumen	12.124.750	100,00	72,60	1 Dokumen	12.124.750,00	25,00	18,15	Dinas Perikanan
14	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Orang	29.000.000	0 Orang	0	10 Orang	6.500.000	0 Orang	0	0 Orang	1.450.000	10 Orang	3.472.000	10 Orang	6.098.000	10 Orang	6.098.000	100,00	93,82	10 Orang	6.098.000,00	25,00	21,03	Dinas Perikanan
15	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	2 (Ha)	97.500.000	0 (Ha)	0	0.5 (Ha)	20.250.000	0 (Ha)	0	0 (Ha)	2.730.000	0,4 (Ha)	4.528.000	0,5 (Ha)	14.076.000	0,5 (Ha)	14.076.000	100,00	69,51	0,5 (Ha)	14.076.000,00	25,00	14,44	Dinas Perikanan
16	3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Orang	29.000.000	0 Orang	0	10 Orang	6.500.000	0 Orang	0	0 Orang	1.304.000	10 Orang	2.165.000	10 Orang	5.150.000	10 Orang	5.150.000	100,00	79,23	10 Orang	5.150.000,00	25,00	17,76	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		94,29	84,90			20,89	16,49	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	182,93			25,00	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Usaha Perikanan yang diawasi	2 Kecamatan	512.500.000	Kecamatan	0	2 Kecamatan	116.580.000	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	29.881.000	2 Kecamatan	62.439.500	2 Kecamatan	62.439.500	100,00	53,56	2 Kecamatan	62.439.500,00	100,00	12,18	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibidang tangkap dan budidaya ika berdasarkan peraturan yang ditetapkan	400	512.500.000	0	0	100	116.580.000	0	0	0	0	0	29.881.000	100	62.439.500	100	62.439.500	100,00	53,56	100	62.439.500,00	25,00	0,00	
17	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20 Dokumen	472.500.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	106.580.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	27.067.000	5 Dokumen	59.625.500	5 Dokumen	59.625.500	100,00	55,94	5 Dokumen	59.625.500,00	25,00	12,62	Dinas Perikanan
18	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	40.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.814.000	1 Dokumen	2.814.000	1 Dokumen	2.814.000	50,00	28,14	1 Dokumen	2.814.000,00	12,50	7,04	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		75,00	42,04			18,75	9,83	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		200,00	107,12			25,00	0,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	128672 Kg	1.308.967.400	0 Kg	0	117755 Kg	167.179.400	0 Kg	0	0 Kg	61.087.614	0 Kg	76.388.114	157280 Kg	159.330.885	157280 Kg	159.330.885	133,57	95,31	157280 Kg	159.330.885,00	122,23	12,17	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro kecil	40 Dokumen	85.000.000	10 Dokumen	0	10 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.422.000	8 Dokumen	4.071.000	10 Dokumen	9.953.000	10 Dokumen	9.953.000	100,00	99,53	20 Dokumen	9.953.000,00	50,00	0,00	
19	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	85.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.422.000	0 Dokumen	4.071.000	3 Dokumen	9.953.000	3 Dokumen	9.953.000	100,00	99,53	3 Dokumen	9.953.000,00	25,00	11,71	Dinas Perikanan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	99,53			25,00	11,71	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha Mikro	400 %	179.450.000	0 %	0	100 %	29.450.000	0 %	0	0 %	7.767.000	100 %	14.559.000	100 %	27.838.000	100 %	27.838.000	100,00	94,53	100 %	27.838.000,00	25,00	0,00	
20	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	120 Unit Usaha	179.450.000	0 Unit Usaha	0	30 Unit Usaha	29.450.000	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	7.767.000	30 Unit Usaha	14.559.000	30 Unit Usaha	27.838.000	30 Unit Usaha	27.838.000	100,00	94,53	30 Unit Usaha	27.838.000,00	25,00	15,51	Dinas Perikanan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	94,53			25,00	15,51	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan	1477920 kg	1.044.517.400	0 kg	0	353265 kg	127.729.400	156119 kg	0	187266 kg	51.898.614	160380 kg	57.758.114	499325 kg	121.539.885	499325 kg	121.539.885	141,35	95,15	499325 kg	121.539.885,00	33,79	0,05	
21	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.6 Ton	505.000.000	0 Ton	0	8.4 Ton	108.212.000	0 Ton	0	0 Ton	45.249.614	6 Ton	45.249.614	8,4 Ton	102.433.885	8,4 Ton	102.433.885	100,00	94,66	8,4 Ton	102.433.885,00	25,00	20,28	Dinas Perikanan
22	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	539.517.400	0 Pelaku Usaha	0	10 Pelaku Usaha	19.517.400	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	6.649.000	0 Pelaku Usaha	12.508.500	10 Pelaku Usaha	19.106.000	10 Pelaku Usaha	19.106.000	100,00	97,89	10 Pelaku Usaha	19.106.000,00	25,00	3,54	Dinas Perikanan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	96,28			25,00	11,91	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		227,56	192,81			36,26	0,02	
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.274.551.300	0 %	0	100 %	3.513.492.650	0 %	0	0 %	1.638.937.554	0 %	2.467.148.443	93,18 %	3.334.539.824	93,18 %	3.334.539.824	93,18	94,91	93.18 %	3.334.539.824,00	93,18	25,12	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Dokumen	316.800.000	0 Dokumen	0	9 Dokumen	73.500.000	3 Dokumen	0	6 Dokumen	26.378.444	9 Dokumen	35.679.044	9 Dokumen	56.672.344	9 Dokumen	56.672.344	100,00	77,11	9 Dokumen	56.672.344,00	25,00	0,00	
23	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	18.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.428.000	1 Dokumen	7.593.750	1 Dokumen	10.518.750	1 Dokumen	10.518.750	100,00	58,44	1 Dokumen	10.518.750,00	25,00	13,49	Dinas Perikanan
24	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	9.600.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	79.000	1 Dokumen	1.457.850	1 Dokumen	1.457.850	1 Dokumen	1.457.850	100,00	80,99	1 Dokumen	1.457.850,00	25,00	15,19	Dinas Perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	19.700.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.700.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.023.444	1 Dokumen	1.764.000	1 Dokumen	4.276.750	1 Dokumen	4.276.750	100,00	90,99	1 Dokumen	4.276.750,00	25,00	21,71	Dinas Perikanan
26	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	9.500.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.353.444	1 Dokumen	1.353.444	1 Dokumen	1.353.444	100,00	67,67	1 Dokumen	1.353.444,00	25,00	14,25	Dinas Perikanan
27	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	14.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.149.050	1 Dokumen	3.149.050	100,00	89,97	1 Dokumen	3.149.050,00	25,00	22,49	Dinas Perikanan
28	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	46.000.000	0 Laporan	0	3 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	7.930.500	2 Laporan	7.930.500	3 Laporan	8.914.500	3 Laporan	8.914.500	100,00	89,15	3 Laporan	8.914.500,00	25,00	19,38	Dinas Perikanan
29	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	140.000.000	0 Laporan	0	1 Laporan	33.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	10.917.500	0 Laporan	15.579.500	1 Laporan	27.002.000	1 Laporan	27.002.000	100,00	80,60	1 Laporan	27.002.000,00	25,00	19,29	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	79,69			25,00	17,97	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas yang telah diverifikasi, direkonsiliasi oleh intansi terkait	400 %	11.548.468.000	0 %	0	100 %	3.059.350.000	0 %	0	0 %	1.502.427.301	0 %	2.259.663.951	100 %	2.945.832.431	100 %	2.945.832.431	100,00	96,29	100 %	2.945.832.431,00	25,00	0,00	
30	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	11.442.768.000	Orang/bulan	0	27 Orang/bulan	3.037.850.000	27 Orang/bulan	0	27 Orang/bulan	1.502.427.301	27 Orang/bulan	2.253.640.951	27 Orang/bulan	2.932.099.931	27 Orang/bulan	2.932.099.931	100,00	96,52	27 Orang/bulan	2.932.099.931,00	25,00	25,62	Dinas Perikanan
31	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	80.500.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	17.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.023.000	1 Dokumen	11.257.500	1 Dokumen	11.257.500	50,00	66,22	1 Dokumen	11.257.500,00	12,50	13,98	Dinas Perikanan
32	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	25.200.000	0 Laporan	0	1 Laporan	4.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.475.000	1 Laporan	2.475.000	100,00	55,00	1 Laporan	2.475.000,00	25,00	9,82	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		83,33	72,58			20,83	16,48	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentasi sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dimanfaatkan/dioperasionalkan / digunakan sesuai dengan fungsi / peruntukan yang telah ditetapkan	400 %	13.400.000	0 %	0	100 %	2.000.000	0 %	0	0 %	0	90 %	1.350.000	100 %	1.350.000	100 %	1.350.000	100,00	67,50	100 %	1.350.000,00	25,00	0,00	
33	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	13.400.000	0 Laporan	0	2 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.350.000	1 Laporan	1.350.000	1 Laporan	1.350.000	50,00	67,50	1 Laporan	1.350.000,00	12,50	10,07	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50,00	67,50			12,50	10,07	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku	0 %	110.000.000	0 %	0	100 %	10.000.000	0 %	0	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100,00	90,00	100 %	9.000.000,00	0,00	0,00	
34	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	110.000.000	0 Orang	0	2 Orang	10.000.000	0 Orang	0	2 Orang	9.000.000	2 Orang	9.000.000	2 Orang	9.000.000	2 Orang	9.000.000	100,00	90,00	2 Orang	9.000.000,00	14,29	8,18	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	90,00			14,29	8,18	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan	400 %	607.183.300	0 %	0	100 %	194.733.000	0 %	0	0 %	28.778.000	50 %	55.726.000	87,77 %	170.918.246	87,77 %	170.918.246	87,77	87,77	87.77 %	170.918.246,00	21,94	0,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
35	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	26.900.000	0 Paket	0	4 Paket	5.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	2.411.000	2 Paket	2.411.000	50,00	48,22	2 Paket	2.411.000,00	12,50	8,96	Dinas Perikanan
36	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	91.600.000	0 Paket	0	4 Paket	14.500.000	0 Paket	0	0 Paket	2.476.000	2 Paket	8.005.300	3 Paket	11.299.350	3 Paket	11.299.350	75,00	77,93	3 Paket	11.299.350,00	18,75	12,34	Dinas Perikanan
37	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	49.883.300	0 Paket	0	1 Paket	4.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	1.839.800	1 Paket	2.189.800	1 Paket	2.189.800	100,00	54,75	1 Paket	2.189.800,00	25,00	4,39	Dinas Perikanan
38	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	50.500.000	0 Paket	0	4 Paket	10.000.000	0 Paket	0	0 Paket	350.000	2 Paket	2.542.500	3 Paket	4.561.360	3 Paket	4.561.360	75,00	45,61	3 Paket	4.561.360,00	18,75	9,03	Dinas Perikanan
39	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	84.000.000	0 Paket	0	4 Paket	15.000.000	0 Paket	0	0 Paket	495.000	0 Paket	495.000	3 Paket	9.449.000	3 Paket	9.449.000	75,00	62,99	3 Paket	9.449.000,00	18,75	11,25	Dinas Perikanan
40	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	22.800.000	0 Laporan	0	10 Laporan	5.700.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	990.000	5 Laporan	1.755.000	5 Laporan	1.755.000	50,00	30,79	5 Laporan	1.755.000,00	12,50	7,70	Dinas Perikanan
41	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	277.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	140.533.000	0 Laporan	0	0 Laporan	25.457.000	10 Laporan	41.853.400	12 Laporan	139.252.736	12 Laporan	139.252.736	100,00	99,09	12 Laporan	139.252.736,00	25,00	50,27	Dinas Perikanan
42	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	n/a	4.500.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	0,00	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			75,00	59,91			18,75	14,85	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantoryang telah diberikan	400 %	494.000.000	0 %	0	100 %	127.024.450	0 %	0	0 %	58.033.360	30 %	81.780.199	90,92 %	116.260.754	90,92 %	116.260.754	90,92	91,53	90.92 %	116.260.754,00	22,73	0,00	
43	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6500 Laporan	27.000.000	0 Laporan	0	1625 Laporan	4.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	2.933.800	0 Laporan	4.073.800	1009 Laporan	4.180.800	1009 Laporan	4.180.800	62,09	92,91	1009 Laporan	4.180.800,00	15,52	15,48	Dinas Perikanan
44	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6500 Laporan	27.000.000	0 Laporan	0	1625 Laporan	4.500.000	0 Laporan	0	0 Laporan	2.933.800	0 Laporan	4.073.800	1009 Laporan	4.180.800	1009 Laporan	4.180.800	62,09	92,91	1009 Laporan	4.180.800,00	15,52	15,48	Dinas Perikanan
45	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	80.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	26.524.450	0 Laporan	0	0 Laporan	13.418.761	9 Laporan	15.115.000	10 Laporan	21.837.557	10 Laporan	21.837.557	83,33	82,33	10 Laporan	21.837.557,00	20,83	27,30	Dinas Perikanan
46	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	80.000.000	0 Laporan	0	12 Laporan	26.524.450	0 Laporan	0	0 Laporan	13.418.761	9 Laporan	15.115.000	10 Laporan	21.837.557	10 Laporan	21.837.557	83,33	82,33	10 Laporan	21.837.557,00	20,83	27,30	Dinas Perikanan
47	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Laporan	8.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	50,00	50,00	2 Laporan	1.000.000,00	12,50	12,50	Dinas Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Laporan	8.000.000	0 Laporan	0	4 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	50,00	50,00	2 Laporan	1.000.000,00	12,50	12,50	Dinas Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Laporan	379.000.000	12 Laporan	0	12 Laporan	94.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	41.680.799	9 Laporan	62.591.399	12 Laporan	89.242.397	12 Laporan	89.242.397	100,00	94,94	24 Laporan	89.242.397,00	50,00	23,55	Dinas Perikanan
50	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Laporan	379.000.000	12 Laporan	0	12 Laporan	94.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	41.680.799	9 Laporan	62.591.399	12 Laporan	89.242.397	12 Laporan	89.242.397	100,00	94,94	24 Laporan	89.242.397,00	50,00	23,55	Dinas Perikanan
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			59,09	64,04			19,77	15,77	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya	400 %	184.700.000	0 %	0	100 %	46.885.200	0 %	0	0 %	14.320.449	60 %	23.949.249	73,6 %	34.506.049	73,6 %	34.506.049	73,60	73,60	73.6 %	34.506.049,00	18,40	0,00	
51	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	69.000.000	0 Unit	0	1 Unit	24.885.200	0 Unit	0	0 Unit	11.212.349	0 Unit	14.009.349	1 Unit	21.247.349	1 Unit	21.247.349	100,00	85,38	1 Unit	21.247.349,00	25,00	30,79	Dinas Perikanan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	116 Unit	72.700.000	0 Unit	0	29 Unit	16.000.000	0 Unit	0	0 Unit	1.978.100	29 Unit	8.759.900	29 Unit	9.508.700	29 Unit	9.508.700	100,00	59,43	29 Unit	9.508.700,00	25,00	13,08	Dinas Perikanan
53	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	23.000.000	0 Unit	0	10 Unit	5.000.000	0 Unit	0	0 Unit	1.130.000	3 Unit	1.180.000	10 Unit	3.200.000	10 Unit	3.200.000	100,00	64,00	10 Unit	3.200.000,00	25,00	13,91	Dinas Perikanan
54	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	20.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	550.000	1	550.000	100,00	55,00	1	550.000,00	25,00	2,75	Dinas Perikanan
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	65,95			25,00	15,13	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		186,37	166,80			19,72	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		104,76	75,96			102,47	24,36	
		Predikat Kinerja (Program)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	54	**Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)**																		**88,13**	**87,41**			**22,27**	**190,08**	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							**4.668.462.400**		**9.115.000**		**1.743.332.168**		**2.706.965.177**		**4.080.663.535**		**4.080.663.535**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Besarnya motivasi dan keinginan untuk merealisasikan kegiatan dengan melihat dari target dan indikator kinerja yang sudah jelas terukur
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Dinas Perikanan pada enam (6) bulan pertama GU masih nihil. hal ini disebabkan masih banyak kesulitan dalam melakukan realisasi anggaran karena sistem aplikasi e purchasing yang belum familiar dikalangan ASN Dinas Perikanan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran serta otomatis terkendala dalam realiasasi target kinerja yang sudah ditetapkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Pimpinan menghendaki tahun depan dengan kondisi sistem penilaian kinerja melalui TAPKIN, bagian keuangan khususnya dan bidang-bidang terkait penyerapan anggaran diharapkan dapat optimal melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan diharapkan ASN di di Diskan sudah bisa menguasai sistem aplikasi e-purchasing untuk realisasi anggaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lampi... 2. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Di... erikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**Urusan Rutin**				**4.744.676.785**					**4.894.021.732**	
1	**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	HSU	**Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP (Point)**		**4.744.676.785**	**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.894.021.732**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi KInerja	9	**140.457.150**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	67.380.350	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.925.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	27.079.700	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Alasan ting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	34.572.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas yang telah diverfikasi, direkonsiliasi oleh intansi terkait		4.190.119.282	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas yang telah diverfikasi, direkonsiliasi oleh intansi terkait	100	4.173.019.282	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.167.619.282	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	4.167.619.282	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		17.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.400.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentasi sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dimanfaatkan/dioperasionalkan / digunakan sesuai dengan fungsi / peruntukan yang telah ditetapkan		6.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentasi sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dimanfaatkan/dioperasionalkan / digunakan sesuai dengan fungsi / peruntukan yang telah ditetapkan	100	5.850.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5.850.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku		34.657.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku	100	58.750.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				18.157.800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	8.750.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	[illegible] ting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan		178.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan	100	262.072.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.192.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	63.547.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3.521.300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4	28.818.700	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		15.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	4.960.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		105.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	155.962.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.070.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantoryang telah diberikan		173.199.703	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantoryang telah diberikan	100	121.382.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1625	4.348.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		19.999.703	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	32.191.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4	1.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		147.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	83.843.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat		77.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat	100	132.490.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42.750.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		22.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	83.440.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	6.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0	0	
II	**Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**										
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	HSU	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**		**396.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	HSU	Jumlah produksi perikanan tangkap	**12.332,64**	**630.320.000**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman		**340.000.000**	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman	<100%	564.220.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		Rp25.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 dokumen	35.366.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Rp280.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7 unit	497.129.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		Rp35.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 unit	31.725.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Nelayan yang Meningkat Kapasitas		**56.000.000**	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitasnya	5 kelompok	66.100.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Rp20.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	18.450.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		Rp25.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan	10 kelompok	21.600.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Rp11.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 unit usaha	26.050.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	HSU	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**		**827.149.900**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	12000	**709.193.650**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkat Kapasitas		**98.550.000**	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkat Kapasitas	5	**98.549.750**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan		Rp16.050.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan	10	Rp16.049.800	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		Rp7.500.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4	Rp7.500.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	[illegible] ting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Rp75.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Rp74.999.950	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina		**728.599.900**	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan yang dapat dibina	100	**610.643.900**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Rp19.999.800	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp515.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Rp382.449.250	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp150.400.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Rp165.000.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan		Rp16.700.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	1	Rp16.700.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Rp7.500.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di	10	Rp7.499.950	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		Rp11.499.900	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0,5	Rp11.499.900	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Rp7.500.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10	Rp7.495.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Alasan ting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	HSU	**Usaha Perikanan yang Diawasi**		**120.159.100**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Usaha Perikanan yang Diawasi**	**2**	**104.991.300**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibidang tangkap dan budidaya ika berdasarkan peraturan		**120.159.100**	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha dibidang tangkap dan budidaya ika berdasarkan peraturan	**100**	**104.991.300**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		Rp110.159.100	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan	**463**	Rp94.316.300	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,		Rp10.000.000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	**4**	Rp10.675.000	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**		**294.000.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**	**124,925**	**318.999.735**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro kecil		**15.000.000**	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro kecil	**10**	**18.000.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		Rp15.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan	**3**	Rp18.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha Mikro		**30.000.000**	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha Mikro	**100**	**39.500.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		Rp30.000.000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	**30**	Rp39.500.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan		**249.000.000**	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan	**363,861**	**261.499.735**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah		Rp194.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	**8,4**	Rp198.999.985	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		Rp55.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	**10**	Rp62.499.750	
Jumlah					**6.381.985.785**					**6.657.526.417**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						**6.657.526.417,00**							**6.253.933.582,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.657.526.417,00**							**6.253.933.582,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**6.657.526.417,00**							**6.253.933.582,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)***	**-**			**100 %**	**4.894.021.732,00**						**-**	**4.711.683.582,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi KInerja Dinas Perikanan*	-			9 dokumen	140.457.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	159.220.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	67.380.350,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		84.540.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		2.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		3.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.925.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		3.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	27.079.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		27.080.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	34.572.100,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		35.500.000,00	DINAS PERIKANAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persenatse laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja Dinas yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh Instansi terkait (%)*	-			100 %	4.173.019.282,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	4.174.519.282,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.167.619.282,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		4.167.619.282,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		6.900.000,00	DINAS PERIKANAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase sarana dan prasararan yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan*	-			100 %	5.850.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	3.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		3.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai kettentuan yang berlaku (%)*	-			100 %	58.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	58.157.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	8.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		18.157.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)*	-			100 %	262.072.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	148.586.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.192.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		7.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	63.547.600,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		25.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.521.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		14.886.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	28.818.700,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		13.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	4.960.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		5.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	155.962.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.070.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		1.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan*	-			100 %	121.382.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	124.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1625 Laporan	4.348.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.191.500,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.843.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		95.000.000,00	DINAS PERIKANAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%)*	-			100 %	132.490.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU	-	42.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		18.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	83.440.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		18.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Dinas Perikanan Kab. HSU		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	**-**			**12332,64 Ton**	**630.320.000,00**						**-**	**396.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)*	-			100 %	564.220.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan	-	340.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	35.366.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				7 Unit	497.129.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tpdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				4 Unit	31.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)*	-			5 kelompok	66.100.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan	-	56.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	18.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	21.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	26.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	KUB Perikanan		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	**-**			**9811,74 Ton**	**709.193.650,00**						**-**	**585.250.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)*	-			5 kelompok	98.549.750,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN	-	71.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				10 Kelompok	16.049.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		25.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				4 Kelompok	7.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		8.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	74.999.950,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	POKDAKAN		37.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persenatse Cakupan Wilayah BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)* *Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina*	-			100 % 100 %	610.643.900,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN	-	514.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	19.999.800,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		22.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	382.449.250,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		275.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	16.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		16.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	165.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		165.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				10 Unit	7.499.950,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				10 Unit	7.495.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	11.499.900,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKDAKAN		20.500.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Usaha Perikanan yang Diawasi***	**-**			**2 Kecamatan**	**104.991.300,00**						**-**	**146.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%)*	-			1,9 %	104.991.300,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKMASWAS	-	146.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				4 Pelaku Usaha	10.675.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKMASWAS		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				463 Pelaku Usaha	94.316.300,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKMASWAS		136.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikananan***	**-**			**124925 Kg**	**318.999.735,00**						**-**	**415.000.000,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)*	-			10 dokumen	18.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR	-	25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				10 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi Pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro (%)*	-			100 %	39.500.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR	-	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Unit Usaha	39.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)* *Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan (kg)*	-			374775 kg 374775 kg	261.499.735,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR	-	330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8,4 Ton	198.999.985,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	62.499.750,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan	POKLAHSAR		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							**6.657.526.417,00**							**6.253.933.582,00**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025



DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PERPUSTAKAAN

Jl. A. Yani no. 02 Amuntai
Telp. (0527) 61015
Email: perpustarda.hsu@gmail.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagaimana diamanatkan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RENJA akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang penganggarannya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya memenuhi pencapaian Target dan Sasaran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam periode satu tahun, maka Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Bapedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadhirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Renja ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Amuntai, Maret 2023
Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. Karyanadi, S.Pd, M.AP.
Pembina
NIP. 19710703 199803 1 010

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 6
2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 7
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 8
2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Untuk kedepan 17
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 19
2.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja 19
2.2.2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja 20
2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 17
2.3.1. Identifikasi Masalah Perpustakaan 25
2.3.2. Identifikasi Masalah Kearsipan 25
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 31
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 47
3.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROPINSI 49
3.2.1. Sekretariat 33
3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 50
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN 51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 61
4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 61
4.2 PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) 63
BAB V PENUTUP 70

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 8

Tabel 2.4 Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 9

Tabel 2.5 Realisasi Target Capaian Renstra 2023 – 2026 16

Tabel 2.6 Rencana Aksi Dinas Perpustakaan kedepan 18

Tabel 2.7 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 22

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 27

Tabel 2.9 Rancangan Matrik RKPD 2025 Permasalahan dan Solusi Dinas Perpustakaan Kab. HSU 28

Tabel 2.10 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara 32

Tabel 2.11 Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara 41

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan 50

Tabel 3.2 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara 54

Tabel 4.1 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara 65

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan, hubungan antara Renja (Rencana Kerja), Rencana Strategis, dan RKPD/RPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah) memegang peranan penting dalam menjamin efektivitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya di berbagai tingkat pemerintahan.

Rencana Strategis berfungsi sebagai panduan jangka panjang untuk keseluruhan tujuan dan prioritas pembangunan suatu organisasi atau entitas pemerintah. Hal ini menentukan arah kegiatan dan inisiatif di masa depan, menguraikan tujuan dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Renja, sebaliknya, adalah rencana yang lebih operasional dan rinci yang menerjemahkan tujuan strategis ke dalam kegiatan dan proyek spesifik yang akan dilaksanakan dalam satu tahun fiskal.

RKPD/RPD sendiri menyempurnakan tujuan dan sasaran strategis di tingkat daerah, dengan mempertimbangkan prioritas, sumber daya, dan tantangan lokal. Hal ini menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan prioritas nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis.

Hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan ini bersifat interaktif dan simbiosis. Rencana Strategis memberikan kerangka dan arah menyeluruh bagi agenda pembangunan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti melalui Rencana Kerja. Implementasi Renja pada gilirannya, menjadi masukan bagi evaluasi dan revisi Rencana Strategis, memastikan bahwa tujuan dan strategi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan keadaan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Perpustakaan Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 129 Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.

Adapun Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026;
c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kecamatan;
d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan RENJA 2025 Dinas Perpustakaan mengacu Kepada Review Rencana Pembangunan Daerah (R-RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Review RENSTRA Dinas Perpustakaan Tahun 2023-2026 dengan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

disesuaikan dengan bidang tugas dari Dinas Perpustakaan, dengan keterkaitan sasa strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. *Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*
2. *Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;*

1.2 LANDASAN HUKUM

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025;
10) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
11) Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16) Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

17) Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
19) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
20) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 nomor 17);
21) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 21);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Perpustakaan yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD Dinas Perpustakaan yang memuat kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang lebih terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat kerangka pendanaan sesuai tahun perencanaan

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renja SKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada periode tahun pertama yakni Tahun 2023 dari Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 - 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program/ kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyedian gaji dan tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Administrasi umum perangkat daerah
   - Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyedian peralatan rumah tangga
   - Penyedian bahan logistik kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4) Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   - Penyedia Jasa pelayanan umum kantor
5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   - Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kar... atau Bangunan Lainnya

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pembinaan Perpustakaan

1) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota
   - Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan
   - Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Pengelolaan dan Pengembangan bahan pustaka
   - Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
2) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
   - Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

IV. Program Pengelolaan Arsip

1) Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
   - Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
   - Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota
2) Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
   - Pengumpulan dan Penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI
   - Akusisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis
3) Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota
   - Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota
   - Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Adapun Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 (tahun ke-1 dari Renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 4 indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan indikator kinerja utama untuk OPD melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 tahun 2019 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah di

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan reviu terhadap IKU, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Nilai	78,50	82,54	105,14
2.	Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	12,00 (skala 20) (*Sedang*)	82,34 (skala 100) 17,30 (skala 20) (**Tinggi**)	144,17
		Nilai Survei Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	12,70 (skala 20) (*Tinggi*)	49,77 (skala 100) 10,46 (skala 20) (**Sedang**)	82,36
3.	Meningkatnya Ketersediaan arsp yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	90.50	90,46	99,96

Pada tabel capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan tahun anggaran 2023 atau tahun ke 1 (satu) dari Rencana Strategis (Renstra), ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target dan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan (output) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator.

Capaian kinerja selama Tahun 2023 dapat dilihat dari hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan prioritas terhadap sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Secara umum realisasi capaian kinerja dapat dikatakan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan catatan ada beberapa kegiatan yang perlu dicermati dan ditingkatkan ketercapaiannya.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.29 dibawah ini.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4
TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) (2023-2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2,23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**									
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100 %	78,01%	100%	89,30%	89,30%	100 %	94,65%	94,65%
01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	89,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	200%	200%
01.2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	3	4	400%
01.2.02.03	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	100%	2	4	200%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

01.2.02.05	Koordinas dan penyusunan laporan capiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	8	11	367%
01.2.02.06	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	19	-	0	-	0	0	0%
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	90,00%	100,00%	80,00%	89,30%	111,63%	80,00%	169%	188%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	23	322	297	92,24%	350	647	2588%
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	2	2	100,00%	2	4	400%
01.2.04	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100%	110%	-	0%	0%	25%	25%	25%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	-	-	0	-	0	0	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	11	-	0	-	7	7	350%
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	100,00%	108,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	1	1	100,00%	1	2	200%
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	18	1	1	100,00%	1	2	200%
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15	1	1	100,00%	1	2	200%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	55	1	1	100,00%	1	2	200%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan	1	-	1	1	100,00%	1	2	200%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10	-	-	0	-	3	3	30%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

[illegible].06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	57	10	13	130,00%	15	28	112%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Yang dibeli	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	0	0	0	0,00%	0	0	0%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	0	2	2	100,00%	0	2	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	36	36	100%	12	24	200%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10	10	100%	10	10	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100%	4	4	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	15	25	25	100%	15	20	80%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	0	0	-	0	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	20	15	15	100%	20	18	117%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	64,26	61,38	57,12	82,34	144,15 %	63,00 *)	72,67	113,0
		Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	61,88	48,30	60,45	49,77	82,33 %	50,00 *)	49,89	80,62%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	81,00	80,00	81,08	101,35%	82,00	81,54	94,81%
						84,37	105,46%		83	96,73%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	2	1	-	0	-	0	0	0%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	9	0	10	10	100%	3	13	144%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	69	46	10	10	100%	25	35	51%
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	34	11	-	0	-	0	0	0%
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150	46	-	0	-	0	0	0%
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5	30	2	3	150,00%	4	7	140%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.560	495	260	972	373,85%	504	1476	58%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100,00%	2	5	167%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	2.700	4.285	600	3.125	520,83%	1000	4125	152,78%
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17	1	-	0	-	0	0	0%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25	2	0	0	-	0	0	0%
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10	4	6	9	150,00%	9	18	180%
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	6	0	0	0	-	0	0	0%
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1	0	1	0	0%	1	1	1
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	373	383	1	0	0%	362	362	97%
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	373	383	358	403	112,57%	362	765	205%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	278	-	38	67	176,32%	6	73	26,26%
2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	90,50%	90,89%	90,50	90,46%	1,00%	91,00%	90,73%	100,25%

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2.01	Pengelola arsip dinamis daerah	Persentase arsip dinamis yang dipeliharan dan dikelola	95%	97,78%	80,00%	80,00%	100,00%	85,00%	82,50%	86,8
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	0	2.369	50	50	100,00%	50	100	-
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	16	20	20	100,00%	10	30	150,00%
2.24.02.2.02	Pengelolaan arsip statis daerah	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	95,00%	92,80%	80,00	80,00%	1%	85,00%	82,50%	86,84%
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan penyampaiaan salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	45	-	30	30	100,00%	0	30	66,67%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	40	20	25	25	100,00%	25	50	125,00%
2.24.02.2.03	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	95,00%	94,00%	80,00%	80,00%	100,00%	85,00%	82,50%	78,38%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25	43%	10	10	100%	15	25	100,00%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25	114%	10	10	100%	0	10	40,00%
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentasi Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	25,00%							
2.24.03.2.01	Pemusnahan arsip dilakukan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK								
2.24.03.2.01.01	Penilaiaan, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3.000							

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

.03.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan								
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten	40							
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana								
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana								
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentasi jumlah arsip yang digunakan / di Akses	35,00%							
2.24.04.2.01	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten	jumlah pengguna arsip yang bersifat tertutup di kabupaten	32							
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan								
2.24.04.2.01.02	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								

*Keterangan : *) Indeks dan Nilai Kesepakatan Rakortekbang*

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.5. Realisasi Target Capaian Renstra 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	12.00 (skala 20)	82,34 (skala 100)	70,5 *)		13,00		13,50		13,50	
					17,30 (skala 20)								
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	12.70 (skala 20)	49,77 (skala 100)	55,00 *)		12,90		13,00		13,00	
					10,46 (skala 20)								
2	Meningkatnya Ketersediaan arsp yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	90.50	90,46	91,00 *)		91,50		92,00		92,00	
3	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Nilai	78.50	82,54	79,00		79,50		80,00		80,00	

Keterangan *) : Hasil kesepakatan rakortekbang 2024

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari Tabel T-C.29 dan Tabel Realisasi Target Capaian Renstra diatas hampir semua target indikator yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, akan tetapi ada beberapa indikator kegiatan yang belum maksimal dalam pencapaiannya, diantaranya :

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dengan target nilai 60,45 hanya diperoleh 49,77 dengan kata lain tercapai hanya 82,33 %, hal ini memang menggambarkan keadaan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masuk dalam kategori SEDANG, hal ini dapat di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :
   1.1. Distribusi buku yang tidak merata terutama pada daerah-daerah terluar dan terpencil di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga membuat akses terhadap bahan bacaan menjadi terbatas
   1.2. Ketimpangan rasio antara jumlah buku yang diminati dan diperlukan masyarakat dengan jumlah penduduk, juga merupakan penghambat minat kegemaran membaca
   1.3. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling khususnya untuk penambahan koleksi buku serta mobilitas layanan keliling
   1.4. Kurangnya tenaga pustakawan untuk promosi kegemaran membaca untuk peningkatan literasi di kalangan masyarakat.
2. Target naskah kuno yang masih belum tercapai dari target 1 (satu) naskah kuno saja untuk Tahun 2023, hal ini lebih disebabkan adanya persyaratan dan penetapan naskah kuno sebagai **Ingatan Kolektif Nasional** (IKON) yang diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, sehingga naskah kuno belum ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun ketentuan penetapan Naskah Kuno sebagaimana Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, diantaranya :
   2.1. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri, yang memiliki usia paling rendah 50 Tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
   2.2. Pengusulan naskah kuno sebagai IKON harus mencantumkan informasi antara lain : Nama Pemilik, Judul Naskah, Isi Singkat Naskah, Tahun Dibuatnya Naskah, Jenis Media yang digunakan (misal : daluwang, daun lontar, bambu, kulit binatang), Jenis Bahasa dan / atau Jenis Aksara

2.1.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Untuk kedepan

Evaluasi terhadap Rencana Aksi dan gambaran yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.6. Rencana Aksi Dinas Perpustakaan kedepan

No.	Sasaran	Rencana Aksi
1.	Meningkatnya perbaikan system administrasi kearsipan di SKPD, pemerintahan desa dan swasta	➢ Melakukan pembinaan arsip terjaga sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Arsip Nasional RI. ➢ Melaksanakan audit pengawasan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ➢ adanya aturan dan kebijakan khusus tentang serah simpan arsip statis ➢ SKPD harus membuat kebijakan khusus tentang alih media dan reproduksi arsip ➢ Mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan dalam rangka penerapan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
2.	Meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi dibidang kearsipan menuju tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan dan swasta	➢ Pengmbangan kompetensi SDM kearsipan sesuai dengan amanah UU 43 tahun 2009 tentang karsipan. ➢ Perlunya koordinasi stakeholder terkait dalam pengembangan SDM kearsipan agar lebih dioptimalkan. ➢ masih diperlukan adanya Bimtek khusus pengelola arsip SKPD dalam penerapan Srikandi
3.	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	➢ Menerapkan jam layanan perpustakaan sesuai aturan protokol kesehatan dan lebih mengoptimalkan layanan perpustakaan digital sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan melalui layanan perpustakaan digital ➢ Pengembangan koleksi melalui berbagai kegiatan terus di upayakan, baik penambahan koleksi melalui pendanaan APBD maupun APBN (DAK) subbidang perpustakaan, dan juga berusaha untuk mendapatkan melalui hibah bantuan lainnya ➢ Perlunya peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan perpustakaan. ➢ Jangkauan akses layanan perpustakaan keliling agar dapat dimaksimalkan agar mendorong kualitas layanan perpustakaan.
4.	Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakan dan minat baca masyarakat	➢ Mendorong semua jenis perpustakaan dalam kegiatan akreditasi perpustakaan ➢ Pemetaaan dan peningkatan kualitas SDM perpustakaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ➢ mendorong kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan ➢ Kolaborasi, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder harus ditingkatkan agar terciptanya masyarakat pembelajar dan berbudaya baca

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dari capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat beberapa kegiatan yang mengalami keberhasilan/ peningkatan kinerja maupun penurunan kinerja.

Agar di tahun yang akan datang tidak mengulangi kesalahan / kegagalan seperti tahun-tahun sebelumnya, perlu diadakan analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja maupun kegagalan/ penurunan kinerja.

2.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

1. Urusan Sekretariat
    a. Mengoptimalkan sumber daya anggaran keuangan yang tersedia guna mencapai target kinerja SKPD semaksimal mungkin
    b. Memaksimalkan sumberdaya manusia (pegawai) baik ASN maupun tenaga kontrak dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan kinerja yang di emban Dinas Perpustakaan.
    c. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian sesuai tupoksi dan jabatan, sehingga tercapainya kinerja individu berbasis teknologi.
    d. Adanya ruang berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan kinerja, dan adanya kenaikan tunjangan ASN yang memacu pegawai itu sendiri sesuai hak dan kewajiban yang di emban yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
    e. Terjalinnya kerjasama antar bidang dan stakeholder lain untuk menunjang kegiatan.
2. Urusan Perpustakaan
    a. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kualitas pelayanan perpustakaan
    b. Adanya pemerataan layanan perpustakaan dengan perpustakaan keliling
    c. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan perpustakaan baik di perpustakaan umum daerah maupun pada saat pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
    d. Adanya peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam hal penambahan koleksi perpustakaan, berupa hibah koleksi buku dari Balai Bahasa Propinsi Kalimantan Selatan dan Hibah koleksi buku dari Penulis lokal sehingga capaian target lebih dari 100 %.
    e. Masifnya promosi kegiatan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Urusan Kearsipan

a. Memberikan pendampingan dan pembinaan secara langsung kepada SKPD maupun pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang tata cara mengelola kearsipan di instansinya.

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kearsipan di SKPD yang ada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Melaksanakan alih media arsip untuk pelestarian arsip terjamin autentitasnya.

d. Melaksanakan preservasi arsip sebagai penyelamatan arsip statis.

2.2.2. Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja

Dari hasil analisis yang dilakukan, beberapa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja :

1. Urusan Sekretariat

a. Sistem perencanaan kegiatan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan dan terlihat belum matang, dan masih kurangnya pemahaman tentang SDM berbasis kinerja.

b. Melihat dari peta jabatan yang ada, masih terdapat kekosongan jabatan yaitu sekretaris, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu (arsiparis dan pustakawan) dari data analisis jabatan yang ada pada Dinas Perpustakaan, bahwasanya kekuatan SDM yang ada tersedia 19 orang ASN, dan masih ada kekurangan tenaga SDM sesuai analisis jabatan sebanyak 27 jabatan yang masih kosong/belum terisi.

c. Tingkat penguasan SDM terhadap teknologi informasi masih menjadi kendala, bahkan ada beberapa pegawai yang memang tidak bisa mengoperasikan komputer, ditengah reformasi birokrasi yang berbasis teknologi informasi seyogyanya pegawai harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan tugas dan perkembangan zaman.

d. Biaya pendanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja belum maksimal, ada beberapa kerusakan gedung bangunan yang perlu penanganan serius seperti atap dak yang bocor dan sarana lainnya penunjang kinerja Dinas Perpustakaan.

2. Urusan Perpustakaan

a. Belum meratanya layanan perpustakaan keliling khususnya pada sekolah sekolah yang tidak bisa di akses dengan mobil layanan perpustakaan keliling

b. Masih terbatasnya jumlah koleksi perpustakaan khususnya yang up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum dan dunia pendidikan pada khususnya

c. Masih kurangnya tenaga perpustakaan terutama sekali pada perpustakaan sekolah, karena terbatasnya tenaga dengan latar belakang pendidikan perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

d. Belum dilaksanakannya pemilihan duta baca/bunda baca dan bunda literasi yang mendukung kegiatan penungkatan minat baca masyarakat

e. Belum optimalnya penelusuran koleksi perpustakaan umum daerah yang hilang maupun yang tidak dikembalikan

3. Urusan Kearsipan

a. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pembuatan dan penerimaan arsip.

b. Kurangnya sumber daya manusia arsiparis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan.

c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kualitas pelayanan, perlindungan dan penyelamatan kearsipan.

d. Belum maksimalnya pengawasan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.7
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Propinsi Kalsel 2025	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n +1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n +1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,00		12,00 / 57,12	12,50 / 59,50	13,00 / 61,88	13,50 / 64,26	82,34		13,00 / 61,88	13,50 / 64,26	Angka Konversi 4,76
2	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	49,00		12,70 / 60,45	12,80 / 60,93	12,90 / 61,40	13,00 / 61,88	49,77		12,90 / 61,40	13,00 / 61,88	Angka Konversi 4,76
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80 Nilai	82	84	86	81,08 (I) 84,37 (II)		84	86	
4	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan			600 orang	650	720	750	3.125		720	750	
5	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah			358 Judul	362	367	373	403		367	373	
6	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip			90,50 %	91,00 %	91,50 %	92,00	90,46		91,50 %	92,00	
7	Persentase arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	
8	Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9	Persentase Pengguna Layanan Penyedia informasi, akses dan layanan kearsipan			80 %	85 %	90 %	95 %	80 %		90 %	95 %	
10	Persentase Tingkat Perlindungan & Penyelamatan Arsip			25 %	25 %	25 %	25 %	-		25 %	25 %	
11	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK			0 berkas	1000 berkas	1000 berkas	1000 berkas	3.492 berkas		1000 berkas	1000 berkas	
12	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana			0 Arsip	10 Arsip	15 Arsip	15 arsip	5 arsip		15 Arsip	15 arsip	
13	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan			0 Arsip	0 Arsip	100 arsip	0 arsip	-		100 arsip	0 arsip	
14	Jumlah arsip statis yang dialih media			0 Arsip	20 Arsip	0 arsip	0 arsip	96 arsip		0 arsip	0 arsip	
15	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang			0 Arsip	0 Arsip	0 arsip	50 arsip	-		0 arsip	50 arsip	
16	Persentase arsip yang digunakan / di akses			0 %	35 %	35 %	35 %	-		35 %	35 %	
17	Jumlah Pengguna arsip yang bersifat tertutup			0 pengguna	7 pengguna	10 pengguna	15 pengguna	-		10 pengguna	15 pengguna	
18	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan			78,50 Nilai	79,00	79,50	80,00	82,54		79,50	80,00	
19	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
20	Persentase realisasi penyerapan keuangan perangkat daerah			90 %	90 %	90 %	90 %	89,30 %		90 %	90 %	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Persentase pengelolaan barang milik daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	-		100 %	100 %	
22	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD			100 %	100 %	100 %	100 %	-		100 %	100 %	
23	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
24	Persentase barang yang dibeli			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
25	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
26	Persentase barang yang dipelihara dengan baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERA

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Di Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggung jawab dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan kinerja organisasi antara lain:

2.3.1 Identifikasi Masalah Perpustakaan

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi serta berbasis inklusi sosial memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2) Masih rendahnya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan (tercetak dan terekam/digital) dengan populasi jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3) Diversifikasi pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih rendah.
4) Masih Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
5) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan keliling khususnya untuk untuk sekolah yang tidak bisa di akses dengan mobil perpustakaan keliling;
6) Sarana dan prasarana pendukung ruang layanan anak serta ruang baca dan diskusi dewasa yang kurang memadai
7) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.
8) Tampilan bangunan perpustakaan daerah yang berada di tengah kota sudah kurang estetik dan menarik minat pengunjung
9) Belum dilaksanakannya pemilihan duta baca, bunda baca dan bunda literasi sejak pandemi COVID-19
10) Masih belum optimalnya penelusuran koleksi perpustakaan baik yang rusak maupun yang hilang karena tidak dikembalikan

2.3.2 Identifikasi Masalah Kearsipan

Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun permasalahan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara,

antara lain:

1) Belum adanya diorama arsip sebagai sarana dalam pelayanan kearsipan untuk masyarakat.
2) Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3) Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
4) Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan;
5) Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
6) Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai
7) Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing OPD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
8) Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital; dan
9) Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang
10) Masih rendahnya penerapan aplikasi SRIKANDI dalam penciptaan arsip hampir disemua instansi guna pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana peraturan MenpanRB Nomor 679 Tahun 2020 dan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2023.
11) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kearsipan sebagaimana amanat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Kemudian Berdasarkan sasaran Renstra K/L, beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel 2.8.
Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambaat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perpustakaan Nasional RI			
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat ketercukupan Koleksi	Anggaran kurang memadai, layanan paket koleksi untuk masyarakat kurang memadai, SDM Pustakawan kurang	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Anggaran kurang memadai, SDM Pustakawan kurang	Peningkatan Jumlah SDM pengelola perpustakaan
		Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka	SDM IT belum memadai, Budaya kerja IT belum sempurna	Telah dibangunnya jaringan e library dan pendaftaran online serta server pada jaringan perpustakaan digital.
	Arsip Nasional RI			
2	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan	Masih rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan tersebut terhadap peraturan Perundang-undangan Kearsipan	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Pemerintah Daerah
3	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Peran Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa Kurang Optimal	Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya
4	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kualitas Pelayanan Kearsipan kepada Publik Masih Rendah	Telah dibangunnya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Adapun Rekomendasi dan sasaran rencana strategis yang harus ditindaklanjuti dalam rangka penguatan pengembangan perpustakaan dan kelembagaan kearsipan yaitu sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.9
RANCANGAN MATRIK RKPD 2025
PERMASALAHAN DAN SOLUSI DINAS PERPUSTAKAAN KAB. HSU

NO	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			Realisasi Target Kinerja 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan Daerah	SOLUSI
1	2			3	4	5	6
	17.	Perpustakaan					
		1	Nilai Budaya Literasi / Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	49,77 (skala 100) 10,46 (skala 20) (Kategori sedang)	Rasio pemerataan layanan perpustakaan dengan nilai 0,7107	Masih kurangnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan sebesar 29 %;	Optimalisasi pengembangan layanan perpustakaan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya penambahan jam layanan perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan digital, penambahan kapasitas akses jaringan internet pemustaka dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan serta mendorong kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa
					Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pemanfaatan Perpustakaan dengan nilai 15,68 %	Jumlah keterlibatan masyarakat yang masih rendah harus terus ditingkatkan.	Terus meningkatkan promosi, sosialisasi tentang keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan, serta menggalakkan pembudayaan kegemaran membaca dikalangan masyarakat. Juga mendorong para pegiat dan komunitas literasi untuk menciptakan berbagai kegiatan inovasi dalam dunia kepustakaan.
						Sarana dan prasarana pendukung bangunan perpustakaan daerah yang perlu di rehabilitasi	Melaksanakan pengecatan ulang bangunan perpustakaan umum daerah, perbaikan bagian bangunan yang mulai bocor, serta pengantian karpet dan gorden pada ruang layanan anak dan ruang baca dewasa
		2	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82,34 (skala 100) 17,30 (skala 20) (kategori Tinggi)	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan nilai 0,6392	Masih belum terpenuhinya ketercukupan koleksi perpustakaan yang hanya 63 % dari Standar Nasional Perpustakaan yang harus di tingkatkan	Penguatan Koleksi Perpustakaan uang up to date masih perlu ditingkatkan, begitu juga dengan penguatan koleksi digital agar lebih di optimalkan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Penambahan koleksi masih terus dilakukan baik dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBN serta hibah koleksi dari pihak ketiga. Penguatan penelusuran kurangnya koleksi baik yang disebabkan koleksi rusak maupun koleksi yang hilang karena tidak dikembalikan oleh pemustaka, dengan membentuk Tim Pelaksana Penelusuran

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

							Koleksi Perpustakaan Umum Daerah dengan melibatkan stackholder terkait
					Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan 44,74 %	Dari segi capaian kuantitas sudah memenuhi standar tetapi dari segi kualitas masih harus ditingkatkan	Koordinasi dan memberikan penguatan kelembagaan perpustakaan Kec/Desa, sekolah dan perpustakaan khusus agar dapat terlaksana dengan optimal sebagai wadah masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi serta penguatan dan replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
					Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan di perpustakaan : 403 judul / 678 eksemplar	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi lokal konten belum optimal.	Perlunya mendorong para penulis lokal dalam menyerahkan karya cetak dan karya rekam mereka ke perpustakaan agar dapat didayagunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
					Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan nilai 1 : 1.807	Dari segi kuantitas sudah memenuhi standar, akan tetapi dari segi kualitas masih kurang	Perlunya penambahan dan penetapan tenaga khusus pustakawan baik disekolah-sekolah maupun pemerintahan desa untuk pengelolaan perpustakaan sehingga perpustakaan dapat berjalan secara optimal sebagaimana fungsinya.
					Seminar tentang kepenulisan belum pernah dilaksanakan pasca COVID-19	Masih rendahnya budaya menulis, sehingga karya-karya tulisan mengenai lokal konten dan sejarah daerah belum terakomodir dan terfasilitasi sesuai ketentuan.	Mendorong masyarakat maupun penulis daerah ikut berperan aktif dalam mendorong budaya menulis tentang karya-karya daerah melalui kegiatan seminar kepenulisan, lomba karya tulis daerah dan maupun festifal literasi dan karya tulis.
					Pemilihan Duta Baca, Bunda Baca dan Bunda Literasi belum pernah dilaksanakan pasca COVID-19	Masih rendahnya budaya baca masyarakat	Perlunya peningkatan budaya baca masyarakat dengan melaksanakan pemilihan duta baca yang diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi masyarakat
	18.	**Kearsipan**					
		1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan	90,46 %	Jumlah arsip aktif, in aktif dan arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip :	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;	Optimalisasi penguatan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			akuntabilitas serta memori kolektif dan jati diri bangsa.		Masih rendahnya penggunaan aplikasi SRIKANDI	Belum optimalnya Penerapan aplikasi Srikandi, SIKN dan JIKN perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan SPBE di Hulu Sungai Utara	Guna pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi yang salah satu indikatornya adalah pelaksanaan arsip digital maka perlu dilaksanakan pengendalian, pengarahan dan evaluasi penerapan aplikasi SRIKANDI dalam 1 Tim Koordinasi
					Sudah ada pembinaan di 28 SKPD / 10 Kecamatan / 5 Kelurahan dan 50 Desa tentang pemanfaatan dan pelayanan arsip sesuai kebijakan	Masih rendahnya kesadaran stakeholder terkait untuk menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)	Masih diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan khususnya terkait penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Perlunya pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit / Pengawasan Kearsipan antar stackholder berkepentingan
					Jlh tenaga Arsiparis (4 org) utk di SKPD dan Desa hanya ada pengelola arsip	Kurangnya tenaga arsiparis di LKD dan tidak tersedianya arsiparis pada setiap SKPD dan pengelola kearsipan yang ada saat ini belum berlatar belakang pendidikan kearsipan.	Perlunya penambahan tenaga dan peningkatan SDM Kearsipan baik yang ada di Dinas Perpustakaan maupun yang ada di SKPD dan Desa melalui kegiatan Bimtek dan pendampingan pembinaan kearsipan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Perpustakaan merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut. Pada Prioritas peningkatan implementasi good governance, dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, Dinas Perpustakaan merencanakan Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota dan program pengelolaan arsip.

Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dengan sasaran Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, direncanakan Program Pembinaan perpustakaan dan program pelestarian naskah kuno, dengan adanya dua program tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta tertib adminsitrasi kearsipan.

Sesuai program nasional bidang perpustakaan, ada beberapa perubahan dengan kebijakan nasional yaitu tentang pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diharapkan nantinya semua perpustakaan yang ada di Indonesia dapat menerapkan program tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat, maka oleh karena itu perlunya kegiatan dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut kegiatan perpustakaan dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui perpustakaan dapat terwujud dengan baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan rencana kerja harus mengacu pada Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang harus disusun. Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya. Berikut kami paparkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.10
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara lembar dari

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100%	4.495.085.646	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	100%	4.853.852.696	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	20.158.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	20.158.500	
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.863.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.863.000	
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.326.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.326.000	
1.1.3	Koordinas dan penyusunan laporan capiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.969.500	Koordinas dan penyusunan laporan capiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.969.500	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	80 %	3.473.084.346	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	80 %	3.473.084.346	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Org/Bln	3.463.021.346	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Org/Bln	3.463.021.346	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.063.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.063.000	
1.3	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100 %	52.290.000	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100 %	62.290.000	
1.3.1	Pengadaaa pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	13.800.000	Pengadaaa pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	13.800.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	38.490.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	48.490.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	100 %	200.689.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	100 %	233.247.850.	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.027.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.027.400	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.636.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.636.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.320.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.320.800	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.289.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.789.950	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.878.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.872.700	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	6.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	6.900.000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	127.637.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	148.701.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Barang yang dibeli	100 %	92.610.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Barang yang dibeli	100 %	201.289.350	
1.5.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah unit kendaaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	Pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah unit kendaaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 Unit	120.000.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.680.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	2 Unit	34.680.000	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	71.930.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	180.609.350	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	452.957.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	484.367.200	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	127.255.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	158.665.600	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	325.701.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	325.701.600	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100 %	203.295.950	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100 %	239.415.450	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	37.394.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	37.394.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	54.213.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	90.332.500	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	7.432.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	7.432.500	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	94.276.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	94.276.000	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	9.980.450	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	9.980.450	
2.1	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,50 *)	236.295.700	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,00 **) 61,88	385.665.750	
		Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	55,00 *)			Kab. Hulu Sungai Utara	Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	12,90 **) 61.40		
	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	196.286.700	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	286.547.500	
2.1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	17 Peprustakaan	11.050.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	17 Peprustakaan	11.200.000	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten / Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya	3 Perpustakaan	10.900.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten / Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya	3 Perpustakaan	10.900.000	
2.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	87.863.200	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	93.960.000	
2.1.4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Derah Kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga peroustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten / Kota	30 Orang	22.531.500	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Derah Kabupaten / Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga peroustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten / Kota	30 Orang	64.145.500	
2.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,	3 Dokumen	10.550.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,	3 Dokumen	15.550.000	
2.1.6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	375 Eksemplar	53.392.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	745 Eksemplar	112.642.000	
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	700 Orang	40.009.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	700 Orang	99.118.250	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2.1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Duta Baca / Bunda Baca / Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	6.925.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	5 Orang	88.120.250	
2.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan	8.589.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan	9.949.000	
2.2.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	13 Orang	14.995.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	28 Orang	24.850.000	
2.2.4	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Locus	9.500.000	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Locus	35.549.000	
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 Naskah	4.050.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 Naskah	4.680.000	
		Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	511 Judul			Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	511 Judul		
3.1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	25 Judul	4.050.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	25 Judul	4.680.000	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.1.1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	10 eksemplar	4.050.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	10 eksemplar	4.680.000	
4	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	91,00 % *)	184.930.400	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	91,50 % **)	309.760.650	
4.1	Pengelola arsip dinamis daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip dinamis yang dipeliharan dan dikelola	90 %	97.714.500	Pengelola arsip dinamis daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip dinamis yang dipeliharan dan dikelola	90 %	84.102.650	
4.1.1	Penciptaan & Penggunaan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	500 Berkas	40.549.750	Penciptaan & Penggunaan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	500 Berkas	73.015.950	
4.1.2	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 Berkas	11.495.250	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 Berkas	7.197.400	
4.1.3	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Laporan	45.669.500	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Laporan	58.089.300	
4.2	Pengelolaan arsip statis daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	90 %	19.994.800	Pengelolaan arsip statis daerah	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	90 %	77.785.350	
4.2.1	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	19.994.800	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	77.785.350	
4.3	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	90 %	67.221.100	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	90 %	147.872.650	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.3.1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 Pengguna	21.542.000	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 Pengguna	38.997.750	
4.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab /Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pemberdyaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	1 Laporan	45.679.100	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab /Kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Laporan Hasil Pemberdyaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	1 Laporan	108.874.900	
5.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	25 %	10.741.850	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentasi Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	25 %	11.144.250	
5.1	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten	15 arsip	10.741.850	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten	15 arsip	11.144.250	
5.1.1	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	10.741.850	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	11.144.250	
TOTAL PAGU ANGGARAN					**4.931.103.596**	**TOTAL PAGU ANGGARAN**				**5.700.503.346**	

Keterangan :

*) : Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2024

**) : Nilai pada renstra 2023-2036

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan dengan adanya kamus usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara per Hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2024, ada 57 (*Lima Puluh Tujuh*) usulan masyarakat yang diverifikasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan. Melalui berbagai pembahasan dan rapat antar stakeholder yang mempunyai kewenangan, maka usulan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan plavon anggaran 2025. Adapun usulan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pembinaan Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,50 *)	
			Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	55,00 *)	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	700 orang	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Hulu Sungai Utara	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	13 Perpustakaan	
1	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Gedung Bulu Tangkis Desa Palimbangan RT.003, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Null
2	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
3	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Babirik Hulu RT.001 Sampai RT.004 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
4	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Tangkawang, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke Skpd
5	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Teluk Haur, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke Skpd

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Bebrasis Inklusi Sosial		
6	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Jingah Bujur Rt 03, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
7	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Sungai Limas Rt. 02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
8	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Waringin, RT. 001 S/D 004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
9	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Tambak Sari Panji Rt.02 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
10	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Hambuku Lima Rt.001-004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Teruskan Ke SKPD
11	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Sungai Durait Tengah Rt.001-006, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
12	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Sungai Luang Hulu Rt.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
13	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Hambuku Hilir, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
14	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Sungai Janjam RT.001-004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
15	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Desa Sungai Janjam Rt.001-004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
16	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Jl.Keramat Desa Pakacangan Rt.001-Rt.006 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
17	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Jl.Keramat Desa Pakacangan Rt.001-Rt.006 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Utara, Kab. Hulu Sungai Utara			
18	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Jl.Keramat Desa Pakacangan Rt.001-Rt.006 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
19	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Murung Panti Hilir, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
20	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Sungai Luang Hilir Rt.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
21	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Murung Panti Hulu Rt.001-007, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
22	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Habuku Baru Rt.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
23	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Desa Hambuku Baru Rt.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
24	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Hambuku Baru Rt.001-005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
25	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Teluk Daun, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
26	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Muara Baruh Rt,01, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
27	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Teluk Daun, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
28	4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pembuatan Buket)	Desa Panangkalaan Kab. Huli Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
29	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Babirik Hilir Rt.001-003, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Desa Babirik Hilir Rt.001-003, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
31	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Beringin Rt.001 - Rt.004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
32	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Pawalutan, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD
33	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Jl.Putera Setia Rt.003 Desa Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD
34	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Sungai Papuyu Rt.001-006, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Kepada Skpd
35	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Pajukungan Hilir Rt.001-004, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
36	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Bajawit, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Rekomendasi Kecamatan
37	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Kota Raja, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Moon Teruskan Kepada SKPD Terkait
38	4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pembuatan Buket)	Desa Kota Raja, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Di Kota Raja Bumdesnya Sudah Ada , Dan Usahanya Salah Satunya Bergerak Dibidang Catring . Maka Kami Turun Mohonkan Agar Dapat Diteruskan Pada Instansi Terkait
39	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Murung Karangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan
40	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Murung Karangan , Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Cangkering, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Dieruskan Pada SKPD Terkait
42	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Telaga Hanyar, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
43	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Desa Teluk Baru, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
44	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Telaga Silaba, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
45	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Pulau Tabak, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Pada SKPD Terkait
46	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	RT.01 Sd RT.08, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
47	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Banyu Hirang, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
48	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Cempaka, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Mohon Diteruskan Pada SKPD Terkait
49	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Desa Banjang Rt.02, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD
50	5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Pangkas Rambut)	Kaludan Kecil RT 005, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD
51	2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Rias)	Jl. Simpang Tiga Rt. 02 Desa Galagah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Agar Dapat Meningkatkan Keterampilan Warga. Usulan Yang Sangat Layak Untuk Bisa Ditindaklanjuti Dan Diteruskan Ke Dinas Terkait
52	3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Tata Boga)	Kantor Desa Teluk Sarikat, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Bebrasis Inklusi Sosial		
53	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Perpustakaan Berkah Ilmu Rt02, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Kegiatan Ini Sangat Penting Utuk Menunjang Peningkatan Sumberdaya Manusia. Diteruskan Ke SKPD.
54	1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Kreasi Anyaman)	Desa Murung Padang, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bebrasis Inklusi Sosial	1 Kegiatan	Diteruskan Ke SKPD
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kab/kota	Hulu Sungai Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 layanan	
1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota (Story Telling)	Desa murung karangan kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Kegiatan	Diteruskan
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota (Story Telling)	Teluk Daun, Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Kegiatan	Diteruskan
3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota (Story Telling)	Jl. Majakalait, Sungai Turak Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Kegiatan	Diteruskan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Keterangan :

*) : Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2024

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi-Misi Presiden Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju : “Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” diterjemahkan dalam 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2025, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
2. Pembangunan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrasturktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 Agenda Pembangunan tersebut Dinas Perpustakaan memiliki keterkaitan dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Sasaran dan indikator dalam pelaksanaaan Program Prioiritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

untuk mencapai yaitu bahwa dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta Melakukan revolusi karakter bangsa dengan melaksanakan program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut, perlu keselarasan dengan program dan kegiatan pada Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI.

a. Bidang Perpustakaan

- Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar membaca, Perpusnas RI memberikan fasilitas pembangunan Perpustakaan model tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, dan fasilitas perpustakaan keliling serta fasilitas pengembangan perpustakaan umum desa/ kelurahan.

  Kegiatan tersebut selaras dengan kegiatan Dinas Perpustakaan dengan diadakannya layanan perpustakaan daerah, layanan perpustakaan keliling, serta pembinaan dan peningkatan minat baca pada semua lapisan masyarakat, dengan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

menghadirkan kembali kegiatan pemilihan duta baca, bunda baca dan penetapan Bunda Literasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perpustakaan, teknis perpustakaan, manajemen perpustakaan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan diadakannya Bimbingan teknis untuk Pengelola Perpustakaan Desa pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi, salah satunya kegiatan adalah peningkatan jam layanan perpustakaan umum daerah (lembur kerja layanan perpustakaan) serta peningkatan kenyamanan layanan perpustakaan dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor khususnya ruang layanan anak dan ruang baca dan diskusi dewasa di perpustakaan umum daerah.
- Peningkatan kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi dengan memaksimalkan layanan perpustakaan digital iHSU, yaitu dengan penambahan koleksi digital.
- pengembangan koleksi daerah harus dapat diakomodir sebagai upaya penyelamatan lokal konten sebagai sebuah kekhasan budaya local yang dapat terpelihara dengan baik. Disinilah peran perpustakaan hadir untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat peradaban daerah dan pusat informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Peningkatan promosi, publikasi dan event-event yang bertajuk pengembangan minat baca harus dapat dilaksanakan sebagai upaya pemasyarakatan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, karena tanpa adanya publikasi dan promosi perpustakaan, lama kelamaan perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakanya.
- Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah salah satu upaya berbasis inklusi adalah program nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi angka kemiskinan.

b. Bidang Kearsipan

- Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis,pengelola kearsipan, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui Bimtek Kearsipan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Utara dengan peserta dari seluruh SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depo Arsip untuk

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

penyimpanan. Dalam hal ini Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki depo arsip berlantai 2 untuk penyimpanan arsip daerah, akan tetapi kondisinya sekarang sudah tidak memadai karena ruang penyimpanan yang ada sudah penuh, kedepannya kami mengharapkan ada pembangunan Depo Arsip yang lebih lega.

- Upaya peningkatan pengembangan di bidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun *e*-arsip dengan mengimplementasikan SIKD dan SIKN untuk mendukung birokrasi modern.

Atas dasar keselarasan tersebut di atas, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.

3.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROPINSI

Dalam konteks pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat Propinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Meningkatkan daya saing manusia yang cerdas dan terampil melalui kesadaran untuk melakukan meningkatkan minat baca, dengan target indikator sasaran berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan melakukan kometmen menerapkan NSPK Kearsipan dan Perpustakaan yang berorintasi Layanan Publik, dengan target indikator sasaran yakni Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip.

Dan akan dicapai dengan melakukan arah dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan baik yang konvensional maupun melalui teknologi informasi digital
2. Meningkatnya koleksi perpustakaan
3. Meningkatnya ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan
4. Meningkatnya Jumlah Kunjungan
5. Meningkatnya perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan (SNP)
6. Melaksanakan kegiatan yang dapat menggugah masyarakat untuk dating ke Perpustakaan melalui Sosialisasi, Rakor, Bimtek, Webinar, Lomba-lomba dan roadshow ke Kabupaten/Kota

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7. Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan
8. Penciptaan dan Penggunaan arsip dinamis
9. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
10. Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
11. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai Renstra Dinas Perpustakaan 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembaungan Daerah (RPD) 2023-2026, maka rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renja SKPD Dinas Perpustakaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS PERPUSTAKAAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan RPD : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Peningkatan tata kelola dan manajemen kualitas pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Terpenuhinya administrasi keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana penunjang perangkat daerah
Tujuan RPD : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Sasaran RPD : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan			
Meningkatkan budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
			Peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah sesuai perkembangan teknologi informasi
			Peningkatan koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat
			Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Penelusuran Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara	Terlaksananya seleksi naskah kuno dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara
Tujuan RPD : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
Meningkatkan kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatnya kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Pengelolaan, perlindungan, dan Penyelamatan Arsip	Terkelolanya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan juga mengacu kepada sasaran prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah, maka pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 4.931.103.596,- terdiri dari 5 Program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan, adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
   5. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyedian gaji dan tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   4. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
   5. *Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*
4) Administrasi umum perangkat daerah
   1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   2. Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
   3. Penyediaan peralatan rumah tangga
   4. Penyedian bahan logistik kantor
   5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   6. Fasilitasi kunjungan tamu
   7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
   2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
2. *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan*
2. *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional atau lapangan*
3. *Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya*
4. *Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya*
5. *Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.*

2. Program Pembinaan Perpustakaan

1) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota

1. *Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan*
2. *Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota*
3. *Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota*
4. *Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota*
5. *Penyusunan data dan informasi perpustakaan*
6. *Pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan*

2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota

1. *Pemilihan duta baca / bunda baca / bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota*
2. *Pengembangan literasi berbasis inklusi social*
3. *Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca*
4. *Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat*

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. *Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara*

4. Program Pengelolaan Arsip

1. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota

1. *Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis*
2. *Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis*
3. *Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota*

2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1. *Akusisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis*

3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota
   1. *Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN*
   2. *Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan layanan kearsipan daerah kabupaten/kota*

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten
   1. *Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana.*

Adapun Program/Kegiatan/Subkegiatan rumusan perencanaan Dinas Perpustakaan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 3.2
Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

lembar dari

Kode	urusan / bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SEKRETARIAT								
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Hulu Sungai Utara	100%	4.495.085.646			100%	3.267.541.548
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Hulu Sungai Utara	100%	20.158.500			100%	13.500.000
2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	3 Dokumen	6.863.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	3.000.000
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hulu Sungai Utara	2 Dokumen	3.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	3.000.000
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hulu Sungai Utara	10 Laporan	9.969.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Laporan	7.500.000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	80 %	3.473.084.346			90%	2.686.434.850
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hulu Sungai Utara	308 orang/ bulan	3.463.021.346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 orang/ bulan	2.685.434.850
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hulu Sungai Utara	2 Laporan	10.063.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	1,000,000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah		-	-			100%	1.000.000
2.23.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 laporan	500.000
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	500.000
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	Hulu Sungai Utara	100 %	52.290.000			100%	10.500.000
2.23.01.2.05.02	Pengadaaa pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Hulu Sungai Utara	1 paket	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2.23.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	500.000
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hulu Sungai Utara	5 orang	38.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 orang	10,000,000
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Hulu Sungai Utara	100%	200.689.850			100%	115.106.698
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	2 Paket	12.027.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	5.000.000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	5.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	7,000,000
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	7.320.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	6.500.000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	2 Paket	15.289.950	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	25.106.698
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	25.878.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	15.000.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hulu Sungai Utara	3 laporan	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 laporan	6.500.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hulu Sungai Utara	17 Laporan	127.637.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Laporan	50.000.000
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang dibeli	Hulu Sungai Utara	100%	92.610.000			100%	33.000.000
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 unit	10,000,000
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 unit	20.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 unit	15.000,000
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 unit	71.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 unit	8.000,000
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hulu Sungai Utara	100 %	452.957.000			100%	337.000.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	36 Laporan	127.255.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	122.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	12 Laporan	325.701.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	215.000.000
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	Hulu Sungai Utara	100 %	203.295.950			100%	71.000.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hulu Sungai Utara	10 unit	37.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 unit	25.000.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hulu Sungai Utara	4 Unit	54.213.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Unit	32.500.000
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hulu Sungai Utara	34 unit	7.432.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 unit	8.000.000
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hulu Sungai Utara	1 unit	94.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hulu Sungai Utara	25 Unit	9.980.450	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Unit	5.500.000
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Hulu Sungai Utara	70,50 *)	236.295.700			13,50 / 64,26 **)	485.000.000
		Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca		55,00 *)				13,00 / 61,88 **)	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hulu Sungai Utara	84,00	196.286.700			86,00	350.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 (ITSM : Informastion Tecnology Service Management)	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Layanan	20.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Hulu Sungai Utara	3 Perpustakaan	10.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Perpustakaan	10.000.000
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	17 perpustakaan	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		17 perpustakaan	20.000.000
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 perpustakaan	20.000.000
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	30 Orang	22.531.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	30.000.000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan	Hulu Sungai Utara	4 Layanan	87.863.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Layanan	125.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi							
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	375 Eksemplar	53.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		800 Eksemplar	115.000.000
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	3 Dokumen	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	10.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	700	40.009.000			750	135.000.000
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	Hulu Sungai Utara	1 Locus	9.500..000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		17 Locus	25.000.000
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Hulu Sungai Utara	13 orang	14.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 orang	15.000.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Hulu Sungai Utara	20 Perpustakaan	8.589.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Perpustakaan	85.000.000
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Hulu Sungai Utara	1 orang	6.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 orang	10.000.000
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Hulu Sungai Utara	1 naskah	4.050.000			1 naskah	15.000.000
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)		511 judul				373 judul	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Hulu Sungai Utara	25 judul	4.050.000			373 Judul	15.000.000
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Hulu Sungai Utara	10 Eksemplar	4.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 eksemplar	15.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	Hulu Sungai Utara	91.00 % *)	184.930.400			90,50 % **)	400.000.000
2.24.02.2.01	Pengelola arsip dinamis daerah	Persentase arsip dinamis yang dipeliharan dan dikelola	Hulu Sungai Utara	90%	97.714.500			95%	250.000.000
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Hulu Sungai Utara	500 Berkas	40.549.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		125 berkas	-
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Hulu Sungai Utara	50 Berkas	11.495.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		0 Berkas	125.000.000
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	14 Laporan	45.669.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		20 Laporan	125.000.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan arsip statis daerah	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	Hulu Sungai Utara	90%	19.994.800			95%	75.000.000
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Hulu Sungai Utara	50 Arsip	19.994.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Arsip	75.000.000
2.24.02.2.03	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Hulu Sungai Utara	90%	67.221.100			95%	75.000.000
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Hulu Sungai Utara	15 Pengguna	21.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Pengguna	75.000.000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Jumlah laporan hasil Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	1 Laporan	45.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Laporan	-
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentasi Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Hulu Sungai Utara	25%	10.741.850			25 %	100.000.000
2.24.03.2.01	Pemusnahan arsip dilakukan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Hulu Sungai Utara	-	-			1.000 berkas	65.000.000
2.24.03.2.01.01	Penilaiaan, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1000 Berkas	65.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten	Hulu Sungai Utara	15 arsip	10.741.850			15 arsip	35.000.000
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah arsip yang dilakukan Evakuasi dan identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		-	35.000.000
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Hulu Sungai Utara	15 Arsip	10.741.850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase jumlah arsip yang digunakan	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		35 %	50.000.000
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten	Jumlah pengguna arsip yang bersifat tertutup di kabupaten	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Pengguna	50.000.000
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		SOP	30.000.000
2.24.04.2.01.02	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Hasil Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Hulu Sungai Utara	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Arsip	20.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN					**4.931.103.596**		**TOTAL PAGU ANGGARAN**		**4.317.541.548**

Keterangan :

*) : Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2024

**) : Nilai pada renstra 2023-2036

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan juga mengacu kepada sasaran prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.931.103.596,-** terdiri dari **5** Program, **14** kegiatan dan **41** sub kegiatan, adapun rincian program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
      2. *Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*
      3. *Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*
   2) Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) *Penyedian gaji dan tunjangan ASN*
      2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
   3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
      1. *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya*
      2. *Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*
   4) Administrasi umum perangkat daerah
      1. *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*
      2. *Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor*
      3. *Penyediaan peralatan rumah tangga*
      4. *Penyedian bahan logistik kantor*
      5. *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*
      6. *Fasilitasi kunjungan tamu*
      7. *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. *Pengadaan peralatan dan mesin lainnya*
      2. *Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya*
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
      2. *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan*
2. *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional atau lapangan*
3. *Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya*
4. *Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya*
5. *Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.*

2. Program Pembinaan Perpustakaan

1) Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota

1. *Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan*
2. *Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota*
3. *Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota*
4. *Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota*
5. *Penyusunan data dan informasi perpustakaan*
6. *Pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan*

2) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota

5. *Pemilihan duta baca / bunda baca / bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota*
6. *Pengembangan literasi berbasis inklusi social*
7. *Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca*
8. *Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat*

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. *Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara*

4. Program Pengelolaan Arsip

1. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
   1. *Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis*
   2. *Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis*
   3. *Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota*
2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
   1. *Akusisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis*

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota
    1. *Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN*
    2. *Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan layanan kearsipan daerah kabupaten/kota*

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten
    1. *Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana.*

4.2. PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan gender adalah adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan para pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembangunan serta selalu mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang. Pada tataran masyarakat juga mensyaratkan ketersediaan data yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing wilayah.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung responsif gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui kegiatan yang direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Dalam upaya untuk memenuhi perencanaan penganggaran program dan kegiatan Dinas Perpustakaan yang responsif gender, maka pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang akan datang ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disiapkan, diantaranya :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
    - Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
        - Sub Kegiatan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
  - Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

2. Program Pengelolaan Arsip
   - Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Penciptaan & Penggunaan arsip dinamis
     - Sub Kegiatan Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/Kota
   - Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   - Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/ kota
     - Sub Kegiatan Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana

DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

lembar dari

Kode	urusan / bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Hulu Sungai Utara	100%	4.495.085.646		
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Hulu Sungai Utara	100%	20.158.500		
2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	3 Dokumen	6.863.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hulu Sungai Utara	2 Dokumen	3.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.01.06	Koordinas dan penyusunan laporan capiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hulu Sungai Utara	10 Laporan	9.969.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	Hulu Sungai Utara	80%	3.473.084.346		
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hulu Sungai Utara	308 orang/ bulan	3.463.021.346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hulu Sungai Utara	2 Laporan	10.063.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	Hulu Sungai Utara	100%	52.290.000		

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.01.2.05.02	Pengadaaa pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Hulu Sungai Utara	1 paket	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hulu Sungai Utara	5 orang	38.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersedian barang dan jasa pelayanan umum kantor	Hulu Sungai Utara	100%	200.689.850		
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	2 Paket	12.027.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	5.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	7.320.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	2 Paket	15.289.950	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Paket	25.878.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hulu Sungai Utara	3 laporan	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hulu Sungai Utara	17 Laporan	127.637.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang dibeli	Hulu Sungai Utara	100%	92.610.000		
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 unit	20.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	1 Unit	71.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hulu Sungai Utara	100%	452.957.000		

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	36 Laporan	127.255.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hulu Sungai Utara	12 Laporan	325.701.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	Hulu Sungai Utara	100%	203.295.950		
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hulu Sungai Utara	10 unit	37.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hulu Sungai Utara	4 Unit	54.213.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hulu Sungai Utara	34 unit	7.432.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hulu Sungai Utara	1 unit	94.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hulu Sungai Utara	25 Unit	9.980.450	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Hulu Sungai Utara	70,50 *)	236.295.700		
		Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca		55,00 *)			
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hulu Sungai Utara	84,00	196.286.700		
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Hulu Sungai Utara	3 Perpustakaan	10.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	17 perpustakaan	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	30 Orang	22.531.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Hulu Sungai Utara	4 Layanan	87.863.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	375 Eksemplar	53.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	3 Dokumen	10.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan	Hulu Sungai Utara	700	40.009.000		
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	Hulu Sungai Utara	1 Locus	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Hulu Sungai Utara	13 orang	14.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Hulu Sungai Utara	20 Perpustakaan	8.589.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/bunda baca/bunda literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Hulu Sungai Utara	1 orang	6.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Hulu Sungai Utara	1 naskah	4.050.000		
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)		511 judul			
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Hulu Sungai Utara	25 judul	4.050.000		

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Hulu Sungai Utara	10 Eksemplar	4.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentasi tingkat ketersedian Arsip	Hulu Sungai Utara	91,00 % *)	184.930.400		
2.24.02.2.01	Pengelola arsip dinamis daerah	Persentase arsip dinamis yang dipeliharan dan dikelola	Hulu Sungai Utara	90 %	97.714.500		
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Hulu Sungai Utara	500 berkas	40.549.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Hulu Sungai Utara	50 Berkas	11.495.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Hulu Sungai Utara	14 Laporan	45.669.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.02.2.02	Pengelolaan arsip statis daerah	Persentase arsip terjaga dam arsip statis yang dibuatkan daftarnya	Hulu Sungai Utara	90%	19.994.800		
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Hulu Sungai Utara	50 Arsip	19.994.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.02.2.03	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Hulu Sungai Utara	90 %	67.221.100		
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Hulu Sungai Utara	15 Pengguna	21.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unti kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Hulu Sungai Utara	1 Laporan	45.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentasi Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Hulu Sungai Utara	25%	10.741.850		
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten	Hulu Sungai Utara	15 arsip	10.741.850		
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Hulu Sungai Utara	15 Arsip	10.741.850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
TOTAL PAGU ANGGARAN					**4.931.103.596**		

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dilandasi dengan Visi dan Misi dalam upaya membina dan mengembangkan sektor Perpustakaan dan Kearsipan sehingga terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Utara Gemar Membaca Serta Terkelolanya Manajemen Arsip Secara Dinamis dan Profesional.

Dari capaian dan analisa kinerja diperlukan peningkatan terutama fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan, serta terselenggaranya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar Bagian Kesekretariatan dan Bagian-Bagian lainnya pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun dengan Instansi/Dinas/Lembaga terkait lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai antisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 adalah :

- ✓ Meningkatkan kinerja personal Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya komitmen, integritas dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai moto ASN Berakhlak
- ✓ Meningkatkan kesatuan persepsi dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi baik internal maupun eksternal dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- ✓ Melanjutkan Program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- ✓ Perlunya dukungan dana untuk menunjang Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan serta sasaran dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami buat untuk diketahui, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita sekalian.

Amuntai, Maret 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN

H. KARYANADI, S.Pd, M.AP.
Pembina
NIP. 197107031998031010

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026. Rencana ini akan menjadi acuan dan kerangka dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta memudahkan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, April 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 .	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kab. HSU dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.....	II-4
Tabel II.2	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023.....	II-13
Tabel II.3	Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-16
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-21
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	II-23
Tabel II.6	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023	II-30
Tabel II.7	Hasil penyesuaian target indikator Kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah Provinsi dan Nasional bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	II-34
Tabel II.8	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kabupaten HSU.....	II-40
Tabel II.9	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten HSU.....	II-42
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	III-2
Tabel III.2	Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025.....	III-5

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel III.3 Target Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025..... III-7

Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026..... IV-5

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik, efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua stakeholder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga target-target yang akan dicapai telah terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk penyempurnaan RKPD, dan untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Renstra SKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU tahun 2025 yang mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD Tahun 2025. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah di bidang Sosial Budaya yang diprioritaskan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting; Menurunnya angka kemiskinan; Pemerataan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak; Penurunan angka pernikahan anak; Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran.
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   h. Perumusan kegiatan prioritas.
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
   j. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 – 2026.
25. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.
26. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program – program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 - 2026.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan usulan program sebanyak 3 dengan 9 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   3. Penyediaan Bahan/Material
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
5. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
   1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
   2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATPOLPP DAN DAMKAR KAB. HULU SUNGAI UTARA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah*	*100%*	-	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 Orang/Bulan	-	812 Orang/Bulan	637 Orang/Bulan	78,42%	812 Orang/Bulan	812 Orang/Bulan	100%
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	-	32 Paket	29 Paket	90,62%	32 Paket	32 Paket	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	55 Jenis	-	40 Paket	35 Paket	87,50%	55 Jenis	55 Jenis	100%
		(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	-	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	22 Laporan	100%
		(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-							
		(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	-	46 Laporan	46 Laporan	100%	46 Laporan	46 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase terpeliharanya barang milik daerah***	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**-**

		(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100%	29 Unit	29 Unit	100%
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**	**100%**	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum***	***100%***		***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	-	144 Kasus	144 Kasus	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

		(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	-	150 Kasus	150 Kasus	100%	12 laporan	12 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	-	1 Orang	1 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
		(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***	***-***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***

		(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**	-	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		(Kegiatan) Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran***	***100%***	**-**	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
		(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

		/ Kota	dalam Daerah Kabupaten / Kota								
		(Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen -	100%	1 Dokumen	1 Dokumen -	100%
		(Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	-	Unit	Unit	%	Unit	Unit	100%
		(Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Untuk capaian hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pertama Renstra Satpol PP dan Damkar (Tahun 2023) cukup berhasil dengan baik.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis SKPD, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan/ kegagalan SKPD menjalankan misinya.

Pada dasarnya kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, yaitu urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan lingkup pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan Perda; dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mencakup Seksi Operasional, pengendalian dan Kerjasama; dan Seksi Pengamanan dan Pengawalan
3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang mencakup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi dan Partisipasi Masyarakat; dan Seksi Pencegahan, Pemulihan, Penanganan dan Pengendalian kebakaran.

Dalam tahun anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara
4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.2. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (80,62 point)	A* (81,12 point)	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan (%)	100	100	100%
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani (%)	100	90,57	90,57%
4.	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km (%)	96	100	100%

Catatan : Bertanda bintang (*) Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2023 adalah cukup berhasil.

Berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2023 :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel

a. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pencapaian Indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori ”A”. Untuk Penilaian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dijadwalkan tahun 2024 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2023 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2022, dimana nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah kategori ”A” dengan nilai 81,12.

2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

❖ Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan

Tingkat capaian kinerja untuk Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan secara umum dapat dicapai. Dari target yang ditetapkan 100% terealisasi sebesar 100% sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 100%. Dengan penjelasan jumlah perda / perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berjumlah 10 perda dari target jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi sebanyak 10 perda. Penanganan pelanggaran perda/perkada ditangani secara non yustisi, dengan memberikan surat pernyataan dan surat peringatan (SP), sesuai SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Peraturan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kuantitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib dilaksanakan.

3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Hulu Sungai Utara

❖ Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani

Pencapaian Indikator kinerja untuk Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani secara umum dapat tercapai, dari target yang ditetapkan 100 % terealisasi sebesar 90,57%, dimana persentase pencapaian kinerja sebesar 90,57%. Dengan penjelasan Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi atau dilaporkan pada tahun 2023 sebanyak 806 pengaduan, dari jumlah tersebut yang dapat ditangani dan diselesaikan sebanyak 730 pengaduan atau 90,57%. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan penertiban terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah, masih rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta diperparah dengan jumlah PKL liar yang terus bertambah. Pelaksanaan penanganan kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

trantib dilakukan atas dasar hasil temuan dari deteksi dini yaitu giat patroli dan laporan masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengawasan, yang dilakukan sesuai dengan SOP Satpol PP dan Damkar.

4. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat Terhadap Musibah Kebakaran

- Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km

Indikator kinerja untuk Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km dari target 96% terealisasi sebesar 100%, dimana target capaian kinerjanya mencapai 100%.

Hal ini dijelaskan dari jumlah musibah kebakaran yag terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebanyak 29 kali kejadian kebakaran dapat terlayani 100% dalam waktu tanggap (response time rate). Target dapat tercapai karena disetiap wilayah kecamatan terdapat BPK binaan Satpol PP dan Damkar yang stand by (siap) 24 jam sehingga upaya penyelamatan dan pemadaman bisa berjalan secara optimal.

Untuk mendukung sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh beberapa sasaran program yang ada di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta , Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

II.3 Tabel Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan pelanggaran perda/Perbup	100%	100%	100%	**Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per Undang-undangan Daerah**
2.	Terlaksananya pengawasan yang dlakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda
3.	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	100%	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	1 Laporan	1 Laporan	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Perkada	terlayani				
5.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
		Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	
6.	Terlaksananya penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	150 Kasus	150 Kasus	100%	Kepala Seksi Operasional Pengendalian, Kerjasama dan Bina Potensi
7.	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	1 orang	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	144 Kasus	144 Kasus	100%	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan
9.	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan pelayanan kebakaran	Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran**
		Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	
10.	Tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11.	Tersedianya Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM pencegahan /penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kepala Seksi Pencegahan, Pemulihan, penanganan dan Pengendalian Kebakaran
12.	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%	

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	90,57%	-	100%	100%	
3	Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km	-	-	96%	96%	96%	96%	100%	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Memasuki tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target Renstra 2023-2026 sebesar 100%, untuk pencapaian indikator Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani adalah sebesar 90,57% atau 91% dari target Renstra 2023-2026 sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran Dalam Radius 10 Km pada tahun 2023 tercapai sebesar 100% dari target Renstra 2023-2026 sebesar 96%.

Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik melalui upaya meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang terkait ketentraman dan ketertiban umum secara lebih intensif, melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam upaya-upaya pendekatan dimasyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keindahan sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud. Melakukan patroli dalam kota dan wilayah kecamatan-kecamatan dilingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Melakukan sosialisasi dan himbauan secara lebih intensif tentang risiko bahaya kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran.

Untuk capaian indikator kinerja program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2023 cukup berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai, hal ini dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja program dan kegiatan berikut ini :

Tabel II.5. Capaian Realisasi Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terwjudnya penyelenggaraan Pemerintahan yng baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	**A (80,62 point)**	**A* (81,12 point)**	**100%**	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	100%	100
								(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100
								(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100
								(Kegiatan) Administrasi keuangan perangkat daerah	***Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah***	***100%***	100%	100

								(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	812 Orang / Bulan	637 Orang / Bulan	78,45
								(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapann ya	1 Paket	1 Paket	100
								(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat daerah	***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja***	***100%***	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	29 Paket	90,62
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	40 Paket	35 Paket	87,50
								(Sub Kegiatan) Penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar an rapat koordinasi dan konsultasi	22 Laporan	22 Laporan	**100**

									SKPD			
								(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	***Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***100***
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	46 Laporan	46 Laporan	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
								(Kegiatan) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	8 Unit	8 Unit	100

								operasional	Perizinannya			
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	28 Unit	100
								(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	-	-	-
2.	Mewujudkan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif	Jumlah kejadian berlatar belakang konflik SARA	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	100%	100%	100%	(Program) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100%	100%	100
								(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	***Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup***	***100%***	**100%**	**93,03**
								(Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100
								(Sub Kegiatan)	Jumlah	4 Laporan	4 Laporan	100

								Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			
			Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	100%	90,57%	90,57%	*(Kegiatan) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah*	*Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	*100%*	100%	100
								(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	144 kasus	144 Kasus	100
								(Sub Kegiatan) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	150 Kasus	150 Kasus	100

								penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
								(Sub Kegiatan) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
								(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	100
								(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	100
			Meningkatnya penanganan pelayanan	Respons Time Rate (Tingkat Waktu	96%	100%	100%	(Program) Pencegahan penanggulanga	Cakupan pelayanan bencana	100%	100%	100%

			tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km				n penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	kebakaran di Kabupaten / Kota			
								(Kegiatan) Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	***Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemadaan kebakaran***	***100%***	100%	100%
								(Sub Kegiatan) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
								(Sub Kegiatan) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten HSU Tahun 2023 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 7.550.816.290,- dan setelah mengalami revisi-revisi pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.186.802.590,-, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	**(PROGRAM) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**6.620.787.590,-**	***5.213.215.703,-***	***78,74***
1.	***(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***2.205.000,-***	***2.115.000,-***	***95,92***
a..	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	630.000,-	540.000,-	85,71
b.	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.575.000,-	1.575.000,-	100
2.	***(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***6.026.500.000,-***	***4.718.484.574***	***78,30***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.026.500.000,-	4.718.484.574	78,30
3.	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***162.150.000,-***	***142.634.000,-***	***87,96***
a.	(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	162.150.000,-	142.634.000,-	87,96
4.	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***108.021.510,-***	***90.420.275,-***	***83,71***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.023.110,-	8.965.500,-	74,57
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.681.100,-	17.903.775,-	86,57
c.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	18.837.300,-	10.542.000,-	55,96
d.	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.480.000,-	53.009.000,-	93,85
5.	***(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***127.539.480,-***	***122.917.054,-***	***96,38***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,-	1.950.000,-	100
b.	(Sub Kegiatan) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.397.480,-	45.839.866,-	90,96
c.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.192.000,-	75.127.188,-	99,91
6.	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***194.371.600,-***	***136.644.800,-***	***70,30***
a.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.871.600,-	132.754.800,-	70,66
b.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,-	3.890.000,-	59,85
c.	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
2)	**(PROGRAM) PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.343.640.000,-**	**1.336.530.082**	**99,47**
7.	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***	***1.202.265.000,-***	**1.195.155.082**	**99,41**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	975.400.000,-	972.790.000,-	99,73
b.	(Sub Kegiatan) Penindakan dan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	114.175.000,-	114.130.000,-	99,96
c.	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	35.325.000,-	33.650.000,-	95,26
d.	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	72.165.000,-	71.531.082,-	99,12
e.	(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.200.000,-	3.054.000,-	58,73
8.	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota***	***141.375.000,-***	***141.375.000,-***	***100***
a.	(Sub Kegiatan) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	129.500.000,-	129.500.000,-	100
b.	(Sub Kegiatan) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	11.875.000,-	11.875.000,-	100
3)	**(PROGRAM) PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN**	**222.375.000,-**	**186.905.000,-**	**84,05**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
9.	***(Kegiatan) Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***222.375.000,-***	***186.905.000,-***	***84,05***
a.	(Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.800.000,-	160.280.000,-	96,09
b.	(Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.575.000,-	25.625.000,-	46,11
Total Belanja		***8.186.802.590,-***	***6.735.650.785***	***82,27***

Dari tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 diatas menunjukan bahwa capaian kinerja realisasi keuangan masuk pada kategori tinggi dengan serapan mencapai 82,27%. Dari semua sub kegiatan ada 4 yang capaiannya rendah yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 46,11%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan capaian 55,96%
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 59,85%
4. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan capaian 58,73%

Dari 4 (empat) sub kegiatan yang realisasi anggarannya rendah disebabkan karena :

1. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan monitoring, pembinaan dan sosialisasi
2. Adanya perubahan sistem untuk belanja pembelian alat tulis kantor dan pengadaan barang lainnya yang semula dilakukan secara manual (belanja langsung) berubah ke sistem ekatalog

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Untuk peralatan kantor terpelihara sesuai kebutuhan
4. Tidak ada klaim dari orang yang dirugikan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Pelaksanaan operasi penertiban dan penegakkan Perda/Perkada sudah memenuhi atau mencakup mutu pelayanan dasar, dan tidak menimbulkan dampak kepada warga negara akibat penegakan Perda dan Perkada, sehingga tidak ada realisasi biaya untuk ganti rugi yang diberikan kepada warga negara baik pelayanan kerugian materil maupun pelayanan pengobatan.

Untuk hasil kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 Antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.7. Hasil penyesuaian target indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Nasional Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	552 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	
2	Terciptanya indeks penyelenggaraan sub urusan trntibum kategori “Baik “	552 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	
3	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	552 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	11 Daerah	-	11 Daerah	11 Daerah	

Catatan : 1 Kabupaten/Kota dan 10 Kecamatan (11 Daerah)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dan Damkar untuk tahun 2023 dapat dilihat bahwa :

1. Pencapaian indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan telah berhasil tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi sebesar 100%.
2. Pencapaian indikator kinerja Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani telah berhasil tercapai sebesar 90,57% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi sebesar 90,57%.
3. Pencapaian Indikator kinerja Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanganan Kebakaran dalam Radius 10 km telah berhasil tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan 96% realisasinya mencapai 100% .

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain :

- Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengoptimalkan potensinya, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Memberi pemahaman kepada anggota Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa substansi dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja.
- Mengupayakan pelaksanaan diklat fungsional bagi pegawai PNS untuk menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja, serta melakukan pendidikan dan pelatihan teknis serta bimbingan teknis untuk anggota trantibum dan anggota PPNS

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Peningkatan jalinan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tantangan yang harus dihadapi, meliputi tantangan Internal dan tantangan eksternal, yaitu :

1. Masih kurangnya personil (Tenaga Teknis Lapangan).
2. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
6. Tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan pada kawasan pemukiman yang cukup tinggi menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap kejadian bencana kebakaran.

Sedangkan peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi :

1. Tuntutan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan aturan semakin kuat, sehingga keperdulian dan partisipasi masyarakat diharapkan juga meningkat.
2. Adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur (Manusia).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Adanya produk – produk peraturan dan perundang – undangan terkait penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat semakin kuat.
4. Optimalisasi koordinasi antar instansi baik instansi vertikal maupun horizontal.
5. Banyaknya jumlah Kelompok BPK yang ada dimasyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demi mewujudkan keberhasilan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping memperhatikan strategi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat juga perlu penentuan isu-isu strategis SKPD, adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Kurangnya SDM dan PPNS penegak perda yang akan melaksanakan penegakkan hukum perda dan perkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kurangnya kesadaran / kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
3. Perlu memaksimalkan pelayanan terhadap warga Negara akibat dari penegakkan Hukum Perda dan Perkada di Kabupaten
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
5. Perlu peningkatan terhadap sarana dan prasarana Damkar dalam penanganan kebakaran
6. Perlunya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan bahaya kebakaran.
7. Perlunya pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arahan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tidak terlepas dari apa yang telah dituangkan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026. Selain itu arah pembangunan tentunya tidak terlepas dan berkesinambungan dengan yang dilaksanakan pada tahun berjalan ditahun 2024. Dalam aspek pemerintahan yakni terlaksananya berbagai urusan layanan umum, urusan wajib, urusan pilihan, dan berbagai urusan lainnya yang menjadi kewajiban daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan pemerintahan juga dengan mendorong adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kompetensi aparatur juga semakin ditingkatkan guna terciptanya perbaikan kinerja pemerintahan, terbinanya kelembagaan pemerintah, meningkatnya kinerja dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam rangka menjalani masa-masa transisi pemerintahan sampai terlaksana dan terpilihnya pimpinan daerah yang akan datang, serta terpeliharanya kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

Untuk Indikator Capaian Kinerja tahun 2025 yang diinginkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.8. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten HSU

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun	Capaian Akhir Periode
			2025	2026
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
	PELAYANAN URUSAN WAJIB			
A.	**Terkait Pelayanan Dasar**			
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	NA	1,4	1,4
5.2	Cakupan pelayanan Musibah kebakaran Kabupaten / Kota (%)	NA	100	100
5.3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) pelayanan kebakaran (%)	NA	96	96

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum
3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebanyak 3 Program sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Prioritas dan sasaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RKPD. Adapun Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 terarah pada :

1. Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Infrastruktur dasar, sarana prasarana pendidikan, Kesehatan dan konektivitas wilayah;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif;
5. Peningkatan pelayanan bencana, mitigasi bencana, Kualitas Lingkungan Hidup dan konsistensi tata ruang;
6. Penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.

Prioritas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan kualitas sosial budaya
2. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial budaya
3. Peningkatan pengelolaan bencana kebakaran

Adapun untuk Rencana kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.172.129.185,-.

Kemudian dari hasil analisis kebutuhan, dilihat dari beberapa permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga terkendala dengan masih minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan, baik untuk kegiatan patroli maupun pengamanan kantor dan rumah pejabat (Upah Jaga Piket).

Untuk Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berdasarkan dari Hasil Analisis Kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to Buy NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL II.9. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.	**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		
1)	***(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**		***(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**		
	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	1,575,000	- (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	1,575,000	
	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	1,800,000	- (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	1,800,000	
2)	***(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***		***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / bulan	7,235,759,144	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7,235,759,144	
3)	***(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*100%*		*(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	*100%*		

PDF-XChange Editor Click to Buy NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	162,150,000	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	162,150,000	
4)	***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	130,250,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Paket	130,250,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	20,601,000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Satpol pp & Damkar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	20,601,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan / Material	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	43 Paket	45,047,341	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	43 Paket	45,047,341	
	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	498,892,000	- (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten / Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	498,892,000	
5)	***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja**	***100%***		***(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Mebel	Satpol pp & Damkar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	
6)	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,442,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,442,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	46 Laporan	65,000,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	46 Laporan	65,000,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111,192,000	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp & Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111,192,000	
7)	***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		***(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	183,683,500	- (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp & Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	183,683,500	
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	10,000,000	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	30 Unit	10,000,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	817,200	- (Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp & Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	817,200	
II.	**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**100%**		**(Program) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**100%**		
8)	***(Kegiatan) Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman***	**100%**		***(Kegiatan) Penanganan Gangguan***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan***	**100%**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dalam 1 (satu) daerah		***dan Ketertiban Umum***			***ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah***		***Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***			
	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	91,430,000	(Sub Kegiatan) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	91,430,000	
	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manuasia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Orang	197,020,000	(Sub Kegiatan) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manuasia	Kab. HSU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Orang	197,020,000	
-	(Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrolii, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,365,590,000	- (Sub Kegiatan) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrolii, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	1,479,590,000	
-	(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	156,000,000	(Sub Kegiatan) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. HSU	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	156,000,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	19,200,000	(Sub Kegiatan) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	19,200,000	
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. HSU	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	10,000,000	(Sub Kegiatan) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	10,000,000	
9)	***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		***(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***		***Persentase Penegakan pelanggaran Perda/Perbup***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen SOP Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen	22,220,000	(Sub Kegiatan) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Kab. HSU	Jumlah dokumen SOP Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen	22,220,000	
	- (Sub Kegiatan) Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	24,825,000	- (Sub Kegiatan) Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	24,825,000	
	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	151,245,000	- (Sub Kegiatan) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	151,245,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan	59,795,000	- (Sub Kegiatan) Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	kab. HSU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan	59,795,000	
III.	**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		**(Program) Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**	**100%**		
10)	***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		***(Kegiatan) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / Kota***		***Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran***	***100%***		
	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	86,720,000	- (Sub Kegiatan) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	86,720,000	
	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	378,125,000	- (Sub Kegiatan) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Laporan	548,125,000	
	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	91,250,000	- (Sub Kegiatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	91,250,000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. HSU	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran	5 Orang	15,000,000	- (Sub Kegiatan) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran	5 Orang	15,000,000	
	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. HSU	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	31,500,000	- (Sub Kegiatan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	31,500,000	
Jumlah					**11,172,129,185**	**Jumlah**				**11,456,129,185**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari tabel II.9 tentang review rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat bahwa program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 3 program dengan 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sesuai Pagu Indikatif Penyesuaian sebesar Rp. 11.172.129.185,-.

Berdasarkan hasil reviu sesuai analisis kebutuhan dana, maka anggaran yang diperlukan untuk Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran di Tahun 2025 adalah sebesar *Rp. 11.456.129.185-,* penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar *Rp. 284.000.000,-.* pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan berupa upah pengamanan jaga piket rumah jabatan/kantor di usulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 114.000.000,-. Pada sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota diusulkan penambahan sebesar Rp. 170.000.000,- untuk belanja insentif Barisan Pemadam Kebakaran (Biaya BBM dan Pemeliharaan Mobil Pemadam) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan (Musrenbang) di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengakomodir usulan masyarakat dan pokok pikiran (Pokir) DPRD.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Adapun arah kebijakan nasional yang melekat pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dsesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah :

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Progrm Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 serta terintegrasi dalam

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah
3. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU.
4. Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
1 .	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B/66	B/66,5	B/67	B/67,5
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A / 80,62 Poin	A / 81,12 Poin	A / 81,62 Poin	A / 82,12 Poin

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. HSU									
2.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan Sosial, agama di masyarakat	Angka Kriminalitas	-	Terwujudnya tata kehidupan sosial, agama yang harmonis	Jumlah Kasus Konflik Sosial	-	-	-	-
SASARAN RENSTRA SATPOL PP & DAMKAR									
				Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat HSU	Persentase Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya penanganan pelayanan tanggap darurat terhadap musibah kebakaran	Respons Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) penanganan kebakaran dalam radius 10 km (%)	96%	96%	96%	96%

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masuk dalam aspek kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pengemban urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum. Untuk penerima jenis pelayanan dasar sub urusan trantibum ini adalah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Sedangkan jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tersebut meliputi layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Adapun target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda/Perkada sesuai mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan perda/perkada	Jumlah penegakan perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar	Capaian (%)	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	Capaian (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	625	625	100%	0	0	100%	100%	Sangat Tinggi

Tabel III.3.Target Capaian SPM sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Total persentase (%) capaian SPM kebakaran (Layanan Penyelamatan dan evalusai korban kebakaran	Jumlah Operasi Non Kebakaran	Korban Jiwa				Jumlah Taksiran Aset	
				Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan	Jumlah korban meninggal dunia	Jumlah korban mengalami luka bakar	Jumlah korban mengalami luka fisik lainnya	Jumlah taksiran aset yang berhasil diselamatkan	Jumlah taksiran kerugian aset
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	Hulu Sungai Utara	100%	25 kegiatan	150 jiwa	-	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 1.800.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Kinerja Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka dilaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan beberapa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 meliputi :

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3. Penyediaan Bahan/Material
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu :
   1. Pengadaan Mebel

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan, yaitu :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2). Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :
   1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
   2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
   3. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) /*** (***Analisis Responsif Gender)***
   4. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM) /*** (***Analisis Responsif Gender)***

5. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
4. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ***(Kegiatan Pendukung pencapaian SPM) /*** (***Analisis Responsif Gender)***

3). Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan 5 sub kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***
5. Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri ***(Kegiatan pendukung pencapaian SPM)***

Pada tahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 11.172.129.185,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 3.936.370.041 Adapun rumusan rencana program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tabel IV.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE							PROGRAM / KEGIARAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**				**100%**	
1	05	01	2	01			**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**				**100%**	
1	05	01	2	01	0001		***(Sub Kegiatan)*** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.HSU	6 Dokumen	Rp 1,575,000	-	-	6 Dokumen	Rp 1,811,250
1	05	01	2	01	0006		***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.HSU	4 Laporan	Rp 1,800,000	-	-	4 Laporan	Rp 4,554,000
1	05	01	2	02			**(Kegiatan)** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah		100%				100%	
1	05	01	2	02	0001		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.HSU	58 Orang / Bulan	Rp 7,235,759,144	-	-	58 Orang / Bulan	Rp 7,235,759,144
1	05	01	2	05			**(Kegiatan)** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**				**100%**	
1	05	01	2	05	0002		***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab.HSU	4 Paket	Rp 162,150,000	-	-	4 Paket	Rp 92,000,000
1	05	01	2	06			**(Kegiatan)** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%				100%	
1	05	01	2	06	0002		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.HSU	33 Paket	Rp 130,250,000	-	-	34 Paket	Rp 17,616,646
1	05	01	2	06	0005		(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab.HSU	12 Paket	Rp 20,601,000	-	-	13 Paket	Rp 15,500,000
1	05	01	2	06	0007		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kab.HSU	42 Paket	Rp 45,047,341	-	-	43 Paket	Rp 23,719,467

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to Buy NOW! www.pdf-xchange.com

KODE							PROGRAM / KEGIARAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	01	2	06	0009		***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.HSU	22 Laporan	Rp 498,892,000	-	-	22 Laporan	Rp 266,059,931
1	05	01	2	07			**(Kegiatan)** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%				100%	
1	05	01	2	07	0005		***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab.HSU	0%	Rp -	-	-	4 Unit	Rp 23,000,000
1	05	01	2	08			**(Kegiatan)** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
1	05	01	2	08	0001		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.HSU	12 Laporan	Rp 5,442,000	-	-	12 Laporan	Rp 12,064,740
1	05	01	2	08	0002		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab.HSU	46 Laporan	Rp 65,000,000	-	-	46 Laporan	Rp 56,536,008
1	05	01	2	08	0004		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.HSU	12 Laporan	Rp 111,192,000	-	-	12 Laporan	Rp 111,192,000
1	05	01	2	09			**(Kegiatan)** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**		**100%**				**100%**	
1	05	01	2	09	0002		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.HSU	29 Unit	Rp 183,683,500	-	-	29 Unit	Rp 108,813,000
1	05	01	2	09	0006		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Kab.HSU	30 Unit	Rp 10,000,000	-	-	30 Unit	Rp 5,175,000

PDF-XChange Editor Click to Buy NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KODE							PROGRAM / KEGIARAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	01	2	09	0010		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab.HSU	1 Unit	Rp 817,200	-	-	1 Unit	Rp 1,231,581
							Jumlah Program 1				**Rp 8,472,209,185**				**Rp 7,975,032,767**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02					***(Program)* Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**		**100%**				**100%**	
1	05	02	2	01			**(Kegiatan)** Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100%**				**100%**	
1	05	02	2	01	0004		***(Sub Kegiatan)*** Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.HSU	1 Dokumen	Rp 91,430,000		-	1 Dokumen	Rp 60,840,000
1	05	02	2	01	0005		***(Sub Kegiatan)*** Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.HSU	12 Orang	Rp 197,020,000	-	-	12 Orang	Rp 95,480,000
1	05	02	2	01	0015		***(Sub Kegiatan)*** Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab.HSU	12 Laporan	Rp 1,365,590,000	-	-	180 Kasus	Rp 972,298,030
1	05	02	2	01	0016		***(Sub Kegiatan)*** Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab.HSU	12 Laporan	Rp 156,000,000	-	-	190 Kasus	Rp 155,985,150

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KODE							PROGRAM / KEGIARAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	02	2	01	0017		**(Sub Kegiatan)** Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani, Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	Kab.HSU	2 Laporan	Rp 19,200,000	-	-	2 Laporan	Rp 5,750,000
1	05	02	2	01	0018		**(Sub Kegiatan)** Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah saran dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang disediakan	Kab.HSU	1 Unit	Rp 10,000,000	-	-		Rp -
1	05	02	2	02			**(Kegiatan) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota**	**Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perbup**		**100%**				**100%**	
1	05	02	2	02	0005		***(Sub Kegiatan)*** Penyusunan SOP penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab.HSU	5 Dokumen	Rp 22,220,000	-	-	5 Dokumen	Rp -
1	05	02	2	02	0010		***(Sub Kegiatan)*** Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Kab.HSU	6 Laporan	Rp 24,825,000	-	-	6 Laporan	Rp -
1	05	02	2	02	0011		***(Sub Kegiatan)*** Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Kab.HSU	4 Laporan	Rp 59,795,000	-	-	4 Laporan	Rp 11,212,500
1	05	02	2	02	0012		***(Sub Kegiatan)*** Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.HSU	12 Laporan	Rp 151,245,000	-	-	12 Laporan	Rp 233,240,300
							Jumlah Program 2				**Rp 2,097,325,000**				**Rp 1,534,805,980**
1	05	04					***(Program)*** **Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran di Kabupaten / Kota**		**100%**				**100%**	
1	05	04		2	01		**(Kegiatan)** Pencegahan Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran**		**100%**				**100%**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KODE							PROGRAM / KEGIARAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome / Output)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA THN 2026	
									LOKASI	TARGET	TOTAL KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	04	2	01	0001		***(Sub Kegiatan)*** Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab.HSU	3 Dokumen	Rp 86,720,000			3 Dokumen	Rp 175,955,520
1	05	04	2	01	0002		***(Sub Kegiatan)*** Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kab.HSU	2 Laporan	Rp 378,125,000			2 Laporan	Rp 109,924,250
1	05	04	2	01	0003		***(Sub Kegiatan)*** Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.HSU	1 Dokumen	Rp 91,250,000			1 Dokumen	Rp 11,500,000
1	05	04	2	01	0007		***(Sub Kegiatan)*** Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaranan	Kab.HSU	2 Orang	Rp 15,000,000			5 Orang	Rp 11,212,500
1	05	04	2	01	0017		***(Sub Kegiatan)*** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab.HSU	10 Unit	Rp 31,500,000			15 Unit	Rp 23,000,000
											Rp 602,595,000				**Rp 331,592,270**
JUMLAH TOTAL ANGGARAN											**Rp 11,172,129,185**				**Rp 9,841,431,017**

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
NIP. 19750404 199403 1 003

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025, dapat dilihat bahwa rencana program dan kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 3 Program dengan 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 11.172.129.185,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 3.936.370.041,-.

Sedangkan rumusan prakiraan maju rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 8.841.431.017,-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025.

Isi dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 3 Program dengan 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 11.172.129.185,-, yaitu untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp. 7.235.759.144,- sedangkan belanja lainnya sebesar Rp. 3.936.370.041,- sesuai dengan pagu indikatif penyesuaian tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, April 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

ASIKIN NOOR, SSTP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199403 1 003

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2025 telah berjalan dan diketahui ada beberapa hal yang disesuaikan dengan anggaran yang telaj ditetapkan sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan baik berupa indikator kegiatan maupun target kinerja. Dimana Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja dalam suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah diawali dengan adanya usulan dari Seksi-seksi dan Sekretariat selaku PPTK yang mengharuskan SKPD untuk melakukan perubahan dan selanjutnya menganalisa gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun yang lalu serta mengacu pada Renstra SKPD kecamatan Amuntai Tengah yang berdasarkan pada penelahaan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD Kecamatan Amuntai Tengah dan mengacu pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
b. Rumusan program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah didasarkan atas pertimbangan-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah.

c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2025 sebagian besar merupakan pergeseran pagu anggaran kegiatan yang kurang maksimal penyerapannya ke pagu anggaran yang lebih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2025.
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2025.

2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2025.

4. Memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1. 2. Landasan Hukum

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran

2.2. Realisasi Capaian Kinerja

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Amuntai Tengah pada Renja Perubahan Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Sebagaimana isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut maka SKPD Kecamatan Amuntai Tengah perlu melakukan evaluasi untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

Adapun realisasi anggaran Kecamatan Amuntai Tengah sampai dengan Triwulan I (Maret 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA S/D TW I TAHUN 2025 (S/D MARET 2025)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW I (Rp)	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.576.292.023**	**1.417.960.587**	**16,5%**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.479.200**	6.000.000	**15,6%**
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.479.200	6.000.000	15,6%
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.251.449.473**	1.401.479.210	**16,98%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.251.449.473	1.401.479.210	16,98%
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.400.000**	**-**	**0**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	22.400.000	**-**	**0**
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.228.800**	5.766.500	**4,3%**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.600	-	0
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.856.100	5.766.500	58,5%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	-	0
1.4.4	Penyediaan Bahan/Material	14.052.100	-	0
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.825.000	-	0
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.904.550**	**4.714.877**	**7,2%**
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.992.550	-	**0**
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.912.000	4.064.877	9,9%
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	650.000	9,2%
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.830.000**	-	**0**
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.120.000	-	0
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000	-	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.760.000	-	0
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**156.502.500**	**15.000.000**	**9,58%**
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1.952.500**	-	**0**
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.952.500	-	0
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**154.550.000**	**15.000.000**	**9,7%**
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	44.800.000	3.000.000	6,7%
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.420.000	6.000.000	10,4%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52.330.000	6.000.000	11,46%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**59.974.400**	-	**0**
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	59.974.400	-	**0**
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.974.400	-	0
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.020.000**	-	**0**
4.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.020.000**	-	**0**
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.020.000	-	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**24.000.000**	-	**0**
5.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24.000.000**	-	**0**
5.1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.000.000	-	0
	Unsur Kewilayahan			
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2.384.582.820	143.294.891	6%
3.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2.384.582.820	143.294.891	6%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	536.054.668	-	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.375.332	500.000	0,08%
	Evaluasi Kelurahan	1.267.152.820	142.794.891	11,26%
Jumlah		**11.226.371.743**	**1.576.255.478**	**14%**

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Amuntai Tengah baru terealisasi sebesar Rp. **1.576.255.478**,- (14%) dari seluruh anggaran yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan program/kegiatan dan pembinaan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Amuntai Tengah perlu dikelola secara optimal.

2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2025 sampai dengan triwulan II (Juni 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
S/D TW II TAHUN 2025 (S/D JUNI 2025)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN TW II	INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME / KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI S/D TW II TAHUN 2025

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah**	%	**100%**	60%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	%	100%	60%
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtrisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	Laporan	5	3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan**	%	100%	100%
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	orang	22	22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	100%	66%
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100%	50%
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	5
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	5
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	5
Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	12	5
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	12	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	**100%**	**50**%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	12	**5**
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan	12	5
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**%**	**100%**	**37%**
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan di bayarkan Pajakanya	unit	7	1
14Terlaksananya 60Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	3

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	20	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**%**	**100%**	**50%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kecamatan	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kecamatan**	**%**	**100%**	**50%**
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase TerlaksananyaUrusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat**	**%**	**100%**	**50%**
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelakanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Dokumen	120	6
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelakanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	6
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**	**%**	**100%**	**42%**
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase suksesnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100**	**42%**
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	5
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangu	Unit	1	1
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**%**	**100%**	**67%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100%**	**67%**
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	4

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100%**	**-**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100%**	**-**
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi SKPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada terutama anggaran.

Rencana kerja perubahan Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang sesuai dengan program dan kegiatan dengan anggaran yang ada diharapkan dapat digunakan secara efektif dan oftimal. Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Amuntai Tengah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dimaksimalkan pada setiap tahapan agar diperoleh hasil yang maksimal, serta umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Amuntai Tengah pada Renja Perubahan.

Adapaun progaram dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Amuntai Tengah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (RP)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**8,492,968,073**	**8,561,406,222**	**68,438,149**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**38,479,200**	**38,479,200**	**0**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,479,200	38,479,200	**0**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8,251,449,473**	**8,251,449,572**	**99**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,251,449,473	8,251,449,572	**99**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22,400,000**	**27,220,000**	**4,820,000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22,400,000	27,220,000	**4,820,000**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**88,055,800**	**154,239,600**	**66,183,800**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,495,600	4,495,600	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,856,100	48,340,800	38,484,700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,000,000	13,171,200	1,171,200
Penyediaan Bahan/Material	12,676,100	6,080,000	-6,596,100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,028,000	82,152,000	33,124,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**63,504,550**	**60,080,900**	**-3,423,650**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,992,550	7,604,900	-9,387,650
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,912,000.	46,876,000	-5,964,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,600,000	5,600,000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**29.079.050**	**29.079.050**	**0**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,120,000.	40,120,000.	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,950,000	7,950,000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,760,000	17,760,000	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**133,902,500**	**126,702,500**	**-7,200,000**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**1,952,500**	**1,952,500**	**0**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1,952,500	1,952,500	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**131,950,000**	**124,750,000**	**-7,200,000**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32,970,000	53,530,000	20,560,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	50,770,000	35,525,000	-15,245,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48,210,000	35,695,000	-12,515,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**57,005,000**	**77.505.000**	**20,500,000**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**57,005,000**	**57,005,000**	**0**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57,005,000	57,005,000	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**-**	**20,500,000**	**20,500,000**
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	20,500,000	20,500,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.200.000	1.200.000	**0**
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**24,520,000**	**24,520,000**	**0**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**24,520,000**	**24,520,000**	**0**
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24,520,000	24,520,000	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**23,550,000**	**84,350,000**	**60,800,000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**23,550,000**	**84,350,000**	**60,800,000**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	60,800,000	60,800,000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23,550,000	23,550,000	0
Perangkat Kecamatan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**2,335,920,220**	**2,795,744,820**	459,824,600
Kebun Sari	***455,533,300***	***527,833,300***	***72,300,000***
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106,700,000	106,700,000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93,300,000	93,300,000	0
Evaluasi Kelurahan	255,533,300	327,833,300	72,300,000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Antasari	***453,810,800***	***488,869,600***	***35,058,800***
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144,145,768	144,145,768	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	82,284,232	82,284,232	0
Evaluasi Kelurahan	227,380,800	262,439,600	35,058,800
Murung Sari	***428,027,300***	***555,993,300***	***127,966,000***
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101,150,000	101,150,000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	128,525,000	168,691,000	40,166,000
Evaluasi Kelurahan	*198,352,300*	*286,152,300*	87,800,000
Paliwara	***472,167,000***	***535,967,000***	***63,800,000***
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	60,180,000	60,180,000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169,370,000	169,370,000	0
Evaluasi Kelurahan	242,617,000	306,417,000	63,800,000
Sungai Malang	***526,381,820***	***687,081,620***	***160,699,800***
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123,878,900.	123,878,900.	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106,071,100	106,071,100	0
Evaluasi Kelurahan	296,431,820	457,131,620	160,699,800
Jumlah Total	**11,226,371,743**	**11,706,121,592**	**602,362,749**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja perubahan Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga perubahan anggaran dapat memacu tercapainya kualitas kinerja agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja Perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan dengan baik, untuk mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara Berkeadilan, Kreatif dan Unggul. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Amuntai, 28 Mei 2025

Plt. CAMAT AMUNTAI TENGAH,

FIKRI ILHAMI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19850402 200312 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Amuntai Utara, Maret 2024

JL. AMUNTAI TANJUNG KM. 7,5 DESA TELUK DAUN

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMNTAI UTARA TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Amuntai Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Utara ……. 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Amuntai Utara …… 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Amuntai Utara …….. 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Amuntai Utara …….. 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA 34

4.1 Program dan Kegiatan …… 37

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dan Pencapaian Renstra s/d 2022……..... 7

Tabel 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2021 12

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2021 Dalam Target RENSTRA 2017-2022..... 16

Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RPD tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara ……..... 24

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amuntai Utara 31

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2023 …..... 32

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Amuntai Utara ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja tahunan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana pencapaiannya hal ini berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana yang terbatas.

Rencana Kerja 2025 ini disusun dengan masih mengacu pada RENSTRA Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat kami harapkan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat untuk dipergunakan sebagai acuan dan arahan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Amuntai Utara, Maret 2024

Camat Amuntai Utara,

ASTIANA ROSANTI,S.IP.M.AP

NIP. 19880401 200701 2 002

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara adalah dokumen perencanaan Kecamatan Amuntai Utara untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Amuntai Utara merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Amuntai Utara yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Amuntai Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Amuntai Utara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Amuntai Utara dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Amuntai Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Amuntai Utara tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Amuntai Utara .

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Renstra Kecamatan Amuntai Utara) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Amuntai Utara dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara (Renja Kecamatan Amuntai Utara) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Amuntai Utara yang mengacu pada dokumen Kecamatan Amuntai Utara dan Renstra Kecamatan Amuntai Utara.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amuntai Utara pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Amuntai Utara terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Amuntai Utara agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik .

Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke 1 dari Renstra yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD untuk tahun 2025 yang akan datang.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Amuntai Utara mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2025;
17. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor.....);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai :

a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Amuntai Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Tujuan :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Amuntai Utara.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas Kecamatan berikutnya.
4. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
6. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMUNTAI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Amuntai Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Amuntai Utara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Utara

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Amuntai Utara

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Amuntai Utara

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Amuntai Utara

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AMUNTAI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Amuntai Utara

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amuntai Utara tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Amuntai Utara ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Amuntai Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2018, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amuntai Utara sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Amuntai Utara 2023
dan Pencapaian RENSTRA Kecamatan Amuntai Utara s/d Tahun 2023
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/d Tahun 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Kewilayahan										
Bidang Urusan										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Kegiatan)Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0	4	4	100%	4	0	0%
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	6	5	5	100%	5	0	0%
	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	100%	100	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	18	20	16	80%	20	16	80%
	(Sub Kegiatan) (Sub Kegiatan) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	1	1	100%	1	0	0%
	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	100%	0	-	-	0%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	0	0	0	0%	1	0	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(Sub Kegiatan)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5	16	16	16	100%	5	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	0	17	16	94%	2	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK Yang Digunakan	0	78	0	0	0%	0	0	#DIV/0!
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	0	80	80	100%	6	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	19000	19000	19000	100%	6	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	100	198	175	88%	24	0	0%
	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0%	0%	0%	0%	0	#DIV/0!
	(Sub Kegiatan) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0%	0%	0%	0%	0	0%
	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	100	100	100	100%	12	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100	100	100	100%	12	0	0%
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	0	0	0	0%	4	0	0%
	(Sub kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	100	100	100	100%	12	0	0%
	(Kegiatan)Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6	6	6	6	100%	12	0	0%
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	2	2	100%	5	0	0%
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	11	0	0	0%	8	0	0%
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	0	100	0	0	0%	0	0	#DIV/0!

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Desa Tertib Administrasi pelayanan Masyarakat	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	
	(Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	25	146	10	8	80%	12	0	0%
	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	26	300	297	99%	12	0	0%
	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	75	300	241	80%	2	0	0%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kegiatan SKPD yang difasilitasi	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan)Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	12	12	12	12	100%	12	0	0%
	(Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)	PersentasePelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PPKM	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan)Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5	0	0	0	0%	5	0	0%
	(Sub Kegiatan)Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5	0	0	0	0%	10	0	0%
	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covi-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 dikecamatan	100	52,33	0%	0%	0%	-	0	0%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi dan Persentase usulan Desa yang diakomodir pada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Kegiatan)Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26	26	26	26	100%	26	0	0%
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	1	1	1	1	100%	1	0	0%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Utara

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Amuntai Utara dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Amuntai Utara. Seluruh kegiatan Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2022 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.234.648.248,- (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.476.520.580,- (.Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau sekitar 78,47 %.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Amuntai Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

Dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1). Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
8). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
9). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
10). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
11). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.337.511.839,- dan terialisasi sebesar Rp.201.876.431,- atau sebesar 59,81 % yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Gangguan/Keramain.

Berdasarkan data realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Amuntai Utara hanya memperoleh capaian sebesar 59,81 %, ini disebabkan oleh adanya penghapusan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan sedangkan target penerimaannya masih ditetapkan untuk Kecamatan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Amuntai Utara pada tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 5 (lima) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Amuntai Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, meliputi kegiatan
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Amuntai Utara tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Amuntai Utara telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan, untuk kecamatan Amuntai Utara telah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil kinerja yang mencapai hampir 100 % karena segala kebutuhan perkantoran baik itu berupa kegiatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

administrasi maupun penyediaan dan pemeliharaan sarana dan parsarana telah dapat dipenuhi dengan baik.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Amuntai Utara telah memberikan pelayan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap IKM dan UMKM yang bekerjasama dengan SKPD terkait.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa dan monitoring kegiatan pilkades tahun 2022. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT, fasilitasi pelaksanaan penerimaan Aparat desa dan fasilitasi sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk program ini kecamatan Amuntai Utara telah melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI yang ada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara demi untuk terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan wilayah kecamatan

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Amuntai Utara pada tabel TC.30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	2024	
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7		-9	-12		-13
A	Nilai SAKIP Kabupaten			BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	80	80	80	79	80	-	-	
C	Persentasi Peningkatan Parsitipasi Masyarakat dalam Pembangunan			90	100	100	100	70	100	90	100	
D	Persentase Penanganan dengan pertimbangan kesulitan mengukur Penurunan Konflik sosial dan keagamaan di kecamatan			-	-	100	100	-	-	100	100	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Amuntai Utara dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan Sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 menambah aset tetap bagi Kecamatan Amuntai Utara yang digunakan untuk kegiatan roda Pemerintahan. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Amuntai Utara yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Amuntai Utara

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
   - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
   - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
   - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
   - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
   - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak

b. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
   1) Urusan pemerintahan umum
   2) Urusan sosial
   3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sispil
   5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;

k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;
m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan
w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Amuntai Utara perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Amuntai Utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran
3. Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana
4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
5. Mutasi Pegawai
6. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat;

Selanjutnya tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Amuntai Utara adalah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

sebagai berikut :

a. Ancaman/tantangan.
   1) Globalisasi
   2) Kurangnya koordinasi antar lembaga
   3) Terjadinya bencana alam
   4) Mutasi pegawai

b. Peluang.
   1) Fungsi dan kedudukan Pemerintahan Desa
   2) Otonomi Daerah
   3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
   4) Kebijakan pusat dan daerah
   5) Terciptanya forum koordinasi

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal berikut :

1. Bidang Pelayanan :
   a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya administrasi kependudukan terutama dalam hal pembuatan akte kematian
2. Bidang Pemerintahan :
   a. Jumlah Desa cukup banyak
   b. Sumberdaya Aparatur Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
   c. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
   d. Masih kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Pemerintahan Desa belum bisa direalisasikan secara optimal
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
   a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Bidang Pendapatan
   a. Kecamatan tidak lagi menangani pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan sehingga mengurangi PAD untuk wilayah Kecamatan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Amuntai Utara bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Amuntai Utara dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapaun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Amuntai Utara dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
   1. Pelayanan Administrasi
   2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
   3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan

1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
2. Meningkatnya pelayanan publik
3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2025 sebagai berikut

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPARTEN HULU SUNGAI UTARA

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100	2.159.310.750	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100	2.359.628.168	
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100	2.000.000	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100	3.500.000	
	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	100	1.986.135.000	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	100	2.171.742.289	
	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	100	14.000.000	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	100	23.100.000	
	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	100	68.510.950	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	100	72.621.079	
	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100	-	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100	-	
	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100	67.664.800	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100	67.664.800	
	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	21.000.000	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	21.000.000	
2	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	18.000.000	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	57.000.000	
	(Kegiatan) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		18.000.000	(Kegiatan) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		57.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	8.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	8.000.000	
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase suksesnya pemberdayaan desa		8.000.000	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase suksesnya pemberdayaan desa		8.000.000	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	-	
	(Kegiatan) Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	100	-	(Kegiatan) Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	100	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	7,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	8,000,000	
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase suksesnya pemberdayaan desa		7,000,000	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase suksesnya pemberdayaan desa		8,000,000	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		15,000,000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	15,000,000	
	(Kegiatan) Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	100	15,000,000	(Kegiatan) Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	100	15,000,000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	100	14,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	100	9,500,000	
	(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		14,000,000	(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		9,500,000	
Jumlah					1,967,175,154	Jumlah				2,380,534,389	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2025 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 9 Maret 2023, Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan hasilnya telah disampaikan ke SKPD teknis dan telah diinput dalam aplikasi SIPD Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Amuntai Utara disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efesien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Amuntai Utara

Dengan menitikberatkan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuain tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Amuntai Utara yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Amuntai Utara mempunyai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Amuntai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Amuntai Utara
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amuntai Utara

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T - C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan

Kecamatan Amuntai Utara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	2.159.310.750	
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2.000.000	
	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	1.986.135.000	
	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	14.000.000	
	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	68.510.950	
	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	-	
	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah		Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	67.664.800	
	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpeliharanya barang milik daerah	21.000.000	
2	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.000.000	
	(Kegiatan) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	18.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	8.000.000	
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase suksesnya pemberdayaan desa	8.000.000	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	
	(Kegiatan) Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum		Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	-	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Utara	Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	9.500.000	
	(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	9.500.000	
	Jumlah			**2.194.810.750**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah direncanakan 5 program dan 10 Kegiatan pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   1) Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
   1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
   1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
   1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

KODE							Program/Kegiatan , dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan(Outcome / Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
									Lokasi	Target	Dana	Sumberdana		Lokasi	Target	Dana	Sumberdana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		01				1	***(Program)* Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Amt Utara**	**100**	**Rp 2.159.310.750**	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	**100**	**Rp 2.386.531.168**	**APBD**
X	X	01	2	01			**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**Kec. Amt Utara**	**100%**	**Rp 2.000.000**	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	**100%**	**Rp 3.500.000**	**APBD**
X	X	01	2	01	01		***(Sub Kegiatan)*** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Amt Utara	4 Dokumen	Rp 1.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	4 Dokumen	Rp 2.000.000	APBD
X	X	01	2	01	06		***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Amt Utara	5 Laporan	Rp 1.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	5 Laporan	Rp 1.500.000	APBD
X	X	01	2	02			**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 1.986.135.000	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 2.171.742.289	**APBD**
X	X	01	2	02	01		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Amt Utara	18 Orang	Rp 1.984.635.000	APBD		Kec. Amt Utara	18 Orang	Rp 2.170.242.289	APBD
X	X	01	2	02	05		***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Amt Utara	1 Laporan	Rp 1.500.000	APBD		Kec. Amt Utara	1 Laporan	Rp 1.500.000	APBD
X	X	01	2	05			**(Kegiatan)** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD**	**Kec. Amt Utara**		Rp 14.000.000	**APBD**		**Kec. Amt Utara**		Rp 23.100.000	**APBD**
X	X	01	2	05	11		***(Sub Kegiatan)*** Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Amt Utara	1 Orang	Rp 5.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	2 Orang	Rp 15.000.000	APBD
							(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Amt Utara	21 Paket	Rp 9.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	21 Paket	Rp 8.100.000	APBD
X	X	01	2	06			**(Kegiatan)** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 68.510.950	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 99.524.079	**APBD**
X	X	01	2	06	01		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	5 Paket	Rp 2.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	5 Paket	Rp 2.000.000	APBD
X	X	01	2	06	02		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	2 Paket	Rp 18.500.000	APBD		Kec. Amt Utara	4 Paket	Rp 40.500.000	APBD
		01	2	06	05		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Amt Utara	6 Paket	Rp 5.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	7 Paket	Rp 5.000.000	APBD
X	X	01	2	06	07		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Amt Utara	30 Paket	Rp 10.010.950	APBD		Kec. Amt Utara	30 Paket	Rp 10.124.079	APBD
X	X	01	2	06	09		***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Amt Utara	24 Laporan	Rp 33.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	24 Laporan	Rp 41.900.000	APBD
							(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	**Kec. Amt Utara**					**Kec. Amt Utara**			
							(Sub Kegiatan) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Amt Utara					Kec. Amt Utara			
X	X	01	2	08			**(Kegiatan)** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 67.664.800	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 67.664.800	**APBD**
X	X	01	2	08	01		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 2.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 2.000.000	APBD
X	X	01	2	08	02		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 27.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 27.000.000	APBD
X	X	01	2	08	03		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	4 laporan	Rp 2.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	4 laporan	Rp 2.000.000	APBD
X	X	01	2	08	04		***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 36.664.800	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp 36.664.800	APBD
X	X	01	2	09			**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 21.000.000	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 21.000.000	**APBD**
X	X	01	2	09	01		**(Sub Kegiatan)**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Amt Utara	6 Unit	Rp 11.000.000	APBD		Kec. Amt Utara	6 Unit	Rp 11.000.000	APBD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

KODE									Program/Kegiatan , dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan(Outcome / Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025			
											Lokasi	Target	Dana	Sumberdana		Lokasi	Target	Dana	Sumberdana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		01					1		***(Program)*** **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Amt Utara**	**100**	**Rp 2,343,531,168**	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	**100**	**Rp 2,249,200,316**	**APBD**
X	X	01	2	01					**(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**Kec. Amt Utara**	**100%**	**Rp 2,000,000**	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	**100%**	**Rp 6,000,000**	**APBD**
X	X	01	2	01	01				***(Sub Kegiatan)*** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Amt Utara	4 Dokumen	Rp 1,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	4 Dokumen	Rp 3,000,000	APBD
X	X	01	2	01	06				***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Amt Utara	5 Laporan	Rp 1,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	5 Laporan	Rp 3,000,000	APBD
X	X	01	2	02					**(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya pengelolaaan administrasi keuangan PD	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 2,171,742,289	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 2,005,635,000	**APBD**
X	X	01	2	02	01				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Amt Utara	18 Orang	Rp 2,170,242,289	APBD		Kec. Amt Utara	18 Orang	Rp 2,002,635,000	APBD
X	X	01	2	02	05				***(Sub Kegiatan)*** Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Amt Utara	1 Laporan	Rp 1,500,000	APBD		Kec. Amt Utara	1 Laporan	Rp 3,000,000	APBD
X	X	01	2	05					**(Kegiatan)** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD**	**Kec. Amt Utara**		Rp 14,000,000	**APBD**		**Kec. Amt Utara**		Rp 26,800,000	**APBD**
X	X	01	2	05	11				***(Sub Kegiatan)*** Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Amt Utara	1 Orang	Rp 5,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	2 Orang	Rp 10,000,000	APBD
									(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Amt Utara	21 Paket	Rp 9,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	21 Paket	Rp 16,800,000	APBD
X	X	01	2	06					**(Kegiatan)** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 59,994,479	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp 103,565,316	**APBD**
X	X	01	2	06	01				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	5 Paket	Rp 2,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	5 Paket	Rp 5,000,000	APBD
X	X	01	2	06	02				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	2 Paket	Rp 10,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	4 Paket	Rp 22,500,000	APBD
		01	2	06	05				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Amt Utara	6 Paket	Rp 5,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	7 Paket	Rp 9,000,000	APBD
X	X	01	2	06	07				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Amt Utara	30 Paket	Rp 9,994,479	APBD		Kec. Amt Utara	30 Paket	Rp 17,065,316	APBD
X	X	01	2	06	09				***(Sub Kegiatan)*** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Amt Utara	24 Laporan	Rp 33,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	24 Laporan	Rp 50,000,000	APBD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

									(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	**Kec. Amt Utara**						**Kec. Amt Utara**			
									(Sub Kegiatan) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Amt Utara						Kec. Amt Utara			
X	X	01	2	08					**(Kegiatan)** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	76,794,400	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	72,200,000	**APBD**
X	X	01	2	08	01				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	2,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	5,000,000	APBD
X	X	01	2	08	02				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	18,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	25,000,000	APBD
									(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	4 laporan	Rp	2,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	4 laporan	Rp	6,000,000	APBD
X	X	01	2	08	04				***(Sub Kegiatan)*** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	54,794,400	APBD		Kec. Amt Utara	12 laporan	Rp	36,200,000	APBD
X	X	01	2	09					**(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	19,000,000	**APBD**		**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	35,000,000	**APBD**
X	X	01	2	09	01				**(Sub Kegiatan)**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Amt Utara	6 Unit	Rp	11,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	6 Unit	Rp	15,000,000	APBD
X	X	01	2	09	06				***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Amt Utara	30 Unit	Rp	5,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	30 Unit	Rp	10,000,000	APBD
X	X	01	2	09	06				***(Sub Kegiatan)*** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Amt Utara	5 Unit	Rp	3,000,000	APBD		Kec. Amt Utara	5 Unit	Rp	10,000,000	APBD
URUSAN KEWILAYAHAN																					
BIDANG URUSAN KECAMATAN																					
X	X	02	2				1		***(Program)*** **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase tertibnya administrasi pelayanan publik**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	4,500,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	15,000,000	**APBD**
X	X	02	2	04					**(Kegiatan)** Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Persentasenya terlaksananya usrusan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	4,500,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	15,000,000	**APBD**
X	X	02	2	04	01				**(Sub Kegiatan)** Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Amt Utara	10 Dokumen	Rp	1,500,000	APBD	10 Dokumen	Kec. Amt Utara	10 Dokumen	Rp	5,000,000	APBD
X	X	02	2	04	02				(**Sub Kegiatan**)Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Amt Utara	12 Laporan	Rp	1,500,000	APBD	12 Laporan	Kec. Amt Utara	12 Laporan	Rp	5,000,000	APBD
X	X	03	2	04	03				***(Sub Kegiatan)*** Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Amt Utara	2 Laporan	Rp	1,500,000	APBD	2 Laporan	Kec. Amt Utara	2 Laporan	Rp	5,000,000	APBD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

X	X																				
X	X	03				2				**(Program) Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	8,000,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	10,000,000	**APBD**
X	X	03	2	01						**(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase suksesnya pemberdayaan desa**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	8,000,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	10,000,000	**APBD**
X	X	03	2	01	03					***(Sub Kegiatan)*** Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Amt Utara	12 Laporan	Rp	8,000,000	APBD	12 Laporan	Kec. Amt Utara	12 Laporan	Rp	10,000,000	APBD
X	X	04				3				***(Program)*** **koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban	**Kec. Amt Utara**		Rp	15,000,000		-	**Kec. Amt Utara**	-	Rp	-	
X	X	04	2	01						**(Kegiatan)** Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum	Persentase Pelaksanaan monitoring Pemilukada di kecamatan	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	15,000,000		-	**Kec. Amt Utara**	-	Rp	-	
X	X	04	2	01	01					***(Sub Kegiatan)*** Sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Amt Utara	2 Laporan	Rp	15,000,000		-	Kec. Amt Utara	-	Rp	-	
X	X	05				3				***(Program)*** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	**Kec. Amt Utara**									
X	X	05	2	01						**(Kegiatan)** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan		**Kec. Amt Utara**									
X	X	05	2	01	01					***(Sub Kegiatan) Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan***		Kec. Amt Utara		Rp	-					Rp	-	
X	X	06				4				***(Program)*** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	9,500,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	19,000,000	**APBD**
X	X	06	2	01						**(Kegiatan)** Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	9,500,000	**APBD**	100%	**Kec. Amt Utara**	100%	Rp	19,000,000	**APBD**
X	X	06	2	01	02					***(Sub Kegiatan)*** Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec. Amt Utara**	26 Dokomen	Rp	1,500,000	APBD	26 Dokomen	**Kec. Amt Utara**	26 Dokomen	Rp	7,000,000	APBD
X	X	06	2	01	09					***(Sub Kegiatan)*** Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Kec. Amt Utara**	1 Dokumen	Rp	8,000,000	APBD	2 Dokumen	**Kec. Amt Utara**	1 Dokumen	Rp	12,000,000	APBD
						JUMLAH TOTAL								**Rp**	**2,380,531,168**					**Rp**	**2,293,200,316**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amuntai Utara dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Utara.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepntingan) di Kecamatan Amuntai Utara. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Amuntai Utara ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaiaan target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amuntai Utara tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Amuntai Utara

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Amuntai Utara sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Amuntai Utara. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Amuntai Utara telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Amuntai Utara, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertangungjawabkan.
2. Pengkomonikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaiaan tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai Utara, April 2024
Camat Amuntai Utara,

ASTIANA ROSANTI,S.IP.M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19880401 200701 2 002

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Amuntai Selatan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja tahunan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana pencapaiannya hal ini berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana yang terbatas.

Rencana Kerja 2025 ini disusun dengan masih mengacu pada RENSTRA Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat kami harapkan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat untuk dipergunakan sebagai acuan dan arahan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Amuntai Selatan, Maret 2024
Camat Amuntai Selatan

YUDHI RIFANI, S.IP., MA
NIP. 19[illegible]012200701 1001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Landasan Hukum 1
I.3 Maksud dan Tujuan 4
I.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 19
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN 27
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……..... 28
III.3 Program dan Kegiatan……..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……..... 34

BAB V PENUTUP..... 34
LAMPIRAN

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Amuntai Selatan Kab Hulu Sungai Utara dan Pencapaian Renstra s/d 2023	7
Tabel II.2	Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Amuntai Selatan Tahun 2023	13
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Amuntai Selatan	15
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ...	22
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amuntai Selatan	29
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	36

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam hal ini Kecamatan Amuntai Selatan menyusun Renja tahun 2025 dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Amuntai Selatan 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi ,sinergi dan harmonisasi dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Adapun Renstra sendiri berfungsi sebagai operasional RPJPD kabupaten, dasar penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD, instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan serta sebagai landasan upaya mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renja juga merupakan landasan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan dibahas dan menjadi bagian dari RAPBD kabupaten.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun Renja Kecamatan Amuntai Selatan mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

f. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5859 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;)

m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

q. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

r. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

s. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

t. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

u. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

v. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023;

w. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

x. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2025 adalah sebagai dokumen Perencanaan tahunan sebagai penjabaran Renstra SKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dankelompoksasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk :

- Menjabarkan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan menjadi Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan.
- menyediakan dasar penyusunan anggaran tahunan
- Mempermudah pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Memberikan informasi kepadapara pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana kerja tahunan SKPD.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kecamatan Amuntai Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupeten Hulu Sungai Utara. Dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selain itu, camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada **dua bidang** pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
    - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
    - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
    - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
    - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
    - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak
b. Non perizinan, yang mencakup **lima urusan** pemerintahan, yaitu :
    1) Urusan pemerintahan umum (1item)
    2) Urusan sosial (4 item)
    3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (4 item)
    4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (7 item)
    5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (24 item)

Pada tahun yang lalu 2024 kecamatan melaksanakan berbagai program kegiatan berdasarkan Renja 2025 dengan menyesuaikan pada Renstra (rencana strategis) untuk periode 2023-2026 dengan mengacu pada RPJMD kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2030. Capaian Renja 2024 dapat dilihat pada table berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Amuntai Selatan
dan Pencapaian RENSTRA Kecamatan Amuntai Selatan s/d Tahun 2023
Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/d Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(7/6)***	***9***	***10=(5+7+9)***	***11=(10/4)***
	UNSUR KEWILAYAHAN		100%	100%	100%			0	0	0
	KECAMATAN		100%	100%	100%			0	0	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90,92%	90,92%	0	0	0
	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	100%	100%	93,95%	93,95%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	87,90%	87,90%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	89,40%	89,40%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	71,53%	71,53%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	100%	100%	96,67%	96,67%	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	64,60%	64,60%	0	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	100%	100%	99,87%	99,87%	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%	29,33%	29,33%	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	99,66%	99,66%	0	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	99,9%	99,9%	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	0	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	99,81%	99,81%	0	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	100%	100%	99,77	99,77	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	99,25%	99,25%	0	0	0
	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	100%	100%	100%	98,15%	98,15%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	96,65	96,65	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	99,16%	99,16%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	99,30%	99,30%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	97,52%	97,52%	0	0	0
	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	99,82%	99,82%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	99,65%	99,65%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan	100%	100%	100%	74,15%	74,15%	0	0	0
	(Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	74,15%	74,15%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	97,33%	97,33%	0	0	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Usaha									
	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100%	25,13%	25,13%	0	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	32,91%	32,91%	0	0	0
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	32,91%	32,91%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	98,74%	98,74%	0	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	0%	0%	0	0	0
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa	100%	100%	100%	0%	0%	0	0	0
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa	100%	100%	100%	0%	0%	0	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	86,19%	86,19%	0	0	0
	(Kegiatan) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	86,19%	86,19%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	79,89%	79,89%	0	0	0
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	100%	100%	92,50%	92,50%	0	0	0

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Dari tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, pada kegiatan :
     - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran Rp. 3.000.000,- terealisasi hanya mencapai 25,13% berupa Perjalanan Perjalanan Dinas
   - Program Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan, pada kegiatan :
     - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp.14.999.800,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, karena tidak ada regulasi/peraturan yang mengaturnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah semua program kegiatan kecuali tersebut diatas.

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Amuntai Selatan

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp. 2.502.908.494,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 1.836.845.769,-** (**73,39 %**).

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b.Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Derah, Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 42.075.000,- yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun setelah Perubahan, target Pendapatan Asli Daerah untuk Kecamatan Amuntai Selatan dihapus atau 0 (Nol) Rupiah. Hal tersebut disebabkan, pihak Kecamatan Amuntai Selatan tidak bisa menarik Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi IMB, karena peraturan terkait kedua retribusi tersebut dicabut.

Adapun target dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Amuntai Selatan Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	KET
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	Retribusi Pelayanan Pasar	0,-	0,-	
2	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,-	0,-	
	J U M L A H	**0,-**	**0,-**	

Berdasarkan data sebagaimana disajikan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 SKPD Kecamatan Amuntai Selatan tidak dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi Kas Daerah. Pada tahun 2023 tidak memenuhi target, karena realisasi pendapatan yang di terima sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Hal tersebut terjadi, karena pada tahun 2023 belum ada aturan (peraturan daerah) yang memerintahkan untuk melaksanakan penagihan retribusi tersebut.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dan substansi Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Anggaran yang di bebankan dalam DPA Perubahan Kecamatan Amuntai Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.220.660.000,- untuk gaji dan tunjangan PNS. Dari anggaran yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.588.347.091,- atau sebesar 71,53%. Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 272.248.494,- yang mana sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 238.548.678,- atau sebesar 87,62%. Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.950.000,- atau sebesar 99,50%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
1	Program yang berkaitan dengan penyelengaraan Urusan	-	7 Program	100%	100%	100%	100%	6 Program	-	100%	100%	
2	Keberadaan Standar Operasional Prosedur	-	15 SOP	100%	100%	100%	100%	15 SOP	-	100%	100%	
3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan denganPenyelengaraan Urusan	-	Ada	100%	100%	100%	100%	Ada	-	100%	100%	
4	Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	-	71,42%	100%	100%	100%	100%	71,42%	-	100%	100%	
5	Keberadaan Jabatan Fungsiunal dalam struktur organisasi SKPD	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	
6	Rasio PNS	-	0,37%	100%	100%	100%	100%	0,37%	-	100%	100%	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	-	80%	100%	100%	100%	100%	80%	-	100%	100%	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Renstra - Renja	-	100%	100%	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11	Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	-	0,16%	100%	100%	100%	100%	0,16%	-	100%	100%	
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	-	0,11%	100%	100%	100%	100%	0,11%	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

15	Total Belanja Langsung dari total belanja perangkat daerah	-	24,70%	100%	100%	100%	100%	24,70	-	100%	100%	
16	Total belanja tidak langsung dari total perangkat daerah	-	75,29%	100%	100%	100%	100%	75,29%	-	100%	100%	
17	Keberadaan Laporan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	-	Ada, 3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Neraca - Calk - LRA	-	100%	100%	
18	Adanya invintarisasi barang atau Asset Perangkat Daerah	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah	-	0	100%	100%	100%	100%	0	-	100%	100%	
20	Jumlah Fasilitas Prasarana Informasi	-	1 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Papan Pengu muman	-	100%	100%	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarkat	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Amuntai Selatan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan maupun hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Amuntai Selatan tahun sebelumnya. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 2 disebutkan bahwa Organisasi Kecamatan Amuntai Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Camat. Adapun tugas pokok Kecamatan Amuntai Selatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeah kabupaten, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan dan melaksanakan urusan pemeintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keja pemeintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan. Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan tugas diatas yang diberikan memiliki kendala dalam penerapannya, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan Bupati tentang wewenang yang dilimpahkan kepada Camat. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Camat berpegang kepada hal-hal yang selama ini memang telah menjadi tugas Camat, hal ini demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat. Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2025 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Pelayanan Prima. Kecamatan Amuntai Selatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat. Khususnya dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten terkait penyelenggaraan Rembuk Stunting di tingkat Kecamatan.

4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5. Peningkatan partisipasi aparatur dan masyarakat terkait kesiapan wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menjaga suasana yang kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan umum.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se- Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD dapat dilihat Tabel 2.4 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama : Kecamatan Amuntai Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Amuntai Selatan**		100 %	**1.913.681.338**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**2.969.128.407**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100 %	13.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100 %	8.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 %	1.729.625.600	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 %	2.782.418.157	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	0 %	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100 %	0	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	42.862.950	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 %	91.763.430	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 %	77.051.300	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	79.292.308	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	58.796.000	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	100 %	**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	100 %	**85.000.000**	
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	70.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	85.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	100 **%**	**20.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	100 **%**	**8.400.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 **%**	20.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 **%**	8.400.000	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**0**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**49.743.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 **%**	0	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 **%**	49.743.000	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES**	**100 %**	**20.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Amuntai Selatan**	**Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES**	**100 %**	**9.990.000**	
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kabupaten	100 %	20.000.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Amuntai Selatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kabupaten	100 %	9.990.000	
Jumlah						**2.043.681.338**	**Jumlah**				**3.122.261.407**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan kedudukan Kecamatan yang fungsi utamanya adalah melaksanakan koordinasi, dan melihat kesesuaian urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan Bupati Hulu Sungai Utara serta kemampuan anggaran, SKPD kecamatan Amuntai Selatan telah menelaah berbagai usulan masyarakat mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di desa-desa hingga Musrenbang kecamatan.

Daftar usulan pembangunan tahun 2025 untuk wilayah kecamatan Amuntai Selatan yang telah disepakati hasil dari kegiatan Musrenbang Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari:

- Usulan bidang infrastruktur
- Usulan bidang sosialbudaya
- Usulan bidang ekonomi

Usulan-usulan tersebut telah disampaikan ke SKPD yang membidangi untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Usulan tersebut dapat dilihat dalam lampiran RENJA ini.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Amuntai Selatan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Penataan Ruang.

   Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

   a. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

   b. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang.

2. Perencanaan Pembangunan.

   Kebijakan umum perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan secara realtime report.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang.

c. Menyusun pedoman teknis yang mengatur keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.

d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.

e. Menyusun pedoman teknis mengenai system dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.

f. Melaksanakan sosialisasi dan deseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD.

III. 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan

Dengan mengacu pada visi misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagaimana tersebut diatas, serta mengacu pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi, maka kecamatan Amuntai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai dalam RENSTRA kecamatan Amuntai Selatan 2023-2026 berikut :

Tujuan

Tujuan Kecamatan amuntai Selatan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Amuntai Utara dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang yang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan Aparatur pemerintahan yang bersih, profesional dan produktif serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu mendukung kegiatan pelayanan publik yaitu :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik

b. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

c. Terwujudnya Kehidupan Sosial dan Keagamaan yang Harmonis

Sasaran

Sasaran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja

Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntable

b. Meningkatnya pelayanan publik yang prima

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

d. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini :

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Amuntai Selatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Kondisi Akhir RPD (2029)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69)	BB (71,5)	BB (72,5)	BB (73,5)	BB (74,5)
				Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar	75%	80%	85%	86%	88%
				Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	75%	80%	85%	86%	88%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

III. 3. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2025, Kecamatan Amuntai Selatan merencanakan 5 program dan 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.122.261.407,- yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota :
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
    4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
        e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

    5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
   1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
      c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, dengan kegiatan:
   1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
    1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        a. Sub Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa
        b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.33.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Mempertimbangkan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Luasnya fungsi kecamatan sebagaimana disebutkan, maka diperlukan suatu program dan kegiatan yang menunjang untuk merealisasikan capaian-capaian dari indikator program dan kegiatan dimaksud. Selain itu didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/356/KUM/2024 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Hulu Sungai Utara Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

1. Perizinan
2. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
    a) Urusan pemerintahan umum
    b) Urusan sosial
    c) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
    d) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sispil
    e) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

    Maka dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati Hulu Sungai Utara 2025-2030 Kecamatan Amuntai Selatan mengusulkan Program, Kegiatan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

yang akan dilaksanan pada tahun 2025 dengan garis besar sebagai berikut :

b. Garis Besar Program Kegiatan

Pada 2025, Kecamatan Amuntai Selatan merencanakan 5 program dan 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.122.261.407,-

c. Ketidak sesuaian Rumusan Program Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program Kegiatan Renja 2025 mengacu pada RPJMD atau Renstra 2025-2029. Sedangkan Program Kegiatan Tahun 2025 pada saat pembuatannya masih mengacu pada RPD/ Renstra Kecamatan Amuntai Selatan 2023-2026. Walaupun dari itu, program yang dirumuskan pada tahun 2025 sebagian besar masih serupa dengan Renja 2024 namun memiliki perbedaan pada Sub kegiatan pendukungnya dan Indikator penyusunnya yang menggunakan pohon kinerja Tahun 2025-2029.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. 1. Program dan Kegiatan

Untuk memenuhi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2025 sesuai dengan keselarasan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029, Maka disusun rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2030 mendatang dapat dijabarkan dengan didukung 5 Program, sebagai berikut:

1) Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

2) Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

3) Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Program ini bertujuan untuk Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

4) Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini bertujuan untuk memfasilitasi urusan pemerintahan umum

5) Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

IV.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Pada tahun 2025, Kecamatan Amuntai Selatan merencanakan 5 program dan 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 3.122.261.407,- Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL IV.1 T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**3.122.261.407**	**APBD**		**100%**	**3.160.123.257**
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**8.000.000**	**APBD**		**100%**	**7.990.000**
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Selatan	6 Dok	2.000.000	APBD		6 Dok	1.990.000
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Amuntai Selatan	6 Lap	6.000.000	APBD		6 Lap	1.000.000
01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Lap	0	APBD		1 Lap	2.500.000
01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Lap	0	APBD		1 Lap	2.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**2.782.418.157**	**APBD**		**100%**	**2.805.958.467**
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Amuntai Selatan	20 Org/Bln	2.780.418.157	APBD		20 Org/Bln	2.802.058.467
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Lap	2.000.000	APBD		1 Lap	1.950.000
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kecamatan Amuntai Selatan	0 lap	0	APBD		4 lap	1.950.000
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**0**	**APBD**		**100%**	**26.718.000**
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Amuntai Selatan	0 paket	0	APBD		25 paket	12.075.000
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Amuntai Selatan	0 org	0	APBD		2 org	14.643.000
01.2.05.0010	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Amuntai Selatan	0 Lap	0	APBD		1 Lap	0
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**42.862.950**	**APBD**		**100%**	**154.539.750**
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Paket	2.997.600	APBD		1 Paket	2.994.000
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	0 Paket	0	APBD		2 Paket -	44.660.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Paket	7.928.000	APBD		1 Paket	12.000.000
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Paket	4.993.350	APBD		1 Paket	19.996.750
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Amuntai Selatan	30 Lap	26.944.000	APBD		30 Lap	74.889.000
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**77.051.300**	**APBD**		**100%**	**103.661.040**
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Lap	7.040.000	APBD		12 Lap	7.040.000
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Lap	26.995.700	APBD		12 Lap	54.998.340
01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Lap	23.996.100	APBD		1 Lap	21.798.700
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Lap	19.019.500	APBD		12 Lap	19.824.000
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**58.796.000**	**APBD**		**100%**	**61.256.000**
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Amuntai Selatan	10 Unit	40.920.000	APBD		10 Unit	38.380.000
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Amuntai Selatan	10 Unit	5.000.000	APBD		27 Unit	10.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Amuntai Selatan	2 Unit	12.876.000	APBD		2 Unit	12.876.000
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**85.000.000**	**APBD**		**100%**	**78.000.000**
02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**85.000.000**	**APBD**		**100%**	**78.000.000**
02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Dok	74.000.000	APBD		12 Dok	66.000.000
02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Lap	5.000.000	APBD		12 Lap	6.000.000
02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Amuntai Selatan	6 Lap	6.000.000	APBD		12 Lap	6.000.000
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**8.400.000**	**APBD**		**100%**	**45.600.000**
03.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**8.400.000**	**APBD**		**100%**	**30.000.000**
03.2.01.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Lap	8.400.000	APBD	Program "KAPLINGAN" (Kampung Peduli Lingkungan)	12 Lap	30.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**49.743.000**	**APBD**		**100%**	**124.999.700**
05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**49.743.000**	**APBD**		**100%**	**124.999.700**
05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Laporan	24.993.000	APBD	Program "GEMA" (Generasi Maju Aparatur) Program "PERAK" (Pemuda Penggerak)	300 Org	99.999.700
05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Amuntai Selatan	12 Dok	24.750.000	APBD	Program "HATI" (HSU Peduli Tanpa Narkoba) Program "DESTANA" (Desa Tahan Bencana)	12 Dok	25.000.000
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**9.990.000**	**APBD**		**100%**	**206.828.800**
06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kabupaten**	**Kecamatan Amuntai Selatan**	**100%**	**9.990.000**	**APBD**		**100%**	**206.828.800**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Amuntai Selatan	30 Dok	4.995.000	APBD	Program "KAYUH JUKUNG" (Konektivitas Wilayah Antar Kampung)	30 Dok	191.828.800
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Amuntai Selatan	1 Dok	4.995.000	APBD	Program "FORUM WARGA"	1 Dok	15.000.000
J U M L A H					***3.122.261.407***				***3.615.551.757***

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Dalam memperhatikan kondisi internal dan eksternal Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu memperhatikan perkembangan sesuai dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dapat menjadi arah, pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amuntai Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Selatan.

Recana kerja (Renja) 2025 ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Amuntai Selatan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Amuntai Selatan ini bersifat umum dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dengan catatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi perencanaandan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah Subhanahuwata'ala, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Hulu Sungai Utara MANTAP**. Aamiin



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Banjang 2024

JL. JEMBATAN HUSIN KM. 7 KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjang ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja tahunan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana pencapaiannya hal ini berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana yang terbatas.

Rencana Kerja 2025 ini disusun dengan masih mengacu pada Renstra Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat kami harapkan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat untuk dipergunakan sebagai acuan dan arahan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Banjang, Maret 2024

Plt. Camat Banjang

Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Landasan Hukum 1
I.3 Maksud dan Tujuan 4
I.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 21
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJANG 33
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 35
BAB V PENUTUP 42
LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam hal ini Kecamatan Banjang menyusun Renja tahun 2025 dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Banjang 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANG dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan

Renja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Adapun Renstra sendiri berfungsi sebagai operasional RPJMD kabupaten, dasar penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD, instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan serta sebagai landasan upaya mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renja juga merupakan landasan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan dibahas dan menjadi bagian dari RAPBD kabupaten.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Banjang Tahun 2025 ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

20. Peraturan Mentari dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ..Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - ....

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjang Tahun 2023 8

Tabel 2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Banjang Tahun 2023 14

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjang Tahun 2018 Dalam Target RENSTRA 2023-2026 21

Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara 28

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjang Tahun 2025 27

Dipindai dengan CamScanner

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor .....);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Banjang tahun 2025 adalah sebagai dokumen Perencanaan tahunan sebagai penjabaran Renstra SKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk :

- Menjabarkan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan menjadi Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan.
- menyediakan dasar penyusunan anggaran tahunan
- Mempermudah pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Memberikan informasi kepadapara pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1. 2. Landasan Hukum

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Pemaduan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kecamatan Banjang merupakan salah satu kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupeten Hulu Sungai Utara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yg belum yang mst' tugas ... yg tidak Menjalankan

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selain itu, camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 28 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
   - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
   - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
   - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
   - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
   - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak

b. Non perizinan, yang mencakup lima urusan pemerintahan, yaitu :
   1) Urusan pemerintahan umum (1item)
   2) Urusan sosial (4 item)
   3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (4 item)
   4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (7 item)
   5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (24 item)

Pada tahun yang lalu (2023) kecamatan melaksanakan berbagai program kegiatan berdasarkan Renja 2023 dengan menyesuaikan pada Renstra (rencana strategis) untuk periode 2023-2026 dengan mengacu pada RPJMD kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026.

Capaian Renja 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 (tabel T-C.29)
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjang Tahun
Pencapaian Renstra s/d tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

Tabel II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KEC. BANJANG KAB. HULU SUNGAI UTARA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (Lalu)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (kerja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Kerja SKPD tahun 2023	Realisasi Kerja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi (Target Tahun 2024) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9+9)	11=(10/4) x 100
URUSAN WAJIB BIDANG PELAYANAN DASAR										
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100	100%	100%	100%	0	0	0
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air, dan Internet	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Pertanggungjawaban Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ATK yang digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan & keamanan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0

Digitized dengan CamScanner

	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik & elektronik tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang akan dibeli	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	9	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi/SKPD yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	10	Penyediaan Makan dan Minuman	Rapat Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase Sarana dan Prasarana Kondusif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**	**0**
	1	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase Jumlah Diklat Yang di Ikuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**	**0**
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Terlaksananya dokumen perencanaan kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**	**0**
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0

Digitized dengan CamScanner

5	Program Pemberian Pelayanan Administrasi Kecamatan		Jumlah Laporan dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	1	Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Jumlah persentase realisasi penerimaan PBB	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	3	Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	4	Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Jumlah pembinaan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	5	Monitoring Penertiban Ketenteraman di Kecamatan	Jumlah laporan kamtibmas & Trantib	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
6	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu		Jumlah Pelayanan PATEN (pertanahan dan non pertanahan) ke masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	1	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	2	Pelayanan Distribusi Buras Sejahtera (Beras)	Jumlah kegiatan distribusi Beras	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	1	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	1	Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
PERMEN 90											

Digitized dengan CamScanner

Urusan: KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan: KECAMATAN										
1	[Program] Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Kegiatan] Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat keluar dan masuk	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya berbagai jenis jasa pelayanan kantor	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Kegiatan] Administrasi Umum Penunjang Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Terpeliharanya Perawatan Bangunan dan Sekitar Kantor yang Baik	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kecamatan	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan-Kegiatan Kecamatan	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kondisi Kendaraan Dinas yang Layak Pakai	0	0	0	0	0	100%	100%	30%

Digitized dengan CamScanner

		(Sub Kegiatan) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan Baik	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		Sub Kegiatan) Pemeliharaan/rehabilitasi taman dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Baik dan Nyaman	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tertibnya Disiplin Aparatur ASN Sesuai Aturan	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya ASN yang Berkualitas dan Disiplin dlm	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Kegiatan) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Laporan Ikhtisar Keuangan dan Kinerja Kecamatan	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Terkait dengan Non Perijinan	Meningkat dan terlaksanya pendaftaran ast disesuai (FAS) di Kecamatan Sanjang	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terfasilitasinya Proses penyusunan kriteria yang dilimpahkan di kecamatan	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Kegiatan) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		0	0	0	0	0	100%	100%	30%
		(Sub Kegiatan) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	Terlaksanya kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	0	0	0	0	0	100%	100%	30%

Digitized dengan CamScanner

	masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Banjang									
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	Bagaimana Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terwujudnya tata kelola dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan transparan	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	(Sub Kegiatan) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terfasilitasinya proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya usulan perencanaan dan pembangunan desa-desa kecamatan banjang tahun 2021	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
5	Program Koordinasi Kelembagaan dan Ketertiban Umum	Terlaksana terlaksananya koordinasi kelembagaan dan ketertiban	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	(Kegiatan) koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksana pelaksanaan monitoring pemilukada di kecamatan	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	
	(Sub Kegiatan) sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI, dan lembaga vertikal wilayah kecamatan	Jumlah TPS yang akan di coblos dan barang laporan di tampilkan	0	0	0	0	0	100%	100%	10%	

Digitized dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjang

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 2.306.424.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.899.452.665,- (82,35%). Dari total anggaran tersebut, anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan 4 Program dengan 9 kegiatan sebesar Rp. 291.939.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 226.394.460,- (77,55 %)

Tabel II. 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kecamatan Banjang Tahun 2023
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD KECAMATAN BANJANG

Urusan	No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pusat Penunjang Lainnya	1	PROGRAM PENCAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.135.222	1.883.974.868	82,29%
	1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.997.908	3.900.000	97,55%
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	997.908	870.000	87,14%
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.030.000	101,00%
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.919.000.000	1.874.998.205	83,00%
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.914.400.000	1.873.958.205	83,09%
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000	1.040.000	91,91%
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.400.000	21.666.000	80,82%
	1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.400.000	7.650.000	91,07%
	1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	14.000.000	58,33%
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.700.460	89.330.438	88,75%
	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.329.000	97,54%
	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00%
	1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	3.300.000	67,29%
	1.4.4	Penyediaan Bahan Material	90.050.000	8.907.000	05,34%
	1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.650.000	66.373.000	88,31%
	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.091.873	89.980.964	83,18%

Dipindai dengan CamScanner

	1.5.1	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.800.000	30,00%
	1.5.2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.172.972	19.699.700	69,92%
	1.5.3	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	326.000	16,26%
	1.5.4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.249.000	89.249.100	99,88%
	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.985.000	5.350.000	35,91%
	1.6.1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.800.000	3.800.000	48,90%
	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.984.000	1.930.000	21,48%
	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	0	0	0,00%
	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PELAYANAN PUBLIK	14.868.800	13.350.800	89,87%
	2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14.868.800	13.350.800	89,87%
	2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	3.900.000	2.825.000	64,28%
	2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	3.900.000	3.126.000	82,27%
	2.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.150.800	7.800.800	85,71%
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.858.800	10.861.000	78,42%
	3.1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	12.858.800	10.861.000	78,42%
	3.1.1	Penyelenggaraan dan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.858.800	10.861.000	78,42%
	4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA	12.454.100	10.867.900	86,98%
	4.1	Fasilitas Penyelenggaraan Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12.454.100	10.867.900	86,98%
	4.1.1	Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	5.494.300	5.387.000	98,06%
	4.1.2	Fasilitas Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Desa	6.935.800	5.480.000	69,90%
	Total		3.580.484.422	1.898.450.900	53,30%

Pada tahun 2023 terdapat 4 program dan 9 kegiatan yang dilaksakana di Kecamatan Banjang, termasuk diantaranya berbagai pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator tersedianya jasa surat menyurat sehingga kegiatan pengadministrasi surat masuk dan surat keluar berjalan lancar 12 bulan.

Jumlah surat masuk = 424 surat

Jumlah surat keluar = 1069 surat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dengan indikator terbayarnya jasa PDAM dan PLN dan Internet TELKOM untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perkantoran agar berjalan lancar.

c. Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan dengan indikator terbayarnya honorarium tenaga non PNS administrasi sehingga keterbatasan PNS dalam melaksanakan tugas dapat teratasi. Di kecamatan Banjang terdapat 4 orang tenaga honor.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator terbayarnya honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor sehingga kegiatan berjalan kondusif (nyaman dan aman).

e. Kegiatan Penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor)dengan indikator tersedianya bahan ATK sehingga kebutuhan ATK dalam melaksanakan kegiatan perkantoran dapat tercukupi.

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator tersedianya bahan cetakan dan penggandaan sehingga berbagai perlengkapan dokumen pelayanan dapat terpenuhi.

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor dengan indikator tersedianya perlengkapan listrik.

h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga kegiatan berjalan lancar (efesien dan efektif) sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan indikator tersedionya makanan dan minuman sehingga kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dan tamu dapat terpenuhi.

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan indikator tersedianya biaya rapat dan perjalanan dinas

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

sehingga kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dapat terlaksana.

k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya gedung kantor.

l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dengan indikator terpeliharanya kendaraan dinas operasional kegiatan.

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD dengan indikator terbinanya kegiatan PBB dan realisasi ADD. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melakukan pembinaan dan fungsi fasilitasi dalam penerimaan PBB di desa, serta melakukan penerimaan PAD dan IMB masyarakat di kecamatan Banjang.

b. Kegiatan monitoring Perizinan Pembangunan di Kecamatan dengan indikator termonitornya perizinan bangunan. Kegitan ini mendukung kegiatan pembinann PBB dan PAD melalui retribusi IMB serta mencakup berbagai penegakan peraturan daerah dalam rangka ketertiban daerah.

c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi dan PATEN untuk masyarakat Banjang yang meliputi:

- Pelayanan perbinan = dokumen pelayanan
- Pelayanan non perizinan = dokumen pelayanan
- Pelayanan kependudukan. = dokumen pelayanan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Pembinaan Masyarakat Sejahtera dengan indikator terlaksananya kegiatan PKK yang diagendakan setiapa bulan bagi TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa.

b. Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan dengan indikator termonitornya kegiatan sosial keagaman. Dalam kegiatan ini mencakup :

- Pemberian rekomendasi proposal kegiatan sosial keagamaan
- Fasilitasi dan kordinasi kegiatan PKH (program Keluarga harapan)
- Fasilitasi distribusi KKS, KIS, KIP,

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

- Fasilitasi kegiatan UKS
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan TKSK dinas sosial.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator tertibnya pemerintahan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa dengan:

- Memfasilitasi lombe desa
- Memfasilitasi pemilihan kepala desa
- Membina aparat desa,
- Membina pelaksanaan dana desa (ADD).

d. Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa dengan indikator termonitornya pembangunan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan pembinaan pembangunan desa melalui:

- Fasilitasi dan pendampingan Musrenbang desa dan kecamatan
- fasilitasi dan koordinasi program pemberdayaan SPP UPK PNPM
- Fasilitasi pembinaan Posyandu
- Fasilitasi kegiatan PISEW (pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah) di Desa Lok Bangsai
- Koordinasi kegiatan PAMSIMAS
- Fasilitasi/koordinasi pembinaan BUMDes.

e. Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan dengan indikator termonitornya kegiatan sosial keagamaan. Dalam kegiatan ini mencakup :

- Pemberian rekomendasi proposal kegiatan sosial keagamaan
- Fasilitasi dan kordinasi kegiatan PKH (program Keluarga harapan)
- Fasilitasi distribusi KKS, KIS, KIP,
- Fasilitasi kegiatan UKS
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan TKSK dinas sosial.

f. Kegiatan monitoring Perbinan Pembangunan di Kecamatan dengan indikator termonitornya perbinan bangunan. Kegitan ini mendukung kegiatan pembinann PBB dan PAD melalui retribusi IMB serta mencakup berbagai penegakan peraturan daerah dalam rangka ketertiban daerah.

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator tertibnya pemerintahan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa dengan:
   - Memfasilitasi lomba desa
   - Memfasilitasi pemilihan kepala desa
   - Membina aparat desa,
   - Membina pelaksanaan dana desa (ADD).

b. Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa dengan indikator termonitornya pembangunan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan pembinaan pembangunan desa melalui:
   - Fasilitasi dan pendampingan Musrenbang desa dan kecamatan
   - fasilitasi dan koordinasi program pemberdayaan SPP UPK PNPM
   - Fasilitasi pembinaan Posyandu
   - Fasilitasi kegiatan PISEW (pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah) di Desa Lok Bangkai
   - Koordinasi kegiatan PAMSIMAS
   - Fasilitasi/koordinasi pembinaan BUMDes.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator tertibnya pemerintahan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa dengan:
   - Memfasilitasi lomba desa
   - Memfasilitasi pemilihan kepala desa
   - Membina aparat desa,
   - Membina pelaksanaan dana desa (ADD).

d. Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa dengan indikator termonitornya pembangunan desa. Dalam kegiatan ini kecamatan Banjang melaksanakan pembinaan pembangunan desa melalui:
   - Fasilitasi dan pendampingan Musrenbang desa dan kecamatan
   - Fasilitasi pembinaan Posyandu

Dipindai dengan CamScanner

- Fasilitasi/koordinasi pembinaan BUMDes.

c. Kegiatan monitoring Perbinan Pembangunan di Kecamatan dengan indikator termonitornya perbinan bangunan. Kegitan ini mendukung kegiatan pembinaan PBB dan PAD melalui retribusi IMB serta mencakup berbagai penegakan peraturan daerah dalam rangka ketertiban daerah.

f. Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang meliputi kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan

Dengan mengacu pada Renstra kecamatan Banjang 2023-2026, pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjang tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjang
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	Kondisi akhir periode
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	0	00	00	88	80
			2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	69	73	75	77	73
2.	Meningkatnya Desa menjadi Desa mandiri di Kecamatan Banjang	Persentase desa berkembang menjadi desa maju	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Desa Yang melaksanakan musyawarah dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	500 100 %

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Banjang yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1) Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut sehorusnya didukung dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber dana.

2) Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan memfasilitasi dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3) Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4) Tuntutan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas pelayanan dalam meraopon kepuasan masyarakat yang dapat diketahui dari survey kepuasan pelayanan.

Berbagai isu tersebut di atas, membutuhkan respon yang baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kecamatan Banjang. Luasnya tugas dan kewenangan camat membutuhkan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak.

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
- Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
- Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
- Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
- Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
- Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak

b. Non perizinan, yang mencakupi 5 urusan pemerintahan, yaitu :
   1) Urusan pemerintahan umum
   2) Urusan sosial

Dipindai dengan CamScanner

3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial, meliputi :

a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. pemberian tanda tangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan **administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;
f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan **administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;
b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;

Dipindai dengan CamScanner

e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;

f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;

g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;

b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;

c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;

d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;

e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;

g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;

i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;

Dipindai dengan CamScanner

j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;

k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;

m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;

o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;

q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);

s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;

t. Rekomendasi cuti dan ijin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;

u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan

w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dengan Rancangan Awal RKPD. Dengan melihat RKPD kab HSU tahun 2023, pembangunan sudah mengacu pada visi dalam RPJMD 2023-2026 yang disusun tanpa adanya visi dan misi. RKPD Kab. HSU tahun 2023 ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja). Maka kebutuhan program kegiatan dalam RENJA kecamatan Banjang 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dipindai dengan CamScanner

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	[Program] Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banjang	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 3.373.070.810	[Program] Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banjang	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 3.382.565.879	
	[Kegiatan] Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	Rp 9.999.750	[Kegiatan] Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	100%	Rp 10.000.000	
	[Sub Kegiatan] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 Dokumen	Rp 4.999.750	[Sub Kegiatan] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 Dokumen	Rp 5.000.000	
	[Sub Kegiatan] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPLaun Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banjang	jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	Rp 5.000.000	[Sub Kegiatan] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKPLaun Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banjang	jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	Rp 5.000.000	
	[Kegiatan] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase tertibnya Administrasi Keuangan Daerah	100%	Rp 2.156.109.302	[Kegiatan] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase tertibnya Administrasi Keuangan Daerah	100%	Rp 2.156.119.302	
	[Sub Kegiatan] Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Banjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 2.151.112.302	[Sub Kegiatan] Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Banjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 2.151.112.302	
	[Sub Kegiatan] Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banjang	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	1 Laporan	Rp 2.997.300	[Sub Kegiatan] Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banjang	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	1 Laporan	Rp 3.000.000	
	[Kegiatan] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 17.000.000	[Kegiatan] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 17.000.000	

Digitized dengan CamScanner

		[Sub Kegiatan] Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banjarsari	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 Orang	Rp 3.000.000	[Sub Kegiatan] Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Banjarsari	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 Orang	Rp 3.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Kecamatan Banjarsari	Pakaian Dinas yang diberi sesuai dengan Jumlah ASN	22 Orang	Rp 12.000.000	[Sub Kegiatan] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Kecamatan Banjarsari	Pakaian Dinas yang diberi sesuai dengan Jumlah ASN	22 Orang	Rp 12.000.000	
		[Kegiatan] Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Kecamatan Banjarsari	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	100%	Rp 93.773.200	[Kegiatan] Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Kecamatan Banjarsari	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana kerja	100%	Rp 96.454.872	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Banjarsari	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	30 Item	Rp 2.900.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Banjarsari	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Banjarsari	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 450.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Banjarsari	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 7.103.965	Rp 7.103.965	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Banjarsari	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	6 jenis atau 30.000 lembar	Rp 3.300.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Banjarsari	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Banjarsari	jumlah ATK yang disediakan	20 jenis	Rp 6.043.150	[Sub Kegiatan] Penyediaan Bahan / Material	Kecamatan Banjarsari	jumlah ATK yang disediakan	20 jenis	Rp 6.043.454	
		[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banjarsari	jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	24 Kali	Rp 27.153.000	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banjarsari	jumlah dapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	24 Kali	Rp 27.186.854	
		[Kegiatan] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kecamatan Banjarsari	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 137.000.000	[Kegiatan] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kecamatan Banjarsari	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 138.000.000	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Banjarsari	Persentase surat masuk dan surat keluar yang ditindaklanjuti sesuai Peraturan	100%	Rp 5.000.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Banjarsari	Persentase surat masuk dan surat keluar yang ditindaklanjuti sesuai Peraturan yang	100%	Rp 5.000.000	

Digitized dengan CamScanner

		[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banjang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	3 rekening	Rp 19.998.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banjang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	3 rekening	Rp 20.000.000	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banjang	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 121.000.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banjang	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 121.000.000	
		[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase tergaliharanya barang milik daerah	100%	Rp 14.000.000	[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banjang	Persentase tergaliharanya barang milik daerah	100%	Rp 15.000.000	
		[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banjang	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 buah	Rp 6.997.000	[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Banjang	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 buah	Rp 5.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Banjang	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	Rp 5.000.000	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Banjang	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	Rp 5.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banjang	Persentase Bangunan Kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara dalam kondisi baik	3 unit	Rp 6.441.500	[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banjang	Persentase Bangunan Kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara dalam kondisi baik	3 unit	Rp 5.000.000	
2	[Program] Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kecamatan Banjang	Persentase terlaksana administrasi pelayanan publik	100%	Rp 32.186.441	[Program] Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjang	Persentase terlaksana administrasi pelayanan publik	100%	Rp 33.000.000	
		[Kegiatan] Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Banjang	Persentasenya terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp 18.486.441	[Kegiatan] Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Banjang	Persentasenya terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	120%	Rp 19.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Banjang	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	20 Berkas	Rp 4.994.000	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Banjang	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	20 Berkas	Rp 5.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Banjang	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	100 Berkas	Rp 3.997.400	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Banjang	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	100 Berkas	Rp 4.000.000	
		[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan ketentraman	Kecamatan Banjang	Jumlah ketentraman dan yang ditanganani	3 Kasemangat a	Rp 35.304.041	[Sub Kegiatan] Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan ketentraman	Kecamatan Banjang	Jumlah kegiatan ketentraman yang ditanganani	3 Kegiatan	Rp 50.000.000	

Digitized by CamScanner

	lain yang dilimpahkan					lain yang dilimpahkan					
3	(Program) Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Banjang	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	Rp 10.000.000	(Program) Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Banjang	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	Rp 10.000.000	
	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase sekesanya pemberdayaan desa	100%	Rp 23.000.000	(Kegiatan) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase sekesanya pemberdayaan desa	100%	Rp 23.000.000	
	(Sub Kegiatan) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Banjang	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	12 kegiatan	Rp 29.999.000	(Sub Kegiatan) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Banjang	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	12 kegiatan	Rp 30.000.000	
4	(Program) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase terlaksanya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	100%	Rp 10.000.000	(Program) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase terlaksanya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	100%	Rp 10.000.000	
	(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase Fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100%	Rp 10.000.000	(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100%	Rp 10.000.000	
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Jumlah desa yang tertib administrasi	20 Desa	Rp 1.000.000	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjang	Jumlah desa yang tertib administrasi	20 Desa	Rp 1.000.000	
	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan Daerah	100%	Rp 1.000.000	(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Banjang	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan Daerah	100%	Rp 1.000.000	
	JUMLAH TOTAL				Rp 3.409.208.873					Rp 3.480.356.873	

Digitized by CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan kedudukan Kecamatan yang fungsi utamanya adalah melaksanakan koordinasi, dan melihat kesesuaian urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan Bupati Hulu Sungai Utara serta kemampuan anggaran, SKPD kecamatan Banjang telah menelaah berbagai usulan masyarakat mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di desa-desa hingga Musrenbang kecamatan.

Daftar usulan pembangunan tahun 2025 untuk wilayah kecamatan Banjang yang telah disepakati hasil dari kegiatan Musrenbang Kecamatan Banjang terdiri dari:

- Usulan bidang infrastruktur
- Usulan bidang social budaya
- Usulan bidang ekonomi

Usulan-usulan tersebut telah disampaikan ke SKPD yang membidangi untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANJANG

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 225 ayat (1) bahwa diantara tugas Camat adalah :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5);
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas mengandung konsekuensi yang luas terhadap tugas atau peran kecamatan, termasuk berbagai program nasional atau daerah yang diklaksanakan ke desa dan melibatkan peran kecamatan. Ada berbagai program nasional yang mempengaruhi tugas atau pelayanan di kecamatan diantaranya:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
    - Dana desa

      Dana Desa yang cukup besar membutuhkan fasilitasi dan koordinasi berbagai pihak. kedepannya pengelolaan dana desa akan berorientasi

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pada kemandirian desa sehingga membutuhkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat termasuk BUMDes

- Program pemberdayaan

  Program pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang partisipatif dan akan menjadi pilihan pemerintah. Program pemberdayaan yang pernah masuk diantaranya Rembuk Stunting, Pembinaan Posyandu.

- Program sosial

  Banyaknya masalah sosial dan prioritas pada pengentasan kemiskinan akan membutuhkan berbagai program sosial yang melibatkan kecamatan. Program sosial yang pernah masuk diantaranya fasilitasi BLT Subsidi BBM, KIP, KIP, KIS, KKS, dan PKH.

III. 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Banjang

Kecamatan Banjang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai dalam RENSTRA kecamatan Banjang 2023-2026 berikut :

Tujuan Kecamatan Banjang :

1. Mewujudkannya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya desa maju di Kecamatan Banjang
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat

Sasaran Kecamatan Banjang :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan Banjang
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk tahun 2024, Kecamatan Banjang merencanakan 4 program dan 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan (Permen 90 Tahun 2020) dengan pagu anggaran Rp. 286.750.230,- yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

1) (Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3) (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pelayanan umum

(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4) (Sub Kegiatan) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
5) (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah

6) (Sub Kegiatan) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
7) (Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8) (Sub Kegiatan) Penyediaan peralatan rumah tangga
9) (Sub Kegiatan) Penyediaan bahan logistic kantor
10) (Sub Kegiatan) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
11) (Sub Kegiatan) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12) (Sub Kegiatan) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
13) (Sub Kegiatan) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
14) (Sub Kegiatan) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya

(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

15) (Sub Kegiatan) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
16) (Sub Kegiatan) Bimbingan teknis implementasi perundangan-undangan

(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

17) (Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

17. (Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

(Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat

1) (Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan
2) (Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenagan lain yang dilimpahkan
3) (Sub Kegiatan) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perijinan non usaha
4) (Sub Kegiatan) Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

(Kegiatan) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

1) (Sub Kegiatan) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

(Kegiatan) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

1) (Sub Kegiatan) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
2) (Sub Kegiatan) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
3) (Sub Kegitaan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

5. **Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum**

(Kegiatan) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banjang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjang Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Tabel IV.1. RUMUSAN RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026 PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR CAMAT BANJANG

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023-2026

KODE							Program/Kegiatan , dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan(Outcome / Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting
									Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		01				1	(Program) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	Kec. Banjang	100%	Rp. 2.373.870.832		
X	X	01	2	01			(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	Kec. Banjang	100%	Rp 8.999.780		
X	X	01	2	01	01		(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kec. Banjang	3 Dokumen	Rp 8.999.780	APBD	
X	X	01	2	01	06		(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan yang disusun	Kec. Banjang	5 Laporan	Rp 5.000.000	APBD	
X	X	01	2	02			(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah	Kec. Banjang	100%	Rp2.154.109.302		

Digitized dengan CamScanner

									(Sub Kegiatan) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Banjang	100%	Rp 2.151.112.002	APBD
X	X	0 1	2	02	0 5				(Sub Kegiatan) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Kec. Banjang	1 Laporan	Rp 2.997.300	APBD
X	X	0 1	2	05					(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Adminastrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Banjang	100%	Rp 17.000.000	
X	X	0 1	2	05	1 1				(Sub Kegiatan) Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kec. Banjang	1 Orang	Rp 5.000.000	APBD
									(Sub Kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas yang dibeli sesuai dengan Jumlah ASN	Kec. Banjang	22 Orang	Rp 12.000.000	APBD
X	X	0 1	2	06					(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	Kec. Banjang	100%	Rp 39.772.350	
X	X	0 1	2	06	0 1				(Sub Kegiatan) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	Kec. Banjang	10 Jenis	Rp 2.990.200	APBD
X	X	0 1	2	06	0 2				(Sub Kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Banjang	2 jenis	Rp 450.000	APBD
		0 1	2	06	0 5				(Sub Kegiatan) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Kec. Banjang	6 jenis atau 10.000 lembar	Rp 3.100.000	APBD

Digitized dengan CamScanner

X	X	01	2	06	07				*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Bahan / Material	jumlah ATK yang disediakan	Kec. Banjang	30 jenis	Rp 6.067.150	APBD	
X	X	01	2	06	09				*(Sub Kegiatan)* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	24 Kali	24 Kali	Rp 27.165.000	APBD	
X	X	01	2	08					(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Banjang	100%	Rp 197.998.600		
X	X	01	2	08	01				*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Didistribusikan sesuai Peruntukannya	Kec. Banjang	100%	Rp 5.000.000	APBD	
X	X	01	2	08	02				*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	Kec. Banjang	3 rekening	Rp 19.998.600	APBD	
X	X	01	2	08	04				*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Banjang	100%	Rp 113.000.000	APBD	
X	X	01	2	09					(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Kec. Banjang	100%	Rp 14.990.800		
X	X	01	2	09	01				*(Sub Kegiatan)* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kec. Banjang	6 buah	Rp 4.997.000	APBD	

Digitized dengan CamScanner

									(Sub Kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Banjang	8 jenis	Rp 5.000.000	APBD	
X	X	01	2	09	06				*(Sub Kegiatan)* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Bangunan Kantor dan Rumah Dinas Yang dipelihara dalam kondisi baik	Kec. Banjang	2 unit	Rp 4.991.800	APBD	
URUSAN KEWILAYAHAN																
BIDANG URUSAN KECAMATAN																
X	X	02	2			1			***(Program)* Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase tertibnya administrasi pelayanan publik**	Kec. Banjang	100%	Rp 32.991.800		
X	X	02	2	04					[Kegiatan] Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Persentasenya terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat**	Kec. Banjang	100%	Rp 32.991.800		
X	X	02	2	04	01				(Sub Kegiatan) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	Kec. Banjang	20 Berkas	Rp 4.994.400	APBD	
X	X	02	2	04	02				(Sub Kegiatan)Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	Kec. Banjang	100 Berkas	Rp 3.997.400	APBD	
X	X	03	2	04	03				*(Sub Kegiatan)* Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	Kec. Banjang	2 Kewenangan	Rp 24.000.000	APBD	
X	X	03				2			***(Program)* Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Kec. Banjang	100%	Rp 19.999.800		
X	X	03	2	03					[Kegiatan] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase suksesnya pemberdayaan desa**	Kec. Banjang	100%	Rp 19.999.800		

Digitized dengan CamScanner

X	X	03	2	01	09				(Sub Kegiatan) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kec. Banjang	12 kegiatan	Rp 19.999.800	APBD	
X	X	06				4	(Program) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Kec. Banjang	100%	Rp 10.999.800		
X	X	06	2	01				(Kegiatan) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	Kec. Banjang	100%	Rp 10.999.800		
X	X	06	2	01	02				(Sub Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	Kec. Banjang	20 Desa	Rp 5.000.000	APBD	
X	X	06	2	01	09				(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase sinkronnya perencanaan desa dengan Perencanaan daerah	Kec. Banjang	100%	Rp 5.999.800	APBD	
						JUMLAH TOTAL							Rp 2.437.862.232		

Banjang, Maret 2022

Camat Banjang,

Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Digitized dengan CamScanner

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Dalam memperhatikan kondisi internal dan eksternal Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu memperhatikan perkembangan sesuai dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 dapat menjadi arah, pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Banjang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Banjang.

Rencana kerja (Renja) 2025 ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Banjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Banjang ini bersifat umum dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Perangkap Daerah (RPD) 2003 – 2026 dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dengan catatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Koordinasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi perencanaandan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap kerichoan Allah Subhanahuwata'ala, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yang baik untuk **Kabupaten Hulu Sungai Aamiin ya rabbal alamin**

Banjang, Maret 2024
Plt.Camat Banjang

Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia dan Petunjuk-Nya jualah Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Haur Gading pada Tahun Anggaran 2025, serta sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran yang sifatnya membangun akan kami terima demi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini.

Haur Gading, 28 Maret 2024

Plt. CAMAT HAUR GADING,

AHMAD MA'RIFATULLAH, S.STP, M.I.P

NIP. 19900614 201206 1 001

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.. 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

3.3 Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP 49

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading dan Pencapaian Renstra Kecamatan Haur Gading Sampai Dengan Tahun 2023 Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 9

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2023 18

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara 20

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara 26

Tabel 2.5 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Haur Gading 38

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 40

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diantaranya telah diatur bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun RencanaStrategis SKPD (Renstra SKPD) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan SKPD dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai bentuk rencana tahunan SKPD yang mengacu pada Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Haur Gading terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Haur Gading agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 adalah merupakan dokumen rencana tahunan, karena tahapannya tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Haur Gading 2023-2026 maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026. Namun demikian sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Dengan demikian Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 ini secara umum mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 maupun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Haur Gading Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading tahun 2025 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak terlepas dari landasan hukum keberadaan organisasi Kecamatan dan proses perencanaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara No.140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
16. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59/2007 dan Perubahan Kedua Permendagri No. 21/2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara RI Th. 2019 No. 1114);
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 288);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Kalsel Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2007 TentangPembentukan Kecamatan Haur Gading;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. HSU Th. 2011 No. 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kab. HSU Th. 2021 No. 28);
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan khususnya di Kecamatan Haur Gading serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Haur Gading dalam menentukan berbagai rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Haur Gading berkenaan dengan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dikarenakan masih adanya program dan kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga anggaran yang disediakan tidak sepenuhnya terserap secara maksimal hal ini mungkin disebabkan karena pelaksana teknis kegiatan masih belum memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan prioritas dimaksud maka SKPD Kecamatan Haur Gading pada **Tahun Anggaran 2023** diberikan wewenang untuk melaksanakan **4 Program** dengan **10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan**, yaitu :

1. **Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
   - Sub Kegiatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan

4. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Beberapa hambatan dan permasalahan tentunya juga dihadapi oleh SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang lalu terutama mengenai permasalahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu terkait Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan, sehingga realisasi anggaran kegiatan 0%, dan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yaitu terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 6.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, karena tidak ada regulasi/peraturan yang mengaturnya.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Haur Gading Sampai Dengan Tahun 2023
Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01					KECAMATAN										
7	01	01				**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	95,12%	95,12%	100%	96,20%	96,20%	
7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	96,89%	96,89%	100%	97,90%	97,90%	
7	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	96,89%	96,89%	100%	99,90%	99,90%	
7	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen/Laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	96,89%	96,89%	100%	99,90%	99,90%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	87,61%	87,61%	100%	95,87%	95,87%	
7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	87,61%	87,61%	100%	95,87%	95,87%	
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	89,90%	89,90%	100%	96,63%	96,63%	
7	01	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	89,90%	89,90%	100%	96,63%	96,63%	
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	93,21%	93,21%	100%	97,74%	97,74%	
7	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	66,86%	66,86%	100%	88,95%	88,95%	
7	01	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yg dibeli sesuai dengan spesifikasi.	100 %	100 %	100 %	99,77%	99,77%	100%	99,92%	99,92%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	86,28%	86,28%	100 %	95,43%	95,43%	
7	01	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan rapat yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	86,84%	86,84%	100 %	95,61%	95,61%	
7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD dalam dan luar daerah yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	99,32%	99,32%	100 %	99,77%	99,77%	
7	01	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	100 %	85,20%	85,20%	100 %	95.07%	95.07%	
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
7	01	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	92,87%	92,87%	100 %	97,62%	97,62%	
7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100 %	100 %	100 %	92,11%	92,11%	100 %	97,37%	97,37%	
7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumberdaya air listrik	100 %	100 %	100 %	66,04%	66,04%	100 %	88,68%	88,68%	
7	01	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	98,00%	98,00%	100 %	99,33%	99,33%	
7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	99,37%	99,37%	100 %	99,79%	99,79%	
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	83,78%	83,78%	100 %	94,59%	94,59%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	89,30%	89,30%	100 %	96,43%	96,43%	
7	01	01	2	09	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	37,98%	37,98%	100 %	79,33%	79,33%	
7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	99,72%	99,72%	100 %	99,91%	99,91%	
7	01	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	47,50%	47,50%	100 %	82,50%	82,50%	
7	01	02	2			**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	80,76%	80,76%	100 %	93,59%	93,59%	
7	01	02	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	80,76%	80,76%	100 %	93,59%	93,59%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	02	2	04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan perizinan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	71,83%	71,83%	100 %	90,61%	90,61%	
7	01	02	2	04	02	Sub Kegiatan PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah administrasi pelayanan non perizinan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	94,53%	94,53%	100 %	98,18%	98,18%	
7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah RTS-PM yang menerima RASTRA	100 %	100 %	100 %	98,95%	98,95%	100 %	99,65%	99,65%	
7	01	03				**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	70,58%	70,58%	100 %	90,19%	90,19%	
7	01	03	2	05		Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode						Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (n-1) (2025)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	03	2	05	01	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	
7	01	03	2	05	02	Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	66,66%	66,66%	
7	01	06				**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Tercapainya pembinaan & pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	83,09%	83,09%	100 %	94,36%	94,36%	
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	83,09%	83,09%	100 %	94,36%	94,36%	
7	01	06	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasinya	100 %	100 %	100 %	83,59%	83,59%	100 %	94,53%	94,53%	
7	01	06	2	01	09	Sub Kegiatan Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase usulan desa yang diakomodir pada Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	100 %	81,16%	81,16%	100 %	93,72%	93,72%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program/kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, pada tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan, sehingga realisasi anggaran kegiatan 0%.

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tidak memenuhi target realisasi kinerja hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja hanya mencapai 37,98% masih dinilai cukup rendah.

  Begitu pula pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak memenuhi target realisasi kinerja hal ini disebabkan karena capaian realisasi kinerja hanya mencapai 47,50% masih dinilai cukup rendah.

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

  Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Sub Kegiatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 6.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, karena tidak ada regulasi/peraturan yang mengaturnya.

- **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

  Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.600.000,- atau 46,00%.

2) Program/kegiatan yang telah **memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

   Seluruh Program dan Kegiatan selain yang diuraikan di atas, dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan persentase dari 75% hingga100%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja SKPD Kecamatan Haur Gading dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Haur Gading. Seluruh kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2023 dibiayai dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 2.266.468.878,-** *(Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)* dan terealisasi sebesar **Rp. 1.826.195.112,-** *(Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)* atau sekitar **(80,57%)**.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Derah, Kecamatan Haur Gading pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 19.300.000,- yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun setelah Perubahan, target Pendapatan Asli Daerah untuk Kecamatan Haur Gading dihapus atau 0 (Nol) Rupiah. Hal tersebut disebabkan, pihak Kecamatan Haur Gading tidak bisa menarik Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi IMB, karena peraturan terkait kedua retribusi tersebut dicabut.

Adapun target dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Retribusi Pelayanan Pasar	0,-	0,-	
2	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,-	0,-	
	J U M L A H	**0,-**	**0,-**	

Berdasarkan data sebagaimana disajikan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 SKPD Kecamatan Haur Gading tidak dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi Kas Daerah. Pada tahun 2023 tidak memenuhi target, karena realisasi pendapatan yang di terima sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Hal tersebut terjadi, karena pada tahun 2023 belum ada aturan (peraturan daerah) yang memerintahkan untuk melaksanakan penagihan retribusi tersebut.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Haur Gading tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Anggaran yang di bebankan dalam DPA Perubahan Kecamatan Haur Gading untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.040.010.000,- untuk gaji dan tunjangan PNS. Dari anggaran yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.625.077.799,- atau sebesar 79,66%.

Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 226.458.878,- yang mana sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 201.117.313,- atau sebesar 88,81%.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan atau Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
1	Program yang berkaitan dengan penyelengaraan Urusan	-	7 Program	100%	100%	100%	100%	6 Program	-	100%	100%	
2	Keberadaan Standar Operasional Prosedur	-	15 SOP	100%	100%	100%	100%	15 SOP	-	100%	100%	
3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelengaraan Urusan	-	Ada	100%	100%	100%	100%	Ada	-	100%	100%	
4	Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	-	71,42%	100%	100%	100%	100%	71,42%	-	100%	100%	
5	Keberadaan Jabatan Fungsiunal dalam struktur organisasi SKPD	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	
6	Rasio PNS	-	0,37%	100%	100%	100%	100%	0,37%	-	100%	100%	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		80%	100%	100%	100%	100%	80%	-	100%	100%	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Renstra - Renja	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11	Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	-	0,16%	100%	100%	100%	100%	0,16%	-	100%	100%	
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	-	0,11%	100%	100%	100%	100%	0,11%	-	100%	100%	
15	Total Belanja Langsung dari total belanja perangkat daerah	-	24,70%	100%	100%	100%	100%	24,70	-	100%	100%	
16	Total belanja tidak langsung dari total perangkat daerah	-	75,29%	100%	100%	100%	100%	75,29%	-	100%	100%	
17	Keberadaan Laporan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	-	Ada, 3 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Neraca - Calk - LRA	-	100%	100%	
18	Adanya invintarisasi barang atau Asset Perangkat Daerah	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)n-2	(6)n-1	(7)n	(8)n+1	(9)n-2	(10)n-1	(11)	(12)	(13)
19	Jumlah Asset yang tidak digunakan oleh perangkat daerah	-	0	100%	100%	100%	100%	0	-	100%	100%	
20	Jumlah Fasilitas Prasarana Informasi	-	1 Jenis	100%	100%	100%	100%	- Papan Pengumuman	-	100%	100%	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarkat	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading dimaksudkan untuk menentukan permasalahan maupun hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun sebelumnya.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 2 disebutkan bahwa Organisasi Kecamatan Haur Gading berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Camat. Adapun tugas pokok Kecamatan Haur Gading adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeah kabupaten, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan dan melaksanakan urusan pemeintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keja pemeintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Kecamatan Haur Gading berdasarkan tugas diatas yang diberikan memiliki kendala dalam penerapannya, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan Bupati tentang wewenang yang dilimpahkan kepada Camat. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Camat berpegang kepada hal-hal yang selama ini memang telah menjadi tugas Camat, hal ini demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Haur Gading tahun 2025 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3) Pelayanan Prima. Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat. Khususnya dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten terkait penyelenggaraan Rembuk Stunting di tingkat Kecamatan.
4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5) Peningkatan partisipasi aparatur dan masyarakat terkait kesiapan wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menjaga suasana yang kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan umum.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi diwilayah Kecamatan Haur Gading.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD dapat dilihat Tabel 2.4 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Kecamatan Haur Gading

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase pemenuhansarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.209.080.700**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**KecamatanHaur Gading**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.256.659.003**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokumen	1.000.000	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokumen	2.000.000	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	1.000.000	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KecamatanHaur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.040.010.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.040.588.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	14 Orang	2.040.010.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	18 Orang	2.040.588.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.000.000	
	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yangmengikuti Bimtek	0 Orang	0	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KecamatanHaur Gading	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 Orang	6.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	30.082.200	Kegiatan AdministrasiUmum Perangkat Daerah	KecamatanHaur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	70.083.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	500.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KecamatanHaur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	1.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	500.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	KecamatanHaur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	30.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	5 Jenis / 10 Ribu Lembar	4.082.200	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KecamatanHaur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	5 Jenis / 10 Ribu Lembar	4.083.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	5.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	KecamatanHaur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	5.000.000	
	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Haur Gading	Persantese Pelaksanaan Rapat yang terealisasi	12 Laporan	10.000.000	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	KecamatanHaur Gading	Persantese PelaksanaanRapat yang terealisasi	100%	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	12 Laporan	10.000.000	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KecamatanHaur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Kali	20.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	
	- Sub Kegiatan Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	- Sub Kegiatan Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	124.988.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.988.003	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	12 Laporan	3.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100%	4.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	12 Laporan	11.999.700	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air &internet	100%	11.999.203	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	12 Laporan	108.988.800	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	100%	108.988.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	12.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gadin	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Mobil dan 5 Kendaran	9.000.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Mobil dan 5 Kendaran	7.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara	1 Buah	0	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gadin	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara	1 Buah	0	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedungkantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000	
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**17.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**21.000.000**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Haur Gading	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	100%	0	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	Kecamatan Haur Gading	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	100%	4.000.000	
	- **Sub** Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan **dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Kecamatan Haur Gading	**Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	100%	0	- **Sub** Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan **dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Kecamatan Haur Gading	**Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	100%	4.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100%	5.000.000	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Haur Gading	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100%	5.000.000	
	- **Sub** Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	**Jumlah Laporan** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	- **Sub** Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	**Jumlah Laporan** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpahkan kepada Camat	100%	12.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpah kan kepada Camat	100%	12.000.000	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	100 Dokumen	5.000.000	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	10 Dokumen	5.000.000	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusanpemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	5.000.000	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	5.000.000	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dgn kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	4 Laporan	2.000.000	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenangan lain yang dilaksanakan	4 Laporan	2.000.000	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya PemberdayaanDesa	100%	10.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya PemberdayaanDesa	100%	10.000.000	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Trantib**	**100%**	**5.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Trantib**	**100%**	**5.000.000**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu di Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu di Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	12 Laporan	5.000.000	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	12 Laporan	5.000.000	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**0**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**62.00.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	KegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	62.000.000	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	0	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kec.	13 Laporan	62.000.000	
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**20.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**20.000.000**	
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	20.000.000	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	20.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dgn Perencanaan Daerah	100%	15.000.000	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dgn Perencanaan Daerah	100%	15.000.000	
J U M L A H					**2.261.080.700**	**J U M L A H**				**2.374.659.003**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai hasil review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas, maka setelah dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, maka untuk SKPD Kecamatan Haur Gading merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase pemenuhansarana dan prasarana kerja**	**100%**	**2.256.659.003**	**PAD**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokumen	2.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	2.000.000	**PAD**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.040.588.000	**DAU**	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	18 Orang	2.040.588.000	**DAU**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah ASN yangmengikuti Bimtek	2 Orang	6.000.000	**PAD**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	70.083.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Komponen Instalasi Listrik penerangan kantor yang dibutuhkan	100%	1.000.000	**PAD**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	30.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	4 Paket	4.083.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	4 Paket	5.000.000	PAD	
	- Sub KegiatanFasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Haur Gading	Persantese Pelaksanaan Rapat yang terealisasi	100%	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	20 Laporan	20.000.000	PAD	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	100%	0	PAD	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	0 Buah	0	PAD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.988.003	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Surat menyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100%	4.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	11.999.203	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase Jasa Pelayanan umum kantor	100%	108.988.800	PAD	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Mobil dan 5 Kendaran	7.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah peralatandan mesin yang dipelihara	100%	2.000.000	PAD	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara	1 Buah	0	PAD	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Haur Gading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Buah	1.000.000	**PAD**	
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**21.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kecamatan Haur Gading	**Persentase Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan**	100%	4.000.000	**PAD**	
	- **Sub** Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan **dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Kecamatan Haur Gading	**Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	100%	4.000.000	**PAD**	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya urusan yg dilimpahkan kepada Camat	100%	12.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan	100 Dokumen	5.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	4 Laporan	5.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dgn kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah kewenanganlain yang dilaksanakan	1 Kegiatan	2.000.000	**PAD**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5.000.000	**PAD**	
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**10.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	100%	10.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec.	12 Laporan	10.000.000	**PAD**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**5.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu di Kecamatan	100%	5.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah TPS yang dimonitoring dan Barang Logistik yang diamankan	42 TPS/ 168 Barang Logistik	5.000.000	**PAD**	
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100%**	**62.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	62.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Laporan	62.000.000	**PAD**	
6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kecamatan Haur Gading**	**Persentase Desa yang tertib administrasi**	**100%**	**15.000.000**	**PAD**	
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi & koordinasi pembinaan & pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan thdp pemerintah desa	100%	15.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah desa yang tertib administrasi	18 Desa	5.000.000	**PAD**	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Haur Gading	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	100%	10.000.000	**PAD**	
TOTAL					**2.374.659.003**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Haur Gading dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selanjutnya dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Haur Gading mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tujuan

Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang transparan dan akuntabel, meningkatnya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Haur Gading dapat dilihat dalam table berikut :

3.3. Program dan Kegiatan

Program Kantor Kecamatan Haur Gading tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Haur Gading Tahun 2023-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel : 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan HaurGading

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB / 73,50	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Haur Gading	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
					Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72,46	73	73,45	73,50
2	Terwujudnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	100%	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	90%	90%	100%
3	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat Kecamatan	Persentase penurunan Angka Kriminalitas di masyarakat Kecamatan	100%	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentase penanganan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RANWAL RENJA) 2025 Kecamatan Haur Gading merupakan implementasi atas visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading tahun 2023 s/d 2026 berisi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Haur Gading. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) 2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD Kecamatan Haur Gading, maka untuk tahun 2025 rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Haur Gading adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

KECAMATAN HAUR GADING TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN		
													Fisik	Pendamping				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Sarana Kerja	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.256.659.003	2.256.659.003	0	0	0	0		100%	2.304.076.500
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas CapaianKinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		100%	5.000.000
7	01	01	2.01	01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kecamatan Haur Gading	6 Dokumen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		6 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	06	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasikinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Laporan yang disusun	Kecamatan Haur Gading	5 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		5 Laporan	2.500.000
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.040.588.000	2.040.588.000	0	0	0	0		100 %	2.103.588.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 01 2.02 01	- Sub kegiatan penyediaan gajidan tunjangan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Kecamatan Haur Gading	18 Orang	2.040.588.000	2.040.588.000	0	0	0	0		20 Orang	2.103.588.000
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.05 11	- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Haur Gading	2 Orang	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0		100 %	0
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Kecamatan Haur Gading	100 %	70.083.000	70.083.000	0	0	0	0		100 %	53.000.000
7 01 01 2.06 01	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	1 Paket	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		1 Paket	1.500.000
7 01 01 2.06 02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Haur Gading	3 Paket	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0		1 Paket	1.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN		
													Fisik	Pendamping				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	01	2.06	05	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	4 Paket	4.083.000	4.083.000	0	0	0	0		4 Paket	5.000.000
7	01	01	2.06	07	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kecamatan Haur Gading	4 Paket	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		5 Paket	10.000.000
7	01	01	2.06	08	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan rapat yang terealisasi	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		12 Laporan	15.000.000
7	01	01	2.06	09	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	20 Laporan	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0		20 Laporan	20.000.000
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Kecamatan Haur Gading	100 %	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7	01	01	2.07	01	- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Peroranganatau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibelisesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	0 Buah	0	0	0	0	0	0		100 %	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
													Fisik	Pendamping					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	125.988.003	125.988.003	0	0	0	0		100 %	130.488.500
7	01	01	2.08	01	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase suratmenyurat yang didistribusikan sesuai peruntukannya	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		12 Laporan	5.000.000
7	01	01	2.08	02	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhankebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	11.999.203	11.999.203	0	0	0	0		12 Laporan	14.999.700
7	01	01	2.08	03	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Haur Gading	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		1 Laporan	1.500.000
7	01	01	2.08	04	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	108.988.800	108.988.800	0	0	0	0		12 Laporan	108.988.800
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	12.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
													Fisik	Pendamping					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	01	2.09	01	- Sub Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	6 Unit	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0		6 Unit	9.000.000
7	01	01	2.09	06	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	4 Unit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		10 Unit	2.000.000
7	01	01	2.09	07	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	1 Buah	0	0	0	0	0	0		100 %	0
7	01	01	2.09	09	- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kecamatan Haur Gading	1 Unit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		1 Unit	1.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Haur Gading	100 %	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0		100 %	17.000.000
7	01	01	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	Persentase PenyelenggaraanRembuk Stunting di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	100 %	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		100 %	0

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
													Fisik	Pendamping					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	01	2.01	01	- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Rembuk Stunting di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		12 Laporan	0
7	01	01	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Pelayanan Publik yang Prima	Kecamatan Haur Gading	100 %	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7	01	01	2.02	03	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kpd Masyarakat	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkankepada Camat	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Haur Gading	100 %	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0		100 %	12.000.000
7	01	02	2.04	01	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Pelayanan Perizinan non usaha yang dikeluarkan	Kecamatan Haur Gading	10 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	1.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
												APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
													Fisik	Pendamping					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	01	02	2.04	02	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah yang terkait dengan non perizinan	Kecamatan Haur Gading	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7	01	02	2.04	03	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah kewenangan lainyang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		100 %	2.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa	Kecamatan Haur Gading	100 %	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
7	01	03	2.01	03	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan ketertiban umum	Persentase terlaksananya koordinasi Trantib	Kecamatan Haur Gading	100 %	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	25.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 04 2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentramandan ketertiban umum	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentramandan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	100 %	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	25.000.000
7 01 04 2.01 01	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		12 Laporan	25.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tersenyelenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Haur Gading	100 %	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0		100 %	55.000.000
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Haur Gading	100 %	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0		100 %	55.000.000
7 01 05 2.01 08	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	13 Laporan	62.000.000	62.000.000	0	0	0	0		100 %	55.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Sasaran	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
									Fisik	Pendamping					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Desayang Tertib Administrasi	Kecamatan Haur Gading	100 %	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0		100 %	20.000.000
7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yg dilaksanakan terhadap pemerintahDesa	Kecamatan Haur Gading	100 %	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0		100 %	20.000.000
7 01 06 2.01 02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Desa yang tertib administrasi	Kecamatan Haur Gading	12 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
7 01 06 2.01 09	- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase sinkronnya Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	Kecamatan Haur Gading	1 Dokumen	15.000.000	10.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
JUMLAH KEBUTUHAN DANA TAHUN 2025							2.374.659.003	2.374.659.003							2.436.076.500

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk program kegiatan kepala SKPD Kecamatan Haur Gading berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading Tahun 2023 – 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Haur Gading dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi misi Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Haur Gading.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Haur Gading. ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Haur Gading ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi dilaksanakannya Rencana Kinerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2025 ini, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2) Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin, dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk nantinya menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagisegenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Haur Gading. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Haur Gading telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Haur Gading, 28 Maret 2024

Plt. CAMAT HAUR GADING,

AHMAD MA'RIFATULLAH, S.STP, M.I.P

NIP. 19900614 201206 1 001

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

III

KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia dan HidayahNya kepada kita semua. Tak lupa pula Shalawat dan Salam kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya dari dulu hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kenerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (renja) ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Sungai Pandan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya.

Plt. Camat Sungai Pandan,

FAJRIYANUR, S.IP
Pembina Tingkat I (IIId)
NIP.19710710 199503 1 003

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I :	PENDAHULUAN		1
	I.1.	Latar Belakang	1
	I.2.	Landasan Hukum	2
	I.3.	Maksud dan Tujuan	5
	I.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II :	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU		7
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan	7
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pandan	16
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan	23
	2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	2.5.	Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III :	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN		40
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD	40
BAB IV :	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT SUNGAI PANDAN		42
	4.1	Program dan Kegiatan	42
BAB V :	PENUTUP		49

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel. T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	8
Tabel. T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara	21
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara	30
Tabel.III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Pandan	41
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Hulu Sungai Utara	43

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Pandan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Sungai Pandan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Sungai Pandan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pandan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Sungai Pandan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pandan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan .

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Sungai Pandan sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Sungai Pandan dengan mengacu pada dokumen RPD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan (Renja Kecamatan Sungai Pandan) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Sungai Pandan yang mengacu pada dokumen Kecamatan Sungai Pandan dan Renstra Kecamatan Sungai Pandan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan pada hakikatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi Kecamatan Sungai Pandan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Pandan agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik .

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke 3 dari Renstra yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD untuk tahun 2025 yang akan datang.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Sungai Pandan mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
16. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17
28. Peraturan Bupati Nomor 21 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

I.3. Maksud Dan Tujuan

Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai :

a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* tentang rancana pembangunan tahunan.
c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Pandan dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Tujuan :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan konfisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Sungai pandan.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas Kecamatan berikutnya.
4. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
6. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1. 1. Latar Belakang
- 1. 2. Landasan Hukum
- 1. 3. Maksud dan Tujuan
- 1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pandan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pandan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sungai Pandan
- 2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pandan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PANDAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pandan

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pandan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Sungai Pandan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C. 39

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2024 tahun berjalan(n-1	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Sungai Pandan	B							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan		
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**84%**	**93%**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	20 Orang	22 Orang	20 Orang	83%	22 Orang		
f	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	15 Paket	5 Jenis	15 Jenis	10 jenis		15 Jenis		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis		20 Jenis		

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis/ Paket	10 Jenis	10 Jenis/lembar	10 jenis		10 Jenis/lembar		
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	35 Jenis	35 paket		35 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Kali	40 Kali	96 kali		40 Kali		
h	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 laporan		48 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan		12 Laporan		
i	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	10 Buah	11 unit	11 unit	100%	11 Buah	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20 Buah	20 Buah	15 Buah	100%	5 unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	100%	2 Unit	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**99%**	**100%**		**0%**	**100%**	
	c	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**97%**	**100%**	**95%**	**88%**	**100%**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1935 Berkas	1800 berkas	1986 berkas		12 laporan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan		12 Laporan	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	33 keluarga	33 keluarga	33 keluarga	33 keluarga	100%	33 keluarga		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		-	-				
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksanasnya penyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum	100%		-	-		100%		

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	-	-	-		12 laporan		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%				100%	100%		
	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggarannya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	-	-	-	-	100%		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	50 orang							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Kesatuan RI								
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen		
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**92,5%**				**100%**		
	a	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Terlaksanaya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**92,5%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	240 dokumen			100%	240 dokumen		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	330 dokumen	100%	330 dokumen		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 dokumen	1 dokumen			100%	-		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
	Jumlah									

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. 1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pandan

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Pandan dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Sungai Pandan. Seluruh kegiatan Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2023 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp. 2.617.006.436,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.402.329.798,- (dua milyar empat ratus dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau sekitar 91,80 %.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sungai Pandan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

Dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

1). Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
8). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
9). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penerintahan Desa.
10). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.379.950.586,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.900.296,- atau sebesar 47,08 % yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Berdasarkan data realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Sungai Pandan hanya memperoleh capaian sebesar 47,08%, ini disebabkan oleh adanya penghapusan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan sedangkan target penerimaannya masih ditetapkan untuk Kecamatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sungai Pandan pada tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 5 (lima) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Sungai Pandan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, meliputi kegiatan
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
   a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Sungai Pandan tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Sungai Pandan telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan, untuk kecamatan Sungai Pandan telah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil kinerja yang mencapai hampir 100 % karena segala kebutuhan perkantoran baik itu berupa kegiatan administrasi maupun penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah dapat dipenuhi dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Sungai Pandan telah memberikan pelayan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang bekerjasama dengan SKPD terkait.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT, fasilitasi pelaksanaan penerimaan Perangkat desa dan fasilitasi sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk program ini kecamatan Sungai Pandan telah melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI dan Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pandan demi untuk terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan wilayah kecamatan

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Sungai Pandan pada tabel TC.30

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Pandan T-C 10

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025(tahun n+1)	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Kecamatan			71 (BB)	71 (BB)	71(BB)	71(BB)	68,18 (B)	-	71(BB)	71(BB)	
2	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100 %	100 %	
3	Persentase Penanganan Konflik sosial dan kegaswan di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Sungai Pandan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan Sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pandan

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
   - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
   - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
   - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
   - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
   - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak
b. Non perizinan, yang meneakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
   1) Urasan pemerintahan umum
   2) Urasan sosial
   3) Urasan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sispil
   5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

a. Pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. Pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. Fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. Fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

a. Mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;

k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;

m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;

o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;

q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);

s. Fasilitasi kegiatan Posyendu di wilayah kecamatan;

t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;

u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan

w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Pandan perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Sungai Pandan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
c. Masih adanya ASN yang tidak bisa ditempatkan sesuai dengan tupoksinya;

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

d. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat, seperti bencana banjir yang sepanjang tahun melanda Kecamatan Sungai Pandan ;

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal berikut :

1. Bidang Pelayanan :
   a. Masih banyaknya bayi / balita yang mengalami gizi buruk/ stunting di Kecamatan Sungai Pandan
2. Bidang Pemerintahan :
   a. Jumlah Desa cukup banyak
   b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
   a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.
4. Bidang Pendapatan
   a. Kecamatan tidak lagi menangani pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan sehingga mengurangi PAD untuk wilayah Kecamatan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD

Review terhadap rancangan awal RPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pandan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Pandan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapaun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Pandan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
   1. Pelayanan Administrasi ;
   2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
   3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial ;
b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
   1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi ;
   2. Meningkatnya pelayanan publik ;
   3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
c. Prioritas dan sasaran Bidang Kesejahteraan Sosial
   1. Penanggulangan kemiskinan ;
      Dengan Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal RPD Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2025 sebagai berikut

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD TAHUN 2025

KABUPARTEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Rancangan Awal RPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penelaah
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.771.594.866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Sungai Pandan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.771.594.866	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.118.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.118.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.718.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.718.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.400.000	
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.376.043.246**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.376.043.246**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	2.376.043.246	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	2.376.043.246	
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**109.841.050**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**109.841.050**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	7 Paket	2.488.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryng Disediakan	7 Paket	2.488.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9.998.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9.998.800	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis / Paket	7.316.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis / Paket	7.316.200	
	Penyediaan Bahan/Materia l	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	15 Paket	10.039.150	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	10.039.150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	79.798.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	79.798.000	
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**181.452.570**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**181.452.570**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	54.998.970	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	54.998.970	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	126.453.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	126.453.600	
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**89.148.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**89.148.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	79.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	79.840.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4.950.000	
f	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	4.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	4.350.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**6.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**6.800.000**	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6.800.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	12 laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	12 laporan	5.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**24.993.880**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDIAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**24.993.880**	
a	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	**24.993.880**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec.Sungai Pandan**	**Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	**24.993.880**	
	Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga,	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok	33 keluarga	24.993.880	Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga	33 keluarga	24.993.880	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Warga dan Kelompok Masyarakat		Masyarakat					dan Kelompok Masyarakat			
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**1.200.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**1.200.000**	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	Persentase terlaksananya penyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	1.200.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**80.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Sungai Pandan**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**80.000.000**	

a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggarenya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec.Sungai Pandan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	50 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec.Sungai Pandan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	50 orang	25.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	25.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksanya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.993.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksanya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.993.800	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksanaanya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.993.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Persentase Terlaksanaanya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.993.800	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	1.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	1.500.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	1.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	1.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	8.993.800	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Sungai Pandan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	8.993.800	
	Jumlah				**2.866.582.466**					**2.866.582.466**	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Sungai Pandan Tahun 2025 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sungai Pandan pada tanggal 18 Maret 2024, Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan hasilnya telah disampaikan ke SKPD teknis dan telah diinput dalam aplikasi SIPPD Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Sungai Pandan disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efesien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pandan

Dengan memperhatikan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Sungai Pandan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Sungai Pandan mempunyai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Sungai Pandan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Pandan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Pandan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPD (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Pandan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Sungai Pandan	Persentase Desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial/agama di masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	100%	Meningkatnya fasilitasi pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penanganan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah direncanakan 6 program dan 10 Kegiatan pada Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   1) Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
   1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
   1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
   1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pandan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kode			Program / Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Sungai Pandan	100%	2.771.894.866	APBD		100%	2.671.325.154
7	01	01	2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	100%	15.118.000	APBD		100%	14.220.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Pandan	6 dokumen	12.718.000	APBD		6 dokumen	12.720.000

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Pandan	5 laporan	2.400.000	APBD		5 Laporan	1.500.000
7	01	02	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**Kec.Sungai Pandan**	**100%**	**2.376.043.246**	**APBD**		**100%**	**2.348.287.000**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Pandan	22 Orang / Bulan	2.376.043.246	APBD		22 Orang / Bulan	2.348.287.000
7	01	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**100%**	**189.841.050,00**	**APBD**		**100%**	**88.020.698**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	15 Paket	2.488.000	APBD		15 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	20 Paket	9.998.800	APBD		20 Paket	6.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	4 Jenis / Paket	7.516.200,00	APBD		4 Jenis / Paket	4.271.500
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	36 Paket	10.039.150,00	APBD		36 Paket	8.197.796
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Pandan	48 Laporan	79.798.000,00	APBD		48 Laporan	67.641.304
7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Sungai Pandan**	**100 %**	**181.452.570,00**	**APBD**		**100 %**	**194.145.994**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	48 laporan	54.998.970,00	APBD		48 laporan	67.641.304
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	126.453.600,00	APBD		12 laporan	126.504.600
7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kec.Sungai Pandan**	**100%**	**89.140.000,00**	**APBD**		**100%**	**26.651.650**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Sungai Pandan	14 unit	79.840.000,00	APBD		11 unit	14.651.650
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Sungai Pandan	5 unit	4.950.000,00	APBD		5 unit	5.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Kec.Sungai Pandan	2 unit	8.350.000,00	APBD		2 unit	7.000.000
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kec.Sungai Pandan**	**100%**	**6.800.000,00**	**APBD**		**100%**	**4.200.000**
7	01	02.2	2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec.Sungai Pandan**	**100%**	6.800.000,00	**APBD**		**100%**	4.200.000
7	01	02.2	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	1.800.000,00	APBD		12 laporan	1.200.000

Click to BUY NOW! PDF-XChange Editor www.pdf-xchange.com

7	01	02.2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditetapkan	Kec.Sungai Pandan	12 laporan	5.000.000,00	APBD		12 laporan	3.000.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kec.Sungai Pandan	100%	24.993.800,00	APBD		100%	25.000.000
7	01	03.2	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Sungai Pandan	100%	24.993.800,00	APBD		100%	25.000.000
7	01	03.2	06	0002	Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Kec.Sungai Pandan	33 keluarga	24.993.800,00	APBD		33 keluarga	25.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	100%	1.200.000	APBD		100%	1.200.000
7	01	04.2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sungai Pandan	100 %	1.200.000	APBD		100 %	1.200.000
7	01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Pandan	12 dokumen	1.200.000	APBD		12 dokumen	1.200.000
7	03	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sungai Pandan	100%	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	05.2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Pandan	100%	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000
7	01	05.2	01	0008	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec.Sungai Pandan	50 orang	25.000.000,00	APBD		1 dokumen	25.000.000
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	25.000.000,00				25.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	100%	11.993.800,00	APBD		100%	15.000.000
7	01	06.2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Terlaksanaanya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	100%	11.993.800,00	APBD		100%	15.000.000
7	01	06.2	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan	12 dokumen	1.500.000,00	APBD		12 dokumen	3.000.000
			01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Pandan	339 dokumen	1.500.000,00	APBD		339 dokumen	5.000.000
7	01	06.2	01		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Sungai Pandan			APBD		15 dokumen	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	06.2	01		1009	Pembinaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Lain-lain	Jumlah Dokumen Administrasi Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Lain-lain	Satu Tunggal Pandan	1 dokumen	8.961.800,00	APBD		1 dokumen	7.000.000
Jumlah										2.966.982.000				2.766.825.158

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Pandan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Pandan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Pandan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Pandan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pandan tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sungai Pandan

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Pandan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Pandan. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Sungai Pandan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas dihilam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Pandan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomonikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sungai Pandan, Juni 2024
Plt. Camat Sungai Pandan,

FAHRIYANUR, S.IP
Penata Tingkat I (IIId)
NIP.19710710 199503 1 003

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENJA

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

TAHUN 2025



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia kepada kita semua.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kenerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (renja) ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penbuatan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya.

Camat Sungai Tabukan

FAHRIADI, S.Sos, M.I.P
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19810517 200604 1 009

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 4
I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelasanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD .. 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan SUNGAI TABUKAN..... 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD 38

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN
4.1 Program dan Kegiatan…… 40

BAB V : PENUTUP
Penutup……. 47

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daearh s/d tahun 2023.....	8
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Skpd Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara	20
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	30
Tabel T-C 28	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Tabukan.....	39
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Hulu Sungai Utara …….....	42

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Tabukan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Sungai Tabukan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Sungai Tabukan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Sungai Tabukan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabukan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Renstra Kecamatan Sungai Tabukan) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Sungai Tabukan dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan (Renja Kecamatan Sungai Tabukan) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Sungai Tabukan yang mengacu pada dokumen Kecamatan Sungai Tabukan dan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Sungai Tabukan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Tabukan agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik .

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025 merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke 2 dari Renstra (Tahun 2023 s.d 2026) yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD untuk tahun 2025 yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Sungai Tabukan mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
15. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOMOR 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2025 ini bermaksud untuk Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai :

a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Tabukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Renja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Tabukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Sungai Tabukan.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sungai Tabukan

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tabukan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2018, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Tabukan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegitan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capian Target Rentra SKPD s/d tahun 2024 tahun berjalan/ n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Sungai Tabukan								
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
7.1.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**		**100%**	**69,52%**	**70%**	**100%**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	**100%**	4 Dokumen		
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	19 laporan		4 laporan	4 laporan	**100%**	2 Dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan Daerah**	**400%**		**100%**	**95%**	**95%**	**100%**		
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	78 orng/bln		204 orang	171 orang	**84%**	9 orang		
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yg dibuat	4 laporan		1 laporan	1 laporan	**100%**	-		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	48 laporan		12 laporan	12 laporan	**100%**	5 Laporan		
7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**400%**		**-**	**-**	**0%**	**-**		
7.01.01.2.04.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 laporan		0	0	**0%**	12 laporan		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**400%**		**100%**	**0%**	**0%**	**100%**		
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 org		2 orang	0 orang	**0%**	1 orang		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja**	**400%**		**100%**	**63,64%**	**64%**	**100%**		
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yg disediakan	80 paket		11 paket	6 paket	**55%**	10 Paket		
7.01.01.2.06.03	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	-		-	-	**-**	2 Paket		
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg dibutuhkan	40 paket		3 paket	2 paket	**67%**	-		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	120 paket		12 paket	12 paket	**100%**	-		
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	144 laporan		24 laporan	8 laporan	**33%**	35 laporan		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan daerah**	**400%**		**100%**	**88,89%**	**89%**	**100%**		
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan		12 laporan	12 laporan	**100%**	-		
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa kebutuhan jaringan telepon,listrik,air dan internet	48 laporan		12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan pelayan umum kantor	48 laporan		12 laporan	8 laporan	**67%**	12 laporan		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**400%**		**100%**	**70,00%**	**70%**	**100%**		
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yng dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 unit		5 unit	4 unit	**80%**	2 unit		
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 unit		1 unit	1 unit	**100%**	5 unit		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit		1 unit	1 unit	**100%**	-		
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 unit		1 unit	0 unit	**0%**	-		
7.01.02	**Program Penyelengraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase tertibnya administrasi pelayanan masyarakat**	**400%**		**100%**	**99,07%**	**99%**	**100%**		
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**persentasi tertib administrtasi pelayanan masyarakat**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	80 laporan		24 laporan	24 laporan	**100%**	24 laporan		
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengn perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	48 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	**100%**	12 laporan		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat**	**400%**		**100%**	**97,22%**	**97%**	**100%**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	80 dokumen		20 dok	20 dok	**100%**	-		
7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	jumlah laporan pelaksaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	48 laporan		36 laporan	36 laporan	**100%**	-		
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48 laporan		24 laporan	22 laporan	**92%**	12 laporan		
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**persentasi terlaksannya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	48 laporan		12 laporan	12 laporan	**100%**	12 laporan		
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**persentasi tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.06.2.01.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	400%		100%	100%	**100%**	12 dokumen		
7.01.06.2.01.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	68 dokumen		17 dokumen	17 dokumen	**100%**	17 dokumen		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Sungai Tabukan. Seluruh kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2023 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.575.255.657,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.011.919.644,- (Satu Milyar Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat rupiah) atau sekitar 64,24%.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sungai Tabukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

Kinerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
8). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
9). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
10). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
11). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
12). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 20.150.000,- dan terialisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,00%. Artinya pada tahun 2023 Kecamatan Sungai Tabukan tidak dapat melaksanakan dan tidak dapat memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi kas Dearah. Hal ini dikarenakan :

1. Target Retribusi Pasar Kecamatan Sungai Tabukan Sebesar Rp.10.150.000,00 tidak terdapat realisasi dikarenakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Perindagkop Kab. HSU belum bisa menerbitkan Karcis Pasar, Sehingga petugas pemungut retribusi Kecamatan Sungai Tabukan tidak dapat memungut retribusi terhadap pedagang yang ada di pasar , sehingga target tidak bisa

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

terealisasi.

2. Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp.10.000.000,00 tidak terdapat realisasi dikarenakan adanya perubahan kebijakan regulasi dan Numenklatur dari IMB menjadi Persetujuan Gedung Bangunan (PGB), dimana kewenangan kepengurusan IMB/ PGB diambil alih oleh Dinas PUPR. Sehingga pada Kecamatan Sungai Tabukan tidak terdapat realisasi selama Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 4 (Empat) Program dengan 12 (Dua belas) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota,meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
    b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun berdasarkan pengukuran Kinerja Per Program Kecamatan Sungai Tabukan diperoleh bahwa :

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	69,52%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	100%	99,07%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Sungai Tabukan telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan dan beberapa sub kegiatan, untuk kecamatan Sungai Tabukan masih perlu ditingkatkan dengan hasil kinerja hanya mencapai 64,72% karena karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapak direalisasikan secara maksimal, diantaranya realisasi Gaji dan Tunjangan PNS, Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terkait dengan Peningkatan Sumberdaya Aparatur atau Bimbingan Teknis yang tidak ada realisasi. Penyebab utama rendahnya realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah pegawai di kecamatan Sungai Tabukan tidak ideal dan pada tahun anggaran 2023 tersebut banyak jabatan yang masih diisi dengan jabatan yang belum definitive.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Sungai Tabukan telah memberikan pelayanan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap IKM dan UMKM yang bekerjasama dengan SKPD terkait.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Sungai Tabukan pada tabel TC.30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Tabukan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024(tahun n-1)	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Nilai Sakip Kecamatan**			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kantor kecamatan**			80%	-	-	-	98%	-	-	-	
3	**Persentasi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**			100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	
4	**Persentasi Penurunan Konfilk sosial dan keagamaan di Kecamatan**			-	100%	100 %	100%	-	100	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target 2025 Pada Tabel TC-30 sebagai berikut :

Berdasarkan Realisasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 yang di ukur dengan 3 (Tiga) Indikator Utama, yaitu

1. Nilai Sakip Kecamatan
2. Persentasi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Persentasi Penurunan Konfilk sosial dan keagamaan di Kecamatan

Dari 3 (Tiga) Indikator tersebut diperoleh bahwa Kecamatan Sungai Tabukan telah memenuhi target renja Tahun 2023. Selanjutnya untuk menjaga prestasi Pencapaian Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabukan, Maka Kecamatan Sungai Tabukan menetapkan target yang sama untuk Tahun 2024 dan 2025, dengan mendapatkan Pencapaian Maksimal untuk Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan Penurunan Konflik Sosial keagamaan di kecamatan serta juga tetap berkomitmen untuk mendapatkan Nilai Sakip melebihi dari yang ditargetkan .

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Sungai Tabukan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 menambah aset tetap bagi Kecamatan Sungai Tabukan yang digunakan untuk kegiatan roda Pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Sungai Tabukan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :
   - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
   - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
   - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
   - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
   - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak

b. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
   1) Urusan pemerintahan umum
   2) Urusan sosial
   3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sispil
   5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;
b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;
f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;
m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan
w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Tabukan perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Sungai Tabukan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan
2. Kurang optimalnya sarana prasarana penunjang kerja
3. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
4. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat;

Selanjutnya tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut :

a. Ancaman/tantangan.
   1) Globalisasi
   2) Kurangnya koordinasi antar lembaga
   3) Terjadinya bencana alam
   4) Mutasi pegawai

b. Peluang.
   1) Fungsi dan kedudukan Pemerintahan Desa
   2) Otonomi Daerah
   3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
   4) Kebijakan pusat dan daerah
   5) Terciptanya forum koordinasi

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal berikut :

1. Bidang Pelayanan :
   a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya administrasi kependudukan terutama dalam hal pembuatan akte kematian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Bidang Perizinan :
   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini disebabkan karena tidak adanya sangsi dari pemerintah bagi yang tidak membuat, disamping itu juga tidak adanya kerja sama antar instansi vertical dalam penerapan disiplin peraturan tersebut
3. Bidang Pemerintahan :
   a. Jumlah Desa cukup banyak
   b. Sumberdaya Aparatur Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
   c. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
   d. Masih kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Pemerintahan Desa belum bisa direalisasikan secara optimal
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
   a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
    1. Pelayanan Administrasi
    2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
    3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial
b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
    1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
    2. Meningkatnya pelayanan publik
    3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa
c. Prioritas dan sasaran Bidang Sosial Keagamaan
    1. Penanggulangan kemiskinan

       Dengan Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025 sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T.C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SKPD : KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikaator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**Rp 2.421.516.822**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**Rp** 2.540.803.422,00	
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 19.420.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 28.730.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp 15.160.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp 24.481.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp 4.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp 4.249.000,00	
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 2.171.184.965	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 2.178.061.422	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 org	Rp 2.170.809.965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 org	Rp 2.177.561.422,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	Rp 225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	Rp 350.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	Rp 150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	Rp 150.000	
c	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	**Rp 7.030.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	**Rp 7.025.000**	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 laporan	Rp 7.030.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 laporan	Rp 7.025.000,00	
d	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**		**Rp 5.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	**Rp 5.000.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	Rp 5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	Rp 5.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 43.463.057	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 59.729.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 14.975.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 22.964.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	Rp 3.706.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	Rp 3.060.900,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Rp 24.782.057	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Rp 33.704.000,00	
f	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 19.500.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	Rp 35.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 19.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp 35.000.000,00	
g	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100 %**	**Rp 123.628.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100 %**	**Rp** 128.511.600,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 18.522.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 108.628.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 109.988.800,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

h	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	**Rp 32.290.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Nilai SAKIP Meningkat**	**100%**	**Rp** 98.746.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	Rp 23.040.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	Rp 77.040.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp 3.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Rp 3.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 18.056.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp 3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp 400.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**Rp 14.670.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**Rp** 11.400.000,00	
a	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	Rp 7.770.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**Rp** 4.600.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 7.770.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 4.600.000,00	
b	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**Rp 6.900.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**Rp** 6.800.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Rp 6.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Rp 6.800.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	100%	**Rp** 57.950.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	100 %	**Rp** 71.083.400,00	
a	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100%	**Rp** 57.950.000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100%	**Rp** 71.083.400,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 57.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 71.083.400,00	1. Keg. PKK 2. Keg. Stunting
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**Rp 2.630.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**Rp** 4.405.000,0	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

a	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase pelaksanaan monitoring Pemilukada di Kecamatan**	**100%**	**Rp 2.630.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase pelaksanaan monitoring Pemilukada di Kecamatan**	**100%**	**Rp** 4.405.000,0	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 2.630.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 4.405.000,0	1. Honor Forkompimcam2. Makan minum rapat3. Perjalanan dinas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	100%	**Rp. 50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	100%	**Rp.** 52.200.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sungai Tabukan	**Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah**	100%	**Rp. 50.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah**	100%	**Rp.** 52.200.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	50 Orang	**Rp. 25.000.000**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	50 Orang	**Rp.** 25.750.000,00	Keg. 17 Agustus

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	**Rp. 25.000.000**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	**Rp.** 26.450.000,00	1. Honor Forkompimcam2. Makan minum rapat3. Perjalanan dinas
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**Rp 16.800.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.Sungai Tabukan	**PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**Rp** 20.525.000,00	
a	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp 16.800.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Sungai Tabukan	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**Rp** 20.525.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	Rp 8.800.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	Rp 6.350.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 dokumen	Rp 8.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 dokumen	Rp 14.175.000,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Total	**Rp 2.563.566.822**			**Rp 2.700.416.822**	

Analisis Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan Hasil analisis yang dilakukan terkait dengan kebutuhan pendanaan di Kecamatan Sungai Tabukan untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp **2.700.416.822** dibanding dengan Pagu Indikatif yang diberikan sebesar Rp 2.563.566.822.Kemudian Menindaklanjuti usulan Kepala Seksi Pemerintahan dan PPM Kecamatan Sungai Tabukan terkait rincian anggaran belanja pembinaan desa dan kegiatan lomba, kegiatan rutin PKK dan Hasil rapat RKBMD terkait pemeliharaan BMD, maka kecamatan sungai tabukan melakukan usul penambahan pagu anggaran sebagai mana tersebut diatas.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efesien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tabukan

Dengan menitikberatkan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuain tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Sungai Tabukan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Sungai Tabukan mempunya Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Sungai Tabukan.
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Adapun Target Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Sungai Tabukan terlihat pada table berikut :

TABEL T-C. 28

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

No.	TUJUAN	INDOKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPD (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Sungai Tabukan	Persentase Desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial,agama di masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	100%	Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penurunan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah direncanakan 6 program dan 14 Kegiatan pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   1) Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
   11) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
   12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   13) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

14) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan beserta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 2.540.803.422,00	**APBD**		**100%**	**2.337.046.103**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 28.730.000,00	**APBD**		**100%**	**8.450.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	4 dokumen	Rp 24.481.000,00	APBD		5 dokumen	3.875.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Tabukan	4 Laporan	Rp 4.249.000,00	APBD		4 Laporan	4.575.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 2.178.061.422	**APBD**		**100%**	**2.174.559.965**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sungai Tabukan	9 orang/bulan	Rp 2.177.561.422,00	APBD		9 orang/bulan	2.170.809.965
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun	Kec. Sungai Tabukan	5 Laporan	Rp 350.000,00	APBD		5 Laporan	1.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	Rp 150.000	APBD		12 Laporan	2.250.000
7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	Kec. Sungai Tabukan	**100%**	Rp 7.025.000	**APBD**		**100%**	**3.000.000**
7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec. Sungai Tabukan	1 Laporan	Rp 7.025.000,00	APBD		12 Laporan	3.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 5.000.000	**APBD**		**100%**	**10.000.000**
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Tabukan	1 org	Rp 5.000.000	APBD		1 org	10.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 59.729.400,00	**APBD**		**100%**	**49.553.038**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	3 Paket	Rp 22.964.500,00	APBD		10 Paket	13.650.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	3 Paket	Rp 3.060.900,00	APBD		10 Paket	20.903.038
7.01.01.2.06.0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Tabukan	35 Laporan	Rp 33.704.000,00	APBD		35 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 35.000.000,00	**APBD**		**100%**	**5.000.000**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	5 unit	Rp 35.000.000,00	APBD		3 unit	5.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100 %**	Rp 128.511.600,00	**APBD**		**100 %**	**35.000.000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	36 laporan	Rp 18.522.800,00	APBD		36 laporan	20.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	12 laporan	Rp 109.988.800,00	APBD		12 laporan	15.000.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Meningkat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 98.746.000,00	**APBD**		**100%**	**51.483.100**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sungai Tabukan	6 unit	Rp 77.040.000,00	APBD		6 unit	30.483.100
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sungai Tabukan	10 unit	Rp 3.250.000	APBD		10 unit	6.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sungai Tabukan	3 Unit	Rp 18.056.000,00	APBD		3 Unit	10.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sungai Tabukan	2 unit	Rp 400.000,00	APBD		2 unit	5.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 11.400.000,00	**APBD**		**100%**	**13.000.000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 4.600.000,00	**APBD**		**100%**	**6.000.000**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	Rp 4.600.000,00	APBD		12 Laporan	6.000.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 6.800.000,00	**APBD**		**100%**	**7.000.000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Tabukan	12 laporan	Rp 6.800.000	APBD		12 laporan	7.000.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100 %**	Rp 71.083.400,00	**APBD**	tag: Responsif Gender & Stunting	**100**	**7.000.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 71.083.400,00	**APBD**	tag: Responsif Gender & Stunting	**100%**	**7.000.000**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	Rp 71.083.400,00	APBD	tag: Responsif Gender & Stunting	12 Laporan	7.000.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 4.405.000,00	**APBD**		**100%**	**5.000.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentasi Pelaksanaan Monitoring Pemilukada Dikecamatan**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 4.405.000,0	**APBD**		**100%**	**5.000.000**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	Rp 4.405.000,0	APBD		12 Laporan	5.000.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	Kec. Sungai Tabukan	**100%**	Rp. 52.200.000,00	APBD		**100%**	**Rp. 50.000.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daetrah**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp. 52.200.000,00	APBD		**100%**	**Rp. 50.000.000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sungai Tabukan	**50 orang**	Rp. 25.750.000,00	APBD	tag: Responsif Gender	**50 Orang**	**Rp. 25.000.000,00**
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	**1 Dokumen**	Rp. 26.450.000,00	APBD		**1 Dokumen**	**Rp. 25.000.000,00**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 20.525.000,00	**APBD**		**100%**	**10.000.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Sungai Tabukan**	**100%**	Rp 20.525.000,00	**APBD**		**100%**	**10.000.000**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	273 dokumen	Rp 6.350.000,00	APBD		12 dokumen	4.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Tabukan	17 dokumen	Rp 14.175.000,00	APBD		17 dokumen	6.000.000
JUMLAH					**Rp** 2.700.416.822,00				**2.422.046.103**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Tabukan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Tabukan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepntingan) di Kecamatan Sungai Tabukan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Tabukan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaiaan target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Tabukan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Tabukan. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Sungai Tabukan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Tabukan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dib[illegible]tal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renja ini dan untuk menangkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhir kata semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mecapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Banua Hanyar, Juli 2024

Camat Sungai Tabukan,

FAHRIADI, S.Sos, M.I.P

NIP.19810517 200604 1 009

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RANCANGAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BABIRIK
TAHUN 2025

KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2025

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Babirik tahun 2026 dapat terselesaikan. Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Babirik tahun 2026 dapatdilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang, rencana kerja Kantor Camat BabirikTahun 2026 diterbitkan sebagai normal, standar, prosedur, kreteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kecamatan Babirik pada tahun 2026.

Babirik, Januari 2026

Mengetahui,

CAMAT BABIRIK,

FIKRI ALHAMI, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP. 19850402 200312 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD adalah

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Camat Babirik Kabupaten Babirik Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Babirik 2025-2029. sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kecamatan Babirik merupakan daerah rawa-rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Ibu Kota Kecamatan Desa Babirik Hilir, Maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas desentralisasi sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU N0. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/ desa), kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Daerah. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Kerja yang dikenal dengan (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan untuk rentang waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
i. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
j. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkup Pemerinah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
k. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

3. Maksud dan Tujuan

A. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dan karyawati dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2026 dapat tercapai
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan
d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Babirik dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
e. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kantor Camat Babirik

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Babirik sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Babirik.
g. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Babirik dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
h. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Babirik untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
i. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Babirik 2025 adalah:

a. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Babirik dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
b. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Babirik Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Babirik, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERAGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 yang lalu telah dianggarkan Dana sebesar Rp 2.335.013,776, yang

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

terdiri dari Belanja Operasi Rp. Rp 2.335.013,776, yang terdiri dari 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dari kegiatan Tahun 2024 (sampai dengan triwulan IV) yang telah di laksanakan oleh Kantor Kecamatan Babirik dapat di uraikan sebagai berikut:

Dari realisasi fisik Sub kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) yang pencapaian fisiknya mencapai 86,91 %

a. Untuk realisasi keuangan dapat di diperoleh realisasi penyerapan Sub kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) yang pencapaian 86,91 %

Anggaran Belanja Kantor Camat Babirik tahun 2024 yang terdiri dari 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dari kegiatan Tahun 2024 (sampai dengan triwulan IV) yang telah di laksanakan oleh Kantor Kecamatan Babirik dapat di uraikan sebagai berikut

Kecamatan Babirik telah mendapat alokasi anggaran perubahan tahun 2024 sebesar **Rp. 2.335.013,776,-** dan realisasi sebesar **Rp 2.029.334,006,-** atau **86,91%** dengan hasil capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Capaian
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**45,88%**
1.1	sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perangkat Daerah	Persentase terlaksannya kegiatan dukumen perangkat daerah	100%	**48,85%**
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumentasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	42%
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**87,94%**
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang 100%	13 Orang 87,94%
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**65,38%**
3.1	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Persentase terealisasinya jasa barang cetakan dan pengadaan Persentase teralisasi jasa bahan material**	**100%**	**69,38%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.2	**Sub Kegiatan penyediaan bahan/material**	**Persentase teralisasi jasa bahan material**	**100%**	**86,74%**
3.3	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	**Persentase** kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	**100%**	**56,74%**
3.4	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100%	62,35**%**
4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**92,21%%**
4.1	Sub kegiatan penyediaan jasa Surat menyurat	Persentase teralisasinya jasa surat menyurat	100%	91,46**%**
4.2	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase teralisasinya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	100%	73,24**%**
4.3	Sub kegiatan penyedian jasa pelayanan umum	Persentase kegiatan penyedian jasa pelayanan umum	100%	98,36%
5	**Kegiatan pemeliharaan barang millik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentasi jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas yang di pelihara**	**100%**	**65,91%**
5.1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Persentase jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas yang dipelihara1	100%	80,63%
5.2	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase terlaksannya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	32,41**%**
6	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**93,86%**
6.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase terlaksannya urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	94,17**%**
6.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Persentase terlaksannya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	100%	59,67**%**
6.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase terlaksannya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	100%	100**%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**77,37%**
7.1	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Persentase terlaksannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	**100%**	**77,37%**
8	**Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan kentraman dan ketertiban umum**	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan kentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**92,51%**
8.1	Sub kegiatan sinergitas negara kepolisian negara republic Indonesia, tentra nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Persentase terlaksannya sinergitas negara kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100%	92,51**%**
	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persetase penerapan **dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	100%	88,44%
	Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan pejabat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan perundang-undangan dan/ kepolisian negara republic indonesia	Persentase kegiatan koordinasi/sinergi dengan pejabat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan perundang-undangan dan/ kepolisian negara republic indonesia	100%	88,44%
10	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	83,29%
10.1	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	86,49%
10.2	Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	Persentase terlaksannya Musrembang TK desa dan TK kecamatan	100%	72,60**%**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2024 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Kabupaten yang Jawab
										I	II	III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8				11		12=10/7x100%		14=4+13		15=14/5x100%		16
				4	Rp	5	Rp	6	Rp	8	Rp			10	Rp	11	Rp	4	Rp	5	Rp	6	Rp	
C	[illegible]	PROGRAM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
C	[illegible]	PROGRAM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
C	[illegible]	PROGRAM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
														Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	[illegible]	PROGRAM [illegible]	Persentase [illegible]	400 %	400.000.000	0 %	0	100 %	100.000.000	25 %	25.000.000			25 %	25.000.000	25,00	25,00	25 %	100.000.000,00	0,00	100,00	
	[illegible]	Pelaksanaan [illegible]	Persentase [illegible]	400 %	400.000.000	100 %	0	100 %	100.000.000	25 %	25.000.000			25 %	25.000.000	25,00	25,00	25 %	100.000.000,00	0,00	100,00	
1	[illegible]	Pelaksanaan [illegible]	Jumlah Dokumen [illegible]	1000 Dokumen	1.000.000.000	500 Dokumen	0	500 Dokumen	1.000.000.000	125 Dokumen	250.000.000			125 Dokumen	250.000.000	125,00	125,00	125 Dokumen	500.000.000,00	0,00	100,00	Kec. Babirik
2	[illegible]	Pelaksanaan [illegible]	Jumlah Laporan [illegible]	200 Laporan	200.000.000	100 Laporan	0	50 Laporan	100.000.000	12 Laporan	25.000.000			12 Laporan	25.000.000	12,00	12,00	200 Laporan	200.000.000,00	0,00	100,00	Kec. Babirik
3	[illegible]	Pelaksanaan [illegible]	Jumlah Laporan [illegible]	220 Laporan	220.000.000	20 Laporan	0	20 Laporan	200.000.000	5 Laporan	50.000.000			5 Laporan	50.000.000	25,00	25,00	220 Laporan	220.000.000,00	0,00	100,00	Kec. Babirik
														Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		37,50	37,50			56,25	56,25	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2020 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang direvisi/ubah)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja OPD 2024 yang direvisi/ubah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
										I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8					9		10		11		12		13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan / Sub (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K/Rp	K/Rp	K/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	[illegible]	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepemilikan barang milik daerah	[illegible] %	[illegible]	[illegible] %	[illegible]	[illegible] %	[illegible]	[illegible] %	[illegible]				25 %	[illegible]	25,00	[illegible]	[illegible] %	[illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0				[illegible]	0	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															[illegible]	[illegible]			[illegible]	0,00	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)															[illegible]	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)															[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Program)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	[illegible]	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)															[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							[illegible]		[illegible]					[illegible]							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Keluaran (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pada Akhir 2026 (Akhir Periode) Kondisi Penerima Manfaat		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (2024 yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan yang dievaluasi (Capaian s.d. Triwulan II)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra-Perangkat Daerah (Capaian s.d. tahun 2023)		Unit Penanggung Jawab Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=11/5x100%		13=6+11		14=13/7x100%		15
				a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp			a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
1.	1.08.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	n/a	31,84	n/a	0,00	n/a	3,26	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0,00	3,84					1,63	3,26	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.	1.08.00	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	n/a	31,84	n/a	0,00	n/a	3,26	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0,00	3,84					1,63	3,26	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3.	1.08.08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0			n/a	0	n/a	31,84	n/a	0,00	n/a	3,26	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0,00	3,84					1,63	3,26	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4.	1.08.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100.000.000	0 %	30.000.000	100 %	120.000.000	28 %	33.600.000	60 %	10.807.000			60 %	31.017.000	60,00	88,00	60 %	120.007.000,00	33,34	20,28	
	1.08.08.2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100.000.000	100 %	30.000.000	100 %	120.000.000	28 %	33.600.000	60 %	10.807.000			60 %	31.017.000	60,00	88,00	60 %	120.007.000,00	33,34	20,28	
1.	1.08.08.2.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji Tunjangan ASN yang Dilaksanakan	1.080 Dokumen	1.080.000.000	360 Dokumen	97.200.000	480 Dokumen	97.200.000	12 Dokumen	7.200.000	1.080 Dokumen	210.214.000			1.080 Dokumen	22.214.000	180,00	82,41	1080 Dokumen	77.000.000,00	33,33	20,00	Sec. Babirik
2.	1.08.08.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Laporan Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan	200 Laporan	10.000.000	300 Laporan	0	60 Laporan	7.000.000	Laporan	0	6 Laporan	1.200.000			6 Laporan	1.188.000	5,00	99,00	206 Laporan	1.188.000,00	326,00	4,24	Sec. Babirik
3.	1.08.08.2.04.03	Perencanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Laporan Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 Laporan	100.000.000	33 Laporan	30.000.000	20 Laporan	36.000.000	3 Laporan	4.000.000	20 Laporan	18.600.000			20 Laporan	18.615.000	15,00	93,08	33 Laporan	30.000.000,00	16,83	51,70	Sec. Babirik
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														35,00	35,25					16,92	25,27	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100,00	35,00					17,46	3,26	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5		Realisasi 6		Target 7		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III	IV	Realisasi 12		Tingkat Capaian 13		Realisasi 14		Tingkat Capaian 15		Unit Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K / Rp	K / Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub-Output)	Target Awal RPJMD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Pada Awal Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (sesuai yang ditetapkan)		Kondisi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Capaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16
				a	R_{pk}	a	R_{pk}	a	R_{pk}	a	R_{pk}	a	R_{pk}			a	R_{pk}	a	R_{pk}	a	R_{pk}	a	R_{pk}	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																						
		Predikat Kinerja (Program)																						

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Serta Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang direvisikan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD 2024 yang diverifikasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=10/7*100%		14=9/5*100%		15=9/7*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	P	Rp	K	Rp	K	Rp	
	11																	44,38	49,69			97,65	88,39	
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			Jumlah Anggaran dari sasaran Program	2.343.x36.888		300.734.240		888.111.364								636.678.388								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
	Tindak Lanjut yang dilaksanakan Bidang Perencanaan Kabkot																							

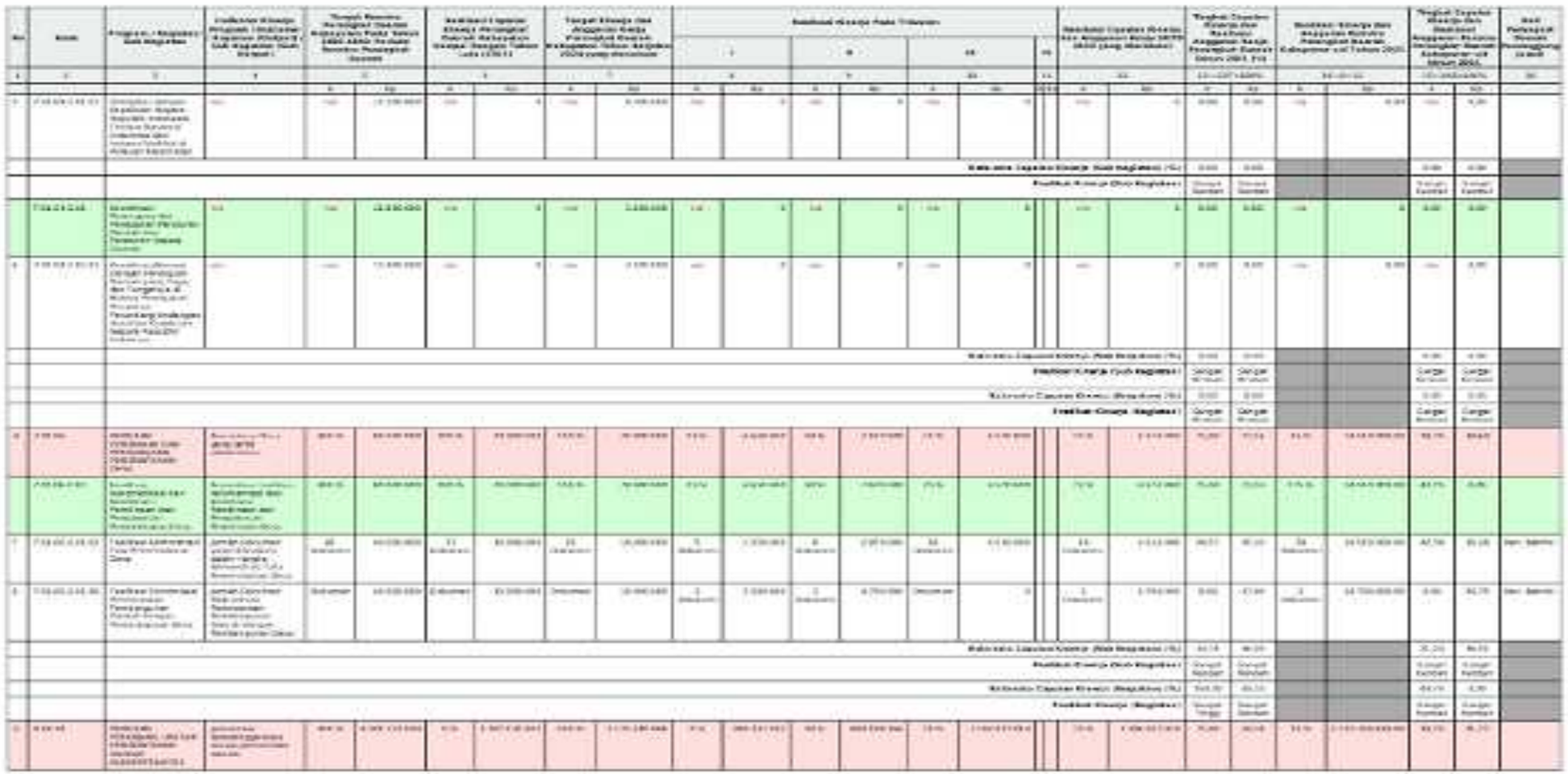
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN III TAHUN 2024

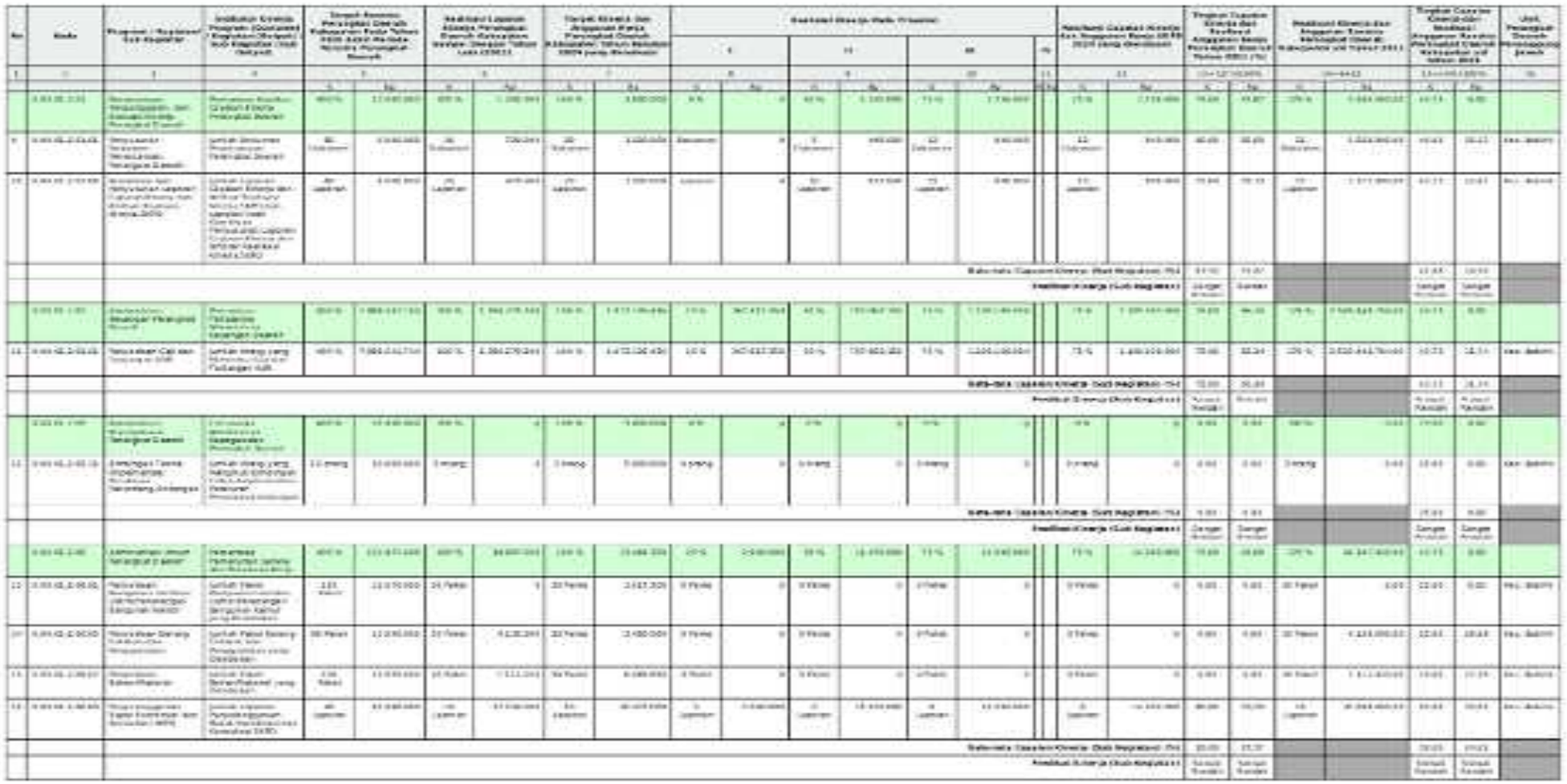
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Outcome/ Kegiatan, Output/ Sub Kegiatan) Pada Tahun 2024 Sesuai Dokumen Perubahan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perubahan (Output) Kegiatan/ Kabupaten Pada Tahun 2024 Sesuai Dokumen Perubahan Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perubahan (Output) Kegiatan/ Kabupaten Sampai Dengan Triwulan yang Dinilai		Target Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan Perubahan Kabupaten yang Dinilai		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan yang Dinilai		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pada Triwulan yang Dinilai (Isi dari Tahun 2024 (%)		Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Pada Triwulan yang Dinilai		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan Perubahan Kabupaten yang Dinilai Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1																												
2																												
3																												
4																												
		Rata-rata Capaian Kinerja (Rata-Rata/Jumlah) (%)																										
		Predikat Kinerja OPD (Regular)																										
		Rata-rata Capaian Kinerja (Anggaran) (%)																										
		Predikat Kinerja (Anggaran)																										
5																												
6																												
		Rata-rata Capaian Kinerja (Rata-Rata/Jumlah) (%)																										
		Predikat Kinerja OPD (Regular)																										
		Rata-rata Capaian Kinerja (Anggaran) (%)																										
		Predikat Kinerja (Anggaran)																										
7																												

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

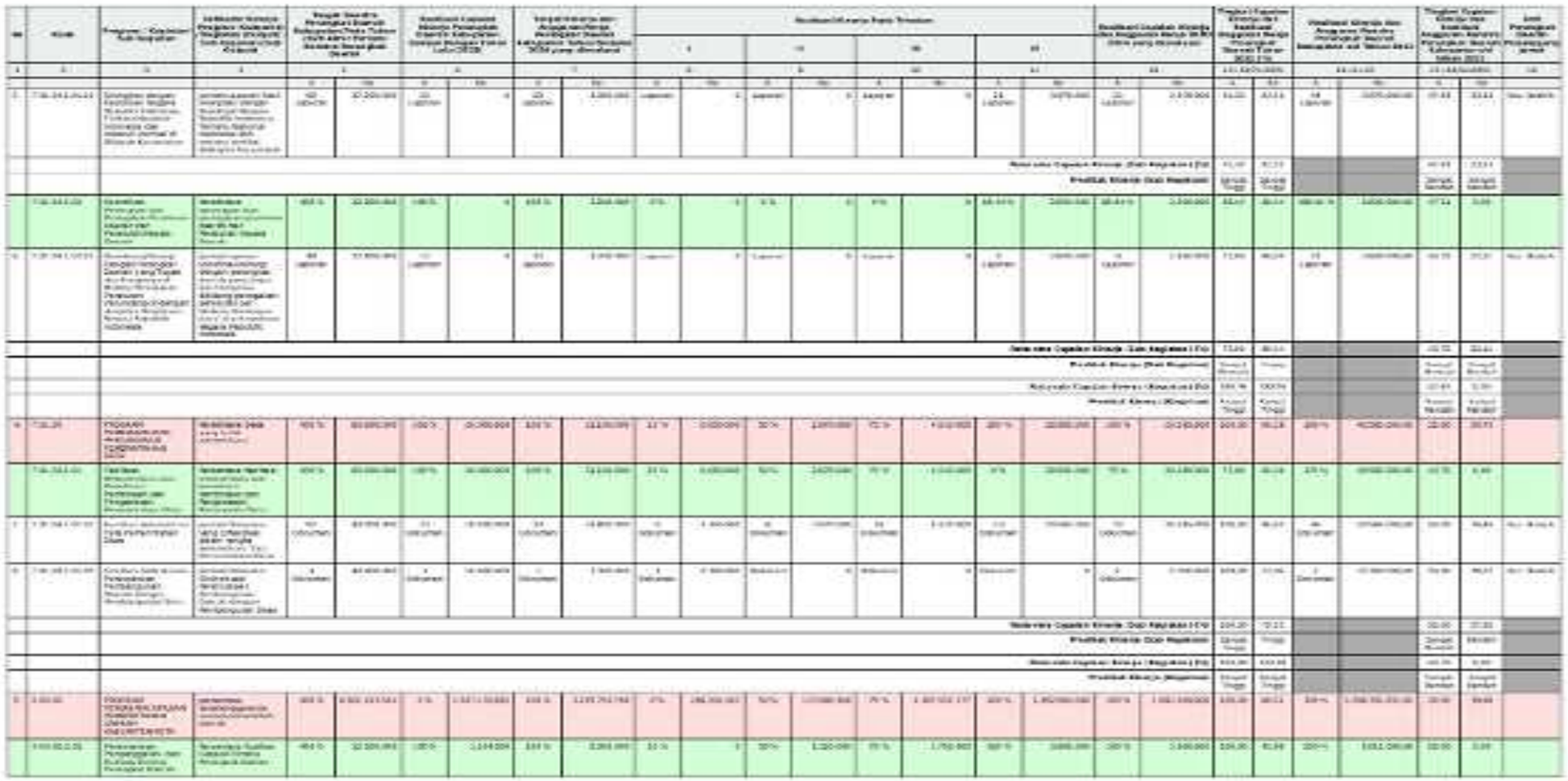
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Program)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
		Jumlah Anggaran dan Realisasi Program							[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	[illegible]																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	[illegible]																								
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	[illegible]																								

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEC. BABIRIK
TRIWULAN IV TAHUN 2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran Perubahan 2024 sebesar Rp.2.029.334,006 atau **86,91** % dari anggaran sebesar Rp.2.335.013,776**,**

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi: ➢ Penyelenggarakan urusan Pemerintah Umum;

- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

a. Rekomendasi
b. Koordinasi
c. Pembinaan
d. Pengawasan
e. Fasilitasi
f. Penetapan
g. Penyelenggaraan dan
h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas pokok Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melaksanakan kewenagan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainya yang dilimpahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Babirik menyelenggarakan Fungsi: Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;

a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh Pegawai Kantor Camat Babirik diharapakan mengerti tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Babirik, untuk itu Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Babirik menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kantor Camat Babirik, selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kantor Camat Babirik kepada seluruh Pegawai.

Berkaitan dengan pelayanan, Kantor Camat Babirik telah membuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang berfungsi sebagai sarana memudahkan proses pelayanan dan memangkas pelayanan birokrasi yang panjang. Dengan adanya PATEN, proses pelayanan lebih terarah dan dilaksanakan pada satu pintu sesuai dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang ada.

- Indikator pelayanan tentang pertanahan ditandai dengan cepatnya proses registrasi surat-surat pertanahan dan minimnya sengketa tanah yang muncul.
- Indikator pelayanan umum ditandai dengan pelayanan surat menyurat yang cepat dan terukur serta tidak adanya komplain dari masyarakat atas keterlambatan proses pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Idealnya dalam dalam setiap pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal serta Prosedur Operasional Standar yang bisa diukur dengan Indikator Kinerja Kunci. Kantor Camat Babirik sendiri saat ini telah menerapkan Standar Pelayanan Pemerintah (SPP) melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya aparatur khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat membantu serta menunjang tugas pelayanan yang ada pada Kantor Camat Babirik yakni pada masing-masing seksi serta subbag yang ada. Namun secara umum atau garis besarnya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan baik dan memenuhi target kinerja yang diharapkan dan akan tetap menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan semaksimal mungkin dimasa mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Hulu Sungai Utara untuk mewujudkan *Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Bermarwah Maju dan Sejahtera*.

3. Penerapan Reward and Punishment

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Babirik) perlu dilakukan *Reward and Punishment* hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat prediket pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

a. Penerapan Punishment

Disisi lain disamping *Reward* juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin. Adapun hasil pencapaian Kinerja pelayanan di Kantor Camat Babirik selama Tahun 2022 sesuai dengan table berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Babirik

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM/ Standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			Realisasi capaian			Proyeksi
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	%			BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	%			86%	87%	90%	66%	67%	68%	
3	Persentase Kelurahan / desa dengan Kinerja Baik	%			75%	75%	88%	68%	68%	68%	
4	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	%			80%	81%	82%	66%	67%	68%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, peluang, hambatan dan kekuatan yang dimiliki pihak Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka terdapat beberapat isu-isu strategis yang didasarkan pada beberapa faktor dari pelayanan SKPD Kecamatan Babirik yaitu:

A. Pelayanan Publik

Dalam bidang pelayanan publik ada beberapa isu strategis yang muncul di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya:

- Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik.
- Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Kelembagaan Masyarakat

Dalam hal kelembagaan masyarakat saat ini di Kecamatan Babirik isu strategis yang timbul diantaranya adalah:

- Masih rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat masih berorientasi dengan Dana yang cukup banyak dimiliki oleh Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Masih minimnya peran serta perusahaan swasta maupun daerah serta pelaku usaha lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan terutama dari perusahaan/pelaku usaha itu sendiri di Kecamatan Babirik.
- Sudah mulai pudarnya sifat kegotong royongan ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan aset pemerintah.

C. Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam hal kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Babirik ada beberapa isu strategis yang dapat ditangkap meliputi:

- Rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari banykannya masyarakat yang masih membuang sampah di lingkungan sungai Kecamatan Babirik.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan dan pengelolaan persampahan di Kecamatan Babirik, hal ini dapat dilihat dengan masih minimnya operasional pelayanan persampahan, baru hanya sebatas wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan dan itupun belum secara keseluruhan.
- Masih belum optimalnya pemeliharaan serta penggunaan sungai dan saluran drainase yang berada di Kecamatan Babirik. Hal ini dilihat dari seringnya terjadi banjir di

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

wilayah Kecamatan Babirik ketika hujan . kondisi rawa dan kiriman air dari daerah hulu juga mengakibatkan banjir di wilayah kecamatan Babirik.

- Masih belum optimalnya perhatian terhadap pengembangan potensi di Kecamatan Babirik.
- Permasalahan abrasi yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan sehingga berdampak besar terhadap masyarakat dan wilayah perbatasan

D. Sektor sarana prasarana publik

Dalam sektor sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Babirik ada beberapa isu strategis yang dapat muncul yakni:

- Masih masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana akses transportasi terutama infrastruktur jalan di Kecamatan Babirik terutama bagi desa-desa yang berjarak jauh dari Ibukota Kecamatan yang menjadi akses vital publik di Kecamatan Babirik, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan.
- Masih minimnya sarana dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik, di Kecamatan Babirik sehingga masyarakat belum dapat merasakan pembangunan serta pelayanan secara maksimal dari pemerintah dan belum dapat mengembangkan roda perekonomian untuk berkembang lebih pesat lagi. Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik sesuai dengan uraian tugas dibagi habis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat beberapa hal yang kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan ini adalah keterlambatan yang dirasakan masyarakat apabila ada permasalahan yang melibatkan beberapa pihak terkait.

5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Babirik yang tercantum pada RKPD 2024 menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk Tahun 2025;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Babirik yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Babirik yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah tertuang dalam RKPD tahun 2025;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Babirik antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Babirik berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Renja Kantor Camat Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masingmasing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan 100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digaris bawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja SKPD. Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara
Perangkat Daerah: Kecamatan Babirik

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ket
					Program /kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiata n/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indika tif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. BABIRIK**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan**		**2.779.164.062,00**						
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**4.800.000**						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Babirik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokum en	1.200.000						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Babirik	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 dokumen	2.400.000						
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.200.000						
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**2.453.326.062,00**						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Babirik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.452.326.062,00						
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Babirik	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	900.000						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**5.000.000**						
7	**01**	**01**	**2.05**	0011	**Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan**	**Kec. Babirik**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**5 0rang**	**5.000.000**						
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**112.861.800,00**						
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Babirik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	**12 paket**	**4.985.800**						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Babirik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia Selama Setahun	**1 paket**	**107.200.000**							
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Babirik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Selama Setahun	**4 paket**	**10.974.800**							
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan bahan material	Kec babirik	Jumlah paket penyediaan bahan material	**1 paket**	**16.020.200**							
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1 laporan**	**80.881.000**							

7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**155.806.200,00**							
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Babirik	Jumlah surat masuk dan keluar dan tenaga administrasi	1500 surat dan 2 administrasi	1.000.000							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Babirik	Persentase pemenuhan Listrik air dan komunikasi	1 2 Laporan	31.034.000							
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 Laporan	123.772.200							
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan**		**47.470.000,00**							
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Babirik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.920.000							
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Babirik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit item	6.550.000							
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Babirik**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**		**11.635.000,00**							
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	Kec. Babirik	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan**		**11.635.000,00**							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					Diilimpahkan kepada Camat		**Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat**								
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha	Kec. Babirik	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha	1 dokumen	2.675.000						
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Kec. Babirik	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	12 laporan	4.000.000						
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Babirik	Jumlah Lpaoran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laaporan	4.960.000						
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Babirik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7 laporan	136.800.000						
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kec. Babirik**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat**		**21.000.000**						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**yang dilakukan**							
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Babirik**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**6.000.000**					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec babirik	Jumlah dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 dokumen	4.000.000					
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Babirik**	**Persentase tingkat kesehatan masyarakat**		**15.000.000**					
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat	Kec. Babirik	Jumlah laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat	30 laporan	15.000.000					

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Babirik**	**Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan**		**15.000.000**						
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Babirik**	**Persentase Peningkatan kesejahtraan kepada Masyarakat**		**15.000.000**						
7	**01**	**04**	**2.01**	0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan**	**Kec babirik**	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan	12 laporan	**11.000.000**						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi hubungaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	4.000.000						
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Kec. Babirik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**		**39.000.000**						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**umum sesuai penugasan Pemerintah daerah**								
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Babirik	**Persentase peningkatan dan koordinasi kepada masyarakat**		**39.000.000**						
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Babirik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23 Desa	39.000.000						
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Babirik**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**		**9.500.000**						
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Babirik**	**Persentase peningkatan Administrasi Pemerinatahan Desa**		**9.500.000**						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Babirik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4.000.000						
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan	Kec babirik	Jumlah dokumen Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	12 dokumen	4.000.000						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					daerah dengan Pembangunan Desa		dengan Pembangunan Desa								
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	1.500.000						

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sehubungan dengan kebijakan Kepala Daerah yang memberikan kesempatan kepada Kecamatan mengelola dana Infrastruktur dan kelembagaan memungkinkan diakomodirnya usulan kegiatan dari masyarakat.

Rancangan awal Renja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Babirik tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut:

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Babirik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan	2.875.299.062	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Babirik	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	11.635.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Babirik	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	21.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Babirik	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	15.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Babirik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	39.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Babirik	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	9.500.000	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam pelaksanaan Penyusunan Renja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2023 – 2026. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sesuai dengan tupoksi Kantor Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai SKPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan disamping melaksanakan kewenangan pemeintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Babirik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kantor Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.
3. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Kecamatan Babirik diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanisme yang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Babirik sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kantor Camat Babirik.

Program dan kegiatan pada Renja Kantor Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program dan kegiatan renja SKPD 2025 kami sajikan dalam tabel lampiran renja ini.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Babirik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Babirik. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 KANTOR CAMAT BABIRIK

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2024	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	1 Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / - indeks kepuasan masyarakat		95%
2.	Meningkatkan kenyamanan wilayah	2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kecamatan	Persentase kelurahan / - desa dengan kinerja baik		90%
		3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan - gangguan KAMTIBMAS		85%
		4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Babirik tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara baik sekretariat maupun seksi-seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebagaimana terlampir.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel. 2.5
Program dan Kegiatan awal SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
KECAMATAN BABIRIK

Kode					Rancangan awal RKPD					Perkiraan maju tahun 2026		Ket
					Program /kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target capaian	Pagu Indikatf (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	12
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. BABIRIK**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan**		**2.779.164.062,00**		**2.779.164.062,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**4.800.000**		**4.800.000**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Babirik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokumen	1.200.000	**10 dokumen**	1.200.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Babirik	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 dokumen	2.400.000	1 dokumen	2.400.000	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**2.453.326.062,00**		**2.453.326.062,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Babirik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.452.326.062,00	1 tahun	2.452.326.062,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Babirik	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	900.000	1 laporan	900.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**5.000.000**		**5.000.000**	
7	**01**	**01**	**2.05**	0011	**Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan**	**Kec. Babirik**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**5 0rang**	**5.000.000**	5 orang	**5.000.000**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**112.861.800,00**		**112.861.800,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Babirik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	**12 paket**	**4.985.800**	12 paket	**4.985.800**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Babirik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia Selama Setahun	**1 paket**	**107.200.000**	1 paket	**107.200.000**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Babirik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Selama Setahun	**4 paket**	**10.974.800**	4 paket	**10.974.800**	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan bahan material	Kec babirik	Jumlah paket penyediaan bahan material	**1 paket**	**16.020.200**	1 paket	**16.020.200**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1 laporan**	**80.881.000**	1 laporan	**80.881.000**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**		**155.806.200,00**		**155.806.200,00**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Babirik	Jumlah surat masuk dan keluar dan tenaga administrasi	1500 surat dan 2 administra si	1.000.000	1500 surat dan 2 administra si	1.000.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Babirik	Persentase pemenuhan Listrik air dan komunikasi	1 2 Laporan	31.034.000	1 2 Laporan	31.034.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 Laporan	123.772.200	1 2 Laporan	123.772.200	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Babirik**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan**		**47.470.000,00**		**47.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Babirik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.920.000	10 Unit	40.920.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Babirik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit item	6.550.000	1 unit item	6.550.000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Babirik**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**		**11.635.000,00**		**11.635.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat**	Kec. Babirik	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat**		**11.635.000,00**		**11.635.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha	Kec. Babirik	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha	1 dokumen	2.675.000	1 dokumen	2.675.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Kec. Babirik	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	12 laporan	4.000.000	12 laporan	4.000.000	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Babirik	Jumlah Lapaoran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laaporan	4.960.000	12 laaporan	4.960.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Babirik**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan**		**21.000.000**		**21.000.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Babirik**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**6.000.000**		**6.000.000**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Peningkatan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					Kecamatan		Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec babirik	Jumlah dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Babirik**	**Persentase tingkat kesehatan masyarakat**		**15.000.000**		**15.000.000**	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat	Kec. Babirik	Jumlah laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat	30 laporan	15.000.000	30 laporan	15.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Babirik**	**Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan**		**15.000.000**		**15.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Babirik**	**Persentase Peningkatan kesejahtraan kepada Masyarakat**		**15.000.000**		**15.000.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**	0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan**	**Kec babirik**	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan	12 laporan	**11.000.000**	12 laporan	**11.000.000**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi hubungaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Babirik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Babirik**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah**		**39.000.000**		**39.000.000**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Babirik	**Persentase peningkatan dan koordinasi kepada masyarakat**		**39.000.000**		**39.000.000**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Babirik	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23 Desa	39.000.000	23 Desa	39.000.000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Babirik**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**		**9.500.000**		**9.500.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**Kec. Babirik**	**Persentase peningkatan Administrasi Pemerinatahan Desa**		**9.500.000**		**9.500.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					Desa							
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Babirik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Kec babirik	Jumlah dokumen Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	12 dokumen	4.000.000	12 dokumen	4.000.000	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Babirik Tahun 2025 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Babirik yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Babirik Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparatur dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Kantor Camat Babirik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Camat Babirik

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Babirik tahun anggaran 2025 ini disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara sebagai wujud pertangungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja SKPD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal-hal yang menjadi substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kiranya Rencana Kerja Kantor Camat Babirik Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Babirik dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Misi Bupati / Wakil Bupati Hulu Sungai Utara untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Bermarwah Maju dan Sejahtera, bangkit Bersama berbagai gasan banua.

Babirik, Januari 2026

Mengetahui
CAMAT BABIRIK,



ZAKIR, AM, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680403 200312 1 001

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Lampiran
Program dan Kegiatan awal SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
KECAMATAN BABIRIK

No	**Program /kegiatan / Sub Kegiatan**	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rincian Substansi kegiatan	Kebutuhan Dana Rp	Dukungan terhadap Program Prioritas SAJIWA	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan**	100%		**2.779.164.062,00**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**	100%		**4.800.000**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokumen		1.200.000		
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 dokumen		2.400.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan		1.200.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian**			**2.453.326.062,00**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1		2.452.326.062,00		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			Tahun				
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan		900.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**			**5.000.000**		
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**5 0rang**		**5.000.000**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**			**112.861.800,00**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	**12 paket**		**4.985.800**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia Selama Setahun	**1 paket**		**107.200.000**		
	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Selama Setahun	**4 paket**		**10.974.800**		
	Penyediaan bahan material	Jumlah paket penyediaan bahan material	**1 paket**		**16.020.200**		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1 laporan**		**80.881.000**		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)**	1500 surat dan 2 administra si		**155.806.200,00**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dan tenaga administrasi	1 2 Laporan		1.000.000		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Listrik air dan komunikasi	1 2 Laporan		31.034.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			123.772.200		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	10 Unit		**11.635.000,00**		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat**	1 unit item		**11.635.000,00**		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayana Perizinan Non Usaha			2.675.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan			4.000.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Lapaoran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4.960.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan**			**21.000.000**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**			**6.000.000**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.000.000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4.000.000		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase tingkat kesehatan masyarakat**			**15.000.000**		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat	Jumlah laporan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat			15.000.000		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan**			**15.000.000**		
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Persentase Peningkatan kesejahtraan kepada Masyarakat**			**15.000.000**		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan			**11.000.000**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Harmonisasi hubungaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4.000.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Pemerintah daerah**			39.000.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase peningkatan dan koordinasi kepada masyarakat**			39.000.000		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			39.000.000		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**			**9.500.000**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Administrasi Pemerinatahan Desa**			**9.500.000**		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			4.000.000		
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	12 laporan		4.000.000		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23 kegiatan		1.500.000		

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG

RENCANA KERJA (RENJA)
2025



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia kepada kita semua.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiaan Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Panggang ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kenerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Danau Panggang pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya.

Camat Danau Panggang,

MUHAMMAD ARYA YUWANA, S.Sos., M.IP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850420 201001 1 018

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL… ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 4
I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN DANAU PANGGANG TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Panggang..... 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....43

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DANAU PANGGANG
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 44
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kec. Danau Panggang 44

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan…… 46

BAB V : PENUTUP
Penutup……. 55

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daearh s/d tahun 2023.....	7
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara	21
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	32
Tabel T-C 28	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Panggang.....	45
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Danau Panggang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 …	48

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Danau Panggang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Danau Panggang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Danau Panggang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Danau Panggang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Danau Panggang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Danau Panggang. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Danau Panggang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Danau Panggang, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Danau Panggang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Danau Panggang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Danau Panggang sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Danau Panggang dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Danau Panggang (Renja Kecamatan Danau Panggang) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Danau Panggang yang mengacu pada dokumen Kecamatan Danau Panggang dan Renstra Kecamatan Danau Panggang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Panggang pada hakikatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Danau Panggang terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Danau Panggang agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Danau Panggang mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
15. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOMOR 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verefikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

I.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Tahun 2025 ini bermaksud untuk Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai :

a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Tabukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Renja Tahun 2025 Kecamatan Danau Panggang ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Danau Panggang.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DANAU PANGGANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Danau Panggang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Danau Panggang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Panggang
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Danau Panggang
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Danau Panggang
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DANAU PANGGANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Danau Panggang

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DANAU PANGGANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Danau Panggang

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Panggang tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Panggang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Danau Panggang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2018, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Panggang sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Danau Panggang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra SKPD s/d tahun 2024 tahun berjalan/ n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Danau Panggang								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN	400%		100%	81%	81%	100%		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**PEMERINTAHAN DAERAH**								
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**400%**		**100%**	**99,28%**	**99,28%**	**100%**		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	98,56%	-		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	5 Laporan		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan Daerah**	**400%**		**100%**	**80,08%**	**80,08%**	**100%**		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang		15 Orang	15 Orang	79,44%	11 Orang		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LAporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan		
7.01.01.2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**400%**		**100%**	**80,20%**	**80,20%**	**100%**		
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		1 Orang	1 Orang	80,20%	2 Orang		
7.01.01.2.06	**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Adminstrasi umum Perangkat Daerah**	**400%**		**100%**	**99,05%**	**99,05%**	**100%**		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	34 Paket		5 Paket	5 Paket	97,55%	15 Paket		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Banguan Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	46 Paket		12 Paket	12 Paket	99,54%	20 Paket		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	58 Paket		12 Paket	12 Paket	98,34%	12 Paket		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99,17%	40 Laporan		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**		**100%**	**93,78%**	**93,78%**	**100%**		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	-		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	93,33%	12 Laporan		
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89,59%	-		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.04	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**400%**		**100%**	**96,42%**	**96,42%**	**100%**		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		6 Unit	6 Unit	95,92%	3 Unit		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit		23 Unit	23 Unit	97,39%	-		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DIrehabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	-		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**PERSENTASE TERTIB ADMINSTRASI PELAYANAN**	**400%**		**100%**	**99,32%**	**99,32%**	**100%**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**MASYRAKAT**								
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pmerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**400%**		**100%**	**99,32%**	**99,32%**	**100%**		
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	70 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	99,57%	25 Dokumen		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	232 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	98,99%	15 Laporan		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PMEBRDAYAAN DESAN DAN KELURAHAN**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan**	**400%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pemberdayaan Desa	**Pemberdayaan Desa**								
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan		
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**400%**		**100%**	**-**	**-**	**100%**		
7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-		
7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN**	**400%**		**100%**	**99,00%**	**99,00%**	**100%**		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	PEMERINTAHAN DESA	**PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**400%**		**100%**	**99,00%**	**99,00%**	**100%**		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	390 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	99,26%	12 Dokumen		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98,64%	12 Dokumen		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Danau Panggang

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Danau Panggang dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Danau Panggang. Seluruh kegiatan Kecamatan Danau Panggang pada tahun 2023 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.806.263.820,- (Satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.619.330.539,- (Satu miliar enam ratus Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau sekitar 93,43 %.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Danau Panggang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
8). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
9). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
10). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.277.800,00 atau 7,23% dari target Pendapatan yang ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Danau Panggang sebesar Rp73.025.000,00.

Pendapatan Retribusi Daerah tersebut berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp115.000,00, Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.380.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp1.380.000,00, dan Pendapatan denda retribusi Jasa Usaha sebesar Rp87.800,00.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Danau Panggang dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi kas Dearah, hasil yang dicapai Kecamatan Danau Panggang telah mendekati target yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Danau Panggang pada tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Danau Panggang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota,meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun berdasarkan pengukuran Kinerja Per Program Kecamatan Danau Panggang diperoleh bahwa :

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah	100%	81%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	100%	99,32%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,00%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Danau Panggang tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Danau Panggang telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan, untuk kecamatan Danau Panggang telah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil kinerja yang mencapai hampir 90 % karena segala kebutuhan perkantoran baik itu berupa kegiatan administrasi maupun penyediaan dan pemeliharaan sarana dan parsarana telah dapat dipenuhi dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Danau Panggang telah memberikan pelayan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta pelaksanaan pembinaan dan penanganan Covid-19. Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap IKM dan UMKM yang bekerjasama dengan SKPD terkait. Untuk pembinaan dan penanganan covid -19 kecamatan juga telah melakukan kegiatan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diawali dengan melakukan rapat –rapat koordinasi dengan lintas sektor dan Kepala Desa yang dilanjutkan dengan pelaksanaan-pelaksanaan sosialisasi, pembagian masker, penyemprotan, monitoring ke desa-desa, fasilitasi pelaksanaan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

vaksinasi dan ikut serta menggerakkan masyarakat untuk ikut bervaksin.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Danau Panggang pada tabel TC.30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN DANAU PANGGANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Danau Panggang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra PKPD				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2023(tahun n-1)	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**Nilai Sakip Kecamatan**			80	70	70	70	-	-	70	70	
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kantor kecamatan**			79%	-	-	-	90%	-	-	-	
3	**Persentasi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**			80%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	**Persentasi Penurunan Konfilk sosial dan keagamaan di Kecamatan**			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Danau Panggang dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan Sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 menambah aset tetap bagi Kecamatan Danau Panggang yang digunakan untuk kegiatan roda Pemerintahan. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Danau Panggang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Danau Panggang

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

a. Perizinan, yaitu :

- Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
- Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
- Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
- Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
- Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :

- Urusan pemerintahan umum
- Urusan sosial
- Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sispil
- Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

a. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
c. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
d. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;
e. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
f. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;
b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;
m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Danau Panggang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Danau Panggang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran
3. Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana
4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
5. Mutasi Pegawai
6. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat;

Selanjutnya tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Danau Panggang adalah sebagai berikut :

a. Ancaman/tantangan.
   1) Globalisasi
   2) Kurangnya koordinasi antar lembaga
   3) Terjadinya bencana alam
   4) Mutasi pegawai
b. Peluang.
   1) Fungsi dan kedudukan Pemerintahan Desa
   2) Otonomi Daerah
   3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
   4) Kebijakan pusat dan daerah
   5) Terciptanya forum koordinasi

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal berikut :

1. Bidang Pelayanan :
   a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya administrasi kependudukan terutama dalam hal pembuatan akte kematian

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2. Bidang Perizinan :
   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini disebabkan karena tidak adanya sangsi dari pemerintah bagi yang tidak membuat, disamping itu juga tidak adanya kerja sama antar instansi vertical dalam penerapan disiplin peraturan tersebut
3. Bidang Pemerintahan :
   a. Jumlah Desa cukup banyak
   b. Sumberdaya Aparatur Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
   c. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
   d. Masih kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Pemerintahan Desa belum bisa direalisasikan secara optimal
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
   a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Danau Panggang bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Danau Panggang dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Danau Panggang dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
    1. Pelayanan Administrasi
    2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
    3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial
b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
    1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
    2. Meningkatnya pelayanan publik
    3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa
c. Prioritas dan sasaran Bidang Sosial Keagamaan
    1. Penanggulangan kemiskinan

       Dengan Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Danau Panggang Tahun 2025 sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T.C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikaator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Danau Panggang	PERSENTASE PELAYANAN SEKRETARIAT YANG TERPENUHI DAN TERPENUHINYA SUMBERDAYA PENUNJANG PELAYANAN KECAMATAN	100%	2.483.578.823	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Danau Panggang	PERSENTASE PELAYANAN SEKRETARIAT YANG TERPENUHI DAN TERPENUHINYA SUMBERDAYA PENUNJANG PELAYANAN KECAMATAN	100%	2.483.578.823	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Danau Panggang	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.050.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Danau Panggang	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.050.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Danau Panggang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Danau Panggang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	1.800.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.229.383.423**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.229.383.423**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Danau Panggang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.228.033.423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Danau Panggang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.228.033.423	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.350.000	
C	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**14.536.000**	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**14.536.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	14.536.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	14.536.000	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase tercapaianya admintrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**63.199.600**	**Admintrasi Umum Prengkat Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase tercapaianya admintrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**63.199.600**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.341.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.341.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.700.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.700.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13.184.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Paket	13.184.100	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	10.390.600	Penyediaan Bahan/Material	Kec.Danau Panggang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	10.390.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	28.583.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	28.583.000	
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Kec.Danau Panggang**	**Persentase tersedianya jasa penunjang**	**100%**	**127.739.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kec.Danau Panggang**	**Persentase tersedianya jasa penunjang**	**100%**	**127.739.800**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pemerintahan Daerah		**urusan pemerintah daerah**			**Urusan Pemerintahan Daerah**		**urusan pemerintah daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.351.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.351.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.388.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.388.800	
G	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentasi terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**44.670.000**	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentasi terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**44.670.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kec. Danau Panggang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 Unit	38.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kec. Danau Panggang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 Unit	38.920.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Peliharaan, an Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Danau Panggang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Danau Panggang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.750.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**20.250.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**100%**	**20.250.000**	
A	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**6.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**6.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	6 Dokumen	6.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	6 Dokumen	6.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
B	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**3.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100%**	**3.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	3.000.000	
C	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan**	**100%**	**11.250.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan**	**100%**	**11.250.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Dilimpahkan kepada Camat		**Yang Dilimpahkan kepada Camat**			**Dilimpahkan kepada Camat**		**Yang Dilimpahkan kepada Camat**			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3.750.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	3.750.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4.500.000	
	Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Danau Panggang	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.000.000	Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Danau Panggang	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**100%**	**4.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**100%**	**4.000.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**DAN KELURAHAN**			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**DAN KELURAHAN**			
A	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	**4.000.000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	**4.000.000**	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Danau Panggang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	4.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Danau Panggang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	4.000.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE KESELARASAN ANTARA APBDES DENGAN RKDES**	**100%**	**12.400.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE KESELARASAN ANTARA APBDES DENGAN RKDES**	**100%**	**12.400.000**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	N ESA					**PEMERINTAH AN DESA**					
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.400.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**12.400.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 Dokumen	4.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Dokumen	6.000.000	
	Fasiitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	51 Dokumen	2.400.000	Fasiitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	51 Dokumen	2.400.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			dan Peraturan Kepala Desa			Kepala Desa		dan Peraturan Kepala Desa			
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Danau Panggang**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**25.000.000**	
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Danau Panggang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**25.000.000**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Danau Panggang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	25.000.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis :

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait dengan pendanaan di Kecamatan Danau Panggang untuk kegiatan tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 2.545.228.823,00.**
2. Perencanaan tahun 2025 merupakan perencanaan kinerja untuk mendukung kinerja Bupati Periode 2025-2030.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Danau Panggang Tahun 2025 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Danau Panggang, Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan hasilnya telah disampaikan ke SKPD teknis dan telah diinput dalam aplikasi SIPPD Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DANAU PANGGANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Danau Panggang disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efesien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Danau Panggang

Dengan menitikberatkan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuain tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Sungai Tabukan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Danau Panggang mempunyai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Danau Panggang.
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Danau Panggang
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Adapun Target Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Danau Panggang terlihat pada tabel berikut :

TABEL T-C. 28
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN DANAU PANGGANG

No.	TUJUAN	INDOKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPD (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Danau Panggang	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Danau Panggang	Persentase Desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial,agama di Masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	100%	Meningkatnya Fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penurunan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah direncanakan 5 program dan 12 Kegiatan pada Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
    1) Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
    1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
    3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
    1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
    1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan beserta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Danau Panggang pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 33 :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN SEKRETARIAT YANG TERPENUHI DAN TERPENUHINYA SUMBERDAYA PENUNJANG PELAYANAN KECAMATAN**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**2.483.578.823**	**APBD**		**100%**	**2.611.680.223**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**4.050.000**	**APBD**		**100%**	**13.500.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Danau Panggang	6 Dokumen	1.500.000	APBD	PROGRAM GEMA	2 Dokumen	4.500.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Danau Panggang	2 Dokumen	750.000	APBD	PROGRAM GEMA	6 Dokumen	4.500.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec.Danau Panggang	5 laporan	1.800.000	APBD	PROGRAM GEMA	12 laporan	4.500.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**2.229.383.423**	**APBD**		**100%**	**2.235.978.863**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Danau Panggang	22 Orang	2.228.033.423	APBD	PROGRAM GEMA	22 Orang	2.231.478.863
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Danau Panggang	1 Laporan	1.350.000	APBD	PROGRAM GEMA	1 Laporan	4.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Danau Panggang	-	-	APBD	PROGRAM GEMA		
7.01.01.2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**14.536.000**	**APBD**		**100%**	**35.000.000**
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Danau Panggang	2 orang	14.536.000	APBD	PROGRAM GEMA	7 orang	35.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tercapaianya admintrasi umum perangkat daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**63.199.600**	**APBD**		**100%**	**164.315.000**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kec.Danau Panggang	15 Paket	1.341.900	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur	4 Paket	5.996.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Disediakan					& Pelayanan Publik		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	20 Paket	9.700.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	1 Paket	30.220.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	-	-	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	1 Paket	1.815.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	10 Paket	13.184.100	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	4 Paket	13.225.000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	30 Paket	10.390.600	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	4 Paket	15.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Danau Panggang	-	-	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Laporan	20.250.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Danau Panggang	36 Laporan	28.583.000	APBD	PROGRAM GEMA	12 Laporan	77.809.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**127.739.800**	**APBD**		**100%**	**117.416.360**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Danau Panggang	12 Laporan	1.000.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	1 Laporan	2.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	12 Laporan	18.351.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Laporan	19.286.760
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Danau Panggang	12 Laporan	108.388.800	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Laporan	96.129.600
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasi terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**44.670.000**	**APBD**		**100%**	**45.470.000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Danau Panggang	4 Unit	38.920.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	4 Unit	39.720.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Danau Panggang	5 Unit	5.750.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	15 Unit	5.750.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**20.250.000**	**APBD**		**100%**	**53.650.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**6.000.000**	**APBD**		**100%**	**15.000.000**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Danau Panggang	6 Dokumen	6.000.000	APBD	PROGRAM GEMA	12 Dokumen	15.000.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**3.000.000**	**APBD**		**100%**	**7.500.000**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Danau Panggang	20 Laporan	3.000.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Laporan	7.500.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**11.250.000**	**APBD**		**100%**	**31.150.000**
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec.Danau Panggang	20 Dokumen	3.750.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Dokumen	13.700.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Danau Panggang	12 Laporan	4.500.000	APBD	MISI BUPATI : Meningkatnya Kualitas Aparatur & Pelayanan Publik	12 Laporan	13.700.000
7.01.02.2.04.0003	Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Kec.Danau Panggang	12 Laporan	3.000.000	APBD	PROGRAM HATI (HSU Peduli Tanpa Narkoba)	12 Laporan	3.750.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**4.000.000**	**APBD**		**100%**	**20.950.000**
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**4.000.000**	**APBD**		**100%**	**20.950.000**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec.Danau Panggang	100 Keluarga	4.000.000	APBD	PROGRAM CERIA	120 Keluarga	20.950.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEAMANAN**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**-**	**APBD**		**100%**	**25.400.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**-**	**APBD**		**100%**	**25.400.000**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Danau Panggang	-	-	APBD	1. PROGRAM HATI	4 Laporan	25.400.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KESELARASAN ANTARA APBDES DENGAN RKDES**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**12.400.000**	**APBD**		**100%**	**117.900.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**10.000.000**	**APBD**		**100%**	**110.400.000**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Danau Panggang	330 Dokumen	4.000.000	APBD	PROGRAM KAYUH JUKUNG	32 Dokumen	96.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Danau Panggang	17 Dokumen	6.000.000	APBD	PROGRAM KAYUH JUKUNG	4 Dokumen	14.400.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**2.400.000**	**APBD**		**100%**	**7.500.000**
7.01.06.2.01.0001	Fasiitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Danau Panggang	51 Dokumen	2.400.000	APBD	Forum Warga	64 Dokumen	7.500.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**25.000.000**	**APBD**		**100%**	**101.303.200**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Danau Panggang**	**100%**	**25.000.000**	**APBD**		**100%**	**101.303.200**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Danau Panggang	-	-	APBD	tag : Kepemudaan PROGRAM PERAK	20 Orang	73.103.200
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Danau Panggang	5 Dokumen	25.000.000	APBD	PROGRAM HATI	12 Dokumen	28.200.000
					2.545.228.823				**2.930.883.423**

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB V
PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Danau Panggang dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Danau Panggang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepntingan) di Kecamatan Danau Panggang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Danau Panggang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaiaan target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Panggang tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Danau Panggang.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Danau Panggang sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Danau Panggang. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Danau Panggang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Danau Panggang, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertangungjawabkan.
2. Pengkomonikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaiaan tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mecapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Danau Panggang, Juli 2024

Camat Danau Panggang,

MUHAMMAD ARYA YUWANA, S.Sos., M.IP

NIP. 19850420 201001 1 018

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
KECAMATAN PAMINGGIR
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN PAMINGGIR

2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
KECAMATAN PAMINGGIR
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN PAMINGGIR
2024

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

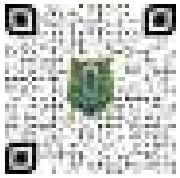
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sebelumnya berupa Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA-SKPD) Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang dalam rumusan rencana program dan kegiatannya berdasarkan pagu indikatif Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 yang akan datang dalam rangka mewujudkan akutabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini kami tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama Tim Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja dan Tim Asistensi Rencana Kerja Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memberikan veriikasi, persetujuan atas penambahan pagu indikatif yang menjadi dokumen RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang ditetapkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Kerja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005.

Dengan segala kerendahan hati kami sampaikan pula, bahwa RENJA SKPD ini tentunya jauh dari sempurna sebagaimana harapan semua pihak. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan pembuatan RENJA SKPD untuk masa yang akan datang.

Paminggir, Desember 2024

CAMAT PAMINGGIR,



RULLY LESMANA, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19841226 200312 1 003

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (Lemberan Daemh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lemberan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 52 Tahun 2022, Tambahan Berita Daerah Nomor 21);

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah, dengan daftar Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

KELIMA : Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah Wajib :

a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;
b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Juli 2024

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ARSWAN

Tembusan :
1. Inspektur Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Perangkat Daerah lainnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL… i
KATA PENGANTAR ii
SURAT KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 100.3.3.2/ 318/KUM/2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 iii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN PAMINGGIR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelasanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD .. 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir 17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5. Penalaahan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat. 36

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN PAMINGGIR
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD 39

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN PAMINGGIR
4.1 Program dan Kegiatan..... 41

BAB V : PENUTUP
Penutup..... 49

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daearh s/d tahun 2023.....	8
Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Tahun 2023	15
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Paminggir Tahun 2023	18
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara	22
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara	31
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan Paminggir.....	40
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara SKPD Kecamatan Paminggir	44

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dalam hal ini setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA), yang dalam hal ini RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen berdasarkan Perencanaan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 sebagai pengganti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan belum adanya Kepala Daerah definitif yang saat ini memasuki tahun ketiga dalam implementasinya sehingga RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Proses penyusunan RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan sebelumnya berupa Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) yang disempurnakan menjadi dokumen RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang definitif. Tahap penyusunan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan dan penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu penyusunan RENJA SKPD

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan di tingkat SKPD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RENJA SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipasif dan demokratis. RENJA SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD maupun APBN.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini juga merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke-3 dari RENSTRA yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinegritas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan. Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai :

a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
c. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA bagi SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berisi evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, analisis kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, review terhadap rancangan awal RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Berisi program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN PAMINGGIR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir

Mengacu pada Rencana Strategis SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2) Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
3) Pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
4) Pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5) Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dimaksud maka SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun Anggaran 2023 diberikan wewenang untuk melaksanakan **4 Program** dengan **8 Kegiatan**, yaitu :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota.
   Kegiatan :
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan.
   4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
   Kegiatan :
   1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
   :
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
   Kegiatan :
   1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
   2. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Kecamatan Pamingir

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegitan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capian Target Rentra SKPD s/d tahun 2024 tahun berjalan/ n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Pamingir								
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.1.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**79,89%**	**80%**	**100%**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**97,26%**	**97,26%**	**100%**		
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	**0%**	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi keuangan Daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**78,68%**	**79%**	**100%**		
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	40 orng/bln	0%	10 orang	10 orang	78,55%	10 orang		
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yg dibuat	16 laporan	0%	4 laporan	4 laporan	98,57%	4 laporan		
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	48 laporan	0%	12 laporan	12 laporan	92,13%	12 Laporan		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**93,33%**	**93,33%**	**100%**		
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	12 org	0%	1 orang	1 orang	93,33%	1 orang		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja**	**400%**	**0%**	**100%**	**87,32%**	**87%**	**100%**		
7.01.01.2.06.01	Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	40 paket	0%	100%	10 paket	94,04%	10 paket		
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	16 paket	0%	4 paket	3 paket	82,50%	3 Paket		
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	80 paket	0%	20 paket	20 paket	97,31%	20 paket		
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	160 laporan	0%	34 laporan	8 laporan	86,76%	30 laporan		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**86,99%**	**87%**	**100%**		
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa kebutuhan jaringan telepon,listrik,air dan internet	48 laporan	0%	12 laporan	12 laporan	73%	12 laporan		
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 laporan	0%	12 laporan	12 laporan	93%	12 laporan		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**400%**	**0%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**		
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yng dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	0%	3 unit	3 unit	99%	3 unit		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.02	**Program Penyelengraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase tertibnya administrasi pelayanan masyarakat**	**400%**	**0%**	**100%**	**96,58%**	**97%**	**100%**		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**persentasi tertib administrtasi pelayanan masyarakat**	**400%**	**0%**	**100%**	**96,58%**	**97%**	**100%**		
7.01.02.2.04.01	Sub Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100 laporan	**0%**	25 laporan	25 laporan	**96%**	25 laporan		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	60 laporan	**0%**	15 laporan	15 laporan	**97%**	15 laporan		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	40 laporan	**0%**	10 laporan	10 laporan	**97%**	10 laporan		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan**	**400%**	**0%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**persentasi terlaksannya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**400%**	**0%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100%**		
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	48 laporan	0%	12 laporan	12 laporan	98%	12 laporan		
7.01.03.2.05	**Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
7.01.03.2.05.01	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
7.01.03.2.05.02	Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**400%**	**0%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**persentasi tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**400%**	**0%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100%**		
7.01.06.2.01.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 dokumen	0%	12 dokumen	12 dokumen	99%	12 dokumen		
7.01.06.2.01.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	48 dokumen	0%	12 dokumen	12 dokumen	97%	12 dokumen		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program/kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;
   - **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
     Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk capaian realisasi kinerja, hal ini di sebabkan karena COVID-19 yang sejak tahun 2018 berstatus Pandemi akan tetapi pada tahun 2023 menjadi Endemi.
2) Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;
   Seluruh Program dan Kegiatan selain yang diuraikan di atas, dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan persentase dari 72 % hingga 100%.

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**1.291.220.100**	**1.031.569.103**	**79,89%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**19.589.200**	**19.052.000**	**97,26%**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	19.589.200	19.052.000	97,26%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.150.516.000**	**905.164.903**	**78,67%**
	Sub Kegiatan Penyediayaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.142.110.000	897.164.903	78.55%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4.900.000	4.830.000	98.57%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.506.000	3.230.000	92,13%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**900.000**	**840.000**	**93,33%**
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900.000	840.000	93,33%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**20.379.500**	**17.727.500**	**86,99%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.697.600	3.510.500	94,94%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.182.800	4.275.600	82,50%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.800.000	3.697.600	97,31%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.220.000	64.395.000	86,76%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**20.379.500**	**17.727.500**	**86,99%**
		Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.180.000	4.494.500	72,73%
		Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.199.500	13.233.000	93,19%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12.935.000**	**12.846.000**	**99,31%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.935.000	12.846.000	99,31%
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**83.527.500**	**80.671.000**	**96,58%**
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**83.527.500**	**80.671.000**	**96,58%**
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	47.050.000	45.200.000	96,07%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	17.250.000	16.810.000	97,45%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	19.227.500	18.661.000	97,05%
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**7.500.000**	**7.360.000**	**98,13%**
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**7.500.000**	**7.360.000**	**98,13%**
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.500.000	7.360.000	98,13%
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	0%
		Sub Kegiatan Pencegahan Covid - 19 ditingkat desa dan kelurahan	-	-	0%
		Sub Kegiatan Pengananan Covid – 19 ditingkat Desa dan Kelurahan	-	-	0%

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**18.650.000**	**18.260.000**	**97,91%**
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**18.650.000**	**18.260.000**	**97,91%**
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	12.100.000	11.920.000	98,51%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	6.550.000	6.340.000	96,79%
Total				**1.400.897.600**	**1.137.860.103**	**81,22%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dan seluruh kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp. **1.400.897.600**,- (satu milyar empat ratus juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **1.137.860.103**,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu seratus tiga rupiah) atau sekitar **81,22**%.

Kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur,
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan,
6. Terselenggaranya Kegiatan PKK,
7. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan,
8. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Kinerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
8). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
9). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.15.100.000,- terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun target dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan
SKPD Kecamatan Paminggir Tahun 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	KET.
1	Retribusi Pelayanan Pasar	12.000.000,-	0,-	0%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	0%
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.100.000,-	0,-	0%
J U M L A H		**15.100.000,-**	**0,-**	**0%**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Berdasarkan data sebagaimana disajikan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 0,- yang berarti pada tahun 2023 SKPD Kecamatan Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat melaksanakan dan tidak dapat memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini dikarenakan :

1. Target Retribusi Pasar Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp.12.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai akhir tahun 2023 belum dapat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Retribusi Daerah, sehingga petugas pemungut retribusi SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat memungut retribusi terhadap pedagang yang ada di Pasar Paminggir.
2. Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 3.100.000,- juga tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan kebijakan regulasi dan numenklatur dari IMB menjadi Persetujuan Gedung Bangunan (PGB), dan kewenangan kepengurusan IMB/ PGB diambil alih oleh Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terdapat realisasi retribusi IMB selama Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realistis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang direncanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

melalui 4 (empat) Program dengan 8 (delapan) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditargetkan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan. Pelaksanaan Tahun 2023 berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Anggaran yang dibebankan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.142.110.000,- untuk gaji dan tunjangan PNS. Dari anggaran yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 897.164.903,- atau sebesar 78,55%.

Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 256.287.600,- yang mana sampai dengan bulan Desember 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 238.295.200,- atau sebesar 92,98%

Berikut data pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tabel T-C.30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Kecamatan Paminggir

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra				Realisasi Capain		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Nilai Sakip Kecamatan**			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kantor kecamatan**			80%	85%	90%	90%	85%	90%	-	-	
3	**Persentasi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**			100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Apabila kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA), maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau sebesar 96,00%. Maka belanja modal yang dilaksanakan pada tahun 2023 tentunya akan menambah aset tetap bagi SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digunakan dalam kegiatan roda Pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana DPA Tahun Anggaran 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Paminggir

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan *urusan pemerintahan umum* berupa dukungan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan *urusan sosial,* meliputi :

a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan *urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,* meliputi:

a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK).

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan *urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***,** meliputi :

a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;
b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/ pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
d. penerbitan surat keterangan pindah/datang Warga Negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;
f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan *urusan pemberdayaan masyarakat dan desa*, meliputi :

a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
c. pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
d. pengusulan pengangkatan Pejabat Kepala Desa di desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

e. pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
g. melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
h. menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
i. membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
j. memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
k. melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. menyampaikan keputusan Camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada Bupati;
m. pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
n. penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
o. fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

p. fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
q. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
r. fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
s. fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
t. rekomendasi cuti dan izin berpergian Sekretaris Desa dalam meninggalkan tugasnya;
u. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa melalui bank yang telah ditetapkan;
w. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
x. pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1) Luasnya tugas dan kewenangan Camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2) Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3) Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran,
3. Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana,
4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi,
5. Mutasi Pegawai, dan
6. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat;

Selanjutnya tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan di SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

a. Ancaman/tantangan.
    1) Globalisasi,
    2) Kurangnya koordinasi antar lembaga,
    3) Terjadinya bencana alam,
    4) Mutasi pegawai.
b. Peluang.
    1) Fungsi dan kedudukan Pemerintahan Desa,
    2) Otonomi Daerah,
    3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
    4) Kebijakan pusat dan daerah,
    5) Terciptanya forum koordinasi.

Adapun isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara di lapangan berupa hal berikut:

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1. Bidang Pelayanan:
    a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya untuk lebih awal membuat KTP/Kartu Keluarga/Akte Kelahiran/ Akte Kematian.
2. Bidang Pemerintahan:
    a. Sumberdaya Aparatur Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
    b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan desa belum tepat waktu.
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
    a. Untuk bantuan sosial seperti non tunai pangan dan bantuan sosial lainnya masih terdapat kendala yaitu data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan tersebut .

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025 khususnya pada tahapan keempat yakni tahapan tahun 2023-2026.

Adapaun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan, adalah:

a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
    1. Pelayanan Administrasi,
    2. Fasilitasi Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial.
b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
    1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi,
    2. Meningkatnya pelayanan publik,
    3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
c. Prioritas dan sasaran Bidang Sosial Keagamaan
    1. Penanggulangan kemiskinan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Sebagai hasil review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas, maka setelah dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, maka untuk SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang sebagaimana tabel T-C.31 sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama: Kecamatan Paminggir

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Paminggir		100%	2.128.264.088	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Paminggir	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.312.372.534	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.275.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.345.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.907.787.138	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Terlaksananya Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.304.116.734	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terleksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Terleksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	63.036.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	67.545.230	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75.991.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89.178.200	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	34.174.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Paminggir	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	61.410.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Paminggir	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	0%	27.170.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Paminggir	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100%	36.792.000	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0%	27.170.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Paminggir	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	36.792.000	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Paminggir	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	24.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatn Paminggir	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	24.000.000	tag: Stunting
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Pesentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	24.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Paminggir	Pesentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	24.829.000	tag: Stunting
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Paminggir	Persentase dokumen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusn tepat waktu	100%	50.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Paminggir	Persentase dokumen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusn tepat waktu	100%	46.304.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Paminggir	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	46.304.000	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Paminggir	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	23.250.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatn Paminggir	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18.650.000	tag: Responsif Gender

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	23.250.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Paminggir	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	18.650.000	tag: Responsif Gender
		JUMLAH				2.231.584.088					2.677.425.964	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Analisis Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan Hasil analisis yang dilakukan terkait dengan kebutuhan pendanaan di SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp **3.145.905.068**,- atau lebih besar Rp **914.320.980**,- dibandingkan dengan Pagu Indikatif yang diberikan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 sebesar Rp **2.231.584.088**,-.

Terjadinya kenaikan kebutuhan pendanaan tersebut untuk kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, dimana dengan adanya kebijakan Pemerintah melakukan pengangkatan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap (PTT) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya penambahan ASN dengan terpenuhinya sebagian besar pejabat struktural di SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak akhir tahun 2023 yang semula hanya 6 orang PNS yaitu terdiri 2 orang pejabat struktural dan 4 orang pegawai fungsional umum telah menjadi 10 PNS atau dengan adanya penambahan 4 orang pejabat struktural dan masih ada 1 jabatan struktural yang belum terisi. Serta apabila PTT saat ini sebanyak 4 orang akan dimenjadikan PPPK pada tahun 2025, maka jumlah PPPK menjadi 6 orang yang pada tahun 2024 ini sebanyak 2 orang atau adanya penambahan sebanyak 4 orang, dengan demikian penambahan anggaran sebesar kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diperkirakan sebesar Rp. **914.320.980**,-.

Selain itu kebutuhan pendanaan untuk kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** perlu penambahan juga yang berguna untuk pemeliharaan kendaraan mobil dinas dan angkutan air (speed) dinas kecamatan.

Adapun kegiatan dimaksud berdasarkan analisis kebutuhan sebagai berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

No	Keg/ Sub Keg	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Kebutuhan Pendanaan	Rencana Aksi Tahun 2025
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**100%**	**Rp. 1.899.596.720**	**Rp 3.145.905.068**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	Rp. 1.899.596.720	Rp 3.145.905.068	Pengangkatan Honorer/PTT menjadi PPPK dan penambahan ASN
2.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**Rp.34.174.000**	**Rp 57.960.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp.34.174.000	Rp 57.960.000	Pemeliharaan Mobdis Camat dan Speed Dinas Kecamatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan (gabungan Kecamatan, Danau Panggang, Babirik dan Paminggir) bertempat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 21 Maret 2024. Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Adapun usulan-usulan pembangunan tahun 2025 untuk wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat di masing-masing desa sebanyak 2 (dua) usulan hasil Musrenbang Desa yang kesemua usulan sudah disepakati melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Dengan demikian dari 7

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

(tujuh) desa yang ada di wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka usulan aspirasi tersebut berjumlah sebanyak 14 (empat belas) yang kesemuanya usulan berupa bidang infrastruktur.

Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan, dan hasilnya telah disampaikan oleh pihak Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melakukan input usulan aspirasi dalam aplikasi SIPD RI untuk dilakukan validasi oleh pihak Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara memastikan kelayakan usulan tersebut dan akan diteruskan kepada SKPD tekhnis untuk dijadikan bahan rencana kerja tahun 2025 baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAMINGGIR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

1. Penataan Ruang.

   Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

   a. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
   b. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang.

2. Perencanaan Pembangunan.

   Kebijakan umum perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan secara realtime report.
   b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang.
   c. Menyusun pedoman teknis yang mengatur keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

d. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi/UPT.
e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Paminggir

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi, maka SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut:

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatnya perberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Paminggir.
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat.

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja SKPD Kecamatan Paminggir.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatnya fasilitasi pelayanan Sosial dan Keagamaan.

Adapun Target Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel : T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan Paminggir

NO.	Tujuan	Indikator	Target Tujuan Kondisi Akhir RPD (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kepuasaan Masyarakat	BB	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Peningkatan partisipasi mayarakat dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Persentase Penurunan Angka kriminalitas di Masyarakat	100%	Meningkatnya fasilitasi pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentase Peningkatan pelayanan Sosial dan Keagamaan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SKPD KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah direncanakan 5 program dan 10 kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan pada SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pagu anggaran Rp. **3.145.905.068**,- (tiga milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima ribu enam puluh delapan rupiah), yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
      - Penyediaan Bahan/Material.
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
   1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
      - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
   1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Adapun masalah yang mendapatkan pendanaan prioritas pada rencana kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 ini ada 2 (dua) masalah. *Pertama* permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini dan persentasi terjadinya masalah hal ini di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat tinggi yaitu Stunting. Mengingat pentingnya permasalahan ini dan turut serta dalam penanggulangannya, maka dalam hal ini telah dimasukan pendanaannya pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sedangkan permasalahan *Kedua* yaitu terkait pengarusutamaan gender, dimana hal ini merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan yang dalam hal tersebut pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Untuk lebih jelasnya terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Paminggir

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp. 3.032.023.868**	**APBD**		**100%**	**Rp 3.089.550.564**
01.021	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp 5.345.000**	**APBD**		**100%**	**Rp 5.345.000**
01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Paminggir	5 Laporan	Rp 5.345.000	APBD		5 Laporan	Rp 5.345.000
01.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertatanya Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp. 2.812.995.438**	**APBN & APBD**		**100%**	**Rp 2.812.378.334**
01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Paminggir	17 orang/ bulan	Rp. 2.804.739.638	APBN		17 orang/ bulan	Rp 2.804.122.534
01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Paminggir	5 Laporan	Rp 3.845.000	APBD		5 Laporan	Rp 3.845.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

01.202.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Kecamatan Paminggir	4 Laporan	Rp	4.410.800	APBD		4 Laporan	Rp. 4. 410.800
01.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**350.000**	**APBD**		**100%**	**Rp. 20.000.000**
01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Paminggir	1 orang	Rp	350.000	APBD		1 orang	Rp. 20.000.000
01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**71.545.230**	**APBD**		**100%**	**Rp 122.307.130**
01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	Kecamatan Paminggir	10 Paket	Rp	1.673.400	APBD		10 Paket	Rp. 2.001.300
01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	4 Paket	Rp	8.493.600	APBD		4 Paket	Rp. 8.898.600
01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	10 Paket	Rp	10.719.230	APBD		10 Paket	Rp. 10.719.230
01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	15 Paket	Rp	14.750.000	APBD		10 Paket	Rp. 14.750.000
01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Paminggir	30 Laporan	Rp	35.909.000	APBD		85 Laporan	Rp. 85.938.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

01.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Paminggir**	**100 %**	**Rp**	**77.178.200**	**APBD**		**100 %**	**Rp. 61.310.100**
01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	50 laporan	Rp	8.200.000	APBD		50 laporan	Rp. 15.700.000
01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	36 laporan	Rp	8.719.000	APBD		36 laporan	Rp. 9.480.500
01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Paminggir	10 laporan	Rp	60.259.200	APBD		4 laporan	Rp 36.129.600
01.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**64.610.000**	**APBD**		**100%**	**Rp. 68.210.000**
01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Paminggir	2 unit	Rp	61 160.000	APBD		7 unit	Rp. 61.960.000
01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Paminggir	15 unit	Rp	3.450.000	APBD		16 unit	Rp. 6.250.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**36.792.000**	**APBD**		**100%**	**Rp 6.792.000**
7.01.02.204	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**19.000.000**	**APBD**		**100%**	**Rp 36.792.000**
7.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Paminggir	25 Dokumen	Rp	5.900.000	APBD		25 Dokumen	Rp 5.900.000
7.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Terkait dengan dengan Nonperizinan	Kecamatan Paminggir	15 Dokumen	Rp	5.900.000	APBD		15 Dokumen	Rp 5.900.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.02.204.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Paminggir	10 laporan	Rp 7.200.000	APBD		10 laporan	Rp. 24.992.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Paminggir**	**100**	**Rp 24.829.000**	**APBD**	**tag: Stunting**	**100%**	**Rp 24.829.000**
7.01.03.201	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp** 24.829.000	**APBD**	**tag: Stunting**	**100%**	**Rp 24.829.000**
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Paminggir	1 Laporam	Rp 24.829.000	APBD	tag: Stunting	1 Laporam	Rp. 24.829.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISUSN TEPAT WAKTU**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp 51.402.200**	**APBD**		**100%**	**Rp. 65.722.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	Rp 51.402.200	**APBD**		**100%**	**Rp. 65.722.000**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Paminggir	500 orang	Rp 26.402.200	APBD		500 orang	Rp. 34.234.000

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Paminggir	1 Dokumen	Rp	25.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp. 31.488.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**18.650.000**	**APBD**	**tag: Responsif Gender**	**100%**	**Rp. 20.400.000**
7.01.06.201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Paminggir**	**100%**	**Rp**	**18.650.000**	**APBD**	**tag: Responsif Gender**	**100%**	**Rp. 20.400.000**
7.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Paminggir	7 Dokumen	Rp	5.900.000	APBD		7 Dokumen	Rp. 5.900.000
7.01.06.201.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Paminggir	12 Dokumen	Rp	12.750.000	APBD	tag: Responsif Gender	12 Dokumen	Rp. 14.500.000
JUMLAH					**Rp**	**2.677.425.964**				**Rp 3.237.293.564**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

BAB V

PENUTUP

Semua program-program kerja dan kegiatan yang direncanakan merupakan suatu upaya SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara, oleh karenanya RENJA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahunan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan proses penyusunannya mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaiaan target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RENSTRA SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara telah

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tetap mengedepankan prinsip Pemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (clean governace) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) dilaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertangungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaiaan tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

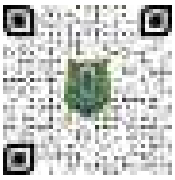
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Dengan mengharap Ridha dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu untuk membangun daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Paminggir, Desember 2024

CAMAT PAMINGGIR,



RULLY LESMANA, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19841226 200312 1 003